



# BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan pembangunan dan keuangan daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi;
- : b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang tentang sistem Kebijakan Akuntansi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
6. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

7. SAP Berbasis Akruial adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
8. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
9. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Kebijakan Akuntansi adalah Prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
12. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
15. Basis Akruial adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
18. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

19. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
20. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
21. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
22. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
23. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
24. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
25. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
26. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
28. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
31. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
32. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.



33. Unit pemerintahan adalah pengguna anggaran/penggunaan barang yang berada di SKPD.
34. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
35. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
36. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
38. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
39. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
40. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
41. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
42. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
43. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
44. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
45. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
46. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kerangka konseptual;
- b. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
- c. kebijakan akuntansi akun

## BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

### Pasal 4

- (1) kerangka konseptual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam standar akuntansi pemerintahan maupun dalam kebijakan akuntansi terkait akun laporan keuangan;
- (2) kerangka konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang:
  - a. tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. lingkungan akuntansi pemerintah daerah;
  - d. pengguna dan kebutuhan informasi;
  - e. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;
  - f. karakteristik kualitatif laporan keuangan;
  - g. komponen laporan keuangan;
  - h. unsur laporan keuangan;
  - i. pengakuan unsur laporan keuangan;
  - j. pengukuran unsur laporan keuangan;
  - k. asumsi dasar;
  - l. prinsip akuntansi dan pelaporan;
  - m. kendala informasi akuntansi yang relevan dan andal;
  - n. dasar hukum pelaporan keuangan;
- (3) Rincian kerangka konseptual tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

### Pasal 5

- (1) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan.
- (2) Komponen laporan keuangan terdiri dari:

- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Rincian kebijakan akuntansi pelaporan keuangan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

#### Pasal 6

- (1) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP terhadap :
  - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
  - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.
- (2) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
  1. aset;
  2. kewajiban;
  3. ekuitas;
  4. pendapatan – LRA;
  5. belanja;
  6. transfer;
  7. pembiayaan;
  8. pendapatan – LO;
  9. beban;
  10. korekasi kesalahan.
- (3) Rincian kebijakan akuntansi akun tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah.

## BAB V

### PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 38.
2. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 24 OKTOBER 2022

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 24 OKTOBER 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SURIYANI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN  
2022 NOMOR 38

## **KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1. Tujuan**

1.1 Kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan. Diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefinisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.

1.2 Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai acuan bagi:

- (a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- (b) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- (c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

1.3 Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

1.4 Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

1.5 Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.6 Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

1.7 Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

## **2. Ruang Lingkup**

2.1 Kerangka Konseptual ini membahas:

- (a) Tujuan Kerangka Konseptual;
- (b) Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- (c) Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
- (d) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
- (e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
- (f) Komponen Laporan Keuangan;
- (g) Defenisi unsur Laporan Keuangan;
- (h) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
- (i) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;
- (j) Asumsi Dasar;
- (k) Prinsip-Prinsip;
- (l) Kendala Informasi Akuntansi; dan
- (m) Dasar Hukum.

2.2 Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## **3. LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH**

Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- (a) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:
  - (1) bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
  - (2) sistem pemerintahan otonomi;
  - (3) adanya pengaruh proses politik;
  - (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
- (b) Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian:
  - (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
  - (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; dan

- (3) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

### **3.1 Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan**

Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintah daerah, pemerintah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRD.

### **3.2 Sistem Pemerintahan Otonomi**

Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

### **3.3 Pengaruh Proses Politik**

Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

### **3.4 Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah Daerah**

Walaupun dalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak

berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat - sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
- (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah.
- (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.

### **3.5 Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian**

Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- (b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
- (d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja pemerintah daerah.
- (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.



### **3.6 Investasi dalam Aset yang Tidak Langsung Menghasilkan Pendapatan**

Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.

### **3.7 Penyusutan Aset Tetap**

Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

## **4. PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI**

### **4.1 Pengguna Laporan Keuangan**

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:

- (a) masyarakat;
- (b) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- (c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- (d) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

### **4.2 Kebutuhan Informasi para Pengguna laporan Keuangan**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, terhubung laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, kecuali Dana Alokasi Umum, terhubung pajak merupakan sumber utama

pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

## **5. PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN**

### **5.1 Peranan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- (d) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational equity*)  
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- (e) Evaluasi Kinerja  
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

## **5.2 Tujuan Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- (b) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- (c) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- (d) menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- (e) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- (f) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Daerah.

## 6. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- (a) Relevan;
- (b) Andal;
- (c) Dapat dibandingkan; dan
- (d) Dapat dipahami.

### 6.1 Relevan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

- (a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- (b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- (c) Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- (d) Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 6.2 Andal

Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- (a) Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- (b) Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- (c) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

## 6.3 Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih bergunajika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang samadari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

## 6.4 Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan

dan lingkungan operasi Pemerintah Daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

## **7. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- (a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
  - (1) Laporan Realisasi Anggaran SKPD;
  - (2) Laporan Operasional (LO);
  - (3) Neraca SKPD;
  - (4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - (5) Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.
- (b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
  - (1) Laporan Realisasi Anggaran PPKD;
  - (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
  - (3) Laporan Operasional (LO);
  - (4) Neraca PPKD;
  - (5) Laporan Arus Kas (LAK);
  - (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - (7) Catatan Atas Laporan Keuangan PPKD;
- (c) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
  - (1) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah;
  - (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
  - (3) Laporan Operasional (LO);
  - (4) Neraca Pemerintah Daerah;
  - (5) Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
  - (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - (7) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## **8. UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos

laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

## **8.1 Laporan Pelaksanaa Anggaran**

### **8.1.1 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- (c) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk danaperimbangan dan dana bagi hasil.
- (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

### **8.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **8.2 Laporan Financial**

### **8.2.1 Neraca**

Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

#### **8.2.1.1 Aset**

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan



pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

#### **8.2.1.2 Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **8.2.1.3 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

### **8.2.2 Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- (b) Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali ataupun pengaruh entitas bersangkutan.

### **8.2.3 Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

- (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

### **8.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **8.3 Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi regional/ ekonomi makro;
- (c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
- (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan;
- (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on the face*) laporan keuangan.

## **9. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- (a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah.
- (b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

### **9.1 Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi**

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

### **9.2 Keandalan Pengukuran**

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

### **9.3 Pengakuan Aset**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai kalim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi,

pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah daerah setelah periode akuntansi berjalan.

#### **9.4 Pengakuan Kewajiban**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

#### **9.5 Pengakuan Pendapatan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan

#### **9.6 Pengakuan Beban dan Belanja**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

### **10. PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversiter lebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah

## **11. ASUMSI DASAR**

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

- (a) asumsi kemandirian entitas;
- (b) asumsi kesinambungan entitas; dan
- (c) asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

### **11.1 Kemandirian Entitas**

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

## **11.2 Kestinambungan Entitas**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

## **11.3 Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

## **12. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:

- (a) basis akuntansi;
- (b) prinsip nilai perolehan;
- (c) prinsip realisasi;
- (d) prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
- (e) prinsip periodisitas;
- (f) prinsip konsistensi;
- (g) prinsip pengungkapan lengkap; dan
- (h) prinsip penyajian wajar.

### **12.1 Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka pemerintah daerah wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

### **12.2 Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)**

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

### **12.3 Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)**

Ketersediaan pendapatan basis kas daerah yang telah diotorisasi melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

### **12.4 Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance OverForm Principle*)**

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek



formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **12.5 Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode semester.

### **12.6 Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)**

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas pertimbangan perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **12.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

### **12.8 Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya

pembentukan dan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

### **13. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL**

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitation*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- (a) Materialitas;
- (b) Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- (c) Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

#### **13.1 Materialitas**

Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

#### **13.2 Pertimbangan Biaya dan Manfaat**

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

#### **13.3 Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif**

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama

antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

#### **14. DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN**

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*)
- (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (d) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- (e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- (i) Peraturan daerah dan aturan-aturan hukum selain yang tersebut di atas, yang mengatur tentang keuangan negara, khususnya keuangan daerah.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

3 Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi bilamana entitas menyesuaikan laporan keuangannya atas peristiwa setelah tanggal pelaporan dan Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah tanggal pelaporan.

**Ruang Lingkup**

2. Kebijakan Akuntansi ini ***diterapkan oleh Entitas Pelaporan yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.***

3. ***Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah Pemerintah Daerah.***

**DEFINISI**

4. ***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:***

***Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.***

***Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara tanggal pelaporan keuangan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:***

- a. *Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan keuangan (merupakan peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan keuangan);*
- b. *Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan keuangan (merupakan peristiwa non penyesuain setelah tanggal pelaporan keuangan).*

**Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal dimana audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam tanggal LHP auditor atau tanggal dimana pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.**

### **OTORISASI PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN**

Untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi definisi peristiwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal dimana audit laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam tanggal LHP auditor atau tanggal dimana pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.

Proses yang terjadi diantara penyusunan laporan keuangan dan otorisasi penerbitan laporan keuangan dapat berbeda tergantung pada sifat organisasi, struktur organisasi, ketentuan yang wajib diikuti oleh entitas serta prosedur yang ditetapkan dalam proses penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan. Pemerintah bertanggung jawab atas laporan keuangan pada saat terbit laporan hasil pemeriksaan.

### **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang mungkin berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Peristiwa akibat kebijakan pemerintah yang berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada (a) apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan dan (b) apakah terdapat bukti yang cukup memadai yang dapat diperoleh atau dapat dipenuhi. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan

atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa penyesuai maka diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan.

### **PERISTIWA PENYESUAIN SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuain setelah tanggal pelaporan

Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuain setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, mencakup:

- a. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal pelaporan, atau adanya kerugian penurunan nilai aset yang telah diakui sebelumnya yang memerlukan penyesuaian, misalnya penghapusan tagihan piutang yang terjadi setelah tanggal pelaporan dan karena itu entitas perlu menyesuaikan jumlah piutangnya;
- b. Penetapan biaya perolehan atas aset yang disajikan pada tanggal laporan keuangan;
- c. Penetapan jumlah pendapatan bagi hasil yang diterima/diberikan setelah tanggal pelaporan;
- d. Kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.

### **PERISTIWA NONPENYESUAIN SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuain setelah tanggal pelaporan.

Contoh dari peristiwa nonpenyesuain setelah tanggal pelaporan diantaranya:

- a. Penyelesaian putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas mengungkapkan kewajiban yang timbul tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas tidak menyesuaikan pos kewajiban yang terkait dengan penyelesaian perkara pengadilan tersebut sampai dengan adanya penetapan anggaran yang berakibat pada penyajian laporan keuangan periode berikutnya;
- b. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada

tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya;

- c. Apabila suatu entitas dibebani dengan program layanan masyarakat yang ditetapkan setelah tanggal pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Entitas tidak menyesuaikan beban yang telah diakui sebelumnya dalam laporan keuangan periode berjalan;
- d. Angsuran Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar dan/atau dipotong/dipungut sebelum tanggal pelaporan dan dilaporkan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

### **Dividen atau Pembagian Lainnya**

Apabila suatu Badan Usaha Milik Negara/Daerah mengumumkan pembagian dividen atau jenis pembagian lainnya setelah tanggal pelaporan, maka entitas yang mengkonsolidasi laporan keuangan Badan Usaha tersebut tidak mengakui pembagian lainnya tersebut sebagai kewajiban pada tanggal pelaporan.

Transaksi dividen dapat terjadi pada sektor publik misalnya pada saat entitas memiliki pengendalian dan mengkonsolidasi laporan keuangan Daerah.

Apabila dividen atau jenis pembagian lainnya diumumkan setelah tanggal pelaporan dan sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dividen atau jenis pembagian lainnya tersebut tidak diakui sebagai kewajiban pada tanggal pelaporan karena tidak ada kewajiban yang timbul pada saat itu, namun cukup diungkapkan dalam laporan keuangan.

### **GOING CONCERN/KESINAMBUNGAN ENTITAS**

Penetapan asumsi kesinambungan entitas suatu entitas membutuhkan pertimbangan entitas itu sendiri. Bagaimanapun juga kesinambungan entitas lebih relevan bagi entitas itu sendiri dibandingkan dengan penilaian kesinambungan entitas suatu pemerintahan sebagai satu kesatuan. Sebagai contoh, entitas yang tidak berlanjut keberadaannya karena keputusan pemerintah untuk memindahkan aktivitasnya kepada entitas lain, maka restrukturisasi tersebut tidak memiliki dampak pada kesinambungan entitas pemerintahan itu sendiri.

Entitas tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pada entitas lain untuk menyusun laporan keuangannya.

Dalam hal suatu entitas dibiayai dengan anggaran, kesinambungan entitas pada umumnya diketahui pada saat pemerintah mengumumkan penghentian atas pembiayaannya.

Apabila asumsi kesinambungan entitas tidak terpenuhi, entitas mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

### **PENGUNGKAPAN**

Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, apabila terdapat lembaga yang berwenang untuk merubah laporan keuangan setelah diterbitkan, maka diungkapkan dalam laporan keuangan.

Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit penting diketahui oleh pengguna karena laporan keuangan tidak mencerminkan peristiwa setelah tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan pos laporan keuangan terkait berdasarkan kondisi/ informasi terkini tersebut.

Dalam beberapa kasus, entitas pelaporan perlu memutakhirkan pengungkapan laporan keuangannya untuk mencerminkan informasi yang diterima setelah periode pelaporan, walaupun informasi tersebut tidak mempengaruhi jumlah yang disajikan dalam laporan keuangannya. Salah satu contoh perlunya pemutakhiran pengungkapan laporan keuangan yaitu adanya bukti tentang kewajiban kontinjensi yang ada pada tanggal pelaporan.

### **PENGUNGKAPAN PERISTIWA NONPENYESUAIN SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

Apabila peristiwa nonpenyesuain setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Karena itu, suatu entitas wajib mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuain tersebut yang mencakup:

- a. Sifat peristiwa; dan
- b. Estimasi dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat disajikan.

Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuain setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

- a. Penurunan nilai aset dalam jumlah besar akibat perubahan kebijakan penilaian aset dengan menggunakan nilai wajar;
- b. Pengumuman rencana untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset dan penyelesaian kewajiban;
- c. Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;



- d. Kerusakan aset tetap akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
- e. Perubahan tidak normal pada nilai aset atau kurs valuta asing setelah tanggal pelaporan;
- f. Perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang diberlakukan atau diumumkan setelah tanggal pelaporan yang memiliki pengaruh signifikan pada piutang perpajakan dan kewajiban pemerintah;
- g. Komitmen entitas atau kewajiban kontinjensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
- h. Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan.
- i. Mengingat Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) pada Paragraf 4 dinyatakan bahwa Entitas tidak menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis Kas menuju Akrual menjadi Laporan Keuangan Tahun 2014 berbasis akrual agar dapat dibandingkan dengan Laporan Keuangan Tahun 2015.
- j. Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan tidak memberlakukan Kebijakan Akuntansi mengenai Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca, sehingga Lampiran Nomor B-02 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca dinyatakan tidak berlaku.

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN**

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

### **PENDAHULUAN**

#### **Tujuan**

Tujuan Kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam Kebijakan akuntansi yang khusus.

#### **Ruang Lingkup**

Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi). Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagiandari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen public lainnya seperti laporan tahunan.

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

## **Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual

Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi basis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

## **DEFINISI**

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Beban adalah penurunan mamfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan

keuangan.

Pos luar biasa adalah adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

#### **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- (b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- (e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- (f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- (g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- (a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- (b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- (a) Aset;
- (b) Kewajiban;
- (c) Ekuitas;
- (d) Pendapatan-LRA;
- (e) Belanja;
- (f) Transfer
- (g) Pembiayaan;
- (h) Saldo Anggaran Lebih;
- (i) Pendapatan-LO;
- (j) Beban; dan
- (k) Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan

nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

#### TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

#### KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- (c) Neraca;
- (d) Laporan Operasional;
- (e) Laporan Arus Kas;
- (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali

- (a) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan, dalam hal ini Pemerintah Daerah;
- (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.

Entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan.

Entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.



## **STRUKTUR DAN ISI**

### **Pendahuluan**

Pernyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-poslainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran Kebijakan ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.

### **Identifikasi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.

Kebijakan Akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Kebijakan Akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebijakan Akuntansi ini.

Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:

- (a) nama SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah;
- (b) cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
- (c) tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
- (d) mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
- (e) tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.

### **Periode Pelaporan**

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

- (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.

### **Tepat Waktu**

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/ pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur- unsur sebagai berikut:

- (a) pendapatan;
- (b) belanja;
- (c) transfer
- (d) surplus/defisit-LRA;
- (e) pembiayaan
- (f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan

anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

#### Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- (a) Saldo Anggaran Lebih awal;
- (b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- (c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- (d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; dan
- (e) Lain-lain;
- (f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdaftar dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/ entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

#### **Klasifikasi**

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan

sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- (a) kas dan setara kas;
- (b) investasi jangka pendek;
- (c) piutang pajak dan bukan pajak;
- (d) persediaan;
- (e) investasi jangka panjang;
- (f) aset tetap;
- (g) kewajiban jangka pendek;
- (h) kewajiban jangka panjang;
- (i) ekuitas.

Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan. Suatu pos diklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

Rincian yang tercakup dalam sub klasifikasi di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi penjualan, pihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya;
- (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;
- (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan kebijakan yang mengatur tentang aset tetap;
- (d) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- (e) pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/ lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian dan metode penilaian.

### **Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan

setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh entitas pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang perhubungan dengan arus kas diatur dalam Kebijakan Akuntansi tentang Laporan Arus Kas

### **Laporan Operasional**

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- (b) Beban dari kegiatan operasional;
- (c) Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional, bila ada;
- (d) Pos luar biasa, bila ada;
- (e) Surplus/defisit-LO.

Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

### **Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- (a) Ekuitas awal;
- (b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- (c) Koreksi-koreksi langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya;
  - 2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

(d) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan

### **Catatan atas Laporan Keuangan**

#### **Struktur**

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- (a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- (b) informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan kebijakan ekonomi makro;
- (c) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- (d) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- (e) rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- (f) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya

informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

### **Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:

- (a) dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- (b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
- (c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan

Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
- (b) Pengakuan belanja;
- (c) Pengakuan beban;
- (d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- (e) Investasi;
- (f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- (g) Kontrak-kontrak konstruksi;
- (h) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- (i) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- (j) Biaya penelitian dan pengembangan;
- (k) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- (l) Dana cadangan;
- (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

63. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (*nonreciprocal revenue*), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

64. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

#### Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.



**KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

4 Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

5 Laporan realisasi anggaran memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding di tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan daerah.

**Ruang Lingkup**

Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah. Tidak termasuk perusahaan daerah.

**MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dan entitas akuntansi terhadap anggaran dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **DEFINISI**

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periodetahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

## **STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:

- (a) nama SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah;
- (b) periode yang dicakup;
- (c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan
- (d) satuan angka yang digunakan.

## **PERIODE PELAPORAN**

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; dan
- (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

## **TEPAT WAKTU**

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan dan entitas akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

Sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

## **ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LRA;
- (b) Belanja;
- (c) Transfer;
- (d) Surplus atau defisit-LRA;
- (e) Penerimaan pembiayaan;
- (f) Pengeluaran pembiayaan;
- (g) Pembiayaan neto; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Adapun Kode Akun untuk pos Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang tercantum dalam Bagan Akun Standar (BAS) adalah sebagai berikut :

Kode Akun					Uraian Akun
4					PENDAPATAN - LRA
4	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
4	1	1			Pendapatan Pajak Daerah - LRA
4	1	1	01		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
4	1	1	01	01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	1	01	02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	1	01	03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	1	01	04	PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4	1	1	01	05	PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	1	01	06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	1	01	07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	1	01	08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	1	01	09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	1	01	10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	1	01	11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	1	01	12	Dst.....
4	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA
4	1	1	02	01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	1	02	02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	1	02	03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	1	02	04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LRA
4	1	1	02	05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	1	02	06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	1	02	07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	1	02	08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	1	02	09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	1	02	10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	1	02	11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	1	02	12	Dst.....
4	1	1	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	1	03	01	Pajak Bahan Bakar Premium - LRA
4	1	1	03	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LRA
4	1	1	03	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LRA
4	1	1	03	04	Pajak Bahan Bakar Solar - LRA
4	1	1	03	05	Pajak Bahan Bakar Gas - LRA
4	1	1	03	06	Dst .....
4	1	1	04		Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	1	04	01	Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	1	05		Pajak Rokok - LRA
4	1	1	05	01	Pajak Rokok - LRA
4	1	1	06		Pajak Hotel - LRA
4	1	1	06	01	Hotel - LRA
4	1	1	06	02	Motel - LRA
4	1	1	06	03	Losmen - LRA
4	1	1	06	04	Gubuk Pariwisata - LRA
4	1	1	06	05	Wisma Pariwisata - LRA
4	1	1	06	06	Pesanggrahan - LRA
4	1	1	06	07	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LRA

4	1	1	06	08	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LRA
4	1	1	06	09	Dst .....
4	1	1	07		Pajak Restoran - LRA
4	1	1	07	01	Restoran - LRA
4	1	1	07	02	Rumah Makan - LRA
4	1	1	07	03	Kafetaria - LRA
4	1	1	07	04	Kantin - LRA
4	1	1	07	05	Warung - LRA
4	1	1	07	06	Bar - LRA
4	1	1	07	07	Jasa Boga/ Katering - LRA
4	1	1	07	08	Dst .....
4	1	1	08		Pajak Hiburan - LRA
4	1	1	08	01	Tontonan Film/Bioskop - LRA
4	1	1	08	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA
4	1	1	08	03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LRA
4	1	1	08	04	Pameran - LRA
4	1	1	08	05	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LRA
4	1	1	08	06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA
4	1	1	08	07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LRA
4	1	1	08	08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA
4	1	1	08	09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran ( <i>fitnes center</i> ) - LRA
4	1	1	08	10	Pertandingan Olahraga - LRA
4	1	1	08	11	Dst .....
4	1	1	09		Pajak Reklame - LRA
4	1	1	09	01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA
4	1	1	09	02	Reklame Kain - LRA
4	1	1	09	03	Reklame Melekat/Stiker - LRA
4	1	1	09	04	Reklame Selebaran - LRA
4	1	1	09	05	Reklame Berjalan - LRA
4	1	1	09	06	Reklame Udara - LRA
4	1	1	09	07	Reklame Apung - LRA
4	1	1	09	08	Reklame Suara - LRA
4	1	1	09	09	Reklame Film/Slide - LRA
4	1	1	09	10	Reklame Peragaan - LRA
4	1	1	09	11	Dst .....
4	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan - LRA
4	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA
4	1	1	10	02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LRA
4	1	1	11		Pajak Parkir - LRA
4	1	1	11	01	Pajak Parkir - LRA
4	1	1	12		Pajak Air Tanah - LRA
4	1	1	12	01	Pajak Air Tanah - LRA
4	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	1	13	01	Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4	1	1	14	01	Asbes - LRA
4	1	1	14	02	Batu Tulis - LRA
4	1	1	14	03	Batu setengah permata - LRA
4	1	1	14	04	Batu Kapur - LRA
4	1	1	14	05	Batu Apung - LRA
4	1	1	14	06	Batu Permata - LRA
4	1	1	14	07	Bentonit - LRA
4	1	1	14	08	Dolomit - LRA
4	1	1	14	09	Feldspar - LRA
4	1	1	14	10	Garam Batu (Halite) - LRA
4	1	1	14	11	Grafit - LRA
4	1	1	14	12	Granit/Andesit - LRA
4	1	1	14	13	Gips - LRA
4	1	1	14	14	Kalsit - LRA
4	1	1	14	15	Kaolin - LRA
4	1	1	14	16	Leusit - LRA
4	1	1	14	17	Magnesit - LRA
4	1	1	14	18	Mika - LRA
4	1	1	14	19	Marmer - LRA
4	1	1	14	20	Nitrat - LRA
4	1	1	14	21	Opsidien - LRA
4	1	1	14	22	Oker - LRA
4	1	1	14	23	Pasir dan kerikil - LRA
4	1	1	14	24	Pasir Kuarsa - LRA
4	1	1	14	25	Perlit - LRA
4	1	1	14	26	Phospat - LRA
4	1	1	14	27	Talk - LRA
4	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA
4	1	1	14	29	Tanah Diatome - LRA
4	1	1	14	30	Tanah Liat - LRA
4	1	1	14	31	Tawas (Alum) - LRA
4	1	1	14	32	Tras - LRA
4	1	1	14	33	Yarosif - LRA
4	1	1	14	34	Zeolit - LRA

4	1	1	14	35	Basal - LRA
4	1	1	14	36	Trakit - LRA
4	1	1	14	37	Mineral bukan logam dan lainnya - LRA
4	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	1	15	01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA
4	1	1	16	01	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA
4	1	1	16	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</b>
4	1	2	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4	1	2	01	01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA
4	1	2	01	02	Puskesmas keliling - LRA
4	1	2	01	03	Puskesmas pembantu - LRA
4	1	2	01	04	Balai Pengobatan - LRA
4	1	2	01	05	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA
4	1	2	01	06	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda - LRA
4	1	2	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4	1	2	02	01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LRA
4	1	2	02	02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LRA
4	1	2	02	03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA
4	1	2	03		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	2	03	01	Kartu Tanda Penduduk - LRA
4	1	2	03	02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA
4	1	2	03	03	Kartu Identitas Kerja - LRA
4	1	2	03	04	Kartu Penduduk Sementara - LRA
4	1	2	03	05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA
4	1	2	03	06	Kartu Keluarga - LRA
4	1	2	03	07	Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	2	04		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4	1	2	04	01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA
4	1	2	04	02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA
4	1	2	05		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	2	05	01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	2	06		Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4	1	2	06	01	Pelataran - LRA
4	1	2	06	02	Los - LRA
4	1	2	06	03	Kios - LRA
4	1	2	07		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	2	07	01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4	1	2	07	02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4	1	2	07	03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4	1	2	07	04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4	1	2	07	05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4	1	2	07	06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4	1	2	07	07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4	1	2	07	08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4	1	2	07	09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4	1	2	07	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4	1	2	07	11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4	1	2	07	12	Dst.....
4	1	2	08		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	2	08	01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	2	08	02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA
4	1	2	08	03	Alat Penyelamatan Jiwa - LRA
4	1	2	08	04	Dst.....
4	1	2	09		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4	1	2	09	01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA
4	1	2	09	02	Penyediaan Peta Foto - LRA
4	1	2	09	03	Penyediaan Peta Digital - LRA
4	1	2	09	04	Penyediaan Peta Tematik - LRA
4	1	2	09	05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA
4	1	2	10		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	2	10	01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	2	11		Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4	1	2	11	01	Rumah Tangga - LRA
4	1	2	11	02	Perkantoran - LRA
4	1	2	11	03	Industri - LRA
4	1	2	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4	1	2	12	01	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LRA
4	1	2	12	02	Pengujian dalam keadaan terbungkus - LRA
4	1	2	13		Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA

4	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA
4	1	2	13	02	Pelatihan Teknis - LRA
4	1	2	14		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4	1	2	14	01	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LRA
4	1	2	15		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA
4	1	2	15	02	Laboratorium - LRA
4	1	2	15	03	Ruangan -LRA
4	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	2	16		Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4	1	2	16	01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA
4	1	2	16	02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA
4	1	2	16	03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA
4	1	2	17		Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4	1	2	17	01	Pelelangan Ikan - LRA
4	1	2	17	02	Pelelangan Ternak - LRA
4	1	2	17	03	Pelelangan Hasil Bumi - LRA
4	1	2	17	04	Pelelangan Hasil Hutan - LRA
4	1	2	17	05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LRA
4	1	2	18		Retribusi Terminal - LRA
4	1	2	18	01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA
4	1	2	18	02	Tempat Kegiatan Usaha - LRA
4	1	2	18	03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA
4	1	2	19		Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	2	19	01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	2	20		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4	1	2	20	01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA
4	1	2	21		Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4	1	2	21	01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LRA
4	1	2	21	02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LRA
4	1	2	22		Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4	1	2	22	01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA
4	1	2	23		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4	1	2	23	01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA
4	1	2	23	02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4	1	2	23	03	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
4	1	2	24		Retribusi Penyeberangan Air - LRA
4	1	2	24	01	Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA
4	1	2	24	02	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA
4	1	2	25		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	2	26		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	2	26	01	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	2	27		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	2	27	01	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	2	28		Retribusi Izin Gangguan - LRA
4	1	2	28	01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	28	02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA
4	1	2	29		Retribusi Izin Trayek - LRA
4	1	2	29	01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	29	02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA
4	1	2	30		Retribusi Izin Perikanan - LRA
4	1	2	30	01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA
4	1	2	30	02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA
4	1	2	31		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4	1	2	31	01	Penggunaan ruas jalan tertentu - LRA
4	1	2	31	02	Penggunaan koridor tertentu -LRA
4	1	2	31	03	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang -
4	1	2	32		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4	1	2	32	01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA</b>
4	1	3	01		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA
4	1	3	01	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD ..... -LRA
4	1	3	01	02	Dst .....



4	1	3	02		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA
4	1	3	02	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN ..... - LRA
4	1	3	02	02	Dst .....
4	1	3	03		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA
4	1	3	03	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA
4	1	3	03	02	Dst .....
4	1	4			<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LRA</b>
4	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA
4	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah - LRA
4	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA
4	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA
4	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA
4	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA
4	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4	1	4	03		Penerimaan Jasa Giro - LRA
4	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah - LRA
4	1	4	03	02	Jasa Giro Bendahara - LRA
4	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA
4	1	4	03	04	Dst .....
4	1	4	04		Pendapatan Bunga - LRA
4	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito..... - LRA
4	1	4	04	02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir ..... - LRA
4	1	4	04	03	Dst .....
4	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
4	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LRA
4	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA
4	1	4	06		Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA
4	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA
4	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari ..... - LRA
4	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari ..... - LRA
4	1	4	06	04	Dst .....
4	1	4	07		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
4	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan ..... - LRA
4	1	4	07	02	Dst .....
4	1	4	08		Pendapatan Denda Pajak - LRA
4	1	4	08	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	08	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA
4	1	4	08	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA
4	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA
4	1	4	08	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
4	1	4	08	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA
4	1	4	08	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
4	1	4	08	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA
4	1	4	08	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA
4	1	4	08	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA
4	1	4	08	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4	1	4	08	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4	1	4	08	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4	1	4	08	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
4	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi - LRA
4	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
4	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA

4	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA
4	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air - LRA
4	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA
4	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA
4	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA
4	1	4	09	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4	1	4	10		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4	1	4	10	03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
4	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA
4	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda ..... - LRA
4	1	4	11	02	Dst .....
4	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA
4	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA
4	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA
4	1	4	12	03	Dst .....
4	1	4	13		Pendapatan dari Pengembalian
4	1	4	13	01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA
4	1	4	13	02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA
4	1	4	13	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA
4	1	4	13	04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA
4	1	4	13	05	Dst .....
4	1	4	14		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4	1	4	14	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA
4	1	4	14	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA
4	1	4	14	03	Dst .....
4	1	4	15		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
4	1	4	15	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA
4	1	4	15	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA
4	1	4	15	03	Dst .....
4	1	4	16		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
4	1	4	16	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
4	1	4	16	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LRA
4	1	4	16	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA
4	1	4	16	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA
4	1	4	17		Pendapatan Zakat* - LRA
4	1	4	17	01	Pendapatan Zakat* ..... - LRA
4	1	4	18		Pendapatan BLUD - LRA
4	1	4	18	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
4	1	4	18	02	Pendapatan Hibah BLUD - LRA
4	1	4	18	03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA
4	1	4	18	04	Dst .....
4	1	4	19		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4	1	4	19	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
<b>4</b>	<b>2</b>				<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA</b>
4	2	1	01		Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA
4	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA
4	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA
4	2	1	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 -LRA
4	2	1	01	05	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA
4	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
4	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA
4	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA
4	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA
4	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA
4	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA
4	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA
4	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA
4	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA
4	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA
4	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA
4	2	1	03		Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
4	2	1	03	01	Dana Alokasi Umum - LRA

4	2	1	04		Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
4	2	1	04	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA
4	2	1	04	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA
4	2	1	04	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA
4	2	1	04	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA
4	2	1	04	05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA
4	2	1	04	06	DAK Bidang Kehutanan - LRA
4	2	1	04	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA
4	2	1	04	08	DAK Bidang Kesehatan - LRA
4	2	1	04	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA
4	2	1	04	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA
4	2	1	04	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA
4	2	1	04	12	DAK Bidang Perdagangan - LRA
4	2	1	04	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA
4	2	1	04	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA
4	2	1	04	15	DAK Bidang Pertanian - LRA
4	2	1	04	16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA
4	2	1	04	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA
4	2	1	04	18	DAK Bidang Pendidikan - LRA
4	2	1	04	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
4	2	1	04	20	Dst .....
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA</b>
4	2	2	01		Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	2	01	01	Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	2	01	02	Dana Tambahan Infrastruktur- LRA
4	2	2	02		Dana Keistimewaan - LRA
4	2	2	02	01	Dana Keistimewaan - LRA**
4	2	2	03		Dana Penyesuaian - LRA
4	2	2	03	01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA
4	2	2	03	02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA
4	2	2	03	03	Dana Insentif Daerah - LRA
4	2	2	03	04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA
4	2	2	03	05	Bantuan Operasional Sekolah - LRA***
4	2	2	03	06	Dst .....
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA</b>
4	2	3	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4	2	3	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak ..... - LRA
4	2	3	01	02	Dst .....
4	2	3	02		Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4	2	3	02	01	Pendapatan Bagi hasil Lainnya ..... - LRA
4	2	3	02	02	Dst .....
4	2	3	03		Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4	2	3	03	01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Bantuan Keuangan - LRA</b>
4	2	4	01		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA
4	2	4	01	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi ..... - LRA
4	2	4	01	02	Dst .....
4	2	4	02		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4	2	4	02	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ..... - LRA
4	2	4	02	02	Dst .....
4	2	4	03		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
4	2	4	03	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota ..... - LRA
4	2	4	03	02	Dst .....
<b>4</b>	<b>3</b>				<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Pendapatan Hibah - LRA</b>
4	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
4	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	3	1	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA
4	3	1	03	01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri ..... - LRA
4	3	1	03	02	Dst .....
4	3	1	04		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA
4	3	1	04	01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA
4	3	1	04	02	Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Dana Darurat - LRA</b>
4	3	2	01		Dana Darurat - LRA
4	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam – LRA
4	3	2	01	02	Dst .....
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Pendapatan Lainnya – LRA</b>
4	3	3	01		Pendapatan Lainnya – LRA

4	3	3	01	01	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga – LRA
4	3	3	01	02	Dst .....

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Kode Akun untuk pos Belanja-LRA ditunjukkan pada Bagan Akun Standar (BAS) dalam Kebijakan Akuntansi Nomor 19 mengenai Belanja.

Kode Akun untuk pos Pembiayaan-LRA ditunjukkan pada Bagan Akun Standar (BAS) dalam Kebijakan Akuntansi Nomor 20 mengenai pembiayaan.

### **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pendapatan disajikan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pos pendapatan yang harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan-LRA sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.

Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

- (a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;

- (b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

### **PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SEBELUM KONVERSI**

Laporan Realisasi Anggaran SKPD (LRA SKPD) disusun untuk semester satu dan tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH DAERAH  
SKPD ...  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun n  
(Dalam Rupiah)

<b>Nomor Urut</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih (Kurang)</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah			
	<b>Jumlah</b>			
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	<b>Jumlah</b>			
	<b>Surplus/ (Defisit)</b>			

### **KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD**

<b>Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah</b>  <b>PENDAPATAN</b>	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>  <b>PENDAPATAN</b>
--	---

Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah	1.Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah	2.Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang Sah	4.Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, tidak terdapat perbedaan. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan konversi

<b>Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</b> <b>BELANJA</b>		<b>PP Nomor 71 Tahun 2010 Atas Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b> <b>BELANJA</b>
A. Belanja Tidak Langsung	i	A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai		1. Belanja Pegawai
	ii	2. Belanja Barang
		3. Bunga
		4. Subsidi
		5. Hibah
		6. Bantuan Sosial
	iii	B. Belanja Modal
		1. Belanja Tanah
B. Belanja Langsung		2. Belanja Peralatan dan Mesin
1. Belanja Pegawai		3. Belanja Gedung dan Bangunan
		4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
2. Belanja Barang dan Jasa		5. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Modal		6. Belanja Aset Lainnya

Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung dikonversi sebagai berikut:

- (a) Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai;

- (b) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja operasi pada akun belanja barang; dan
- (c) Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.

Dalam konversi agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian konversinya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI**

Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

**PEMERINTAH DAERAH**  
**SKPD .....**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun n dan n-1  
 (Dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun n	%	Realisasi Tahun n-1
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b><u>PENDAPATAN</u></b>				
<b>2</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah				
<b>7</b>	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>				
<b>8</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7)</b>				

9					
10	<b>BELANJA</b>				
11					
12	<b>BELANJA OPERASI</b>				
13	Belanja Pegawai				
14	Belanja Barang				
15	<b>Jumlah Belanja Operasi (13 s/d 14)</b>				
16					
17	<b>BELANJA MODAL</b>				
18	Belanja Tanah				
19	Belanja Peralatan Dan Mesin				
20	Belanja Gedung Dan Bangunan				
21	Belanja Jalan, Irigasi, Dan Jaringan				
22	Belanja Aset Tetap Lainnya				
23	Belanja Aset Lainnya				
24	<b>Jumlah Belanja Modal (18 s/d 23)</b>				
25	<b>JUMLAH BELANJA (15 + 24)</b>				
26	<b>SURPLUS/ DEFISIT (8 - 25)</b>				

#### **PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SEBELUM KONVERSI**

28. Laporan Realisasi Anggaran PPKD (LRA PPKD) sebagai kantor pusat, disusun setiap semester dan Tahunan. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja PPKD yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

#### **PEMERINTAH DAERAH**

#### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun n

(Dalam Rupiah)

<b>Nomor Urut</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih (Kurang)</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengolahan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			



1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
<b>1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	<b>Jumlah Pendapatan</b>			
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	<b>Jumlah Belanja</b>			
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>			
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>			
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>			
	<b>Pembiayaan Neto</b>			
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>			

**KONVERSI UNTUK LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD**

<b>Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  <b>PENDAPATAN</b>	<b>PP Nomor 71 Tahun 2010 Atas Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>  <b>PENDAPATAN</b>
<b>A. Pendapatan Asli daerah</b>	<b>A. Pendapatan Asli daerah</b>
1. Pajak Daerah	1. Pajak Daerah
2. Retribusi daerah	2. Retribusi daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
<b>B. Dana Perimbangan</b>	<b>B. Pendapatan Transfer</b>
1. Dana Bagi Hasil :	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
– Dana Bagi Hasil Pajak	→ 1. Dana Bagi Hasil Pajak
– Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	→ 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
2. Dana Alokasi Umum	→ 3. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus	→ 4. Dana Alokasi Khusus
<b>C. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah</b>	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
1. Pendapatan Hibah	→ 1. Dana Otonomi Khusus
2. Dana Darurat	→ 2. Dana Penyesuaian
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer Pemerintah Provinsi
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	→ 1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	→ 2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
	<b>C. Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>
	→ 1. Pendapatan Hibah
	→ 2. Pendapatan Dana Darurat
	→ 3. Pendapatan Lainnya

Pendapatan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :

- a. Dari komponen Dana Perimbangan, yakni: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus ke Pendapatan Transfer.
- b. Dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yakni : Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya ke komponen Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

<b>Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>PP Nomor 71 Tahun 2010 Atas Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>
<b>BELANJA</b>		<b>BELANJA</b>
A. Belanja Tidak Langsung		A. Belanja Operasi
1. Belanja Pegawai	i	1. Belanja Pegawai
2. Belanja Bunga	ii	2. Belanja Barang
3. Belanja Subsidi		3. Bunga
4. Belanja Hibah		4. Subsidi
5. Belanja Bantuan Sosial		5. Hibah
6. Belanja bagi Hasil		6. Bantuan Sosial
7. Belanja Bantuan Keuangan	iii	B. Belanja Modal
8. Belanja Tidak Terduga		1. Belanja Tanah
B. Belanja Langsung		2. Belanja Peralatan dan Mesin
1. Belanja Pegawai		3. Belanja Gedung dan Bangunan
2. Belanja Barang dan Jasa	iv	4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
3. Belanja Modal		5. Belanja Aset Tetap Lainnya
		6. Belanja Aset Lainnya
		C. Belanja Tidak Terduga
		1. Belanja Tidak Terduga
	v	D. Transfer/Bagi Hasil
		1. Bagi Hasil Pajak
		2. Bagi Hasil Retribusi
		3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Belanja yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu: Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi.

Sedangkan untuk Belanja Langsung dikonversi sebagai berikut:

- a. Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai;

- b. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja operasi pada akun belanja barang;
- c. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.

Sedangkan pada belanja tidak langsung untuk akun Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga masuk dalam kelompok tersendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja tidak terduga ke komponen belanja tidak terduga, dan
- b. Dari komponen belanja tidak langsung, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan ke komponen transfer/bagi hasil ke Desa.

Dalam konversi agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan kegiatan.

<b>Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>PP Nomor 71 Tahun 2010 Atas Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>
<b>A. Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>A. Penerimaan Pembiayaan</b>
1. Penggunaan SiLPA	1. Penggunaan SiLPA
2. Pencairan dana cadangan	2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman daerah	4. Pinjaman dalam negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah pusat</li> <li>- Pemerintah daerah lainnya</li> <li>- Lembaga keuangan bank</li> <li>- Lembaga keuangan bukan bank</li> <li>- Obligasi</li> <li>- lainnya</li> </ul>
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	5. Penerimaan kembali pinjaman <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepada perusahaan negara</li> <li>- Kepada perusahaan daerah</li> <li>- Kepafa pemerintah daerah</li> </ul>

	lainnya
<b>B. Pengeluaran Pembiayaan daerah</b>	<b>B. Pengeluaran Pembiayaan</b>
1. Pembentukan dana cadangan	1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
3. Pembayaran Pokok Utang	3. Pembayaran Pokok Utang
4. Pemberian Pinjaman Daerah	4. Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam Neraca, seperti terlihat dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu dari akun penerimaan pinjaman daerah ke pinjaman dalam negeri.

Pengeluaran pembiayaan yang merupakan wewenang PPKD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat dalam bagan di atas, tidak perlu dilakukan konversi karena tidak terdapat perbedaan yang berarti.

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD SETELAH KONVERSI

### PEMERINTAH DAERAH

#### LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PPKD

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun n dan n-1

(Dalam Rupiah)

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun n	%	Realisasi Tahun n-1
1	2	3	4	5	
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	<b>Jumlah Pndapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>				
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
10	<b>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</b>				
11	Dana Bagi Hasil Pajak				
12	Dana Bagi Sumber Daya Alam				
13	Dana Alokasi Umum				
14	Dana Alokasi Khusus				
15	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s/d 14)</b>				
16					
17	<b>Transfer Pemerintah Pusat -</b>				

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun n	%	Realisasi Tahun n-1
1	2	3	4	5	
	<b>Lainnya</b>				
18	Dana Otonomi Khusus				
19	Dana Penyesuaian				
20	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)</b>				
21					
22	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
24	Pendapatan Bagih Hasil Lainnya				
25	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)</b>				
26	<b>Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)</b>				
27					
28	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
29	Pendapatan Hibah				
30	Pendapatan Dana Darurat				
31	Pendapatan Lainnya				
32	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)</b>				
33	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)</b>				
34					
35	<b>BELANJA</b>				
36	<b>BELANJA OPERASI</b>				
37	Belanja Pegawai				
38	Belanja Barang				
39	Bunga				
40	Subsidi				
41	Hibah				
42	Bantuan Sosial				
43	<b>Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)</b>				
44					
45	<b>BELANJA MODAL</b>				
46	Belanja Tanah				
47	Belanja Peralatan dan Mesin				
48	Belanja Gedung dan Bangunan				
49	Belanja Jalan. Irigasi, dan Jaringan				
50	Belanja Aset Tetap Lainnya				
51	Belanja Aset Lainnya				
52	<b>Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)</b>				
53					
54	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>				
55	Belanja Tidak Terduga				
56	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga (55)</b>				
57	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)</b>				
58					
59	<b>TRANSFER</b>				
60	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>				

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun n	%	Realisasi Tahun n-1
1	2	3	4	5	
61	Bagi Hasil Pajak				
62	Bagi Hasil Retribusi				
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
64	<b>JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)</b>				
65	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER/ BAGI HASIL KE DESA (57 + 64)</b>				
66					
67	<b>SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)</b>				
68					
69	<b>PEMBIAYAAN</b>				
70					
71	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>				
72	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)				
73	Pencairan Dana Cadangan				
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan				
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya				
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank				
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi				
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya				
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara				
82	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan daerah				
83	Penerimaan Kembali pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
84	<b>Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)</b>				
85					
86	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>				
87	Pembentukan Dana Cadangan				
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat				
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah daerah Lainnya				
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank				
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga				

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun n	%	Realisasi Tahun n-1
1	2	3	4	5	
93	Keuangan Bukan Bank				
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi				
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya				
96	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah				
97	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
98	<b>Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97)</b>				
99	<b>PEMBIAYAAN NETO (84 – 98)</b>				
100					
101	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 98)</b>				

#### **PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN GABUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

29. Laporan Realisasi Anggaran gabungan Pemerintah Daerah disusun di semester I dan akhir tahun anggaran, dan nilainya merupakan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan PPKD. Laporan ini dibuat oleh PPKD sebagai Pemerintah Daerah.

30. Untuk laporan realisasi anggaran gabungan tidak memerlukan proses eliminasi, tetapi penggabungan langsung seluruh pendapatan dan belanja dari PPKD dan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berikut adalah contoh *woorsheet* untuk Laporan Realisasi Anggaran Gabungan:

No	Uraian	SKPD 1	SKPD 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			xxx	Xxx
6	Lain-Lain PAD Yang Sah			xxx	Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	Xxx
8	Dana Perimbangan/Transfer			xxx	Xxx
9	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			xxx	Xxx
10	Jumlah Pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx



11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung/Operasi	xxx	xxx	xxx	Xxx
13	Belanja Langsung/Modal	xxx	xxx	xxx	Xxx
14	Jumlah Belanja	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus/Defisit	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan Daerah				
17	Penerimaan Pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran Pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan Neto			xxx	Xxx
20	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan (SiLPA)			xxx	Xxx

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI NERACA**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

### **PENDAHULUAN**

#### **Tujuan**

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

#### **Ruang Lingkup**

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk tingkat SKPD, PPKD, dan Pemerintah Daerah.

### **DEFINISI**

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

#### **KLASIFIKASI**

**4. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.**

**5. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan**

**dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan**

Apabila suatu entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

**9. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:**

- (a) kas dan setara kas;**
- (b) investasi jangka pendek;**
- (c) piutang;**
- (d) persediaan;**
- (e) investasi jangka panjang;**
- (f) aset tetap;**
- (g) kewajiban jangka pendek;**
- (h) kewajiban jangka panjang;**
- (i) ekuitas.**

**10. Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.**

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- (a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- (b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan; dan
- (c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

## **PENYUSUNAN NERACA SKPD SEBELUM KONVERSI**

Setelah disusun LRA SKPD, kemudian melakukan jurnal penyesuaian, selanjutnya Satuan Kerja menyusun Neraca SKPD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Format neraca SKPD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

### **PEMERINTAH DAERAH**

#### **NERACA SKPD .....**

**Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1**

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-	Jumlah	%
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
<b>Kas dan Setara Kas</b>				
Kas di Bendahara Penerimaan				
Kas di Bendahara Pengeluaran				
Setara Kas				
<b>Investasi Jangka Pendek</b>				
Investasi dalam Deposito				
Investasi dalam Saham				
Investasi dalam Obligasi				
<b>Piutang</b>				
Piutang Pajak				
Piutang Retribusi				
Piutang Iain-lain				
<b>Persediaan</b>				
Persediaan Alat Tulis Kantor				
Persediaan Alat Listrik				
Persediaan Material/Bahan				
Persediaan Benda Pos				
Persediaan Bahan Bakar				
Persediaan Bahan Makanan Pokok				
<b>Jumlah</b>				
<b>ASET TETAP</b>				
<b>Tanah</b>				
Tanah				
<b>Peralatan dan mesin</b>				
Alat-alat Berat				
Alat-alat Angkutan Darat				
Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor				
Alat-alat Angkutan di Air Bermotor				

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-	Jumlah	%
Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor				
Alat-alat Angkutan Udara				
Alat-alat Bengkel				
Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan				
Peralatan Kantor				
Perlengkapan Kantor				
Komputer				
Meubelair				
Peralatan Dapur				
Penghias Ruangan Rumah Tangga				
Alat-alat Studio				
Alat-alat Komunikasi				
Alat-alat Ukur				
Alat-alat Kedokteran				
Alat-alat Laboratorium				
Alat-alat Persenjataan/Keamanan				
<b>Gedung dan bangunan</b>				
Gedung Kantor				
Gedung Rumah Jabatan				
Gedung Rumah Dinas				
Gedung Gudang				
Bangunan Bersejarah				
Bangunan Monumen				
Tugu Peringatan				
<b>Jalan, Jaringan, dan Instalasi</b>				
Jalan				
Jembatan				
Jaringan Air				
Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota				
Instalasi Listrik dan Telepon				
<b>Aset Tetap Lainnya</b>				
Buku dan Kepustakaan				
Barang Bercorak				
Kesenian, Kebudayaan				
Hewan/Ternak dan Tanaman				
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
<b>Akumulasi Penyusutan</b>				
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap				
<b>Jumlah</b>				
<b>ASET LAINNYA</b>				
Tagihan Piutang Penjualan				

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-	Jumlah	%
Tagihan Tuntutan Ganti				
Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tidak Berwujud				
Aset Lain-lain				
<b>Jumlah</b>				
<b>JUMLAH ASET</b>				
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
Utang Bunga				
Utang Pajak				
Bagian Lancar Utang Jangka				
Pendapatan Diterima Di Muka				
Utang Jangka Pendek Lainnya				
<b>Jumlah</b>				
<b>EKUITAS</b>				
<b>Jumlah</b>				
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>				

#### KONVERSI UNTUK NERACA SKPD

Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh konversi pada bagan di bawah ini:

<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  ASET LANCAR</b>		<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  ASET LANCAR</b>
<b>Kas</b>		
1. Kas di Bendahara	→	1. Kas di Bendahara Penerimaan



2. Kas di Bendahara	→ 2. Kas di Bendahara Pengeluaran
3. Setara Kas	
<b>Investasi Jangka Pendek</b>	→ 3. Investasi Jangka Pendek
1. Investasi dalam Deposito	
2. Investasi dalam Saham	4. Piutang Pajak
3. Investasi dalam Obligasi	5. Piutang Retribusi
<b>Piutang</b>	6. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
1. Piutang Pajak	7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
2. Piutang Retribusi	8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
3. Piutang lain-lain	9. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
<b>Persediaan</b>	10. Bagian Lancar Tagihan
1. Persediaan Alat Tulis Kantor	11. Bagian Lancar Tuntutan
2. Persediaan Alat Listrik	12. Bagian Lancar Tuntutan
3. Persediaan Material/Bahan	13. Piutang Lainnya
4. Persediaan Benda Pos	14. Persediaan
5. Persediaan Bahan Bakar	
6. Persediaan Bahan Makanan	

Dari bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk SKPD, tidak terdapat perbedaan pada kelompok Aset Lancar.

<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ASET TETAP</b>	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ASET TETAP</b>
1. Tanah	1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin	2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan	3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	→ 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya	5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	6. Konstruksi dalam
7. Akumulasi Penyusutan	7. Akumulasi Penyusutan

Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan Instalasi berdasarkan akun pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan berdasarkan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.

<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</b> <b>ASET LAINNYA</b>		<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b> <b>ASET LAINNYA</b>
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		1. Tagihan Penjualan Angsuran
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	→	2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	→	3. Tuntutan Ganti Rugi
4. Aset Tidak Berwujud		4. Kemitraan dengan Pihak
5. Aset Lain-Lain		5. Aset Tidak Berwujud
		6. Aset Lain-Lain

Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Oleh karena itu, dalam konversi, sesuai dengan kejadian transaksinya, perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  <b>KEWAJIBAN</b>	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>  <b>KEWAJIBAN</b>
<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2. Uang Bunga	2. Utang Bunga
3. Utang Pinjaman Jangka Pendek	3. Bagian Lancar Utang dalam Negeri
4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
5. Pendapatan Diterima Dimuka*	5. Utang Jangka Pendek Lainnya
6. Utang Belanja**	
7. Utang Jangka Pendek Lainnya	

Perbedaan kelompok Kewajiban:

(\*) Dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah terdapat Pendapatan diterima dimuka. Hal ini terjadi dari transaksi pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Namun sebenarnya bila transaksi itu terjadi maka diakui/dicatat ke pendapatan sesuai dengan jenisnya dan bukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

(\*\*) Dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah terdapat Utang Belanja

<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  <b>EKUITAS DANA</b>	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>  <b>EKUITAS</b>
<b>Ekuitas Dana Lancar</b> 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)  2. Cadangan Piutang 3. Cadangan Persediaan	<b>Ekuitas</b>

4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek *	
<b>Ekuitas Dana Investasi</b>	
1. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
2. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	
<b>Ekuitas Dana Untuk Di Konsolidasi</b>	
Rekening Koran PPKD	

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 bagi komponen Ekuitas pada Neraca. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasi yaitu Rekening Koran PPKD. Rekening Koran PPKD merupakan rekening timbal balik atau reciprocal yang akan dieleminasi pada saat laporan keuangan dikonsolidasi sehingga perbedaan tersebut tidak memerlukan konversi.

(\*) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan *contra account* dari Ekuitas

#### **NERACA SKPD SETELAH KONVERSI**

Setelah melakukan konversi, maka format Neraca SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

### **PEMERINTAH DAERAH**

#### **NERACA SKPD**

**Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>20X1</b>	<b>20X0</b>
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		
Kas di bendahara penerimaan		
Kas di bendahara pengeluaran		

Uraian	20X1	20X0
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah		
Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Piutang Lainnya		
Persediaan		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Akumulasi Penyusutan		
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Perbendaharaan		
Tuntutan Gaji Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		
<b>JUMLAH ASET</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah		
Lainnya		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
<b>Jumlah Kewajiban</b>		
<b>EKUITAS</b>		
Ekuitas		
<b>Jumlah Ekuitas</b>		

Uraian	20X1	20X0
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		

#### **PENYUSUNAN NERACA PPKD SEBELUM KONVERSI**

Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD. Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sebelum menyusun neraca PPKD, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian jika ada). Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan agar nilai dari akun-akun neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi: penyesuaian untuk nilai piutang pendapatan, jumlah persediaan, nilai aset tetap. Format neraca PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut:

#### **PEMERINTAH DAERAH**

#### **NERACA PPKD**

**Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun	Jumlah	%
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
<b>Kas</b>				
Kas diKas Daerah				
<b>Investasi Jangka Pendek</b>				
Investasi dalam Saham				
Investasi dalam Obligasi				
<b>Piutang</b>				
Piutang Pajak				
Piutang Retribusi				
Piutang Dana Bagi Hasil				
Piutang Dana Alokasi Umum				
Piutang Dana Alokasi Khusus				
Piutang Lain-Lain				
<b>Jumlah</b>				
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>				
<b>Investasi Permanen</b>				
Pinjaman kepada Perusahaan				
Pinjaman kepada Perusahaan				
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah				
Investasi dalam Surat Utang				
Investasi Dana Bergulir				
Investasi Non Permanen Lainnya				
<b>Investasi Non Permanen</b>				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun	Jumlah	%
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan				
Penyertaan Modal Perusahaan				
Investasi Permanen Lainnya				
<b>Jumlah</b>				
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah				
Peralatan dan Mesin				
Gedung dan Bangunan				
Jalan, Jaringan dan Instalasi				
Aset Tetap Lainnya				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan				
<b>Jumlah</b>				
<b>ASET LAINNYA</b>				
Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Tuntutan Gaji Kerugian				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tak Berwujud				
Aset Lain-lain				
<b>Jumlah</b>				
<b>ASET UNTUK DIKONSOLIDASI</b>				
RK-SKPD.....				
RK-SKPD .....				
<b>Jumlah</b>				
<b>JUMLAH ASET</b>				
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
Utang Bunga				
Utang Pajak				
Bagian Lancar Utang Jangka				
Pendapatan Diterima di Muka				
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>				
Utang Dalam Negeri				
Utang Luar Negeri				
<b>Jumlah</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas				
<b>Jumlah</b>				
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>				

#### KONVERSI UNTUK NERACA PPKD

Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan di bawah ini:

<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>ASET LANCAR</b>
<b>Kas</b>	<b>A. Aset Lancar</b>
1. Kas di Kas Daerah	1. Kas di Kas Daerah
<b>Investasi Jangka Pendek</b>	4. Investasi Jangka Pendek
<b>Piutang</b>	5. Piutang Pajak
1. Piutang Pajak	6. Piutang Retribusi
2. Piutang Retribusi	7. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara
3. Piutang Dana Bagi Hasil	8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
4. Piutang Dana Alokasi Umum	9. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
5. Piutang Dana Alokasi Khusus	10. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6. Piutang Lain-Lain	11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
	12. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
	13. Piutang Lainnya
<b>Persediaan</b>	14. Persediaan

Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selain piutang pajak dan piutang retribusi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum, Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tidak disajikan contohnya, sehingga perlu dikonversikan ke piutang lainnya.

Kemudian dalam format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah diberikan kelompok akun Bagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Bagian



Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan tidak ada, sehingga dimasukkan ke dalam akun Piutang Lain-lain.

<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>
<b>A. Investasi Non Permanen</b>	<b>A. Investasi Non Permanen</b>
1. Pinjaman kepada Perusahaan	1. Pinjaman kepada Perusahaan
2. Pinjaman kepada Perusahaan	2. Pinjaman kepada Perusahaan
3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3. Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
4. Investasi dalam Surat Utang	4. Investasi dalam Surat Utang
5. Investasi Dana Bergulir	5. Investasi dalam
6. Investasi Non Permanen	6. Investasi Non Permanen Lainnya
<b>B. Investasi Permanen</b>	<b>B. Investasi Permanen</b>
1. Penyertaan Modal Pemerintah	1. Penyertaan Modal Pemerintah
2. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	2. Investasi Permanen Lainnya
3. Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	
4. Investasi Permanen Lainnya	

Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka Panjang:

- (a) Dalam format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, Investasi dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok investasi non permanen, sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok investasi permanen;
- (b) Dalam format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat akun Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non Permanen, yang di dalam format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya;

- (c) Dalam format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat akun Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ke dalam Investasi Permanen, yang di dalam format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tidak ada, sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya.

<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  <b>ASET TETAP</b>		<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>  <b>ASET TETAP</b>
1. Tanah		1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin		2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan		3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi	→	4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya		5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan		6. Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan		7. Akumulasi Penyusutan

Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan Instalasi berdasarkan akun pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,, sedangkan berdasarkan format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan jaringan termasuk di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.

<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  <b>ASET LAINNYA</b>		<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>  <b>ASET LAINNYA</b>
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		1. Tagihan Penjualan Angsuran
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	→	2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	→	3. Tuntutan Ganti Rugi
4. Aset Tidak Berwujud		4. Kemitraan dengan Pihak
5. Aset Lain-Lain		5. Aset Tidak Berwujud
		6. Aset Lain-Lain

Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah hanya ada Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam dua kelompok seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Oleh karena itu, sesuai dengan kejadian transaksinya perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  <b>KEWAJIBAN</b>		<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>  <b>KEWAJIBAN</b>
<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga	→	1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2. Utang Bunga		2. Utang Bunga
3. Utang Pajak		3. Bagian Lancar Utang dalam

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya
5. Pendapatan Diterima di Muka	→	5. Utang Jangka Pendek Lainnya
<b>B. Kewajiban Jangka Panjang</b>		<b>B. Kewajiban Jangka Panjang</b>
1. Utang Dalam Negeri		1. Utang Dalam Negeri
2. Utang Luar Negeri	→	2. Utang Jangka Panjang

Perbedaan kelompok Kewajiban:

- (a) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat Utang Pajak yang dimasukkan ke dalam Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
- (b) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan Diterima di Muka yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
- (c) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat Utang Luar Negeri yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Panjang Lainnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

<b>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</b>
<b>EKUITAS DANA</b>		<b>EKUITAS</b>
<b>A. Ekuitas Dana Lancar</b>		<b>Ekuitas</b>
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		
2. Cadangan Piutang		
3. Cadangan Persediaan		
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka		

<b>B. Ekuitas Dana Investasi</b>	
1. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	
2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap	
3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan)	
4. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka	
<b>C. Ekuitas Dana Cadangan</b>	
1. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	

Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 bagi komponen Ekuitas pada Neraca yaitu pada komponen Ekuitas Dana Lancar. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah komponen Ekuitas Dana Lancar tidak terdapat Pendapatan Yang Ditangguhkan sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 komponen Ekuitas Dana Lancar terdapat Pendapatan Yang Ditangguhkan.

- (\*) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan *contra account* dari Ekuitas Dana Lancar
- (\*\*) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang merupakan *contra account* dan Ekuitas Dana Investasi

#### **NERACA PPKD SETELAH KONVERSI**

Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

#### **PEMERINTAH DAERAH**

#### **NERACA PPKD**

**Per 31 Desember 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>20X1</b>	<b>20X0</b>
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>		

<b>Uraian</b>	<b>20X1</b>	<b>20X0</b>
Kas di Kas Daerah		
Investasi Jangka Pendek		
Piutang Pajak		
Piutang Retribusi		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
Piutang Lainnya		
(Penyisihan Piutang Tak Tertagih)		
Persediaan		
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>Investasi Non Permanen</b>		
Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		
Investasi dalam Surat Utang Negara		
Investasi dalam Proyek Pembangunan		
Investasi Non Permanen Lainnya		
<b>Investasi Permanen</b>		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Investasi Permanen Lainnya		
<b>ASET TETAP</b>		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
(Akumulasi Penyusutan)		
<b>Jumlah Aset</b>		
<b>DANA CADANGAN</b>		
Dana Cadangan		
<b>Jumlah Dana</b>		
<b>ASET LAINNYA</b>		
Tagihan Penjualan Angsuran		
Tuntutan Perbendaharaan		
Tuntutan Gaji Rugi		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tak Berwujud		
Aset Lain-lain		
<b>Jumlah Aset</b>		
<b>Rekening Koran - SKPD.....</b>		
<b>Rekening Koran - SKPD.....</b>		

Uraian	20X1	20X0
<b>JUMLAH ASET</b>		
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka</b>		
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Utang dalam Negeri - Obligasi		
Utang Jangka Panjang Lainnya		
<b>Jumlah Kewajiban Jangka</b>		
<b>EKUITAS</b>		
<b>Jumlah Ekuitas</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		

#### **NERACA GABUNGAN PEMDA**

Neraca gabungan Pemda disusun pada akhir tahun anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang sifatnya reciprocal (timbang balik antar unit dalam satu Pemda) harus dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun - akun *reciprocal*. Akun-akun resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD, sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini terjadi karena hubungan SKPD dan PPKD adalah hubungan Pusat-Cabang. Dimana PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan PPKD bertindak sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu entitas pelaporan Pemda yang bersangkutan.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
LAPORAN ARUS KAS**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

**Ruang Lingkup**

*Pemerintah daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.*

**Manfaat Informasi Arus Kas**

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).



## **DEFINISI**

*Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:*

*Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

*Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.*

*Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.*

*Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.*

*Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.*

*Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah daerah.*

*Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.*

*Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.*

*Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.*

**Beban transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Dana cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

**Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

**Entitas Pelaporan** adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

**Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

**Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

**Kemitraan** adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

**Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

**Mata uang asing** adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

**Mata uang pelaporan** adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

**Metode biaya** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

**Metode ekuitas** adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

***Metode Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.***

***Metode tidak langsung adalah metode penyajian arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.***

***Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.***

***Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.***

***Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.***

***Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.***

***Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.***

***Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.***

***Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.***

***Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.***

#### **Kas dan Setara Kas**

***Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.***

Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara

kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

### **ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS**

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.

***Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD.***

Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum daerah dan/atau kuasa bendahara umum daerah.

### **PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS**

***Laporan arus kas adalah bagian dari laporan financial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.***

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

**17. Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut.**

18. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

### **Aktivitas Operasi**

**19. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.**

20. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

21. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:

- (a) Pendapatan Asli Daerah;
- (b) Dana Perimbangan; dan
- (c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

22. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

- (a) Belanja Pegawai;
- (b) Belanja Barang;
- (c) Bunga;
- (d) Subsidi;
- (e) Hibah;
- (f) Bantuan Sosial;
- (g) Belanja Bagi Hasil; dan
- (h) Belanja Tidak Terduga.

**23. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.**

**24. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum Jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berfalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai**

**aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.**

### **Aktivitas Investasi**

**25. Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.**

26. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

27. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- (a) Penjualan Aset Tetap;
- (b) Penjualan Aset Lainnya;
- (c) Pencairan Dana Cadangan;
- (d) Penerimaan dari privatisasi Perusahaan Daerah/Divestasi;
- (e) Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.

28. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- (a) Perolehan Aset Tetap;
- (b) Perolehan Aset Lainnya;
- (c) Pembentukan Dana Cadangan;
- (d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- (e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

### **Aktivitas Pendanaan**

**29. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.**

30. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

31. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- (a) Penerimaan Utang;
- (b) Penerimaan dari utang Obligasi Pemerintah daerah;
- (c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah; dan
- (d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.

32. Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- (a) Pembayaran Pokok Utang;
- (b) Pembayaran pokok utang Obligasi Pemerintah Daerah;
- (c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
- (d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah; dan
- (e) Pembentukan Dana Cadangan.

### **Aktivitas Transitoris**

**33. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.**

34. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.

35. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

36. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

### **PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI, PENDANAAN, DAN TRANSITORIS**

**37. Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.**

**38. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode Langsung. Metode langsung ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.**

39. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;

- (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan
- (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

**PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH**

**40. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:**

- (a) **Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.**
- (b) **Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.**

**PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS**

**41.** Format Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah :

**PEMERINTAH DAERAH  
LAPORAN ARUS KAS  
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>		
3	Penerimaan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Penerimaan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Penerimaan Lain-Lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Penerimaan Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Penerimaan Hibah	XXX	XXX
16	Penerimaan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Penerimaan Lainnya	XXX	XXX
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	XXX	XXX
19	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 18)</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
20	<b>Arus Keluar Kas</b>		
21	Pembayaran Pegawai	XXX	XXX
22	Pembayaran Barang	XXX	XXX
23	Pembayaran Bunga	XXX	XXX
24	Pembayaran Subsidi	XXX	XXX
25	Pembayaran Hibah	XXX	XXX
26	Pembayaran Bantuan Sosial	XXX	XXX
27	Pembayaran Tak Terduga	XXX	XXX
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
30	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX



31	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
32	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
33	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-32)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
34	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
35	<b>Arus Masuk Kas</b>		
36	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
37	Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
38	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
39	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
40	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
41	Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
42	Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
44	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
45	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
46	<b>Arus Keluar Kas</b>		
47	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
48	Perolehan Tanah	XXX	XXX
49	Perolehan Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
50	Perolehan Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
51	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
52	Perolehan Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
53	Perolehan Aset Lainnya	XXX	XXX
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
55	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
56	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
57	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
58	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
59	<b>Arus Masuk Kas</b>		
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
61	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
63	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
64	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
65	Pinjaman Dalam negeri - Lainnya	XXX	XXX
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	XXX	XXX
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
69	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
70	<b>Arus Keluar Kas</b>		
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
79	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
80	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
81	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
82	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
83	<b>Arus Masuk Kas</b>		
84	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
85	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (84)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
86	<b>Arus Keluar Kas</b>		
87	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	XXX	XXX
88	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
89	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (84 - 87)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
90	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
91	<b>Saldo Awal Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
92	<b>Saldo Akhir Kas di BUD &amp; Kas di Bendahara Pengeluaran (90+91)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
93	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>
94	<b>Saldo Akhir Kas (92+93)</b>	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>

#### **ARUS KAS MATA UANG ASING**

**42. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.**

**43. Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.**

44. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

#### **BUNGA DAN BAGIAN LABA**

**45. Aruskas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.**

46. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

47. Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

48. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

#### **PEROLEHAN DAN PELEPASAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PERUSAHAAN DAERAH/KEMITRAAN DAN UNIT OPERASI LAINNYA**

49. Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

**50. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan**

**kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan.**

**51. Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.**

**52. Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.**

**53. Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:**

- (a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;**
- (b) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;**
- (c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan**
- (d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.**

54. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

**55. Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.**

#### **TRANSAKSI BUKAN KAS**

**56. Transaksi operasi, investasi dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

57. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

## **KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS**

**58. Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.**

## **PENGUNGKAPAN LAINNYA**

**59. Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

60. Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

61. Contoh kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas adalah kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
LAPORAN OPERASIONAL**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**1. Tujuan**

Tujuan pernyataan standar Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

**2. Ruang Lingkup**

*Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.*

*Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan daerah.*

**MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL**

*Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.*

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintah daerah, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- (a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

- (b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; dan
- (d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **DEFINISI**

***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:***

***Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenalkannya pencatatan penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak diperkenalkannya pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.***

***Bantuan Keuangan adalah beban pemerintah dalam bentuk bantuan uang kepada pemerintah lainnya yang digunakan untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.***

***Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.***

***Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.***

***Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.***

***Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.***

***Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau***

*lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.*

*Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.*

*Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.*

*Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.*

*Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.*

*Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.*

*Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.*

*Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.*

#### **PERIODE PELAPORAN**

*Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:*

*(a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;*

**(b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.**

Manfaat Laporan Operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah daerah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu.

## **STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL**

**Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.**

**Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:**

- (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;**
- (b) cakupan entitas pelaporan;**
- (c) periode yang dicakup;**
- (d) mata uang pelaporan;**
- (e) satuan angka yang digunakan.**

**Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:**

- (a) Pendapatan-LO;**
- (b) Beban;**
- (c) Surplus/Defisit dari operasi;**
- (d) Kegiatan non operasional;**
- (e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;**
- (f) Pos Luar Biasa;**
- (g) Surplus/Defisit-LO.**

**Adapun Kode Akun untuk Beban berdasarkan Peraturan Dalam Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang tercantum dalam Bagan Akun Standar (BAS) adalah sebagai berikut :**

Kode Akun				Uraian Akun
8				PENDAPATAN - LO
8	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
8	1	1		Pendapatan Pajak Daerah - LO
8	1	1	01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO



8	1	1	01	01	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	1	01	02	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	1	01	03	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	1	01	04	PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8	1	1	01	05	PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8	1	1	01	06	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8	1	1	01	07	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8	1	1	01	08	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8	1	1	01	09	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	1	01	10	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	1	01	11	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	1	01	12	Dst .....
8	1	1	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO
8	1	1	02	01	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	1	02	02	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	1	02	03	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	1	02	04	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO
8	1	1	02	05	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO
8	1	1	02	06	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8	1	1	02	07	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8	1	1	02	08	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8	1	1	02	09	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	1	02	10	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	1	02	11	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	1	02	12	Dst.....
8	1	1	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	1	1	03	01	Pajak Bahan Bakar Premium - LO
8	1	1	03	02	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO
8	1	1	03	03	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LO
8	1	1	03	04	Pajak Bahan Bakar Solar - LO
8	1	1	03	05	Pajak Bahan Bakar Gas - LO
8	1	1	03	06	Dst .....
8	1	1	04		Pajak Air Permukaan - LO
8	1	1	04	01	Pajak Air Permukaan - LO
8	1	1	05		Pajak Rokok - LO
8	1	1	05	01	Pajak Rokok - LO
8	1	1	06		Pajak Hotel - LO
8	1	1	06	01	Hotel - LO
8	1	1	06	02	Motel - LO
8	1	1	06	03	Losmen - LO
8	1	1	06	04	Gubuk Pariwisata - LO
8	1	1	06	05	Wisma Pariwisata - LO
8	1	1	06	06	Pesanggrahan - LO
8	1	1	06	07	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LO
8	1	1	06	08	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LO
8	1	1	06	09	Dst.....
8	1	1	07		Pajak Restoran - LO
8	1	1	07	01	Restoran - LO
8	1	1	07	02	Rumah Makan - LO
8	1	1	07	03	Kafetaria - LO
8	1	1	07	04	Kantin - LO
8	1	1	07	05	Warung - LO
8	1	1	07	06	Bar - LO
8	1	1	07	07	Jasa Boga/ Katering - LO
8	1	1	07	08	Dst.....
8	1	1	08		Pajak Hiburan - LO
8	1	1	08	01	Tontonan Film/Bioskop - LO
8	1	1	08	02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO
8	1	1	08	03	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LO
8	1	1	08	04	Pameran - LO
8	1	1	08	05	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LO
8	1	1	08	06	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO
8	1	1	08	07	Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO
8	1	1	08	08	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO
8	1	1	08	09	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO
8	1	1	08	10	Pertandingan Olahraga - LO
8	1	1	08	11	Dst.....
8	1	1	09		Pajak Reklame - LO
8	1	1	09	01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO
8	1	1	09	02	Pajak Reklame Kain - LO
8	1	1	09	03	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO
8	1	1	09	04	Pajak Reklame Selebaran - LO
8	1	1	09	05	Pajak Reklame Berjalan - LO
8	1	1	09	06	Pajak Reklame Udara - LO
8	1	1	09	07	Pajak Reklame Apung - LO
8	1	1	09	08	Pajak Reklame Suara - LO
8	1	1	09	09	Pajak Reklame Film/Slide - LO
8	1	1	09	10	Pajak Reklame Peragaan - LO
8	1	1	09	11	Dst.....

8	1	1	10		Pajak Penerangan Jalan - LO
8	1	1	10	01	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LO
8	1	1	10	02	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO
8	1	1	11		Pajak Parkir - LO
8	1	1	11	01	Pajak Parkir - LO
8	1	1	12		Pajak Air Tanah - LO
8	1	1	12	01	Pajak Air Tanah - LO
8	1	1	13		Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	1	13	01	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	1	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8	1	1	14	01	Asbes - LO
8	1	1	14	02	Batu Tulis - LO
8	1	1	14	03	Batu setengah permata - LO
8	1	1	14	04	Batu Kapur - LO
8	1	1	14	05	Batu Apung - LO
8	1	1	14	06	Batu Permata - LO
8	1	1	14	07	Bentonit - LO
8	1	1	14	08	Dolomit - LO
8	1	1	14	09	Feldspar - LO
8	1	1	14	10	Garam Batu (Halite) - LO
8	1	1	14	11	Grafit - LO
8	1	1	14	12	Granit/Andesit - LO
8	1	1	14	13	Gips - LO
8	1	1	14	14	Kalsit - LO
8	1	1	14	15	Kaolin - LO
8	1	1	14	16	Leusit - LO
8	1	1	14	17	Magnesit - LO
8	1	1	14	18	Mika - LO
8	1	1	14	19	Marmer - LO
8	1	1	14	20	Nitrat - LO
8	1	1	14	21	Opsidien - LO
8	1	1	14	22	Oker - LO
8	1	1	14	23	Pasir dan kerikil - LO
8	1	1	14	24	Pasir Kuarsa - LO
8	1	1	14	25	Perlit - LO
8	1	1	14	26	Phospat - LO
8	1	1	14	27	Talk - LO
8	1	1	14	28	Tanah Serap (Fullers earth) - LO
8	1	1	14	29	Tanah Diatome - LO
8	1	1	14	30	Tanah Liat - LO
8	1	1	14	31	Tawas (Alum) - LO
8	1	1	14	32	Tras - LO
8	1	1	14	33	Yarosif - LO
8	1	1	14	34	Zeolit - LO
8	1	1	14	35	Basal - LO
8	1	1	14	36	Trakit - LO
8	1	1	14	37	Mineral bukan logam dan lainnya - LO
8	1	1	15		Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8	1	1	15	01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8	1	1	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
8	1	1	16	01	BPHTB - Pemindehan Hak - LO
8	1	1	16	02	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO
<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>
8	1	2	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8	1	2	01	01	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO
8	1	2	01	02	Puskesmas keliling - LO
8	1	2	01	03	Puskesmas pembantu - LO
8	1	2	01	04	Balai Pengobatan - LO
8	1	2	01	05	Rumah Sakit Umum Daerah - LO
8	1	2	01	06	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda - LO
8	1	2	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8	1	2	02	01	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LO
8	1	2	02	02	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LO
8	1	2	02	03	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO
8	1	2	03		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8	1	2	03	01	Kartu Tanda Penduduk - LO
8	1	2	03	02	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO
8	1	2	03	03	Kartu Identitas Kerja - LO
8	1	2	03	04	Kartu Penduduk Sementara - LO
8	1	2	03	05	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
8	1	2	03	06	Kartu Keluarga - LO
8	1	2	03	07	Akta Catatan Sipil - LO
8	1	2	04		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8	1	2	04	01	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO
8	1	2	04	02	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO

8	1	2	05		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	2	05	01	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	2	06		Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8	1	2	06	01	Pelataran - LO
8	1	2	06	02	Los - LO
8	1	2	06	03	Kios - LO
8	1	2	07		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8	1	2	07	01	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8	1	2	07	02	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8	1	2	07	03	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8	1	2	07	04	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8	1	2	07	05	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8	1	2	07	06	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8	1	2	07	07	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8	1	2	07	08	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8	1	2	07	09	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8	1	2	07	10	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8	1	2	07	11	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8	1	2	07	12	Dst.....
8	1	2	08		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	2	08	01	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	2	08	02	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO
8	1	2	08	03	Alat Penyelamatan Jiwa - LO
8	1	2	08	04	Dst.....
8	1	2	09		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8	1	2	09	01	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO
8	1	2	09	02	Penyediaan Peta Foto - LO
8	1	2	09	03	Penyediaan Peta Digital - LO
8	1	2	09	04	Penyediaan Peta Tematik - LO
8	1	2	09	05	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO
8	1	2	10		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	2	10	01	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	2	11		Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8	1	2	11	01	Rumah Tangga - LO
8	1	2	11	02	Perkantoran - LO
8	1	2	11	03	Industri - LO
8	1	2	12		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8	1	2	12	01	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LO
8	1	2	12	02	Pengujian dalam keadaan terbungkus - LO
8	1	2	13		Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8	1	2	13	01	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO
8	1	2	13	02	Pelatihan Teknis - LO
8	1	2	14		Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8	1	2	14	01	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO
8	1	2	15		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8	1	2	15	01	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
8	1	2	15	02	Laboratorium - LO
8	1	2	15	03	Ruangan -LO
8	1	2	15	04	Kendaraan Bermotor - LO
8	1	2	16		Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8	1	2	16	01	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO
8	1	2	16	02	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO
8	1	2	16	03	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO
8	1	2	17		Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8	1	2	17	01	Pelelangan Ikan - LO
8	1	2	17	02	pelelangan Ternak - LO
8	1	2	17	03	Pelelangan Hasil Bumi - LO
8	1	2	17	04	Pelelangan Hasil Hutan - LO
8	1	2	17	05	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LO
8	1	2	18		Retribusi Terminal - LO
8	1	2	18	01	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO
8	1	2	18	02	Tempat Kegiatan Usaha - LO
8	1	2	18	03	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO
8	1	2	19		Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	2	19	01	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	2	20		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8	1	2	20	01	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO
8	1	2	21		Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8	1	2	21	01	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LO
8	1	2	21	02	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LO

8	1	2	22		Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8	1	2	22	01	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO
8	1	2	23		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8	1	2	23	01	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
8	1	2	23	02	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO
8	1	2	23	03	Pelayanan Tempat olahraga - LO
8	1	2	24		Retribusi Penyebrangan Air - LO
8	1	2	24	01	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO
8	1	2	24	02	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO
8	1	2	25		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	2	25	01	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	2	26		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	2	26	01	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	2	27		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	2	27	01	Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	2	28		Retribusi Izin Gangguan - LO
8	1	2	28	01	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	28	02	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO
8	1	2	29		Retribusi Izin Trayek - LO
8	1	2	29	01	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	29	02	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO
8	1	2	30		Retribusi Izin Perikanan - LO
8	1	2	30	01	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO
8	1	2	30	02	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO
8	1	2	31		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8	1	2	31	01	Penggunaan ruas jalan tertentu - LO
8	1	2	31	02	Penggunaan koridor tertentu -LO
8	1	2	31	03	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang - LO
8	1	2	32		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8	1	2	32	01	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO
8	1	3			<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO</b>
8	1	3	01		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO
8	1	3	01	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah - LO
8	1	3	01	02	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD ..... - LO
8	1	3	01	03	Dst .....
8	1	3	02		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN -LO
8	1	3	02	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN - LO
8	1	3	02	02	Dst .....
8	1	3	03		Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LO
8	1	3	03	01	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta.... - LO
8	1	3	03	02	Dst .....
8	1	4			<b>Lain-lain PAD Yang Sah - LO</b>
8	1	4	01		Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8	1	4	01	01	Hasil Penjualan Tanah - LO
8	1	4	01	02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO
8	1	4	01	03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
8	1	4	01	04	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
8	1	4	01	05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO
8	1	4	02		Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8	1	4	02	01	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8	1	4	03		Penerimaan Jasa Giro - LO
8	1	4	03	01	Jasa Giro Kas Daerah - LO
8	1	4	03	02	Jasa Giro Kas Bendahara - LO
8	1	4	03	03	Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8	1	4	03	04	Dst .....
8	1	4	04		Pendapatan Bunga - LO
8	1	4	04	01	Pendapatan Bunga Deposito ..... - LO
8	1	4	04	02	Pendapatan Bunga Dana Bergulir ..... - LO
8	1	4	04	03	Dst .....
8	1	4	05		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8	1	4	05	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO
8	1	4	05	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO

8	1	4	06		Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8	1	4	06	01	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO
8	1	4	06	02	Penerimaan Potongan dari ..... - LO
8	1	4	06	03	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari ..... - LO
8	1	4	06	04	Dst .....
8	1	4	07		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8	1	4	07	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8	1	4	07	02	Dst .....
8	1	4	08		Pendapatan Denda Pajak - LO
8	1	4	08	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	08	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	08	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	08	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO
8	1	4	08	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
8	1	4	08	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8	1	4	08	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8	1	4	08	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8	1	4	08	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
8	1	4	08	10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8	1	4	08	11	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8	1	4	08	12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO
8	1	4	08	13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8	1	4	08	14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8	1	4	08	15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8	1	4	08	16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
8	1	4	09		Pendapatan Denda Retribusi - LO
8	1	4	09	01	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8	1	4	09	02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8	1	4	09	03	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8	1	4	09	04	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - LO
8	1	4	09	05	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8	1	4	09	06	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8	1	4	09	07	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8	1	4	09	08	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8	1	4	09	09	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8	1	4	09	10	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8	1	4	09	11	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8	1	4	09	12	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8	1	4	09	13	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8	1	4	09	14	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8	1	4	09	15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8	1	4	09	16	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8	1	4	09	17	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8	1	4	09	18	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
8	1	4	09	19	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8	1	4	09	20	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8	1	4	09	21	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8	1	4	09	22	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8	1	4	09	23	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8	1	4	09	24	Pendapatan Denda Retribusi penyebrangan Air - LO
8	1	4	09	25	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8	1	4	09	26	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8	1	4	09	27	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8	1	4	09	28	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
8	1	4	09	29	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
8	1	4	09	30	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO
8	1	4	09	31	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8	1	4	09	32	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8	1	4	10		Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8	1	4	10	01	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8	1	4	10	02	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8	1	4	10	03	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
8	1	4	10	04	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO
8	1	4	11		Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
8	1	4	11	01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
8	1	4	11	02	Dst .....
8	1	4	12		Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
8	1	4	12	01	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO
8	1	4	12	02	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
8	1	4	12	03	Dst .....
8	1	4	13		Pendapatan dari Pengembalian -LO
8	1	4	13	01	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO
8	1	4	13	02	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8	1	4	13	03	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
8	1	4	13	04	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
8	1	4	13	05	Dst .....
8	1	4	14		Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
8	1	4	14	01	Fasilitas Sosial - LO
8	1	4	14	02	Fasilitas Umum - LO

8	1	4	14	03	Dst .....
8	1	4	15		Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8	1	4	15	01	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO
8	1	4	15	02	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
8	1	4	15	03	Dst .....
8	1	4	16		Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8	1	4	16	01	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8	1	4	16	02	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8	1	4	16	03	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
8	1	4	16	04	Dst .....
8	1	4	17		Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8	1	4	17	01	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO
8	1	4	17	02	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO
8	1	4	17	03	Dst.....
8	1	4	18		Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8	1	4	18	01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8	1	4	18	02	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO
8	1	4	18	03	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8	1	4	18	04	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
8	1	4	19		Pendapatan Zakat* - LO
8	1	4	19	01	Pendapatan Zakat*..... - LO
8	1	4	19	02	Dst .....
8	1	4	20		Pendapatan BLUD - LO
8	1	4	20	01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
8	1	4	20	02	Pendapatan Hibah BLUD - LO
8	1	4	20	03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8	1	4	20	04	Dst .....
8	1	4	21		Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
8	1	4	21	01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
<b>8</b>	<b>2</b>				<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO</b>
8	2	1	01		Bagi Hasil Pajak - LO
8	2	1	01	01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO
8	2	1	01	02	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO
8	2	1	01	03	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO
8	2	1	01	04	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 -LO
8	2	1	01	05	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO
8	2	1	02		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8	2	1	02	01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO
8	2	1	02	02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
8	2	1	02	03	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
8	2	1	02	04	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO
8	2	1	02	05	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO
8	2	1	02	06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
8	2	1	02	07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO
8	2	1	02	08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO
8	2	1	02	09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
8	2	1	02	10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
8	2	1	03		Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8	2	1	03	01	Dana Alokasi Umum - LO
8	2	1	04		Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
8	2	1	04	01	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO
8	2	1	04	02	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO
8	2	1	04	03	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO
8	2	1	04	04	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO
8	2	1	04	05	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO
8	2	1	04	06	DAK Bidang Kehutanan - LO
8	2	1	04	07	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO
8	2	1	04	08	DAK Bidang Kesehatan - LO
8	2	1	04	09	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8	2	1	04	10	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO
8	2	1	04	11	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO
8	2	1	04	12	DAK Bidang Perdagangan - LO
8	2	1	04	13	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO
8	2	1	04	14	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO
8	2	1	04	15	DAK Bidang Pertanian - LO
8	2	1	04	16	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO
8	2	1	04	17	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO
8	2	1	04	18	DAK Bidang Pendidikan - LO
8	2	1	04	19	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
8	2	1	04	20	Dst.....
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO</b>
8	2	2	01		Dana Otonomi Khusus - LO
8	2	2	01	01	Dana Otonomi Khusus - LO

8	2	2	01	02	Dana Tambahan Infrastruktur- LO
8	2	2	02		Dana Keistimewaan - LO**
8	2	2	02	01	Dana Keistimewaan - LO
8	2	2	03		Dana Penyesuaian - LO
8	2	2	03	01	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8	2	2	03	02	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8	2	2	03	03	Dana Insentif Daerah - LO
8	2	2	03	04	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO
8	2	2	03	05	Bantuan Operasional Sekolah - LO***
8	2	2	03	06	Dst .....
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>
8	2	3	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8	2	3	01	01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak..... - LO
8	2	3	01	02	Dst .....
8	2	3	02		Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO
8	2	3	02	01	Pendapatan Bagi hasil Lainnya..... - LO
8	2	3	02	02	Dst .....
8	2	3	03		Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
8	2	3	03	01	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Bantuan Keuangan - LO</b>
8	2	4	01		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
8	2	4	01	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi ..... - LO
8	2	4	01	02	Dst .....
8	2	4	02		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8	2	4	02	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ..... - LO
8	2	4	02	02	Dst ....
8	2	4	03		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
8	2	4	03	01	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota ..... - LRA
8	2	4	03	02	Dst .....
<b>8</b>	<b>3</b>				<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Pendapatan Hibah - LO</b>
8	3	1	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8	3	1	01	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8	3	1	02		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	3	1	02	01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8	3	1	03		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8	3	1	03	01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri..... - LO
8	3	1	03	02	Dst .....
8	3	1	04		Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO
8	3	1	04	01	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO
8	3	1	04	02	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Dana Darurat - LO</b>
8	3	2	01		Dana Darurat - LO
8	3	2	01	01	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8	3	2	01	02	Dst .....
<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Pendapatan Lainnya - LO</b>
8	3	3	01		Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	01	01	Pendapatan Lainnya - LO
8	3	3	01	02	Dst .....
<b>8</b>	<b>4</b>				<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>
<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			<b>Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO</b>
8	4	1	01		Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8	4	1	01	01	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
8	4	1	01	02	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
8	4	1	01	03	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
8	4	1	01	04	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
8	4	1	01	05	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO
8	4	1	01	06	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
8	4	1	01	07	Dst .....
<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO</b>
8	4	2	01		Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8	4	2	01	01	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
8	4	2	01	02	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
8	4	2	01	03	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO
8	4	2	01	04	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
8	4	2	01	05	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
8	4	2	01	06	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
8	4	2	01	07	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
8	4	2	01	08	Dst .....
<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>			<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>

8	4	3	01		Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	01	01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8	4	3	01	02	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO
8	4	3	01	03	Dst .....
8	5				PENDAPATAN LUAR BIASA - LO
8	5	1			Pendapatan Luar Biasa - LO
8	5	1	01		Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
8	5	1	01	01	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

**Kode Akun untuk pos Beban-LO ditunjukkan pada Bagan Akun Standar (BAS) dalam Kebijakan Akuntansi Nomor 18 mengenai Beban.**

### **INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- 1. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**
- 2. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

### **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL**

- 1. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**
- 2. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.**
- 3. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.**

### **SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

- 1. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.**
- Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.



- 3. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.**

#### **POS LUAR BIASA**

- 1. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.**
2. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - (a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
  - (b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
  - (c) kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- 3. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

#### **SURPLUS/DEFISIT-LO**

- 1. Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.**
2. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

- 1. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.**
- 2. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**
- 3. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah**

*berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.*

4. *Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:*
  - a) *Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi*
  - b) *Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

**TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN BERBENTUK BARANG/JASA**

1. *Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.*
2. *Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.*

Format Laporan Operasional (LO) Pemerintah Daerah :

**PEMERINTAH DAERAH  
LAPORAN OPERASIONAL  
Per 31 Desember Tahun n-1 dan Tahun n-2**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun n-1</b>	<b>Tahun n-2</b>	<b>Kenaikan /Penurunan</b>	<b>(%)</b>
1	2	3		4	5
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)</b>				

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun n-1</b>	<b>Tahun n-2</b>	<b>Kenaikan /Penurunan</b>	<b>(%)</b>
1	2	3		4	5
8					
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -</b>				
	<b>DANA PERIMBANGAN</b>				
10	Dana Bagi Hasil Pajak				
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
12	Dana Alokasi Umum				
13	Dana Alokasi Khusus				
14	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d14)</b>				
15	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -</b>				
	<b>LAINNYA</b>				
16	Dana Otonomi Khusus				
17	Dana Penyesuaian				
18	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)</b>				
19	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				
21	Pendapatan Bagi Hasil lainnya				
22	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) Jumlah Pendapatan Transfer (15+20+25)</b>				
23	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>				
24	Pendapatan Hibah				
25	Pendapatan Dana Darurat Pendapatan lainnya				
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)</b>				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 +26+32)</b>				
	<b>BEBAN</b>				
	Beban Pegawai				
	Beban Persediaan				
	Beban Jasa				
	Beban Pemeliharaan				
	Beban Perjalanan Dinas				
	Beban Bunga				
	Beban Subsidi				
	Beban Hibah				
	Beban Bantuan Sosial				
	Beban Penyusutan				
	Beban Transfer				
	Beban Lain-lain				
	<b>JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)</b>				
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)</b>				
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>				
	Surplus Penjualan Aset Nonlancar				

No	Uraian	Tahun n-1	Tahun n-2	Kenaikan /Penurunan	(%)
1	2	3		4	5
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Defisit Penjualan Aset Nonlancar Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya <b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (53 s/d 57)</b> <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50+58)</b>  <b>POS LUAR BIASA</b> Pendapatan Luar Biasa Beban Luar Biasa <b>POS LUAR BIASA (62-63)</b> <b>SURPLUS/DEFISIT-LO (59+64)</b>				

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**1. Tujuan**

Tujuan kebijakan ini mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah daerah.

**2. Ruang Lingkup**

***Standar ini harus diterapkan pada:***

- a. Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan;***
- b. Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.***
- c.** Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi.
- d.** Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan dalam menyusun laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan gabungan, tidak termasuk perusahaan daerah.

## **DEFINISI**

*Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:*

- 1. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.*
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- 3. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*
- 4. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.*
- 5. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.*
- 6. Belanja adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.*
- 7. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.*
- 8. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.*
- 9. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.*
- 10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh*

*suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.*

- 11. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.*
- 12. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.*
- 13. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.*
- 14. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.*
- 15. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan.*
- 16. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.*
- 17. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.*

#### **UMUM**

- 1. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.*
- 2. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan*

Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

3. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
4. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

### **STRUKTUR DAN ISI**

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
3. Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - (a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
  - (b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
  - (c) Ikhtisar pencapaian kinerja target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
  - (d) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
  - (e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;



- (f) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- 4. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Kebijakan berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Misalnya, Kebijakan Akuntansi tentang Persediaan mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- 5. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan, pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang lazim yang mengikhtisarkan secara ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan dan hasil-hasilnya selama satu periode.

#### **PENYAJIAN INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI.**

1. ***Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan informasi yang merupakan gambaran entitas secara umum.***
2. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi:
  - (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
  - (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
  - (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

#### **PENYAJIAN INFORMASI TENTANG KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO**

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas akuntansi/pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.
2. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas akuntansi/pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.
3. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas akuntansi/pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran,

dan dengan rencana lainnya sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran dibandingkan dengan realisasinya.

4. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran, program dan prioritas anggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan, pengembangan pasar surat utang negara.
5. Ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

#### **PENYAJIAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN SELAMA TAHUN PELAPORAN**

Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target :

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan oleh DPRD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan untuk diketahui pembaca laporan keuangan.
2. Dalam satu periode pelaporan, dikarenakan alasan dan kondisi tertentu, entitas pelaporan mungkin melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada, yang disahkan oleh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi/pelaporan.
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang dalam APBD dengan realisasinya.
4. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatan-LRA

dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.

5. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:
  - (a) Nilai target total;
  - (b) Nilai realisasi total;
  - (c) Presentase perbandingan antara target dan realisasi; dan
  - (d) Alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.
6. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi/pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

#### **DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENGUNGKAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN**

1. Entitas akuntansi/pelaporan mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

1. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.
2. Sesuai dengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
  - (a) Asumsi kemandirian entitas;
  - (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
  - (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
3. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau

kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

4. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
5. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

#### **PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN**

1. Pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah meliputi:
  - (a) Masyarakat;
  - (b) Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
  - (c) Pihak yang memberi atau yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
  - (d) Pemerintah daerah.
2. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat membuat penilaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi terpilih yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu pengguna/pemakai laporan keuangan, karena kadangkala perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, atau laporan perubahan ekuitas terbiasa dari pengungkapan kebijakan terpilih.

#### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

1. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib, penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

2. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan angka-angka dengan periode sebelumnya. Jika perubahan kebijakan akuntansi berpengaruh material, perubahan kebijakan dan dampak perubahan secara kuantitatif harus diungkapkan.
3. Empat pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan :
  - a. Pertimbangan sehat;
  - b. Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut seharusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan;
  - c. Substansi Mengungguli Bentuk Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realita kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian;
  - d. Materialitas Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.
4. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.
5. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
  - a. Entitas pelaporan;
  - b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - c. Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - d. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas;
  - e. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

6. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.

**PENYAJIAN RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS YANG DISAJIKAN PADA LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN**

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut :
  - (a) Anggaran;
  - (b) Realisasi;
  - (c) Presentase pencapaian
  - (d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
  - (e) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - (f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
  - (g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
  - (h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi;
  - (i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
  - (j) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
3. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
  - (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - (c) Rincian yang diperlukan; dan
  - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
4. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
  - (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - (c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;

- (d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi; dan
  - (e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
5. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan
  - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
6. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:
- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - (c) Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
  - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
7. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
- (a) Perbandingan dengan periode yang lalu;
  - (b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
  - (c) Rincian yang diperlukan; dan
  - (d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

**PENGUNGKAPAN INFORMASI YANG DIHARUSKAN OLEH KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG BELUM DISAJIKAN DALAM LEMBAR MUKA LAPORAN KEUANGAN.**

1. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
2. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas

akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap, pembaca laporan perlu diingatkan kemungkinan akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan entitas akuntansi/ pelaporan pada periode yang akan datang.

3. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian (misalnya rincian persediaan, rincian aset tetap, atau rincian pengeluaran belanja) dari seperti yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus, pengungkapan kebijakan akuntansi, untuk dapat meningkatkan pemahaman pembaca, harus merujuk ke rincian yang disajikan pada tempat lain di laporan keuangan. Dalam kebijakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga perolehan. Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset tersebut menunjukkan ada salah satu akun aset tetap dengan harga selain harga perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari donasi.

#### **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

1. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.
2. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
  - (a) domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
  - (b) penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
  - (c) ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.
3. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:
  - (a) Penggantian manajemen pemerintah daerah selama tahun berjalan;
  - (b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
  - (c) Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
  - (d) Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan; dan
  - (e) Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang harus ditanggulangi pemerintah daerah.
4. Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.



## SUSUNAN

1. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
  - (a) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
  - (b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
  - (c) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
  - (d) Kebijakan akuntansi yang penting:
    - 1) Entitas pelaporan;
    - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
    - 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
    - 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
    - 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
  - (e) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
    - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
    - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
  - (f) Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.
2. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

**PEMERINTAH DAERAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**SKPD.....**

<b>PENDAHULUAN</b>		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD	
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
	5.1.1	Pendapatan
	5.1.2	Belanja
	5.1.3	Aset
	5.1.4	Kewajiban
	5.1.5	Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab VII	Penutup	

**PEMERINTAH DAERAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**PPKD**

<b>PENDAHULUAN</b>		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD PPKD	
	2.1	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD

	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab IV	Kebijakan akuntansi		
	4.1	Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah PPKD	
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD	
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD	
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD	
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD		
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan PPKD	
		5.1.1	Pendapatan
		5.1.2	Belanja
		5.1.3	Pembiayaan
		5.1.4	Aset
		5.1.5	Kewajiban
		5.1.6	Ekuitas
		5.1.7	Arus Kas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD		
Bab VII	Penutup		

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
AKUNTANSI KAS**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

Akuntansi Kas bertujuan membantu entitas pemerintah dalam proses akuntansi kas pada umumnya, khususnya dalam proses mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan posisi kas dan peristiwa/kejadian/transaksi yang mempengaruhi saldo kas dalam laporan keuangan pemerintah.

**DEFINISI**

1. Paragraf 8 PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, wujud kas dapat dibedakan atas uang tunai dan saldo simpanan di bank. Kas berupa uang tunai, terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.
2. Uang yang berada dalam pengelolaan pemerintah tidak semua dapat diakui sebagai Kas dan disajikan pada laporan keuangan sebagai aset lancar. Uang dalam pengelolaan pemerintah disajikan sebagai aset non lancar apabila uang tersebut tidak memenuhi definisi aset lancar dan definisi kas pada PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Sebagai contoh, uang pemerintah yang penggunaannya dibatasi, atau sengaja dialokasikan untuk kebutuhan khusus.
3. PSAP No 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan Setara Kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek yang termasuk dalam setara kas harus segera dapat diubah menjadi tunai kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut

setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dihitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

a. Kas Pemerintah Daerah

Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pengelola Uang Daerah meliputi (i) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), (ii) Bendahara Penerimaan, dan (iii) Bendahara Pengeluaran.

b. Kas Di Kas Daerah

Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Sentral dan/atau Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo kas di Kas Daerah akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:

1. Penyetoran kas pendapatan asli daerah dari Bendahara Penerimaan;
2. Penyetoran pengembalian sisa uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
3. penerimaan pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain
4. pendapatan daerah yang sah;
5. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang
6. dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan
7. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo kas di Kas Daerah akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari :

1. Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
2. belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
3. pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan

4. pemberian pinjaman; dan
5. dan pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

c. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan dapat terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke RKUD.

Sesuai dengan ketentuan bahwa kas yang berasal dari seluruh Pendapatan Asli Daerah yang ditampung di rekening penerimaan setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD oleh bendahara penerimaan. Dalam hal penyetoran belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur penyetoran secara berkala. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

d. Kas di Bendahara Pengeluaran

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan kepada SKPD. Dalam hal pengelolaan Uang Persediaan tersebut, pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Rekening pengeluaran SKPD tersebut selain mengelola uang persediaan juga mengelola uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD dalam bentuk tambahan uang persediaan, atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dapat dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di rekening pengeluaran. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:

1. Transfer uang persediaan dan/atau dana LS yang dikelola oleh bendahara pengeluaran dari RKUD;
2. Penerimaan uang pengembalian belanja;

3. Penerimaan jasa giro; dan
4. Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar, yang antara lain berasal dari:

1. Belanja daerah;
2. Penyetoran uang pengembalian belanja; dan
3. Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran ke RKUN.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran wajib menyetorkan sisa uang persediaan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan terakhir tahun anggaran. Bukti setoran sisa uang persediaan harus dilampiri sebagai bukti pertanggungjawaban. Apabila masih terdapat uang persediaan yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

e. Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah

Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah meliputi:

1. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;
2. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD;
3. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan; dan
4. Saldo kas di BLUD.

f. Saldo Kas Lainnya yang Diterima karena Penyelenggaraan Pemerintahan

Selain pengaturan tersebut diatas, pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh

sekolah negeri milik pemerintah kabupaten sebagai hibah dari pemerintah provinsi.

Pembukaan rekening bank tersebut harus mempunyai dasar hukum dan rekening tersebut wajib dilaporkan kepada BUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca kementerian/lembaga/SKPD sebagai Kas Lainnya.

g. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Hal yang membedakan BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pola pengelolaan keuangan BLUD memberi keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian pemerintah daerah. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah daerah.

#### AKUNTANSI TRANSAKSI KAS

Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

1. Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

Transaksi Pendapatan, Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penerimaan kas bersumber dari pendapatan terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat: pendapatan negara, antara lain Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Hibah,
- b. Pemerintah Daerah: pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah;



- c. Transaksi Penerimaan Pembiayaan, Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
  - d. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.
  - e. Transaksi Penerimaan Transfer, Penerimaan transfer atau transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat/provinsi.
  - f. Transaksi Penerimaan Lainnya / Non Anggaran, Penerimaan Daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan dan penerimaan transfer pemerintah, antara lain berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga.
2. Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:
- a. Transaksi Belanja Daerah, Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan *yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali* oleh pemerintah.
  - b. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan, Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
  - c. Transaksi Pengeluaran Transfer, Pengeluaran transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
  - d. Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran, Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

3. Akuntansi Kas dari Transaksi Pendapatan dan Belanja
  - a. Kas dari Transaksi Pendapatan, Pendapatan pada Pemerintah Pusat meliputi seluruh jenis penerimaan kas yang berasal dari Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Pendapatan pada pemerintah daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
4. Pengakuan  
Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
  1. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah; atau
  2. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari
  3. BUD; atau
  4. Pengesahan atas penerimaan pendapatan
5. Pengukuran  
Penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima dalam rekening mata uang asing, sesuai paragraf 62 PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Penerimaan kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima dalam akun bank bermata uang rupiah maka jumlah mata uang asing tersebut dikonversi menjadi jumlah dalam rupiah sesuai kurs transaksi.
- g. Kas dari Pendapatan pada Rekening Kas Umum Daerah
  1. Penerimaan kas dari pendapatan yang disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah dicatat sebagai berikut:
    - a. SKPD hanya mencatat jurnal transaksi pendapatan dan tidak mencatat jurnal penerimaan kas karena kas diterima langsung di BUD.

**Jurnal di SKPD**

<b>Nama Akun</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
RK PPKD* .....	xxx	
Pendapatan (Kode Akun yang sesuai).....		xxx

\*Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

**Jurnal di BUD**

<b>Nama Akun</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
Kas di Kas Daerah .....	xxx	
RK SKPD* .....		xxx

\*Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah

h. Kas dari Pendapatan pada Bendahara Penerimaan

Penerimaan pendapatan melalui bendahara penerimaan dapat berupa penerimaan secara tunai dan penerimaan melalui rekening bendahara penerimaan, sehingga kas di bendahara penerimaan dapat berupa kas tunai dan/atau kas di rekening bendahara penerimaan. Pencatatan jurnal terkait penambahan kas yang bersumber dari pendapatan pada bendahara penerimaan mengikuti pedoman sebagai berikut:

1. Apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah, maka uang tunai yang diterima dicatat sebagai kas dengan akun pasangan pendapatan;
2. Apabila Bendahara Penerimaan bukan merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah, maka uang tunai yang diterima dicatat sebagai kas dengan akun pasangan pendapatan yang ditangguhkan Pada saat penerimaan kas di Bendahara Penerimaan

**Jurnal di SKPD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas di Bendahara Penerimaan .....		xxx	
	Pendapatan (Kode Akun yang sesuai) .....		xxx

**Jurnal di BUD**

*Tidak ada jurnal di BUD*

Pada saat bendahara penerimaan menyetor tunai ke Rekening Kas Umum Daerah

**Jurnal di SKPD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
RK PPKD .....		xxx	
	Kas di Bendahara Penerimaan.....		xxx

**Jurnal di BUD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas di Kas Daerah .....		xxx	
	RK SKPD .....		xxx

i. Kas dari Pendapatan Hibah.

Penerimaan pendapatan hibah merupakan semua penerimaan negara yang menjadi hak milik pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Pendapatan hibah dapat berbentuk uang, barang, atau jasa, misalnya tenaga ahli dan pelatihan. Akuntansi penerimaan kas yang berasal dari pendapatan hibah diatur secara khusus di dalam Buletin Teknis Akuntansi Hibah.

6. Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya

Setiap penerimaan tunai pemerintah dicatat sebagai aset walaupun belum jelas kepemilikannya, apakah sebagai kewajiban atau ekuitas. Apabila terdapat peristiwa dimana pemerintah telah menerima uang namun belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak pemerintah atau bukan maka pemerintah belum dapat mencatat penerimaan uang tersebut sebagai pendapatan, sampai dengan saat status hukum jelas milik pemerintah.

Jurnal untuk mencatat penerimaan kas yang belum jelas kepemilikannya adalah sebagai berikut:

**Pada saat satker menerima uang**

**Jurnal di satker**

Nama Akun	Debit	Kredit
Kas yang dibatasi penggunaannya .....	xxx	
Kewajiban-Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikan (Kode Akun yang sesuai).....		xxx

**Bila telah diyakini bahwa kas tersebut milik pihak ketiga, maka akan dijurnal:**

Nama Akun	Debit	Kredit
Kewajiban-Penerimaan kas yang belum teridentifikasi		
Kepemilikan (Kode Akun yang sesuai) .....	xxx	
Utang kepada pihak ketiga .....		xxx

**Pada saat di bayar kepada pihak ketiga**

Nama Akun	Debit	Kredit
Utang kepada pihak ketiga .....	xxx	
Kas yang dibatasi penggunaannya .....		xxx

**Jika telah diakui bahwa kas tersebut milik pemerintah, maka akan dijurnal:**

Nama Akun	Debit	Kredit
Kewajiban-Penerimaan kas yang belum teridentifikasi		
Kepemilikan (Kode Akun yang sesuai).....	xxx	
Pendapatan (Kode Akun yang sesuai) .....		xxx

Nama Akun	Debit	Kredit
Kas .....	xxx	
Kas yang Dibatasi Penggunaannya .....		xxx

7. Koreksi dan Pengembalian Pendapatan

- a. Koreksi pendapatan yang mempengaruhi kas dapat timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.
- b. Pengembalian pendapatan dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti lebih terima misalnya pendapatan pajak, perhitungan penyelesaian uang muka diterima dan/atau angsuran diterima BUD. Akuntansi atas transaksi pengembalian pendapatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) bersifat normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode pelaporan keuangan. Misal pengembalian pendapatan pajak
- b) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode
- c) Misalnya transaksi pengembalian bagian laba BUMD karena lebih setor yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan.
- d) Koreksi dan pengembalian tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan kesalahan, koreksi dan pengembalian tersebut.

**Jurnal di SKPD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Pendapatan (Kode Akun yang sesuai) .....		xxx	
	RK PPKD .....		xxx

**Jurnal di BUD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
RK SKPD .....		xxx	
	Kas di Kas Daerah .....		xxx

- 8. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja,  
Belanja pemerintah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP) dan pembayaran langsung (LS).
- 9. Pengakuan  
Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 10. Pengukuran  
Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Apabila pengeluaran kas dalam mata uang asing dan dikeluarkan dari rekening pemerintah dalam mata uang asing, maka pencatatan pengeluaran tunai dalam mata uang asing tersebut dalam rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Apabila pengeluaran kas dalam mata uang asing dan dikeluarkan dari rekening pemerintah dalam mata uang rupiah, maka pencatatan pengeluaran tunai dalam mata uang asing tersebut dalam rupiah menggunakan kurs transaksi.

A. Belanja Melalui Mekanisme Uang Persediaan (UP)

Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Apabila terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pada akhir tahun anggaran sisa UP yang belum digunakan harus disetor, maka sisa UP tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Sisa UP berupa uang yang belum digunakan sampai dengan tanggal pelaporan dan masih berada di bendahara pengeluaran dicatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Pada Pemerintah Pusat, bagian dari UP yang telah dibelanjakan yang masih berupa kwitansi pembelian barang dan penyerahan uang muka yang belum dipertanggungjawabkan sebagai belanja hingga tanggal pelaporan dicatat sebagai bagian dari kas di bendahara pengeluaran dan diungkap secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Penerimaan UP oleh SKPD dari Bendahara Umum Daerah**

**Jurnal di SKPD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas di Bendahara Pengeluaran .....		xxx	
RK PPKD .....			xxx

**Jurnal di BUD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
RK SKPD .....		xxx	
Kas di Kas Daerah.....			xxx

**Pertanggungjawaban dan Penerimaan GU oleh SKPD dari Kas Umum Daerah**

**Jurnal di SKPD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Belanja (kode akun yang sesuai) .....		xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran .....			xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran .....		xxx	
RK PPKD .....			xxx

**Jurnal di BUD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
RK SKPD .....		xxx	
Kas di Kas Daerah .....			xxx

**Pengembalian/setoran uang persediaan ke RKUD**

**Jurnal di SKPD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
RK PPKD .....		xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran .....			xxx

**Jurnal di BUD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas di Kas Daerah .....		xxx	
RK SKPD .....			xxx

B. Belanja Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung (LS)

Pembayaran langsung adalah mekanisme pengeluaran kas untuk belanja dari Rekening Kas Umum Daerah secara langsung kepada pihak ketiga (atas dasar perikatan atau surat keputusan) atau kepada bendahara pengeluaran. Pengeluaran kas untuk belanja yang dilakukan melalui mekanisme LS akan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

1. Pada saat pembayaran langsung kepada pihak ketiga

Pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terbit, BUD akan mengirimkan uang sejumlah yang tercantum di SP2D secara langsung ke bank pihak ketiga sesuai dengan persyaratan yang ada. Termasuk dalam perhitungan SP2D tersebut adalah potongan atas pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku. Atas potongan pajak-pajak yang ada, pemerintah pusat memperlakukannya sebagai pendapatan yang telah menjadi hak pemerintah pusat.

Terhadap transaksi tersebut akan di jurnal sebagai berikut:

**Jurnal di SKPD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Belanja (kode akun yang sesuai) .....		xxx	
	RK PPKD .....		xxx

SKPD mencatat belanja sejumlah nilai brutonya, meskipun dana yang diterima oleh pihak ketiga merupakan neto setelah dikurangi potongan pajak.

**Jurnal di BUD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
RK SKPD .....		xxx	
	Kas di Kas Daerah .....		xxx

C. Kelebihan Pembayaran Belanja,

Pemerintah melakukan koreksi karena suatu pengeluaran belanja diterima kembali oleh kas daerah. Bila pengeluaran dan penerimaan kembali terjadi pada sebuah periode pengeluaran belanja, maka penerimaan kembali tersebut dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila penerimaan atas koreksi kesalahan belanja tersebut diterima pada periode akuntansi berikutnya, maka penerimaan atas koreksi pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

D. Pengembalian belanja terjadi pada periode yang sama dengan periode pengeluaran belanja dan disetor ke kas daerah.

Jurnal di SKPD (pengembalian belanja diterima oleh Bendahara Pengeluaran)

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas di Bendahara Pengeluaran .....		xxx	
	Belanja (kode akun yang sesuai) .....		xxx
RK PPKD .....		xxx	
	Kas di Bendahara Pengeluaran .....		xxx

**Jurnal di BUD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas di Kas Daerah .....		xxx	
	RK SKPD .....		xxx

**Pengembalian belanja terjadi pada periode setelah periode pengeluaran belanja dan disetor ke kas daerah.**

**Jurnal di BUD**

	Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah .....		xxx	
	Lain-lain PAD yang Sah (kode akun yang sesuai) .....		xxx

**E. Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan,**

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaranyang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplusanggaran.

**F. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan adalah setiap penerimaan berasal dari utang yang wajib dikembalikan, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun atau tahun-tahun anggaran berikutnya, dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

**G. Pengakuan**

Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
  1. Kas diterima di Kas Umum Negara/Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  2. Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

**H. Pengukuran**

Penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar jumlah rupiah diterima. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima dalam akun bank dalam mata uang asing, maka jumlah penerimaan dicatat dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima dan disetor kedalam akun bank bermata uang rupiah, maka jumlah diterima dalam mata uang asing tersebut dikonversi menjadi rupiah sesuai kurs transaksi.



**Jurnal standar penerimaan kas dari penarikan pinjaman.**

**Jika dokumen utang telah diterima namun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas dalam Transito.....		xxx	
	Penerimaan Pembiayaan.....		xxx
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.....		xxx	
	Utang Jangka Panjang.....		xxx

**Pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas di BUD.....		xxx	
	Kas dalam Transito.....		xxx

I. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran kas untuk pengeluaran pembiayaan mencakup transaksi:

1. Pemberian pinjaman, menyebabkan timbulnya piutang;
2. Pelunasan pokok utang, menyebabkan berkurangnya utang;
3. Pengeluaran kas untuk investasi, penyertaan modal negara/pemerintah daerah, menyebabkan penambahan investasi pada sisi aset;
4. Pembentukan dana cadangan menyebabkan penambahan dana cadangan.

J. Pengakuan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

1. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
2. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan *L/C*, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu,:
  - a. Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - b. Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

K. Pengukuran

Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah rupiah yang dikeluarkan. Pengeluaran kas dalam mata uang asing dan/atau dikeluarkan dari akun bank dalam mata uang asing, maka jumlah pengeluaran tersebut dicatat dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Apabila pengeluaran kas dalam mata uang asing dan/atau dikeluarkan dari akun bank ber mata uang rupiah, maka jumlah tersebut dicatat dalam mata uang rupiah sesuai kurs transaksi.

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Bila pemerintah melakukan pengembalian pokok pinjaman, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

## Jurnal di BUD

	Nama Akun	Debet	Kredit
Pengeluaran Pembiayaan (kode akun yang sesuai.....xxx			
	Kas di Kas Daerah.....xxx		xxx
Utang Jangka Panjang.....xxx			
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.....xxx		xxx

### L. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana penyesuaian, dan bantuan keuangan. Pembahasan transfer dalam buletin teknis ini mencakup tiga hal yaitu penerimaan transfer, pengeluaran transfer dan kelebihan penyaluran.

Tidak termasuk dalam definisi transfer:

1. Pemindahan antar bank dua pihak independen untuk maksud pembiayaan;
2. Pemindahan dana antar bank yang dimiliki sebuah entitas pelaporan, antar entitas pelaporan dan entitas-entitas akuntansi di bawah entitas pelaporan tersebut.

Pada saat Buletin Teknis Akuntansi Kas diterbitkan, penerimaan transfer terdapat hanya pada pemerintah daerah. Dari sisi Pemerintah Pusat, transfer merupakan pengeluaran ke pemerintah daerah. Dari sisi pemerintah daerah, transfer dapat merupakan pendapatan, apabila suatu pemerintah daerah menerima transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Namun transfer bagi pemerintah daerah dapat juga merupakan pengeluaran apabila suatu pemerintah daerah memberikan transfer kepada pemerintah daerah lainnya.

### M. Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota.

### N. Pengakuan

Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

### O. Pengukuran

Penerimaan kas yang berasal dari transfer dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah rupiah diterima. Jika pada penyaluran diketahui terdapat pemotongan karena lebih salur dari tahun anggaran sebelumnya, maka pendapatan transfer dicatat secara bruto, yaitu sejumlah yang diterima di kas daerah ditambah jumlah pemotongan. Terhadap jumlah yang dipotong dicatat sebagai pengembalian pendapatan transfer tahun anggaran yang lalu.

Pada saat Pemerintah Pusat menyalurkan dana bagi hasil ke pemerintah daerah:

**Jurnal di BUD-yang menerima transfer:**

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah.....	xxx	
Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil.....		xxx

P. Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

K. Pengakuan

Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

L. Pengukuran

Pengeluaran kas untuk transfer dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah rupiah yang ditransfer.

Atas pengeluaran transfer, akan dijurnal sebagai berikut:

**Jurnal di BUD-yang mengeluarkan transfer**

Nama Akun	Debet	Kredit
Transfer Dana Bagi Hasil.....	xxx	
Kas di RKUD.....		xxx

**Jurnal di BUD-yang menerima transfer**

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah.....	xxx	
Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil.....		xxx

M. Kelebihan Pembayaran Belanja Dana Bagi Hasil

Sesuai dengan PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa paragraf 7 dan paragraf 14 maka pengembalian kelebihan bayar atas transfer, misalnya dana bagi hasil dicatat sebagai pengurang SAL/SiLPA sedangkan penerimaannya dicatat sebagai Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah TAYL oleh pemerintah pusat. Dalam hal pengembalian kelebihan transfer dilakukan dengan cara pemotongan oleh entitas yang menyalurkan, maka pemotongan dicatat sebagai pengembalian pendapatan transfer TAYL.

**Pencatatan oleh entitas penerima dan dipotong karena lebih salur:**

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Kas Daerah .....	xxx	
SAL/SiLPA .....	xxx	
Pendapatan LRA (sebesar transfer bruto) .....		xxx

**Pencatatan atas jumlah yang dipotong oleh entitas yang menyalurkan:**

Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Rekening Kas Umum Negara/Daerah.....	xxx	
Pendapatan lain-lain (kode akun yang sesuai).....		xxx

Dalam hal lebih salur dibayar/disetor oleh pemda ke pemerintah pusat, maka dijurnal sebagai berikut:

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
SAL/SiLPA .....		xxx	
Kas di Kas Daerah .....			xxx

N. Penerimaan dan Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan pihak ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Jurnal penerimaan dan pengeluaran non anggaran adalah sebagai berikut.

O. Pada Pemerintah Daerah

Bendahara pengeluaran melakukan pemotongan dan pemungutan pajak pusat dari transaksi belanja barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan. Atas transaksi tersebut, bendahara pengeluaran akan mencatat dengan jurnal:

Jurnal di SKPD

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas di Bendahara Pengeluaran .....		xxx	
Utang PFK .....			xxx

**Bendahara pengeluaran kemudian menyetor potongan tersebut ke Kas Negara, sehingga dijurnal sebagai berikut:**

**Jurnal di SKPD**

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Utang PFK .....		xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran .....			xxx

**AKUNTANSI SALDO KAS**

Rekonsiliasi Bank, Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dibanding catatan akuntansi pada entitas pemerintah yang mengelola rekening pada bank tersebut. Entitas pemerintah melakukan koreksi saldo kas di akun kas pada bank tersebut, apabila perlu. Selain itu, rekonsiliasi bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank. Rekonsiliasi juga berguna untuk mengetahui penerimaan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat pada akuntansi pemerintah atau sebaliknya.

Catatan akuntansi entitas pemerintah dan catatan menurut bank seharusnya menunjukkan saldo yang sama. Namun demikian, dalam kenyataan, jika rekening koran bank dibandingkan dengan catatan akuntansi entitas pemerintah, kemungkinan dijumpai adanya perbedaan yang dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Transaksi sudah dicatat oleh entitas pemerintah, tetapi belum dilaporkan oleh bank dan belum tercatat pada rekening koran, seperti:

a. Setoran Dalam Perjalanan

Setoran dalam perjalanan merupakan setoran yang dilakukan oleh entitas pemerintah (biasanya pada akhir suatu periode yang dicakup oleh rekening koran) dan uang setoran tersebut belum diterima oleh bank karena adanya proses perbankan, seperti kliring, sehingga belum masuk dalam rekening koran bank.

Proses rekonsiliasinya adalah sebagai berikut: Setoran dalam perjalanan dapat diidentifikasi dengan

cara membandingkan semua setoran menurut dokumen sumber pendapatan dengan setoran yang tercantum dalam laporan bank, sehingga setoran pemerintah yang belum tercatat di laporan bank merupakan setoran dalam perjalanan. Apabila terdapat setoran dalam perjalanan maka entitas pemerintah melakukan jurnal penyesuaian dengan menambah nilai kas pada rekening yang bersangkutan.

b. Dokumen pencairan dana yang masih beredar (*outstanding check*)

Dokumen pencairan dana yang masih beredar merupakan dokumen yang sudah dibuat dan diserahkan oleh entitas pemerintah kepada penerima tetapi sampai akhir periode dokumen tersebut belum diuangkan di bank, contohnya adalah SP2D yang sudah diterbitkan namun belum dicairkan oleh bank. Akibatnya entitas pemerintah telah mencatat sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh bank. Proses rekonsiliasinya adalah sebagai berikut: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan/atau cek yang masih beredar (*outstanding check*) dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan seluruh SP2D/cek yang telah dikeluarkan dengan SP2D/cek yang telah dibayarkan/diuangkan oleh bank yang tercantum di laporan bank, sehingga SP2D/cek yang tidak tercantum di laporan bank merupakan SP2D/cek yang masih beredar.

2. Transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh entitas pemerintah, seperti:

1. Biaya bank

Biaya bank adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada entitas pemerintah dengan cara langsung mengurangi saldo simpanan. Entitas pemerintah biasanya baru mengetahui adanya biaya bank pada saat menerima rekening koran atau memo debet dari bank. Proses rekonsiliasinya adalah sebagaiberikut: Biaya bank dapat ditemukan dengan mengidentifikasi memo

debet untuk biaya bank di laporan bank.

## 2. Setoran pendapatan/penerimaan melalui transfer giro

Setoran pendapatan/penerimaan melalui transfer giro merupakan setoran melalui rekening giro pemerintah di bank. Penerimaan ini telah dilakukan bank namun belum diinformasikan kepada entitas pemerintah. Pemerintah baru mengetahui bertambahnya saldo kas setelah menerima laporan bank atau memo kredit dari bank. Proses rekonsiliasinya adalah sebagai berikut: Transaksi ini dapat diketahui dengan mengidentifikasi memo kredit untuk transfer tersebut di laporan bank.

## 3. Jasa giro bank

Jasa giro bank adalah balas jasa bank yang diberikan kepada pemerintah karena bank dapat memanfaatkan simpanan giro pemerintah. Dalam hal ini, bank langsung menambah giro pemerintah, sedangkan pemerintah belum mencatatnya karena belum mengetahuinya sampai saat menerima laporan bank atau memo kredit dari bank. Proses rekonsiliasinya adalah sebagai berikut: Jasa giro bank dapat diketahui dengan mengidentifikasi memo kredit untuk jasa giro di laporan bank. Apabila terdapat jasa giro bank maka entitas pemerintah (BUN) melakukan penyesuaian dengan menambah nilai kas dari pendapatan jasa giro tersebut.

## 4. Salah Catat

Apabila setelah mempertimbangkan semua penyebab di atas, ketidakcocokan antara saldo entitas pelaporan dan saldo bank masih ditemukan, maka kemungkinan terdapat salah catat di pembukuan pemerintah dan/atau di buku bank. Apabila salah catat telah diidentifikasi, namun saldo kas belum sesuai, maka ada indikasi bahwa kas digelapkan.

Kesalahan pencatatan dapat dilakukan baik oleh entitas pemerintah maupun oleh bank, misalnya SP2D untuk membayar belanja barang sebesar Rp 173.000.000,00 oleh petugas akuntansi entitas pemerintah dicatat sebesar Rp 137.000.000,00.

### Contoh Jurnal

#### Setoran dalam perjalanan

	Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Bank.....		xxx	
	Pendapatan (sesuai kode akun).....		xxx

#### Biaya Bank

	Nama Akun	Debet	Kredit
Belanja Administrasi Bank.....		xxx	
	Kas di Bank.....		xxx

#### Setoran pendapatan/penerimaan melalui transfer giro

	Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Bank .....		xxx	
	Pendapatan (sesuai kode akun).....		xxx

#### Pendapatan Jasa Giro Bank

	Nama Akun	Debet	Kredit
Kas di Bank.....		xxx	
	Pendapatan Jasa Giro.....		xxx

### 1. Akuntansi Selisih Kas

Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai di tangan (*on hand*) yang ada pada tanggal tertentu. Selisih kas dapat berbentuk selisih lebih dan selisih kurang. Selisih lebih kas terjadi bila catatan akuntansi kas (buku kas) lebih kecil dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu, sedangkan selisih kurang kas terjadi bila catatan akuntansi kas (buku kas) lebih besar dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu.

Atas selisih kas yang ada perlu dilakukan penelusuran lebih dalam penyebab terjadinya selisih kas tersebut. Penelusuran dapat memberi kesimpulan apakah:

Atas selisih kas yang ada perlu dilakukan penelusuran lebih dalam penyebab terjadinya selisih kas tersebut. Penelusuran dapat memberi kesimpulan apakah:

1. Penyebab selisih kas dapat diidentifikasi dengan pasti Kesalahan dalam pencatatan akuntansi, baik kurang catat ataupun lebih catat. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan entitas pemerintah
2. Penyebab selisih kas tidak dapat diidentifikasi secara pasti Segala pengaturan akuntansi selisih kas dalam buletin Teknis ini yang tak selaras dengan Buletin Teknis Kerugian Negara dinyatakan tidak berlaku.

### 2. Selisih Lebih Kas,

Bila selisih lebih kas belum dapat diidentifikasi, maka diperlukan jurnal koreksi untuk menyesuaikan saldo catatan akuntansi dengan saldo fisik yang ada dengan mencatat dalam rekening perantara selisih lebih kas yang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar.

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas.....		xxx	
	Ekuitas Dana Lancar-Selisih Lebih Kas .....		xxx

Bila selisih lebih kas dapat diidentifikasi, maka diperlukan jurnal koreksi sesuai dengan substansi yang diidentifikasi berdasarkan hasil penelusuran tersebut dengan jurnal sebagai berikut:

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Ekuitas Dana Lancar-Selisih Lebih Kas .....		xxx	
	Kas .....		xxx

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas .....		xxx	
	Pendapatan/Kewajiban/lainnya sesuai hasil penelusuran .....		xxx

### 3. Selisih Kurang Kas

Bila selisih kurang kas belum dapat diidentifikasi, maka diperlukan jurnal koreksi sementara untuk mengamankan hak pemerintah untuk menyesuaikan saldo catatan akuntansi dengan saldo fisik yang ada dengan mencatat dalam rekening perantara selisih kurang kas yang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar.

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Ekuitas Dana Lancar-selisih kurang kas .....		xxx	
	Kas .....		xxx

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Aset Lainnya.....		xxx	
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya .....		xxx

Bila selisih kurang kas telah dapat diidentifikasi dan merupakan kesalahan pencatatan akuntansi murni bukan penyalahgunaan kas, maka diperlukan jurnal koreksi sesuai dengan substansi yang diidentifikasi berdasarkan hasil penelusuran tersebut, yaitu dengan jurnal sebagai berikut:

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Kas.....		xxx	
	Ekuitas Dana Lancar-Selisih Lebih Kas .....		xxx

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya .....		xxx	
	Aset Lainnya .....		xxx

	<b>Nama Akun</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
Belanja/Aset/lainnya sesuai hasil penelusuran .....		xxx	
	Kas .....		xxx

Berdasarkan hasil telaah atau pemeriksaan, mungkin dijumpai adanya selisih kas yang mempengaruhi saldo fisik yang disebabkan adanya indikasi penggunaan untuk kepentingan pribadi karyawan entitas pelaporan. Jumlah saldo kas yang disajikan pada neraca harus memperlihatkan saldo kas yang sebenarnya dan uang



kas yang digunakan untuk kepentingan pribadi bendahara tidak termasuk saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan neraca sehingga harus dikeluarkan dari Saldo Kas. Atas hal ini dilakukan:

1. Saldo Kas harus disajikan pada Neraca sejumlah Kas yang sebenarnya ada dengan mengoreksi Saldo SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran sebagai "Koreksi SiLPA yang disebabkan Indikasi Penyalahgunaan oleh Bendahara/Staf Entitas pelaporan".
2. Bila SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang dianggarkan pada tahun berikutnya, 1 maka nilainya adalah SiLPA yang telah dikoreksi.
3. Perlakuan akuntansi tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Pada neraca, perlakuan akuntansi agar mengacu pada Buletin Teknis tentang akuntansi piutang yang menyatakan bahwa salah satu peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang pemerintah adalah adanya kerugian negara/daerah. Oleh karenanya, apabila telah terdapat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maka surat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengakui adanya piutang Tuntutan Perbendaharaan.

#### 4. Penyajian Kas Pada Neraca

Seluruh uang yang dikuasai pemerintah dilaporkan dalam Neraca, dan dapat disajikan dalam kelompok aset lancar dan aset non lancar berdasarkan dari karakteristik uang tersebut.

#### 5. Penyajian Uang pada Aset Lancar

Jika uang memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan memenuhi definisi kas pada paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, yang mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, maka uang tersebut diklasifikasikan sebagai Aset Lancar.

Penyajian uang sebagai aset lancar pada neraca tergantung pada dua kriteria, yaitu apakah uang tersebut (a) merupakan hak pemerintah dan (b) telah melalui mekanisme APBD. Uang pada Aset Lancar disajikan sebagai Kas dan Setara Kas.

#### 6. Kas dan Setara Kas

Jika uang tersebut merupakan hak milik pemerintah dan telah melalui mekanisme APBD maka uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL/SiLPA pada entitas pelaporan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Uang yang merupakan hak pemerintah dan telah melalui mekanisme APBD pada entitas pelaporan SKPKD atau SKPD disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun pasangan ekuitas dana lancar.

Jika uang tersebut dikuasai pemerintah dan merupakan hak pemerintah namun pada saat pelaporan uang tersebut belum memenuhi kriteria telah melalui mekanisme APBD, maka uang tersebut disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun pasangan ekuitas dana lancar selain SAL/SiLPA pada entitas pelaporan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, contohnya Kas BLU dan Kas Hibah Langsung yang belum disahkan.

Jika uang tersebut belum/tidak memenuhi kriteria pengakuan hak pemerintah dan belum melalui mekanisme APBN/D, uang tersebut dapat disajikan sebagai kas dan setara kas dengan akun lawan berupa:

1. Pendapatan yang Ditangguhkan, jika uang tersebut merupakan penerimaan yang belum selesai *earning proses*-nya. Termasuk di dalamnya adalah uang yang berasal dari penerimaan yang belum menjadi pendapatan negara misalnya penerimaan migas.
2. Utang kepada Pihak Ketiga, jika uang tersebut dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah namun uang tersebut merupakan hak pihak ketiga, meliputi antara lain Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan berupa dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca.

Penyajian di neraca diserahkan pada kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada kriteria apakah kas dan setara tersebut telah memenuhi sebagai hak pemerintah dan/atau telah melalui mekanisme APBD.

Kas dan Setara Kas pada Aset Lancar meliputi saldo kas pada BUD, saldo kas pada bendahara, kas di bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan, kas di BLU dan setara kas.

#### Saldo Kas Pada BUD

Saldo Kas pada Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri dari: Saldo Rekening Kas Umum Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dengan akun lawan Ekuitas Dana Lancar - SiLPA.

#### Saldo Kas Pada Bendahara

Sesuai ketentuan yang ada, pada akhir tahun anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan seluruh uang negara/daerah yang dikuasainya atau seluruh sisa UP/TUP ke Kas Daerah. Namun, pada kondisi tertentu, sesuai peraturan yang berlaku, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak dapat menyetorkan saldo kas yang dikuasainya ke Kas Daerah maka saldo kas yang

dikuasainya tersebut harus dilaporkan sebagai bagian dari kas dan setara kas di Neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran.

- a. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (misalnya Retribusi Daerah pada pemerintah daerah). Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke kas daerah.
- b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah per tanggal neraca merupakan bagian dari SAL/SiLPA.

#### Kas di Bendahara Pengeluaran yang Bukan Berasal dari Uang Persediaan

Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan disajikan di neraca apabila memenuhi kriteria definisi, pengakuan dan pengukuran sebagai kas. Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan dapat berbentuk :

1. Bunga jasa giro atas pengelolaan rekening bendahara pengeluaran di bank yang belum disetorkan per tanggal neraca; atau
2. Pungutan pajak atas pembayaran yang dilakukan pada pihak ke III dan belum disetorkan per tanggal neraca; atau
3. Pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung di akun bank Bendahara Pengeluaran.

Penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari uang persediaan di neraca diserahkan pada kebijakan akuntansi, dengan mengacu pada kriteria apakah kas tersebut telah memenuhi kriteria pengakuan sebagai hak pemerintah dan telah melalui mekanisme APBD.

Kas tersebut disajikan dengan akun kas lainnya di bendahara pengeluaran dengan akun lawan utang kepada pihak ketiga pada pemerintah daerah jika kas tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai hak pemerintah.

Kas tersebut disajikan dengan akun kas lainnya di bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan pada SKPD atau akun lawan ekuitas dana lancar selain SAL/SiLPA pada tingkat pemerintah daerah jika kas tersebut telah memenuhi kriteria pengakuan sebagai hak pemerintah namun belum melalui mekanisme APBD.

Kas tersebut disajikan dengan akun kas lainnya di bendahara pengeluaran dengan akun lawan ekuitas dana lancar lainnya pada akun SAL/SiLPA pada Pemerintah daerah jika kas tersebut telah memenuhi kriteria pengakuan sebagai hak pemerintah dan telah melalui mekanisme APBD.

#### Kas di Badan Layanan Umum

Peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan bahwa Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bagian dari pemerintah dan tidak terpisahkan dari kekayaan negara, termasuk didalamnya adalah saldo Kas yang menjadi tanggung jawab BLUD. Oleh karenanya, setelah proses konsolidasi dengan SKPD pemerintah daerah, Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada SKPD/pemerintah daerah.

#### Setara Kas

Berdasarkan paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas yang merupakan hak pemerintah disajikan sebagai bagian dari kas dan setara kas yang merupakan bagian dari SAL/SiLPA.

#### Penyajian Uang pada Aset Nonlancar

Uang yang disajikan pada aset non Lancar merupakan uang yang tidak memenuhi definisi aset lancar yaitu suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, dan uang yang tidak memenuhi definisi kas menurut paragraf 8 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang dapat digunakan setiap saat untuk membiayai kegiatan pemerintah. Uang tersebut diklasifikasikan dalam kelompok aset nonlancar, yang disajikan secara terpisah dari saldo kas dan setara kas pada aset lancar. Penyajian uang pada aset nonlancar tergantung pada tiga kriteria, yaitu apakah uang tersebut (a) merupakan hak pemerintah, (b) dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan (c) dibatasi/tidak penggunaannya. Uang pada aset nonlancar dapat disajikan sebagai dana cadangan, aset yang dibatasi penggunaannya, dan aset nonlancar lainnya.

### Dana Cadangan

Uang yang merupakan hak pemerintah yang disisihkan untuk menampung kebutuhan/memenuhi tujuan tertentu yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran disajikan sebagai Dana Cadangan dengan akun lawan Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan.

### Aset yang dibatasi penggunaannya

Uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya, disajikan sebagai Aset yang Dibatasi Penggunaannya dengan akun lawan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya.

### Aset Nonlancar lainnya

Uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, tidak dicadangkan untuk tujuan tertentu, dan tidak dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai aset nonlancar dengan akun lawan diinvestasikan dalam aset lainnya. Penyajian uang yang dikuasai pemerintah namun bukan merupakan hak pemerintah sebagai aset nonlancar juga diikuti dengan penyajian utang kepada pihak ketiga dengan akun lawan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

### Kas dan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Unsur Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas merupakan semua aliran kas masuk ke Bendahara Umum Daerah. Pengeluaran kas merupakan aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Oleh karenanya, saldo akhir pada laporan arus kas harus memperlihatkan jumlah kas dan setara kas pada neraca.

## **AKUNTANSI SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)**

### **Perhitungan SAL**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih

lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Berdasarkan praktek/sistem yang berlaku saat ini, pemerintah daerah hanya menyajikan SILPA.

#### Penyimpanan Dana SAL

Pada akhir tahun anggaran dana SAL disimpan oleh:

- a. Bendahara Umum Daerah dalam bentuk Rekening Milik Bendahara Umum Daerah, yang antara lain terdiri dari:
  1. Rekening Kas Umum Daerah;
  2. Subrekening Kas Umum Daerah;
  3. Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih;
  4. Rekening Kas Penempatan;
  5. Rekening Khusus;
  6. Rekening Pengeluaran.
- b. Bendahara Pengeluaran dalam bentuk uang persediaan, terdiri atas:
  1. Uang persediaan pada Rekening Bendahara Pengeluaran;
  2. Uang persediaan pada kas tunai (*cash on hand*) Bendahara Pengeluaran; dan
  3. Uang persediaan dalam bentuk kuitansi/bukti pembayaran yang belum disahkan oleh SKPKD.
- c. Bendahara satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam bentuk Rekening Kas BLUD dan kas tunai (*cash on hand*), meliputi Rekening Operasional BLUD dan/atau Rekening Pengelolaan Kas BLUD. Rekening Kas BLUD yang menjadi bagian dari SAL merupakan kas yang berasal dari akumulasi selisih antara pendapatan BLUD dan belanja BLUD yang sudah disahkan oleh SKPKD.

#### Penggunaan SAL,

SAL diutamakan untuk digunakan dalam rangka membiayai defisit APBD tahun anggaran berjalan. Penggunaan SAL dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Akuntansi dan Pelaporan SAL

merupakan bagian dari ekuitas dana dalam neraca konsolidasian Pemerintah Daerah.

#### Rekonsiliasi dan Penyelesaian Selisih Angka SAL

Rekonsiliasi antara angka SAL menurut buku dan angka SAL menurut fisik

Melakukan perhitungan saldo buku SAL akhir. Saldo buku SAL akhir berasal dari SAL setelah.

1. penyesuaian ditambah/dikurangi dengan SiLPA setelah penyesuaian. dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Penghitungan saldo buku SAL setelah penyesuaian  
Saldo buku SAL setelah penyesuaian dihitung dari saldo SAL akhir tahun lalu,

ditambah/dikurangi selisih lebih/kurang kas tahun lalu, dikurangi penggunaan SAL, dan ditambah penyesuaian lainnya yang mempengaruhi saldo SAL awal tahun seperti koreksi saldo awal kas BUD, koreksi saldo awal kas pada BLUD, dan koreksi saldo awal hibah langsung.

- b. Penghitungan saldo buku SiLPA tahun berjalan setelah penyesuaian  
Saldo buku SiLPA setelah penyesuaian dihitung dari SiLPA tahun berjalan ditambah/dikurangi dengan penyesuaian tahun berjalan seperti pengembalian pendapatan tahun yang lalu dan selisih kurs yang belum terealisasi atas kas yang merupakan bagian dari SAL
2. Mengidentifikasi kas yang merupakan bagian dari SAL  
Saldo fisik kas dapat meliputi antara lain
  - a. Rekening BUD di Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Rekening Khusus;
  - c. Kas di Bendahara Pengeluaran;
  - d. Kas pada BLUD yang telah disahkan; dan
  - e. Kas hibah langsung lembaga yang telah disahkan.
3. Menyesuaikan saldo fisik kas  
Saldo fisik kas yang merupakan bagian dari SAL perlu disesuaikan dengan pos-pos neraca lain yang mempengaruhi saldo fisik kas seperti Utang Perhitungan Pihak Ketiga dan Utang kepada Pihak Ketiga karena SP2D retur.
4. Rekonsiliasi saldo buku SAL dengan fisik kas SAL yang telah disesuaikan  
Berdasarkan hasil rekonsiliasi, dapat terjadi selisih/perbedaan antara saldo buku SAL dengan saldo fisik kas SAL. Apabila terjadi selisih/perbedaan angka SAL, Bendahara Umum Negara melakukan penelitian penyebab terjadinya selisih/perbedaan angka SAL untuk menetapkan langkah penanganan yang diperlukan. Apabila telah diketahui penyebab selisih/perbedaan angka SAL dilakukan koreksi dengan menyesuaikan akun SAL, dan apabila pada saat menyusun laporan keuangan, selisih/perbedaan tersebut belum diselesaikan maka terhadap hal tersebut harus diungkap secara memadai di dalam CaLK

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PIUTANG**

***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.***

### **PENDAHULUAN**

#### Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang meliputi cara mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan pos piutang, baik oleh penyusun laporan, pengguna laporan, dan institusi yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:

- (a) Definisi;
- (b) Pengakuan;
- (c) Pengukuran; dan
- (d) Pengungkapan.

### **DEFINISI**

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. piutang pajak terjadi pada saat hak daerah untuk menagih timbul.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat adanya ketetapan atau perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Piutang daerah adalah hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain sebagai akibat transaksi.

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak terjadi pada saat hak daerah untuk menagih timbul.

Piutang Retribusi adalah piutang yang dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Berdasarkan UU yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.

Piutang Perikatan adalah piutang yang timbul atas pelaksanaan perjanjian/kerjasama penyertaan dana bergulir dan dana pemberdayaan atau akibat lainnya.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) adalah nilai piutang yang dapat ditagih setelah perkiraan piutang dikurangi perkiraan penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

## UMUM

Karakteristik utama piutang adalah pemerintah daerah akan menerima pembayaran dimasa akan datang sebagai akibat transaksi masa saat ini dan/atau dimasa lalu atau akibat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah:

- (a) Pungutan pendapatan daerah. Piutang pendapatan daerah merupakan piutang yang timbul dari tunggakan pungutan pendapatan. Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah adalah:
  - (1) Piutang Pajak;
  - (2) Piutang Selain Pajak;
  - (3) Piutang Valuta Asing.
- (b) Perikatan. Piutang perikatan merupakan piutang yang timbul dari berbagai perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan. Piutang perikatan timbul karena:
  - (1) Pemberian Pinjaman;
  - (2) Jual Beli
  - (3) Piutang Penjualan Kredit
  - (4) Piutang Kemitraan
  - (5) Imbalan Fasilitas Jasa
- (c) Kerugian Daerah. Kemungkinan terjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian daerah. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Penghentian Pengakuan Piutang, berdasarkan atas:

- (a) Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang.
- (b) Penghentian Pengakuan Piutang. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian

piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

## PENGAKUAN

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, secara garis besar terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang pendapatan daerah lainnya.

Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari pungutan pendapatan harus dipenuhi kriteria:

- (a) Telah diterbitkan surat ketetapan;
- (b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
- (c) Telah diterbitkan surat pemberitahuan tentang pajak daerah (SPTPD) oleh wajib pajak.

Pengakuan pendapatan pajak daerah yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan pajak daerah dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal;

3. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### PENGUKURAN

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- (a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
- (c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Pajak;
- (d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

#### Pemberian pinjaman

- (a) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(b) Penjualan Kredit

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

## **PENGUNGKAPAN**

### **PIUTANG BERDASARKAN PUNGUTAN**

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, penilaian dan pengukuran piutang;
- (b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (c) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Penyajian piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib bayar pada periode berjalan tahun dan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.

## PIUTANG BERDASARKAN PERIKATAN

Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran seluruh jenis piutang;
- (b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

## PIUTANG TUNTUTAN GANTI RUGI/TUNTUTAN PERBENDAHARAN

Di samping disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan TGR;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- d. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

## PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

***Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu loss contingency, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.***

***Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang.***

## **KUALITAS PIUTANG DAN PENYISIHAN PIUTANG**

### **Kualitas Piutang**

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Taksiran Piutang Tidak Tertagih</b>
<b>1.</b>	Lancar	<b>0,5 %</b>
<b>2.</b>	Kurang Lancar	<b>10 %</b>
<b>3.</b>	Diragukan	<b>50 %</b>
<b>4.</b>	Macet	<b>100 %</b>

Penggolongan kualitas piutang harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian karena berdasarkan penggolongan tersebut akan dilakukan penentuan besaran persentase atas penyisihan penyertaan bergulir tidak tertagih

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setahun berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang.

Bupati Pangkajene dan Kepulauan dapat melakukan restrukturisasi piutang daerah terhadap debitor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan debitor mengalami kesulitan pembayaran dan/atau debitor memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi. Cakupan restrukturisasi meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran, atau persetujuan penundaan pembayaran. Jadi, restrukturisasi piutang daerah dimaksud untuk memaksimalkan potensi penerimaan daerah.

Restrukturisasi piutang daerah dapat menyebabkan peningkatan kualitas piutang. Perubahan kualitas piutang daerah setelah persetujuan restrukturisasi dapat diubah adalah sebagai berikut:

- (a) setinggi-tingginya kualitas kurang lancar untuk piutang daerah yang sebelum restrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau kualitas macet; dan

- (b) tidak berubah, apabila piutang daerah yang sebelum memiliki kualitas kurang lancar.

### Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang yang dibedakan dalam empat jenis dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Karakteristik Umur
1.	Lancar	≤ 1 tahun dari tanggal jatuh tempo
2.	Kurang Lancar	> 1 – 3 tahun dari tanggal jatuh tempo
3.	Diragukan	> 3 – 5 tahun dari tanggal jatuh tempo
4.	Macet	> 5 tahun dari tanggal jatuh tempo

### Penyajian/Pencatatan Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

### Penyesuaian Penyisihan Piutang

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup



diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

#### PENGHENTIAN PENGAKUAN PIUTANG

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain karena pelunasan juga bisa dilakukan karena adanya penghapusan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah, penghapusan piutang dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusan bersyarat dan penghapusan mutlak. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih. Sementara itu penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapustagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapustagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal. Penghapusbukuan piutang tidak otomatis menghapus hak tagih yuridis-formil. Di lain pihak, upaya penagihan tetap dilakukan walaupun pemerintah sebagai kreditur sudah putus asa dan menghapus buku. Oleh karena itu, terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstra *comptabel*.

## Penghapusbukuan Piutang

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Secara umum, kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan **pada neraca pemerintah**, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

## Penghapustagihan Piutang

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku

Adapun kriteria penghapustagihan piutang antara lain:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada daerah untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua ancatan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan lelang.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk ekstrakomtabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomtabel*.

#### **Ketentuan tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang**

Berikut ini adalah ketentuan tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan piutang :

- a. Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak pembukuan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang;
- b. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tanpa menghapuskan hak tagih daerah;
- c. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih negara/daerah;
- d. Penghapusan piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah di urus secara optimal oleh instansi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan penyelesaiannya tidak mungkin lagi maka diserahkan kepada PUPN;
- e. PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun:
  - Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya
  - Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai

ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.

- f. Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh :
  - Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,-
  - Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,-
- g. Dalam hal piutang daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai pada point “ f “ dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
- h. Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) kepada Bupati, piutang tersebut meliputi :
  - Piutang daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah dan piutang daerah lainnya, tidak harus mendapatkan pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan, tetapi cukup keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
  - Piutang daerah terhadap piutang pemerintah pusat yang akan dihapuskan apabila setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Bupati yang bersangkutan.
- i. Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
  - Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan tertibnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;
  - Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.
- j. Penghapusan secara mutlak atas piutang negara/daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
  - Diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang.
  - Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.

Tentang tata cara penghapusan piutang yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak pembukuan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, diatur secara teknis oleh SKPD terkait.

#### Penerimaan Kembali atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
AKUNTANSI INVESTASI**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh investasi Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.

Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan konsolidasian, dan entitas akuntansi BUD dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan Akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

- (a) Penempatan uang yang termasuk dalam lingkup setara kas;
- (b) Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- (c) Kerjasama operasi; dan
- (d) Investasi dalam properti.

**DEFINISI**

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dan pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi

seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

#### BENTUK INVESTASI

Pemerintah Daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

#### KLASIFIKASI INVESTASI

Investasi Pemerintah Daerah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- (b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- (c) Berisiko rendah.

Dengan memperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- (a) Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- (b) Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan Partisipasi Pemerintah Daerah; atau



- (c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen ini dapat berupa:

- (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- (b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat berupa:

- (a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk, dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Daerah;
- (b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;

- (d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh Pemerintah Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Akuntansi untuk investasi Pemerintah Daerah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri

#### PENGAKUAN INVESTASI

Suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 20 butir (b), biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan.

## PENGUKURAN INVESTASI

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai beraih yang dapat direalisasikan.

Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.

Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.

Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

#### METODE PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

(b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan

(d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

(a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;

- (b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- (d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

#### PENGAKUAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

#### PELEPASAN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

#### PENGUNGKAPAN

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:

- (a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (b) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- (c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- (d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- (e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- (f) Perubahan pos investasi.

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI DANA BERGULIR**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi non permanen-dana bergulir dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

#### Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam penyajian seluruh dana bergulir Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas.

Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi dana bergulir pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:

- (e) Definisi;
- (f) Pengakuan;
- (g) Pengukuran; dan
- (h) Pengungkapan.

### DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Dana bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir diragukan tertagih adalah jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

## UMUM

Karakteristik utama dana bergulir adalah:

- (a) Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBD, diakui sebagai kekayaan daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah daerah.

- (b) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBD awal atau revisi APBD (APBD Perubahan)

- (c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana

bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

(d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).

(e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir.

Dana yang digulirkan oleh pemerintah daerah dapat ditagih untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

Dana bergulir bersumber dari:

APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang karena sifatnya dipergunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

1. Penarikan kembali pokok pinjaman dana bergulir;
2. Pendapatan dari dana bergulir;
3. Saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD; dan
4. Sumber-sumber lain yang sah dari program-program yang dapat disinergikan dan diintegrasikan, karena memiliki komitmen yang sama untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Dana yang disalurkan kepada masyarakat yang harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah tanpa disalurkan kembali kepada masyarakat atau dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah dan hendak disalurkan kembali kepada masyarakat dengan mengalokasikan pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran tidak memenuhi karakteristik dana bergulir tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang Jangka Panjang, sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo piutang yang bersangkutan. Karakteristik dana bergulir adalah dana yang dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke Rekening Kas Daerah (revolving fund) terlebih dahulu dan tanpa perlu pengalokasian pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai *executing agency* atau *chanelling agency* sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai *executing*



*agency*, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai *chanelling agency*, lembaga tersebut hanya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.

#### Akuntansi Dana Bergulir

Pengeluaran dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir. Rencana pengeluaran dana bergulir tersebut harus dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) meskipun secara teknis akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat pada Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pada saat pengeluaran dana bergulir terealisasi tersebut, dana bergulir dicatat di neraca sebesar harga perolehan dana bergulir dan tandingannya adalah Ekuitas. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Rencana penagihan dana bergulir yang tidak akan digulirkan kembali dianggarkan pada nomenklatur Penerimaan Pembiayaan – Dana Bergulir untuk pokok dana bergulir sedangkan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur lain-lain pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir yang diterima di Kas Daerah dicatat pada Penerimaan Pembiayaan – Dana Bergulir sedangkan penerimaan bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat pada lain-lain pendapatan asli daerah. Realisasi penerimaan pokok dana bergulir dicatat di neraca mengurangi dana bergulir dan tandingannya Ekuitas Dana Investasi - Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang.

Penagihan dana bergulir yang digulirkan kembali oleh Pemerintah Daerah tidak dilakukan pencatatan karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oleh Pemerintah Daerah ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBD.

#### PENGAKUAN DANA BERGULIR

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana bergulir apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah Daerah;

- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar dana bergulir dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan dana bergulir yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Alokasi anggaran untuk dana bergulir berada di BUD, tetapi pelaksanaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada SKPD. Walaupun pelaksanaan didelegasikan, tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap merupakan transaksi pembiayaan.

Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D-LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan.

#### PENGUKURAN DANA BERGULIR

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Hal tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kali dana bergulir sebesar dana yang digulirkan ke masyarakat ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perolehan dana bergulir.

#### PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

Pengukuran dana bergulir setelah saat perolehan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika pemerintah daerah pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Dana bergulir disajikan berdasarkan nilai perolehan yang belum dilunasi tersebut dikurangi dana bergulir diragukan tertagih (dana bergulir yang tidak dapat ditagih ditambah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat

ditagih). Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih diikuti dengan pencatatan untuk mengurangi ekuitas.

Harga perolehan dana bergulir dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### Dana bergulir diragukan tertagih

Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian, nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan.

Dana bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan pada periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat direalisasi. Dana bergulir diragukan tertagih terdiri dari dana bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perkiraan dana bergulir yang tidak tertagih (*diragukan dapat tertagih*). Dana bergulir yang tidak dapat tertagih harus didukung dengan bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan tetap harus dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dana bergulir diragukan tertagih ditentukan dengan melakukan analisis terhadap saldo dana bergulir yang masih *outstanding* berdasarkan berdasarkan pengalaman masa lalu pada setiap akhir periode.

Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

1. *Kualitas Lancar*, apabila 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, dengan *taksiran piutang tidak tertahih sebesar 5 %*
2. *Kualitas Kurang Lancar*, apabila 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun belum dilakukan pelunasan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, dengan *taksiran piutang tidak tertagih sebesar 10 %*;
3. *Kualitas Diragukan*, apabila 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, dengan *taksiran piutang tidak tertagih sebesar 50 %*; dan

4. *Kualitas Macet*, apabila diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, dengan taksiran piutang tidak tertagih sebesar 100%.

#### METODE PENILAIAN DANA BERGULIR

Penilaian dana bergulir Pemerintah Daerah dilakukan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) adalah nilai dana bergulir yang dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.

#### PENGAKUAN HASIL DARI DANA BERGULIR

Hasil investasi non permanen yang diperoleh dari dana bergulir dapat berupa bunga dari dana bergulir atau bagi hasil dari dana bergulir dicatat sebagai pendapatan. Hasil tersebut tidak termasuk pengembalian pokok dana bergulir. Hasil dari dana bergulir apabila tidak dimaksudkan untuk digulirkan diakui sebagai pendapatan pada saat bunga atau bagi hasil telah disetor ke kas daerah.

Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir digulirkan kepada masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat pengeluaran pembiayaan-dana bergulir sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sekaligus menambah investasi non-permanen dana bergulir dan ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam investasi jangka panjang di Neraca.

Pendapatan dari dana bergulir berupa bunga atau bagi hasil dapat digunakan secara langsung apabila dana bergulir tersebut dikelola secara teknis oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiaya pengeluaran operasional. Apabila bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tidak disetor ke kas daerah melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasil dari dana bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana bergulir yang digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional pada saat yang bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.

#### PENGUNGKAPAN

Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan dana bergulir, selain mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan

Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- (a) Dasar Penilaian Dana Bergulir;
- (b) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- (c) Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- (d) Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- (e) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PERSEDIAAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

### **PENDAHULUAN**

#### **Tujuan**

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

#### **Ruang Lingkup**

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan Ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

- (a) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
- (b) Instrumen Keuangan.

### **DEFINISI**

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

#### UMUM

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- (a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- (b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- (c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat terdiri dari:

- (a) Barang konsumsi;
- (b) Obat-obatan;
- (c) Alat Tulis Kantor;
- (d) Amunisi;
- (e) Bahan untuk pemeliharaan;
- (f) Suku cadang;
- (g) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- (h) Barang cetakan;
- (i) Pita cukai dan leges;
- (j) Bahan baku;
- (k) Barang dalam proses/setengah jadi;
- (l) Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (m) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengelompokan pada paragraf 9 jenis persediaan yang disajikan pada laporan persediaan meliputi jenis persediaan yang disimpan untuk tujuan berjaga-jaga sedangkan persediaan yang sifatnya dikonsumsi sesegara mungkin/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode tidak disajikan dalam laporan persediaan melainkan langsung diakui sebagai beban, pengelompokan persediaan meliputi :

<b>Akun persediaan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Kriteria</b>
<b>Persediaan habis pakai</b>	Persediaan ATK	Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Karcis dan benda berharga	Untuk dijual
	persediaan barang cetakan	Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Bola Lampu	Untuk berjaga-jaga
	Dst.....	
<b>Persediaan Bahan/Material</b>	Persediaan Bahan baku bangunan	Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Bahan/bibit tanaman	Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Bibit ternak	Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Bahan obat-obatan	Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Bahan kimia	Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Bahan Makanan	Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Bibit Ikan	Untuk diserahkan/Untuk berjaga-jaga
	Persediaan Bibit Tanaman	Untuk diserahkan/Untuk berjaga-jaga
	Dst.....	
<b>Persediaan Barang Lainnya</b>	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	Untuk diserahkan/dijual
	Suku cadang	Untuk berjaga-jaga
	Dst.....	

Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman dicatat sebagai persediaan.

Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



## PENGAKUAN

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, dilakukan perhitungan fisik masing-masing persediaan dan setiap persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan jika dilakukan dengan pembelian, Nilai HPP jika persediaan diproduksi sendiri dan nilai wajar jika persediaan yang perolehannya bukan pembelian atau produksi.

Terdapat dua pendekatan pengakuan persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset

pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Yang termasuk Persediaan untuk pendekatan aset adalah persediaan obat-obatan, persediaan alat tulis kantor di sekretariat SKPD, persediaan barang cetakan berupa formulir, persediaan suku cadang, persediaan alat-alat listrik dan persediaan yang sifatnya untuk berjaga-jaga.

Dalam pendekatan beban

setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Yang termasuk dalam pendekatan beban ini adalah persediaan alat tulis kantor untuk kegiatan, bahan-bahan makanan/minuman.

Selisih Persediaan. Selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus/penyimpan barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal seperti usang, kadaluarsa dan rusak, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal seperti hilang, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

## PENGUKURAN

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan

biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO) seperti obat-obatan, suku cadang, dan lain-lain atau yang memiliki nilai material.

Persediaan dicatat dengan menggunakan dua Metode yaitu metode perpetual dan metode Periodik.

#### Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Metode ini digunakan untuk persediaan obat-obatan. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

#### Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, Metode ini digunakan untuk Persediaan Alat Tulis Kantor dan Barang Cetak (formulir/Blangko) di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Penggunaan metode periodik maka fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir

diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

## PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan mengungkapkan:

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- (b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau/ perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- (c) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI ASET TETAP**

***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.***

### **PENDAHULUAN**

#### Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

#### Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:

- (a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
- (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Namun demikian, Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

### **DEFINISI**

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa (Residu) adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Overhaul aset tetap adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian peralatan mesin aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

Penyusutan adalah alokasi sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai kondisi semula.

Renovasi aset tetap adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan atau kapasitas.

## UMUM

Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:

- (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- (b) Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

## KLASIFIKASI ASET TETAP

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Adapun Kode Akun untuk Aset Tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang tercantum dalam Bagan Akun Standar (BAS) adalah sebagai berikut :

Kode Akun				Uraian Akun
1	3			<b>ASET TETAP</b>
1	3	1		<b>Tanah</b>
1	3	1	01	Tanah Perkampungan
1	3	1	01 01	Tanah Kampung
1	3	1	01 02	Tanah Emplasmen
1	3	1	01 03	Tanah Kuburan
1	3	1	01 04	Dst.....
1	3	1	02	Tanah Pertanian
1	3	1	02 01	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
1	3	1	02 02	Tanah Tegalan
1	3	1	02 03	Tanah Ladang
1	3	1	02 04	Dst.....
1	3	1	03	Tanah Perkebunan
1	3	1	03 01	Tanah Perkebunan .....
1	3	1	03 02	Dst.....
1	3	1	04	Kebun Campuran
1	3	1	04 01	Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
1	3	1	04 02	Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
1	3	1	04 03	Dst.....
1	3	1	05	Hutan
1	3	1	05 01	Hutan Lebat
1	3	1	05 02	Hutan Belukar
1	3	1	05 03	Hutan Tanaman Jenis
1	3	1	05 04	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
1	3	1	05 05	Hutan Untuk Penggunaan Khusus
1	3	1	05 06	Dst.....

1	3	1	06		Kolam Ikan
1	3	1	06	01	Tambak
1	3	1	06	02	Air Tawar
1	3	1	06	03	Dst.....
1	3	1	07		Danau/Rawa
1	3	1	07	01	Danau
1	3	1	07	02	Rawa
1	3	1	08		Tanah Tandus/Rusak
1	3	1	08	01	Tanah Tandus
1	3	1	08	02	Tanah Rusak
1	3	1	09		Alang-alang dan Padang Rumput
1	3	1	09	01	Alang-alang
1	3	1	09	02	Padang Rumput
1	3	1	10		Tanah Pengguna Lain
1	3	1	10	01	Tanah Pengguna Lain.....
1	3	1	10	02	Dst.....
1	3	1	11		Tanah Untuk Bangunan Gedung
1	3	1	11	01	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	1	11	02	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	1	11	03	Tanah Untuk Bangunan Industri
1	3	1	11	04	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
1	3	1	11	05	Tanah Kosong
1	3	1	11	06	Tanah Peternakan
1	3	1	11	07	Tanah Bangunan Pengairan
1	3	1	11	08	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
1	3	1	11	09	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
1	3	1	11	10	Dst.....
1	3	1	12		Tanah Pertambangan
1	3	1	12	01	Pertambangan .....
1	3	1	12	02	Dst.....
1	3	1	13		Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1	3	1	13	01	Tanah Lapangan Olah Raga
1	3	1	13	02	Tanah Lapangan Parkir
1	3	1	13	03	Tanah Lapangan Penimbun Barang
1	3	1	13	04	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1	3	1	13	05	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1	3	1	13	06	Tanah Lapangan Terbang
1	3	1	13	07	Tanah Untuk Bangunan Jalan
1	3	1	13	08	Tanah Untuk Bangunan Air
1	3	1	13	09	Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1	3	1	13	10	Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1	3	1	13	11	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1	3	1	13	12	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
1	3	1	13	13	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	1	13	14	Dst.....
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Peralatan dan Mesin</b>
1	3	2	01		Alat-Alat Besar Darat
1	3	2	01	01	Tractor
1	3	2	01	02	Grader
1	3	2	01	03	Excavator
1	3	2	01	04	Pile Driver
1	3	2	01	05	Hauler
1	3	2	01	06	Asphal Equipment
1	3	2	01	07	Compacting Equipment
1	3	2	01	08	Aggregate & Concrete Equipment
1	3	2	01	09	Loader
1	3	2	01	10	Alat Pengangkat
1	3	2	01	11	Mesin Proses
1	3	2	01	12	Dst.....
1	3	2	02		Alat-Alat Besar Apung
1	3	2	02	01	Dredger
1	3	2	02	02	Floating Excavator
1	3	2	02	03	Amphibi Dredger
1	3	2	02	04	Kapal Tarik
1	3	2	02	05	Mesin Proses Apung
1	3	2	02	06	Dst.....
1	3	2	03		Alat-alat Bantu
1	3	2	03	01	Alat Penarik
1	3	2	03	02	Feeder
1	3	2	03	03	Compressor
1	3	2	03	04	Electric Generating Set
1	3	2	03	05	Pompa
1	3	2	03	06	Mesin Bor
1	3	2	03	07	Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	2	03	08	Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	2	03	09	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator

1	3	2	03	10	Dst.....
1	3	2	04		Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	2	04	01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	2	04	02	Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	2	04	03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	2	04	04	Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	2	04	05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	2	04	06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	2	04	07	Dst.....
1	3	2	05		Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1	3	2	05	01	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	2	05	02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
1	3	2	05	03	Kendaraan Tak Bermotor Khusus
1	3	2	06		Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	2	06	01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang
1	3	2	06	02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
1	3	2	06	03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
1	3	2	07		Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	2	07	01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
1	3	2	07	02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
1	3	2	07	03	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	2	08		Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	2	08	01	Pesawat Terbang
1	3	2	08	02	Dst.....
1	3	2	09		Alat Bengkel Bermesin
1	3	2	09	01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
1	3	2	09	02	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1	3	2	09	03	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	2	09	04	Perkakas Bengkel Service
1	3	2	09	05	Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	2	09	06	Perkakas Bengkel Kayu
1	3	2	09	07	Perkakas Bengkel Khusus
1	3	2	09	08	Peralatan Las
1	3	2	09	09	Perkakas Pabrik Es
1	3	2	09	10	Dst.....
1	3	2	10		Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	2	10	01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	2	10	02	Perkakas Bengkel Listrik
1	3	2	10	03	Perkakas Bengkel Service
1	3	2	10	04	Perkakas Pengangkat
1	3	2	10	05	Perkakas Standar (Standart Tool)
1	3	2	10	06	Perkakas Khusus (Special Tool)
1	3	2	10	07	Perkakas Bengkel Kerja
1	3	2	10	08	Peralatan Tukang-tukang Besi
1	3	2	10	09	Peralatan Tukang Kayu
1	3	2	10	10	Peralatan Tukang Kulit
1	3	2	10	11	Peralatan Ukur, Gip & Feting
1	3	2	10	12	Dst.....
1	3	2	11		Alat Ukur
1	3	2	11	01	Alat Ukur universal
1	3	2	11	02	Alat Ukur/Test Intelegensia
1	3	2	11	03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1	3	2	11	04	Alat Ukur /Test Klinis Lain
1	3	2	11	05	Alat Calibrasi
1	3	2	11	06	Oscilloscope
1	3	2	11	07	Universal Tester
1	3	2	11	08	Alat Ukur/Pembanding
1	3	2	11	09	Alat Ukur Lainnya
1	3	2	11	10	Alat Timbangan/Blora
1	3	2	11	11	Anak Timbangan/Biasa
1	3	2	11	12	Takaran Kering
1	3	2	11	13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1	3	2	11	14	Takaran Latex/Getah Susu
1	3	2	11	15	Gelas Takar Berbagai Capasitas
1	3	2	11	16	Dst.....
1	3	2	12		Alat Pengolahan
1	3	2	12	01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	2	12	02	Alat Panen/Pengolahan
1	3	2	12	03	Alat-Alat Peternakan
1	3	2	12	04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	2	12	05	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	2	12	06	Alat Processing
1	3	2	12	07	Alat Pasca Panen
1	3	2	12	08	Alat Produksi Perikanan
1	3	2	12	09	Dst.....
1	3	2	13		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1	3	2	13	01	Alat Pemeliharaan Tanaman
1	3	2	13	02	Alat Panen



1	3	2	13	03	Alat Penyimpanan
1	3	2	13	04	Alat Laboratorium
1	3	2	13	05	Alat Penangkap Ikan
1	3	2	13	06	Dst.....
1	3	2	14		Alat Kantor
1	3	2	14	01	Mesin Tik
1	3	2	14	02	Mesin Hitung/Jumlah
1	3	2	14	03	Alat Reproduksi (Pengganda)
1	3	2	14	04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1	3	2	14	05	Alat Kantor Lainnya
1	3	2	14	06	Dst.....
1	3	2	15		Alat Rumah Tangga
1	3	2	15	01	Meubelair
1	3	2	15	02	Alat Pengukur Waktu
1	3	2	15	03	Alat Pembersih
1	3	2	15	04	Alat Pendingin
1	3	2	15	05	Alat Dapur
1	3	2	15	06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1	3	2	15	07	Alat Pemadam Kebakaran
1	3	2	15	08	Dst.....
1	3	2	16		Komputer
1	3	2	16	01	Komputer Unit/Jaringan
1	3	2	16	02	Personal Komputer
1	3	2	16	03	Peralatan Komputer Mainframe
1	3	2	16	04	Peralatan Mini Komputer
1	3	2	16	05	Peralatan Personal Komputer
1	3	2	16	06	Perlatan Jaringan
1	3	2	16	07	Dst.....
1	3	2	17		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	2	17	01	Meja Kerja Pejabat
1	3	2	17	02	Meja Rapat Pejabat
1	3	2	17	03	Kursi Kerja Pejabat
1	3	2	17	04	Kursi Rapat Pejabat
1	3	2	17	05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	2	17	06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1	3	2	17	07	Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	2	17	08	Dst.....
1	3	2	18		Alat Studio
1	3	2	18	01	Peralatan Studio Visual
1	3	2	18	02	Peralatan Studio Video dan Film
1	3	2	18	03	Peralatan Studio Video dan Film A
1	3	2	18	04	Peralatan Cetak
1	3	2	18	05	Peralatan Computing
1	3	2	18	06	Peralatan Pemetaan Ukur
1	3	2	18	07	Dst.....
1	3	2	19		Alat Komunikasi
1	3	2	19	01	Alat Komunikasi Telephone
1	3	2	19	02	Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	2	19	03	Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	2	19	04	Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	2	19	05	Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	2	19	06	Alat Komunikasi Sosial
1	3	2	19	07	Alat-alat Sandi
1	3	2	19	08	Dst.....
1	3	2	20		Peralatan Pemancar
1	3	2	20	01	Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	2	20	02	Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	2	20	03	Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	2	20	04	Peralatan Pemancar UHF
1	3	2	20	05	Peralatan Pemancar SHF
1	3	2	20	06	Peralatan Antena MF/MW
1	3	2	20	07	Peralatan Antena HF/SW
1	3	2	20	08	Peralatan Antena VHF/FM
1	3	2	20	09	Peralatan Antena UHF
1	3	2	20	10	Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	2	20	11	Peralatan Translator VHF/VHF
1	3	2	20	12	Peralatan Translator UHF/UHF
1	3	2	20	13	Peralatan Translator VHF/UHF
1	3	2	20	14	Peralatan Translator UHF/VHF
1	3	2	20	15	Peralatan Microwave FPU
1	3	2	20	16	Peralatan Microwave Terrestrial
1	3	2	20	17	Peralatan Microwave TVRO
1	3	2	20	18	Peralatan Dummy Load
1	3	2	20	19	Switcher Antena
1	3	2	20	20	Switcher/Menara Antena
1	3	2	20	21	Feeder
1	3	2	20	22	Humidity Control
1	3	2	20	23	Program Input Equipment
1	3	2	20	24	Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	2	20	25	Dst.....

1	3	2	21		Alat Kedokteran
1	3	2	21	01	Alat Kedokteran Umum
1	3	2	21	02	Alat Kedokteran Gigi
1	3	2	21	03	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	2	21	04	Alat Kedokteran Mata
1	3	2	21	05	Alat Kedokteran T.H.T
1	3	2	21	06	Alat Rotgen
1	3	2	21	07	Alat Farmasi
1	3	2	21	08	Alat Kedokteran Bedah
1	3	2	21	09	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	2	21	10	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1	3	2	21	11	Mortuary
1	3	2	21	12	Alat Kesehatan Anak
1	3	2	21	13	Poliklinik Set
1	3	2	21	14	Penderita Cacat Tubuh
1	3	2	21	15	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1	3	2	21	16	Alat Kedokteran Jantung
1	3	2	21	17	Alat Kedokteran Nuklir
1	3	2	21	18	Alat Kedokteran Radiologi
1	3	2	21	19	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	2	21	20	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	2	21	21	Alat Kedokteran Jiwa
1	3	2	21	22	Alat Kedokteran Hewan
1	3	2	21	23	Dst.....
1	3	2	22		Alat Kesehatan
1	3	2	22	01	Alat Kesehatan Perawatan
1	3	2	22	02	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	2	22	03	Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	2	22	04	Alat Kesehatan Matra Udara
1	3	2	22	05	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1	3	2	22	06	Alat Kesehatan Olahraga
1	3	2	22	07	Dst.....
1	3	2	23		Unit-Unit Laboratorium
1	3	2	23	01	Alat Laboratorium Kimia Air
1	3	2	23	02	Alat Laboratorium Microbiologi
1	3	2	23	03	Alat Laboratorium Hidro Kimia
1	3	2	23	04	Alat Laboratorium Model/Hidrolika
1	3	2	23	05	Alat Laboratorium Buatan/Geologi
1	3	2	23	06	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	2	23	07	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1	3	2	23	08	Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan
1	3	2	23	09	Alat Laboratorium Cangkok Tanam
1	3	2	23	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
1	3	2	23	11	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1	3	2	23	12	Alat Laboratorium Umum
1	3	2	23	13	Alat Laboratorium Umum A
1	3	2	23	14	Alat Laboratorium Kedokteran
1	3	2	23	15	Alat Laboratorium Microbiologi
1	3	2	23	16	Alat Laboratorium Kimia
1	3	2	23	17	Alat Laboratorium Microbiologi A
1	3	2	23	18	Alat Laboratorium Patologi
1	3	2	23	19	Alat Laboratorium Immunologi
1	3	2	23	20	Alat Laboratorium Hematologi
1	3	2	23	21	Alat Laboratorium Film
1	3	2	23	22	Alat Laboratorium Makanan
1	3	2	23	23	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	2	23	24	Alat Laboratorium Farmasi
1	3	2	23	25	Alat Laboratorium Fisika
1	3	2	23	26	Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	3	2	23	27	Alat Laboratorium Klimatologi
1	3	2	23	28	Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	2	23	29	Alat Laboratorium Pasir
1	3	2	23	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1	3	2	23	31	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1	3	2	23	32	Alat Laboratorium Metalography
1	3	2	23	33	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	3	2	23	34	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	3	2	23	35	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	2	23	36	Alat Laboratorium Matrologie
1	3	2	23	37	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
1	3	2	23	38	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	3	2	23	39	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
1	3	2	23	40	Alat Laboratorium Uji Tekstel
1	3	2	23	41	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	2	23	42	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1	3	2	23	43	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
1	3	2	23	44	Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	2	23	45	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	2	23	46	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	2	23	47	Alat Laboratorium Pertanian A
1	3	2	23	48	Alat Laboratorium Pertanian B
1	3	2	23	49	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	2	23	50	Alat Laboratorium Energi Surya
1	3	2	23	51	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass

1	3	2	23	52	Alat Laboratorium Oceanografi
1	3	2	23	53	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1	3	2	23	54	Alat Laboratorium Biologi Peralatan
1	3	2	23	55	Alat Laboratorium Biologi
1	3	2	23	56	Alat Laboratorium Geofisika
1	3	2	23	57	Alat Laboratorium Tambang
1	3	2	23	58	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1	3	2	23	59	Alat Laboratorium Proses Industri
1	3	2	23	60	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	3	2	23	61	Laboratorium Kearsipan
1	3	2	23	62	Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1	3	2	23	63	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
1	3	2	23	64	Alat Laboratorium Lainnya
1	3	2	23	65	Dst.....
1	3	2	24		Alat Peraga/Praktek Sekolah
1	3	2	24	01	Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1	3	2	24	02	Bidang Studi : Matematika
1	3	2	24	03	Bidang Studi : IPA Dasar
1	3	2	24	04	Bidang Studi : IPA Lanjutan
1	3	2	24	05	Bidang Studi : IPA Menengah
1	3	2	24	06	Bidang Studi : IPA Atas
1	3	2	24	07	Bidang Studi : IPS
1	3	2	24	08	Bidang Studi : Agama Islam
1	3	2	24	09	Bidang Studi : Ketrampilan
1	3	2	24	10	Bidang Studi : Kesenian
1	3	2	24	11	Bidang Studi : Olah Raga
1	3	2	24	12	Bidang Studi : PMP
1	3	2	24	13	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
1	3	2	24	14	Dst.....
1	3	2	25		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	2	25	01	<i>Analytical instrument</i>
1	3	2	25	02	<i>Instrument Probe/Sensor</i>
1	3	2	25	03	<i>General Laboratory Tool</i>
1	3	2	25	04	<i>Instrument Probe/Sensor A</i>
1	3	2	25	05	<i>Glassware Plastic/Utensils</i>
1	3	2	25	06	<i>Laboratory Safety Equipment</i>
1	3	2	25	07	Dst.....
1	3	2	26		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1	3	2	26	01	<i>Radiation Detector</i>
1	3	2	26	02	<i>Modular Counting and Scientific</i>
1	3	2	26	03	<i>Assembly/Accounting System</i>
1	3	2	26	04	<i>Recorder Display</i>
1	3	2	26	05	<i>System/Power Supply</i>
1	3	2	26	06	<i>Measuring / Testing Device</i>
1	3	2	26	07	<i>Opto Electronics</i>
1	3	2	26	08	<i>Accelerator</i>
1	3	2	26	09	<i>Reactor Experimental System</i>
1	3	2	26	10	Dst.....
1	3	2	27		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1	3	2	27	01	Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	2	27	02	Alat Kesehatan Kerja
1	3	2	27	03	Proteksi Lingkungan
1	3	2	27	04	Meteorological Equipment
1	3	2	27	05	Sumber Radiasi
1	3	2	27	06	Dst.....
1	3	2	28		Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1	3	2	28	01	<i>Radiation Application Equipment</i>
1	3	2	28	02	<i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
1	3	2	28	03	Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
1	3	2	28	04	Peralatan Hidrologi
1	3	2	28	05	Dst.....
1	3	2	29		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	2	29	01	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
1	3	2	29	02	Alat Laboratorium Kualitas Udara
1	3	2	29	03	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	2	29	04	Laboratorium Lingkungan
1	3	2	29	05	Alat Laboratorium Penunjang
1	3	2	29	06	Dst.....
1	3	2	30		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	2	30	01	<i>Towing Carriage</i>
1	3	2	30	02	<i>Wave Generator and Absorber</i>
1	3	2	30	03	<i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
1	3	2	30	04	<i>Cavitation Tunnel</i>
1	3	2	30	05	<i>Overhead Cranes</i>
1	3	2	30	06	Peralatan umum
1	3	2	30	07	Pemesinan : Model Ship Workshop
1	3	2	30	08	Pemesinan : Propeller Model Workshop
1	3	2	30	09	Pemesinan : Mechanical Workshop
1	3	2	30	10	Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
1	3	2	30	11	Pemesinan Painting Shop
1	3	2	30	12	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop

1	3	2	30	13	Pemesinan : Electrical Workshop
1	3	2	30	14	MOB
1	3	2	30	15	Photo and Film Equipment
1	3	2	30	16	Dst.....
1	3	2	31		Senjata Api
1	3	2	31	01	Senjata Genggam
1	3	2	31	02	Senjata Pinggang
1	3	2	31	03	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
1	3	2	31	04	Senapan Mesin
1	3	2	31	05	Mortir
1	3	2	31	06	Anti Lapis Baja
1	3	2	31	07	Artilleri Medan (Armed)
1	3	2	31	08	Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)
1	3	2	31	09	Peluru Kendali/Rudal
1	3	2	31	10	Kavaleri
1	3	2	31	11	Senjata Lain-lain
1	3	2	32		Persenjataan Non Senjata Api
1	3	2	32	01	Alat Keamanan
1	3	2	32	02	Non Senjata Api
1	3	2	33		Amunisi
1	3	2	33	01	Amunisi Umum
1	3	2	33	02	Amunisi Darat
1	3	2	33	03	Dst.....
1	3	2	34		Senjata Sinar
1	3	2	34	01	Laser
1	3	2	34	02	Dst.....
1	3	2	35		Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	2	35	01	Alat Bantu Keamanan
1	3	2	35	02	Alat Perlindungan
1	3	2	35	03	Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
1	3	2	35	04	Dst.....
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Gedung dan Bangunan</b>
1	3	3	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Kantor
1	3	3	01	02	Bangunan Gudang
1	3	3	01	03	Bangunan Gudang Untuk Bengkel
1	3	3	01	04	Bangunan Gedung Instalasi
1	3	3	01	05	Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	3	01	06	Bangunan Kesehatan
1	3	3	01	07	Bangunan Oceanarium/Opseratorium
1	3	3	01	08	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	3	01	09	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	3	01	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	3	01	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
1	3	3	01	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	3	01	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1	3	3	01	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	3	01	15	Bangunan Gedung Pematangan Hewan
1	3	3	01	16	Bangunan Gedung Pabrik
1	3	3	01	17	Bangunan Stasiun Bus
1	3	3	01	18	Bangunan Kandang Hewan/Ternak
1	3	3	01	19	Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	3	01	20	Bangunan Gedung Museum
1	3	3	01	21	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
1	3	3	01	22	Bangunan Pengujian Kelaikan
1	3	3	01	23	Bangunan Lembaga Pemasarakatan
1	3	3	01	24	Bangunan Rumah Tahanan
1	3	3	01	25	Bangunan Gedung Kramatorium
1	3	3	01	26	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	3	01	27	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	3	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	3	02	01	Rumah Negara Golongan I
1	3	3	02	02	Rumah Negara Golongan II
1	3	3	02	03	Rumah Negara Golongan III
1	3	3	02	04	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1	3	3	02	05	Asrama
1	3	3	02	06	Hotel
1	3	3	02	07	Motel
1	3	3	02	08	Flat/Rumah Susun
1	3	3	02	09	Dst.....
1	3	3	03		Bangunan Menara
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
1	3	3	03	02	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
1	3	3	03	03	Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	3	03	04	Dst.....
1	3	3	04		Bangunan Bersejarah
1	3	3	04	01	Istana Peringatan
1	3	3	04	02	Rumah Adat

1	3	3	04	03	Rumah Peninggalan Sejarah
1	3	3	04	04	Makam Sejarah
1	3	3	04	05	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
1	3	3	04	06	Dst.....
1	3	3	05		Tugu Peringatan
1	3	3	05	01	Tugu Kemerdekaan
1	3	3	05	02	Tugu Pembangunan
1	3	3	05	03	Tugu Peringatan Lainnya
1	3	3	06		Candi
1	3	3	06	01	Candi Hindhu
1	3	3	06	02	Candi Budha
1	3	3	06	03	Candi Lainnya
1	3	3	07		Monumen/Bangunan Bersejarah
1	3	3	07	01	Bangunan Bersejarah Lainnya
1	3	3	08		Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	3	08	01	Tugu/Tanda Batas
1	3	3	08	02	Dst.....
1	3	3	09		Rambu-Rambu
1	3	3	09	01	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
1	3	3	09	02	Rambu Tidak Bersuar
1	3	3	09	03	Dst.....
1	3	3	10		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	3	10	01	<i>Rumwey/Threshold Light</i>
1	3	3	10	02	<i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
1	3	3	10	03	<i>Approach Light</i>
1	3	3	10	04	<i>Rumwey Identification Light (Rells)</i>
1	3	3	10	05	<i>Signal</i>
1	3	3	10	06	<i>Flood Light</i>
1	3	3	10	07	Dst.....
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>
1	3	4	01		Jalan
1	3	4	01	01	Jalan Negara/Nasional
1	3	4	01	02	Jalan Propinsi
1	3	4	01	03	Jalan Kabupaten/Kota
1	3	4	01	04	Jalan Desa
1	3	4	01	05	Jalan Khusus
1	3	4	01	06	Jalan Tol
1	3	4	01	07	Jalan Kereta
1	3	4	01	08	Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	4	01	09	Dst.....
1	3	4	02		Jembatan
1	3	4	02	01	Jembatan Negara/Nasional
1	3	4	02	02	Jembatan Propinsi
1	3	4	02	03	Jembatan Kabupaten/Kota
1	3	4	02	04	Jembatan Desa
1	3	4	02	05	Jembatan Khusus
1	3	4	02	06	Jembatan Pada Jalan Tol
1	3	4	02	07	Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1	3	4	02	08	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	4	02	09	Jembatan penyeberangan
1	3	4	02	10	Dst.....
1	3	4	03		Bangunan Air Irigasi
1	3	4	03	01	Bangunan Waduk
1	3	4	03	02	Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	4	03	03	Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	4	03	04	Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	4	03	05	Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	4	03	06	Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	4	03	07	Dst.....
1	3	4	04		Bangunan Air Pasang Surut
1	3	4	04	01	Bangunan Waduk
1	3	4	04	02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1	3	4	04	03	Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	4	04	04	Bangunan Pembuang Pasang Surut
1	3	4	04	05	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	4	04	06	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1	3	4	04	07	Bangunan Sawah Pasang Surut
1	3	4	04	08	Dst.....
1	3	4	05		Bangunan Air Rawa
1	3	4	05	01	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
1	3	4	05	02	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1	3	4	05	03	Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1	3	4	05	04	Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1	3	4	05	05	Bangunan Pengamanan Pasang Surut
1	3	4	05	06	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1	3	4	05	07	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa

1	3	4	05	08	Dst.....
1	3	4	06		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	4	06	01	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1	3	4	06	02	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
1	3	4	06	03	Bangunan Pembuang Pengaman
1	3	4	06	04	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	4	06	05	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
1	3	4	06	06	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
1	3	4	06	07	Dst.....
1	3	4	07		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	4	07	01	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	03	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	04	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	05	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	06	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	4	07	07	Dst.....
1	3	4	08		Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	4	08	01	Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	4	08	02	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1	3	4	08	03	Bangunan Pembawa Air Bersih
1	3	4	08	04	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	4	08	05	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	4	08	06	Dst.....
1	3	4	09		Bangunan Air Kotor
1	3	4	09	01	Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	4	09	02	Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	4	09	03	Bangunan Pembuangan Air Kotor
1	3	4	09	04	Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	4	09	05	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	4	09	06	Dst.....
1	3	4	10		Bangunan Air
1	3	4	10	01	Bangunan Air Laut
1	3	4	10	02	Bangunan Air Tawar
1	3	4	10	03	Dst.....
1	3	4	11		Instalasi Air Minum Bersih
1	3	4	11	01	Air Muka Tanah
1	3	4	11	02	Air Sumber /Mata Air
1	3	4	11	03	Air Tanah Dalam
1	3	4	11	04	Air Tanah Dangkal
1	3	4	11	05	Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	4	11	06	Dst.....
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor
1	3	4	12	01	Instalasi Air Kotor
1	3	4	12	02	Instalasi Air Buangan Industri
1	3	4	12	03	Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	4	12	04	Dst.....
1	3	4	13		Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik
1	3	4	13	01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	4	13	02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1	3	4	14		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	4	14	01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan .....
1	3	4	14	02	Dst.....
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	4	15	01	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	4	15	02	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1	3	4	15	03	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
1	3	4	15	04	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1	3	4	15	05	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	4	15	06	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1	3	4	15	07	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1	3	4	15	08	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1	3	4	15	09	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	3	4	15	10	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	4	15	11	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)
1	3	4	15	12	Dst.....
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik
1	3	4	16	01	Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	4	16	02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	4	16	03	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	4	16	04	Dst.....
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan
1	3	4	17	01	Instalasi Pertahanan Di Darat
1	3	4	17	02	Dst.....
1	3	4	18		Instalasi Gas

1	3	4	18	01	Instalasi Gardu Gas
1	3	4	18	02	Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	3	4	19		Instalasi Pengaman
1	3	4	19	01	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	4	19	02	Dst.....
1	3	4	20		Jaringan Air Minum
1	3	4	20	01	Jaringan Pembawa
1	3	4	20	02	Jaringan Induk Distribusi
1	3	4	20	03	Jaringan Cabang Distribusi
1	3	4	20	04	Jaringan Sambungan ke rumah
1	3	4	20	05	Dst.....
1	3	4	21		Jaringan Listrik
1	3	4	21	01	Jaringan Transmisi
1	3	4	21	02	Jaringan Distribusi
1	3	4	22		Jaringan Telepon
1	3	4	22	01	Jaringan Telepon Di atas Tanah
1	3	4	22	02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah
1	3	4	22	03	Jaringan Telepon Didalam Air
1	3	4	23		Jaringan Gas
1	3	4	23	01	Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	4	23	02	Jaringan Pipa Distribusi
1	3	4	23	03	Jaringan Pipa Dinas
1	3	4	23	04	Jaringan BBM
1	3	4	23	05	Dst.....
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>			<b>Aset Tetap Lainnya</b>
1	3	5	01		Buku
1	3	5	01	01	Umum
1	3	5	01	02	Filsafat
1	3	5	01	03	Agama
1	3	5	01	04	Ilmu Sosial
1	3	5	01	05	Ilmu Bahasa
1	3	5	01	06	Matematika & Pengetahuan alam
1	3	5	01	07	Ilmu Pengetahuan Praktis
1	3	5	01	08	Arsitektur, Kesenian, Olah raga
1	3	5	01	09	Geografi, Biografi, Sejarah
1	3	5	01	10	Dst.....
1	3	5	02		Terbitan
1	3	5	02	01	Terbitan Berkala
1	3	5	02	02	Buku Laporan
1	3	5	02	03	Dst.....
1	3	5	03		Barang-Barang Perpustakaan
1	3	5	03	01	Peta
1	3	5	03	02	Naskah (Manuskrip)
1	3	5	03	03	Musik
1	3	5	03	04	Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
1	3	5	03	05	<i>Three Dimensional Artetacs and Realita</i>
1	3	5	03	06	Bentuk <i>Micro (Microform)</i>
1	3	5	03	07	Rekaman Suara ( <i>Sound Recording</i> )
1	3	5	03	08	Berkas Komputer ( <i>Computer Files</i> )
1	3	5	03	09	Film Bergerak dan Rekaman Video
1	3	5	03	10	Tarscalt
1	3	5	03	11	Dst.....
1	3	5	04		Barang Bercorak Kebudayaan
1	3	5	04	01	Pahatan
1	3	5	04	02	Lukisan
1	3	5	04	03	Alat Kesenian
1	3	5	04	04	Alat Olah Raga
1	3	5	04	05	Tanda Penghargaan
1	3	5	04	06	Maket dan Foto Dokumen
1	3	5	04	07	Benda-benda Bersejarah
1	3	5	04	08	Barang Kerajinan
1	3	5	04	09	Dst.....
1	3	5	05		Alat Olah Raga Lainnya
1	3	5	05	01	Senam
1	3	5	05	02	Alat Olah Raga Air
1	3	5	05	03	Alat Olah Raga Udara
1	3	5	05	04	Dst.....
1	3	5	06		Hewan
1	3	5	06	01	Binatang Ternak
1	3	5	06	02	Binatang Unggas
1	3	5	06	03	Binatang Melata
1	3	5	06	04	Binatang Ikan
1	3	5	06	05	Hewan Kebun Binatang
1	3	5	06	06	Hewan Pengamanan
1	3	5	06	07	Dst.....
1	3	5	07		Tanaman

1	3	5	07	01	Tanaman Perkebunan
1	3	5	07	02	Tanaman Holtikultura
1	3	5	07	03	Tanaman Kehutanan
1	3	5	07	04	Tanaman Hias
1	3	5	07	05	Tanaman Obat dan Kosmetika
1	3	5	07	06	Dst.....
1	3	5	08		Aset Tetap Renovasi
1	3	5	08	01	Aset Tetap Renovasi .....
1	3	5	08	02	Dst.....
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>			<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>
1	3	6	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	6	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan .....
1	3	6	01	02	Dst.....
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>			<b>Akumulasi Penyusutan</b>
1	3	7	01		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	3	7	01	01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
1	3	7	01	02	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
1	3	7	01	03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
1	3	7	01	04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	7	01	05	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1	3	7	01	06	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
1	3	7	01	07	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1	3	7	01	08	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
1	3	7	01	09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
1	3	7	01	10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	7	01	11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
1	3	7	01	12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
1	3	7	01	13	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
1	3	7	01	14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor
1	3	7	01	15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
1	3	7	01	16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer
1	3	7	01	17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	7	01	18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
1	3	7	01	19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
1	3	7	01	20	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
1	3	7	01	21	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
1	3	7	01	22	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
1	3	7	01	23	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
1	3	7	01	24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1	3	7	01	25	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	7	01	26	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1	3	7	01	27	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1	3	7	01	28	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1	3	7	01	29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	7	01	30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1	3	7	01	31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api
1	3	7	01	32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
1	3	7	01	33	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
1	3	7	02		Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	3	7	02	01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	7	02	02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	7	02	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	7	02	04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah
1	3	7	02	05	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan
1	3	7	02	06	Akumulasi Penyusutan Candi
1	3	7	02	07	Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
1	3	7	02	08	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	7	02	09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
1	3	7	02	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1	3	7	03		Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
1	3	7	03	01	Akumulasi Penyusutan Jalan
1	3	7	03	02	Akumulasi Penyusutan Jembatan
1	3	7	03	03	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi
1	3	7	03	04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
1	3	7	03	05	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa
1	3	7	03	06	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	7	03	07	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	7	03	08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
1	3	7	03	09	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor
1	3	7	03	10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	7	03	11	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
1	3	7	03	12	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor
1	3	7	03	13	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	7	03	14	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	7	03	15	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	7	03	16	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
1	3	7	03	17	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan
1	3	7	03	18	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas
1	3	7	03	19	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman
1	3	7	03	20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum
1	3	7	03	21	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik
1	3	7	03	22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon



Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan tetap dilakukan pencatatan dan merupakan lampiran Laporan Keuangan dan dijelaskan didalam CaLK.

#### PENGAKUAN ASET TETAP

Aset tetap diakui pada saat mamfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (f) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat

dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

#### PENILAIAN AWAL ASET TETAP

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk tujuan kebijakan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya. Penilaian yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

#### KOMPONEN BIAYA

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- (a) biaya persiapan tempat;
- (b) biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- (c) biaya pemasangan (*instalation cost*);
- (d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- (e) biaya konstruksi.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

## KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke-salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.

## PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

## PERTUKARAN ASET (EXCHANGES OF ASSETS)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

## ASET DONASI

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah

dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### RENOVASI ASET TETAP

Suatu satuan kerja SKPD dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun aset tetap lainnya jarang ditemukan. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu SKPD direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker atau SKPD, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Renovasi aset tetap milik sendiri;
2. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan; dan
3. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

Penjelasan terhadap ketiga jenis renovasi tersebut diuraikan di bawah ini.

#### Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan satuan kerja pada SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

### Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu SKPD;
2. Renovasi aset tetap milik satuan kerja SKPD lain;
3. Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan
4. Renovasi aset tetap milik SKPD lain.

Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset renovasi ini belum juga diserahkan, maka SKPD yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

### Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja SKPD, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
2. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMD, yayasan, dan lain-lain).

Renovasi semacam ini, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan sebagaimana butir 2 di atas, yaitu bahwa pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok

aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan, maka akan dicatat sebagai KDP.

Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut (sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu) telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja SKPD pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

#### Penambahan Nilai dan Masa Manfaat Pemeliharaan/Renovasi/Overhaul

Kreteria nilai kapitalisasi Penambahan Nilai dan Masa Manfaat Pemeliharaan/Renovasi/Overhaul atau batasan *capital expenditure* setelah perolehan awal aset tetap yang dikeluarkan sebagai belanja modal sebagai berikut:

Tabel. Penambahan Nilai dan Masa Manfaat Pemeliharaan/Renovasi/Overhaul

<b>URAIAN</b>	<b>Presentase (Penambahan Nilai) dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
Peralatan dan Mesin	>0% s.d 20%	0
	>20% s.d 50%	2
	>50% s.d 75%	4
	>75% s.d 100%	5
	> 100%	5
Gedung dan Bangunan	>0% s.d 20%	0
	>20% s.d 50%	5
	>50% s.d 75%	10
	>75% s.d 100%	15
	>100%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan	>0% s.d 15%	0
	>15% s.d 30%	2
	>30% s.d 45%	3
	>45% s.d 60%	5
	>60% s.d 75%	7
	>75% s.d 90%	10
	>90%	15

#### PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

Pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi. Pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu tahun (memperpanjang manfaat aset tersebut



dari yang direncanakan semula atau peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja) disebut dengan pengeluaran modal (*capital expenditure*) sedangkan pengeluaran yang memberikan manfaat kurang dari satu tahun (termasuk pengeluaran untuk mempertahankan kondisi aset tetap) disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Pemeliharaan aset tetap yang sifatnya rutin/swakelola tidak akan menambah nilai dan masa manfaat aset tetap atau tidak ada batasan *capital expenditure*, antara lain :

- Pembersihan AC secara rutin;
- Pergantian oli/pelumas kendaraan bermotor
- Penambalan jalan, penambalan irigasi, penutupan plat drainase;
- Penggantian lampu penerang berupa bola lampu;
- Irigasi/Drainase yang sifatnya pengerukan lumpur atau pembersihan jaringan irigasi/saluran irigasi.

Pembedaan antara *capital expenditure* dan *revenue expenditure* selain dari adanya penambahan manfaat aset atau tidak, juga dapat dilihat dari besarnya jumlah pengeluaran. Misalnya, sebuah pembelian inventaris berupa jam dinding seharga Rp20.000 harus dicatat sebagai pengeluaran untuk aset tetap karena jam dinding tersebut dapat digunakan lebih dari satu tahun. Akan tetapi karena nilainya yang kecil tidak mungkin mencatat dan memperlakukan biaya tersebut seperti biaya perolehan aset yang besar. Untuk itu pemerintah harus menentukan batasan pengeluaran untuk memperoleh aset yang dapat disebut juga dengan *capitalization threshold* (nilai satuan minimum kapitalisasi aset). SAP tidak menentukan besarnya *capitalization threshold* ini tetapi memberikan kebebasan kepada masing-masing entitas untuk menentukan sendiri.

#### Pengakuan Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*).

Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya-biaya lain yang dikeluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.

Sebaliknya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban (*expense / revenue expenditure*).

### Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikaitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.

Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset tetap diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*capitalization threshold*) yang mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan ke dalam nilai tercatat aset tetap. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa (*expense*). Contoh dari kasus tersebut adalah pengeluaran untuk memulihkan kembali fungsi tanggul lumpur Sidoarjo, tanggul pemecah gelombang, dan tanggul penahan lahar di lereng gunung Merapi.

### PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP (REVALUATION)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

## NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI DAN EXTRA COMPTABLE

Extra Comptable adalah hasil dari belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap atau batas kapitalisasi (*capital threshold*), dan piutang yang sudah dikategorikan macet serta akan dilakukan hapus buku.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi adalah batas minimal pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat diakui sebagai belanja modal didalam penganggaran dan diakui sebagai Aset tetap.

Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut :

Berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relative material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relative material.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal dan diakui sebagai Aset tetap, jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- (a) Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Perolehan aset tetap dan aset lainnya tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/disumbangkan/dihibahkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
- (c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi (*treshold capitalization*) untuk setiap jenis aset atau belanja modal sebagai berikut:

Tabel. batasan minimal kapitalisasi (*treshold capitalization*)

No	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap
1	Belanja Modal Tanah	Rp 0
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 300.000,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 0
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 20.000.000,00
5	Belanja Modal Aset tetap lainnya	Rp 100.000,00

Untuk batasan minimal kapitalisasi aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan tidak ada batasan minimal kapitalisasi sehingga berapapun nilainya akan dikapitalisasi. Batasan minimal kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan dikecualikan terhadap gedung dan bangunan perolehan di bawah tahun 2013 dengan nilai perolehan di bawah batasan minimal kapitalisasi.

Jika barang tidak memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud tabel diatas, maka dilakukan pencatatan pada daftar barang non aset tetap (*extra comptable*) dan dicatat pada beban oprasional (LO) yaitu beban lain-lain.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap diberlakukan apabila aset dimaksud berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal;
- (c) tidak dimaksudkan untuk dijual dan dihibahkan dalam operasi normal entitas;
- (d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (e) tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan;
- (f) tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan; dan
- (g) nilainya memenuhi ketentuan nilai minimum kapitalisasi aset.

#### **AKUNTANSI TANAH**

Tanah dapat diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi 4 (empat) kriteria berikut:

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual;
- (4) Diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah daerah.

Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. Misalnya, apabila Lembaga Perumahan Rakyat mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah untuk rakyat miskin. Pada Neraca Lembaga Perumahan Rakyat, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.

Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL). Berdasarkan hal tersebut, untuk contoh kasus diatas, Lembaga Perumahan Rakyat tetap mengakui/ mencatat tanah sebagai persediaan sebelum berita acara penyerahan dan sertifikat tanah diserahkan kepada masing-masing rakyat yang berhak.

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang

dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Pedoman terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- (3) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca

pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan (belanja), sehingga nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Pada umumnya, pembelian tanah dianggarkan dalam belanja modal, sehingga pengakuan aset tetap tanah didahului dengan pengakuan belanja modal yang akan mengurangi Kas Umum Daerah.

Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari statutanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Kepemilikan pemerintah atas tanah di luar negeri mungkin dibatasi oleh waktu sesuai hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan, sehingga kepemilikannya bersifat tidak permanen. Dalam hal demikian, biaya yang timbul atas perolehan hak (semacam hak guna/pakai atau hak pengelolaan) tersebut perlu disusutkan/diamortisasi.

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

Untuk aset tetap berupa tanah, berapa pun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset Tanah diperoleh.

Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap.

Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

#### AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin ini dapat berupa alat-alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan kepada aset persediaan. Misalkan Pemda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Dinas Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Perolehan peralatan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai dan angsuran.

Perolehan melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pengeluaran belanja modal. Sehingga terdapat 2 (dua) jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi belanja dan jurnal korolari untuk mencatat pengakuan aset tetap peralatan dan mesin.

#### AKUNTANSI GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa, sehingga setidaknya-tidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama.

Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, seperti rumah yang akan diserahkan kepada para transmigrans, maka rumah tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

#### AKUNTANSI JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.



Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan.

Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

#### AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, sebagai berikut:

- 1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- 2) Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
- 3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.
- 4) Pembelian hewan/tanaman/pohon yang akan menambah aset tetap lainnya antara lain :
  - Pembelian hewan yang sifatnya akan dikembangbiakkan atau untuk dikuasai lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak pembelian;
  - Pembelian tanaman/pohon yang sifatnya akan ditanam kembali, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung pada saat tanaman/pohon dibeli, akan menambah nilai aset tetap lainnya.
  - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas atau untuk diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pembelian/pembuatan keramba ikan yang dapat digunakan lebih dari 12 (dua belas) bulan akan menambah nilai aset tetap lainnya. Dan Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas atau untuk diserahkan kepada masyarakat.

#### ASET BUKU (*BOOK ASSETS*)

Aset tetap lainnya berupa buku di klasifikasikan sesuai jenis dan fungsinya yaitu :

- a. Perolehan buku yang akan menjadi buku perpustakaan di akui sebagai aset tetap lainnya dengan batas minimum Rp 100.000,00 per satuan nilai buku;
- b. Perolehan buku yang berasal dari belanja modal dan disimpan pada SKPD/Unit Kerja baik pada perpustakaan, ruang kerja, ruang belajar, ruang kepala sekolah/guru maupun ruangan lainnya, maka diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya sesuai dengan batasan minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Perolehan buku yang sumbernya dari dana APBD, dana Hibah dan dana lainnya, yang fungsinya di pinjamkan ke siswa/murid tidak di catat/diakui sebagai aset tetap lainnya, melainkan di catat sebagai extracontable dan tidak ada batasan minimum maupun maksimum untuk nilai perolehan bukunya;
- d. Perolehan buku yang peruntukannya untuk perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan di terapkan penghapusan pada saat buku tersebut sudah tidak dapat digunakan. Penerapan proses penghapusan buku, bisa dilakukan jika sudah lebih dari 12 (bulan) dari masa manfaat buku tersebut.

#### ASET TANAMAN/POHON (*PLANTS/TREES ASSETS*)

Kreteria aset tetap lainnya berupa tanaman/pohon dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

- a. Perolehan tanaman/pohon dari belanja modal diakui sebagai aset tetap lainnya dengan batasan minimum perolehan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satuan nilai tanaman/pohon;
- b. Perolehan tanaman/pohon dari belanja modal yang peruntukannya untuk langsung ditanam dan bukan melalui proses pembibitan, maka diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya sesuai dengan batasan minimum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Perolehan tanaman/pohon yang peruntukannya untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dan perolehannya melalui proses pembibitan maupun pengadaan langsung, maka tidak diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya. Tanaman/pohon yang sampai dengan akhir periode atau per 31 Desember belum ada Berita Acara Serah Terima kepada pihak ketiga/masyarakat, maka disajikan atau dicatat sebagai persediaan;
- d. Perolehan tanaman/pohon yang berasal dari belanja modal dan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka tidak diakui atau dicatat sebagai aset tetap lainnya melainkan dicatat sebagai *extracomptable*;
- e. Perolehan tanaman/pohon yang peruntukannya untuk langsung ditanam, tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat tanaman/pohon tersebut sudah mati atau hilang. Penerapan proses penghapusan tanaman/pohon, bisa dilakukan jika sudah lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak perolehan tanaman/pohon atau telah habis masa jaminan pemeliharaan tanaman/pohon tersebut.
- f. Perolehan tanaman/pohon yang akan diakui sebagai aset tetap lainnya adalah yang berasal dari belanja modal, bukan yang berasal dari biaya/belanja pemeliharaan.

#### ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

*Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (Heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

- (a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- (b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;

- (c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- (d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

### **ASET INFRASTRUKTUR (*INFRASTRUCTURE ASSETS*)**

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus

diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

#### ASET MILITER (*MILITARY ASSETS*)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

aset tetap ruang milik jalan (*road space assets*), adalah ruang yang terdapat pada batas sisi kiri hingga batas sisi kanan jalan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa-masa yang akan datang.

Jalan wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berstatus jalan kota, serta tanah jalan fasilitas umum, baik yang telah diserahkan dan yang belum diserahkan dimana tidak memungkinkan lagi terbit dokumen serah terima dari pengembang ke Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang disebabkan status/keberadaan pihak pengembang yang tidak jelas, maka menjadi bagian dari ruang milik jalan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan disajikan sebagai Aset Tetap – Tanah dengan penilaian berdasarkan nilai wajar saat perolehan sesuai SAP melalui penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Sedangkan jalan fasilitas umum yang belum diserahkan atau masih dikuasai oleh pihak pengembang dimana status/keberadaan pihak pengembang masih jelas, maka jalan tersebut bukan bagian dari ruang milik jalan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan hingga diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan nilai tanah yang berasal dari ruang milik jalan (*rumija*) yang sifatnya jalan baru atau pekerjaan/pengadaan tahun berjalan yang tidak diketahui nilai perolehan tanah tersebut cukup diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap ruang milik jalan (*rumija*) yang berupa tanah termasuk yang dijelaskan di atas akan disajikan dalam neraca setelah nilai perolehan awal tanah didapatkan berdasarkan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

#### PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (*RETIREMENT AND DISPOSAL*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

#### PENCATATAN ASET TETAP

Pencatatan Aset Tetap dilakukan dalam Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB).

Pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) terdiri dari:

- (a) KIB A = Kartu Inventaris Barang Tanah;
- (b) KIB B = Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin;
- (c) KIB C = Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan;
- (d) KIB D =Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- (e) KIB E = Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya;
- (f) KIB F = Kartu Inventaris Barang Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Pencatatan Aset Tetap meliputi pencatatan Barang Persediaan dan pencatatan Aset Tetap

Barang persediaan adalah aset lancar yang dicatat dalam Buku Persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi.

Aset Tetap yang mempunyai nilai lebih dari atau sama dengan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dicatat dalam Buku Inventaris dan Kartu Inventaris Barang (KIB).

Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, dicatat di dalam *extracontable* aset.

Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak di kapitalisasi dicatat dalam Buku Persediaan.

Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam Buku Persediaan.

Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

Aset tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintah.

5) Aset tetap yang dicatat dikelompokkan sesuai dengan golongan dan bidang barang.

#### PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- (a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - (1) Penambahan;
  - (2) Pelepasan;
  - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
  - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
- (c) Informasi penyusutan, meliputi:
  - (1) Nilai penyusutan;
  - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
  - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
  - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- (b) Tanggal efektif penilaian kembali;
- (c) Jika ada, nama penilai independen;
- (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

### **PENDAHULUAN**

#### **Tujuan**

6 Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan.

7 Kebijakan Akuntansi ini memberikan panduan untuk:

- (a) Identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- (b) Penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca; dan
- (c) Penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

#### **Ruang Lingkup**

**3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan kebijakan ini.**

4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.

5. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset tetap yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

### **DEFINISI**

**6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:**

**Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.**



***Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.***

***Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.***

***Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.***

***Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.***

***Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.***

***Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.***

***Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.***

***Termin (progress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.***

***Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.***

#### **KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai dengan 31 desember atau pekerjaan telah selesai akan tetapi belum terbayarkan retensinya. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

8. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup rehabilitasi atau renovasi mesin dan peralatan, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya dimana penyelesaian pekerjaan sampai dengan 31 Desember belum selesai atau pekerjaan telah selesai akan tetapi pembayaran reternsi masih belum terbayarkan.

9. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

### **KONTRAK KONSTRUKSI**

10. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.

11. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- (b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- (c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

### **PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI**

12. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

**13. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:**

- (a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;**
- (b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan**
- (c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.**

**14. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:**

- (a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau**
- (b) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.**

### **PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan**

**15. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:**

- (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;*
- (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan*
- (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.*

**16. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.**

**17. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:**

- (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;*
- (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;*
- (c) Sudah ada berita acara penyerahan pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO)*

## **PENGUKURAN**

**18. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.**

## **BIAYA KONSTRUKSI**

**19. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:**

- (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;*
- (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan*
- (c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.*

20. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- (a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- (b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- (c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- (d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
- (e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

21. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- (a) Asuransi;
- (b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- (c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik

yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

**22. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:**

- (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;**
- (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan**
- (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.**

23. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.

24. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

25. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

**26. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.**

27. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

**28. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.**

**29. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.**

**30. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.**

31. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

**32. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang**

***sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.***

33. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

#### **PENGUNGKAPAN**

***34. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:***

- (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;***
- (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;***
- (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;***
- (d) Uang muka kerja yang diberikan; dan***
- (e) Retensi.***

35. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih belum terbayarkan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

36. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
AKUNTANSI ASET LAINNYA**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**Pendahuluan**

**Tujuan**

8 Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset lainnya dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

*2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.*

**Definisi**

*3. Berikut Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.*

*Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan,*

***pengukuran maupun pengungkapannya.***

### **Klasifikasi**

**4. Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:**

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Hak Cipta
	Lisensi dan Frenchise
Aset Lain-lain	Aset Lain-lain

### **Pengakuan**

5. Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

6. **Tagihan Jangka Panjang**, tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai *Modul 2 - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 98* dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

**7. Kemitraan dengan Pihak Ketiga**, Untuk mengoptimalkan

pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset *Modul 2 - Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 99* pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset



tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

## **8. Aset Tak Berwujud**

### **Tujuan**

9. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud. Masalah utama akuntansi untuk aset tak berwujud adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, dan pengungkapan yang perlu dilakukan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tak berwujud.
10. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tak berwujud dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

### **Ruang Lingkup**

11. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.***

4. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:

- (a) Aset tak berwujud yang diatur oleh kebijakan akuntansi lainnya;
- (b) Aset keuangan (seperti saham, obligasi, dan derivatifnya);
- (c) Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksplorasi, pengembangan dan penambangan mineral, minyak, dan gas alam dan sumber daya lainnya yang tidak dapat diperbarui; dan
- (d) Aset tidak berwujud yang terjadi dari kontrak dengan pemegang polis.

### **Definisi**

12. ***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:***

***Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut.***

***Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.***

***Aset keuangan adalah kas dan setara kas serta aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.***

***Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual.***

***Riset adalah penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru.***

***Pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada suatu rencana dan rancangan alat, barang, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau mengalami perbaikan yang substansial, sebelum dimulainya penggunaan atau pemanfaatan.***

### **Umum**

- 13.** Pemerintah sering kali mengeluarkan sumber daya untuk mendapatkan, mengembangkan, memelihara atau memperkuat sumber daya tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi dan hak kekayaan intelektual.
- 14.** Beberapa jenis aset tidak berwujud mungkin terkandung dalam bentuk fisik, seperti dalam *compact disk* (yang memuat piranti lunak

komputer), dokumentasi legal (yang memuat lisensi atau paten), atau film. Untuk itu, penentuan apakah aset tersebut termasuk dalam aset berwujud atau tidak berwujud ditentukan dengan mempertimbangkan atribut yang dominan pada aset tersebut. Misalnya, piranti lunak untuk menjalankan komputer, dimana komputer tersebut tidak dapat beroperasi tanpa piranti lunak tersebut merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari piranti kerasnya sehingga diperlakukan sebagai bagian dari aset tetap. Akan tetapi, bila piranti lunak tersebut bukan merupakan bagian integral dari piranti keras yang terkait, piranti lunak tersebut diperlakukan sebagai aset tidak berwujud.

### **Klasifikasi Aset Tak Berwujud**

#### **15. Aset tak berwujud meliputi:**

- (a) Piranti lunak (software) komputer;**
  - (b) Lisensi dan francshise;**
  - (c) Hak cipta (copyright,), paten, dan hak lainnya; dan**
  - (d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.**
- 16.** Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 17.** Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
- 18.** Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- 19.** Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat

diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

### **Pengakuan Aset Tak Berwujud**

**20. Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:**

**(a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan**

**(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.**

**21.** Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup penerimaan pendapatan daerah, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas.

**22. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis dan/atau sosial masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi dan/atau sosial yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut.**

**23.** Dalam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud, perusahaan mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tak berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal.

**24. Pengakuan aset tak berwujud akan sangat andal bila aset tak berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Bila aset tak berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.**

**25.** Aset tak berwujud dapat diperoleh entitas melalui pelaksanaan hasil kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut antara lain untuk:

- (a) Menentukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya, aset yang dapat diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; dan
- (b) Menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal.

**26.** Dalam menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset tak berwujud menjadi dua tahap, yaitu:

- (a) Tahap penelitian atau riset; dan
- (b) Tahap pengembangan.

**27.** Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang dilakukan hanya pada tahap riset saja.

**28.** *Suatu entitas tidak boleh mengakui aset tak berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.*

**29.** Contoh-contoh kegiatan penelitian atau riset adalah sebagai berikut:

- (a) Kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru;
- (b) Pencarian, evaluasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya;
- (c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa; dan
- (d) Perumusan, perancangan, evaluasi, dan seleksi berbagai alternatif kemungkinan bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa.

**30.** Suatu aset tidak berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan hanya jika perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:

- (a) Kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan;
- (b) Niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan menggunakannya;
- (c) Kemampuan untuk menggunakan aset tak berwujud tersebut;

- (d) Cara aset tak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut;
- (e) Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan menggunakan aset tersebut; dan
- (f) Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya.

**31. *Pembelian software komputer yang tidak dapat dipisahkan dari hardware, misal, tanpa adanya software tersebut hardware tidak dapat beroperasi, maka software tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai Aset Tak Berwujud tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari hardware dan diakui sebagai bagian dari peralatan dan mesin. Namun, jika software tersebut dapat dipisahkan dari hardware, dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud.***

**32. *Batasan Minimum Pengakuan Aset Tak Berwujud pada saat Perolehan dari belanja modal (pembelian baru) dan berasal atau bersumber dari biaya pemeliharaan maka dalam pengakuan atau penyajian nilai yang dicatat sebagai aset tak berwujud dapat di klasifikasikan sebagai berikut :***

Perolehan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal/pengadaan baru, maka batasan minimum pengakuan atau penyajian nilai sebagai aset tak berwujud adalah **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);**

- a. Perolehan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal/pengadaan baru yang mempunyai *lisensi/hak paten* dari lembaga yang berwenang sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka dalam pengakuan atau penyajian nilai sebagai aset tak berwujud tidak mengenal Batas Minimum atau *reshold capitalization*;
- b. Pengakuan atau penyajian nilai sebagai aset tak berwujud sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 diatas adalah perolehan aset tak berwujud yang berasal dari belanja modal/pengadaan baru bukan yang berasal dari belanja pemeliharaan.

Batasan minimum untuk Kapitalisasi aset tak berwujud yang berasal dari Biaya Pemeliharaan aset tak berwujud adalah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).**

Kriteria pemeliharaan aset tak berwujud adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pemeliharaan
1.	Menyesuaikan perubahan dalam pemrosesan, lingkungan data dan memenuhi permintaan <i>user</i> (perubahan sistem aplikasi).
2.	Meng- <i>upgrade</i> , memperbaiki, penyempurnaan sistem dan pengembangan dokumentasi sistem.
3.	Inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan.

Batasan nilai Pemeliharaan aset tak berwujud yang dapat menambah umur/masa manfaat sebagai berikut :

No	Nilai Pemeliharaan	Penambahan Umur/Masa Manfaat (Tahun)
1.	< 100.000.000,00	0
2.	≥100.000.000,00 s.d 1.000.000.000,00	1
3.	> 1.000.000.000,00	2

### Perlakuan Khusus Untuk Software Komputer

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
2. Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual

atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

### **Beban Masa Lalu Tidak Diakui sebagai Aset**

**33. *Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.***

### **Pengukuran Aset Tak Berwujud**

**34. *Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.***

### **Perolehan Terpisah**

**35.** Jika suatu aset tak berwujud diperoleh secara terpisah, biaya aset tak berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya.

**36.** Biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, misalnya imbalan profesional konsultan hukum. Apabila terdapat diskonto atau rabat, maka diskonto atau rabat tersebut mengurangi biaya perolehan aset.

### **Pertukaran Aset**

**37.** Suatu aset tak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah aset tak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset



lainnya. Biaya perolehan aset tak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.

### **Aset Tak Berwujud yang Dihasilkan secara Internal (Swakelola)**

**38.** Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset tak berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan:

- (a) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan aset tak berwujud;
- (b) Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan aset tersebut; dan
- (c) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum.

**39.** Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan aset tak berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal.

### **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

**25.** *Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya pengeluaran, kecuali:*

- (a) Pengeluaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan sehingga menjadi lebih besar daripada standar kinerja yang diperkirakan semula; dan*
- (b) Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara andal.*

*Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran setelah perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tak berwujud.*

**40.** Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara agar aset dapat beroperasi pada standar kinerja yang diperkirakan semula. Aset tak berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak mungkin ditentukan apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset tersebut. Di samping itu, sering kali sulit mengaitkan secara langsung pengeluaran tersebut dengan aset tak berwujud tertentu, tetapi lebih mudah mengaitkan pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan. Dengan demikian, jarang terjadi pengeluaran setelah pengakuan awal aset tak berwujud, baik aset yang diperoleh melalui pembelian maupun yang dihasilkan sendiri, diakui sebagai penambahan biaya perolehan aset tak berwujud.

#### **Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

**41.** *Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.*

#### **Periode Amortisasi**

**42.** *Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.*

**43.** Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal tersebut, dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang masa manfaat aset tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan masa manfaat suatu aset tak berwujud, termasuk:

- (a) Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolaannya oleh tim manajemen yang lain;
- (b) Siklus hidup yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama;
- (c) Keusangan teknis, teknologi;
- (d) Tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;
- (e) Periode pengendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan
- (f) Ketergantungan masa manfaat aset tersebut atas masa manfaat aset lainnya dari entitas.

**44.** Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak (software) komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek.

**45. *Jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut, kecuali:***

- (a) Hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan***
- (b) Pembaruan tersebut pada dasarnya pasti diperoleh.***

#### **Metode Amortisasi**

**46. *Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain.***

**47.** Metode amortisasi yang dapat dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method), dalam menentukan nilai perhitungan amortisasi aktiva tetap tak berwujud kecuali jika aset tak berwujud

tersebut tidak memiliki batasan izin penggunaan atau masa manfaat tidak terbatas, maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan **menetapkan masa manfaat 5 tahun** untuk semua jenis aplikasi.

$$\text{Garis Lurus} \quad \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

**48.** Metode amortisasi yang digunakan pada suatu aset tak berwujud harus diterapkan konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan oleh entitas.

**49.** *Pelaksanaan amortisasi dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual.*

#### **Penghentian Dan Pelepasan (Retirement And Disposal)**

**50.** *Suatu aset tak berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.*

**51.** *Aset tak berwujud yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

#### **Pengungkapan**

**52.** *Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya:*

- (a) Masa manfaat aset tak berwujud;*
- (b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:*
  - (1) Penambahan;*
  - (2) Penghentian dan pelepasan;*
  - (3) Akumulasi Amortisasi; dan*
  - (4) Mutasi lainnya.*

**(c) Informasi amortisasi, meliputi:**

**(1) Nilai penyusutan;**

**(2) Metode amortisasi yang digunakan;**

**(3) Masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan; dan**

**(4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.**

**26. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:**

**(a) Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;**

**(b) Keberadaan dan nilai aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi; dan**

**(c) Jumlah komitmen untuk memperoleh aset tak berwujud.**

**53.** Entitas dianjurkan, tetapi tidak diharuskan, untuk mengungkapkan informasi mengenai gambaran mengenai setiap aset tak berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasikan yang masih digunakan.

**54. Aset Lain-lain,** Aset yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan pemanfaatannya direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

Hal ini dapat diklasifikasikan untuk direklas ke dalam aset lain-lain yaitu:

- a. Aset tetap yang rusak berat, using, tidak diketahui keberadaannya (proses identifikasi/pencarian) dan atau hilang (proses penggantian/penghapusan dengan persetujuan Bupati Pangkajene dan Kepulauan);
- b. Aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal);
- c. Mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d. Aset Tetap kecuali tanah yang sudah tidak bermanfaat, hilang, tidak diketahui keberadaannya dan aset lancar yang tidak memenuhi unsur sebagai aset lancar.

Hal dalam penyajian di neraca untuk aset lain-lain yang direklas dari aset

tetap yaitu:

***Aset lain-lain dalam kelompok aset tetap yang rusak berat dan hilang disajikan berdasarkan nilai tercatat/nilai buku dengan tidak mengenal nilai residu dan nilai perolehannya cukup di ungkap dalam catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan keuangan.***

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
AKUNTANSI KEWAJIBAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

9 Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

**Ruang Lingkup**

**2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintahan Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.**

**3. Kebijakan Akuntansi ini mengatur:**

- (a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.**
- (b) Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing.**
- (c) Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman.**
- (d) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Daerah.**
- (e) Huruf (b), (c), dan (d) diatas berlaku sepanjang belum ada pengaturan khusus dalam pernyataan tersendiri mengenai hal-hal tersebut.**

5. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

- (a) Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi;
- (b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai;

- (c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti pada paragraf 3(b).
- (d) Huruf (a) dan (b) diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

## **DEFINISI**

**5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:**

**Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang Pemerintah Daerah.**

**Aset Tertentu yang memenuhi syarat (Qualifying Asset), selanjutnya disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan tujuannya.**

**Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan peminjaman dana.**

**Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.**

**Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (present value,) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.**

**Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.**

**Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.**

**Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.**

**Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti.**

**Kewajiban kontinjensi adalah:**

- (a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya



- suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau*
- (b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:*
- (1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable,) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau*
  - (2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.*

**Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**

**Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang Pemerintah Daerah.**

**Nilai nominal adalah nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah.**

**Nilai tercatat (carrying amount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.**

**Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.**

**Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.**

**Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.**

**Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang.**

**Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau nilai pelunasan pada saat diterbitkan,**

*misalnya Surat Utang Negara (SUN).*

***Surat Perbendaharaan Negara*** adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

***Surat Utang Negara*** adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

***Tunggakan*** adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

## **UMUM**

6. Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

## **KLASIFIKASI KEWAJIBAN**

***9. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.***

10. Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

***11. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka***

***pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.***

12. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

13. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

***14. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:***

- (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;***
- (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance,) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan***
- (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.***

15. Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

16. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*rollover*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

17. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- (a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- (b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### **PENGAKUAN KEWAJIBAN**

**18. Kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada pada saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.**

19. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, kerusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

20. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.

**21. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.**

22. Kewajiban dapat timbul dari:

- (a) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- (b) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- (c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- (d) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

**23. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai**

**sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.**

24. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

**25. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.**

26. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

**27. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.**

28. Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

**29. Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut**

**mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.**

30. Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- (d)** Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan.
- (e)** Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

31. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di suatu kecamatan dan DPRD mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan Pemerintah Daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh Pemerintah Daerah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk Pemerintah Daerah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke Pemerintah Daerah untuk membayar manfaat, barang atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan Pemerintah Daerah.

## **PENGUKURAN KEWAJIBAN**

### **32. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata**

***uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.***

33. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

34. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan.

#### **UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (ACCOUNT PAYABLE)**

***35. Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak.***

36. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

***37. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.***

#### **UTANG TRANSFER**

38. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

39. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **UTANG BUNGA (ACCRUED INTEREST)**

***40. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.***

41. Pengukuran dan penyajian, utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

#### **UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK)**

**42. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.**

43. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

#### **BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG**

**44. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.**

45. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

#### **KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA (OTHER CURRENT LIABILITIES)**

46. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

#### **UTANG PEMERINTAH DAERAH YANG TIDAK DIPERJUAL BELIKAN DAN YANG DIPERJUAL BELIKAN**

47. Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:

- (a) Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
- (b) Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)



### **Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan (*non -Traded Debt*)**

**48. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.**

49. Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dan pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

50. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasi secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.

### **Utang Pemerintah Daerah yang Diperjualbelikan (*Traded Debt*)**

51. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.

52. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

**53. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.**

54. Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan

nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.

55. Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis lurus.

#### **PERUBAHAN VALUTA ASING**

**56. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.**

57. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

**58. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.**

**59. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.**

60. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.

61. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

#### **PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO**

**62. Untuk sekuritas utang Pemerintah Daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*), dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang**

**berkaitan.**

63. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.

64. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

**TUNGGAKAN**

**65. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.**

66. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

67. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Daerah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas entitas.

68. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

**RESTRUKTURISASI UTANG**

**69. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.**

70. Restrukturisasi dapat berupa:

- (a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau

- (b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
- i. Perubahan jadwal pembayaran,
  - ii. Penambahan masa tenggang, atau
  - iii. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

71. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restruktunsasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

72. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

**73. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.**

**74. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.**

75. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

## **PENGHAPUSAN UTANG**

76. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

77. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.

**78. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 73 berlaku.**

**79. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 70, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.**

80. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- (a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
- (b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

81. Penilaian kembali aset pada paragraf 80 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG PEMERINTAH DAERAH**

82. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- (a) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- (b) *Commitment fee* atas dana pinjaman yang belum ditarik;
- (c) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- (d) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya;
- (e) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

**83. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan**

***dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.***

84. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada paragraf 86.

85. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Daerah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (*professional judgement*) untuk menentukan hal tersebut.

***86. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.***

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

***87. Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.***

***88. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:***

- (a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;***
- (b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;***
- (c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;***
- (d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;***
- (e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:***
  - (1) Pengurangan pinjaman;***
  - (2) Modifikasi persyaratan utang;***

- (3) *Pengurangan tingkat bunga pinjaman;*
  - (4) *Pengunduran jatuh tempo pinjaman;*
  - (5) *Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan*
  - (6) *Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.*
- (f) *Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.*
- (g) *Biaya pinjaman:*
- (1) *Perlakuan biaya pinjaman;*
  - (2) *Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan*
  - (3) *Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.*

#### **PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

*Kriteria pengakuan pendapatan diterima dimuka yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diakui berdasarkan sifat dan peruntukkan waktunya dengan kriteria yaitu:*

- a. Pendapatan yang diterima yang memiliki ikatan/perjanjian jasa yang harus masih dipenuhi oleh pemberi jasa, yang memiliki sifat jangka pendek atau jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan, maka pengakuan pendapatan diterima dimuka dihitung dengan metode bulanan sejak ditandatangani ikatan/perjanjian;
- b. Pendapatan yang diterima yang memiliki ikatan/perjanjian jasa yang harus masih dipenuhi oleh pemberi jasa, yang memiliki sifat jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 12 bulan, maka pengakuan pendapatan diterima dimuka dihitung dengan metode tahunan sejak ditandatangani ikatan/perjanjian.

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI EKUITAS**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

### **PENDAHULUAN**

#### **Tujuan**

10 Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **Ruang Lingkup**

11 Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

### **DEFINISI**

**3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:**

***Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.***

### **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS**

4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

5. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

6. Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.



## **KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI PENDAPATAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

### **PENDAHULUAN**

#### **Tujuan**

12 Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**2. *Perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pendapatan.***

#### **Ruang Lingkup**

**3. *Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pendapatan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.***

**4. *Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.***

#### **Manfaat Informasi Akuntansi Pendapatan.**

3. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dengan:

- (a) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi;
- (b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas perolehan pendapatan.

4. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **DEFINISI**

7. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**Azas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

**Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

**Basis Akrual** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya transaksi ekonomi tanpa diterima atau dibayarkan secara kas.

**Kas Umum Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

**Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

**Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

**Pendapatan Transfer** adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

**Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

**Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

**Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung Saldo Anggaran Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

## **KLASIFIKASI PENDAPATAN**

### **8. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut:**

- (a) Urusan pemerintahan daerah;**
- (b) Organisasi; dan**
- (c) Kelompok.**

### **9. Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:**

- (a) Jenis;**
- (b) Obyek; dan**
- (c) Rincian obyek pendapatan.**

### **10. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:**

- (a) Pendapatan Asli Daerah,**
- (b) Pendapatan Transfer, dan**
- (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.**

11. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

12. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

13. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

14. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

### **15. Kelompok pendapatan transfer dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:**

- (a) Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;**
- (b) Transfer pemerintah pusat-lainnya; dan**
- (c) Transfer Pemerintah Provinsi.**

16. Jenis transfer pemerintah pusat-dana perimbangan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

17. Jenis transfer pemerintah pusat-lainnya terdiri atas obyek pendapatan dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

18. Jenis transfer pemerintah provinsi terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya. Kelompok pendapatan bagi hasil pajak terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi, pendapatan bagi hasil pajak dari kabupaten, dan pendapatan bagi hasil pajak dari kota.

19. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

20. Kelompok dana otonomi khusus dan dana penyesuaian terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

**21. Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:**

**(a) Pendapatan Hibah;**

**(b) Pendapatan Dana Darurat;**

**(c) Pendapatan lainnya.**

22. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

23. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

**PENGAKUAN**

24. Berdasarkan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan:

25. Pendapatan LO menggunakan basis akrual dan akan diakui pada saat :

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*)

26. Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan akan diakui pada saat :

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. diterima oleh SKPD; atau
- c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD

27. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*), dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.

28. Pendapatan LO diakui pada saat penetapan seperti pendapatan atas Pajak PBB dimana saat dikeluarkan SPPT PBB, pada saat menerima Pepres untuk pendapatan DAU.

29. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Dan apabila pada saat pemeriksaan

ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Pengakuan pendapatan self assessment seperti pajak hotel dan restaurant.

30. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

31. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

32. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

33. Pengakuan pendapatan pada paragraf 32 seperti pada saat pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK).

34. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

35. Dalam kriteria pengakuan pendapatan-LRA, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

**36. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan-LRA dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.**

**37. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.**

**38. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.**

**39. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan**

**sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

**40. Pendapatan-LO diakui pada saat:**

**(a) Timbulnya hak atas pendapatan yang disebut earned;**

**(b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai yang disebut realized.**

41. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan

42. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

43. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

**44. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan.**

45. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

**46. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.**

**47. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.**

**48. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

**49. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.**

50. Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

#### **TRANSAKSI PENDAPATAN BERBENTUK BARANG DAN JASA**

**51. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.**

**52. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang dikapitalisasi ke dalam nilai perolehan barang yang diperoleh.**

#### **PENGUKURAN**

53. ***Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***

54. ***Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.***

55. ***Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***

56. ***Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.***

57. ***Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.***

#### **PENGUNGKAPAN**

58. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
- (d) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pendapatan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 serta Permendagri No.21 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
AKUNTANSI BEBAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

13 Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk beban dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan.

**2. *Perlakuan akuntansi beban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan beban.***

**Ruang Lingkup**

**3. *Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam akuntansi beban Pemerintah Daerah dalam laporan keuangan untuk tujuan umum.***

4. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk perusahaan daerah.

**DEFINISI**

**5. *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:***

***Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.***

***Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.***

***Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset***



yang bersangkutan.

**Beban Transfer** adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

**Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

#### KLASIFIKASI BEBAN

**6. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan klasifikasi organisasi.**

**7.** Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

**8.** Klasifikasi organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, sekretariat DPRD, sekretariat daerah, dinas pemerintah tingkat dan lembaga teknis daerah

**9. Adapun Kode Akun untuk Beban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang tercantum dalam Bagan Akun Standar (BAS) adalah sebagai berikut :**

Kode Akun				Uraian Akun
9				<b>BEBAN</b>
9	1			<b>BEBAN OPERASI - LO</b>
9	1	1		<b>Beban Pegawai - LO</b>
9	1	1	01	Beban Gaji dan Tunjangan - LO
9	1	1	01 01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
9	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga - LO
9	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan - LO
9	1	1	01 04	Tunjangan Fungsional - LO
9	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum - LO
9	1	1	01 06	Tunjangan Beras - LO
9	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
9	1	1	01 08	Pembulatan Gaji - LO
9	1	1	01 09	Iuran Jaminan Kesehatan - LO
9	1	1	01 10	Uang Paket - LO
9	1	1	01 11	Tunjangan Badan Musyawarah - LO
9	1	1	01 12	Tunjangan Komisi - LO
9	1	1	01 13	Tunjangan Badan Anggaran - LO
9	1	1	01 14	Tunjangan Badan Kehormatan - LO
9	1	1	01 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
9	1	1	01 16	Tunjangan Perumahan - LO
9	1	1	01 17	Uang Duka Wafat/Tewas - LO
9	1	1	01 18	Uang Jasa Pengabdian - LO
9	1	1	01 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO
9	1	1	01 20	Tunjangan Kesehatan DPRD - LO
9	1	1	01 21	Dst .....

9	1	1	02		Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
9	1	1	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO
9	1	1	02	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO
9	1	1	02	03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO
9	1	1	02	04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi - LO
9	1	1	02	05	Dst .....
9	1	1	03		Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO
9	1	1	03	01	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO
9	1	1	03	02	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO
9	1	1	03	03	Dst .....
9	1	1	04		Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO
9	1	1	04	01	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO
9	1	1	04	02	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO
9	1	1	04	03	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO
9	1	1	05		Insentif Pemungutan Pajak Daerah
9	1	1	05	01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	05	02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	05	03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	05	04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO
9	1	1	05	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO
9	1	1	05	06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO
9	1	1	05	07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO
9	1	1	05	08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO
9	1	1	05	09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO
9	1	1	05	10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO
9	1	1	05	11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO
9	1	1	05	12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO
9	1	1	05	13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO
9	1	1	05	14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
9	1	1	05	15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
9	1	1	05	16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
9	1	1	06		Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
9	1	1	06	01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO
9	1	1	06	02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
9	1	1	06	03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
9	1	1	06	04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
9	1	1	06	05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
9	1	1	06	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO
9	1	1	06	07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
9	1	1	06	08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
9	1	1	06	09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
9	1	1	06	10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
9	1	1	06	11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO
9	1	1	06	12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
9	1	1	06	13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO
9	1	1	06	14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
9	1	1	06	15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
9	1	1	06	16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
9	1	1	06	17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO
9	1	1	06	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
9	1	1	06	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO
9	1	1	06	20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
9	1	1	06	21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO
9	1	1	06	22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhanan - LO
9	1	1	06	23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO
9	1	1	06	24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO
9	1	1	06	25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
9	1	1	06	26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO
9	1	1	06	27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
9	1	1	06	28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO
9	1	1	06	29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO
9	1	1	06	30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO
9	1	1	06	31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO
9	1	1	06	32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
9	1	1	07		Uang Lembur - LO
9	1	1	07	01	Uang Lembur PNS - LO
9	1	1	07	02	Uang Lembur Non PNS - LO
9	1	2			<b>Beban Barang dan Jasa</b>
9	1	2	01		Beban Bahan Pakai Habis
9	1	2	01	01	Beban Persediaan alat tulis kantor
9	1	2	01	02	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender
9	1	2	01	03	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
9	1	2	01	04	Beban Persediaan perangk, materai dan benda pos lainnya
9	1	2	01	05	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9	1	2	01	06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
9	1	2	01	07	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran
9	1	2	01	08	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas
9	1	2	01	09	Dst ....

9	1	2	02		Beban Persediaan Bahan/ Material
9	1	2	02	01	Beban Persediaan bahan baku bangunan
9	1	2	02	02	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman
9	1	2	02	03	Beban Persediaan bibit ternak
9	1	2	02	04	Beban Persediaan bahan obat-obatan
9	1	2	02	05	Beban Persediaan bahan kimia
9	1	2	02	06	Beban Persediaan Makanan Pokok
9	1	2	02	07	Dst .....
9	1	2	03		Beban Jasa Kantor
9	1	2	03	01	Beban Jasa telepon
9	1	2	03	02	Beban Jasa air
9	1	2	03	03	Beban Jasa listrik
9	1	2	03	04	Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
9	1	2	03	05	Beban Jasa surat kabar/majalah
9	1	2	03	06	Beban Jasa kawat/faksimili/internet
9	1	2	03	07	Beban Jasa paket/pengiriman
9	1	2	03	08	Beban Jasa Sertifikasi
9	1	2	03	09	Beban Jasa Transaksi Keuangan
9	1	2	03	10	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9	1	2	03	11	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9	1	2	03	12	Dst .....
9	1	2	04		Beban Premi Asuransi
9	1	2	04	01	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
9	1	2	04	02	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9	1	2	04	03	Dst.....
9	1	2	05		Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9	1	2	05	01	Beban Jasa Service
9	1	2	05	02	Beban Penggantian Suku Cadang
9	1	2	05	03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9	1	2	05	04	Beban Jasa KIR
9	1	2	05	05	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9	1	2	05	06	Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
9	1	2	06		Beban Cetak dan Penggandaan
9	1	2	06	01	Beban Cetak
9	1	2	06	02	Beban Penggandaan
9	1	2	07		Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9	1	2	07	01	Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas
9	1	2	07	02	Beban sewa gedung/ kantor/tempat
9	1	2	07	03	Beban sewa ruang rapat/pertemuan
9	1	2	07	04	Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
9	1	2	07	05	Dst ....
9	1	2	08		Beban Sewa Sarana Mobilitas
9	1	2	08	01	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9	1	2	08	02	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9	1	2	08	03	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9	1	2	08	04	Dst ...
9	1	2	09		Beban Sewa Alat Berat
9	1	2	09	01	Beban Sewa Eskavator
9	1	2	09	02	Beban Sewa Buldoser
9	1	2	09	03	Dst ...
9	1	2	10		Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9	1	2	10	01	Beban sewa meja kursi
9	1	2	10	02	Beban sewa komputer dan printer
9	1	2	10	03	Beban sewa proyektor
9	1	2	10	04	Beban sewa generator
9	1	2	10	05	Beban sewa tenda
9	1	2	10	06	Beban sewa pakaian adat/tradisional
9	1	2	10	07	Dst ....
9	1	2	11		Beban Makanan dan Minuman
9	1	2	11	01	Beban makanan dan minuman harian pegawai
9	1	2	11	02	Beban makanan dan minuman rapat
9	1	2	11	03	Beban makanan dan minuman tamu
9	1	2	11	04	Beban makanan dan minuman pelatihan
9	1	2	11	05	Dst ...
9	1	2	12		Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9	1	2	12	01	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9	1	2	12	02	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
9	1	2	12	03	BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)
9	1	2	12	04	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
9	1	2	12	05	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9	1	2	12	06	Dst ...
9	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja
9	1	2	13	01	Beban pakaian kerja lapangan
9	1	2	13	02	Dst ...
9	1	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

9	1	2	14	01	Beban pakaian KORPRI
9	1	2	14	02	Beban pakaian adat daerah
9	1	2	14	03	Beban pakaian batik tradisional
9	1	2	14	04	Beban pakaian olahraga
9	1	2	14	05	Dst ...
9	1	2	15		Beban Perjalanan Dinas
9	1	2	15	01	Beban perjalanan dinas dalam daerah
9	1	2	15	02	Beban perjalanan dinas luar daerah
9	1	2	15	03	Beban perjalanan dinas luar negeri
9	1	2	16		Beban Perjalanan Pindah Tugas
9	1	2	16	01	Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah
9	1	2	16	02	Beban perjalanan pindah tugas luar daerah
9	1	2	17		Beban Pemulangan Pegawai
9	1	2	17	01	Beban pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
9	1	2	17	02	Beban pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
9	1	2	18		Beban Pemeliharaan
9	1	2	18	01	Beban Pemeliharaan Tanah
9	1	2	18	02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9	1	2	18	03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9	1	2	18	04	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9	1	2	18	05	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9	1	2	18	06	Dst.....
9	1	2	19		Beban Jasa Konsultasi
9	1	2	19	01	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
9	1	2	19	02	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
9	1	2	19	03	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
9	1	2	19	04	Dst ...
9	1	2	20		Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9	1	2	20	01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9	1	2	20	02	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	21		Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9	1	2	21	01	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9	1	2	21	02	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9	1	2	22		Beban Beasiswa Pendidikan PNS
9	1	2	22	01	Beban beasiswa tugas belajar D3
9	1	2	22	02	Beban beasiswa tugas belajar S1
9	1	2	22	03	Beban beasiswa tugas belajar S2
9	1	2	22	04	Beban beasiswa tugas belajar S3
9	1	2	22	05	Dst .....
9	1	2	23		Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
9	1	2	23	01	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan
9	1	2	23	02	Beban sosialisasi
9	1	2	23	03	Beban bimbingan teknis
9	1	2	23	04	Dst .....
9	1	2	24		Beban Honorarium Non Pegawai
9	1	2	24	01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9	1	2	24	02	Moderator
9	1	2	24	03	Dst.....
9	1	2	25		Honorarium PNS
9	1	2	25	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9	1	2	25	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9	1	2	25	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9	1	2	25	04	Dst.....
9	1	2	26		Honorarium Non PNS
9	1	2	26	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9	1	2	26	02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap
9	1	2	26	03	Dst.....
9	1	2	27		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
9	1	2	27	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9	1	2	27	02	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9	1	2	27	03	Dst.....
<b>9</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Beban Bunga</b>
9	1	3	01		Bunga Utang Pinjaman
9	1	3	01	01	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9	1	3	01	02	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
9	1	3	01	03	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9	1	3	01	04	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9	1	3	01	05	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
9	1	3	02		Bunga Utang Obligasi
9	1	3	02	01	Bunga Utang Obligasi
<b>9</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Beban Subsidi</b>

9	1	4	01		Beban Subsidi
9	1	4	01	01	Beban Subsidi kepada BUMN
9	1	4	01	02	Beban Subsidi kepada BUMD
9	1	4	01	03	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
<b>9</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>Beban Hibah</b>
9	1	5	01		Beban Hibah kepada Pemerintah
9	1	5	01	01	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah
9	1	5	02		Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
9	1	5	02	01	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9	1	5	02	02	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
9	1	5	02	03	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota
9	1	5	03		Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9	1	5	03	01	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD.....
9	1	5	03	02	Dst.....
9	1	5	04		Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9	1	5	04	01	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat.....
9	1	5	04	01	Dst.....
9	1	5	05		Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9	1	5	05	01	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.....
9	1	5	05	02	Dst ...
9	1	5	06		Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***
9	1	5	06	01	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.....
9	1	5	06	02	Dst ...
<b>9</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			<b>Beban Bantuan Sosial</b>
9	1	6	01		Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9	1	6	01	01	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...
9	1	6	01	02	Dst .....
9	1	6	02		Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
9	1	6	02	01	Beban Bantuan Sosial kepada ....
9	1	6	02	02	Dst .....
<b>9</b>	<b>1</b>	<b>7</b>			<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>
9	1	7	01		Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9	1	7	01	01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
9	1	7	01	02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
9	1	7	01	03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu
9	1	7	01	04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9	1	7	01	05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
9	1	7	01	06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
9	1	7	01	07	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
9	1	7	01	08	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
9	1	7	01	09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
9	1	7	01	10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
9	1	7	01	11	Beban Penyusutan Alat Ukur
9	1	7	01	12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
9	1	7	01	13	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
9	1	7	01	14	Beban Penyusutan Alat Kantor
9	1	7	01	15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9	1	7	01	16	Beban Penyusutan Peralatan Komputer
9	1	7	01	17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9	1	7	01	18	Beban Penyusutan Alat Studio
9	1	7	01	19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi
9	1	7	01	20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
9	1	7	01	21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran
9	1	7	01	22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan
9	1	7	01	23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
9	1	7	01	24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
9	1	7	01	25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
9	1	7	01	26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9	1	7	01	27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
9	1	7	01	28	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
9	1	7	01	29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9	1	7	01	30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9	1	7	01	31	Beban Penyusutan Senjata Api
9	1	7	01	32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
9	1	7	01	33	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
9	1	7	02		Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9	1	7	02	01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9	1	7	02	02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9	1	7	02	03	Beban Penyusutan Bangunan Menara
9	1	7	02	04	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
9	1	7	02	05	Beban Penyusutan Tugu Peringatan
9	1	7	02	06	Beban Penyusutan Candi
9	1	7	02	07	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
9	1	7	02	08	Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain
9	1	7	02	09	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9	1	7	02	10	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
9	1	7	02	11	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara

9	1	7	03		Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9	1	7	03	01	Beban Penyusutan Jalan
9	1	7	03	02	Beban Penyusutan Jembatan
9	1	7	03	03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
9	1	7	03	04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
9	1	7	03	05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
9	1	7	03	06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
9	1	7	03	07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
9	1	7	03	08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
9	1	7	03	09	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
9	1	7	03	10	Beban Penyusutan Bangunan Air
9	1	7	03	11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
9	1	7	03	12	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
9	1	7	03	13	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
9	1	7	03	14	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9	1	7	03	15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
9	1	7	03	16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
9	1	7	03	17	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan
9	1	7	03	18	Beban Penyusutan Instalasi Gas
9	1	7	03	19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
9	1	7	03	20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
9	1	7	03	21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik
9	1	7	03	22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon
9	1	7	03	23	Beban Penyusutan Jaringan Gas
9	1	7	04		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9	1	7	04	01	Beban Amortisasi Goodwill
9	1	7	04	02	Beban Amortisasi Lisensi dan franchise
9	1	7	04	03	Beban Amortisasi Hak Cipta
9	1	7	04	04	Beban Amortisasi Paten
9	1	7	04	05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
9	1	8			<b>Beban Penyisihan Piutang</b>
9	1	8	01		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
9	1	8	01	01	Beban Penyisihan Piutang Pajak
9	1	8	01	02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi
9	1	8	01	03	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9	1	8	01	04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
9	1	8	01	05	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
9	1	8	01	06	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9	1	8	01	07	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
9	1	8	01	08	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
9	1	8	01	09	Beban Penyisihan Piutang Hibah
9	1	8	01	10	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
9	1	8	01	11	Dst .....
9	1	8	02		Beban Penyisihan Piutang Lainnya
9	1	8	02	01	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
9	1	8	02	02	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
9	1	8	02	03	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
9	1	8	02	04	Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
9	1	8	02	05	Beban Penyisihan Uang Muka
9	1	8	02	06	Dst .....
9	1	9			<b>Beban Lain-lain</b>
9	1	9	01		Beban Penurunan Nilai Investasi
9	1	9	01	01	Beban Penurunan Nilai Investasi
9	1	9	02		Beban Penyisihan Dana Bergulir
9	1	9	02	01	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9	1	9	03		Beban Lain-lain
9	1	9	03	01	Beban Lain-lain
9	2				<b>BEBAN TRANSFER</b>
9	2	1			<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>
9	2	1	01		Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	1	01	01	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota....
9	2	1	01	02	Dst....
9	2	2			<b>Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya</b>
9	2	2	01		Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9	2	2	01	01	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota.....
9	2	2	01	02	Dst.....
9	2	3			<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya</b>
9	2	3	01		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9	2	3	01	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi....
9	2	3	01	02	Dst....
9	2	3	02		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9	2	3	02	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.....
9	2	3	02	02	Dst....
9	2	4			<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa</b>
9	2	4	01		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

9	2	4	01	01	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa....
9	2	4	01	02	Dst....
<b>9</b>	<b>2</b>	<b>5</b>			<b>Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya</b>
9	2	5	01		Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9	2	5	01	01	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik.....
9	2	5	01	02	Dst....
<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>			<b>Beban Transfer Dana Otonomi Khusus</b>
9	2	6	01		Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
9	2	6	01	01	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota...
9	2	6	01	02	Dst....
<b>9</b>	<b>3</b>				<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>
<b>9</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO</b>
9	3	1	01		Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9	3	1	01	01	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9	3	1	01	02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9	3	1	01	03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9	3	1	01	04	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9	3	1	01	05	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9	3	1	01	06	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9	3	1	01	07	Dst .....
<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO</b>
9	3	2	01		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9	3	2	01	01	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9	3	2	01	02	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9	3	2	01	03	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9	3	2	01	04	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9	3	2	01	05	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9	3	2	01	06	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9	3	2	01	07	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9	3	2	01	08	Dst .....
<b>9</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO</b>
9	3	3	01		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	01	01	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9	3	3	01	02	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9	3	3	01	03	Dst .....
<b>9</b>	<b>4</b>				<b>BEBAN LUAR BIASA</b>
<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			<b>Beban Luar Biasa</b>
9	4	1	01		Beban Luar Biasa
9	4	1	01	01	Beban Bencana Alam
9	4	1	01	02	Beban Luar Biasa Lainnya
9	4	1	01	03	Dst .....

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

## PENGAKUAN

### 10. Beban diakui pada saat:

- (d) *timbulnya kewajiban;*
- (e) *terjadinya konsumsi aset;*
- (f) *terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.*

**11.** Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah.

**12.** Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

**13.** Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

**14. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.**

**15.** Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan Metode garis lurus (straight line method);

**16. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.**

**17. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.**

**18.** Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban digunakan dua pendekatan.

**19. Metode pendekatan Beban.** Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin. Pendekatan ini seperti Beban Alat Tulis Kantor yang akan digunakan dalam kegiatan, beban makan dan minum dan beban pemeliharaan yang langsung digunakan.

**20. Metode pendekatan Aset.** Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga jaga. Pendekatan ini seperti pembelian alat tulis kantor pada sekretariat dan barang cetakan yang akan digunakan dalam waktu lama, serta pembelian obat-obatan pada Puskesmas dan RSUD .

## **PENGUKURAN**

**21. Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.**

## **PENGUNGKAPAN**

**22.** Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- (a) Rincian beban per SKPD.
- (b) Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- (c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.



## KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI BELANJA

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

14 Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**2. Perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan belanja.**

#### Ruang Lingkup

**3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.**

**4. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.**

### DEFINISI

**5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

**Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.**

**Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.**

***Kas Umum Daerah*** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.

***Kurs*** adalah rasio pertukaran dua mata uang.

***Rekening Kas Umum Daerah*** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

#### **KLASIFIKASI BELANJA**

**6. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.**

7. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

8. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

9. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

10. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

11. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai	xxx
- Belanja Barang	xxx
- Bunga	xxx

- Subsidi	xxx
- Hibah	xxx
- Bantuan Sosial	xxx
Belanja Modal	
- Belanja Aset Tetap	xxx
- Belanja Aset Lainnya	xxx
Belanja Lain-lain/Tak Terduga	xxx
Transfer	xxx

**12. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.**

13. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

14. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

15. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :

- Pelayanan Umum	xxx
- Pertahanan	xxx
- Ketertiban dan Keamanan	xxx
- Ekonomi	xxx
- Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
- Perumahan dan Permukiman	xxx
- Kesehatan	xxx
- Pariwisata dan Budaya	xxx
- Agama	xxx
- Pendidikan	xxx
- Perlindungan sosial	xxx

**16. Adapun Kode Akun untuk Belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang tercantum dalam Bagan Akun Standar (BAS) adalah sebagai berikut :**

Kode Akun				Uraian Akun
5				BELANJA
5	1			BELANJA OPERASI
5	1	1		Belanja Pegawai
5	1	1	01	Belanja Gaji dan Tunjangan
5	1	1	01 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga
5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan
5	1	1	01 04	Tunjangan Fungsional
5	1	1	01 05	Tunjangan Fungsional Umum
5	1	1	01 06	Tunjangan Beras
5	1	1	01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5	1	1	01 08	Pembulatan Gaji
5	1	1	01 09	Iuran Jaminan Kesehatan
5	1	1	01 10	Uang Paket
5	1	1	01 11	Tunjangan Badan Musyawarah
5	1	1	01 12	Tunjangan Komisi
5	1	1	01 13	Tunjangan Badan Anggaran
5	1	1	01 14	Tunjangan Badan Kehormatan
5	1	1	01 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5	1	1	01 16	Tunjangan Perumahan
5	1	1	01 17	Uang Duka Wafat/Tewas
5	1	1	01 18	Uang Jasa Pengabdian
5	1	1	01 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5	1	1	01 20	Tunjangan Kesehatan DPRD
5	1	1	01 21	Dst .....
5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5	1	1	02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5	1	1	02 02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5	1	1	02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5	1	1	02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5	1	1	02 05	Dst .....
5	1	1	03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5	1	1	03 01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	1	03 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5	1	1	03 03	Dst .....
5	1	1	04	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5	1	1	04 01	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5	1	1	04 02	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5	1	1	04 03	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
5	1	1	05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5	1	1	05 01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	05 02	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	05 03	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	05 04	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA
5	1	1	05 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA
5	1	1	05 06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
5	1	1	05 07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
5	1	1	05 08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA
5	1	1	05 09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA
5	1	1	05 10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA
5	1	1	05 11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA
5	1	1	05 12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA
5	1	1	05 13	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA
5	1	1	05 14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
5	1	1	05 15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
5	1	1	05 16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
5	1	1	06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	1	06 01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA
5	1	1	06 02	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
5	1	1	06 03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
5	1	1	06 04	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
5	1	1	06 05	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
5	1	1	06 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA
5	1	1	06 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
5	1	1	06 08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
5	1	1	06 09	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
5	1	1	06 10	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
5	1	1	06 11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA
5	1	1	06 12	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
5	1	1	06 13	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA
5	1	1	06 14	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
5	1	1	06 15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
5	1	1	06 16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA

5	1	1	06	17	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA
5	1	1	06	18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA
5	1	1	06	19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA
5	1	1	06	20	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
5	1	1	06	21	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA
5	1	1	06	22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LRA
5	1	1	06	23	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
5	1	1	06	24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air - LRA
5	1	1	06	25	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
5	1	1	06	26	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA
5	1	1	06	27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
5	1	1	06	28	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA
5	1	1	06	29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA
5	1	1	06	30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA
5	1	1	06	31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA
5	1	1	06	32	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
5	1	1	07		Uang Lembur
5	1	1	07	01	Uang Lembur PNS
5	1	1	07	02	Uang Lembur Non PNS
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5	1	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis
5	1	2	01	01	Belanja alat tulis kantor
5	1	2	01	02	Belanja dokumen/administrasi tender
5	1	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5	1	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5	1	2	01	05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5	1	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5	1	2	01	07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5	1	2	01	08	Belanja pengisian tabung gas
5	1	2	01	09	Dst.....
5	1	2	02		Belanja Bahan/Material
5	1	2	02	01	Belanja bahan baku bangunan
5	1	2	02	02	Belanja bahan/bibit tanaman
5	1	2	02	03	Belanja bibit ternak
5	1	2	02	04	Belanja bahan obat-obatan
5	1	2	02	05	Belanja bahan kimia
5	1	2	02	06	Belanja Persediaan Makanan Pokok
5	1	2	02	07	Dst.....
5	1	2	03		Belanja Jasa Kantor
5	1	2	03	01	Belanja telepon
5	1	2	03	02	Belanja air
5	1	2	03	03	Belanja listrik
5	1	2	03	04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5	1	2	03	05	Belanja surat kabar/majalah
5	1	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet
5	1	2	03	07	Belanja paket/pengiriman
5	1	2	03	08	Belanja Sertifikasi
5	1	2	03	09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5	1	2	03	10	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5	1	2	03	11	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	2	03	12	Dst.....
5	1	2	04		Belanja Premi Asuransi
5	1	2	04	01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5	1	2	04	02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5	1	2	04	03	Dst.....
5	1	2	05		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5	1	2	05	01	Belanja Jasa Service
5	1	2	05	02	Belanja Penggantian Suku Cadang
5	1	2	05	03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5	1	2	05	04	Belanja Jasa KIR
5	1	2	05	05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	2	05	06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan
5	1	2	06	01	Belanja cetak
5	1	2	06	02	Belanja Penggandaan
5	1	2	07		Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5	1	2	07	01	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5	1	2	07	02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5	1	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5	1	2	07	04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5	1	2	07	05	Dst.....
5	1	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5	1	2	08	01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5	1	2	08	02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5	1	2	08	03	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5	1	2	08	04	Dst ...
5	1	2	09		Belanja Sewa Alat Berat

5	1	2	09	01	Belanja sewa Eskavator
5	1	2	09	02	Belanja sewa Bulldoser
5	1	2	09	03	Dst ...
5	1	2	10		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5	1	2	10	01	Belanja sewa meja kursi
5	1	2	10	02	Belanja sewa komputer dan printer
5	1	2	10	03	Belanja sewa proyektor
5	1	2	10	04	Belanja sewa generator
5	1	2	10	05	Belanja sewa tenda
5	1	2	10	06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5	1	2	10	07	Dst.....
5	1	2	11		Belanja Makanan dan Minuman
5	1	2	11	01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5	1	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat
5	1	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu
5	1	2	11	04	Belanja makanan dan minuman pelatihan
5	1	2	11	05	Dst.....
5	1	2	12		Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5	1	2	12	01	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	1	2	12	02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	1	2	12	03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	1	2	12	04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	1	2	12	05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	1	2	12	06	Dst.....
5	1	2	13		Belanja Pakaian Kerja
5	1	2	13	01	Belanja pakaian kerja lapangan
5	1	2	13	02	Dst.....
5	1	2	14		Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5	1	2	14	01	Belanja pakaian KORPRI
5	1	2	14	02	Belanja pakaian adat daerah
5	1	2	14	03	Belanja pakaian batik tradisional
5	1	2	14	04	Belanja pakaian olahraga
5	1	2	14	05	Dst.....
5	1	2	15		Belanja Perjalanan Dinas
5	1	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5	1	2	15	02	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5	1	2	15	03	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5	1	2	16		Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5	1	2	16	01	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5	1	2	16	02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
5	1	2	17		Belanja Pemulangan Pegawai
5	1	2	17	01	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
5	1	2	17	02	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
5	1	2	18		Belanja Pemeliharaan
5	1	2	18	01	Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	2	18	02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	2	18	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	2	18	04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5	1	2	18	05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	2	18	06	Dst.....
5	1	2	19		Belanja Jasa Konsultansi
5	1	2	19	01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5	1	2	19	02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5	1	2	19	03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5	1	2	19	04	Dst.....
5	1	2	20		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	20	01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5	1	2	20	02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	21		Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5	1	2	21	01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5	1	2	21	02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
5	1	2	22		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	2	22	01	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5	1	2	22	02	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5	1	2	22	03	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5	1	2	22	04	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5	1	2	22	05	Dst .....
5	1	2	23		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5	1	2	23	01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5	1	2	23	02	Belanja sosialisasi
5	1	2	23	03	Belanja bimbingan teknis
5	1	2	23	04	Dst.....

5	1	2	24		Belanja Honorarium Non Pegawai
5	1	2	24	01	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
5	1	2	24	02	Moderator
5	1	2	24	03	Dst.....
5	1	2	25		Honorarium PNS
5	1	2	25	01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5	1	2	25	02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5	1	2	25	03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	25	04	Dst .....
5	1	2	26		Honorarium Non PNS
5	1	2	26	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5	1	2	26	02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5	1	2	26	03	Dst.....
5	1	2	27		Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5	1	2	27	01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5	1	2	27	02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5	1	2	27	03	Dst.....
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Bunga</b>
5	1	3	01		Bunga Utang Pinjaman
5	1	3	01	01	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5	1	3	01	02	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	3	01	03	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5	1	3	01	04	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5	1	3	01	05	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
5	1	3	02		Bunga Utang Obligasi
5	1	3	02	01	Bunga Utang Obligasi
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>Belanja Subsidi</b>
5	1	4	01		Belanja Subsidi
5	1	4	01	01	Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	4	01	02	Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	4	01	03	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>Belanja Hibah</b>
5	1	5	01		Belanja Hibah kepada Pemerintah
5	1	5	01	01	Belanja Hibah kepada Pemerintah
5	1	5	02		Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5	1	5	02	01	Hibah kepada Pemerintah Provinsi
5	1	5	02	02	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5	1	5	02	03	Hibah kepada Pemerintah Kota
5	1	5	03		Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5	1	5	03	01	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD .....
5	1	5	03	02	Dst.....
5	1	5	04		Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5	1	5	04	01	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat .....
5	1	5	04	02	Dst ...
5	1	5	05		Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5	1	5	05	01	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan .....
5	1	5	05	02	Dst ...
5	1	5	06		Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar ***
5	1	5	06	01	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota .....
5	1	5	06	02	Dst.....
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>			<b>Belanja Bantuan Sosial</b>
5	1	6	01		Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5	1	6	01	01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ....
5	1	6	01	02	Dst.....
5	1	6	02		Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
5	1	6	02	01	Belanja Bantuan Sosial kepada .....
5	1	6	02	02	Dst.....
<b>5</b>	<b>2</b>				<b>BELANJA MODAL</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Belanja Modal Tanah</b>
5	2	1	01		Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan
5	2	1	01	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung
5	2	1	01	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Emplasmen
5	2	1	01	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Kuburan
5	2	1	01	04	Dst.....
5	2	1	02		Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian
5	2	1	02	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5	2	1	02	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Tegalan
5	2	1	02	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Ladang
5	2	1	02	04	Dst.....
5	2	1	03		Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan
5	2	1	03	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan .....

5	2	1	03	02	Dst.....
5	2	1	04		Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran
5	2	1	04	01	Belanja modal Pengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5	2	1	04	02	Belanja modal Pengadaan Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
5	2	1	04	03	Dst.....
5	2	1	05		Belanja modal Pengadaan Hutan
5	2	1	05	01	Belanja modal Pengadaan Hutan Lebat
5	2	1	05	02	Belanja modal Pengadaan Hutan Belukar
5	2	1	05	03	Belanja modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5	2	1	05	04	Belanja modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5	2	1	05	05	Belanja modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
5	2	1	05	06	Dst.....
5	2	1	06		Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan
5	2	1	06	01	Belanja modal Pengadaan Tambak
5	2	1	06	02	Belanja modal Pengadaan Air Tawar
5	2	1	06	03	Dst.....
5	2	1	07		Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5	2	1	07	01	Belanja modal Pengadaan tanah Rawa
5	2	1	07	02	Belanja modal Pengadaan tanah Danau
5	2	1	08		Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5	2	1	08	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus
5	2	1	08	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Rusak
5	2	1	09		Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
5	2	1	09	01	Belanja modal Pengadaan tanah Alang-alang
5	2	1	09	02	Belanja modal Pengadaan tanah Padang Rumput
5	2	1	10		Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5	2	1	10	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...
5	2	1	10	02	Dst.....
5	2	1	11		Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
5	2	1	11	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5	2	1	11	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	2	1	11	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5	2	1	11	04	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5	2	1	11	05	Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong
5	2	1	11	06	Belanja modal Pengadaan Tanah Peternakan
5	2	1	11	07	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5	2	1	11	08	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5	2	1	11	09	Belanja modal Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
5	2	1	11	10	Dst.....
5	2	1	12		Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan
5	2	1	12	01	Belanja modal Pengadaan Pertambangan .....
5	2	1	12	02	Dst.....
5	2	1	13		Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5	2	1	13	01	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5	2	1	13	02	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5	2	1	13	03	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
5	2	1	13	04	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	2	1	13	05	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	2	1	13	06	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5	2	1	13	07	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5	2	1	13	08	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5	2	1	13	09	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5	2	1	13	10	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5	2	1	13	11	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5	2	1	13	12	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
5	2	1	13	13	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	2	1	13	14	Dst.....
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>
5	2	2	01		Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5	2	2	01	01	Belanja modal Pengadaan Tractor
5	2	2	01	02	Belanja modal Pengadaan Grader
5	2	2	01	03	Belanja modal Pengadaan Excavator
5	2	2	01	04	Belanja modal Pengadaan Pile Driver
5	2	2	01	05	Belanja modal Pengadaan Hauler
5	2	2	01	06	Belanja modal Pengadaan Asphalt Equipment
5	2	2	01	07	Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment
5	2	2	01	08	Belanja modal Pengadaan Aggregate \$ Concrete Equipment
5	2	2	01	09	Belanja modal Pengadaan Loader
5	2	2	01	10	Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat
5	2	2	01	11	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses
5	2	2	01	12	Dst.....
5	2	2	02		Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5	2	2	02	01	Belanja modal Pengadaan Dredger
5	2	2	02	02	Belanja modal Pengadaan Floating Excavator
5	2	2	02	03	Belanja modal Pengadaan Amphibi Dredger



5	2	2	02	04	Belanja modal Pengadaan Kapal Tarik
5	2	2	02	05	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses Apung
5	2	2	02	06	Dst.....
5	2	2	03		Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
5	2	2	03	01	Belanja modal Pengadaan Alat Penarik
5	2	2	03	02	Belanja modal Pengadaan Feeder
5	2	2	03	03	Belanja modal Pengadaan Compressor
5	2	2	03	04	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set
5	2	2	03	05	Belanja modal Pengadaan Pompa
5	2	2	03	06	Belanja modal Pengadaan Mesin Bor
5	2	2	03	07	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5	2	2	03	08	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5	2	2	03	09	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5	2	2	03	10	Dst.....
5	2	2	04		Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	2	04	01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	2	04	02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	2	04	03	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	04	04	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	2	04	05	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	2	2	04	06	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	2	2	05		Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	2	05	01	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	2	05	02	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
5	2	2	06		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5	2	2	06	01	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5	2	2	06	02	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5	2	2	06	03	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
5	2	2	07		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5	2	2	07	01	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5	2	2	07	02	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5	2	2	07	03	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
5	2	2	08		Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
5	2	2	08	01	Belanja modal Pengadaan Pesawat Terbang
5	2	2	08	02	Dst.....
5	2	2	09		Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5	2	2	09	01	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5	2	2	09	02	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5	2	2	09	03	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	09	04	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5	2	2	09	05	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5	2	2	09	06	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5	2	2	09	07	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5	2	2	09	08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Las
5	2	2	09	09	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es
5	2	2	09	10	Dst.....
5	2	2	10		Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	2	10	01	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	2	2	10	02	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5	2	2	10	03	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5	2	2	10	04	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat
5	2	2	10	05	Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5	2	2	10	06	Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5	2	2	10	07	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5	2	2	10	08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5	2	2	10	09	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5	2	2	10	10	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5	2	2	10	11	Belanja modal Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting
5	2	2	10	12	Dst.....
5	2	2	11		Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
5	2	2	11	01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal
5	2	2	11	02	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5	2	2	11	03	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5	2	2	11	04	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5	2	2	11	05	Belanja modal Pengadaan Alat Calibrasi
5	2	2	11	06	Belanja modal Pengadaan Oscilloscope
5	2	2	11	07	Belanja modal Pengadaan Universal Tester
5	2	2	11	08	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5	2	2	11	09	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5	2	2	11	10	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5	2	2	11	11	Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5	2	2	11	12	Belanja modal Pengadaan Takaran Kering
5	2	2	11	13	Belanja modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5	2	2	11	14	Belanja modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5	2	2	11	15	Belanja modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Capacitas
5	2	2	11	16	Dst.....
5	2	2	12		Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
5	2	2	12	01	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman

5	2	2	12	02	Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5	2	2	12	03	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan
5	2	2	12	04	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5	2	2	12	05	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5	2	2	12	06	Belanja modal Pengadaan Alat Prosesing
5	2	2	12	07	Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen
5	2	2	12	08	Belanja modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan
5	2	2	12	09	Dst.....
5	2	2	13		Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5	2	2	13	01	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5	2	2	13	02	Belanja modal Pengadaan Alat Panen
5	2	2	13	03	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan
5	2	2	13	04	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
5	2	2	13	05	Belanja modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan
5	2	2	13	06	Dst.....
5	2	2	14		Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5	2	2	14	01	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik
5	2	2	14	02	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5	2	2	14	03	Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5	2	2	14	04	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5	2	2	14	05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5	2	2	14	06	Dst.....
5	2	2	15		Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5	2	2	15	01	Belanja modal Pengadaan Meubelair
5	2	2	15	02	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5	2	2	15	03	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
5	2	2	15	04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
5	2	2	15	05	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur
5	2	2	15	06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	2	2	15	07	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
5	2	2	15	08	Dst.....
5	2	2	16		Belanja modal Pengadaan Komputer
5	2	2	16	01	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
5	2	2	16	02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5	2	2	16	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5	2	2	16	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5	2	2	16	05	Belanja modal Pengadaan Perlatan Jaringan
5	2	2	16	06	Dst.....
5	2	2	17		Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	2	17	01	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5	2	2	17	02	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5	2	2	17	03	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5	2	2	17	04	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5	2	2	17	05	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	2	2	17	06	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	2	2	17	07	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5	2	2	17	08	Dst.....
5	2	2	18		Belanja modal Pengadaan Alat Studio
5	2	2	18	01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5	2	2	18	02	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5	2	2	18	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5	2	2	18	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak
5	2	2	18	05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing
5	2	2	18	06	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
5	2	2	18	07	Dst.....
5	2	2	19		Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
5	2	2	19	01	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5	2	2	19	02	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5	2	2	19	03	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	2	2	19	04	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5	2	2	19	05	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5	2	2	19	06	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5	2	2	19	07	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi
5	2	2	19	08	Dst.....
5	2	2	20		Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5	2	2	20	01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5	2	2	20	02	Belanja modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5	2	2	20	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5	2	2	20	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5	2	2	20	05	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5	2	2	20	06	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5	2	2	20	07	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5	2	2	20	08	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5	2	2	20	09	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF
5	2	2	20	10	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5	2	2	20	11	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF
5	2	2	20	12	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
5	2	2	20	13	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5	2	2	20	14	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF

5	2	2	20	15	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave FPU
5	2	2	20	16	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave Terrestrial
5	2	2	20	17	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microwave TVRO
5	2	2	20	18	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dummy Load
5	2	2	20	19	Belanja modal Pengadaan Switcher Antena
5	2	2	20	20	Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
5	2	2	20	21	Belanja modal Pengadaan Feeder
5	2	2	20	22	Belanja modal Pengadaan Humidity Control
5	2	2	20	23	Belanja modal Pengadaan Program Input Equipment
5	2	2	20	24	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5	2	2	20	25	Dst.....
5	2	2	21		Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
5	2	2	21	01	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5	2	2	21	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5	2	2	21	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	2	2	21	04	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5	2	2	21	05	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5	2	2	21	06	Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen
5	2	2	21	07	Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi
5	2	2	21	08	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah
5	2	2	21	09	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	2	2	21	10	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	2	2	21	11	Belanja modal Pengadaan Mortuary
5	2	2	21	12	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5	2	2	21	13	Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set
5	2	2	21	14	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5	2	2	21	15	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
5	2	2	21	16	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5	2	2	21	17	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5	2	2	21	18	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5	2	2	21	19	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	2	2	21	20	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	2	2	21	21	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
5	2	2	21	22	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Hewan
5	2	2	21	23	Dst.....
5	2	2	22		Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
5	2	2	22	01	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5	2	2	22	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	2	2	22	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5	2	2	22	04	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5	2	2	22	05	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5	2	2	22	06	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
5	2	2	22	07	Dst.....
5	2	2	23		Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5	2	2	23	01	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5	2	2	23	02	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	2	2	23	03	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5	2	2	23	04	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5	2	2	23	05	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
5	2	2	23	06	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	2	2	23	07	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
5	2	2	23	08	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5	2	2	23	09	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Cokok Tanam
5	2	2	23	10	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5	2	2	23	11	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5	2	2	23	12	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5	2	2	23	13	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5	2	2	23	14	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5	2	2	23	15	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	2	2	23	16	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5	2	2	23	17	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Mikrobiologi A
5	2	2	23	18	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5	2	2	23	19	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5	2	2	23	20	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5	2	2	23	21	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Film
5	2	2	23	22	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5	2	2	23	23	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5	2	2	23	24	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5	2	2	23	25	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5	2	2	23	26	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	2	2	23	27	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5	2	2	23	28	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	2	2	23	29	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5	2	2	23	30	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5	2	2	23	31	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5	2	2	23	32	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5	2	2	23	33	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	2	2	23	34	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	2	2	23	35	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	2	2	23	36	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5	2	2	23	37	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5	2	2	23	38	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	2	2	23	39	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
5	2	2	23	40	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel

5	2	2	23	41	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	2	2	23	42	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5	2	2	23	43	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5	2	2	23	44	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5	2	2	23	45	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	2	2	23	46	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5	2	2	23	47	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5	2	2	23	48	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5	2	2	23	49	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	2	2	23	50	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya
5	2	2	23	51	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
5	2	2	23	52	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
5	2	2	23	53	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	2	2	23	54	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
5	2	2	23	55	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5	2	2	23	56	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5	2	2	23	57	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5	2	2	23	58	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	2	2	23	59	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
5	2	2	23	60	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	2	2	23	61	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5	2	2	23	62	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5	2	2	23	63	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
5	2	2	23	64	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
5	2	2	23	65	Dst.....
5	2	2	24		Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5	2	2	24	01	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
5	2	2	24	02	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5	2	2	24	03	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5	2	2	24	04	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
5	2	2	24	05	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
5	2	2	24	06	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
5	2	2	24	07	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPS
5	2	2	24	08	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
5	2	2	24	09	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
5	2	2	24	10	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5	2	2	24	11	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
5	2	2	24	12	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : PMP
5	2	2	24	13	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
5	2	2	24	14	Dst.....
5	2	2	25		Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	2	25	01	Belanja modal Pengadaan Analytical instrument
5	2	2	25	02	Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5	2	2	25	03	Belanja modal Pengadaan General Laboratory Tool
5	2	2	25	04	Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
5	2	2	25	05	Belanja modal Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
5	2	2	25	06	Belanja modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment
5	2	2	25	07	Dst.....
5	2	2	26		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
5	2	2	26	01	Belanja modal Pengadaan Radiation Detector
5	2	2	26	02	Belanja modal Pengadaan Modular Counting and Scientific
5	2	2	26	03	Belanja modal Pengadaan Assembly/Accounting System
5	2	2	26	04	Belanja modal Pengadaan Recorder Display
5	2	2	26	05	Belanja modal Pengadaan System/Power Supply
5	2	2	26	06	Belanja modal Pengadaan Measuring / Testing Device
5	2	2	26	07	Belanja modal Pengadaan Opto Electronics
5	2	2	26	08	Belanja modal Pengadaan Accelator
5	2	2	26	09	Belanja modal Pengadaan Reactor Expermental System
5	2	2	26	10	Dst.....
5	2	2	27		Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5	2	2	27	01	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	2	2	27	02	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5	2	2	27	03	Belanja modal Pengadaan Proteksi Lingkungan
5	2	2	27	04	Belanja modal Pengadaan Meteorological Equipment
5	2	2	27	05	Belanja modal Pengadaan Sumber Radiasi
5	2	2	27	06	Dst.....
5	2	2	28		Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
5	2	2	28	01	Belanja modal Pengadaan Radiation Application Equipment
5	2	2	28	02	Belanja modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5	2	2	28	03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir
5	2	2	28	04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Hidrologi
5	2	2	28	05	Dst.....
5	2	2	29		Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	2	29	01	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5	2	2	29	02	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	2	2	29	03	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	2	2	29	04	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5	2	2	29	05	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5	2	2	29	06	Dst.....
5	2	2	30		Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika

5	2	2	30	01	Belanja modal Pengadaan Towing Carriage
5	2	2	30	02	Belanja modal Pengadaan Wave Generator and Absorber
5	2	2	30	03	Belanja modal Pengadaan Data Acquisition and Analyzing System
5	2	2	30	04	Belanja modal Pengadaan Cavitation Tunnel
5	2	2	30	05	Belanja modal Pengadaan Overhead Cranes
5	2	2	30	06	Belanja modal Pengadaan Peralatan umum
5	2	2	30	07	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5	2	2	30	08	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop
5	2	2	30	09	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
5	2	2	30	10	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
5	2	2	30	11	Belanja modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop
5	2	2	30	12	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
5	2	2	30	13	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop
5	2	2	30	14	Belanja modal Pengadaan MOB
5	2	2	30	15	Belanja modal Pengadaan Photo and Film Equipment
5	2	2	30	16	Dst.....
5	2	2	31		Belanja modal Pengadaan Senjata Api
5	2	2	31	01	Belanja modal Pengadaan Senjata Genggam
5	2	2	31	02	Belanja modal Senjata Pinggang
5	2	2	31	03	Belanja modal Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
5	2	2	31	04	Belanja modal Senapan Mesin
5	2	2	31	05	Belanja modal Mortir
5	2	2	31	06	Belanja modal Anti Lapis Baja
5	2	2	31	07	Belanja modal Artileri Medan (Armed)
5	2	2	31	08	Belanja modal Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
5	2	2	31	09	Belanja modal Peluru Kendali/Rudal
5	2	2	31	10	Belanja modal Kavaleri
5	2	2	31	11	Belanja modal Senjata Lain-lain
5	2	2	32		Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5	2	2	32	01	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan
5	2	2	32	02	Belanja modal Pengadaan Non Senjata Api
5	2	2	33		Belanja modal Pengadaan Amunisi
5	2	2	33	01	Belanja modal Pengadaan Amunisi Umum
5	2	2	33	02	Belanja modal Pengadaan Amunisi Darat
5	2	2	34		Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar
5	2	2	34	01	Belanja modal Pengadaan Laser
5	2	2	34	02	Dst.....
5	2	2	35		Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5	2	2	35	01	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
5	2	2	35	02	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan
5	2	2	35	03	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
5	2	2	35	04	Dst.....
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>
5	2	3	01		Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	3	01	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5	2	3	01	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
5	2	3	01	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
5	2	3	01	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5	2	3	01	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5	2	3	01	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
5	2	3	01	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opseratorium
5	2	3	01	08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	2	3	01	09	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	3	01	10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	2	3	01	11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5	2	3	01	12	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	3	01	13	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5	2	3	01	14	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	2	3	01	15	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5	2	3	01	16	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5	2	3	01	17	Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5	2	3	01	18	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5	2	3	01	19	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5	2	3	01	20	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5	2	3	01	21	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5	2	3	01	22	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5	2	3	01	23	Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan
5	2	3	01	24	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5	2	3	01	25	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5	2	3	01	26	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	2	3	01	27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	3	02		Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	3	02	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5	2	3	02	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5	2	3	02	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III
5	2	3	02	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	2	3	02	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
5	2	3	02	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel
5	2	3	02	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel
5	2	3	02	08	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun

5	2	3	02	09	Dst.....
5	2	3	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara
5	2	3	03	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5	2	3	03	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5	2	3	03	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5	2	3	03	04	Dst.....
5	2	3	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5	2	3	04	01	Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan
5	2	3	04	02	Belanja modal Pengadaan Rumah Adat
5	2	3	04	03	Belanja modal Pengadaan Rumah Peningggalan Sejarah
5	2	3	04	04	Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah
5	2	3	04	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5	2	3	04	06	Dst.....
5	2	3	05		Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	05	01	Belanja modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan
5	2	3	05	02	Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan
5	2	3	05	03	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya
5	2	3	06		Belanja modal Pengadaan Candi
5	2	3	06	01	Belanja modal Pengadaan Candi Hindhu
5	2	3	06	02	Belanja modal Pengadaan Candi Budha
5	2	3	06	03	Belanja modal Pengadaan Candi Lainnya
5	2	3	07		Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah
5	2	3	07	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya
5	2	3	08		Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	08	01	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5	2	3	09		Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	3	09	01	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
5	2	3	09	02	Dst.....
5	2	3	10		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5	2	3	10	01	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5	2	3	10	02	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
5	2	3	10	03	Dst.....
5	2	3	11		Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	3	11	01	Belanja modal Pengadaan Rumwey/Threshold Light
5	2	3	11	02	Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5	2	3	11	03	Belanja modal Pengadaan Approach Light
5	2	3	11	04	Belanja modal Pengadaan Rumwey Identification Light (RelIs)
5	2	3	11	05	Belanja modal Pengadaan Signal
5	2	3	11	06	Belanja modal Pengadaan Flood Light
5	2	3	11	07	Dst.....
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>
5	2	4	01		Belanja modal Pengadaan Jalan
5	2	4	01	01	Belanja modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional
5	2	4	01	02	Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi
5	2	4	01	03	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5	2	4	01	04	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
5	2	4	01	05	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus
5	2	4	01	06	Belanja modal Pengadaan Jalan Tol
5	2	4	01	07	Belanja modal Pengadaan Jalan Kereta
5	2	4	01	08	Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	4	01	09	Dst.....
5	2	4	02		Belanja modal Pengadaan Jembatan
5	2	4	02	01	Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5	2	4	02	02	Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi
5	2	4	02	03	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5	2	4	02	04	Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa
5	2	4	02	05	Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus
5	2	4	02	06	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
5	2	4	02	07	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
5	2	4	02	08	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	4	02	09	Belanja modal Pengadaan Jembatan penyeberangan
5	2	4	02	10	Dst.....
5	2	4	03		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5	2	4	03	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
5	2	4	03	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5	2	4	03	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5	2	4	03	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5	2	4	03	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5	2	4	03	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5	2	4	03	07	Dst.....
5	2	4	04		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5	2	4	04	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
5	2	4	04	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	2	4	04	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut

5	2	4	04	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5	2	4	04	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	2	4	04	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	2	4	04	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5	2	4	04	08	Dst.....
5	2	4	05		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa
5	2	4	05	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5	2	4	05	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5	2	4	05	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5	2	4	05	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5	2	4	05	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5	2	4	05	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5	2	4	05	07	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	2	4	05	08	Dst.....
5	2	4	06		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	4	06	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5	2	4	06	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5	2	4	06	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
5	2	4	06	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	2	4	06	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5	2	4	06	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
5	2	4	06	07	Dst.....
5	2	4	07		Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	4	07	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	06	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	2	4	07	07	Dst.....
5	2	4	08		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5	2	4	08	01	Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	2	4	08	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5	2	4	08	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5	2	4	08	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	2	4	08	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	2	4	08	06	Dst.....
5	2	4	09		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
5	2	4	09	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5	2	4	09	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5	2	4	09	03	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5	2	4	09	04	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
5	2	4	09	05	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	2	4	09	06	Dst.....
5	2	4	10		Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
5	2	4	10	01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut
5	2	4	10	02	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar
5	2	4	10	03	Dst.....
5	2	4	11		Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
5	2	4	11	01	Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah
5	2	4	11	02	Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5	2	4	11	03	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam
5	2	4	11	04	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal
5	2	4	11	05	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	4	11	06	Dst.....
5	2	4	12		Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5	2	4	12	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5	2	4	12	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5	2	4	12	03	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5	2	4	12	04	Dst.....
5	2	4	13		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	4	13	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	2	4	13	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	4	14		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	14	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	4	15		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	4	15	01	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air
5	2	4	15	02	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5	2	4	15	03	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
5	2	4	15	04	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	2	4	15	05	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	2	4	15	06	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	2	4	15	07	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	2	4	15	08	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	2	4	15	09	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	2	4	15	10	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)

5	2	4	15	11	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTsm)
5	2	4	15	12	Dst.....
5	2	4	16		Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5	2	4	16	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5	2	4	16	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	2	4	16	03	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	2	4	16	04	Dst.....
5	2	4	17		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan
5	2	4	17	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat
5	2	4	17	02	Dst.....
5	2	4	18		Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas
5	2	4	18	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5	2	4	18	02	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	2	4	18	03	Dst.....
5	2	4	19		Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman
5	2	4	19	01	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	2	4	19	02	Dst.....
5	2	4	20		Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum
5	2	4	20	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa
5	2	4	20	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5	2	4	20	03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5	2	4	20	04	Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Rumah
5	2	4	20	05	Dst.....
5	2	4	21		Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
5	2	4	21	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi
5	2	4	21	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi
5	2	4	22		Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon
5	2	4	22	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5	2	4	22	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5	2	4	22	03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air
5	2	4	23		Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas
5	2	4	23	01	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	2	4	23	02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5	2	4	23	03	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5	2	4	23	04	Belanja modal Pengadaan Jaringan BBM
5	2	4	23	05	Dst.....
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>			<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>
5	2	5	01		Belanja modal Pengadaan Buku
5	2	5	01	01	Belanja modal Pengadaan Umum
5	2	5	01	02	Belanja modal Pengadaan Filsafat
5	2	5	01	03	Belanja modal Pengadaan Agama
5	2	5	01	04	Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial
5	2	5	01	05	Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa
5	2	5	01	06	Belanja modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan alam
5	2	5	01	07	Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis
5	2	5	01	08	Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5	2	5	01	09	Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5	2	5	01	10	Dst.....
5	2	5	02		Belanja modal Pengadaan Terbitan
5	2	5	02	01	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala
5	2	5	02	02	Belanja modal Pengadaan Buku Laporan
5	2	5	02	03	Dst.....
5	2	5	03		Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5	2	5	03	01	Belanja modal Pengadaan Peta
5	2	5	03	02	Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)
5	2	5	03	03	Belanja modal Pengadaan Musik
5	2	5	03	04	Belanja modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)
5	2	5	03	05	Belanja modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and Realita
5	2	5	03	06	Belanja modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)
5	2	5	03	07	Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara
5	2	5	03	08	Belanja modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)
5	2	5	03	09	Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5	2	5	03	10	Belanja modal Pengadaan Tarscalt
5	2	5	03	11	Dst.....
5	2	5	04		Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5	2	5	04	01	Belanja modal Pengadaan Pahatan
5	2	5	04	02	Belanja modal Pengadaan Lukisan
5	2	5	04	03	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian
5	2	5	04	04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga
5	2	5	04	05	Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan
5	2	5	04	06	Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen
5	2	5	04	07	Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah
5	2	5	04	08	Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan
5	2	5	04	09	Dst.....
5	2	5	05		Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya



5	2	5	05	01	Belanja modal Pengadaan Senam
5	2	5	05	02	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air
5	2	5	05	03	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara
5	2	5	05	04	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5	2	5	05	05	Dst.....
5	2	5	06		Belanja modal Pengadaan Hewan
5	2	5	06	01	Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak
5	2	5	06	02	Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas
5	2	5	06	03	Belanja modal Pengadaan Binatang Melata
5	2	5	06	04	Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan
5	2	5	06	05	Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5	2	5	06	06	Belanja modal Pengadaan Hewan Pengamanan
5	2	5	06	07	Dst.....
5	2	5	07		Belanja modal Pengadaan Tanaman
5	2	5	07	01	Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan
5	2	5	07	02	Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura
5	2	5	07	03	Belanja modal Pengadaan Tanaman Kehutanan
5	2	5	07	04	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias
5	2	5	07	05	Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
5	2	5	07	06	Dst.....
5	3				<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>
5	3	1			<b>Belanja Tak Terduga</b>
5	3	1	01		Belanja Tak Terduga
5	3	1	01	01	Belanja Tak Terduga

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

## PENGAKUAN

**17. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.**

**18. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.**

**19. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.**

**20. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**

**21. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan lain-lain-LRA.**

21. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

## **PENGAKUAN AKUNTANSI ATAS BELANJA BARANG PAKAI HABIS DAN BELANJA MODAL**

**22. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:**

- (a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
- (b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;**
- (c) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization threshold) yang telah ditetapkan.**

## **PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN**

**23. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:**

- (a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:**
  - (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau**
  - (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau**
  - (3) bertambah volume, dan/atau**
  - (4) bertambah kapasitas produksi.**
- (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.**

## **PENGUKURAN**

**24. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.**

## **PENGUNGKAPAN**

**25. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:**

- (a) Rincian belanja per SKPD.**
- (b) Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.**
- (c) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.**
- (d) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 serta Permendagri No.21 tahun 2011 tentang perubahan atas**

Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

- (e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

15 Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**2. *Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan pembiayaan.***

**Ruang Lingkup**

**3. *Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas, oleh entitas pelaporan.***

**4. *Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.***

**DEFINISI**

**5. *Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.***

6. Sumber pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penjualan investasi permanen lainnya.

7. Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara lain pembayaran utang pokok, pengisian dana cadangan, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah.

**8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:**

**Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.**

**Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.**

**Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.**

**Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**

**Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.**

**Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.**

#### **KLASIFIKASI PEMBIAYAAN**

**9. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :**

- (a) Penerimaan Pembiayaan Daerah;**
- (b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.**

10. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

11. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

12. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

13. Pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

14. **Adapun Kode Akun untuk Pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 yang tercantum dalam Bagan Akun Standar (BAS) adalah sebagai berikut :**

Kode Akun					Uraian Akun
7					<b>PEMBIAYAAN</b>
7	1				<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>
7	1	1			<b>Penggunaan SiLPA</b>
7	1	1	01		Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
7	1	1	01	01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
7	1	2			<b>Pencairan Dana Cadangan</b>
7	1	2	01		Pencairan Dana Cadangan
7	1	2	01	01	Pencairan Dana Cadangan .....
7	1	2	01	02	Dst .....
7	1	3			<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>
7	1	3	01		<b>Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>
7	1	3	01	01	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN
7	1	3	01	02	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD
7	1	3	01	03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta
7	1	4			<b>Pinjaman Dalam Negeri</b>
7	1	4	01		Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7	1	4	01	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank .....
7	1	4	01	02	Dst .....
7	1	4	02		Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	1	4	02	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	1	4	03		Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	03	01	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7	1	4	04		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7	1	4	04	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7	1	4	05		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	05	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7	1	4	06		Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	1	4	06	01	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	1	5			<b>Penerimaan Kembali Piutang</b>
7	1	5	01		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	01	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7	1	5	02		Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	02	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7	1	5	03		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7	1	5	03	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7	1	5	04		Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	04	01	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	1	5	05		Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	5	05	01	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7	1	6			<b>Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya</b>
7	1	6	01		Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	1	6	01	01	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan

7	1	6	02		Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	02	01	Penarikan Dana Bergulir
7	1	6	03		Pencairan Deposito Jangka Panjang
7	1	6	03	01	Pencairan Deposito Jangka Panjang
7	1	6	04		Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7	1	6	04	01	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b>			<b>Pinjaman Luar Negeri</b>
7	1	7	01		Pinjaman Luar Negeri
7	1	7	01	01	Pinjaman Luar Negeri
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>			<b>Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya</b>
7	1	8	01		Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7	1	8	01	01	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
<b>7</b>	<b>2</b>				<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>Pembentukan Dana Cadangan</b>
7	2	1	01		Pembentukan Dana Cadangan
7	2	1	01	01	Pembentukan Dana Cadangan
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah</b>
7	2	2	01		Penyertaan Modal pada BUMN
7	2	2	01	01	Penyertaan Modal pada BUMN
7	2	2	02		Penyertaan Modal pada BUMD
7	2	2	02	01	Penyertaan Modal pada BUMD
7	2	2	03		Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7	2	2	03	01	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri</b>
7	2	3	01		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7	2	3	01	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7	2	3	02		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	2	3	02	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7	2	3	03		Pelunasan Obligasi Daerah
7	2	3	03	01	Pelunasan Obligasi Daerah
7	2	3	04		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7	2	3	04	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7	2	3	05		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7	2	3	05	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7	2	3	06		Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	3	06	01	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>Pemberian Pinjaman Daerah</b>
7	2	4	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7	2	4	01	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7	2	4	02		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7	2	4	02	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7	2	4	03		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7	2	4	03	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7	2	4	04		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7	2	4	04	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>			<b>Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya</b>
7	2	5	01		Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	2	5	01	01	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7	2	5	02		Pembentukan Dana Bergulir
7	2	5	02	01	Pembentukan Dana Bergulir
7	2	5	03		Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7	2	5	03	01	Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7	2	5	04		Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
7	2	5	04	01	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>6</b>			<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri</b>
7	2	6	01		Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7	2	6	01	01	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>			<b>Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya</b>
7	2	7	01		Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7	2	7	01	01	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya

#### **PENGAKUAN**

**15. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.**

**16. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.**

#### **PENGUKURAN**

**17. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

**18. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.**

#### **AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO**

19. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

**20. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.**

21. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

**22. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.**

23. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

#### **PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR**

**24. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka**



*panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan dineraca sebagai Investasi Jangka Panjang.*

*25. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik tidak dimaksudkan untuk diminta kembali lagi oleh pemerintah daerah maka rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut dianggarkan di APBD sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok masyarakat tersebut dibukukan dan disajikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.*

#### **TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

*26. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.*

*27. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

*28. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.*

*29. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:*

- (a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;*
- (b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.*

## **PENGUNGKAPAN**

30. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- (a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- (b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
- (c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi pembiayaan yang didasarkan pada Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri No. 59 tahun 2007 serta Permendagri No.21 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 tahun 2005 dan PP No. 71 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
AKUNTANSI PENYUSUTAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

16 Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk penyusutan serta informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

*2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk unit Pemerintahan Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.*

*3. Kebijakan Akuntansi ini mengatur Perlakuan akuntansi untuk penyusutan selama masa mamfaat aset.*

**DEFINISI**

*4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:*

*Akuntansi Aset adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan aset dan neraca Pemerintah Daerah.*

*Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*

***Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.***

***Masa manfaat adalah:***

- (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau***
- (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.***

***Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa mamfaat aset yang bersangkutan.***

***Penyusutan setahun adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 desember.***

***Penyusutan semesteran pertama adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 juni***

***Penyusutan semesteran kedua adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 desember***

## **UMUM**

***5. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.***

6. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

7. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

8. Penyusutan dilakukan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

## METODE PENYUSUTAN

**9. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah Metode garis lurus (straight line method)**

10. Rumusan perhitungan metode garis lurus adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat/Sisa Masa manfaat}}$$

**11. Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai harga perolehan aset tersebut ketika tidak terjadi rehabilitasi.**

**12. Nilai yang dapat disusutkan adalah nilai buku aset tersebut ditambahkan dengan nilai rehabilitasi aset (apabila terjadi rehabilitasi)**

**13. Masa manfaat adalah masa manfaat aset tetap tersebut yang mana tidak mengalami rehabilitasi (lihat tabel masa manfaat).**

**14. Sisa masa manfaat adalah masa manfaat aset tetap setelah dikurangi dengan masa manfaat yang telah digunakan (disusutkan)**

**15. Dalam hal pemerintah daerah menggunakan Metode garis lurus (straight line method) maka masa manfaat aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut:**

**TABEL MASA MANFAAT**

<b>KELOMPOK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>MASA MANFAAT</b>
<b>ALAT BESAR</b>		
	ALAT BESAR DARAT : 1. Traktor 2. Grader 3. Excavator 4. Pile Driver 5. Hauter 6. Asphal Equipment 7. Compacting Equipment 8. Aggragate & Concrete Equipment 9. Loader 10. Alat Pengangkat 11. Mesin Proses	10 TAHUN
	ALAT BESAR APUNG : 1. Dredger 2. Floating excavator 3. Amphibi Dredger 4. Kapal Tarik 5. Mesin Proses Agung	8 TAHUN
	ALAT BANTU : 1. Alat Penarik 2. Freeder 3. Compressor 4. Electric Generating Set	7 TAHUN

	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pompa</li> <li>6. Mesin Bor</li> <li>7. Unit Pemeliharaan Lapangan</li> <li>8. Alat Pengolahan Air Kotor</li> <li>9. Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator</li> </ul>	
<b>ALAT ANGKUTAN</b>		
	<p>ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR :</p> <p>A. Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua, Roda Tiga, Dll :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan Bermotor Roda Dua</li> <li>2. Kendaraan Bermotor Roda Tiga</li> </ul> <p>B. Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Empat, Roda Enam, Roda Sepuluh, Dll:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan</li> <li>2. Kendaraan Bermotor Penumpang</li> <li>3. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</li> <li>4. Kendaraan Bermotor Khusus</li> </ul>	7 TAHUN
	<p>ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan Bermotor Angkutan Barang</li> <li>2. Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang</li> </ul>	2 TAHUN
	<p>ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR :</p> <p>A. Alat Angkut Apung Bermotor yang Mempunyai Berat Diatas 1000 DWT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Angkut Bermotor untuk Barang</li> <li>2. Alat Angkut Bermotor Penumpang</li> <li>3. Alat Angkut Bermotor Khusus</li> </ul>	10 TAHUN
	<p>ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR :</p> <p>A. Alat Angkut Apung Tak Bermotor yang Mempunyai Berat Diatas 1000 DWT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Angkut Apung Tak Bermotor untuk Barang</li> <li>2. Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang</li> <li>3. Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus</li> </ul>	3 TAHUN
	<p>ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA :</p> <p>A. Alat Angkut Bermotor Udara yang Mempunyai Berat Diatas 1000 DWT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kapal Terbang</li> </ul>	20 TAHUN
<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>		
	<p>ALAT BENGKEL BERMESIN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi</li> <li>2. Perkakas Konstruksi Lagam yang Berpindah</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Perkakas Bengkel Listrik</li> <li>4. Perkakas Bengkel Service</li> <li>5. Perkakas Pengangkat Bermesin</li> <li>6. Perkakas Bengkel Kayu</li> <li>7. Perkakas Bengkel Khusus</li> <li>8. Peralatan Las</li> <li>9. Perkakas Pabrik Es</li> </ul>	10 TAHUN
	<p>ALAT BENGKEL TAK BERMESIN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perkakas Bengkel Konstruksi Logam</li> <li>2. Perkakas Bengkel Listrik</li> <li>3. Perkakas Bengkel Service</li> <li>4. Perkakas Pengangkat</li> <li>5. Perkakas Standar (Standar Tool)</li> <li>6. Perkakas Khusus ( Special Tool)</li> <li>7. Perkakas Bengkel Kerja</li> <li>8. Peralatan Tukang-Tukang Besi</li> <li>9. Peralatan Tukang Kayu</li> <li>10. Peralatan Tukang Kulit</li> <li>11. Peralatan Ukur, Gip &amp; Feting</li> </ul>	5 TAHUN
	<p>ALAT UKUR :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Ukur Universal</li> <li>2. Alat Ukur/Test Intelegensia</li> <li>3. Alt Ukur/Test Alat Kepribadian</li> <li>4. Alat Ukur/Test Klinis Lain</li> <li>5. Alat Calibrasi</li> <li>6. Oscilloscope</li> <li>7. Universal Tester</li> <li>8. Alat Ukur/Pembanding</li> <li>9. Alat Ukur Lainnya</li> <li>10. Alat Timbangan/ Blora</li> <li>11. Anak Timbangan/ Biasa</li> <li>12. Takaran Kering</li> <li>13. Takaran Bahan Bangunan 2 HL</li> <li>14. Takaran Latex/ Getah Susu</li> <li>15. Gelas Takar Berbagai Kapasitas</li> </ul>	5 TAHUN
<b>ALAT PERTANIAN</b>		
	<p>ALAT PENGOLAHAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman</li> <li>2. Alat Panen/ Pengolahan</li> <li>3. Alat-alat Peternakan</li> <li>4. Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian</li> <li>5. Alat Prosessing</li> <li>6. Alat Pasca Panen</li> <li>7. Alat Produksi Perikanan</li> <li>8. Alat Laboratorium Pertanian</li> <li>9. Alat Produksi Perikanan</li> </ul> <p>ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ ALAT PENYIMPANAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Pemeliharaan Tanaman</li> <li>2. Alat Panen</li> <li>3. Alat Penyimpanan</li> <li>4. Alat Penangkap Ikan</li> </ul>	4 TAHUN
<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>		
	<p>ALAT KANTOR :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mesin Tik</li> </ul>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mesin Hitung/ Jumlah</li> <li>3. Alat Reproduksi (Pengganda)</li> <li>4. Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor</li> <li>5. Alat Kantor Lainnya</li> </ol>	5 TAHUN
	ALAT RUMAH TANGGA : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meubeleir</li> <li>2. Alat Pengukur Waktu</li> <li>3. Alat Pendingin</li> <li>4. Alat Dapur</li> <li>5. Alat Rumah Tangga Lainnya</li> <li>6. Alat Pemadam Kebakaran</li> <li>7. Alat Pembersih</li> </ol>	5 TAHUN
<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>		
	ALAT STUDIO : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan Studio Visual</li> <li>2. Peralatan Studio Video dan Film</li> <li>3. Peralatan Studio Video dan Film A</li> <li>4. Peralatan Cetak</li> <li>5. Peralatan Pemetaan Pengukur</li> </ol>	5 TAHUN
	ALAT KOMUNIKASI : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Komunikasi Telepon</li> <li>2. Alat Komunikasi Radio SSB</li> <li>3. Alat Komunikasi Radio HF/FM</li> <li>4. Alat Komunikasi Radio VHF</li> <li>5. Alat Komunikasi Radio UHF</li> <li>6. Alat Komunikasi Sosial</li> <li>7. Alat-alat Sandi</li> </ol>	5 TAHUN
	PERALATAN PEMANCAR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan Pemancar MF/MW</li> <li>2. Peralatan Pemancar HF/SW</li> <li>3. Peralatan Pemancar VHF/FM</li> <li>4. Peralatan Pemancar UHF</li> <li>5. Peralatan Pemancar SHF</li> <li>6. Peralatan Antena MF/MW</li> <li>7. Peralatan Antena HF/SW</li> <li>8. Peralatan Antena VHF/FM</li> <li>9. Peralatan Antena UHF</li> <li>10. Peralatan Antena SHF/Parabola</li> <li>11. Peralatan Translator VHF/VHF</li> <li>12. Peralatan Translator UHF/UHF</li> <li>13. Peralatan Translator VHF/UHF</li> <li>14. Peralatan Translator UHF/VHF</li> <li>15. Peralatan Microwave FPU</li> <li>16. Peralatan Microwave Teretrial</li> <li>17. Peralatan Microwave TVRO</li> <li>18. Peralatan Dummy Load</li> <li>19. Switcher Antena</li> <li>20. Switcher/ Menara Antena</li> <li>21. Feeder</li> <li>22. Humity Control</li> <li>23. Program Input Equipment</li> <li>24. Peralatan Antena Penerima VHF</li> </ol>	10 TAHUN
	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	15 TAHUN
<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>		
	ALAT KEDOKTERAN :	



	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Kedokteran Umum</li> <li>2. Alat Kedokteran Gigi</li> <li>3. Alat Kedokteran Keluarga Berencana</li> <li>4. Alat Kedokteran Mata</li> <li>5. Alat Kedokteran T.H.T</li> <li>6. Alat Farmasi</li> <li>7. Alat Kedokteran Bedah</li> <li>8. Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan</li> <li>9. Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam</li> <li>10. Mortuary</li> <li>11. Alat Kesehatan Anak</li> <li>12. Poliklinik set</li> <li>13. Penderita Cacat Tubuh</li> <li>14. Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)</li> <li>15. Alat Kedokteran Jantung</li> <li>16. Alat Kedokteran Radiologi</li> <li>17. Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin</li> <li>18. Alat Kedokteran Gawat Darurat</li> <li>19. Alat Kedokteran Jiwa</li> <li>20. Alat Rontgen</li> <li>21. Alat Kedokteran Nuklir</li> </ol>	5 TAHUN
	<p>ALAT KESEHATAN UMUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Kesehatan Perawatan</li> <li>2. Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis</li> <li>3. Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis</li> <li>4. Alat Kesehatan Matra Laut</li> <li>5. Alat Kesehatan Matra Udara</li> <li>6. Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian</li> <li>7. Alat Kesehatan Olahraga</li> </ol>	5 TAHUN
<b>ALAT LABORATORIUM</b>		
	<p>UNIT ALAT LABORATORIUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Laboratorium Kimia Air</li> <li>2. Alat Laboratorium Microbiologi</li> <li>3. Alat Laboratorium Hidro Kimia</li> <li>4. Alat Laboratorium Model/Hidrolika</li> <li>5. Alat Laboratorium Buatan/Geologi</li> <li>6. Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi</li> <li>7. Alat Laboratorium Aspal Cat &amp; Kimia</li> <li>8. Alat Laboratorium Mekanik Tanah dan Bangunan</li> <li>9. Alat Laboratorium Cocos Tanam</li> <li>10. Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik</li> <li>11. Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik A</li> <li>12. Alat Laboratorium Umum</li> <li>13. Alat Laboratorium A</li> <li>14. Alat Laboratorium Kedokteran</li> <li>15. Alat Laboratorium Microbiologi A</li> <li>16. Alat Laboratorium Kimia</li> <li>17. Alat Laboratorium Microbiologi B</li> <li>18. Alat Laboratorium Patologi</li> </ol>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>19. Alat Laboratorium Immunologi</li> <li>20. Alat Laboratorium Hematologi</li> <li>21. Alat Laboratorium Film</li> <li>22. Alat Laboratorium Makanan</li> <li>23. Alat Laboratorium Standarisasi</li> </ol>	8 TAHUN

	<p>Kalibrasi dan Instrumentasi</p> <p>24. Alat Laboratorium Farmasi</p> <p>25. Alat Laboratorium Fisika</p> <p>26. Alat Laboratorium Hidrodinamika</p> <p>27. Alat Laboratorium Klimatologi</p> <p>28. Alat Laboratorium Proses Peleburan</p> <p>29. Alat Laboratorium Pasir</p> <p>30. Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan</p> <p>31. Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola</p> <p>32. Alat Laboratorium Metalography</p> <p>33. Alat Laboratorium Proses Pengelasan</p> <p>34. Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan</p> <p>35. Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam</p> <p>36. Alat Laboratorium Matrologie</p> <p>37. Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam</p> <p>38. Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas</p> <p>39. Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil</p> <p>40. Alat Laboratorium Uji Tekstil</p> <p>41. Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik</p> <p>42. Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet</p> <p>43. Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik</p> <p>44. Alat Laboratorium Uji Keramik</p> <p>45. Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa</p> <p>46. Alat Laboratorium Pertanian</p> <p>47. Alat Laboratorium Pertanian A</p> <p>48. Alat Laboratorium Pertanian B</p> <p>49. Alat Laboratorium Elektronika dan Daya</p> <p>50. Alat Laboratorium Energi Surya</p> <p>51. Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas</p> <p>52. Alat Laboratorium Oceanografi</p> <p>53. Alat Laboratorium Lingkungan Perairan</p> <p>54. Alat Laboratorium Biologi Peralatan</p> <p>55. Alat Laboratorium Biologi</p> <p>56. Alat Laboratorium Geofisika</p> <p>57. Alat Laboratorium Tambang</p> <p>58. Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia</p>	8 TAHUN
	<p>59. Alat Laboratorium Proses Industri</p> <p>60. Alat Laboratorium Kesehatan Kerja</p> <p>61. Laboratorium Kearsipan</p> <p>62. Laboratorium Hematologi &amp; Urinalisis</p> <p>63. Alat Laboratorium Lainnya</p> <p>64. Laboratorium Hematologi &amp; Urinalisis A</p>	
	<p>UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA</p> <p>NUKLIR :</p> <p>1. Analytical Instrument</p>	

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Instrument Probe/Sensor</li> <li>3. General Laboratory Tool</li> <li>4. Instrument Probe/Sensor A</li> <li>5. Glassware Plastic/Utensils</li> <li>6. Laboratory Safety Equipment</li> </ol>	15 TAHUN
	<p>ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ ELEKTRONIKA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rediation Detector</li> <li>2. Modular Counting and Scentific</li> <li>3. Assembly/Accounting System</li> <li>4. Recorder Display</li> <li>5. System/Power Supply</li> <li>6. Measuring/Testing Device</li> <li>7. Opto Electronics</li> <li>8. Accelator</li> <li>9. Reactor Experimental System</li> </ol>	15 TAHUN
	<p>ALAT PROTEKSI RADIASI/ PROTEKSI LINGKUNGAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Ukur Fisika Kesehatan</li> <li>2. Alat Kesehatan Kerja</li> <li>3. Proteksi Lingkungan</li> <li>4. Meteorelogical Equipment</li> <li>5. Sumber radiasi</li> </ol>	10 TAHUN
	<p>RADIATION APPLICATION &amp; NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Radiation Application Equipment</li> <li>2. Non Destructive Test (NDT) Device</li> <li>3. Peralatan Umum Kedokteran / Klinik Nuklir</li> <li>4. Peralatan Hidrologi</li> </ol>	10 TAHUN
	<p>ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Laboratorium Kualitas Air dan tanah</li> <li>2. Alat Laboratorium Kualitas udara</li> <li>3. Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran</li> <li>4. Laboratorium Lingkungan</li> <li>5. Alat Laboratorium Penunjang</li> </ol>	7 TAHUN
	<p>PERALATAN LABORATORIUM HIDRODINAMIKA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Towing Carriage</li> <li>2. Wave Generator and Absorber</li> <li>3. Data Accquistion and Analyzing System</li> <li>4. Cavitation Tunel</li> <li>5. Overhead Cranes</li> <li>6. Peralatan Umum</li> <li>7. Pemesinan : Model Ship Workshop</li> <li>8. Pemesinan : Propeller Model Workshop</li> <li>9. Pemesinan : Mechnical Workshop</li> <li>10. Pemesinan : Precision Mechanical workshop</li> </ol>	15 TAHUN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Pemesinan : Painting shop</li> <li>12. Pemesinan : Ship Model Preparation Shop</li> <li>13. Pemesinan : Electrical workshop</li> <li>14. MOB</li> <li>15. Photo and Film Equipment</li> </ol>	

	ALAT LABORATORIUM STANDARSASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	10 TAHUN
<b>ALAT PERSENJATAAN</b>		
	SENJATA API : 1. Senjata Gengam 2. Senjata Pinggang 3. senjata Bahu / Senjata Laras Panjang 4. Senapan Mesin 5. Mortir 6. Anti Lapis Baja 7. Artileri Medan (Armed) 8. Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 9. Peluru Kendali / Rudal 10. Kavaleri PERSENJATAAN NON SENJATA API : 1. Alat Keamanan 2. Non Senjata Api	10 TAHUN  3 TAHUN
	SENJATA SINAR : 1. Laser	5 TAHUN
	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN  KOMPUTER	4 TAHUN
	KOMPUTER UNIT	4 TAHUN
	PERALATAN KOMPUTER	4 TAHUN
<b>ALAT EKSPLORESI</b>		
	ALAT EKSPLORESI TOPOGRAFI	5 TAHUN
	ALAT EKSPLORESI GEOFISIKA	10 TAHUN
<b>ALAT PENGEBORAN</b>		
	ALAT PENGEBORAN MESIN	10 TAHUN
	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10 TAHUN
<b>ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN</b>		
	PERALATAN SUMUR	10 TAHUN
	PERALATAN PRODUKSI	10 TAHUN
	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15 TAHUN
<b>ALAT BANTU</b>		

<b>EKSPLORASI</b>		
	ALAT BANTU EKSPLORASI	10 TAHUN
	ALAT BANTU PRODUKSI	10 TAHUN
<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>		
	ALAT DETEKSI	5 TAHUN
	ALAT PELINDUNG	5 TAHUN
	ALAT SAR	2 TAHUN
	ALAT KERJA PENERBANGAN	10 TAHUN
<b>ALAT PERAGA</b>		
	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	10 TAHUN
ALAT PERAGA	ALAT PERAGA SEKOLAH	4 TAHUN
<b>PERALATAN PROSES/ PRODUKSI</b>		
	UNIT PERALATAN PROSES/ PRODUKSI	8 TAHUN
<b>RAMBU-RAMBU</b>		
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	7 TAHUN
	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5 TAHUN
<b>PERALATAN OLAHRAGA</b>		
	Peralatan Olahraga	3 TAHUN
<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50 TAHUN
	BANGUNAN TEMPAT TINGGAL	50 TAHUN
<b>MONUMEN</b>		
	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50 TAHUN
	BANGUNAN BERSEJARAH	50 TAHUN
	BANGUNAN MENARA : Bangunan Menara Perambauan	40 TAHUN
	TUGU/ TANDA BATAS	50 TAHUN
<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>		
	JALAN	10 TAHUN
	JEMBATAN	50 TAHUN
<b>BANGUNAN AIR</b>		
	BANGUNAN AIR IRIGASI	50 TAHUN
	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG	50 TAHUN

	SURUT	
	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25 TAHUN
	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10 TAHUN
	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30 TAHUN
	BANGUNAN AIR BERSIH / AIR BAKU	40 TAHUN
	BANGUNAN AIR KOTOR	40 TAHUN
<b>INSTALASI</b>		
	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30 TAHUN
	INSTALASI AIR KOTOR	30 TAHUN
	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10 TAHUN
	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10 TAHUN
	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40 TAHUN
	INSTALASI GARDU LISTRIK	40 TAHUN
	INSTALASI PERTAHANAN	30 TAHUN
	INSTALASI GAS	30 TAHUN
	INSTALASI PENGAMAN	20 TAHUN
	INSTALASI LAIN	5 TAHUN
<b>JARINGAN</b>		
	JARINGAN AIR MINUM	30 TAHUN
	JARINGAN LISTRIK	40 TAHUN
	JARINGAN TELEPON	20 TAHUN
	JARINGAN GAS	30 TAHUN
<b>BARANG BERCORAK KESENIAN</b>	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN : 1. Pahatan 2. Lukisan 3. Alat Kesenian 4. Alat Olahraga 5. Tanda Penghargaan 6. Market dan Photo Dokumen 7. Benda-benda Bersejarah 8. Barang Kerajinan	4 TAHUN

Sumber : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 59/KMK.6/2013

**12. Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus.**

13. Aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
- (b) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);

- (c) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
- (d) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai asset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).

**14. Selain tanah, buku, hewan, tanaman dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.**

15. Besarnya penyusutan setiap tahun dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana dalam akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

**16. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mulai melakukan penyusutan atas aset tetap pada saat penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2015, Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan asset tetap Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggunakan pendekatan Tahunan dan Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh dari tahun perolehan, meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau dua hari bahkan atau satu hari.**

**17. Beban penyusutan terhadap Aktiva Tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut :**

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku} + \text{Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa manfaat}}$$

**18. Beban penyusutan terhadap Aktiva Tetap yang terjadi rehabilitasi atau renovasi atau overhaul dan atau terjadi kapitalisasi yang mengakibatkan penambahan nilai aktiva tetap dan menambah sisa masa manfaat aktiva tetap tersebut maka nilai penyusutan sebagai berikut :**

$$\text{Penyusutan yang baru} = \frac{\text{Nilai Buku} + \text{Nilai Rehab/Renov/Kapitalisasi}}{\text{Sisa Masa manfaat} + \text{penambahan masa manfaat}}$$

## **PENGUNGKAPAN**

**19. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai penyusutan pada akhir periode akuntansi:**

**(a) nilai penyusutan;**

**(b) metode penyusutan yang digunakan;**

**(c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan**

**(d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.**



**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.***

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

17 Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Dalam Kebijakan Akuntansi ini, yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ruang Lingkup**

***2. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan disajikan secara terkonsolidasi menurut Kebijakan Akuntansi ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.***

***3. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan badan layanan umum daerah.***

4. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

- (c) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
- (d) Akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi;
- (e) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan (joint venture); dan
- (f) Laporan statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

**Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

**Entitas akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

**Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

**Konsolidasi** adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi yang berada di bawahnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

**Laporan keuangan konsolidasian** adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

## PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

6. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada paragraf 6, disajikan oleh entitas pelaporan kecuali :

5. Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
6. Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh Pemerintah Pusat.

**8. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.**

9. Perusahaan negara/daerah pada dasarnya adalah suatu entitas akuntansi, namun akuntansi dan penyajian laporannya tidak menggunakan standar akuntansi pemerintahan.

10. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada DPRD.

**11. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

12. Contoh akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

#### **ENTITAS PELAPORAN**

13. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- (c) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- (d) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- (e) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- (f) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

#### **ENTITAS AKUNTANSI**

**14. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.**

15. Setiap unit Pemerintahan Daerah yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

16. Dengan penetapan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku suatu entitas akuntansi tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh

signifikan dalam pencapaian program Pemerintah Daerah dapat ditetapkan sebagai entitas pelaporan.

#### **BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

**17.** Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. Termasuk dalam BLUD antara lain adalah rumah sakit, universitas negeri, dan otorita.

**18. Selaku penerima anggaran belanja pemerintah daerah (APBD) BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.**

**19. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan.**

**20.** Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

**21.** Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada kementerian negara/lembaga teknis pemerintah pusat/daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya.
- b. Neraca BLUD digabungkan kepada neraca pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya.

#### **PROSEDUR KONSOLIDASI**

**22. Konsolidasi yang dimaksud oleh Kebijakan Akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik.**

**23.** Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

#### **PENGUNGKAPAN**

**24. Dalam catatan atas laporan keuangan perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi.**

**25.** Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik sebagaimana disebut pada paragraf 10, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI**  
**KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN**  
**ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

18 Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan dan pelaporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

**Ruang Lingkup**

*2. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Kebijakan Akuntansi ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.*

*5. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah Pemerintah Daerah.*

**DEFINISI**

*6. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:*

*Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.*

***Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.***

***Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.***

***Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.***

***Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.***

#### **KOREKSI KESALAHAN**

5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian.

5. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

7. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- (a) Kesalahan yang tidak berulang;
- (b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

8. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- (a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- (b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

9. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dan wajib pajak.

***10. Setiap kesalahan harus koreksi segera setelah diketahui.***

***11. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak,***

*dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.*

**12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.**

**13. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.**

**14. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.**

15. Contoh koreksi kesalahan belanja:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.
- (b) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, koreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- (c) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- (d) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

**16. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun**



**aset yang bersangkutan.**

17. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- (a) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- (b) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

**18. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedulan pada akun ekuitas.**

19. Koreksi kesalahan belanja dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dana lancar dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas dana diinvestasikan. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas dana diinvestasikan.

20. Koreksi kesalahan pendapatan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 15 dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas dana lancar. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian,

koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas dana lancar.

18. Contoh koreksi kesalahan beban:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

**20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.**

21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi dengan:
  - (1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
  - (2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.

**22. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.**

23. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh :
  - (1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas.
  - (2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah ekuitas.

**24. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan**

***yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.***

25. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- (a) Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A, dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- (b) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

26. Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

***27. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan***

28. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- (a) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- (b) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

29. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

30. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,14,16,dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

31. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa

hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

32. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 13,18,dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

**33. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.**

34. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada paragraf 32 adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

**35. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.**

**36. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.**

**37. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

38. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa uar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

39. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dan waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

40. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

41. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

42. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- (b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

43. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

**42. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

## **PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI**

43. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

**44. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.**

**45. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.**

## **OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

46. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

**47. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan bebantahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

**48. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.**

**49. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.**

50. Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- (a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- (b) Fungsi tersebut tetap ada.
- (c) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- (d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

19 Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk bantuan belanja sosial dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

**Ruang Lingkup**

**2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk unit Pemerintahan Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya.**

3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi belanja bantuan sosial pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:

- (a) Definisi,
- (b) Pengakuan,
- (c) Penyajian, dan
- (d) Pengungkapan.

**DEFINISI**

**4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:**

**Bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.**

**Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.**

**Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan adalah bantuan yang diberikan**



*secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.*

**Belanja bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat** diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, belanja bantuan sosial dihentikan pada saat pihak yang dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut.

**Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

**Pemberi bantuan sosial** adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar serta penanggulangan bencana.

**Penerima belanja bantuan sosial** adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

**Risiko sosial** adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

## **UMUM**

5. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

6. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

**7. Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:**

**(a) selektif;**

**(b) memenuhi persyaratan penerima bantuan;**

**(c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;**

**(d) sesuai tujuan penggunaan.**

**8. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.**

9. Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

10. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

11. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan

12. Transfer uang/barang/jasa dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat memiliki ketentuan berikut ini:

(a) Belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

(b) Belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.

(c) Belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

(d) Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.

(e) Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan.

13. Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran belanja bantuan sosial memiliki kriteria berikut ini:

(1) Tujuan penggunaan;

(2) Pemberi Bantuan;

- (3) Persyaratan Penerima Bantuan;
- (4) Bersifat Sementara atau Berkelanjutan.

14. Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk:

- (a) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (b) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (c) Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (d) Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (e) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (f) Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

15. Pemberian belanja bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan.

***16. Belanja bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan di lingkungan instansi pemerintah walaupun terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk menangani risiko sosial. Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sehingga didanai dengan menggunakan belanja pegawai, barang atau modal.***

17. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD. Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial meliputi:

- (a) individu dan/atau keluarga;
- (b) masyarakat; dan
- (c) lembaga non pemerintahan.

18. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

19. Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuan sosial. Pihak ketiga ini dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perlindungan terjadinya risiko sosial. Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa tidak boleh diberikan kepada instansi pemerintah lain atau pegawai pemerintah walaupun terkait dengan aktivitas penanganan risiko sosial.

#### **PENYUSUNAN ANGGARAN**

20. Penganggaran belanja bantuan sosial hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah memenuhi seluruh kriteria belanja bantuan sosial baik dari sisi pengertian, tujuan, persyaratan penerima, pemberi dan sifat. Belanja bantuan sosial ini dapat berupa pemberian uang, barang, maupun jasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

- (g) Pemberian uang kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Uang ini diberikan tanpa ada maksud untuk ditarik kembali dengan mekanisme dana bergulir, bukan berupa Penguatan Modal Masyarakat PNPM Mandiri, dan bukan pemberian kepada partai politik.
- (h) Pemberian barang baik berupa barang habis pakai maupun berbentuk aset tetap, dari hasil membeli atau memproduksi sendiri, yang diberikan kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Barang yang diberikan bukan untuk dipakai sendiri atau diberikan kepada instansi vertikal pemerintah yang bersangkutan, sehingga tidak menambah jumlah aset yang dimiliki oleh satuan kerja terkait atau instansi vertikal di bawahnya.
- (i) Pemberian berupa jasa, satuan kerja memberikan pelatihan atau mengirimkan orang untuk melakukan pelatihan kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria.

***21. Penganggaran belanja bantuan sosial meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan terkait dengan penyelenggaraan bantuan sosial tersebut.***

#### **PELAKSANAAN ANGGARAN**

22. Penerima belanja bantuan sosial dapat meliputi anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan namun harus dipilih

secara selektif yaitu yang perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

23. Contoh individu, kelompok, masyarakat yang berhak menerima belanja bantuan sosial adalah mereka yang memiliki risiko sosial dan tidak mampu mengurangi risiko sosial secara mandiri tanpa bantuan pemerintah, antara lain:

- (a) masyarakat tertinggal dan terlantar;
- (b) orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan;
- (c) anak-anak yatim;
- (d) keluarga atau masyarakat miskin;
- (e) keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun ahli warisnya yang tidak mampu;
- (f) orang lanjut usia;
- (g) orang sakit dan cacat;
- (h) pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
- (i) tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
- (j) korban bencana;
- (k) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

24. Belanja bantuan sosial dapat juga diberikan kepada lembaga pendidikan, keagamaan atau lembaga sosial lain yang menangani individu/kelompok masyarakat yang memiliki risiko sosial. Belanja bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah, kegiatan penyuluhan, pendampingan dan advokasi untuk individu atau masyarakat yang memiliki risiko sosial.

25. Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang mempunyai keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan pemberian bantuan sosial ini dapat menganggarkan belanja bantuan sosial.

26. Jenis kegiatan yang didanai dengan belanja bantuan sosial harus sesuai dengan kriteria belanja bantuan sosial. Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan berikut ini:

- (a) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk antara lain:
  - 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - 2. perawatan dan pengasuhan;
  - 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - 4. bimbingan mental spiritual;

5. bimbingan fisik;
  6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  7. pelayanan aksesibilitas;
  8. bantuan dan asistensi sosial;
  9. bimbingan resosialisasi;
  10. bimbingan lanjut; dan/atau
  11. rujukan.
- (b) Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.
- (c) Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:
1. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
    - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
    - b. pelatihan keterampilan;
    - c. pendampingan;
    - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
    - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
    - f. supervisi dan advokasi sosial;
    - g. penguatan keserasian sosial;
    - h. penataan lingkungan; dan/atau
    - i. bimbingan lanjut.
  2. penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk:
    - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
    - b. penguatan kelembagaan masyarakat;
    - c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
    - d. pemberian stimulant.
  3. penggalian nilai-nilai dasar
  4. pemberian akses; dan/atau
  5. pemberian bantuan usaha.
- (d) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan Sosial diberikan melalui antara lain:
1. bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan langsung;
  - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
  - c. penguatan kelembagaan.
2. advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
  3. bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (e) Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. penyuluhan dan bimbingan sosial;
  2. pelayanan sosial;
  3. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  4. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
  5. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
  6. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
  7. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- (f) Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
1. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  2. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial dan penampungan serta tempat hunian;
  3. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
  4. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
  5. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  6. santunan duka cita;
  7. santunan kecacatan.

## **PENGAKUAN**

***27. Bantuan sosial sebagai kelompok belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran belanja bantuan sosial tersebut dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.***

## **PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN**

28. Belanja bantuan sosial disajikan pada LRA sebesar nilai belanja bantuan sosial yang direalisasikan. Persediaan yang berasal dari belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yaitu persediaan disajikan sebesar:

- (a) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- (c) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

29. Penyajian dan pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- (a) Disajikan sebagai pengeluaran belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan sebagai beban bantuan sosial pada Laporan Operasional;
- (b) Disajikan sebagai persediaan di Neraca atas asset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan;
- (c) Disajikan sebagai utang di Neraca atas komitmen belanja bantuan sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan. Disajikan sebagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima;
- (d) Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

30. Belanja Bantuan Sosial merupakan bagian dari belanja operasi. Bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang disajikan pada LRA sebesar nilai bantuan sosial yang direalisasikan dengan memperhitungkan seluruh belanja yang terkait dengan aktivitas pemberian belanja bantuan sosial tersebut. Sebagai contoh belanja bantuan sosial terkait dengan pengadaan barang untuk diserahkan kepada penerima bantuan sosial, meliputi biaya pembelian, pengiriman dan pengadaan barang sampai dengan barang tersebut sampai ke tangan penerima bantuan sosial. Belanja lain yang terkait dengan bantuan sosial yang dianggarkan pada belanja selain bantuan sosial tidak boleh diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.

31. Bantuan sosial berbentuk barang yang belum diserahkan kepada pihak penerima harus disajikan sebagai persediaan di neraca. Utang belanja bantuan sosial disajikan dalam kelompok kewajiban atas jumlah belanja bantuan sosial yang belum dibayarkan/diserahkan padahal seharusnya sudah dibayarkan diserahkan. Piutang belanja bantuan sosial disajikan atas kelebihan pemberian bantuan sosial yang akan dikembalikan oleh penerima bantuan sosial.

32. *Informasi tambahan tentang belanja dan aset bantuansosial yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya:*

- a.** *Rincian bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial.*
- b.** *Rincian bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama.*



- c.** *Persediaan untuk bantuan sosial yang akan diberikan.*
- d.** *Rincian pengeluaran dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.*
- e.** *Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk full disclosure.*

**KEBIJAKAN AKUNTANSI  
AKUNTANSI HIBAH**

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

**PENDAHULUAN**

**Tujuan**

20 Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk memberikan panduan pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah baik pendapatan maupun belanja hibah. Kebijakan Akuntansi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penerimaan hibah dan penggunaan dana hibah, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah khususnya dalam aspek hibah.

**DEFINISI**

*4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan pengertian:*

***Hibah** merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah, perusahaan negara/daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat, serta tidak secara terus menerus.*

***Pendapatan Hibah** adalah penerimaan daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.*

***Belanja Hibah** adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam*

*peraturan perundang-undangan.*

***Pemberi hibah adalah negara asing atau badan/lembaga asing dan/atau badan/lembaga internasional, atau suatu pemerintah daerah, badan/lembaga dalam negeri, dan perseorangan baik dalam dan luar negeri yang memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah.***

***Penerima hibah yaitu diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.***

## **UMUM**

***16. Kriteria Pendapatan Hibah yaitu sebagai berikut:***

- (b) Berasal dari Pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, dan pemerintah lain atau berasal dari badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan;***
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah;***
- (d) Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah;***
- (e) Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah.***

17. Berdasarkan mekanisme penganggaran, pendapatan hibah diklasifikasikan menjadi:

- (a) Hibah Yang Direncanakan, dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD),
- (b) Hibah Langsung, diterima langsung oleh KL/SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD). Hibah ini tidak masuk dalam perencanaan karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya. Namun demikian, hibah langsung yang diterima dalam periode tahun berjalan dan dapat dimasukkan dalam dokumen perubahan anggaran pada saat penyusunan perubahan anggaran, maka hibah langsung dimaksud dapat beralih menjadi hibah yang direncanakan.

18. Berdasarkan bentuknya, pendapatan hibah diklasifikasikan menjadi:

- (a) Dalam bentuk uang berupa rupiah, valuta asing atau devisa yang dirupiahkan,
- (b) Dalam bentuk surat berharga,
- (c) Dalam bentuk barang, dan
- (d) Dalam bentuk jasa termasuk asistensi, tenaga ahli, beasiswa dan pelatihan.

19. Berdasarkan sumbernya, pendapatan hibah diklasifikasikan menjadi:

- (a) Pendapatan hibah dalam negeri yang berasal dari: Pemerintah Pusat dan Institusi/Lembaga di dalam negeri termasuk masyarakat dan kelompok masyarakat
- (b) Pendapatan Hibah Luar Negeri yang berasal dari: negara asing, Lembaga donor multilateral, lembaga keuangan asing, dan lembaga non keuangan asing.

#### 20. Hibah Langsung berbentuk uang

Mekanisme pendapatan hibah langsung bentuk uang secara garis besar mengikuti, tahapan-tahapan pengajuan nomor register, pengajuan ijin pembukaan rekening pengajuan Revisi DPA, serta pengesahan realisasi pendapatan hibah. Tahapan- tahapan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Hibah langsung diterima oleh Satuan Kerja OPD;
- b. SKPD dapat langsung menggunakan uang hibah yang diterima tersebut sesuai dengan tujuan pemberian hibah;
- c. Dilakukan pengajuan pengesahan atas pendapatan hibah langsung tersebut oleh PPKD atau Kuasa BUD;
- d. Satker SKPD wajib menyajikan sisa dana atas pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang pada neraca;
- e. Apabila pada akhir tahun masih sisa pendapatan hibah berbentuk uang/kas, maka dapat;
  - 1. disetor ke Kas Daerah;
  - 2. digunakan untuk kegiatan di tahun anggaran berikutnya sepanjang sesuai dengan perjanjian hibahnya;
  - 3. dikembalikan kepada donor dalam hal naskah perjanjian hibah menyatakan demikian.

#### **21. Kriteria Belanja Hibah yaitu sebagai berikut:**

- (a) Hibah dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan;**
- (b) Tidak bersifat wajib atau tidak mengikat bagi pemberi hibah;**
- (c) Dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah**
- (d) Tidak ada timbal balik/balasan secara langsung yang harus dilakukan oleh penerima hibah**
- (e) Digunakan sesuai dengan naskah perjanjian**
- (f) Bersifat satu kali dan/atau dapat ditetapkan kembali**
- (g) Dianggarkan pada BUD**

22. Berdasarkan sisi bentuknya, belanja hibah terdiri dari Hibah dalam bentuk devisa (luar negeri) dan dalam bentuk rupiah

23. Menurut pihak yang menerima hibah, belanja hibah diklasifikasikan menjadi:

- (a) Belanja Hibah kepada pemerintah negara lain atau pemerintah lainnya
- (b) Belanja Hibah kepada perusahaan negara/daerah
- (c) Belanja Hibah kepada organisasi internasional
- (d) Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

24. Seluruh Belanja Hibah bersifat terencana. Belanja hibah yang direncanakan melalui proses perencanaan dan penganggaran serta tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara-APBD. Belanja Hibah diberikan oleh unit yang menurut peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan.

## **PENGAKUAN**

### **2. PENGAKUAN PENDAPATAN HIBAH**

**25. *Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.***

**26. *Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul***

**27. *Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional.***

28. Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan

**29. *Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:***

**(a) *Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik,***

**(b) *Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih, dan***

**(c) *Jumlahnya dapat diestimasi secara andal***

30. Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah untuk menagihnya.

31. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan

tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.

(b) Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka

1. Terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani
2. Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

32. Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional

33. Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan statutory report.

34. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima Satker K/L atau SKPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-Lo diakui pada saat diterima oleh Satker/SKPD penerima.

**35. Jurnal standar untuk pengakuan pendapatan hibah basis akrual adalah:**

<b>DR</b>	<b>Kas di BUD</b>	<b>XXX.XXX</b>	
<b>DR</b>	<b>Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya - Jenis Aset</b>	<b>XXX.XXX</b>	
<b>CR</b>	<b>Pendapatan Hibah / Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)-LO</b>		<b>XXX.XXX</b>

**(a) Pencatatan di LRA**

<b>DR</b>	<b>Akun Perantara</b>	<b>XXX.XXX</b>	
<b>CR</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)-LRA</b>		<b>XXX.XXX</b>

**(b) Pencatatan di Laporan Operasional**

**Pengakuan Pendapatan Hibah pada Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi.**

**Jurnal pada saat pendapatan hibah telah diterima Kasnya:**

<b>DR</b>	<b>Kas di Kas Daerah</b>	<b>XXX.XXX</b>	
<b>CR</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)-LO</b>		<b>XXX.XXX</b>

*Jurnal pada saat pendapatan hibah berupa barang telah diterima barangnya adalah sebagai berikut:*

DR	Aset Tetap – Jenis Aset	XXX.XXX	
CR	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah)-LO		XXX.XXX

### 3. PENGAKUAN BELANJA HIBAH

*36. Pengeluaran hibah selain disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja hibah, juga disajikan sebagai beban hibah di Laporan Operasional.*

*37. Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.*

*38. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:*

*(a) Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.*

*(b) Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.*

*39. Jurnal Standar untuk mencatat realisasi belanja hibah adalah:*

DR	Belanja Hibah	XXX.XXX	
CR	Rekening Antara		XXX.XXX

DR	Beban Hibah	XXX.XXX	
CR	Kas di Kas Umum Daerah		XXX.XXX

### PENGUKURAN

*40. Pendapatan Hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.*

*41. Hibah yang diterima dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

*42. Hibah yang diterima dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah dan dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

*43. Belanja hibah dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan atau menjadi kewajiban hibah.*

#### **PENYAJIAN**

*44. Realisasi pendapatan hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi pendapatan dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.*

*45. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan (BUD) menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Hibah dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pada akuntansi berbasis akrual, pendapatan hibah juga disajikan pada Laporan Operasional yang dikelompokkan ke dalam Pendapatan Operasional. Jika ada beban/biaya yang harus dikeluarkan terkait dengan pendapatan hibah yang diterima maka disajikan dalam kelompok beban operasional.*

*46. Realisasi belanja dan beban hibah disajikan dalam mata uang rupiah. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja hibah menurut jenis belanja, organisasi dan. menurut fungsi dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja. Pada penerapan akuntansi berbasis akrual beban hibah juga disajikan pada Laporan Operasional pada Pos Operasional.*

#### **PENGUNGKAPAN**

*47. Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional, transaksi hibah juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan belanja hibah yang diterima/dikeluarkan. Jenis informasi atas transaksi hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:*

*(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi hibah;*



- (b) Penjelasan pencapaian transaksi hibah terhadap target yang ditetapkan dalam undang-undang APBN, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target selama tahun pelaporan;**
- (c) Informasi rinci tentang sumber-sumber atau jenis-jenis hibah;**
- (d) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan;**
- (e) Jenis hibah, apakah berupa uang, barang, jasa, ataupun surat berharga**

**48. Jenis informasi atas transaksi belanja hibah yang dapat dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain:**

- (a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran atas transaksi belanja hibah;**
- (b) Informasi rinci tentang jenis-jenis belanja hibah dan penerima hibah;**
- (c) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.**

## KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUNTANSI TRANSFER

*Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.*

### PENDAHULUAN

#### Tujuan

21 Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk memberikan panduan tentang cara mengakui, mengukur, dan menyajikan transfer, baik transfer masuk maupun keluar, bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan, maupun institusi yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah.

#### Ruang Lingkup

22 *Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan dalam akuntansi diterapkan dalam akuntansi untuk seluruh transaksi yang berkaitan dengan transfer, yaitu:*

- (a) Beban transfer;*
- (b) Pendapatan Transfer-LO;*
- (c) Utang Transfer;*
- (d) Piutang Transfer; dan*
- (e) Pendapatan Transfer LRA dan Belanja Transfer.*

### DEFINISI

23 *Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:*

*Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan.*

*Dana Bagi Hasil merupakan jenis transfer yang menurut ketentuan perundang-undangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan pemerintah pusat yang sebagian dibagikan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.*

*Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dari pemerintah pusat yang*

*dialokasikan kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi*

*Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional*

*Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.*

*Pendapatan Operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.*

*Utang transfer adalah utang yang timbul pada entitas pemerintah pemberi transfer, apabila terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan ketentuan.*

*Piutang transfer adalah utang yang timbul karena lebih salur kepada entitas penerima transfer sedangkan bagi entitas penerima, piutang transfer timbul apabila terdapat entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan*

*Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus oleh pemerintah pusat serta dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang tidak akan diterima kembali*

*Pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus yang diperoleh dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.*

#### **KLASIFIKASI TRANSFER**

24 Dana Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dana Perimbangan, terdiri atas:
  - (a) Dana Bagi Hasil (DBH)
  - (b) Dana Alokasi Umum (DAU)

- (c) Dana Alokasi Khusus (DAK)
- 2. Transfer Lainnya, terdiri atas:
  - (a) Dana Otonomi Khusus (Otsus)
  - (b) Dana Keistimewaan
  - (c) Dana Transfer Bidang Pendidikan
  - (d) Dana Transfer Lainnya Terkait Program Tertentu Pemerintah
  - (e) Dana Desa
- 3. Dana Transfer Daerah:
  - (a) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi
  - (b) Dana Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota
  - (c) Bantuan Keuangan

## **PENGAKUAN**

### **1. BEBAN TRANSFER**

**25 Dengan mempertimbangkan jenis, pola alokasi, dan pola penyaluran sebagaimana diuraikan sebelumnya, Beban Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat (1) terjadi pengeluaran kas dari rekening kas negara/daerah, dan (2) terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan.**

26 Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan pada tahun yang berjalan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban bagi entitas penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah kewajiban dimaksud diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa entitas penyalur merealisasikan pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur dimaksud diakui sebagai piutang transfer.

**27 Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasar tanggal diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berjalan atau laporan keuangan belum terbit, jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau pengurang beban transfer tahun berjalan.**

**28 Selanjutnya apabila kurang atau lebih salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka kurang atau lebih salur tersebut menambah atau mengurangi beban transfer sejenis pada periode diketahuinya informasi dimaksud**

### **2. PENDAPATAN TRANSFER**

**29 Terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Dapat**

***terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.***

30 Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan entitas penerima diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui informasi kurang bayar tersebut sebagai dasar pengakuan pendapatan operasional pada tahun diketahuinya informasi tersebut.

31 Bila ada jenis transfer yang karena kebijakan pemerintah pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata lain, entitas penerima transfer dari pemerintah pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang.

32 Penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui oleh pemerintah kabupaten/kota karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah kabupaten/kota.

### **3. UTANG DAN PIUTANG TRANSFER**

33 Piutang transfer yang timbul dari jumlah hak yang belum diterima dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas pemberi. Pernyataan dimaksud dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum, bentuk dokumen yang cukup sah untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudited. Surat pemberitahuan dikirim setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.

34 Jika dari laporan keuangan entitas pemberi transfer terdapat nilai utang transfer yang diestimasi, maka nilai dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pencatatan piutang transfer bagi entitas penerima transfer.

35 Perubahan jumlah atau “penghapus-bukuan” utang-piutang transfer hanya dimungkinkan karena adanya kekeliruan/kesalahan dalam proses penghitungan/pencatatan. Utang atau piutang transfer dimaksud sebenarnya tidak terjadi, atau secara materiil tidak pernah ada. Jika terjadi demikian, perlakuan akuntansi adalah koreksi dan harus dijelaskan dalam laporan keuangan serta pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan koreksi yang dilakukan. Koreksi atas utang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi atas piutang. Begitupun sebaliknya, koreksi atas piutang oleh entitas pemberi diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan koreksi utang oleh entitas penerima.

#### **4. BELANJA DAN PENDAPATAN TRANSFER**

36 ***Belanja dan Pendapatan LRA diakui berdasarkan mutasi kas pada entitas pelaporan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.***

37 Pendapatan LRA transfer dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

38 Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan Transfer LRA, berdasarkan periodenya dapat dibagi menjadi:

- (a) Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- (b) Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

39 ***Pendapatan basis kas diakui pada saat :***

- 1) ***Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.***
- 2) ***Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.***
- 3) ***Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.***

- 4) *Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.*
- 5) *Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.*

40 Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja juga didasarkan pada pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari entitas secara umum terpusat pada BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai belanja harus mendapat pengakuan dari BUN, atau entitas yang diberi kewenangan untuk hal dimaksud.

## **PENGUKURAN**

### **1. BEBAN TRANSFER**

41 *Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima. Selain itu kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundangan.*

### **2. PENDAPATAN TRANSFER**

42 *Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD. Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.*

43 Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur. Kelebihan salur dapat terjadi terutama disebabkan oleh entitas penyalur

### **3. BELANJA DAN PENDAPATAN TRANSFER**

44 Belanja transfer atau transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai uang yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dapat terjadi akibat lebih salur pada tahun sebelumnya, dilakukan pemotongan atas penyaluran tahun berikutnya. Dalam hal terjadi demikian, belanja transfer dicatat sebesar pengeluaran kas bruto sebelum pemotongan.

45 ***Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan.*** Hal ini lazim terjadi pada pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian, pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang SiLPA.

Pendapatan transfer LRA dinilai sebesar kas bruto yang diterima, termasuk penerimaan akibat kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Dapat terjadi kas yang diterima selain hak entitas pada tahun anggaran berjalan, dapat pula termasuk hak entitas tahun-tahun sebelumnya yang belum disalurkan

## **PENYAJIAN**

### **1. PENDAPATAN TRANSFER**

46 Transfer masuk yang diterima oleh Pemda pada umumnya dicatat dan disajikan sebagai pendapatan. Namun, atas kelebihan penyaluran transfer sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan dikategorikan sebagai utang. Penjelasan yang memadai atas pendapatan transfer diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pada saat menerima dana transfer, entitas mencatat sebagai berikut :

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Kas Pendapatan Transfer LO <i>(Untuk mencatat penerimaan transfer)</i>	XXX	XXX

47 Pada akhir periode atau pada saat diketahui adanya kurang bayar/salur yang belum diterima maka kurang bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan dan dicatat sebagai piutang. Apabila informasi kurang bayar/salur tersebut diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka entitas penerima mengakui kurang bayar/salur transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan.

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Piutang transfer Pendapatan Transfer LO <i>(Untuk mencatat kurang bayar/ salur yang belum dilakukan penyaluran)</i>	XXX	XXX



48 Selanjutnya pada saat diterima pembayaran atas piutang transfer, dijurnal sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas Piutang Transfer <i>(Untuk mencatat pembayaran atas kurang bayar/salur)</i>	XXX	XXX

49 Jika piutang transfer dimaksud hingga akhir periode belum dibayar maka diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan per jenis piutang transfer.

50 Pada saat diketahui terdapat kelebihan penerimaan dana transfer, dicatat sebagai pengurang pendapatan transfer:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Pendapatan Transfer LO Utang Kelebihan Transfer <i>(Untuk mencatat kelebihan penerimaan dana transfer)</i>	XXX	XXX

51 Pada Dana Desa, pemerintah kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan, tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa, bukan pemerintah kota.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas Utang Dana Desa <i>(Mencatat penerimaan Dana Desa di RKUD)</i>	XXX	XXX
	Utang Dana Desa Kas <i>(Mencatat penyaluran Dana Desa)</i>	XXX	XXX

## 2. KOREKSI UTANG-PIUTANG TRASNFER

52 Koreksi atas utang-piutang transfer dapat terjadi karena kekeliruan dalam perhitungan atau penentuan daerah lebih/kurang salur. Dalam hal terjadi demikian tetapi tidak terdapat perubahan jumlah, maka penyesuaian dilakukan pada daftar utang/piutang daerah yang mengalami lebih salur. Tetapi jika hal itu berdampak pada nilai total, maka dilakukan penyesuaian pada akun Ekuitas. Koreksi atas utang oleh entitas pemberi dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Utang Transfer Ekuitas <i>(Untuk mencatat Koreksi atas utang)</i>	xxx	xxx

	<i>Transfer oleh entitas pemberi)</i>		
	Ekuitas Piutang Transfer <i>(Untuk mencatat Koreksi atas piutang Transfer oleh entitas penerima)</i>	xxx	xxx

53 Atas koreksi tersebut, entitas penerima yang sebelumnya mencatat sebagai piutang dikoreksi sebagai berikut:

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Ekuitas Piutang Transfer <i>(Untuk mencatat Koreksi atas utang transfer oleh entitas penerima)</i>	xxx	xxx

54 Selanjutnya koreksi atas piutang oleh entitas pemberi dicatat sebagai berikut:

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Ekuitas Piutang Transfer <i>(Untuk mencatat Koreksi atas piutang transfer oleh entitas penyalur)</i>	xxx	xxx

55 Oleh entitas penerima, koreksi atas kejadian tersebut dicatat sebagai berikut:

<b>Tanggal</b>	<b>Uraian</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
	Utang Ekuitas <i>(Untuk mencatat Koreksi atas piutang transfer oleh entitas penerima)</i>	xxx	xxx

### **3. BELANJA DAN PENDAPATAN TRANSFER**

56 Belanja transfer atau transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai uang yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dapat terjadi akibat lebih salur pada tahun sebelumnya, dilakukan pemotongan atas penyaluran tahun berikutnya. Dalam hal terjadi demikian, belanja transfer dicatat sebesar pengeluaran kas bruto sebelum pemotongan.

**57 Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima. Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak yang menyalurkan.**

58 Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, dalam hal laporan keuangan sudah diterbitkan, dilakukan

dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. SAL yang selama ini dikenal pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah dikenal dengan SiLPA.

59 Pendapatan transfer LRA dinilai sebesar kas bruto yang diterima, termasuk penerimaan akibat kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Dapat terjadi kas yang diterima selain hak entitas pada tahun anggaran berjalan, dapat pula termasuk hak entitas tahun-tahun sebelumnya yang belum disalurkan.

***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.***

## **PENDAHULUAN**

### **DEFINISI**

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### **TUJUAN**

3. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLUD. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual.

### **RUANG LINGKUP**

4. ***Secara umum, Standar Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah mengacu pada kebijakan akuntansi ini.***

5. ***BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah daerah, BLUD menerapkan kebijakan akuntansi ini dalam menyusun laporan keuangan.***

## **ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN**

6. *BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut :*

- a. pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBN/APBD;*
- b. entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;*
- c. pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;*
- d. entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;*
- e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;*
- f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;*
- g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;*
- h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan*
- i. laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal pemerintah.*

7. *Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN/APBD) yang menyelenggarakan akuntansi, BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.*

## **DEFINISI**

8. *Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.*

9. *Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.*

## **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

10. Laporan keuangan BLUD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLUD. Tujuan umum laporan keuangan BLUD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLUD; dan
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLUD dalam mendanai aktivitasnya.

## **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

11. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

## **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

12. *Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas :*

- a. Laporan Realisasi Anggaran;*
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;*
- c. Neraca;*
- d. Laporan Operasional;*
- e. Laporan Arus Kas;*
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan*
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.*

13. Laporan keuangan BLUD memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban BLUD pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan ekonomi BLUD dalam menyelenggarakan kegiatannya di masa mendatang.

## **STRUKTUR DAN ISI**

### **PENDAHULUAN**

14. Pernyataan Standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### **PERIODE PELAPORAN**

15. Laporan keuangan BLUD disajikan paling kurang sekali dalam setahun.

### **TEPAT WAKTU**

16. Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu BLUD bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

17. ***Laporan Realisasi Anggaran BLUD menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.***

18. ***Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut:***

***a. Pendapatan-LRA;***

***b. Belanja;***

***c. Surplus/defisit-LRA;***

***d. Penerimaan pembiayaan;***

***e. Pengeluaran pembiayaan;***

***f. Pembiayaan neto; dan***

***g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA).***

19. ***Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.***

20. Satuan kerja pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan

keuangan BLUD diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Salah satu bentuk fleksibilitas dalam pengelolaan pendapatan adalah bahwa pendapatan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanjanya. Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja tersebut berarti bahwa pendapatan BLUD tidak disetorkan terlebih dahulu ke Kas Daerah. Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.

**21. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.**

22. Pemerintah dapat membuat mekanisme pengakuan pendapatan-LRA BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkup pemerintah tersebut. Misalnya, pemerintah membuat mekanisme pengesahan pendapatan-LRA BLUD yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).

23. Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.

**24. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

**25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.**

**26. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.**

**27. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah daerah.**

**28. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah daerah.**

**29. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.**

**30. Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.**

**31. Termasuk pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:**  
**a. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;**



- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;**
- c. Pendapatan hasil kerja sama;**
- d. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan**
- e. Pendapatan BLUD lainnya.**

32. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

33. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.

34. Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.

35. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.

36. Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29 huruf e, antara lain berupa:

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.

37. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa tidak dilaporkan pada LRA karena pengakuan pendapatan berbasis kas. Pendapatan Hibah berupa barang/jasa dilaporkan pada Laporan Operasional yang berbasis akrual.

**38. Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.**

39. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

40. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

**41. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.**

42. Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan

transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka panjang. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan. Sementara, pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang.

43. ***Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.***

44. ***Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.***

45. ***Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.***

46. ***Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.***

47. ***Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA.***

48. ***Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.***

49. Alokasi anggaran yang diterima oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 47 adalah alokasi anggaran yang tidak terkait dengan imbalan jasa layanan yang diberikan oleh BLUD kepada entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut, misalnya alokasi anggaran untuk Dana Bergulir yang diberikan oleh BUD kepada BLUD yang berada di bawah pemerintah daerah/SKPD.

50. Contoh format LRA BLUD disajikan pada ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

## **LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

51. ***Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.***

52. ***Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :***

***a. Saldo Anggaran Lebih awal;***

- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;**
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;**
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;**
- e. Lain-lain; dan**
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.**

53. **Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.**

54. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD disajikan pada ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

## **NERACA**

55. **Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.**

56. Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- a. Kas dan setara kas;**
- b. Investasi jangka pendek;**
- c. piutang dari kegiatan BLUD;**
- d. persediaan;**
- e. Investasi jangka panjang;**
- f. aset tetap;**
- g. aset lainnya;**
- h. kewajiban jangka pendek;**
- i. kewajiban jangka panjang; dan**
- j. ekuitas.**

57. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

58. **Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.**

59. Dalam rangka perhitungan saldo kas dengan catatan SAL pada BLUD, BLUD harus dapat mengidentifikasi kas pada BLUD yang berasal dari pendapatan yang telah diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

60. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBD.

61. ***Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas.***

62. Dana kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 60 antara lain:

- a. Dana titipan pihak ketiga;
- b. Uang jaminan; dan
- c. Uang muka pasien rumah sakit.

63. ***Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBD diakui sebagai aset lainnya.***

64. ***Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.***

65. Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Bupati. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi non permanen.

66. Investasi permanen pada BLUD, antara lain berbentuk penyertaan modal.

67. Investasi non permanent pada BLUD, antara lain sebagai berikut :

- a. Investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain;
- b. Investasi dalam bentuk dana bergulir; dan
- c. Investasi nonpermanen lainnya.

68. ***Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.***

69. BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat oleh BLUD pada laporan keuangan BUD.

70. Contoh format Neraca BLUD disajikan dalam ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

## **LAPORAN OPERASIONAL**

71. ***Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.***

72. ***Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai***

**berikut :**

- a. Pendapatan-LO;**
- b. Beban;**
- c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;**
- d. Kegiatan nonoperasional;**
- e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;**
- f. Pos Luar Biasa; dan**
- g. Surplus/Defisit-LO.**

**73. BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:**

- a. Pendapatan dari alokasi APBD;**
- b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;**
- c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;**
- d. Pendapatan hasil kerja sama;**
- e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan**
- f. Pendapatan BLUD lainnya.**

**Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.**

74. BLUD menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**75. Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:**

- a. Timbulnya hak atas pendapatan;**
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.**

76. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

77. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

**78. Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.**

**79. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).**

**80. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas**

**bruto dapat dikecualikan.**

81. **Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.**

82. **Beban pada BLUD diakui pada saat :**

**a. timbulnya kewajiban;**

**b. terjadinya konsumsi aset; dan/atau**

**c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.**

83. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.

84. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional BLUD.

85. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

86. **Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.**

87. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

88. Contoh format Laporan Operasional BLUD disajikan dalam ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

## **LAPORAN ARUS KAS**

89. **Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.**

90. **Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.**

## **AKTIVITAS OPERASI**

91. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

a. Pendapatan dari alokasi APBD;

b. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;

c. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;

d. Pendapatan hasil kerja sama;

- e. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- f. Pendapatan BLUD lainnya.

92. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :

- a. Pembayaran Pegawai;
- b. Pembayaran Barang;
- c. Pembayaran Bunga; dan
- d. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa,

### **AKTIVITAS INVESTASI**

93. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

94. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

95. Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas :

- a. Penjualan Aset Tetap;
- b. Penjualan Aset Lainnya;
- c. Penerimaan dari Divestasi; dan
- d. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

96. Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 94 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 94 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.

97. Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas :

- a. Perolehan Aset Tetap;
- b. Perolehan Aset Lainnya;
- c. Penyertaan Modal;
- d. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- e. Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

98. Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 96 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 96 huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 96 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

## **AKTIVITAS PENDANAAN**

99. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

100. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

101. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain :

- a. Penerimaan pinjaman; dan
- b. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan.

102. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investas BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 100 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

103. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

104. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, sebagai berikut :

- a. Pembayaran pokok pinjaman; dan
- b. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.

105. Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 103 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dar APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat.

## **AKTIVITAS TRANSITORIS**

106. ***Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.***

107. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Pajak.

108. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.

109. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK.

110. Contoh format Laporan Arus Kas BLUD disajikan dalam ilustrasi



Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

#### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**111. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.**

**112. Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut :**

- a. Ekuitas awal;**
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;**
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan**
  - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.****
- d. Ekuitas akhir.**

113. Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

114. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD disajikan pada ilustrasi Kebijakan Akuntansi ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

#### **PENGGABUNGAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM KE DALAM LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN**

**115. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.**

**116. Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.**

117. Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan

yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.

**118. Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.**

119. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

120. Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

**121. Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.**

**122. Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan sebagaimana dinyatakan pada Paragraf 29 huruf b.**

## **PENGHENTIAN SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENJADI SATUAN KERJA BIASA**

123. Sesuai ketentuan perundangan, pemerintah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD pada satuan kerja pemerintah daerah.

**124. Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selanjutnya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.**

## **TANGGAL EFEKTIF**

**125. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan mulai Tahun Anggaran 2019.**

**BAGAN AKUN STANDAR PEMERINTAH DAERAH**

Kode Akun						Uraian Akun
0	0	00	00	00	0000	Perubahan SAL
1						ASET
1	1					ASET LANCAR
1	1	01				Kas dan Setara Kas
1	1	01	01			Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01		Kas di Kas Daerah
1	1	01	01	01	0001	Kas di Kas Daerah
1	1	01	02			Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01		Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	02	01	0001	Kas di Bendahara Penerimaan
1	1	01	03			Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01		Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	03	01	0001	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	1	01	04			Kas di BLUD
1	1	01	04	01		Kas di BLUD
1	1	01	04	01	0001	Kas di BLUD
1	1	01	05			Kas Dana BOS
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS
1	1	01	05	01	0001	Kas Dana BOS
1	1	01	06			Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01		Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	06	01	0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	01	07			Kas Lainnya
1	1	01	07	01		Kas Lainnya
1	1	01	07	01	0001	Kas Lainnya
1	1	01	08			Setara Kas
1	1	01	08	01		Setara Kas
1	1	01	08	01	0001	Setara Kas
1	1	02				Investasi Jangka Pendek
1	1	02	01			Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01		Investasi dalam Saham
1	1	02	01	01	0001	Investasi dalam Saham
1	1	02	02			Investasi dalam Deposito
1	1	02	02	01		Deposito Jangka Pendek
1	1	02	02	01	0001	Deposito Jangka Pendek
1	1	02	03			Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01		Investasi dalam SUN
1	1	02	03	01	0001	Investasi dalam SUN
1	1	02	04			Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01		Investasi dalam SBI
1	1	02	04	01	0001	Investasi dalam SBI
1	1	02	05			Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01		Investasi dalam SPN
1	1	02	05	01	0001	Investasi dalam SPN
1	1	02	06			Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01		Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	02	06	01	0001	Investasi Jangka Pendek BLUD
1	1	03				Piutang Pajak Daerah
1	1	03	01			Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	03	01	01		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	01	01	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
1	1	03	01	01	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
1	1	03	01	01	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	01	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	02		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	03	01	02	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi
1	1	03	01	02	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
1	1	03	01	02	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	02	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	03		Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	01	03	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
1	1	03	01	03	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
1	1	03	01	03	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	03	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	04		Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	03	01	04	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi
1	1	03	01	04	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum
1	1	03	01	04	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	04	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	05		Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	01	05	0001	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
1	1	03	01	05	0002	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
1	1	03	01	05	0003	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	05	0004	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	06		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	03	01	06	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pribadi
1	1	03	01	06	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Umum
1	1	03	01	06	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	06	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	07		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	03	01	07	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pribadi
1	1	03	01	07	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Umum
1	1	03	01	07	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Pusat
1	1	03	01	07	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah
1	1	03	01	08		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	03	01	08	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi

Kode Akun						Uraian Akun
1	1	03	01	08	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -Umum
1	1	03	01	08	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> - Pemerintah Pusat
1	1	03	01	08	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> - Pemerintah Daerah
1	1	03	01	09		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
1	1	03	01	09	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Pribadi
1	1	03	01	09	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Umum
1	1	03	01	09	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Pemerintah Pusat
1	1	03	01	09	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> - Pemerintah Daerah
1	1	03	01	10		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	01	10	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi
1	1	03	01	10	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum
1	1	03	01	10	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	10	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	11		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	01	11	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi
1	1	03	01	11	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum
1	1	03	01	11	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	11	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	12		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	01	12	0001	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
1	1	03	01	12	0002	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
1	1	03	01	12	0003	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	12	0004	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	13		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1	1	03	01	13	0001	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
1	1	03	01	13	0002	Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
1	1	03	01	13	0003	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	13	0004	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
1	1	03	01	14		Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	01	14	0001	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
1	1	03	01	14	0002	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
1	1	03	01	14	0003	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
1	1	03	01	14	0004	Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
1	1	03	02			Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	03	02	01		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	01	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	03	02	02		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
1	1	03	02	02	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i>
1	1	03	02	03		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	02	03	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	03	02	04		Piutang BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
1	1	03	02	04	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
1	1	03	02	05		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	05	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus
1	1	03	02	06		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
1	1	03	02	06	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
1	1	03	02	07		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
1	1	03	02	07	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
1	1	03	02	08		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
1	1	03	02	08	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
1	1	03	02	09		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
1	1	03	02	09	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
1	1	03	02	10		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	10	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	03	02	11		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	11	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	03	02	12		Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	12	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	03	02	13		Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	13	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	03	02	14		Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	02	14	0001	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
1	1	03	03			Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	03	03	01		Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	01	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	03	03	02		Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	02	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	03	03	03		Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	03	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	03	03	04		Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	03	04	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	03	04			Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01		Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	04	01	0001	Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	03	05			Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01		Piutang Pajak Rokok
1	1	03	05	01	0001	Piutang Pajak Rokok
1	1	03	06			Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01		Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	01	0001	Piutang Pajak Hotel
1	1	03	06	02		Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	02	0001	Piutang Pajak Motel
1	1	03	06	03		Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	03	0001	Piutang Pajak Losmen
1	1	03	06	04		Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	04	0001	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	03	06	05		Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	05	0001	Piutang Pajak Wisma Pariwisata
1	1	03	06	06		Piutang Pajak Pesanggrahan
1	1	03	06	06	0001	Piutang Pajak Pesanggrahan

Kode Akun						Uraian Akun
1	1	03	06	07		Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	07	0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
1	1	03	06	08		Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	06	08	0001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	03	07			Piutang Pajak Restoran
1	1	03	07	01		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
1	1	03	07	01	0001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya
1	1	03	07	02		Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	02	0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	03	07	03		Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	03	0001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	03	07	04		Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	04	0001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	03	07	05		Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	05	0001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	03	07	06		Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	06	0001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	03	07	07		Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	07	07	0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	03	08			Piutang Pajak Hiburan
1	1	03	08	01		Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	03	08	01	0001	Piutang Pajak Tontonan Film
1	1	03	08	02		Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
1	1	03	08	02	0001	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
1	1	03	08	03		Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1	1	03	08	03	0001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1	1	03	08	04		Piutang Pajak Pameran
1	1	03	08	04	0001	Piutang Pajak Pameran
1	1	03	08	05		Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
1	1	03	08	05	0001	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya
1	1	03	08	06		Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	03	08	06	0001	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	03	08	07		Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
1	1	03	08	07	0001	Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
1	1	03	08	08		Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1	1	03	08	08	0001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
1	1	03	08	09		Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )
1	1	03	08	09	0001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )
1	1	03	08	10		Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
1	1	03	08	10	0001	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
1	1	03	09			Piutang Pajak Reklame
1	1	03	09	01		Piutang Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / Videotron/Megatron
1	1	03	09	01	0001	Piutang Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/Megatron
1	1	03	09	02		Piutang Pajak Reklame Kain
1	1	03	09	02	0001	Piutang Pajak Reklame Kain
1	1	03	09	03		Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	03	09	03	0001	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	03	09	04		Piutang Pajak Reklame Selebaran
1	1	03	09	04	0001	Piutang Pajak Reklame Selebaran
1	1	03	09	05		Piutang Pajak Reklame Berjalan
1	1	03	09	05	0001	Piutang Pajak Reklame Berjalan
1	1	03	09	06		Piutang Pajak Reklame Udara
1	1	03	09	06	0001	Piutang Pajak Reklame Udara
1	1	03	09	07		Piutang Pajak Reklame Apung
1	1	03	09	07	0001	Piutang Pajak Reklame Apung
1	1	03	09	08		Piutang Pajak Reklame Suara
1	1	03	09	08	0001	Piutang Pajak Reklame Suara
1	1	03	09	09		Piutang Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
1	1	03	09	09	0001	Piutang Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
1	1	03	09	10		Piutang Pajak Reklame Peragaan
1	1	03	09	10	0001	Piutang Pajak Reklame Peragaan
1	1	03	10			Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	03	10	01		Piutang Pajak Penerangan Dihilangkan Sendiri
1	1	03	10	01	0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri
1	1	03	10	02		Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	10	02	0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	03	11			Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01		Piutang Pajak Parkir
1	1	03	11	01	0001	Piutang Pajak Parkir
1	1	03	12			Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	12	01		Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	12	01	0001	Piutang Pajak Air Tanah
1	1	03	13			Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01		Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	13	01	0001	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	03	14			Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	03	14	01		Piutang Pajak Asbes
1	1	03	14	01	0001	Piutang Pajak Asbes
1	1	03	14	02		Piutang Pajak Batu Tulis
1	1	03	14	02	0001	Piutang Pajak Batu Tulis
1	1	03	14	03		Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1	1	03	14	03	0001	Piutang Pajak Batu Setengah Permata
1	1	03	14	04		Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	04	0001	Piutang Pajak Batu Kapur
1	1	03	14	05		Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	05	0001	Piutang Pajak Batu Apung
1	1	03	14	06		Piutang Pajak Batu Permata
1	1	03	14	06	0001	Piutang Pajak Batu Permata

Kode Akun					Uraian Akun
1	1	03	14	07	Piutang Pajak Bentonit
1	1	03	14	07	0001 Piutang Pajak Bentonit
1	1	03	14	08	Piutang Pajak Dolomit
1	1	03	14	08	0001 Piutang Pajak Dolomit
1	1	03	14	09	Piutang Pajak Felspar
1	1	03	14	09	0001 Piutang Pajak Felspar
1	1	03	14	10	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	03	14	10	0001 Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
1	1	03	14	11	Piutang Pajak Grafit
1	1	03	14	11	0001 Piutang Pajak Grafit
1	1	03	14	12	Piutang Pajak Granit/Andesit
1	1	03	14	12	0001 Piutang Pajak Granit/Andesit
1	1	03	14	13	Piutang Pajak Gips
1	1	03	14	13	0001 Piutang Pajak Gips
1	1	03	14	14	Piutang Pajak Kalsit
1	1	03	14	14	0001 Piutang Pajak Kalsit
1	1	03	14	15	Piutang Pajak Kaolin
1	1	03	14	15	0001 Piutang Pajak Kaolin
1	1	03	14	16	Piutang Pajak Leusit
1	1	03	14	16	0001 Piutang Pajak Leusit
1	1	03	14	17	Piutang Pajak Magnesit
1	1	03	14	17	0001 Piutang Pajak Magnesit
1	1	03	14	18	Piutang Pajak Mika
1	1	03	14	18	0001 Piutang Pajak Mika
1	1	03	14	19	Piutang Pajak Marmer
1	1	03	14	19	0001 Piutang Pajak Marmer
1	1	03	14	20	Piutang Pajak Nitrat
1	1	03	14	20	0001 Piutang Pajak Nitrat
1	1	03	14	21	Piutang Pajak Opsidien
1	1	03	14	21	0001 Piutang Pajak Opsidien
1	1	03	14	22	Piutang Pajak Oker
1	1	03	14	22	0001 Piutang Pajak Oker
1	1	03	14	23	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	03	14	23	0001 Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	03	14	24	Piutang Pajak Pasir Kuarsa
1	1	03	14	24	0001 Piutang Pajak Pasir Kuarsa
1	1	03	14	25	Piutang Pajak Perlit
1	1	03	14	25	0001 Piutang Pajak Perlit
1	1	03	14	26	Piutang Pajak Fosfat
1	1	03	14	26	0001 Piutang Pajak Fosfat
1	1	03	14	27	Piutang Pajak Talk
1	1	03	14	27	0001 Piutang Pajak Talk
1	1	03	14	28	Piutang Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers earth</i> )
1	1	03	14	28	0001 Piutang Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers earth</i> )
1	1	03	14	29	Piutang Pajak Tanah Diatome
1	1	03	14	29	0001 Piutang Pajak Tanah Diatome
1	1	03	14	30	Piutang Pajak Tanah Liat
1	1	03	14	30	0001 Piutang Pajak Tanah Liat
1	1	03	14	31	Piutang Pajak Tawas (Alum)
1	1	03	14	31	0001 Piutang Pajak Tawas (Alum)
1	1	03	14	32	Piutang Pajak Trass
1	1	03	14	32	0001 Piutang Pajak Trass
1	1	03	14	33	Piutang Pajak Yarusif
1	1	03	14	33	0001 Piutang Pajak Yarusif
1	1	03	14	34	Piutang Pajak Zeolit
1	1	03	14	34	0001 Piutang Pajak Zeolit
1	1	03	14	35	Piutang Pajak Basal
1	1	03	14	35	0001 Piutang Pajak Basal
1	1	03	14	36	Piutang Pajak Trakit
1	1	03	14	36	0001 Piutang Pajak Trakit
1	1	03	14	37	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	14	37	0001 Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	03	15		Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	03	15	01	Piutang PBBP2
1	1	03	15	01	0001 Piutang PBBP2
1	1	03	16		Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	03	16	01	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	03	16	01	0001 Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
1	1	03	16	02	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	03	16	02	0001 Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
1	1	04			Piutang Retribusi Daerah
1	1	04	01		Piutang Retribusi Jasa Umum
1	1	04	01	01	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	04	01	01	0001 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
1	1	04	01	01	0002 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
1	1	04	01	01	0003 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
1	1	04	01	01	0004 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
1	1	04	01	01	0005 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
1	1	04	01	01	0006 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis
1	1	04	01	02	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	04	01	02	0001 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1	1	04	01	03	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
1	1	04	01	03	0001 Piutang Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Penguburan Mayat
1	1	04	01	03	0002 Piutang Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Penguburan Mayat
1	1	04	01	04	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	04	0001 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	04	01	05	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Kode Akun						Uraian Akun
1	1	04	01	05	0001	Piutang Retribusi Pelataran
1	1	04	01	05	0002	Piutang Retribusi Los
1	1	04	01	05	0003	Piutang Retribusi Kios
1	1	04	01	06		Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	04	01	06	0001	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	04	01	07		Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	07	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
1	1	04	01	07	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penanggulangan Kebakaran
1	1	04	01	07	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Alat Penyelamatan Jiwa
1	1	04	01	08		Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	04	01	08	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
1	1	04	01	08	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Foto
1	1	04	01	08	0003	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Digital
1	1	04	01	08	0004	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Tematik
1	1	04	01	08	0005	Piutang Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
1	1	04	01	09		Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku
1	1	04	01	09	0001	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku
1	1	04	01	10		Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	04	01	10	0001	Piutang Retribusi Rumah Tangga
1	1	04	01	10	0002	Piutang Retribusi Perkantoran
1	1	04	01	10	0003	Piutang Retribusi Industri
1	1	04	01	11		Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	04	01	11	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya
1	1	04	01	11	0002	Piutang Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
1	1	04	01	12		Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	04	01	12	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
1	1	04	01	12	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
1	1	04	01	12	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
1	1	04	01	13		Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	01	13	0001	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	04	02			Piutang Retribusi Jasa Usaha
1	1	04	02	01		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	04	02	01	0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
1	1	04	02	01	0002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah
1	1	04	02	01	0003	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan
1	1	04	02	01	0004	Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium
1	1	04	02	01	0005	Piutang Retribusi Pemakaian Ruang
1	1	04	02	01	0006	Piutang Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
1	1	04	02	01	0007	Piutang Retribusi Pemakaian Alat
1	1	04	02	02		Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	04	02	02	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
1	1	04	02	02	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
1	1	04	02	03		Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1	1	04	02	03	0001	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
1	1	04	02	03	0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
1	1	04	02	04		Piutang Retribusi Terminal
1	1	04	02	04	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
1	1	04	02	04	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
1	1	04	02	04	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
1	1	04	02	05		Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	05	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
1	1	04	02	06		Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	04	02	06	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	04	02	07		Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	04	02	07	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
1	1	04	02	08		Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	04	02	08	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	04	02	09		Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	09	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	04	02	10		Piutang Retribusi Penyeberangan di Air
1	1	04	02	10	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
1	1	04	02	10	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
1	1	04	02	11		Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	04	02	11	0001	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
1	1	04	02	11	0002	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
1	1	04	02	11	0003	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
1	1	04	02	11	0004	Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
1	1	04	03			Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	04	03	01		Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	01	0001	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	04	03	02		Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	02	0001	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	04	03	03		Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	04	03	03	0001	Piutang Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	04	03	04		Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	04	03	04	0001	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
1	1	04	03	04	0002	Piutang Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
1	1	04	03	05		Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	04	03	05	0001	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
1	1	04	03	05	0002	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
1	1	04	03	05	0003	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
1	1	04	03	06		Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	04	03	06	0001	Piutang Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
1	1	05				Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	05	01			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
1	1	05	01	01	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal

Kode Akun						Uraian Akun
						pada BUMN
1	1	05	02			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
1	1	05	02	01		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
1	1	05	02	01	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
1	1	05	02	02		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
1	1	05	02	02	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)
1	1	05	02	03		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
1	1	05	02	03	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
1	1	05	02	04		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
1	1	05	02	04	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada
1	1	05	02	05		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
1	1	05	02	05	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Sanitasi)
1	1	05	03			Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1	1	05	03	01		Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1	1	05	03	01	0001	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
1	1	06				Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	06	01			Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	01	01		Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	06	01	01	0001	Piutang Hasil Penjualan Tanah
1	1	06	01	02		Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
1	1	06	01	02	0001	Piutang Hasil Penjualan Alat Besar
1	1	06	01	02	0002	Piutang Hasil Penjualan Alat Angkutan
1	1	06	01	02	0003	Piutang Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	1	06	01	02	0004	Piutang Hasil Penjualan Alat Pertanian
1	1	06	01	02	0005	Piutang Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	1	06	01	02	0006	Piutang Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	1	06	01	02	0007	Piutang Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	1	06	01	02	0008	Piutang Hasil Penjualan Alat Laboratorium
1	1	06	01	02	0010	Piutang Hasil Penjualan Komputer
1	1	06	01	02	0011	Piutang Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
1	1	06	01	02	0012	Piutang Hasil Penjualan Alat Pengeboran
1	1	06	01	02	0013	Piutang Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	1	06	01	02	0014	Piutang Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
1	1	06	01	02	0015	Piutang Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
1	1	06	01	02	0016	Piutang Hasil Penjualan Alat Peraga
1	1	06	01	02	0017	Piutang Hasil Penjualan Peralatan
1	1	06	01	02	0018	Piutang Hasil Penjualan Rambu-Rambu
1	1	06	01	02	0019	Piutang Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
1	1	06	01	03		Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
1	1	06	01	03	0001	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Gedung
1	1	06	01	03	0002	Piutang Hasil Penjualan Monumen
1	1	06	01	03	0003	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Menara
1	1	06	01	03	0004	Piutang Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	1	06	01	04		Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	01	04	0001	Piutang Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
1	1	06	01	04	0002	Piutang Hasil Penjualan Bangunan Air
1	1	06	01	04	0003	Piutang Hasil Penjualan Instalasi
1	1	06	01	04	0004	Piutang Hasil Penjualan Jaringan
1	1	06	01	05		Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
1	1	06	01	05	0001	Piutang Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
1	1	06	01	05	0002	Piutang Hasil Penjualan Barang Bercorak
1	1	06	01	05	0003	Piutang Hasil Penjualan Hewan
1	1	06	01	05	0004	Piutang Hasil Penjualan Biota Perairan
1	1	06	01	05	0005	Piutang Hasil Penjualan Tanaman
1	1	06	01	05	0006	Piutang Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
1	1	06	01	05	0007	Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	1	06	01	06		Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya
1	1	06	01	06	0001	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
1	1	06	01	06	0002	Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
1	1	06	02			Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	02	01		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
1	1	06	02	01	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
1	1	06	02	02		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
1	1	06	02	02	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
1	1	06	02	02	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
1	1	06	02	02	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	1	06	02	02	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
1	1	06	02	02	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	1	06	02	02	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	1	06	02	02	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	1	06	02	02	0008	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
1	1	06	02	02	0010	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
1	1	06	02	02	0011	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
1	1	06	02	02	0012	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran
1	1	06	02	02	0013	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat
1	1	06	02	02	0014	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
1	1	06	02	02	0015	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
1	1	06	02	02	0016	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga



Kode Akun						Uraian Akun
1	1	06	02	02	0017	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
1	1	06	02	02	0018	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu-Rambu
1	1	06	02	02	0019	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
1	1	06	02	03		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
1	1	06	02	03	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
1	1	06	02	03	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
1	1	06	02	03	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
1	1	06	02	03	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	1	06	02	04		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	1	06	02	04	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
1	1	06	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air
1	1	06	02	04	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
1	1	06	02	04	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
1	1	06	02	05		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
1	1	06	02	05	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar
1	1	06	02	05	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	1	06	02	05	0003	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
1	1	06	02	05	0004	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
1	1	06	02	05	0005	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman
1	1	06	02	05	0006	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
1	1	06	02	05	0007	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
1	1	06	02	06		Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
1	1	06	02	06	0001	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
1	1	06	02	06	0002	Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
1	1	06	03			Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	03	01		Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	06	03	01	0001	Piutang Hasil Sewa BMD
1	1	06	03	02		Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
1	1	06	03	02	0001	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
1	1	06	03	03		Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	03	03	0001	Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
1	1	06	03	04		Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
1	1	06	03	04	0001	Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
1	1	06	03	05		Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	03	05	0001	Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	04			Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01		Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	04	01	0001	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
1	1	06	05			Piutang Jasa Giro
1	1	06	05	01		Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	06	05	01	0001	Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
1	1	06	05	02		Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	02	0001	Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
1	1	06	05	03		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	06	05	03	0001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
1	1	06	05	04		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	06	05	04	0001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
1	1	06	05	05		Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	06	05	05	0001	Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
1	1	06	06			Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	06	01	0001	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	07			Piutang Pendapatan Bunga
1	1	06	07	01		Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	07	01	0001	Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
1	1	06	08			Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
1	1	06	08	01		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	06	08	01	0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	06	08	02		Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	08	02	0001	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	06	09			Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01		Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	09	01	0001	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
1	1	06	10			Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01		Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	10	01	0001	Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
1	1	06	11			Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01		Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	11	01	0001	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1	1	06	12			Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
1	1	06	12	01		Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	06	12	01	0001	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	06	12	01	0002	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep
1	1	06	12	01	0003	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	06	12	01	0004	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus
1	1	06	12	01	0005	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
1	1	06	12	01	0006	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
1	1	06	12	01	0007	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
1	1	06	12	01	0008	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
1	1	06	12	01	0009	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
1	1	06	12	01	0010	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua
1	1	06	12	01	0011	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	06	12	01	0012	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	06	12	01	0013	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
1	1	06	12	01	0014	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
1	1	06	12	02		Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	06	12	02	0001	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
1	1	06	12	02	0002	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep

Kode Akun						Uraian Akun
1	1	06	12	02	0003	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
1	1	06	12	02	0004	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
1	1	06	12	02	0005	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- Bus
1	1	06	12	02	0006	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
1	1	06	12	02	0007	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
1	1	06	12	02	0008	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
1	1	06	12	02	0009	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
1	1	06	12	02	0010	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
1	1	06	12	02	0011	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
1	1	06	12	02	0012	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
1	1	06	12	02	0013	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
1	1	06	12	02	0014	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda
1	1	06	12	03		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	06	12	03	0001	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin
1	1	06	12	03	0002	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar
1	1	06	12	03	0003	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas
1	1	06	12	03	0004	Piutang Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Lainnya
1	1	06	12	04		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
1	1	06	12	04	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
1	1	06	12	05		Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
1	1	06	12	05	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
1	1	06	12	06		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
1	1	06	12	06	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
1	1	06	12	06	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel
1	1	06	12	06	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen
1	1	06	12	06	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
1	1	06	12	06	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
1	1	06	12	06	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
1	1	06	12	06	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan sejenisnya
1	1	06	12	06	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
1	1	06	12	07		Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran
1	1	06	12	07	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
1	1	06	12	07	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
1	1	06	12	08		Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan
1	1	06	12	08	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
1	1	06	12	08	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
1	1	06	12	08	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
1	1	06	12	08	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran
1	1	06	12	08	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
1	1	06	12	08	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
1	1	06	12	08	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
1	1	06	12	08	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan
1	1	06	12	08	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran ( <i>fitness center</i> )
1	1	06	12	08	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
1	1	06	12	09		Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame
1	1	06	12	09	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard/Videotron/Megatron</i>
1	1	06	12	09	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
1	1	06	12	09	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
1	1	06	12	09	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
1	1	06	12	09	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
1	1	06	12	09	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
1	1	06	12	09	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
1	1	06	12	09	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
1	1	06	12	09	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
1	1	06	12	09	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
1	1	06	12	10		Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
1	1	06	12	10	0001	Piutang Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
1	1	06	12	10	0002	Piutang Penerangan Jalan Sumber Lain
1	1	06	12	11		Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
1	1	06	12	11	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
1	1	06	12	12		Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
1	1	06	12	12	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
1	1	06	12	13		Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	12	13	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
1	1	06	12	14		Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	06	12	14	0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes
1	1	06	12	14	0002	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
1	1	06	12	14	0003	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
1	1	06	12	14	0004	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
1	1	06	12	14	0005	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
1	1	06	12	14	0006	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
1	1	06	12	14	0007	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit
1	1	06	12	14	0008	Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit
1	1	06	12	14	0009	Piutang Pendapatan Denda Pajak Felspar
1	1	06	12	14	0010	Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )
1	1	06	12	14	0011	Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit
1	1	06	12	14	0012	Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
1	1	06	12	14	0013	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips
1	1	06	12	14	0014	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit
1	1	06	12	14	0015	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin
1	1	06	12	14	0016	Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit
1	1	06	12	14	0017	Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit
1	1	06	12	14	0018	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika
1	1	06	12	14	0019	Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer

Kode Akun						Uraian Akun
1	1	06	12	14	0020	Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat
1	1	06	12	14	0021	Piutang Pendapatan Denda Pajak Opsidien
1	1	06	12	14	0022	Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker
1	1	06	12	14	0023	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
1	1	06	12	14	0024	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
1	1	06	12	14	0025	Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit
1	1	06	12	14	0026	Piutang Pendapatan Denda Pajak Fospat
1	1	06	12	14	0027	Piutang Pendapatan Denda Pajak Talk
1	1	06	12	14	0028	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )
1	1	06	12	14	0029	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
1	1	06	12	14	0030	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
1	1	06	12	14	0031	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
1	1	06	12	14	0032	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras
1	1	06	12	14	0033	Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif
1	1	06	12	14	0034	Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit
1	1	06	12	14	0035	Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal
1	1	06	12	14	0036	Piutang Pendapatan Denda Pajak Trakit
1	1	06	12	14	0037	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
1	1	06	12	15		Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	06	12	15	0001	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan,Perdesaan dan Perkotaan
1	1	06	12	16		Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	06	12	16	0001	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak
1	1	06	12	16	0002	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemberian Hak Baru
1	1	06	13			Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
1	1	06	13	01		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
1	1	06	13	01	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
1	1	06	13	01	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan
1	1	06	13	01	0003	Persampahan/Kebersihan
1	1	06	13	01	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1	1	06	13	01	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1	1	06	13	01	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
1	1	06	13	01	0007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1	1	06	13	01	0008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1	1	06	13	01	0009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1	1	06	13	01	0010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1	1	06	13	01	0011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1	1	06	13	01	0012	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1	1	06	13	01	0013	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
1	1	06	13	02		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
1	1	06	13	02		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
1	1	06	13	02	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1	1	06	13	02	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1	1	06	13	02	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pasar
1	1	06	13	02	0004	Pelelangan
1	1	06	13	02	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Terminal
1	1	06	13	02	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
1	1	06	13	02	0007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
1	1	06	13	02	0008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
1	1	06	13	02	0009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
1	1	06	13	02	0010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1	1	06	13	02	0011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air
1	1	06	13	03		Piutang Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1	1	06	13	03	0001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
1	1	06	13	03	0002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1	1	06	13	03	0003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1	1	06	13	03	0004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
1	1	06	13	03	0005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan
1	1	06	13	03	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1	1	06	13	03	0006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
1	1	06	14			Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
1	1	06	14	01		Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	14	01	0001	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
1	1	06	15			Piutang Pendapatan dari Pengembalian
1	1	06	15	01		Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	06	15	01	0001	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
1	1	06	15	02		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
1	1	06	15	02	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
1	1	06	15	02	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
1	1	06	15	03		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1	1	06	15	03	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
1	1	06	15	04		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
1	1	06	15	04	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa
1	1	06	15	04	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap
1	1	06	15	04	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota
1	1	06	15	04	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
1	1	06	15	04	0005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
1	1	06	15	04	0006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri-Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri
1	1	06	15	05		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
1	1	06	15	05	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
1	1	06	15	06		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
1	1	06	15	06	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM

Kode Akun						Uraian Akun
1	1	06	15	07		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
1	1	06	15	07	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN
1	1	06	16			Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01		Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	16	01	0001	Piutang Pendapatan BLUD
1	1	06	17			Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
1	1	06	17	01		Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
1	1	06	17	01	0001	Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
1	1	06	17	02		Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	17	02	0001	Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	1	06	18			Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
1	1	06	18	01		Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	1	06	18	01	0001	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	1	06	19			Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01		Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	19	01	0001	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
1	1	06	20			Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
1	1	06	20	01		Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
1	1	06	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
1	1	06	21			Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01		Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	21	01	0001	Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
1	1	06	22			Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
1	1	06	22	01		Piutang Pendapatan Zakat
1	1	06	22	01	0001	Piutang Pendapatan Zakat
1	1	06	22	02		Piutang Pendapatan Infaq
1	1	06	22	02	0001	Piutang Pendapatan Infaq
1	1	06	22	03		Piutang Pendapatan Shadaqah
1	1	06	22	03	0001	Piutang Pendapatan Shadaqah
1	1	06	22	04		Piutang Pendapatan Wakaf
1	1	06	22	04	0001	Piutang Pendapatan Wakaf
1	1	07				Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	07	01			Piutang Dana Perimbangan
1	1	07	01	01		Piutang Dana Transfer Umum-DBH
1	1	07	01	01	0001	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB
1	1	07	01	01	0002	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
1	1	07	01	01	0003	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
1	1	07	01	01	0004	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
1	1	07	01	01	0005	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
1	1	07	01	01	0006	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi
1	1	07	01	01	0007	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
1	1	07	01	01	0008	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent
1	1	07	01	01	0009	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty
1	1	07	01	01	0010	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
1	1	07	01	01	0011	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH
1	1	07	01	01	0012	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR
1	1	07	01	01	0013	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
1	1	07	01	02		Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU)
1	1	07	01	02	0001	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
1	1	07	01	02	0002	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
1	1	07	01	02	0003	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	07	01	02	0004	Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1	1	07	01	03		Piutang Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
1	1	07	01	03	0001	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
1	1	07	01	03	0002	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
1	1	07	01	03	0003	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
1	1	07	01	03	0004	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
1	1	07	01	03	0005	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
1	1	07	01	03	0006	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
1	1	07	01	03	0007	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang
1	1	07	01	03	0008	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
1	1	07	01	03	0009	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
1	1	07	01	03	0010	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
1	1	07	01	03	0011	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
1	1	07	01	03	0012	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
1	1	07	01	03	0013	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
1	1	07	01	03	0014	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	1	07	01	03	0015	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
1	1	07	01	03	0016	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
1	1	07	01	03	0017	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>
1	1	07	01	03	0018	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1	1	07	01	03	0019	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
1	1	07	01	03	0020	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan Rumah Sakit Pratama
1	1	07	01	03	0021	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
1	1	07	01	03	0022	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-BAPELKES
1	1	07	01	03	0023	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas DTPK
1	1	07	01	03	0024	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
1	1	07	01	03	0025	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
1	1	07	01	03	0026	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> (KB)
1	1	07	01	03	0027	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan

Kode Akun						Uraian Akun
						Rumah Swadaya
1	1	07	01	03	0028	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi- Penyediaan Rumah Swadaya
1	1	07	01	03	0029	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi- Penyediaan Rumah Khusus
1	1	07	01	03	0030	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan- Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
1	1	07	01	03	0031	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
1	1	07	01	03	0032	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
1	1	07	01	03	0033	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
1	1	07	01	03	0034	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
1	1	07	01	03	0035	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
1	1	07	01	03	0036	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan
1	1	07	01	03	0037	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
1	1	07	01	03	0038	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
1	1	07	01	03	0039	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
1	1	07	01	03	0040	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
1	1	07	01	03	0041	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
1	1	07	01	03	0042	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
1	1	07	01	03	0043	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
1	1	07	01	03	0044	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
1	1	07	01	03	0045	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
1	1	07	01	03	0046	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
1	1	07	01	03	0047	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
1	1	07	01	03	0048	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
1	1	07	01	03	0049	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
1	1	07	01	03	0050	Piutang Dana Transfer Khusus Fisik-Bidang Sosial-Reguler
1	1	07	01	04		Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik
1	1	07	01	04	0001	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Reguler
1	1	07	01	04	0002	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
1	1	07	01	04	0003	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
1	1	07	01	04	0004	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TPG PNSD
1	1	07	01	04	0005	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
1	1	07	01	04	0006	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-TKG PNSD
1	1	07	01	04	0007	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP PAUD
1	1	07	01	04	0008	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
1	1	07	01	04	0009	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
1	1	07	01	04	0010	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
1	1	07	01	04	0011	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-BOK
1	1	07	01	04	0012	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
1	1	07	01	04	0013	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Akreditasi Puskesmas
1	1	07	01	04	0014	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-Jaminan Persalinan
1	1	07	01	04	0015	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- BOKKB-BOKB
1	1	07	01	04	0016	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik- PK2UKM
1	1	07	01	04	0017	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
1	1	07	01	04	0018	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
1	1	07	01	04	0019	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
1	1	07	02			Piutang Dana Insentif Daerah (DID)
1	1	07	02	01		Piutang DID
1	1	07	02	01	0001	Piutang DID
1	1	07	03			Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur
1	1	07	03	01		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	07	03	01	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	07	03	02		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	02	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	03		Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	07	03	03	0001	Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	07	03	04		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
1	1	07	03	04	0001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua
1	1	07	03	05		Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
1	1	07	03	05	0001	Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Provinsi Papua Barat
1	1	07	04			Piutang Dana Keistimewaan
1	1	07	04	01		Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa
1	1	07	04	01	0001	Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
1	1	07	05			Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01		Piutang Dana Desa
1	1	07	05	01	0001	Piutang Dana Desa
1	1	08				Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	08	01			Piutang Bagi Hasil
1	1	08	01	01		Piutang Bagi Hasil Pajak
1	1	08	01	01	0001	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0002	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0003	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1	1	08	01	01	0004	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
1	1	08	01	01	0005	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok
1	1	08	02			Piutang Bantuan Keuangan
1	1	08	02	01		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	01	0001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	02		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	02	0001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	1	08	02	03		Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	03	0001	Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	04		Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	08	02	04	0001	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
1	1	09				Piutang Lainnya
1	1	09	01			Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Kode Akun					Uraian Akun
1	1	09	01	01	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	01	01	0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	01	02	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah
1	1	09	01	02	0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
1	1	09	01	03	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
1	1	09	01	03	0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
1	1	09	01	04	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
1	1	09	01	04	0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
1	1	09	01	05	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
1	1	09	01	05	0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
1	1	09	01	06	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	1	09	01	06	0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	1	09	01	07	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD
1	1	09	01	07	0001 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD
1	1	09	02		Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
1	1	09	02	01	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	02	01	0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
1	1	09	02	02	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	1	09	02	02	0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah
1	1	09	02	03	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
1	1	09	02	03	0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
1	1	09	02	04	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
1	1	09	02	04	0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
1	1	09	02	05	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
1	1	09	02	05	0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
1	1	09	02	06	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
1	1	09	02	06	0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	1	09	02	07	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
1	1	09	02	07	0001 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
1	1	09	03		Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	09	03	01	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	1	09	03	01	0001 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	1	09	03	02	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	03	02	0001 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	1	09	04		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	09	04	01	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	09	04	01	0001 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	1	09	04	02	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	09	04	02	0001 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	1	09	05		Uang Muka
1	1	09	05	01	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	09	05	01	0001 Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1	1	10			Penyisihan Piutang
1	1	10	01		Penyisihan Piutang Pendapatan
1	1	10	01	01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	1	10	01	01	0001 Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1	1	10	01	01	0002 Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1	1	10	01	01	0003 Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
1	1	10	01	01	0004 Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
1	1	10	01	01	0005 Penyisihan Piutang Pajak Rokok
1	1	10	01	01	0006 Penyisihan Piutang Pajak Hotel
1	1	10	01	01	0007 Penyisihan Piutang Pajak Restoran
1	1	10	01	01	0008 Penyisihan Piutang Pajak Hiburan
1	1	10	01	01	0009 Penyisihan Piutang Pajak Reklame
1	1	10	01	01	0010 Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan
1	1	10	01	01	0011 Penyisihan Piutang Pajak Parkir
1	1	10	01	01	0012 Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
1	1	10	01	01	0013 Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1	1	10	01	01	0014 Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1	1	10	01	01	0015 Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
1	1	10	01	01	0001 6 Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
1	1	10	01	02	Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	10	01	02	0001 Penyisihan Piutang Retribusi
1	1	10	01	03	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	10	01	03	0001 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1	1	10	01	04	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	01	04	0001 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1	1	10	01	05	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1	1	10	01	05	0001 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB
1	1	10	01	05	0002 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPh Pasal 21
1	1	10	01	05	0003 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
1	1	10	01	05	0004 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH CHT
1	1	10	01	05	0005 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Minyak Bumi
1	1	10	01	05	0006 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Gas Bumi
1	1	10	01	05	0007 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
1	1	10	01	05	0008 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent
1	1	10	01	05	0009 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty
1	1	10	01	05	0010 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan- PSDH
1	1	10	01	05	0011 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan- IUUPH
1	1	10	01	05	0012 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Kehutanan-DR
1	1	10	01	05	0013 Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DBH-DBH SDA Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
1	1	10	01	05	0014	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU
1	1	10	01	05	0015	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
1	1	10	01	05	0016	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	10	01	05	0017	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
1	1	10	01	05	0018	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
1	1	10	01	05	0019	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
1	1	10	01	05	0020	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP
1	1	10	01	05	0021	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
1	1	10	01	05	0022	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
1	1	10	01	05	0023	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
1	1	10	01	05	0024	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
1	1	10	01	05	0025	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
1	1	10	01	05	0026	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
1	1	10	01	05	0027	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK
1	1	10	01	05	0028	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah
1	1	10	01	05	0029	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga
1	1	10	01	05	0030	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
1	1	10	01	05	0031	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
1	1	10	01	05	0032	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
1	1	10	01	05	0033	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
1	1	10	01	05	0034	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>
1	1	10	01	05	0035	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
1	1	10	01	05	0036	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
1	1	10	01	05	0037	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
1	1	10	01	05	0038	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata
1	1	10	01	05	0039	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
1	1	10	01	05	0040	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
1	1	10	01	05	0041	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
1	1	10	01	05	0042	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
1	1	10	01	05	0043	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> (KB)
1	1	10	01	05	0044	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
1	1	10	01	05	0045	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
1	1	10	01	05	0046	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
1	1	10	01	05	0047	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
1	1	10	01	05	0048	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
1	1	10	01	05	0049	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
1	1	10	01	05	0050	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
1	1	10	01	05	0051	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan
1	1	10	01	05	0052	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Jalan
1	1	10	01	05	0053	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Keselamatan Jalan
1	1	10	01	05	0054	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum- Reguler
1	1	10	01	05	0055	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum- Afirmasi
1	1	10	01	05	0056	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan
1	1	10	01	05	0057	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler
1	1	10	01	05	0058	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
1	1	10	01	05	0059	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan
1	1	10	01	05	0060	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
1	1	10	01	05	0061	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pasar- Penugasan
1	1	10	01	05	0062	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
1	1	10	01	05	0063	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan

Kode Akun						Uraian Akun
1	1	10	01	05	0064	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
1	1	10	01	05	0065	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
1	1	10	01	05	0066	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
1	1	10	01	05	0067	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
1	1	10	01	05	0068	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
1	1	10	01	05	0069	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
1	1	10	01	05	0070	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
1	1	10	01	05	0071	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
1	1	10	01	05	0072	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
1	1	10	01	05	0073	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
1	1	10	01	05	0074	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1	1	10	01	05	0075	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
1	1	10	01	05	0076	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
1	1	10	01	05	0077	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana
1	1	10	01	05	0078	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
1	1	10	01	05	0079	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB- Pengawasan Obat dan Makanan
1	1	10	01	05	0080	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
1	1	10	01	05	0081	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
1	1	10	01	05	0082	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
1	1	10	01	05	0083	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
1	1	10	01	05	0084	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
1	1	10	01	05	0085	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
1	1	10	01	05	0086	Penyisihan Piutang Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
1	1	10	01	05	0087	Penyisihan Piutang Dana Insentif Daerah
1	1	10	01	05	0088	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
1	1	10	01	05	0089	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
1	1	10	01	05	0090	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
1	1	10	01	05	0091	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
1	1	10	01	05	0092	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
1	1	10	01	05	0093	Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan
1	1	10	01	05	0094	Penyisihan Piutang Dana Desa
1	1	10	01	06		Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	10	01	06	0001	Penyisihan Piutang Bagi Hasil
1	1	10	01	06	0002	Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
1	1	10	02			Penyisihan Piutang Lainnya
1	1	10	02	01		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
1	1	10	02	01	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
1	1	10	02	02		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
1	1	10	02	02	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain
1	1	10	02	03		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
1	1	10	02	03	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank
1	1	10	02	04		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
1	1	10	02	04	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
1	1	10	02	05		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD
1	1	10	02	05	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD
1	1	10	02	06		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	06	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1	1	10	02	07		Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	02	07	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	1	10	02	08		Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
1	1	10	02	08	0001	Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka
1	1	11				Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01			Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01		Beban Dibayar Dimuka
1	1	11	01	01	0001	Beban Dibayar Dimuka
1	1	12				Persediaan
1	1	12	01			Barang Pakai Habis
1	1	12	01	01		Bahan
1	1	12	01	01	0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi
1	1	12	01	01	0002	Bahan Kimia
1	1	12	01	01	0004	Bahan Bakar dan Pelumas
1	1	12	01	01	0005	Bahan Baku
1	1	12	01	01	0006	Bahan Kimia Nuklir
1	1	12	01	01	0007	Barang Dalam Proses
1	1	12	01	01	0008	Bahan/Bibit Tanaman



Kode Akun						Uraian Akun
1	1	12	01	01	0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran
1	1	12	01	01	0010	Isi Tabung Gas
1	1	12	01	01	0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
1	1	12	01	01	0012	Bahan Lainnya
1	1	12	01	02		Suku Cadang
1	1	12	01	02	0001	Suku Cadang Alat Angkutan
1	1	12	01	02	0002	Suku Cadang Alat Besar
1	1	12	01	02	0003	Suku Cadang Alat Kedokteran
1	1	12	01	02	0004	Suku Cadang Alat Laboratorium
1	1	12	01	02	0005	Suku Cadang Alat Pemancar
1	1	12	01	02	0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
1	1	12	01	02	0007	Suku Cadang Alat Pertanian
1	1	12	01	02	0008	Suku Cadang Alat Bengkel
1	1	12	01	02	0010	Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
1	1	12	01	02	0011	Suku Cadang Lainnya
1	1	12	01	03		Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor
1	1	12	01	03	0001	Alat Tulis Kantor
1	1	12	01	03	0002	Kertas dan Cover
1	1	12	01	03	0003	Bahan Cetak
1	1	12	01	03	0004	Benda Pos
1	1	12	01	03	0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1	1	12	01	03	0006	Bahan Komputer
1	1	12	01	03	0007	Perabot Kantor
1	1	12	01	03	0008	Alat Listrik
1	1	12	01	03	0009	Perlengkapan Dinas
1	1	12	01	03	0010	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
1	1	12	01	03	0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga
1	1	12	01	03	0012	Suvenir/Cendera Mata
1	1	12	01	03	0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
1	1	12	01	04		Obat-obatan
1	1	12	01	04	0001	Obat
1	1	12	01	04	0002	Obat-obatan Lainnya
1	1	12	01	05		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan
1	1	12	01	05	0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat
1	1	12	01	05	0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya
1	1	12	01	06		Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1	1	12	01	06	0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga
1	1	12	01	06	0002	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya
1	1	12	01	07		Natura dan Pakan
1	1	12	01	07	0001	Natura
1	1	12	01	07	0002	Pakan
1	1	12	01	07	0003	Natura dan Pakan Lainnya
1	1	12	01	08		Persediaan Penelitian
1	1	12	01	08	0001	Persediaan Penelitian Biologi
1	1	12	01	08	0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
1	1	12	01	08	0003	Persediaan Penelitian Teknologi
1	1	12	01	08	0004	Persediaan Penelitian Lainnya
1	1	12	01	09		Persediaan dalam Proses
1	1	12	01	09	0001	Persediaan Dalam Proses
1	1	12	01	09	0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya
1	1	12	02			Barang Tak Habis Pakai
1	1	12	02	01		Komponen
1	1	12	02	01	0001	Komponen Jembatan Baja
1	1	12	02	01	0002	Komponen Jembatan Pratekan
1	1	12	02	01	0003	Komponen Peralatan
1	1	12	02	01	0004	Komponen Rambu-Rambu
1	1	12	02	01	0005	Attachment
1	1	12	02	01	0006	Komponen Lainnya
1	1	12	02	02		Pipa
1	1	12	02	02	0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)
1	1	12	02	02	0002	Pipa Asbes Semen (ACP)
1	1	12	02	02	0003	Pipa Baja
1	1	12	02	02	0004	Pipa Beton Pratekan
1	1	12	02	02	0005	Pipa Fiber Glass
1	1	12	02	02	0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)
1	1	12	02	02	0007	Pipa Lainnya
1	1	12	03			Barang Bekas Dipakai
1	1	12	03	01		Komponen Bekas dan Pipa Bekas
1	1	12	03	01	0001	Komponen Bekas
1	1	12	03	01	0002	Pipa Bekas
1	1	12	03	01	0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
1	1	13				Aset Untuk Dikonsolidasikan
1	1	13	01			RK SKPD
1	1	13	01	01		RK SKPD
1	1	13	01	01	0001	RK SKPD
1	2					INVESTASI JANGKA PANJANG
1	2	01				Investasi Jangka Panjang Non Permanen
1	2	01	01			Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	01	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	01	01	0001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1	2	01	02			Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01		Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	02	01	0001	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1	2	01	03			Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01		Investasi dalam Obligasi
1	2	01	03	01	0001	Investasi dalam Obligasi
1	2	01	04			Investasi dalam Proyek Pembangunan
1	2	01	04	01		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	01	04	01	0001	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
1	2	01	04	02		Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
1	2	01	04	02	0001	Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
1	2	01	05			Dana Bergulir
1	2	01	05	01		Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	01	05	01	0001	Dana Bergulir kepada Koperasi
1	2	01	05	02		Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	01	0001	Dana Bergulir kepada Masyarakat
1	2	01	05	03		Dana Bergulir melalui BLUD
1	2	01	05	01	0001	Dana Bergulir melalui BLUD
1	2	02				Investasi Jangka Panjang Permanen
1	2	02	01			Penyertaan Modal
1	2	02	01	01		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	01	0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
1	2	02	01	02		Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	02	01	01	0001	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
1	2	02	02			Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah
1	2	02	02	01		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	2	02	02	01	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
1	2	02	02	02		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	02	02	02	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1	2	02	02	03		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
1	2	02	02	03	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
1	2	02	02	04		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
1	2	02	02	04	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
1	2	02	02	05		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	02	02	05	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
1	2	02	02	06		Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	2	02	02	06	0001	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
1	3					ASET TETAP
1	3	01				Tanah
1	3	01	01			Tanah
1	3	01	01	01		Tanah Persil
1	3	01	01	01	0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1	3	01	01	01	0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1	3	01	01	01	0003	Tanah untuk Bangunan Industri
1	3	01	01	01	0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
1	3	01	01	01	0005	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
1	3	01	01	01	0006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
1	3	01	01	01	0007	Tanah Persil Lainnya
1	3	01	01	02		Tanah Non Persil
1	3	01	01	02	0001	Tanah Basah
1	3	01	01	02	0002	Tanah Kering
1	3	01	01	02	0003	Tanah Perkebunan
1	3	01	01	02	0004	Tanah Hutan
1	3	01	01	02	0005	Tanah Tandus
1	3	01	01	02	0006	Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
1	3	01	01	02	0007	Tanah Pertanian
1	3	01	01	02	0008	Tanah Pertambangan
1	3	01	01	02	0009	Tanah Non Persil Lainnya
1	3	01	01	03		Lapangan
1	3	01	01	03	0001	Tanah Lapangan Olahraga
1	3	01	01	03	0002	Tanah Lapangan Parkir
1	3	01	01	03	0003	Tanah Lapangan Penimbunan Barang
1	3	01	01	03	0004	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1	3	01	01	03	0005	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1	3	01	01	03	0006	Tanah Lapangan Terbang
1	3	01	01	03	0007	Tanah untuk Jalan
1	3	01	01	03	0008	Tanah untuk Bangunan Air
1	3	01	01	03	0009	Tanah untuk Bangunan Instalasi
1	3	01	01	03	0010	Tanah untuk Bangunan Jaringan
1	3	01	01	03	0011	Tanah untuk Bangunan Bersejarah
1	3	01	01	03	0012	Tanah untuk Makam
1	3	01	01	03	0013	Tanah untuk Taman
1	3	01	01	03	0014	Tanah untuk Latihan
1	3	01	01	03	0015	Tanah Daerah Pertahanan
1	3	01	01	03	0016	Tanah Lapangan PBB
1	3	01	01	03	0017	Tanah Kampung
1	3	01	01	03	0018	Emplament
1	3	01	01	03	0019	Lapangan Lainnya
1	3	02				Peralatan dan Mesin
1	3	02	01			Alat Besar
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat
1	3	02	01	01	0001	Tractor
1	3	02	01	01	0002	Grader
1	3	02	01	01	0003	Excavator
1	3	02	01	01	0004	Pile Driver
1	3	02	01	01	0005	Hauler
1	3	02	01	01	0006	Asphalt Equipment
1	3	02	01	01	0007	Compacting Equipment
1	3	02	01	01	0008	Aggregate and Concrete Equipment
1	3	02	01	01	0009	Loader
1	3	02	01	01	0010	Alat Pengangkat
1	3	02	01	01	0011	Mesin Proses
1	3	02	01	01	0012	Alat Besar Darat Lainnya
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung
1	3	02	01	02	0001	Dredger
1	3	02	01	02	0002	Floating Excavator
1	3	02	01	02	0003	Amphibi Dredger
1	3	02	01	02	0004	Kapal Tarik
1	3	02	01	02	0005	Mesin Proses Apung
1	3	02	01	02	0006	Alat Besar Apung Lainnya

Kode Akun					Uraian Akun
1	3	02	01	03	Alat Bantu
1	3	02	01	03	0001 Alat Penarik
1	3	02	01	03	0002 Feeder
1	3	02	01	03	0003 Compressor
1	3	02	01	03	0004 Electric Generating Set
1	3	02	01	03	0005 Pompa
1	3	02	01	03	0006 Mesin Bor
1	3	02	01	03	0007 Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	02	01	03	0008 Alat Pengolahan Air Kotor
1	3	02	01	03	0009 Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
1	3	02	01	03	0010 Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
1	3	02	01	03	0011 Mesin Tato
1	3	02	01	03	0012 Perlengkapan Kebakaran Hutan
1	3	02	01	03	0013 Peralatan Selam
1	3	02	01	03	0014 Peralatan SAR Mountenering
1	3	02	01	03	0015 Peralatan Intelijen
1	3	02	01	03	0016 Alat Bantu Lainnya
1	3	02	02		Alat Angkutan
1	3	02	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor
1	3	02	02	01	0001 Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	02	02	01	0002 Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	02	02	01	0003 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	02	02	01	0004 Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	02	02	01	0005 Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	02	02	01	0006 Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	02	02	01	0007 Kendaraan Tempur
1	3	02	02	01	0008 Alat Angkutan Kereta Rel
1	3	02	02	01	0009 Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
1	3	02	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
1	3	02	02	02	0001 Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
1	3	02	02	02	0002 Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
1	3	02	02	02	0003 Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
1	3	02	02	02	0004 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
1	3	02	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor
1	3	02	02	03	0001 Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
1	3	02	02	03	0002 Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
1	3	02	02	03	0003 Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
1	3	02	02	03	0004 Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
1	3	02	02	03	0005 Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
1	3	02	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
1	3	02	02	04	0001 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
1	3	02	02	04	0002 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
1	3	02	02	04	0003 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	02	02	04	0004 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
1	3	02	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara
1	3	02	02	05	0001 Kapal Terbang
1	3	02	02	05	0002 Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
1	3	02	03		Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin
1	3	02	03	01	0001 Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada
1	3	02	03	01	0002 Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
1	3	02	03	01	0003 Perkakas Bengkel Listrik
1	3	02	03	01	0004 Perkakas Bengkel Service
1	3	02	03	01	0005 Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	02	03	01	0006 Perkakas Bengkel Kayu
1	3	02	03	01	0007 Perkakas Bengkel Khusus
1	3	02	03	01	0008 Peralatan Las
1	3	02	03	01	0009 Perkakas Pabrik Es
1	3	02	03	01	0010 Alat Bengkel Bermesin Lainnya
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin
1	3	02	03	02	0001 Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	02	03	02	0002 Perkakas Bengkel Listrik
1	3	02	03	02	0003 Perkakas Bengkel Service
1	3	02	03	02	0004 Perkakas Pengangkat
1	3	02	03	02	0005 Perkakas <i>Standard</i> ( <i>Standard Tools</i> )
1	3	02	03	02	0006 Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
1	3	02	03	02	0007 Perkakas Bengkel Kerja
1	3	02	03	02	0008 Peralatan Tukang Besi
1	3	02	03	02	0009 Peralatan Tukang Kayu
1	3	02	03	02	0010 Peralatan Tukang Kayu
1	3	02	03	02	0011 Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
1	3	02	03	02	0012 Peralatan Bengkel Khusus Peladam
1	3	02	03	02	0013 Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
1	3	02	03	03	Alat Ukur
1	3	02	03	03	0001 Alat Ukur Universal
1	3	02	03	03	0002 Alat Ukur/Tes Inteligensia
1	3	02	03	03	0003 Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
1	3	02	03	03	0004 Alat Ukur/Tes Klinis Lain
1	3	02	03	03	0005 Alat Kalibrasi
1	3	02	03	03	0006 Oscilloscope
1	3	02	03	03	0007 Universal Tester
1	3	02	03	03	0008 Alat Ukur/Pembanding
1	3	02	03	03	0009 Alat Ukur Lain-Lain
1	3	02	03	03	0010 Alat Timbangan/Biara
1	3	02	03	03	0011 Anak Timbangan/Biara
1	3	02	03	03	0012 Takaran Kering
1	3	02	03	03	0013 Takaran Bahan Bangunan
1	3	02	03	03	0014 Takaran Lainnya
1	3	02	03	03	0015 Alat Penguji Kendaraan Bermotor
1	3	02	03	03	0016 <i>Specific Set</i>

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	02	03	03	0017	Alat Pengukur Keadaan Alam
1	3	02	03	03	0018	Alat Pengukur Penglihatan
1	3	02	03	03	0019	Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
1	3	02	03	03	0020	Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
1	3	02	03	03	0021	Alat Ukur Lainnya
1	3	02	04			Alat Pertanian
1	3	02	04	01		Alat Pengolahan
1	3	02	04	01	0001	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	02	04	01	0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
1	3	02	04	01	0003	Alat Panen
1	3	02	04	01	0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	02	04	01	0005	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	02	04	01	0006	Alat <i>Processing</i>
1	3	02	04	01	0007	Alat Pasca Panen
1	3	02	04	01	0008	Alat Produksi Perikanan
1	3	02	04	01	0009	Alat-Alat Peternakan
1	3	02	04	01	0010	Alat Pengolahan Lainnya
1	3	02	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	02	05	01		Alat Kantor
1	3	02	05	01	0001	Mesin Ketik
1	3	02	05	01	0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah
1	3	02	05	01	0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)
1	3	02	05	01	0004	Alat Penyimpan Perengkapan Kantor
1	3	02	05	01	0005	Alat Kantor Lainnya
1	3	02	05	02		Alat Rumah Tangga
1	3	02	05	02	0001	Mebel
1	3	02	05	02	0002	Alat Pengukur Waktu
1	3	02	05	02	0003	Alat Pembersih
1	3	02	05	02	0004	Alat Pendingin
1	3	02	05	02	0005	Alat Dapur
1	3	02	05	02	0006	Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
1	3	02	05	02	0007	Alat Pemadam Kebakaran
1	3	02	05	03		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0001	Meja Kerja Pejabat
1	3	02	05	03	0002	Meja Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0003	Kursi Kerja Pejabat
1	3	02	05	03	0004	Kursi Rapat Pejabat
1	3	02	05	03	0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	02	05	03	0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1	3	02	05	03	0007	Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	02	06			Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	02	06	01		Alat Studio
1	3	02	06	01	0001	Peralatan Studio Audio
1	3	02	06	01	0002	Peralatan Studio Video dan Film
1	3	02	06	01	0003	Peralatan Studio Gambar
1	3	02	06	01	0004	Peralatan Cetak
1	3	02	06	01	0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
1	3	02	06	01	0006	Alat Studio Lainnya
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi
1	3	02	06	02	0001	Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
1	3	02	06	02	0002	Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	02	06	02	0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	02	06	02	0004	Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	02	06	02	0005	Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	02	06	02	0006	Alat Komunikasi Sosial
1	3	02	06	02	0007	Alat-Alat Sandi
1	3	02	06	02	0008	Alat Komunikasi Khusus
1	3	02	06	02	0009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
1	3	02	06	02	0010	Alat Komunikasi Satelit
1	3	02	06	02	0011	Alat Komunikasi Lainnya
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar
1	3	02	06	03	0001	Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	02	06	03	0002	Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	02	06	03	0003	Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	02	06	03	0004	Peralatan Pemancar UHF
1	3	02	06	03	0005	Peralatan Pemancar SHF
1	3	02	06	03	0006	Peralatan Antena MF/MW
1	3	02	06	03	0007	Peralatan Antena HF/SW
1	3	02	06	03	0008	Peralatan Antena VHF/FM
1	3	02	06	03	0009	Peralatan Antena UHF
1	3	02	06	03	0010	Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	02	06	03	0011	Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
1	3	02	06	03	0012	Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
1	3	02	06	03	0013	Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
1	3	02	06	03	0014	Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
1	3	02	06	03	0015	Peralatan <i>Microwave</i> FPU
1	3	02	06	03	0016	Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
1	3	02	06	03	0017	Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
1	3	02	06	03	0018	Peralatan <i>Dummy Load</i>
1	3	02	06	03	0019	<i>Switcher</i> Antena
1	3	02	06	03	0020	<i>Switcher</i> /Menara Antena
1	3	02	06	03	0021	<i>Feeder</i>
1	3	02	06	03	0022	<i>Humidity Control</i>
1	3	02	06	03	0023	Program <i>Input Equipment</i>
1	3	02	06	03	0024	Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	02	06	03	0025	Peralatan Pemancar LF
1	3	02	06	03	0026	Unit Pemancar MF+HF
1	3	02	06	03	0027	Peralatan Antena Pemancar MF+HF
1	3	02	06	03	0028	Peralatan Penerima
1	3	02	06	03	0029	Peralatan Pemancar dan Penerima LF

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	02	06	03	0030	Peralatan Pemancar dan Penerima MF
1	3	02	06	03	0031	Peralatan Pemancar dan Penerima HF
1	3	02	06	03	0032	Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	02	06	03	0033	Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
1	3	02	06	03	0034	Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
1	3	02	06	03	0035	Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
1	3	02	06	03	0036	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
1	3	02	06	03	0037	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
1	3	02	06	03	0038	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
1	3	02	06	03	0039	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	02	06	03	0040	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
1	3	02	06	03	0041	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
1	3	02	06	03	0042	Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
1	3	02	06	03	0043	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
1	3	02	06	03	0044	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
1	3	02	06	03	0045	Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
1	3	02	06	03	0046	Peralatan Perlengkapan Radio
1	3	02	06	03	0047	Sumber Tenaga
1	3	02	06	03	0048	Peralatan Pemancar Lainnya
1	3	02	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi
1	3	02	06	04	0001	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
1	3	02	06	04	0002	<i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
1	3	02	06	04	0003	<i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
1	3	02	06	04	0004	Radar
1	3	02	06	04	0005	Alat Pengatur Telekomunikasi
1	3	02	06	04	0006	Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
1	3	02	06	04	0007	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
1	3	02	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran
1	3	02	07	01	0001	Alat Kedokteran Umum
1	3	02	07	01	0002	Alat Kedokteran Gigi
1	3	02	07	01	0003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	02	07	01	0004	Alat Kedokteran Bedah
1	3	02	07	01	0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	02	07	01	0006	Alat Kedokteran THT
1	3	02	07	01	0007	Alat Kedokteran Mata
1	3	02	07	01	0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1	3	02	07	01	0009	Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
1	3	02	07	01	0010	Alat Kedokteran Anak
1	3	02	07	01	0011	Alat Kedokteran Poliklinik
1	3	02	07	01	0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	02	07	01	0013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
1	3	02	07	01	0014	Alat Kedokteran Jantung
1	3	02	07	01	0015	Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
1	3	02	07	01	0016	Alat Kedokteran <i>Patalogi Anatomy</i>
1	3	02	07	01	0017	Alat Kedokteran Transfusi Darah
1	3	02	07	01	0018	Alat Kedokteran Radioterapi
1	3	02	07	01	0019	Alat Kedokteran Nuklir
1	3	02	07	01	0020	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	02	07	01	0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	02	07	01	0022	Alat Kedokteran Jiwa
1	3	02	07	01	0023	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
1	3	02	07	01	0024	Alat Kedokteran ICU
1	3	02	07	01	0025	Alat Kedokteran ICCU
1	3	02	07	01	0026	Alat Kedokteran Bedah Jantung
1	3	02	07	01	0027	Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
1	3	02	07	01	0028	Alat Kedokteran Anestesi
1	3	02	07	01	0029	Alat Kedokteran Lainnya
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum
1	3	02	07	02	0001	Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	02	07	02	0002	Alat Kesehatan Matra Udara
1	3	02	07	02	0003	Alat Kesehatan Kepolisian
1	3	02	07	02	0004	Alat Kesehatan Olahraga
1	3	02	07	02	0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya
1	3	02	08			Alat Laboratorium
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium
1	3	02	08	01	0001	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
1	3	02	08	01	0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
1	3	02	08	01	0003	Alat Laboratorium Hidrokimia
1	3	02	08	01	0004	Alat Laboratorium Model Hidrolika
1	3	02	08	01	0005	Alat Laboratorium Batuan/Geologi
1	3	02	08	01	0006	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	02	08	01	0007	Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
1	3	02	08	01	0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
1	3	02	08	01	0009	Alat Laboratorium Cocok Tanam
1	3	02	08	01	0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
1	3	02	08	01	0011	Alat Laboratorium Umum
1	3	02	08	01	0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi
1	3	02	08	01	0013	Alat Laboratorium Kimia
1	3	02	08	01	0014	Alat Laboratorium Patologi
1	3	02	08	01	0015	Alat Laboratorium Immunologi
1	3	02	08	01	0016	Alat Laboratorium Hematologi
1	3	02	08	01	0017	Alat Laboratorium Film
1	3	02	08	01	0018	Alat Laboratorium Makanan
1	3	02	08	01	0019	Alat Laboratorium Farmasi
1	3	02	08	01	0020	Alat Laboratorium Fisika
1	3	02	08	01	0021	Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	3	02	08	01	0022	Alat Laboratorium Klimatologi
1	3	02	08	01	0023	Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	02	08	01	0024	Alat Laboratorium Pasir

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	02	08	01	0025	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
1	3	02	08	01	0026	Alat Laboratorium Pembuatan Pola
1	3	02	08	01	0027	Alat Laboratorium Metalografi
1	3	02	08	01	0028	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	3	02	08	01	0029	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	3	02	08	01	0030	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	02	08	01	0031	Alat Laboratorium Metrologi
1	3	02	08	01	0032	Alat Laboratorium Pelapisan Logam
1	3	02	08	01	0033	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	3	02	08	01	0034	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
1	3	02	08	01	0035	Alat Laboratorium Uji Tekstil
1	3	02	08	01	0036	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	02	08	01	0037	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
1	3	02	08	01	0038	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
1	3	02	08	01	0039	Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	02	08	01	0040	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	02	08	01	0041	Alat Laboratorium Pertanian
1	3	02	08	01	0042	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	02	08	01	0043	Alat Laboratorium Energi Surya
1	3	02	08	01	0044	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomass
1	3	02	08	01	0045	Alat Laboratorium Oseanografi
1	3	02	08	01	0046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1	3	02	08	01	0047	Alat Laboratorium Biologi Perairan
1	3	02	08	01	0048	Alat Laboratorium Biologi
1	3	02	08	01	0049	Alat Laboratorium Geofisika
1	3	02	08	01	0050	Alat Laboratorium Tambang
1	3	02	08	01	0051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1	3	02	08	01	0052	Alat Laboratorium Proses Industri
1	3	02	08	01	0053	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	3	02	08	01	0054	Laboratorium Kearsipan
1	3	02	08	01	0055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
1	3	02	08	01	0056	Alat Laboratorium Lain
1	3	02	08	01	0057	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
1	3	02	08	01	0058	Alat Laboratorium Pendidikan
1	3	02	08	01	0059	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
1	3	02	08	01	0060	Alat Laboratorium Teknik Pantai
1	3	02	08	01	0061	Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
1	3	02	08	01	0062	Alat Laboratorium Populasi
1	3	02	08	01	0063	Alat Pengukur Gelombang
1	3	02	08	01	0064	Unit Alat Laboratorium Lainnya
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1	3	02	08	02	0001	<i>Analytical Instrument</i>
1	3	02	08	02	0002	<i>Instrument Probe/Sensor</i>
1	3	02	08	02	0003	<i>General Laboratory Tool</i>
1	3	02	08	02	0004	<i>Glassware Plastic/Utensils</i>
1	3	02	08	02	0005	<i>Laboratory Safety Equipment</i>
1	3	02	08	02	0006	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
1	3	02	08	03		Alat Peraga Praktik Sekolah
1	3	02	08	03	0001	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
1	3	02	08	03	0002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
1	3	02	08	03	0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
1	3	02	08	03	0004	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
1	3	02	08	03	0005	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
1	3	02	08	03	0006	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
1	3	02	08	03	0007	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS
1	3	02	08	03	0008	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
1	3	02	08	03	0009	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
1	3	02	08	03	0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
1	3	02	08	03	0011	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
1	3	02	08	03	0012	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
1	3	02	08	03	0013	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
1	3	02	08	03	0014	Alat Peraga Kejuruan
1	3	02	08	03	0015	Alat Peraga PAUD/TK
1	3	02	08	03	0016	Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
1	3	02	08	04	0001	<i>Radiation Detector</i>
1	3	02	08	04	0002	<i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
1	3	02	08	04	0003	<i>Assembly/Counting System</i>
1	3	02	08	04	0004	<i>Recorder Display</i>
1	3	02	08	04	0005	<i>System/Power Supply</i>
1	3	02	08	04	0006	<i>Measuring/Testing Device</i>
1	3	02	08	04	0007	<i>Opto Electronics</i>
1	3	02	08	04	0008	<i>Accelerator</i>
1	3	02	08	04	0009	<i>Reactor Experimental System</i>
1	3	02	08	04	0010	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
1	3	02	08	05	0001	Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	02	08	05	0002	Alat Kesehatan Kerja
1	3	02	08	05	0003	Proteksi Lingkungan
1	3	02	08	05	0004	<i>Meteorological Equipment</i>
1	3	02	08	05	0005	Sumber Radiasi
1	3	02	08	05	0006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
1	3	02	08	06		<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
1	3	02	08	06	0001	<i>Radiation Application Equipment</i>
1	3	02	08	06	0002	<i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
1	3	02	08	06	0003	Peralatan Hidrologi
1	3	02	08	06	0004	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1	3	02	08	07	0001	Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1	3	02	08	07	0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	02	08	07	0003	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	02	08	07	0004	Laboratorium Lingkungan
1	3	02	08	07	0005	Alat Laboratorium Penunjang
1	3	02	08	07	0006	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>
1	3	02	08	08	0001	<i>Towing Carriage</i>
1	3	02	08	08	0002	<i>Wave Generator and Absorber</i>
1	3	02	08	08	0003	<i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
1	3	02	08	08	0004	<i>Cavitation Tunnel</i>
1	3	02	08	08	0005	<i>Overhead Cranes</i>
1	3	02	08	08	0006	Peralatan Umum
1	3	02	08	08	0007	Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
1	3	02	08	08	0008	Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
1	3	02	08	08	0009	Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
1	3	02	08	08	0010	Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
1	3	02	08	08	0011	Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
1	3	02	08	08	0012	Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
1	3	02	08	08	0013	Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
1	3	02	08	08	0014	MOB
1	3	02	08	08	0015	<i>Photo and Film Equipment</i>
1	3	02	08	08	0016	Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
1	3	02	08	09	0001	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
1	3	02	08	09	0002	Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
1	3	02	08	09	0003	Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
1	3	02	08	09	0004	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
1	3	02	08	09	0005	Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
1	3	02	08	09	0006	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
1	3	02	08	09	0007	Alat Laboratorium Natus
1	3	02	08	09	0008	Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
1	3	02	08	09	0009	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
1	3	02	08	09	0010	Alat Laboratorium Uji Perangkat
1	3	02	08	09	0011	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
1	3	02	10			Komputer
1	3	02	10	01		Komputer Unit
1	3	02	10	01	0001	Komputer Jaringan
1	3	02	10	01	0002	<i>Personal Computer</i>
1	3	02	10	01	0003	Komputer Unit Lainnya
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer
1	3	02	10	02	0001	Peralatan <i>Mainframe</i>
1	3	02	10	02	0002	Peralatan <i>Mini Computer</i>
1	3	02	10	02	0003	Peralatan <i>Personal Computer</i>
1	3	02	10	02	0004	Peralatan Jaringan
1	3	02	10	02	0005	Peralatan Komputer Lainnya
1	3	02	11			Alat Eksplorasi
1	3	02	11	01		Alat Eksplorasi Topografi
1	3	02	11	01	0001	Optik
1	3	02	11	01	0002	Ukur/Instrumen
1	3	02	11	01	0003	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
1	3	02	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika
1	3	02	11	02	0001	Mekanik
1	3	02	11	02	0002	Elektronik/ <i>Electric</i>
1	3	02	11	02	0003	Manual
1	3	02	11	02	0004	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
1	3	02	12			Alat Pengeboran
1	3	02	12	01		Alat Pengeboran Mesin
1	3	02	12	01	0001	Bor Mesin Tumbuk
1	3	02	12	01	0002	Bor Mesin Putar
1	3	02	12	01	0003	Alat Pengeboran Mesin Lainnya
1	3	02	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin
1	3	02	12	02	0001	Bangka
1	3	02	12	02	0002	Pantek
1	3	02	12	02	0003	Putar
1	3	02	12	02	0004	Peralatan Bantu
1	3	02	12	02	0005	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
1	3	02	13			Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	02	13	01		Sumur
1	3	02	13	01	0001	Peralatan Sumur Minyak
1	3	02	13	01	0002	Sumur Pemboran
1	3	02	13	01	0003	Sumur Lainnya
1	3	02	13	02		Produksi
1	3	02	13	02	0001	RIG
1	3	02	13	02	0002	Produksi Lainnya
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian
1	3	02	13	03	0001	Alat Pengolahan Minyak
1	3	02	13	03	0002	Alat Pengolahan Air
1	3	02	13	03	0003	Alat Pengolahan <i>Steam</i>
1	3	02	13	03	0004	Alat Pengolahan <i>Wax</i>
1	3	02	13	03	0005	Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
1	3	02	14			Alat Bantu Eksplorasi
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi
1	3	02	14	01	0001	Mekanik
1	3	02	14	01	0002	Elektrik
1	3	02	14	01	0003	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi
1	3	02	14	02	0001	Perawatan Sumur
1	3	02	14	02	0002	Tes Unit
1	3	02	14	02	0003	Alat Bantu Produksi Lainnya
1	3	02	15			Alat Keselamatan Kerja
1	3	02	15	01		Alat Deteksi

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	02	15	01	0001	Radiasi
1	3	02	15	01	0002	Suara
1	3	02	15	01	0003	Alat Deteksi Lainnya
1	3	02	15	02		Alat Pelindung
1	3	02	15	02	0001	Baju Pengaman
1	3	02	15	02	0002	Masker
1	3	02	15	02	0003	Topi Kerja
1	3	02	15	02	0004	Sabuk Pengaman
1	3	02	15	02	0005	Sepatu Lapangan
1	3	02	15	02	0006	Alat Pelindung Lainnya
1	3	02	15	03		Alat SAR
1	3	02	15	03	0001	Alat Penolong
1	3	02	15	03	0002	Alat Pendukung Pencarian
1	3	02	15	03	0003	Alat Kerja Bawah Air
1	3	02	15	03	0004	Alat SAR Lainnya
1	3	02	15	04		Alat Kerja Penerbangan
1	3	02	15	04	0001	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
1	3	02	15	04	0002	Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
1	3	02	15	04	0003	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
1	3	02	15	04	0004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
1	3	02	15	04	0005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
1	3	02	15	04	0006	Alat Ukur Peralatan <i>Fas</i> lektrik
1	3	02	15	04	0007	Alat Kerja Penerbangan Lainnya
1	3	02	16			Alat Peraga
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
1	3	02	16	01	0001	Alat Peraga Pelatihan
1	3	02	16	01	0002	Alat Peraga Percontohan
1	3	02	16	01	0003	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
1	3	02	17			Peralatan Proses/Produksi
1	3	02	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi
1	3	02	17	01	0001	<i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
1	3	02	17	01	0002	<i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
1	3	02	17	01	0003	<i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
1	3	02	17	01	0004	<i>Solid-Solid Classifier</i>
1	3	02	17	01	0005	<i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
1	3	02	17	01	0006	<i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
1	3	02	17	01	0007	<i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
1	3	02	17	01	0008	<i>Leaching Equipment</i>
1	3	02	17	01	0009	<i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
1	3	02	17	01	0010	<i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
1	3	02	17	01	0011	<i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
1	3	02	17	01	0012	<i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
1	3	02	17	01	0013	<i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
1	3	02	17	01	0014	<i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
1	3	02	17	01	0015	<i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
1	3	02	17	01	0016	<i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
1	3	02	17	01	0017	<i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
1	3	02	17	01	0018	<i>Isotope Separation Equipment</i>
1	3	02	17	01	0019	<i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
1	3	02	17	01	0020	<i>Solid Material Handling Equipment</i>
1	3	02	17	01	0021	<i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
1	3	02	17	01	0022	<i>Heat Generating Equipment</i>
1	3	02	17	01	0023	<i>Heat Transfer Equipment</i>
1	3	02	17	01	0024	<i>Mechanical Process</i>
1	3	02	17	01	0025	<i>Chemical Reaction Equipment</i>
1	3	02	17	01	0026	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
1	3	02	18			Rambu-rambu
1	3	02	18	01		Rambu-rambu Lalu Lintas Darat
1	3	02	18	01	0001	Rambu Bersuar
1	3	02	18	01	0002	Rambu Tidak Bersuar
1	3	02	18	01	0003	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
1	3	02	18	02		Rambu-rambu Lalu Lintas Udara
1	3	02	18	02	0001	<i>Runway/Threshold Light</i>
1	3	02	18	02	0002	<i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
1	3	02	18	02	0003	<i>Approach Light</i>
1	3	02	18	02	0004	<i>Runway Identification Light (REILS)</i>
1	3	02	18	02	0005	<i>Signal</i>
1	3	02	18	02	0006	<i>Flood Lights</i>
1	3	02	18	02	0007	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
1	3	02	18	03		Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
1	3	02	18	03	0001	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
1	3	02	18	03	0002	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
1	3	02	19			Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga
1	3	02	19	01	0001	Peralatan Olahraga Atletik
1	3	02	19	01	0002	Peralatan Permainan
1	3	02	19	01	0003	Peralatan Senam
1	3	02	19	01	0004	Peralatan Olahraga Air
1	3	02	19	01	0005	Peralatan Olahraga Udara
1	3	02	19	01	0006	Peralatan Olahraga Lainnya
1	3	03				Gedung dan Bangunan
1	3	03	01			Bangunan Gedung
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
1	3	03	01	01	0001	Bangunan Gedung Kantor
1	3	03	01	01	0002	Bangunan Gudang
1	3	03	01	01	0003	Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
1	3	03	01	01	0004	Bangunan Gedung Instalasi
1	3	03	01	01	0005	Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	03	01	01	0006	Bangunan Kesehatan
1	3	03	01	01	0007	Bangunan Oseanarium/Observatorium



Kode Akun						Uraian Akun
1	3	03	01	01	0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	03	01	01	0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	03	01	01	0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	03	01	01	0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga
1	3	03	01	01	0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	03	01	01	0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
1	3	03	01	01	0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	03	01	01	0015	Bangunan Gedung Pemotong Hewan
1	3	03	01	01	0016	Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	03	01	01	0017	Bangunan Gedung Museum
1	3	03	01	01	0018	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
1	3	03	01	01	0019	Bangunan Pengujian Kelaikanan
1	3	03	01	01	0020	Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
1	3	03	01	01	0021	Bangunan Rumah Tahanan
1	3	03	01	01	0022	Bangunan Gedung Krematorium
1	3	03	01	01	0023	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	03	01	01	0024	Bangunan Tempat Persidangan
1	3	03	01	01	0025	Bangunan Terbuka
1	3	03	01	01	0026	Bangunan Penampung Sekam
1	3	03	01	01	0027	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1	3	03	01	01	0028	Bangunan Industri
1	3	03	01	01	0029	Bangunan Peternakan/Perikanan
1	3	03	01	01	0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	03	01	01	0031	Bangunan Peralatan Geofisika
1	3	03	01	01	0032	Bangunan Fasilitas Umum
1	3	03	01	01	0033	Bangunan Parkir
1	3	03	01	01	0034	Bangunan Gedung Pabrik
1	3	03	01	01	0035	Bangunan Stasiun Bus
1	3	03	01	01	0036	Taman
1	3	03	01	01	0037	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1	3	03	01	02	0001	Rumah Negara Golongan I
1	3	03	01	02	0002	Rumah Negara Golongan II
1	3	03	01	02	0003	Rumah Negara Golongan III
1	3	03	01	02	0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1	3	03	01	02	0005	Asrama
1	3	03	01	02	0006	Hotel
1	3	03	01	02	0007	Motel
1	3	03	01	02	0008	Flat/Rumah Susun
1	3	03	01	02	0009	Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
1	3	03	01	02	0010	Panti Asuhan
1	3	03	01	02	0011	Apartemen
1	3	03	01	02	0012	Rumah Tidak Bersusun
1	3	03	01	02	0013	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
1	3	03	02			Monumen
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
1	3	03	02	01	0001	Candi
1	3	03	02	01	0002	Tugu
1	3	03	02	01	0003	Bangunan Peninggalan
1	3	03	02	01	0004	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
1	3	03	03			Bangunan Menara
1	3	03	03	01		Bangunan Menara Perambuan
1	3	03	03	01	0001	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
1	3	03	03	01	0002	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
1	3	03	03	01	0003	Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	03	03	01	0004	Bangunan Menara Pengawas
1	3	03	03	01	0005	Bangunan Menara Perambuan Lainnya
1	3	03	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti
1	3	03	04	01		Tugu/Tanda Batas
1	3	03	04	01	0001	Tugu/Tanda Batas Administrasi
1	3	03	04	01	0002	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
1	3	03	04	01	0003	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
1	3	03	04	01	0004	Pagar
1	3	03	04	01	0005	Tugu/Tanda Batas Lainnya
1	3	04				Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan
1	3	04	01	01		Jalan
1	3	04	01	01	0001	Jalan Nasional
1	3	04	01	01	0002	Jalan Provinsi
1	3	04	01	01	0003	Jalan Kabupaten
1	3	04	01	01	0004	Jalan Kota
1	3	04	01	01	0005	Jalan Desa
1	3	04	01	01	0006	Jalan Tol
1	3	04	01	01	0007	Jalan Kereta Api
1	3	04	01	01	0008	Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	04	01	01	0009	Jalan Khusus
1	3	04	01	01	0010	Jalan Lainnya
1	3	04	01	02		Jembatan
1	3	04	01	02	0001	Jembatan pada Jalan Nasional
1	3	04	01	02	0002	Jembatan pada Jalan Provinsi
1	3	04	01	02	0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten
1	3	04	01	02	0004	Jembatan pada Jalan Kota
1	3	04	01	02	0005	Jembatan pada Jalan Desa
1	3	04	01	02	0006	Jembatan pada Jalan Tol
1	3	04	01	02	0007	Jembatan pada Jalan Kereta Api
1	3	04	01	02	0008	Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	04	01	02	0009	Jembatan pada Jalan Khusus
1	3	04	01	02	0010	Jembatan Penyeberangan
1	3	04	01	02	0011	Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
1	3	04	01	02	0012	Jembatan Pengukur

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	04	01	02	0013	Jembatan Lainnya
1	3	04	02			Bangunan Air
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi
1	3	04	02	01	0001	Bangunan Waduk Irigasi
1	3	04	02	01	0002	Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	04	02	01	0003	Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	04	02	01	0004	Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	04	02	01	0005	Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	04	02	01	0006	Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	04	02	01	0007	Bangunan Sawah Irigasi
1	3	04	02	01	0008	Bangunan Air Irigasi Lainnya
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut
1	3	04	02	02	0001	Bangunan Waduk Pasang Surut
1	3	04	02	02	0002	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1	3	04	02	02	0003	Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	04	02	02	0004	Saluran Pembuang Pasang Surut
1	3	04	02	02	0005	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	04	02	02	0006	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1	3	04	02	02	0007	Bangunan Sawah Pasang Surut
1	3	04	02	02	0008	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
1	3	04	02	03	0001	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0003	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0004	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0007	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	04	02	03	0008	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	04	02	04	0001	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	04	02	04	0002	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
1	3	04	02	04	0003	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
1	3	04	02	04	0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	04	02	04	0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
1	3	04	02	04	0006	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
1	3	04	02	04	0007	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1	3	04	02	05	0001	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0002	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0003	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0004	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0005	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0006	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	04	02	05	0007	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
1	3	04	02	05	0008	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0001	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0003	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0004	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	04	02	06	0006	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor
1	3	04	02	07	0001	Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	04	02	07	0002	Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	04	02	07	0003	Bangunan Pembuang Air Kotor
1	3	04	02	07	0004	Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	04	02	07	0005	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	04	02	07	0006	Bangunan Air Kotor Lainnya
1	3	04	03			Instalasi
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Air Baku
1	3	04	03	01	0001	Instalasi Air Permukaan
1	3	04	03	01	0002	Instalasi Air Sumber/Mata Air
1	3	04	03	01	0003	Instalasi Air Tanah Dalam
1	3	04	03	01	0004	Instalasi Air Tanah Dangkal
1	3	04	03	01	0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor
1	3	04	03	02	0001	Instalasi Air Buangan Domestik
1	3	04	03	02	0002	Instalasi Air Buangan Industri
1	3	04	03	02	0003	Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	04	03	02	0004	Instalasi Air Kotor Lainnya
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah
1	3	04	03	03	0001	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	04	03	03	0002	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
1	3	04	03	03	0003	Bangunan Penampung Sampah
1	3	04	03	03	0004	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
1	3	04	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1	3	04	03	04	0001	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
1	3	04	03	04	0002	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
1	3	04	03	04	0003	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
1	3	04	03	04	0004	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik
1	3	04	03	05	0001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	04	03	05	0002	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1	3	04	03	05	0003	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
1	3	04	03	05	0004	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1	3	04	03	05	0005	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	04	03	05	0006	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1	3	04	03	05	0007	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	04	03	05	0008	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1	3	04	03	05	0009	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	3	04	03	05	0010	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	04	03	05	0011	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
1	3	04	03	05	0012	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik
1	3	04	03	06	0001	Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	04	03	06	0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	04	03	06	0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	04	03	06	0004	Instalasi Gardu Listrik Lainnya
1	3	04	03	07		Instalasi Pertahanan
1	3	04	03	07	0001	Instalasi Pertahanan di Darat
1	3	04	03	07	0002	Instalasi Pertahanan Lainnya
1	3	04	03	08		Instalasi Gas
1	3	04	03	08	0001	Instalasi Gardu Gas
1	3	04	03	08	0002	Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	3	04	03	08	0003	Instalasi Pengolahan Gas
1	3	04	03	08	0004	Instalasi Gas Lainnya
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman
1	3	04	03	09	0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	3	04	03	09	0002	Instalasi Reaktor Nuklir
1	3	04	03	09	0003	Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
1	3	04	03	09	0004	Instalasi Pengaman Lainnya
1	3	04	03	10		Instalasi Lain
1	3	04	03	10	0001	Instalasi Lain
1	3	04	04			Jaringan
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum
1	3	04	04	01	0001	Jaringan Pembawa
1	3	04	04	01	0002	Jaringan Induk Distribusi
1	3	04	04	01	0003	Jaringan Cabang Distribusi
1	3	04	04	01	0004	Jaringan Sambungan ke Rumah
1	3	04	04	01	0005	Jaringan Air Minum Lainnya
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik
1	3	04	04	02	0001	Jaringan Transmisi
1	3	04	04	02	0002	Jaringan Distribusi
1	3	04	04	02	0003	Jaringan Listrik Lainnya
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon
1	3	04	04	03	0001	Jaringan Telepon di atas Tanah
1	3	04	04	03	0002	Jaringan Telepon di bawah Tanah
1	3	04	04	03	0003	Jaringan Telepon di dalam Air
1	3	04	04	03	0004	Jaringan dengan Media Udara
1	3	04	04	03	0005	Jaringan Telepon Lainnya
1	3	04	04	04		Jaringan Gas
1	3	04	04	04	0001	Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	04	04	04	0002	Jaringan Pipa Distribusi
1	3	04	04	04	0003	Jaringan Pipa Dinas
1	3	04	04	04	0004	Jaringan BBM
1	3	04	04	04	0005	Jaringan Gas Lainnya
1	3	05				Aset Tetap Lainnya
1	3	05	01			Bahan Perpustakaan
1	3	05	01	01		Bahan Perpustakaan Tercetak
1	3	05	01	01	0001	Buku Umum
1	3	05	01	01	0002	Buku Filsafat
1	3	05	01	01	0003	Buku Agama
1	3	05	01	01	0004	Buku Ilmu Sosial
1	3	05	01	01	0005	Buku Ilmu Bahasa
1	3	05	01	01	0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
1	3	05	01	01	0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
1	3	05	01	01	0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
1	3	05	01	01	0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
1	3	05	01	01	0010	Serial
1	3	05	01	01	0011	Buku Laporan
1	3	05	01	01	0012	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
1	3	05	01	02		Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
1	3	05	01	02	0001	Audio Visual
1	3	05	01	02	0002	Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )
1	3	05	01	02	0003	Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
1	3	05	01	03		Kartografi, Naskah dan Lukisan
1	3	05	01	03	0001	Bahan Kartografi
1	3	05	01	03	0002	Naskah (Manuskrip)/Asli
1	3	05	01	03	0003	Lukisan dan Ukiran
1	3	05	01	03	0004	Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
1	3	05	01	04		Musik
1	3	05	01	04	0001	Karya Musik
1	3	05	01	04	0002	Musik Lainnya
1	3	05	01	05		Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
1	3	05	01	05	0001	Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
1	3	05	01	05	0002	Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya
1	3	05	01	06		<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
1	3	05	01	06	0001	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
1	3	05	01	06	0002	<i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
1	3	05	01	07		<i>Tarscalt</i>
1	3	05	01	07	0001	<i>Tarscalt</i>
1	3	05	01	07	0002	<i>Tarscalt</i> Lainnya
1	3	05	02			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga
1	3	05	02	01		Barang Bercorak Kesenian
1	3	05	02	01	0001	Alat Musik
1	3	05	02	01	0002	Lukisan
1	3	05	02	01	0003	Alat Peraga Kesenian
1	3	05	02	01	0004	Barang Bercorak Kesenian Lainnya

Kode Akun					Uraian Akun
1	3	05	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan
1	3	05	02	02	0001 Pahatan
1	3	05	02	02	0002 Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
1	3	05	02	02	0003 Barang Kerajinan
1	3	05	02	02	0004 Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
1	3	05	02	03	Tanda Penghargaan
1	3	05	02	03	0001 Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
1	3	05	02	03	0002 Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
1	3	05	03		Hewan
1	3	05	03	01	Hewan Piaraan
1	3	05	03	01	0001 Hewan Pengaman
1	3	05	03	01	0002 Hewan Pengangkut
1	3	05	03	01	0003 Hewan Kebun Binatang
1	3	05	03	01	0004 Hewan Piaraan Lainnya
1	3	05	03	02	Ternak
1	3	05	03	02	0001 Ternak Potong
1	3	05	03	02	0002 Ternak Perah
1	3	05	03	02	0003 Ternak Unggas
1	3	05	03	02	0004 Ternak Lainnya
1	3	05	03	03	Hewan Lainnya
1	3	05	03	03	0001 Hewan Lainnya
1	3	05	04		Biota Perairan
1	3	05	04	01	Ikan Bersirip ( <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)
1	3	05	04	01	0001 Ikan Budidaya
1	3	05	04	02	<i>Crustacea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	02	0001 <i>Crustacea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	03	<i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	03	0001 <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	04	<i>Coelenterata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
1	3	05	04	04	0001 <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
1	3	05	04	05	<i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
1	3	05	04	05	0001 <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
1	3	05	04	06	<i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)
1	3	05	04	06	0001 <i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
1	3	05	04	07	<i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	07	0001 <i>Reptilia</i> Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	08	<i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	08	0001 <i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
1	3	05	04	09	<i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
1	3	05	04	09	0001 <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh- Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
1	3	05	04	10	Biota Perairan Lainnya
1	3	05	04	10	0001 Budidaya Biota Perairan Lainnya
1	3	05	05		Tanaman
1	3	05	05	01	Tanaman
1	3	05	05	01	0001 Tanaman
1	3	05	06		Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01	Barang Koleksi Non Budaya
1	3	05	06	01	0001 Hewan Koleksi
1	3	05	06	01	0002 Biota Perairan Koleksi
1	3	05	06	01	0003 Tanaman Koleksi
1	3	05	06	01	0004 Mikroba Koleksi
1	3	05	06	01	0005 Batuan Koleksi
1	3	05	06	01	0006 Fosil
1	3	05	06	01	0007 Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
1	3	05	07		Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01	Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	05	07	01	0001 Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	06			Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01		Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	06	01	01	0001 Konstruksi Dalam Pengerjaan
1	3	07			Akumulasi Penyusutan
1	3	07	01		Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1	3	07	01	01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar
1	3	07	01	01	0001 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>
1	3	07	01	01	0002 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Grader</i>
1	3	07	01	01	0003 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>
1	3	07	01	01	0004 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>
1	3	07	01	01	0005 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>
1	3	07	01	01	0006 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>AsphaltEquipment</i>
1	3	07	01	01	0007 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
1	3	07	01	01	0008 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
1	3	07	01	01	0009 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
1	3	07	01	01	0010 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
1	3	07	01	01	0011 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses
1	3	07	01	01	0012 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
1	3	07	01	01	0013 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- <i>Dreger</i>
1	3	07	01	01	0014 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>
1	3	07	01	01	0015 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>
1	3	07	01	01	0016 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik
1	3	07	01	01	0017 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
1	3	07	01	01	0018 Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
1	3	07	01	01	0019 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik
1	3	07	01	01	0020 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu- <i>Feeder</i>
1	3	07	01	01	0021 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu- <i>Compressor</i>
1	3	07	01	01	0022 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu- <i>Electric Generating Set</i>
1	3	07	01	01	0023 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa
1	3	07	01	01	0024 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor
1	3	07	01	01	0025 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
1	3	07	01	01	0026 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	07	01	01	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
1	3	07	01	01	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
1	3	07	01	01	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tato
1	3	07	01	01	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
1	3	07	01	01	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam
1	3	07	01	01	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering
1	3	07	01	01	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen
1	3	07	01	01	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya
1	3	07	01	02		Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan
1	3	07	01	02	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1	3	07	01	02	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
1	3	07	01	02	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1	3	07	01	02	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1	3	07	01	02	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1	3	07	01	02	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
1	3	07	01	02	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
1	3	07	01	02	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
1	3	07	01	02	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
1	3	07	01	02	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
1	3	07	01	02	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
1	3	07	01	02	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
1	3	07	01	02	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
1	3	07	01	02	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
1	3	07	01	02	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
1	3	07	01	02	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
1	3	07	01	02	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
1	3	07	01	02	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
1	3	07	01	02	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
1	3	07	01	02	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
1	3	07	01	02	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
1	3	07	01	03		Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
1	3	07	01	03	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
1	3	07	01	03	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
1	3	07	01	03	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
1	3	07	01	03	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Service
1	3	07	01	03	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pengangkat Bermesin
1	3	07	01	03	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
1	3	07	01	03	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus
1	3	07	01	03	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las
1	3	07	01	03	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es
1	3	07	01	03	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
1	3	07	01	03	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1	3	07	01	03	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
1	3	07	01	03	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Service
1	3	07	01	03	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
1	3	07	01	03	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)
1	3	07	01	03	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)
1	3	07	01	03	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
1	3	07	01	03	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak
1	3	07	01	03	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
1	3	07	01	03	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
1	3	07	01	03	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting
1	3	07	01	03	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
1	3	07	01	03	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
1	3	07	01	03	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal
1	3	07	01	03	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Inteligencia
1	3	07	01	03	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1	3	07	01	03	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
1	3	07	01	03	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi
1	3	07	01	03	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Oscilloscope
1	3	07	01	03	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester
1	3	07	01	03	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
1	3	07	01	03	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
1	3	07	01	03	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
1	3	07	01	03	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
1	3	07	01	03	0035	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Kering
1	3	07	01	03	0036	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
1	3	07	01	03	0037	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya
1	3	07	01	03	0038	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
1	3	07	01	03	0039	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Specific Set
1	3	07	01	03	0040	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
1	3	07	01	03	0041	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
1	3	07	01	03	0042	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
1	3	07	01	03	0043	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
1	3	07	01	03	0044	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
1	3	07	01	04		Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian
1	3	07	01	04	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1	3	07	01	04	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
1	3	07	01	04	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen
1	3	07	01	04	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
1	3	07	01	04	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
1	3	07	01	04	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing
1	3	07	01	04	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	07	01	04	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
1	3	07	01	04	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
1	3	07	01	04	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
1	3	07	01	05		Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1	3	07	01	05	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik
1	3	07	01	05	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
1	3	07	01	05	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
1	3	07	01	05	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
1	3	07	01	05	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
1	3	07	01	05	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel
1	3	07	01	05	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
1	3	07	01	05	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat
1	3	07	01	05	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
1	3	07	01	05	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
1	3	07	01	05	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
1	3	07	01	05	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
1	3	07	01	05	0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
1	3	07	01	05	0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
1	3	07	01	05	0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1	3	07	01	05	0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat
1	3	07	01	05	0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
1	3	07	01	06		Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
1	3	07	01	06	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio
1	3	07	01	06	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
1	3	07	01	06	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
1	3	07	01	06	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak
1	3	07	01	06	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
1	3	07	01	06	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya
1	3	07	01	06	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
1	3	07	01	06	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
1	3	07	01	06	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
1	3	07	01	06	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
1	3	07	01	06	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
1	3	07	01	06	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
1	3	07	01	06	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
1	3	07	01	06	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
1	3	07	01	06	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
1	3	07	01	06	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
1	3	07	01	06	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
1	3	07	01	06	0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
1	3	07	01	06	0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW
1	3	07	01	06	0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM
1	3	07	01	06	0021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
1	3	07	01	06	0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF
1	3	07	01	06	0023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
1	3	07	01	06	0024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW
1	3	07	01	06	0025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM
1	3	07	01	06	0026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
1	3	07	01	06	0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola
1	3	07	01	06	0028	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
1	3	07	01	06	0029	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
1	3	07	01	06	0030	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
1	3	07	01	06	0031	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-
1	3	07	01	06	0032	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> FPU
1	3	07	01	06	0033	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
1	3	07	01	06	0034	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
1	3	07	01	06	0035	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
1	3	07	01	06	0036	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
1	3	07	01	06	0037	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena
1	3	07	01	06	0038	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
1	3	07	01	06	0039	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
1	3	07	01	06	0040	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Program <i>Input Equipment</i>
1	3	07	01	06	0041	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
1	3	07	01	06	0042	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar LF
1	3	07	01	06	0043	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
1	3	07	01	06	0044	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF
1	3	07	01	06	0045	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima
1	3	07	01	06	0046	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
1	3	07	01	06	0047	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF
1	3	07	01	06	0048	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF
1	3	07	01	06	0049	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	07	01	06	0050	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
1	3	07	01	06	0051	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
1	3	07	01	06	0052	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
1	3	07	01	06	0053	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
1	3	07	01	06	0054	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
1	3	07	01	06	0055	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
1	3	07	01	06	0056	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
1	3	07	01	06	0057	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
1	3	07	01	06	0058	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
1	3	07	01	06	0059	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
1	3	07	01	06	0060	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
1	3	07	01	06	0061	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
1	3	07	01	06	0062	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
1	3	07	01	06	0063	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio
1	3	07	01	06	0064	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga
1	3	07	01	06	0065	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar Lainnya
1	3	07	01	06	0066	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi/Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen

Kode Akun						Uraian Akun
						<i>Landing System</i>
1	3	07	01	06	0067	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequence Omni Range (VOR)</i>
1	3	07	01	06	0068	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
1	3	07	01	06	0069	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
1	3	07	01	06	0070	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
1	3	07	01	06	0071	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
1	3	07	01	06	0072	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
1	3	07	01	07		Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
1	3	07	01	07	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
1	3	07	01	07	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
1	3	07	01	07	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1	3	07	01	07	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
1	3	07	01	07	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1	3	07	01	07	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
1	3	07	01	07	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
1	3	07	01	07	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1	3	07	01	07	0009	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
1	3	07	01	07	0010	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
1	3	07	01	07	0011	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
1	3	07	01	07	0012	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1	3	07	01	07	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
1	3	07	01	07	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
1	3	07	01	07	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
1	3	07	01	07	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi <i>Anatomy</i>
1	3	07	01	07	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
1	3	07	01	07	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
1	3	07	01	07	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
1	3	07	01	07	0020	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1	3	07	01	07	0021	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
1	3	07	01	07	0022	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
1	3	07	01	07	0023	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
1	3	07	01	07	0024	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
1	3	07	01	07	0025	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
1	3	07	01	07	0026	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
1	3	07	01	07	0027	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
1	3	07	01	07	0028	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
1	3	07	01	07	0029	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
1	3	07	01	07	0030	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Laut
1	3	07	01	07	0031	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Udara
1	3	07	01	07	0032	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Kepolisian
1	3	07	01	07	0033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Olahraga
1	3	07	01	07	0034	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya
1	3	07	01	08		Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium
1	3	07	01	08	0001	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
1	3	07	01	08	0002	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
1	3	07	01	08	0003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrokimia
1	3	07	01	08	0004	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Model Hidrolika
1	3	07	01	08	0005	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Batuan/Geologi
1	3	07	01	08	0006	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1	3	07	01	08	0007	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
1	3	07	01	08	0008	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
1	3	07	01	08	0009	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Cocok Tanam
1	3	07	01	08	0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
1	3	07	01	08	0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum
1	3	07	01	08	0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi
1	3	07	01	08	0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia
1	3	07	01	08	0014	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Patologi
1	3	07	01	08	0015	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Immunologi
1	3	07	01	08	0016	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hematologi
1	3	07	01	08	0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Film
1	3	07	01	08	0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Makanan
1	3	07	01	08	0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Farmasi
1	3	07	01	08	0020	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika
1	3	07	01	08	0021	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrodinamika
1	3	07	01	08	0022	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Klimatologi
1	3	07	01	08	0023	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Peleburan
1	3	07	01	08	0024	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pasir
1	3	07	01	08	0025	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1	3	07	01	08	0026	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pembuatan Pola
1	3	07	01	08	0027	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metalografi
1	3	07	01	08	0028	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1	3	07	01	08	0029	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1	3	07	01	08	0030	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1	3	07	01	08	0031	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Metrologi
1	3	07	01	08	0032	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pelapisan Logam
1	3	07	01	08	0033	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1	3	07	01	08	0034	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
1	3	07	01	08	0035	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil
1	3	07	01	08	0036	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1	3	07	01	08	0037	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
1	3	07	01	08	0038	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
1	3	07	01	08	0039	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Keramik
1	3	07	01	08	0040	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1	3	07	01	08	0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pertanian
1	3	07	01	08	0042	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1	3	07	01	08	0043	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Energi Surya
1	3	07	01	08	0044	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1	3	07	01	08	0045	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Oseanografi
1	3	07	01	08	0046	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lingkungan Perairan

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	07	01	08	0047	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi Perairan
1	3	07	01	08	0048	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi
1	3	07	01	08	0049	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Geofisika
1	3	07	01	08	0050	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Tambang
1	3	07	01	08	0051	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1	3	07	01	08	0052	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Industri
1	3	07	01	08	0053	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1	3	07	01	08	0054	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan
1	3	07	01	08	0055	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
1	3	07	01	08	0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain
1	3	07	01	08	0057	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hemodinamika Motor dan Sistem Propulsi
1	3	07	01	08	0058	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pendidikan
1	3	07	01	08	0059	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
1	3	07	01	08	0060	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Teknik Pantai
1	3	07	01	08	0061	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
1	3	07	01	08	0062	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Populasi
1	3	07	01	08	0063	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Pengukur Gelombang
1	3	07	01	08	0064	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium Lainnya
1	3	07	01	08	0065	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
1	3	07	01	08	0066	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
1	3	07	01	08	0067	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>
1	3	07	01	08	0068	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
1	3	07	01	08	0069	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Laboratory Safety Equipment</i>
1	3	07	01	08	0070	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
1	3	07	01	08	0071	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
1	3	07	01	08	0072	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
1	3	07	01	08	0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
1	3	07	01	08	0074	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
1	3	07	01	08	0075	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
1	3	07	01	08	0076	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
1	3	07	01	08	0077	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS
1	3	07	01	08	0078	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
1	3	07	01	08	0079	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
1	3	07	01	08	0080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
1	3	07	01	08	0081	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
1	3	07	01	08	0082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
1	3	07	01	08	0083	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
1	3	07	01	08	0084	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
1	3	07	01	08	0085	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
1	3	07	01	08	0086	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
1	3	07	01	08	0087	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Radiation Detector</i>
1	3	07	01	08	0088	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
1	3	07	01	08	0089	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Assembly/Counting System</i>
1	3	07	01	08	0090	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Recorder Display</i>
1	3	07	01	08	0091	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>System/Power Supply</i>
1	3	07	01	08	0092	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/Testing Device</i>
1	3	07	01	08	0093	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
1	3	07	01	08	0094	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika
1	3	07	01	08	0095	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Reactor Experimental System</i>
1	3	07	01	08	0096	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
1	3	07	01	08	0097	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
1	3	07	01	08	0098	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi
1	3	07	01	08	0099	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
1	3	07	01	08	0100	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- <i>Meteorological Equipment</i>
1	3	07	01	08	0101	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
1	3	07	01	08	0102	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi
1	3	07	01	08	0103	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application Equipment</i>
1	3	07	01	08	0104	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device</i>
1	3	07	01	08	0105	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi</i>
1	3	07	01	08	0106	Akumulasi Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
1	3	07	01	08	0107	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
1	3	07	01	08	0108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
1	3	07	01	08	0109	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1	3	07	01	08	0110	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
1	3	07	01	08	0111	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
1	3	07	01	08	0112	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
1	3	07	01	08	0113	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Towing Carriage</i>
1	3	07	01	08	0114	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Wave Generator And Absorber</i>
1	3	07	01	08	0115	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System</i>
1	3	07	01	08	0116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Cavitation Tunnel</i>



Kode Akun						Uraian Akun
1	3	07	01	08	0117	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Overhead Cranes</i>
1	3	07	01	08	0118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Umum</i>
1	3	07	01	08	0119	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
1	3	07	01	08	0120	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>
1	3	07	01	08	0121	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop</i>
1	3	07	01	08	0122	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>
1	3	07	01	08	0123	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop</i>
1	3	07	01	08	0124	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop</i>
1	3	07	01	08	0125	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop</i>
1	3	07	01	08	0126	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-MOB</i>
1	3	07	01	08	0127	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Photo and Film Equipment</i>
1	3	07	01	08	0128	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya</i>
1	3	07	01	08	0129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
1	3	07	01	08	0130	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
1	3	07	01	08	0131	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
1	3	07	01	08	0132	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
1	3	07	01	08	0133	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
1	3	07	01	08	0134	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
1	3	07	01	08	0135	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
1	3	07	01	08	0136	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
1	3	07	01	08	0137	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat
1	3	07	01	08	0138	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
1	3	07	01	08	0139	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
1	3	07	01	10		Akumulasi Penyusutan Komputer
1	3	07	01	10	0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan
1	3	07	01	10	0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
1	3	07	01	10	0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
1	3	07	01	10	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe
1	3	07	01	10	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan <i>Mini Computer</i>
1	3	07	01	10	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan <i>Personal Computer</i>
1	3	07	01	10	0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan
1	3	07	01	10	0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya
1	3	07	01	11		Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi
1	3	07	01	11	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi- Optik
1	3	07	01	11	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi- Ukur/Instrumen
1	3	07	01	11	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi- Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
1	3	07	01	11	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Mekanik
1	3	07	01	11	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Elektronik/ <i>Electric</i>
1	3	07	01	11	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Manual
1	3	07	01	11	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika- Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
1	3	07	01	12		Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran
1	3	07	01	12	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Bor Mesin Tumbuk
1	3	07	01	12	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Bor Mesin Putar
1	3	07	01	12	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Mesin- Alat Pengeboran Mesin Lainnya
1	3	07	01	12	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
1	3	07	01	12	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
1	3	07	01	12	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
1	3	07	01	12	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
1	3	07	01	12	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
1	3	07	01	13		Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
1	3	07	01	13	0001	Akumulasi Penyusutan Sumur-Peralatan Sumur Minyak
1	3	07	01	13	0002	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran
1	3	07	01	13	0003	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya
1	3	07	01	13	0004	Akumulasi Penyusutan Produksi-RIG
1	3	07	01	13	0005	Akumulasi Penyusutan Produksi-Produksi Lainnya
1	3	07	01	13	0006	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
1	3	07	01	13	0007	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
1	3	07	01	13	0008	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Steam</i>
1	3	07	01	13	0009	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Wax</i>
1	3	07	01	13	0010	Akumulasi Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
1	3	07	01	14		Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
1	3	07	01	14	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Mekanik
1	3	07	01	14	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Elektrik
1	3	07	01	14	003	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
1	3	07	01	14	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
1	3	07	01	14	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Tes Unit
1	3	07	01	14	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
1	3	07	01	15		Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
1	3	07	01	15	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Radiasi
1	3	07	01	15	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Suara
1	3	07	01	15	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
1	3	07	01	15	0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman
1	3	07	01	15	0005	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Masker
1	3	07	01	15	0006	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja
1	3	07	01	15	0007	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
1	3	07	01	15	0008	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
1	3	07	01	15	0009	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	07	01	15	0010	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
1	3	07	01	15	0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
1	3	07	01	15	0012	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat SAR Lainnya
1	3	07	01	15	0013	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
1	3	07	01	15	0014	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
1	3	07	01	15	0015	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
1	3	07	01	15	0016	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
1	3	07	01	15	0017	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
1	3	07	01	15	0018	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
1	3	07	01	15	0019	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Alat Kerja Penerbangan Lainnya
1	3	07	01	16		Akumulasi Penyusutan Alat Peraga
1	3	07	01	16	0001	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
1	3	07	01	16	0002	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
1	3	07	01	16	0003	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
1	3	07	01	17		Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
1	3	07	01	17	0001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
1	3	07	01	17	0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
1	3	07	01	17	0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
1	3	07	01	17	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Classifier</i>
1	3	07	01	17	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
1	3	07	01	17	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
1	3	07	01	17	0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
1	3	07	01	17	0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Leaching Equipment</i>
1	3	07	01	17	0009	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
1	3	07	01	17	0010	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
1	3	07	01	17	0011	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
1	3	07	01	17	0012	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
1	3	07	01	17	0013	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
1	3	07	01	17	0014	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
1	3	07	01	17	0015	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
1	3	07	01	17	0016	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
1	3	07	01	17	0017	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
1	3	07	01	17	0018	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
1	3	07	01	17	0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
1	3	07	01	17	0020	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Material Handling Equipment</i>
1	3	07	01	17	0021	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
1	3	07	01	17	0022	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>
1	3	07	01	17	0023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>
1	3	07	01	17	0024	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>
1	3	07	01	17	0025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>
1	3	07	01	17	0026	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
1	3	07	01	18		Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu
1	3	07	01	18	0001	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
1	3	07	01	18	0002	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
1	3	07	01	18	0003	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
1	3	07	01	18	0004	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway/Threshold Light</i>
1	3	07	01	18	0005	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
1	3	07	01	18	0006	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Approach Light</i>
1	3	07	01	18	0007	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
1	3	07	01	18	0008	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Signal</i>
1	3	07	01	18	0009	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>
1	3	07	01	18	0010	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
1	3	07	01	18	0011	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
1	3	07	01	18	0012	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
1	3	07	01	19		Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga
1	3	07	01	19	0001	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik
1	3	07	01	19	0002	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan
1	3	07	01	19	0003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Senam
1	3	07	01	19	0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air
1	3	07	01	19	0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara
1	3	07	01	19	0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya
1	3	07	02			Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1	3	07	02	01		Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	07	02	01	0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor
1	3	07	02	01	0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang
1	3	07	02	01	0003	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
1	3	07	02	01	0004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
1	3	07	02	01	0005	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium
1	3	07	02	01	0006	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan
1	3	07	02	01	0000	7 Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Oseanarium/Observatorium
1	3	07	02	01	0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1	3	07	02	01	0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1	3	07	02	01	0010	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1	3	07	02	01	0011	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga
1	3	07	02	01	0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1	3	07	02	01	0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
1	3	07	02	01	0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool
1	3	07	02	01	0015	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
1	3	07	02	01	016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan
1	3	07	02	01	0017	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Museum
1	3	07	02	01	0018	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
1	3	07	02	01	0019	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pengujian Kelainan
1	3	07	02	01	0020	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
1	3	07	02	01	0021	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Rumah Tahanan
1	3	07	02	01	0022	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Krematorium

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	07	02	01	0023	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1	3	07	02	01	0024	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Persidangan
1	3	07	02	01	0025	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka
1	3	07	02	01	0026	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Penampung Sekam
1	3	07	02	01	0027	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
1	3	07	02	01	0028	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Industri
1	3	07	02	01	0029	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan
1	3	07	02	01	030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	07	02	01	0031	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peralatan Geofisika
1	3	07	02	01	0032	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum
1	3	07	02	01	0033	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir
1	3	07	02	01	0034	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pabrik
1	3	07	02	01	0035	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Stasiun Bus
1	3	07	02	01	0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman
1	3	07	02	01	0037	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
1	3	07	02	01	0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
1	3	07	02	01	0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
1	3	07	02	01	0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
1	3	07	02	01	0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
1	3	07	02	01	0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
1	3	07	02	01	0043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
1	3	07	02	01	0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
1	3	07	02	01	0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
1	3	07	02	01	0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Dalam Proses Penggolongannya
1	3	07	02	01	0047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung
1	3	07	02	01	0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
1	3	07	02	01	0049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
1	3	07	02	01	0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
1	3	07	02	02		Akumulasi Penyusutan Monumen
1	3	07	02	02	0001	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
1	3	07	02	01	0002	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
1	3	07	02	01	0003	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
1	3	07	02	01	0004	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
1	3	07	02	03		Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1	3	07	02	03	0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
1	3	07	02	03	0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
1	3	07	02	03	0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
1	3	07	02	03	0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
1	3	07	02	03	0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
1	3	07	02	04		Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas
1	3	07	02	04	0001	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi
1	3	07	02	04	0002	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
1	3	07	02	04	0003	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
1	3	07	02	04	0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar
1	3	07	02	04	0005	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Lainnya
1	3	07	03			Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1	3	07	03	01		Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan
1	3	07	03	01	0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional
1	3	07	03	01	0002	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Provinsi
1	3	07	03	01	0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten
1	3	07	03	01	0004	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kota
1	3	07	03	01	0005	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa
1	3	07	03	01	0006	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Tol
1	3	07	03	01	0007	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kereta Api
1	3	07	03	01	0008	Akumulasi Penyusutan Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	07	03	01	0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus
1	3	07	03	01	0010	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya
1	3	07	03	01	0011	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
1	3	07	03	01	0012	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
1	3	07	03	01	0013	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
1	3	07	03	01	0014	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
1	3	07	03	01	0015	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
1	3	07	03	01	0016	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
1	3	07	03	01	0017	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
1	3	07	03	01	0018	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1	3	07	03	01	0019	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
1	3	07	03	01	0020	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan penyeberangan
1	3	07	03	01	0021	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal
1	3	07	03	01	0022	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Pengukur
1	3	07	03	01	0023	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya
1	3	07	03	02		Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1	3	07	03	02	0001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi
1	3	07	03	02	0002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
1	3	07	03	02	0003	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi
1	3	07	03	02	0004	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi
1	3	07	03	02	0005	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi
1	3	07	03	02	0006	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi
1	3	07	03	02	0007	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi
1	3	07	03	02	0008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya
1	3	07	03	02	0009	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
1	3	07	03	02	0010	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1	3	07	03	02	0011	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
1	3	07	03	02	0012	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
1	3	07	03	02	0013	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
1	3	07	03	02	0014	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1	3	07	03	02	0015	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut

Kode Akun						Uraian Akun
1	3	07	03	02	0016	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
1	3	07	03	02	0017	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0018	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0019	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0020	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0021	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0022	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0023	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1	3	07	03	02	0024	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
1	3	07	03	02	0025	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
1	3	07	03	02	0026	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
1	3	07	03	02	0027	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
1	3	07	03	02	0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1	3	07	03	02	0029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
1	3	07	03	02	0030	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
1	3	07	03	02	0031	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
1	3	07	03	02	0032	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0033	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0034	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0035	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0036	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0037	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1	3	07	03	02	0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
1	3	07	03	02	0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
1	3	07	03	02	0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0042	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0043	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1	3	07	03	02	0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	07	03	02	0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor
1	3	07	03	02	0047	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Waduk Air Kotor
1	3	07	03	02	0048	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor
1	3	07	03	02	0049	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pengaman Air Kotor
1	3	07	03	02	0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor
1	3	07	03	02	0051	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Air Kotor Lainnya
1	3	07	03	03		Akumulasi Penyusutan Instalasi
1	3	07	03	03	0001	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
1	3	07	03	03	0002	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air
1	3	07	03	03	0003	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
1	3	07	03	03	0004	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
1	3	07	03	03	0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
1	3	07	03	03	0006	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik
1	3	03	03	07	0007	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Industri
1	3	07	03	03	0008	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Pertanian
1	3	07	03	03	0009	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Kotor Lainnya
1	3	07	03	03	0010	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1	3	07	03	03	0011	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non
1	3	07	03	03	0012	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
1	3	07	03	03	0013	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
1	3	07	03	03	0014	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
1	3	07	03	03	0015	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
1	3	07	03	03	0016	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
1	3	03	03	03	0017	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
1	3	07	03	03	0018	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1	3	07	03	03	0019	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
1	3	07	03	03	0020	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
1	3	07	03	03	0021	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1	3	07	03	03	0022	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1	3	07	03	03	0023	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit
1	3	07	03	03	0024	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1	3	07	03	03	0025	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Kode Akun						Uraian Akun
						(PLTP)
1	3	07	03	03	0026	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1	4	03	03	07	0027	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1	3	07	03	03	0028	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
1	3	07	03	03	0029	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
1	3	07	03	03	0030	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk
1	3	07	03	03	0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1	3	07	03	03	0032	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1	3	07	03	03	0033	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Lainnya
1	3	07	03	03	0034	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat
1	3	07	03	03	0035	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan Lainnya
1	3	07	03	03	0036	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
1	4	03	03	07	0037	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
1	4	03	03	03	0038	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
1	3	07	03	03	0039	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya
1	3	07	03	03	0040	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1	4	03	03	03	0041	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Reaktor Nuklir
1	4	03	03	03	0042	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
1	3	07	03	03	0043	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Lainnya
1	3	07	03	03	0044	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain
1	3	07	03	04		Akumulasi Penyusutan Jaringan
1	3	07	03	04	0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa
1	3	07	03	04	0002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi
1	3	07	03	04	0003	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Cabang Distribusi
1	3	07	03	04	0004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah
1	3	07	03	04	0005	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Air Minum Lainnya
1	3	07	03	04	0006	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
1	3	07	03	04	0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
1	3	07	03	04	0008	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
1	3	07	03	04	0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
1	3	07	03	04	0010	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
1	3	07	03	04	0011	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-
1	3	07	03	04	0012	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
1	3	07	03	04	0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
1	3	07	03	04	0014	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
1	3	07	03	04	0015	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
1	3	07	03	04	0016	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
1	3	07	03	04	0017	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan BBM
1	3	07	03	04	0018	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
1	3	07	04			Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya
1	3	07	04	01		Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
1	3	07	04	01	0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
1	3	07	04	02		Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
1	3	07	04	02	0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi
1	4					DANA CADANGAN
1	4	01				Dana Cadangan
1	4	01	01			Dana Cadangan
1	4	01	01	01		Dana Cadangan
1	4	01	01	01	0001	Dana Cadangan
1	5					ASET LAINNYA
1	5	01				Tagihan Jangka Panjang
1	5	01	01			Tagihan Penjualan Angsuran
1	5	01	01	01		Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
1	5	01	01	01	0001	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III.
1	5	01	01	02		Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1	5	01	01	02	0001	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas.
1	5	01	02			Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1	5	01	02	01		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	01	02	01	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1	5	01	02	02		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	01	02	02	0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
1	5	02				Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01			Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01		Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	02	01	01	0001	Sewa
1	5	02	01	01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan
1	5	02	01	01	0003	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
1	5	02	01	01	0004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
1	5	03				Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01			Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01		Aset Tidak Berwujud
1	5	03	01	01	0001	Goodwill
1	5	03	01	01	0002	Lisensi dan Franchise
1	5	03	03	01	0003	Hak Cipta
1	5	03	04	01	0004	Hak Paten
1	5	03	01	01	0005	Software
1	5	03	01	01	0006	Kajian
1	5	03	01	01	0007	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
1	5	03	01	01	0008	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
1	5	03	01	01	0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya
1	5	04				Aset Lain-lain
1	5	04	01			Aset Lain-lain
1	5	04	01	01		Aset Lain-lain
1	5	04	01	01	0001	Aset Rusak Berat/Usang
1	5	04	01	01	0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah
1	5	05				Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01			Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1	5	05	01	01	0001	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise

Kode Akun						Uraian Akun
1	5	05	01	01	0002	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta
1	5	05	01	01	0003	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
1	5	05	01	01	0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-
1	5	05	01	01	0005	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian
1	5	06				Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01			Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
1	5	06	01	01		Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	06	01	01	0001	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa
1	5	05	01	01	0002	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
1	5	05	01	01	0003	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
1	5	05	01	01	0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
2						KEWAJIBAN
2	1					KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2	1	01				Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	01	01			Utang Taspen
2	1	01	01	01		Utang Taspen
2	1	01	01	01	0001	Utang Taspen
2	1	01	02			Utang luran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01		Utang luran Jaminan Kesehatan
2	1	01	02	01	0001	Utang luran Jaminan Kesehatan
2	1	01	03			Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01		Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	03	01	0001	Utang luran Jaminan Kecelakaan Kerja
2	1	01	04			Utang luran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01		Utang luran Jaminan Kematian
2	1	01	04	01	0001	Utang luran Jaminan Kematian
2	1	01	05			Utang PPh Pusat
2	1	01	05	01		Utang PPh 21
2	1	01	05	01	0001	Utang PPh 21
2	1	01	05	02		Utang PPh 22
2	1	01	05	02	0001	Utang PPh 22
2	1	01	05	03		Utang PPh 23
2	1	01	05	03	0001	Utang PPh 23
2	1	01	05	04		Utang PPh 25
2	1	01	05	04	0001	Utang PPh 25
2	1	01	06			Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01		Utang PPN Pusat
2	1	01	06	01	0001	Utang PPN Pusat
2	1	01	07			Utang Taperum
2	1	01	07	01		Utang Taperum
2	1	01	07	01	0001	Utang Taperum
2	1	01	08			Utang luran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01		Utang luran Wajib Pegawai
2	1	01	08	01	0001	Utang luran Wajib Pegawai
2	1	02				Utang Bunga
2	1	02	01			Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat
2	1	02	01	01		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
2	1	02	01	01	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
2	1	02	01	02		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
2	1	02	01	02	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
2	1	02	01	03		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	03	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah
2	1	02	01	04		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	04	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang
2	1	02	01	05		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	02	01	05	0001	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	02	01	06		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	02	01	06	0001	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	02	02			Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain
2	1	02	02	01		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain- Jangka Pendek
2	1	02	02	01	0001	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain- Jangka Pendek
2	1	02	03			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	02	03	01		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	02	03	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	03	02		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	03	02	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	03	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	03	03	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	03	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	03	04	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	03	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	03	05	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	03	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	03	06	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	03	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank- Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	03	07	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	03	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	03	08	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	03	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	03	09	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	04			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	1	02	04	01		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	04	01	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	02	04	02		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	04	02	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	02	04	03		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	04	03	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	02	04	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	02	04	04	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek

Kode Akun					Uraian Akun	
2	1	02	04	05		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	04	05	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	02	04	06		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	04	06	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	02	04	07		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	04	07	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	02	04	08		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	04	08	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	02	04	09		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	04	09	0001	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	02	05			Utang Bunga kepada Masyarakat
2	1	02	05	01		Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	02	05	01	0001	Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	02	06			Utang Bunga melalui BLUD
2	1	02	06	01		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Pendek
2	1	02	06	01	0001	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Pendek
2	1	02	06	02		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	02	06	02	0001	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	02	06	03		Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	02	06	03	0001	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	03				Utang Pinjaman Jangka Pendek
2	1	03	01			Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah
2	1	03	01	01		Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
2	1	03	01	01	0001	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
2	1	03	02			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	03	02	01		Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	02	01	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	02	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	02	02	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	02	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	02	03	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	03			Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	03	03	01		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	03	01	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
2	1	03	03	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	03	02	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
2	1	03	03	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	03	03	0001	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
2	1	03	04			Utang Pinjaman melalui BLUD
2	1	03	04	01		Utang Pinjaman melalui BLUD
2	1	03	04	01	0001	Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
2	1	04				Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
2	1	04	01			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat
2	1	04	01	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	04	01	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	04	01	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	04	01	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	04	01	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	04	01	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	04	02			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	04	02	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka
2	1	04	02	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	02	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	02	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	02	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	02	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	02	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	02	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	02	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	02	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	02	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	02	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	03			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	04	03	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	03	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	1	04	03	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	03	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	1	04	03	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka

Kode Akun						Uraian Akun
						Menengah
2	1	04	03	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	1	04	03	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	03	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	1	04	03	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	03	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	1	04	03	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	03	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	1	04	04			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat
2	1	04	04	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2	1	04	04	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah
2	1	04	05			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD
2	1	04	05	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	04	05	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	04	05	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	04	05	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	05				Pendapatan Diterima Dimuka
2	1	05	01			Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2	1	05	01	01	0001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III
2	1	05	02			Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	05	02	01		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2	1	05	02	01	0001	Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III
2	1	05	03			Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	05	03	01	0001	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2	1	06				Utang Belanja
2	1	06	01			Utang Belanja Pegawai
2	1	06	01	01		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2	1	06	01	01	0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS
2	1	06	01	01	0002	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK
2	1	06	01	01	0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS
2	1	06	01	01	0004	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PPPK
2	1	06	01	01	0005	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PNS
2	1	06	01	01	0006	Utang Belanja Tunjangan Jabatan ASN- Tunjangan Jabatan PPPK
2	1	06	01	01	0007	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PNS
2	1	06	01	01	0008	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN- Tunjangan Fungsional PPPK
2	1	06	01	01	0009	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS
2	1	06	01	01	0010	Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN- Tunjangan Fungsional Umum PPPK
2	1	06	01	01	0011	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS
2	1	06	01	01	0012	Utang Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PPPK
2	1	06	01	01	0013	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS
2	1	06	01	01	0014	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN -Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2	1	06	01	01	0015	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PNS
2	1	06	01	01	0016	Utang Belanja Pembulatan Gaji ASN-Pembulatan Gaji PPPK
2	1	06	01	01	0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS
2	1	06	01	01	0018	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
2	1	06	01	01	0019	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
2	1	06	01	01	0020	Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN- Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
2	1	06	01	01	0021	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PNS
2	1	06	01	01	0022	Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN- Iuran Jaminan Kematian PPPK
2	1	06	01	01	0023	Utang Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
2	1	06	01	01	0024	Utang Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
2	1	06	01	02		Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN
2	1	06	01	02	0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
2	1	06	01	02	0002	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
2	1	06	01	02	0003	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
2	1	06	01	02	0004	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
2	1	06	01	02	0005	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
2	1	06	01	02	0006	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
2	1	06	01	02	0007	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
2	1	06	01	02	0008	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
2	1	06	01	02	0009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
2	1	06	01	02	0010	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
2	1	06	01	03		Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
2	1	06	01	03	0001	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas
2	1	06	01	03	0002	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0003	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0004	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
2	1	06	01	03	0005	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
2	1	06	01	03	0006	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel
2	1	06	01	03	0007	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran
2	1	06	01	03	0008	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan



Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	01	03	0009	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame
2	1	06	01	03	0010	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan
2	1	06	01	03	0011	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
2	1	06	01	03	0012	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
2	1	06	01	03	0013	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
2	1	06	01	03	0014	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN
2	1	06	01	03	0015	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan
2	1	06	01	03	0016	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2	1	06	01	03	0017	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan
2	1	06	01	03	0018	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2	1	06	01	03	0019	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
2	1	06	01	03	0020	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2	1	06	01	03	0021	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pasar
2	1	06	01	03	0022	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengujian Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	03	0023	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	01	03	0024	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penggantian Biaya Cetak Peta
2	1	06	01	03	0025	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
2	1	06	01	03	0026	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengolahan Limbah Cair
2	1	06	01	03	0027	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Tera/Tera Ulang
2	1	06	01	03	0028	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Pendidikan bagi ASN
2	1	06	01	03	0029	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	1	06	01	03	0030	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemakaian Kekayaan Daerah
2	1	06	01	03	0031	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2	1	06	01	03	0032	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyediaan Tempat Pelelangan
2	1	06	01	03	0033	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Terminal
2	1	06	01	03	0034	Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Khusus Parkir
2	1	06	01	03	0035	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
2	1	06	01	03	0036	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Rumah Potong Hewan
2	1	06	01	03	0037	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kepelabuhan
2	1	06	01	03	0038	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	1	06	01	03	0039	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penyeberangan Air
2	1	06	01	03	0040	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Penjualan Produksi Usaha Daerah
2	1	06	01	03	0041	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
2	1	06	01	03	0042	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	1	06	01	03	0043	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
2	1	06	01	03	0044	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Usaha Perikanan
2	1	06	01	03	0045	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pengendalian Lalu Lintas
2	1	06	01	03	0046	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
2	1	06	01	03	0047	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
2	1	06	01	03	0048	Utang Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD- Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
2	1	06	01	03	0049	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
2	1	06	01	03	0050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
2	1	06	01	03	0051	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
2	1	06	01	03	0052	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
2	1	06	01	03	0053	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
2	1	06	01	03	0054	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan
2	1	06	01	03	0055	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
2	1	06	01	04		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
2	1	06	01	04	0001	Utang Belanja Uang Representasi DPRD-Uang Representasi DPRD
2	1	06	01	04	0002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga DPRD- Tunjangan Keluarga DPRD
2	1	06	01	04	0003	Utang Belanja Tunjangan Beras DPRD- Tunjangan Beras DPRD
2	1	06	01	04	0004	Utang Belanja Uang Paket DPRD-Uang Paket DPRD
2	1	06	01	04	0005	Utang Belanja Belanja Tunjangan Jabatan DPRD-Tunjangan Jabatan DPRD
2	1	06	01	04	0006	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD-Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
2	1	06	01	04	0007	Utang Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
2	1	06	01	04	0008	Utang Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
2	1	06	01	04	0009	Utang Belanja Tunjangan Reses DPRD- Tunjangan Reses DPRD
2	1	06	01	04	0010	Utang Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
2	1	06	01	04	0011	Utang Belanja Pembulatan Gaji DPRD-Pembulatan Gaji DPRD
2	1	06	01	04	0012	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kesehatan DPRD
2	1	06	01	04	0013	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
2	1	06	01	04	0014	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Jaminan Kematian DPRD
2	1	06	01	04	0015	Utang Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD
2	1	06	01	04	0016	Utang Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD
2	1	06	01	04	0017	Utang Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD-Uang Jasa Pengabdian DPRD
2	1	06	01	05		Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0001	Utang Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH-Gaji Pokok KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0002	Utang Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH- Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0003	Utang Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH-Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0004	Utang Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH- Tunjangan Beras KDH/WKDH

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	01	05	0005	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH-Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0006	Utang Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH-Pembulatan Gaji KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0007	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH-luran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0008	Utang Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH-luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0009	Utang Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH-luran Jaminan Kematian KDH/WKDH
2	1	06	01	05	0010	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah- nsentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	05	0011	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	05	0012	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi
2	1	06	01	05	0013	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
2	1	06	01	05	0014	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
2	1	06	01	05	0015	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
2	1	06	01	05	0016	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
2	1	06	01	05	0017	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
2	1	06	01	05	0018	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
2	1	06	01	05	0019	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan
2	1	06	01	05	0020	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
2	1	06	01	05	0021	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
2	1	06	01	05	0022	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
2	1	06	01	05	0023	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	1	06	01	05	0024	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2	1	06	01	05	0025	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2	1	06	01	05	0026	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
2	1	06	01	05	0027	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2	1	06	01	05	0028	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengubuan Mayat
2	1	06	01	05	0029	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2	1	06	01	05	0030	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
2	1	06	01	05	0031	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
2	1	06	01	05	0032	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	01	05	0033	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
2	1	06	01	05	0034	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
2	1	06	01	05	0035	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
2	1	06	01	05	0036	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
2	1	06	01	05	0037	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
2	1	06	01	05	0038	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	1	06	01	05	0039	Utang Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
2	1	06	01	05	0040	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2	1	06	01	05	0041	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
2	1	06	01	05	0042	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
2	1	06	01	05	0043	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
2	1	06	01	05	0044	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
2	1	06	01	05	0045	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
2	1	06	01	05	0046	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
2	1	06	01	05	0047	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	1	06	01	05	0048	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air
2	1	06	01	05	0049	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
2	1	06	01	05	0050	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
2	1	06	01	05	0051	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2	1	06	01	05	0052	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
2	1	06	01	05	0053	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
2	1	06	01	05	0054	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	01	05	0055	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
2	1	06	01	06		Utang Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
2	1	06	01	06	0001	Utang Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD-Dana Operasional Pimpinan DPRD
2	1	06	01	06	0002	Utang Belanja Dana Operasional KDH/WKDH- Dana Operasional KDH/WKDH
2	1	06	02			Utang Belanja Barang dan Jasa
2	1	06	02	01		Utang Belanja Barang
2	1	06	02	01	0001	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
2	1	06	02	01	0002	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia
2	1	06	02	01	0004	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
2	1	06	02	01	0005	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Baku
2	1	06	02	01	0006	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia Nuklir
2	1	06	02	01	0007	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Barang dalam Proses
2	1	06	02	01	0008	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
2	1	06	02	01	0009	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
2	1	06	02	01	0010	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas
2	1	06	02	01	0011	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-
2	1	06	02	01	0012	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya
2	1	06	02	01	0013	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan
2	1	06	02	01	0014	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Besar
2	1	06	02	01	0015	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
2	1	06	02	01	0016	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
2	1	06	02	01	0017	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar
2	1	06	02	01	0018	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
2	1	06	02	01	0019	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Pertanian
2	1	06	02	01	0020	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Suku Cadang Alat Bengkel
2	1	06	02	01	0022	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang- Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
2	1	06	02	01	0023	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
2	1	06	02	01	0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
2	1	06	02	01	0025	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
2	1	06	02	01	0026	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
2	1	06	02	01	0027	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos
2	1	06	02	01	0028	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
2	1	06	02	01	0029	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
2	1	06	02	01	0030	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
2	1	06	02	01	0031	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
2	1	06	02	01	0032	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas
2	1	06	02	01	0033	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaprolap dan Perlengkapan Satwa
2	1	06	02	01	0034	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga
2	1	06	02	01	0035	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
2	1	06	02	01	0036	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
2	1	06	02	01	0037	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan
2	1	06	02	01	0038	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya
2	1	06	02	01	0039	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
2	1	06	02	01	0040	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
2	1	06	02	01	0041	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
2	1	06	02	01	0042	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
2	1	06	02	01	0043	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura
2	1	06	02	01	0044	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Pakan
2	1	06	02	01	0045	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
2	1	06	02	01	0046	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
2	1	06	02	01	0047	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
2	1	06	02	01	0048	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
2	1	06	02	01	0049	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
2	1	06	02	01	0050	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
2	1	06	02	01	0051	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
2	1	06	02	01	0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat
2	1	06	02	01	0053	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
2	1	06	02	01	0054	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Penambah Daya Tahan Tubuh
2	1	06	02	01	0055	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
2	1	06	02	01	0056	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
2	1	06	02	01	0057	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
2	1	06	02	01	0058	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
2	1	06	02	01	0059	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas KDH dan WKDH
2	1	06	02	01	0060	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
2	1	06	02	01	0061	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Harian (PSH)
2	1	06	02	01	0062	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
2	1	06	02	01	0063	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)
2	1	06	02	01	0064	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
2	1	06	02	01	0065	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Sipil Resmi (PSR)
2	1	06	02	01	0066	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Upacara (PDU)
2	1	06	02	01	0067	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Penyelamatan
2	1	06	02	01	0068	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Siaga
2	1	06	02	01	0069	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Teknik
2	1	06	02	01	0070	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Pelatihan Kerja
2	1	06	02	01	0071	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Laboratorium
2	1	06	02	01	0072	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Kerja Bengkel
2	1	06	02	01	0073	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian KORPRI
2	1	06	02	01	0074	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Adat Daerah
2	1	06	02	01	0075	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional
2	1	06	02	01	0076	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Olahraga
2	1	06	02	01	0077	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka
2	1	06	02	01	0078	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Jas/Safari

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	01	0079	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Jembatan Baja
2	1	06	02	01	0080	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
2	1	06	02	01	0081	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Peralatan
2	1	06	02	01	0082	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Komponen Rambu-Rambu
2	1	06	02	01	0083	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai- Komponen-Attachment
2	1	06	02	01	0084	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Komponen-Komponen Lainnya
2	1	06	02	01	0085	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
2	1	06	02	01	0086	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
2	1	06	02	01	0087	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Baja
2	1	06	02	01	0088	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Beton Pratekan
2	1	06	02	01	0089	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Fiber Glass
2	1	06	02	01	0090	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
2	1	06	02	01	0091	Utang Belanja Barang Tak Habis Pakai-Pipa-Pipa Lainnya
2	1	06	02	01	0092	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas
2	1	06	02	01	0093	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai- Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
2	1	06	02	01	0094	Utang Belanja Barang Bekas Dipakai-Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
2	1	06	02	02		Utang Belanja Jasa
2	1	06	02	02	0001	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
2	1	06	02	02	0002	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
2	1	06	02	02	0003	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
2	1	06	02	02	0004	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
2	1	06	02	02	0005	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pemberi
2	1	06	02	02	0006	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
2	1	06	02	02	0007	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Rohaniwan
2	1	06	02	02	0008	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
2	1	06	02	02	0009	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggara Ujian
2	1	06	02	02	0010	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
2	1	06	02	02	0011	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
2	1	06	02	02	0012	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2	1	06	02	02	0013	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan
2	1	06	02	02	0014	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan
2	1	06	02	02	0015	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium
2	1	06	02	02	0016	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
2	1	06	02	02	0017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
2	1	06	02	02	0018	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
2	1	06	02	02	0019	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Bencana
2	1	06	02	02	0020	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial
2	1	06	02	02	0021	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Sumber Daya Air
2	1	06	02	02	0022	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Perhubungan
2	1	06	02	02	0023	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
2	1	06	02	02	0024	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
2	1	06	02	02	0025	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
2	1	06	02	02	0026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi
2	1	06	02	02	0027	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Komputer
2	1	06	02	02	0028	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum
2	1	06	02	02	0029	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ahli
2	1	06	02	02	0030	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan
2	1	06	02	02	0031	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan
2	1	06	02	02	0032	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Caraka
2	1	06	02	02	0033	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir
2	1	06	02	02	0034	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Juru Masak
2	1	06	02	02	0035	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
2	1	06	02	02	0036	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Audit/Surveillance ISO
2	1	06	02	02	0037	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
2	1	06	02	02	0038	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tata Rias
2	1	06	02	02	0039	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
2	1	06	02	02	0040	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Operator Tiket
2	1	06	02	02	0041	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
2	1	06	02	02	0042	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
2	1	06	02	02	0043	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan
2	1	06	02	02	0044	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Perpustakaan
2	1	06	02	02	0045	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kearsipan
2	1	06	02	02	0046	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
2	1	06	02	02	0047	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara
2	1	06	02	02	0048	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi
2	1	06	02	02	0049	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
2	1	06	02	02	0050	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi
2	1	06	02	02	0051	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah
2	1	06	02	02	0052	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
2	1	06	02	02	0053	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengukuran Tanah
2	1	06	02	02	0054	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Jalan/Tol
2	1	06	02	02	0055	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan
2	1	06	02	02	0056	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
2	1	06	02	02	0057	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Operator Kapal
2	1	06	02	02	0058	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelaman
2	1	06	02	02	0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon
2	1	06	02	02	0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air
2	1	06	02	02	0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik
2	1	06	02	02	0062	Utang Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
2	1	06	02	02	0063	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
2	1	06	02	02	0064	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman
2	1	06	02	02	0065	Utang Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya
2	1	06	02	02	0066	Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan
2	1	06	02	02	0067	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	0068	Utang Belanja Jasa Kantor-Rekening Penerangan Jalan Umum
2	1	06	02	02	0069	Utang Belanja Jasa Kantor-Pengolahan Air Limbah
2	1	06	02	02	0070	Utang Belanja Jasa Kantor-Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan
2	1	06	02	02	0071	Utang Belanja Jasa Kantor-Lembur
2	1	06	02	02	0072	Utang Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
2	1	06	02	02	0073	Utang Belanja Jasa Kantor-Medical Check Up
2	1	06	02	02	0074	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
2	1	06	02	02	0075	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi- Kontribusi Jaminan Kesehatan PBI
2	1	06	02	02	0076	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3
2	1	06	02	02	0077	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPB dan BP Kelas 3
2	1	06	02	02	0078	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
2	1	06	02	02	0079	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
2	1	06	02	02	0080	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-luran Jaminan Kematian bagi Non ASN
2	1	06	02	02	0081	Utang Belanja luran Jaminan/Asuransi-Asuransi Barang Milik Daerah
2	1	06	02	02	0082	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
2	1	06	02	02	0083	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
2	1	06	02	02	0084	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
2	1	06	02	02	0085	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
2	1	06	02	02	0086	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
2	1	06	02	02	0087	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
2	1	06	02	02	0088	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Persil Lainnya
2	1	06	02	02	0089	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Basah
2	1	06	02	02	0090	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kering
2	1	06	02	02	0091	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Perkebunan
2	1	06	02	02	0092	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Hutan
2	1	06	02	02	0093	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Tandus
2	1	06	02	02	0094	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
2	1	06	02	02	0095	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertanian
2	1	06	02	02	0096	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Pertambangan
2	1	06	02	02	0097	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Non Persil Lainnya
2	1	06	02	02	0098	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Olahraga
2	1	06	02	02	0099	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Parkir
2	1	06	02	02	0100	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
2	1	06	02	02	0101	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
2	1	06	02	02	0102	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
2	1	06	02	02	0103	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan Terbang
2	1	06	02	02	0104	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Jalan
2	1	06	02	02	0105	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Air
2	1	06	02	02	0106	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
2	1	06	02	02	0107	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
2	1	06	02	02	0108	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
2	1	06	02	02	0109	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Makam
2	1	06	02	02	0110	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Taman
2	1	06	02	02	0111	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah untuk Latihan
2	1	06	02	02	0112	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Daerah Pertahanan
2	1	06	02	02	0113	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Lapangan PBB
2	1	06	02	02	0114	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Tanah Kampung
2	1	06	02	02	0115	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa <i>Emplasmant</i>
2	1	06	02	02	0116	Utang Belanja Sewa Tanah-Sewa Lapangan Lainnya
2	1	06	02	02	0117	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Tractor</i>
2	1	06	02	02	0118	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Grader</i>
2	1	06	02	02	0119	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Excavator</i>
2	1	06	02	02	0120	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Pile Driver</i>
2	1	06	02	02	0121	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Hauler</i>
2	1	06	02	02	0122	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Asphalt Equipment</i>
2	1	06	02	02	0123	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Compacting Equipment</i>
2	1	06	02	02	0124	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
2	1	06	02	02	0125	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Loader</i>
2	1	06	02	02	0126	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengangkat
2	1	06	02	02	0127	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses
2	1	06	02	02	0128	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Darat Lainnya
2	1	06	02	02	0129	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Dredger</i>
2	1	06	02	02	0130	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Floating Excavator</i>
2	1	06	02	02	0131	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Amphibi Dredger</i>
2	1	06	02	02	0132	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Tarik
2	1	06	02	02	0133	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Proses Apung
2	1	06	02	02	0134	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Besar Apung Lainnya
2	1	06	02	02	0135	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penarik
2	1	06	02	02	0136	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Feeder</i>
2	1	06	02	02	0137	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Compressor</i>
2	1	06	02	02	0138	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Electric Generating Set</i>
2	1	06	02	02	0139	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pompa
2	1	06	02	02	0140	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Bor
2	1	06	02	02	0141	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
2	1	06	02	02	0142	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
2	1	06	02	02	0143	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
2	1	06	02	02	0144	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
2	1	06	02	02	0145	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin <i>Tatoo</i>
2	1	06	02	02	0146	Utang belanja sewa peralatan dan mesin-sewa perlengkapan kebakaran hutan
2	1	06	02	02	0147	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Selam
2	1	06	02	02	0148	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
2	1	06	02	02	0149	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Intelijen
2	1	06	02	02	0150	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Lainnya
2	1	06	02	02	0151	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2	1	06	02	02	0152	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
2	1	06	02	02	0153	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	02	02	0154	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	0155	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
2	1	06	02	02	0156	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
2	1	06	02	02	0157	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tempur
2	1	06	02	02	0158	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
2	1	06	02	02	0159	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
2	1	06	02	02	0160	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	02	02	0161	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
2	1	06	02	02	0162	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
2	1	06	02	02	0163	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya
2	1	06	02	02	0164	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
2	1	06	02	02	0165	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	02	02	0166	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
2	1	06	02	02	0167	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
2	1	06	02	02	0168	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
2	1	06	02	02	0169	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
2	1	06	02	02	0170	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	02	02	0171	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
2	1	06	02	02	0172	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	02	02	0173	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kapal Terbang
2	1	06	02	02	0174	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
2	1	06	02	02	0175	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
2	1	06	02	02	0176	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
2	1	06	02	02	0177	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	02	02	0178	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel <i>Service</i>
2	1	06	02	02	0179	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
2	1	06	02	02	0180	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kayu
2	1	06	02	02	0181	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Khusus
2	1	06	02	02	0182	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Las
2	1	06	02	02	0183	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pabrik Es
2	1	06	02	02	0184	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
2	1	06	02	02	0185	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
2	1	06	02	02	0186	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	02	02	0187	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel <i>Service</i>
2	1	06	02	02	0188	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Pengangkat
2	1	06	02	02	0189	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas <i>Standard Tools</i>
2	1	06	02	02	0190	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
2	1	06	02	02	0191	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perkakas Bengkel Kerja
2	1	06	02	02	0192	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Besi
2	1	06	02	02	0193	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	02	02	0194	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	02	02	0195	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
2	1	06	02	02	0196	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
2	1	06	02	02	0197	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0198	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Universal
2	1	06	02	02	0199	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
2	1	06	02	02	0200	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
2	1	06	02	02	0201	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
2	1	06	02	02	0202	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kalibrasi
2	1	06	02	02	0203	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Oscilloscope</i>
2	1	06	02	02	0204	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Universal Tester</i>
2	1	06	02	02	0205	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur/Pembanding
2	1	06	02	02	0206	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lain-Lain
2	1	06	02	02	0207	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Timbangan/Biara
2	1	06	02	02	0208	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Anak Timbangan/Biara
2	1	06	02	02	0209	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Kering
2	1	06	02	02	0210	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Bahan Bangunan
2	1	06	02	02	0211	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Takaran Lainnya
2	1	06	02	02	0212	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0213	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Specific Set</i>
2	1	06	02	02	0214	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
2	1	06	02	02	0215	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Penglihatan
2	1	06	02	02	0216	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
2	1	06	02	02	0217	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
2	1	06	02	02	0218	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Lainnya
2	1	06	02	02	0219	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
2	1	06	02	02	0220	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
2	1	06	02	02	0221	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Panen
2	1	06	02	02	0222	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
2	1	06	02	02	0223	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	02	02	0224	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat <i>Processing</i>
2	1	06	02	02	0225	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pasca Panen
2	1	06	02	02	0226	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Produksi Perikanan
2	1	06	02	02	0227	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Peternakan
2	1	06	02	02	0228	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Lainnya
2	1	06	02	02	0229	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Ketik
2	1	06	02	02	0230	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
2	1	06	02	02	0231	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
2	1	06	02	02	0232	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
2	1	06	02	02	0233	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kantor Lainnya
2	1	06	02	02	0234	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mebel
2	1	06	02	02	0235	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Waktu
2	1	06	02	02	0236	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pembersih
2	1	06	02	02	0237	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendingin
2	1	06	02	02	0238	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Dapur
2	1	06	02	02	0239	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
2	1	06	02	02	0240	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	02	02	0241	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Kerja Pejabat
2	1	06	02	02	0242	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Meja Rapat Pejabat
2	1	06	02	02	0243	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Kerja Pejabat

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	0244	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Rapat Pejabat
2	1	06	02	02	0245	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
2	1	06	02	02	0246	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
2	1	06	02	02	0247	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
2	1	06	02	02	0248	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Audio
2	1	06	02	02	0249	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Video dan Film
2	1	06	02	02	0250	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Gambar
2	1	06	02	02	0251	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Cetak
2	1	06	02	02	0252	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
2	1	06	02	02	0253	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Studio Lainnya
2	1	06	02	02	0254	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
2	1	06	02	02	0255	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
2	1	06	02	02	0256	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
2	1	06	02	02	0257	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
2	1	06	02	02	0258	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
2	1	06	02	02	0259	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Sosial
2	1	06	02	02	0260	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat-Alat Sandi
2	1	06	02	02	0261	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Khusus
2	1	06	02	02	0262	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
2	1	06	02	02	0263	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Satelit
2	1	06	02	02	0264	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Komunikasi Lainnya
2	1	06	02	02	0265	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
2	1	06	02	02	0266	Peralatan Pemancar HF/SW
2	1	06	02	02	0267	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
2	1	06	02	02	0268	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar UHF
2	1	06	02	02	0269	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar SHF
2	1	06	02	02	0270	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena MF/MW
2	1	06	02	02	0271	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena HF/SW
2	1	06	02	02	0272	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena VHF/FM
2	1	06	02	02	0273	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena UHF
2	1	06	02	02	0274	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
2	1	06	02	02	0275	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
2	1	06	02	02	0276	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
2	1	06	02	02	0277	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
2	1	06	02	02	0278	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
2	1	06	02	02	0279	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Microwave</i> FPU
2	1	06	02	02	0280	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
2	1	06	02	02	0281	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
2	1	06	02	02	0282	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Dummy Load</i>
2	1	06	02	02	0283	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Switcher</i> Antena
2	1	06	02	02	0284	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Switcher</i> /Menara Antena
2	1	06	02	02	0285	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Feeder</i>
2	1	06	02	02	0286	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Humidity Control</i>
2	1	06	02	02	0287	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Program <i>Input Equipment</i>
2	1	06	02	02	0288	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
2	1	06	02	02	0289	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar LF
2	1	06	02	02	0290	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Pemancar MF+HF
2	1	06	02	02	0291	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
2	1	06	02	02	0292	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima
2	1	06	02	02	0293	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	02	02	0294	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	02	02	0295	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	02	02	0296	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	02	02	0297	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	02	02	0298	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	02	02	0299	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	02	02	0300	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	02	02	0301	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	02	02	0302	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	02	02	0303	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	02	02	0304	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	02	02	0305	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	02	02	0306	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
2	1	0	02	02	0307	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
2	1	06	02	02	0308	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
2	1	06	02	02	0309	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
2	1	06	02	02	0310	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
2	1	06	02	02	0311	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Tenaga
2	1	06	02	02	0312	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
2	1	06	02	02	0313	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
2	1	06	02	02	0314	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
2	1	06	02	02	0315	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
2	1	06	02	02	0316	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radar
2	1	06	02	02	0317	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
2	1	06	02	02	0318	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
2	1	06	02	02	0319	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
2	1	06	02	02	0320	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Umum
2	1	06	02	02	0321	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gigi
2	1	06	02	02	0322	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
2	1	06	02	02	0323	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah
2	1	06	02	02	0324	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
2	1	06	02	02	0325	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran THT
2	1	06	02	02	0326	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Mata
2	1	06	02	02	0327	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
2	1	06	02	02	0328	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
2	1	06	02	02	0329	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anak

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	0330	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
2	1	06	02	02	0331	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
2	1	06	02	02	0332	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
2	1	06	02	02	0333	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Jantung
2	1	06	02	02	0334	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
2	1	06	02	02	0335	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Patologi <i>Anatomy</i>
2	1	06	02	02	0336	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
2	1	06	02	02	0337	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
2	1	06	02	02	0338	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Nuklir
2	1	06	02	02	0339	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
2	1	06	02	02	0340	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
2	1	06	02	02	0341	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Lainnya
2	1	06	02	02	0342	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
2	1	06	02	02	0343	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICU
2	1	06	02	02	0344	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran ICCU
2	1	06	02	02	0345	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
2	1	06	02	02	0346	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
2	1	06	02	02	0347	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Anestesi
2	1	06	02	02	0348	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kedokteran Lainnya
2	1	06	02	02	0349	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
2	1	06	02	02	0350	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
2	1	06	02	02	0351	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
2	1	06	02	02	0352	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Olahraga
2	1	06	02	02	0353	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
2	1	06	02	02	0354	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
2	1	06	02	02	0355	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
2	1	06	02	02	0356	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
2	1	06	02	02	0357	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
2	1	06	02	02	0358	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
2	1	06	02	02	0359	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
2	1	06	02	02	0360	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
2	1	06	02	02	0361	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
2	1	06	02	02	0362	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cokok Tanam
2	1	06	02	02	0363	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
2	1	06	02	02	0364	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Umum
2	1	06	02	02	0365	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
2	1	06	02	02	0366	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kimia
2	1	06	02	02	0367	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Patologi
2	1	06	02	02	0368	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Immunologi
2	1	06	02	02	0369	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hematologi
2	1	06	02	02	0370	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Film
2	1	06	02	02	0371	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Makanan
2	1	06	02	02	0372	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Farmasi
2	1	06	02	02	0373	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	02	02	0374	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
2	1	06	02	02	0375	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
2	1	06	02	02	0376	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
2	1	06	02	02	0377	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pasir
2	1	06	02	02	0378	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0379	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
2	1	06	02	02	0380	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metalografi
2	1	06	02	02	0381	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
2	1	06	02	02	0382	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
2	1	06	02	02	0383	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0384	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Metrologi
2	1	06	02	02	0385	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
2	1	06	02	02	0386	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
2	1	06	02	02	0387	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
2	1	06	02	02	0388	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
2	1	0	02	02	0389	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
2	1	06	02	02	0390	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	02	02	0391	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	02	02	0392	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
2	1	06	02	02	0393	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0394	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	02	02	0395	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
2	1	06	02	02	0396	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
2	1	06	02	02	0397	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
2	1	06	02	02	0398	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
2	1	06	02	02	0399	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
2	1	06	02	02	0400	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
2	1	06	02	02	0401	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Biologi
2	1	06	02	02	0402	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Geofisika
2	1	06	02	02	0403	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0404	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
2	1	06	02	02	0405	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
2	1	06	02	02	0406	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
2	1	06	02	02	0407	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Kearsipan
2	1	06	02	02	0408	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
2	1	06	02	02	0409	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lain
2	1	06	02	02	0410	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
2	1	06	02	02	0411	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
2	1	06	02	02	0412	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
2	1	06	02	02	0413	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0414	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
2	1	06	02	02	0415	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Populasi
2	1	06	02	02	0416	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengukur Gelombang
2	1	06	02	02	0417	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya



Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	0418	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Analytical Instrument</i>
2	1	06	02	02	0419	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Instrument Probe/Sensor</i>
2	1	06	02	02	0420	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>General Laboratory Tool</i>
2	1	06	02	02	0421	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
2	1	06	02	02	0422	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Laboratory Safety Equipment</i>
2	1	06	02	02	0423	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
2	1	06	02	02	0424	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
2	1	06	02	02	0425	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
2	1	06	02	02	0426	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
2	1	06	02	02	0427	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
2	1	06	02	02	0428	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
2	1	06	02	02	0429	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
2	1	06	02	02	0430	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS
2	1	06	02	02	0431	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
2	1	06	02	02	0432	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
2	1	06	02	02	0433	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
2	1	06	02	02	0434	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
2	1	06	02	02	0435	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
2	1	06	02	02	0436	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
2	1	06	02	02	0437	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Kejuruan
2	1	06	02	02	0438	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga PAUD/TK
2	1	06	02	02	0439	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
2	1	06	02	02	0440	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Radiation Detector</i>
2	1	06	02	02	0441	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
2	1	06	02	02	0442	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0443	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Recorder Display</i>
2	1	06	02	02	0444	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>System/Power Supply</i>
2	1	06	02	02	0445	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Measuring/Testing Device</i>
2	1	06	02	02	0446	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Opto Electronics</i>
2	1	06	02	02	0447	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Accelerator</i>
2	1	06	02	02	0448	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Reactor Experimental System</i>
2	1	06	02	02	0449	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
2	1	06	02	02	0450	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
2	1	06	02	02	0451	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kesehatan Kerja
2	1	06	02	02	0452	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Proteksi Lingkungan
2	1	06	02	02	0453	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Meteorological Equipment</i>
2	1	06	02	02	0454	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumber Radiasi
2	1	06	02	02	0455	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
2	1	06	02	02	0456	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Radiation Application Equipment</i>
2	1	06	02	02	0457	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
2	1	06	02	02	0458	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Hidrologi
2	1	06	02	02	0459	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
2	1	06	02	02	0460	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
2	1	06	02	02	0461	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
2	1	06	02	02	0462	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
2	1	06	02	02	0463	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Laboratorium Lingkungan
2	1	06	02	02	0464	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Penunjang
2	1	06	02	02	0465	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
2	1	06	02	02	0466	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Towing Carriage</i>
2	1	06	02	02	0467	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Wave Generator and Absorber</i>
2	1	06	02	02	0468	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
2	1	06	02	02	0469	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Cavitation Tunnel</i>
2	1	06	02	02	0470	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Overhead Cranes</i>
2	1	06	02	02	0471	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Umum
2	1	0	02	02	0472	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
2	1	06	02	02	0473	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
2	1	06	02	02	0474	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
2	1	06	02	02	0475	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
2	1	06	02	02	0476	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
2	1	06	02	02	0477	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
2	1	06	02	02	0478	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
2	1	06	02	02	0479	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa MOB
2	1	06	02	02	0480	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Photo and Film Equipment</i>
2	1	06	02	02	0481	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
2	1	06	02	02	0482	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
2	1	06	02	02	0483	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
2	1	06	02	02	0484	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
2	1	06	02	02	0485	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
2	1	06	02	02	0486	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
2	1	06	02	02	0487	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
2	1	06	02	02	0488	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0489	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
2	1	06	02	02	0490	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
2	1	06	02	02	0491	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
2	1	06	02	02	0492	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
2	1	06	02	02	0520	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Jaringan
2	1	06	02	02	0521	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Personal Computer</i>
2	1	06	02	02	0522	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Komputer Unit Lainnya
2	1	06	02	02	0523	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Mainframe</i>
2	1	06	02	02	0524	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Mini Computer</i>

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	0525	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan <i>Personal Computer</i>
2	1	06	02	02	0526	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Jaringan
2	1	06	02	02	0527	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Komputer Lainnya
2	1	06	02	02	0528	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Optik
2	1	06	02	02	0529	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Ukur/Instrumen
2	1	06	02	02	0530	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
2	1	06	02	02	0531	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0532	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektronik/ <i>Electric</i>
2	1	06	02	02	0533	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Manual
2	1	06	02	02	0534	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
2	1	06	02	02	0535	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Tumbuk
2	1	06	02	02	0536	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bor Mesin Putar
2	1	06	02	02	0537	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
2	1	06	02	02	0538	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Bangka
2	1	06	02	02	0539	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pantek
2	1	06	02	02	0540	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Putar
2	1	06	02	02	0541	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Bantu
2	1	06	02	02	0542	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
2	1	06	02	02	0543	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Sumur Minyak
2	1	06	02	02	0544	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Pemboran
2	1	06	02	02	0545	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sumur Lainnya
2	1	06	02	02	0546	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa RIG
2	1	06	02	02	0547	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Produksi Lainnya
2	1	06	02	02	0548	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Minyak
2	1	06	02	02	0549	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan Air
2	1	06	02	02	0550	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan <i>Steam</i>
2	1	06	02	02	0551	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pengolahan <i>Wax</i>
2	1	06	02	02	0552	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
2	1	06	02	02	0553	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Mekanik
2	1	06	02	02	0554	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Elektrik
2	1	06	02	02	0555	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
2	1	06	02	02	0556	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Perawatan Sumur
2	1	06	02	02	0557	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Tes Unit
2	1	06	02	02	0558	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
2	1	06	02	02	0559	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Radiasi
2	1	06	02	02	0560	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Suara
2	1	06	02	02	0561	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Deteksi Lainnya
2	1	06	02	02	0562	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Baju Pengaman
2	1	06	02	02	0563	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Masker
2	1	06	02	02	0564	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Topi Kerja
2	1	06	02	02	0565	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sabuk Pengaman
2	1	06	02	02	0566	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Sepatu Lapangan
2	1	06	02	02	0567	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pelindung Lainnya
2	1	06	02	02	0568	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Penolong
2	1	06	02	02	0569	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Pendukung Pencarian
2	1	06	02	02	0570	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Bawah Air
2	1	06	02	02	0571	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat SAR Lainnya
2	1	06	02	02	0572	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
2	1	06	02	02	0573	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
2	1	06	02	02	0574	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
2	1	06	02	02	0575	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
2	1	06	02	02	0576	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
2	1	06	02	02	0577	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
2	1	06	02	02	0578	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
2	1	06	02	02	0579	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan
2	1	06	02	02	0580	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Percontohan
2	1	06	02	02	0581	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
2	1	06	02	02	0582	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
2	1	06	02	02	0583	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
2	1	06	02	02	0584	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
2	1	06	02	02	0585	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid-Solid Classifier</i>
2	1	06	02	02	0586	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
2	1	06	02	02	0587	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
2	1	06	02	02	0588	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
2	1	06	02	02	0589	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Leaching Equipment</i>
2	1	06	02	02	0590	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0591	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
2	1	06	02	02	0592	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
2	1	06	02	02	0593	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
2	1	06	02	02	0594	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
2	1	06	02	02	0595	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0596	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
2	1	06	02	02	0597	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
2	1	06	02	02	0598	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
2	1	06	02	02	0599	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Isotope Separation Equipment</i>
2	1	06	02	02	0600	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
2	1	06	02	02	0601	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Solid Material Handling Equipment</i>
2	1	06	02	02	0602	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
2	1	06	02	02	0603	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Heat Generating Equipment</i>
2	1	06	02	02	0604	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Heat Transfer Equipment</i>
2	1	06	02	02	0605	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Mechanical Process</i>
2	1	06	02	02	0606	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Chemical Reaction Equipment</i>
2	1	06	02	02	0607	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
2	1	06	02	02	0608	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Bersuar
2	1	06	02	02	0609	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu Tidak Bersuar
2	1	06	02	02	0610	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
2	1	06	02	02	0611	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Runway/Threshold Light</i>

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	0612	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
2	1	06	02	02	0613	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Approach Light</i>
2	1	06	02	02	0614	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
2	1	06	02	02	0615	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa <i>Signal</i>
2	1	06	02	02	0616	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa
2	1	06	02	02	0617	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
2	1	06	02	02	0618	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
2	1	06	02	02	0619	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
2	1	06	02	02	0620	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Atletik
2	1	06	02	02	0621	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Permainan
2	1	06	02	02	0622	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Senam
2	1	06	02	02	0623	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Air
2	1	06	02	02	0624	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Udara
2	1	06	02	02	0625	Utang Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
2	1	06	02	02	0626	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Kantor
2	1	06	02	02	0627	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gudang
2	1	0	02	02	0628	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
2	1	06	02	02	0629	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Instalasi
2	1	06	02	02	0630	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
2	1	06	02	02	0631	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Kesehatan
2	1	06	02	02	0632	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
2	1	06	02	02	0633	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
2	1	06	02	02	0634	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
2	1	06	02	02	0635	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
2	1	06	02	02	0636	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
2	1	06	02	02	0637	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
2	1	06	02	02	0638	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
2	1	06	02	02	0639	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
2	1	06	02	02	0640	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
2	1	06	02	02	0641	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
2	1	06	02	02	0642	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Museum
2	1	06	02	02	0643	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
2	1	06	02	02	0644	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
2	1	06	02	02	0645	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
2	1	06	02	02	0646	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Rumah Tahanan
2	1	06	02	02	0647	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Krematorium
2	1	06	02	02	0648	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
2	1	06	02	02	0649	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Persidangan
2	1	06	02	02	0650	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Terbuka
2	1	06	02	02	0651	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Penampung Sekam
2	1	06	02	02	0652	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2	1	06	02	02	0653	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Industri
2	1	06	02	02	0654	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
2	1	06	02	02	0655	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	02	02	0656	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
2	1	06	02	02	0657	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Fasilitas Umum
2	1	06	02	02	0658	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Parkir
2	1	06	02	02	0659	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Pabrik
2	1	06	02	02	0660	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Stasiun Bus
2	1	06	02	02	0661	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Taman
2	1	06	02	02	0662	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	02	02	0663	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan I
2	1	06	02	02	0664	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan II
2	1	06	02	02	0665	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara Golongan III
2	1	06	02	02	0666	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
2	1	06	02	02	0667	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Asrama
2	1	06	02	02	0668	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Hotel
2	1	06	02	02	0669	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Motel
2	1	06	02	02	0670	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Flat/Rumah Susun
2	1	06	02	02	0671	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
2	1	06	02	02	0672	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Panti Asuhan
2	1	06	02	02	0673	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Apartemen
2	1	06	02	02	0674	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Rumah Tidak Bersusun
2	1	06	02	02	0675	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
2	1	06	02	02	0676	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi
2	1	06	02	02	0677	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu
2	1	06	02	02	0678	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Peninggalan
2	1	06	02	02	0679	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
2	1	06	02	02	0680	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
2	1	06	02	02	0681	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
2	1	06	02	02	0682	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
2	1	06	02	02	0683	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa
2	1	06	02	02	0684	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
2	1	06	02	02	0685	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
2	1	06	02	02	0686	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
2	1	06	02	02	0687	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
2	1	06	02	02	0688	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Pagar
2	1	06	02	02	0689	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
2	1	06	02	02	0690	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Nasional
2	1	06	02	02	0691	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Provinsi
2	1	06	02	02	0692	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Kabupaten
2	1	06	02	02	0693	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Kota
2	1	06	02	02	0694	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Desa
2	1	06	02	02	0695	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Tol
2	1	06	02	02	0696	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Kereta Api
2	1	06	02	02	0697	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	02	02	0698	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	0699	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jalan Lainnya
2	1	06	02	02	0700	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
2	1	06	02	02	0701	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
2	1	06	02	02	0702	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
2	1	06	02	02	0703	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Kota
2	1	06	02	02	0704	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Desa
2	1	06	02	02	0705	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Tol
2	1	06	02	02	0706	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
2	1	06	02	02	0707	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	02	02	0708	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
2	1	06	02	02	0709	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan penyeberangan
2	1	06	02	02	0710	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
2	1	0	02	02	0711	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan Pengukur
2	1	06	02	02	0712	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jembatan Lainnya
2	1	06	02	02	0713	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Irigasi
2	1	06	02	02	0714	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
2	1	06	02	02	0715	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
2	1	06	02	02	0716	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
2	1	06	02	02	0717	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
2	1	06	02	02	0718	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
2	1	06	02	02	0719	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Irigasi
2	1	06	02	02	0720	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
2	1	06	02	02	0721	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
2	1	06	02	02	0722	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
2	1	06	02	02	0723	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
2	1	06	02	02	0724	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
2	1	06	02	02	0725	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
2	1	06	02	02	0726	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
2	1	06	02	02	0727	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
2	1	06	02	02	0728	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
2	1	06	02	02	0729	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0730	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0731	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0732	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0733	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0734	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-
2	1	06	02	02	0735	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
2	1	06	02	02	0736	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
2	1	06	02	02	0737	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
2	1	06	02	02	0738	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	02	02	0739	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	02	02	0740	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
2	1	06	02	02	0741	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
2	1	06	02	02	0742	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
2	1	06	02	02	0743	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
2	1	06	02	02	0744	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0745	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0746	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0747	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0748	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0749	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	02	0750	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
2	1	06	02	02	0751	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
2	1	06	02	02	0752	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	02	0753	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	02	0754	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	02	0755	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	02	0756	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	02	0757	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	02	02	0758	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
2	1	06	02	02	0759	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
2	1	06	02	02	0760	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
2	1	06	02	02	0761	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
2	1	06	02	02	0762	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
2	1	06	02	02	0763	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
2	1	06	02	02	0764	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Permukaan
2	1	06	02	02	0765	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
2	1	06	02	02	0766	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
2	1	06	02	02	0767	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
2	1	06	02	02	0768	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	02	02	0769	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
2	1	06	02	02	0770	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Buangan Industri
2	1	06	02	02	0771	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
2	1	06	02	02	0772	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
2	1	06	02	02	0773	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
2	1	06	02	02	0774	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
2	1	06	02	02	0775	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Bangunan Penampung Sampah
2	1	06	02	02	0776	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
2	1	06	02	02	0777	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
						Percontohan
2	1	06	02	02	0778	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
2	1	06	02	02	0779	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
2	1	06	02	02	0780	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-
2	1	06	02	02	0781	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
2	1	06	02	02	0782	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
2	1	06	02	02	0783	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
2	1	06	02	02	0784	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
2	1	06	02	02	0785	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
2	1	06	02	02	0786	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
2	1	06	02	02	0787	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
2	1	06	02	02	0788	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
2	1	06	02	02	0789	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
2	1	06	02	02	0790	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
2	1	06	02	02	0791	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
2	1	06	02	02	0792	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
2	1	06	02	02	0793	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
2	1	06	02	02	0794	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
2	1	06	02	02	0795	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
2	1	06	02	02	0796	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
2	1	06	02	02	0797	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
2	1	06	02	02	0798	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
2	1	06	02	02	0799	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gardu Gas
2	1	06	02	02	0800	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
2	1	06	02	02	0801	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Gas
2	1	06	02	02	0802	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Gas Lainnya
2	1	06	02	02	0803	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
2	1	06	02	02	0804	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
2	1	06	02	02	0805	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
2	1	06	02	02	0806	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
2	1	06	02	02	0807	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Instalasi Lain
2	1	06	02	02	0808	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Pembawa
2	1	06	02	02	0809	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Induk Distribusi
2	1	06	02	02	0810	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Cabang Distribusi
2	1	06	02	02	0811	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
2	1	06	02	02	0812	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
2	1	06	02	02	0813	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi-
2	1	06	02	02	0814	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Distribusi
2	1	06	02	02	0815	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Listrik Lainnya
2	1	06	02	02	0816	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
2	1	06	02	02	0817	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
2	1	06	02	02	0818	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
2	1	06	02	02	0819	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan dengan Media Udara
2	1	06	02	02	0820	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Telepon Lainnya
2	1	06	02	02	0821	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
2	1	06	02	02	0822	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Pipa Distribusi
2	1	06	02	02	0823	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Pipa Dinas
2	1	06	02	02	0824	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan BBM
2	1	06	02	02	0825	Utang Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi- Sewa Jaringan Gas Lainnya
2	1	06	02	02	0826	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Umum
2	1	06	02	02	0827	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Filsafat
2	1	06	02	02	0828	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Agama
2	1	06	02	02	0829	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Sosial
2	1	06	02	02	0830	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Bahasa
2	1	06	02	02	0831	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
2	1	06	02	02	0832	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
2	1	06	02	02	0833	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
2	1	06	02	02	0834	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
2	1	06	02	02	0835	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Serial
2	1	06	02	02	0836	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Buku Laporan
2	1	06	02	02	0837	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
2	1	06	02	02	0838	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Audio Visual
2	1	06	02	02	0839	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )
2	1	0	02	02	0840	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
2	1	06	02	02	0841	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Bahan Kartografi
2	1	06	02	02	0842	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
2	1	06	02	02	0843	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan dan Ukiran
2	1	06	02	02	0844	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
2	1	06	02	02	0845	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa
2	1	06	02	02	0846	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Musik Lainnya
2	1	06	02	02	0847	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
2	1	06	02	02	0848	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya
2	1	06	02	02	0849	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i>
2	1	06	02	02	0850	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i> Lainnya
2	1	06	02	02	0851	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Tarscalt</i>
2	1	06	02	02	0852	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Tarscalt</i> Lainnya
2	1	06	02	02	0853	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Musik
2	1	06	02	02	0854	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Lukisan
2	1	06	02	02	0855	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Peraga Kesenian
2	1	06	02	02	0856	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
2	1	06	02	02	0857	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Pahatan
2	1	06	02	02	0858	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	0859	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Kerajinan
2	1	06	02	02	0860	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
2	1	06	02	02	0861	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa
2	1	06	02	02	0862	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
2	1	06	02	02	0863	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengaman
2	1	06	02	02	0864	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Pengangkut
2	1	06	02	02	0865	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Kebun Binatang
2	1	06	02	02	0866	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Piaraan Lainnya
2	1	06	02	02	0867	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Potong
2	1	06	02	02	0868	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Perah
2	1	06	02	02	0869	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Unggas
2	1	06	02	02	0870	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ternak Lainnya
2	1	06	02	02	0871	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Lainnya
2	1	06	02	02	0872	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Ikan Budidaya
2	1	06	02	02	0873	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Crustea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0874	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0875	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0876	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0877	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0878	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0879	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
2	1	06	02	02	0880	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
2	1	06	02	02	0881	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
2	1	06	02	02	0882	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman
2	1	06	02	02	0883	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Hewan Koleksi
2	1	06	02	02	0884	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Biota Perairan Koleksi
2	1	06	02	02	0885	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Tanaman Koleksi
2	1	06	02	02	0886	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Mikroba Koleksi
2	1	06	02	02	0887	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Batuan Koleksi
2	1	06	02	02	0888	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Fosil
2	1	06	02	02	0889	Utang Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya-Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
2	1	06	02	02	0890	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
2	1	06	02	02	0891	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
2	1	06	02	02	0892	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
2	1	06	02	02	0893	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
2	1	06	02	02	0894	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
2	1	06	02	02	0895	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
2	1	06	02	02	0896	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
2	1	06	02	02	0897	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
2	1	06	02	02	0898	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
2	1	06	02	02	0899	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
2	1	06	02	02	0900	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
2	1	06	02	02	0901	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
2	1	06	02	02	0902	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
2	1	06	02	02	0903	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
2	1	06	02	02	0904	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
2	1	06	02	02	0905	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan <i>Landscap</i>
2	1	06	02	02	0906	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
2	1	06	02	02	0907	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
2	1	06	02	02	0908	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
2	1	06	02	02	0909	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
2	1	06	02	02	0910	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
2	1	06	02	02	0911	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
2	1	06	02	02	0912	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
2	1	06	02	02	0913	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan
2	1	06	02	02	0914	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
2	1	06	02	02	0915	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
2	1	06	02	02	0916	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
2	1	06	02	02	0917	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
2	1	06	02	02	0918	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	0919	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
2	1	06	02	02	0920	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
2	1	06	02	02	0921	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
2	1	06	02	02	0922	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
2	1	06	02	02	0923	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
2	1	06	02	02	0924	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
2	1	06	02	02	0925	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
2	1	06	02	02	0926	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
2	1	06	02	02	0927	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
2	1	06	02	02	0928	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
2	1	06	02	02	0929	Utang Belanja Jasa Konstruksi-Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu
2	1	06	02	02	0930	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
2	1	06	02	02	0931	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
2	1	06	02	02	0932	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika
2	1	06	02	02	0933	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan
2	1	06	02	02	0934	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi
2	1	06	02	02	0935	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan
2	1	06	02	02	0936	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
2	1	06	02	02	0937	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
2	1	06	02	02	0938	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-
2	1	06	02	02	0939	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
2	1	06	02	02	0940	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
2	1	06	02	02	0941	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
2	1	06	02	02	0942	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa
2	1	06	02	02	0943	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
2	1	06	02	02	0944	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
2	1	06	02	02	0945	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
2	1	06	02	02	0946	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-
2	1	06	02	02	0947	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataaan
2	1	06	02	02	0948	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan
2	1	06	02	02	0949	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan
2	1	06	02	02	0950	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataaan
2	1	06	02	02	0951	Utang Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi- Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataaan
2	1	06	02	02	0952	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi
2	1	06	02	02	0953	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan
2	1	06	02	02	0954	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
2	1	06	02	02	0955	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum
2	1	06	02	02	0956	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
2	1	06	02	02	0957	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
2	1	06	02	02	0958	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
2	1	06	02	02	0959	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
2	1	06	02	02	0960	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan
2	1	06	02	02	0961	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
2	1	06	02	02	0962	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Konservasi Energi
2	1	06	02	02	0963	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
2	1	06	02	02	0964	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
2	1	06	02	02	0965	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
2	1	06	02	02	0966	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kawasan
2	1	06	02	02	0967	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata
2	1	06	02	02	0968	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan
2	1	06	02	02	0969	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Masyarakat
2	1	06	02	02	0970	Utang Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)-Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat
2	1	06	02	02	0971	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S1
2	1	06	02	02	0972	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S2
2	1	06	02	02	0973	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS- Beasiswa Tugas Belajar S3

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	0974	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan
2	1	06	02	02	0975	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,
2	1	06	02	02	0976	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Bimbingan Teknis
2	1	06	02	02	0977	Utang Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Diklat Kepemimpinan
2	1	06	02	02	0978	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0979	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0980	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	0981	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
2	1	06	02	02	0982	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi
2	1	06	02	02	0983	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
2	1	06	02	02	0984	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
2	1	06	02	02	0985	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
2	1	06	02	02	0986	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
2	1	06	02	02	0987	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
2	1	06	02	02	0988	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
2	1	06	02	02	0989	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak
2	1	06	02	02	0990	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
2	1	06	02	02	0991	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	1	06	02	02	0992	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
2	1	06	02	02	0993	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
2	1	06	02	02	0994	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
2	1	06	02	02	0995	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
2	1	06	02	02	0996	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
2	1	06	02	02	0997	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2	1	06	02	02	0998	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh- Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
2	1	06	02	02	0999	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah oleh Pegawai-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	02	1000	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	02	02	1001	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak
2	1	06	02	02	1002	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku
2	1	06	02	02	1003	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
2	1	06	02	02	1004	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif
2	1	06	02	02	1005	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
2	1	06	02	02	1006	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	1	06	02	02	1007	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
2	1	06	02	02	1008	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah -Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
2	1	06	02	02	1009	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
2	1	06	02	02	1010	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
2	1	06	02	02	1011	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
2	1	06	02	02	1012	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
2	1	06	02	02	1013	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
2	1	06	02	02	1014	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
2	1	06	02	02	1015	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
2	1	06	02	02	1016	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif
2	1	06	02	02	1017	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah



Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	02	1018	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
2	1	06	02	02	1019	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat
2	1	06	02	02	1020	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
2	1	06	02	02	1021	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
2	1	06	02	02	1022	Utang Belanja Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
2	1	06	02	02	1023	Utang Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
2	1	06	02	03		Utang Belanja Pemeliharaan
2	1	06	02	03	0001	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
2	1	06	02	03	0002	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah
2	1	06	02	03	0003	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Industri
2	1	06	02	03	0004	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
2	1	06	02	03	0005	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
2	1	06	02	03	0006	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
2	1	06	02	03	0007	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Persil Lainnya
2	1	06	02	03	0008	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Basah
2	1	06	02	03	0009	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kering
2	1	06	02	03	0010	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Perkebunan
2	1	06	02	03	0011	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Hutan
2	1	06	02	03	0012	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Tandus
2	1	06	02	03	0013	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
2	1	06	02	03	0014	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertanian
2	1	06	02	03	0015	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Pertambangan
2	1	06	02	03	0016	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Non Persil Lainnya
2	1	06	02	03	0017	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Olahraga
2	1	06	02	03	0018	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Parkir
2	1	06	02	03	0019	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
2	1	06	02	03	0020	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
2	1	06	02	03	0021	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
2	1	06	02	03	0022	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan Terbang
2	1	06	02	03	0023	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Jalan
2	1	06	02	03	0024	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Air
2	1	06	02	03	0025	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Instalasi
2	1	06	02	03	0026	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Jaringan
2	1	06	02	03	0027	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
2	1	06	02	03	0028	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Makam
2	1	06	02	03	0029	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Taman
2	1	06	02	03	0030	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah untuk Latihan
2	1	06	02	03	0031	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Daerah Pertahanan
2	1	06	02	03	0032	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Lapangan PBB
2	1	06	02	03	0033	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Tanah Kampung
2	1	06	02	03	0034	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- <i>Emplasmnt</i>
2	1	06	02	03	0035	Utang Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah-Lapangan Lainnya
2	1	06	02	03	0036	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Tractor</i>
2	1	06	02	03	0037	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Grader</i>
2	1	06	02	03	0038	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Excavator</i>
2	1	06	02	03	0039	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Pile Driver</i>
2	1	06	02	03	0040	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Hauler</i>
2	1	06	02	03	0041	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Asphalt Equipment</i>
2	1	06	02	03	0042	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Compacting Equipment</i>
2	1	06	02	03	0043	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
2	1	06	02	03	0044	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
2	1	06	02	03	0045	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
2	1	06	02	03	0046	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Proses
2	1	06	02	03	0047	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Darat Lainnya
2	1	06	02	03	0048	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Dredger</i>
2	1	06	02	03	0049	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Floating Excavator</i>
2	1	06	02	03	0050	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Amphibi Dredger</i>
2	1	06	02	03	0051	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Kapal Tarik
2	1	06	02	03	0052	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar-Mesin Proses Apung
2	1	06	02	03	0053	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Besar Apung Lainnya
2	1	06	02	03	0054	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Penarik
2	1	06	02	03	0055	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Feeder</i>
2	1	06	02	03	0056	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Compressor</i>
2	1	06	02	03	0057	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Electric Generating Set</i>
2	1	06	02	03	0058	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pompa
2	1	06	02	03	0059	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin Bor
2	1	06	02	03	0060	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Unit Pemeliharaan Lapangan
2	1	06	02	03	0061	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Pengolahan Air Kotor
2	1	06	02	03	0062	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Pembangkit Uap Air Panas- <i>Steam Generator</i>
2	1	06	02	03	0063	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar- <i>Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan</i>
2	1	06	02	03	0064	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Mesin <i>Tatoo</i>
2	1	06	02	03	0065	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Perlengkapan Kebakaran Hutan
2	1	06	02	03	0066	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Selam
2	1	06	02	03	0067	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Alat Besar-Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
2	1	06	02	03	0068	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Peralatan Intelijen
2	1	06	02	03	0069	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu Lainnya
2	1	06	02	03	0070	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2	1	06	02	03	0071	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	03	0072	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	02	03	0073	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
2	1	06	02	03	0074	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
2	1	06	02	03	0075	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus
2	1	06	02	03	0076	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tempur
2	1	06	02	03	0077	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel
2	1	06	02	03	0078	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
2	1	06	02	03	0079	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	02	03	0080	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
2	1	06	02	03	0081	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
2	1	06	02	03	0082	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	02	03	0083	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
2	1	06	02	03	0084	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	02	03	0085	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
2	1	06	02	03	0086	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
2	1	06	02	03	0087	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
2	1	06	02	03	0088	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
2	1	06	02	03	0089	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	02	03	0090	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
2	1	06	02	03	0091	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	02	03	0092	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kapal Terbang
2	1	06	02	03	0093	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
2	1	06	02	03	0094	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
2	1	06	02	03	0095	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
2	1	06	02	03	0096	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	02	03	0097	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
2	1	06	02	03	0098	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
2	1	06	02	03	0099	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kayu
2	1	06	02	03	0100	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Khusus
2	1	06	02	03	0101	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Las
2	1	06	02	03	0102	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Pabrik Es
2	1	06	02	03	0103	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
2	1	06	02	03	0104	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
2	1	06	02	03	0105	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	02	03	0106	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Servis
2	1	06	02	03	0107	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
2	1	06	02	03	0108	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Standar ( <i>Standard Tools</i> )
2	1	06	02	03	0109	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
2	1	06	02	03	0110	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Perkakas Bengkel Kerja
2	1	06	02	03	0111	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Besi
2	1	06	02	03	0112	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	02	03	0113	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	02	03	0114	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
2	1	06	02	03	0115	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Bengkel Khusus Peladam
2	1	06	02	03	0116	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
2	1	06	02	03	0117	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Universal
2	1	06	02	03	0118	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Inteligensia
2	1	06	02	03	0119	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
2	1	06	02	03	0120	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
2	1	06	02	03	0121	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Kalibrasi
2	1	06	02	03	0122	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan- <i>Oscilloscope</i>
2	1	06	02	03	0123	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan- <i>Universal Tester</i>
2	1	06	02	03	0124	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur/Pembanding
2	1	06	02	03	0125	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lain-Lain
2	1	06	02	03	0126	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Timbangan/Biara
2	1	06	02	03	0127	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Anak Timbangan/Biara
2	1	06	02	03	0128	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Kering
2	1	06	02	03	0129	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Bahan Bangunan
2	1	06	02	03	0130	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Takaran Lainnya
2	1	06	02	03	0131	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
2	1	06	02	03	0132	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan- <i>Specific Set</i>
2	1	06	02	03	0133	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Keadaan Alam
2	1	06	02	03	0134	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Penglihatan
2	1	06	02	03	0135	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
2	1	06	02	03	0136	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
2	1	06	02	03	0137	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Ukur Lainnya
2	1	06	02	03	0138	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
2	1	06	02	03	0139	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
2	1	06	02	03	0140	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Panen
2	1	06	02	03	0141	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	03	0142	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	02	03	0143	Utang Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat <i>Processing</i>
2	1	06	02	03	0144	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pasca Panen
2	1	06	02	03	0145	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Produksi Perikanan
2	1	06	02	03	0146	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat-Alat Peternakan
2	1	06	02	03	0147	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan Lainnya
2	1	06	02	03	0148	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Ketik
2	1	06	02	03	0149	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
2	1	06	02	03	0150	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Reproduksi (Penggandaan)
2	1	06	02	03	0151	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
2	1	06	02	03	0152	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya
2	1	06	02	03	0153	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mbel
2	1	06	02	03	0154	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
2	1	06	02	03	0155	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih
2	1	06	02	03	0156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
2	1	06	02	03	0157	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Dapur
2	1	06	02	03	0158	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
2	1	06	02	03	0159	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	02	03	0160	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Kerja Pejabat
2	1	06	02	03	0161	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja Rapat Pejabat
2	1	06	02	03	0162	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Kerja Pejabat
2	1	06	02	03	0163	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Rapat Pejabat
2	1	06	02	03	0164	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
2	1	06	02	03	0165	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Kursi Tamu di Ruang Pejabat
2	1	06	02	03	0166	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Lemari dan Arsip Pejabat
2	1	06	02	03	0167	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Audio
2	1	06	02	03	0168	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Video dan Film
2	1	06	02	03	0169	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Studio Gambar
2	1	06	02	03	0170	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Cetak
2	1	06	02	03	0171	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
2	1	06	02	03	0172	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Studio Lainnya
2	1	06	02	03	0173	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
2	1	06	02	03	0174	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio SSB
2	1	06	02	03	0175	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
2	1	06	02	03	0176	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Radio VHF
2	1	06	02	03	0177	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Radio UHF
2	1	06	02	03	0178	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Sosial
2	1	06	02	03	0179	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat-Alat Sandi
2	1	06	02	03	0180	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Komunikasi Khusus
2	1	06	02	03	0181	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
2	1	06	02	03	0182	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Satelit
2	1	06	02	03	0183	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi Lainnya
2	1	06	02	03	0184	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-
2	1	06	02	03	0185	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW
2	1	06	02	03	0186	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM
2	1	06	02	03	0187	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF
2	1	06	02	03	0188	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF
2	1	06	02	03	0189	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW
2	1	06	02	03	0190	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW
2	1	06	02	03	0191	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM
2	1	06	02	03	0192	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena UHF
2	1	06	02	03	0193	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola
2	1	06	02	03	0194	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
2	1	06	02	03	0195	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
2	1	06	02	03	0196	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan

Kode Akun						Uraian Akun
						<i>Translator VHF/UHF</i>
2	1	06	02	03	0197	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan <i>Translator UHF/VHF</i>
2	1	06	02	03	0198	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Microwave FPU</i>
2	1	06	02	03	0199	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
2	1	06	02	03	0200	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan <i>Microwave TVRO</i>
2	1	06	02	03	0201	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan <i>Dummy Load</i>
2	1	06	02	03	0202	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Switcher Antena</i>
2	1	06	02	03	0203	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Switcher/Menara Antena</i>
2	1	06	02	03	0204	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Feeder</i>
2	1	06	02	03	0205	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
2	1	06	02	03	0206	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Program <i>Input Equipment</i>
2	1	06	02	03	0207	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF
2	1	06	02	03	0208	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
2	1	06	02	03	0209	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Unit Pemancar MF+HF
2	1	06	02	03	0210	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF
2	1	06	02	03	0211	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima
2	1	06	02	03	0212	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	02	03	0213	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	02	03	0214	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	02	03	0215	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	02	03	0216	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	02	03	0217	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	02	03	0218	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	02	03	0219	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	02	03	0220	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	02	03	0221	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	02	03	0222	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	02	03	0223	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	02	03	0224	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	02	03	0225	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	02	03	0226	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
2	1	06	02	03	0227	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
2	1	06	02	03	0228	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
2	1	06	02	03	0229	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
2	1	06	02	03	0230	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Sumber Tenaga
2	1	06	02	03	0231	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
2	1	06	02	03	0232	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
2	1	06	02	03	0233	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
2	1	06	02	03	0234	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
2	1	06	02	03	0235	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan danMesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Radar
2	1	06	02	03	0236	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Pengatur Telekomunikasi
2	1	06	02	03	0237	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
2	1	06	02	03	0238	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
2	1	06	02	03	0239	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum
2	1	06	02	03	0240	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gigi
2	1	06	02	03	0241	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
2	1	06	02	03	0242	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah
2	1	06	02	03	0243	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	05	02	03	0244	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran THT
2	1	06	02	03	0245	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Mata
2	1	06	02	03	0246	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
2	1	06	02	03	0247	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
2	1	06	02	03	0248	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anak
2	1	06	02	03	0249	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Poliklinik
2	1	06	02	03	0250	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
2	1	06	02	03	0251	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
2	1	06	02	03	0252	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jantung
2	1	06	02	03	0253	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
2	1	06	02	03	0254	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Patologi Anatomy
2	1	06	02	03	0255	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Transfusi Darah
2	1	06	02	03	0256	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Radioterapi
2	1	06	02	03	0257	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Nuklir
2	1	06	02	03	0258	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
2	1	06	02	03	0259	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Gawat Darurat
2	1	06	02	03	0260	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Jiwa
2	1	06	02	03	0261	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
2	1	06	02	03	0262	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICU
2	1	06	02	03	0263	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran ICCU
2	1	06	02	03	0264	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Bedah Jantung
2	1	06	02	03	0265	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Traditional Medicine
2	1	06	02	03	0266	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Anestesi
2	1	06	02	03	0267	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Lainnya
2	1	06	02	03	0268	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Laut
2	1	06	02	03	0269	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Matra Udara
2	1	06	02	03	0270	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Kepolisian
2	1	06	02	03	0271	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Olahraga
2	1	06	02	03	0272	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat
2	1	06	02	03	0273	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
2	1	06	02	03	0274	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
2	1	06	02	03	0275	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
2	1	06	02	03	0276	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
2	1	06	02	03	0277	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
2	1	06	02	03	0278	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
2	1	06	02	03	0279	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
2	1	06	02	03	0280	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
2	1	06	02	03	0281	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam
2	1	06	02	03	0282	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
2	1	06	02	03	0283	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
2	1	06	02	03	0284	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium
2	1	06	02	03	0285	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
2	1	06	02	03	0286	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
2	1	06	02	03	0287	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
2	1	06	02	03	0288	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
2	1	06	02	03	0289	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
2	1	06	02	03	0290	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
2	1	06	02	03	0291	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
2	1	06	02	03	0292	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	02	03	0293	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
2	1	06	02	03	0294	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
2	1	06	02	03	0295	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
2	1	06	02	03	0296	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
2	1	06	02	03	0297	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
2	1	06	02	03	0298	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
2	1	06	02	03	0299	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	03	0300	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
2	1	06	02	03	0301	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
2	1	06	02	03	0302	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
2	1	06	02	03	0303	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
2	1	06	02	03	0304	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
2	1	05	02	03	0305	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
2	1	06	02	03	0306	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
2	1	06	02	03	0307	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
2	1	06	02	03	0308	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
2	1	06	02	03	0309	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	02	03	0310	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	02	03	0311	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
2	1	06	02	03	0312	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
2	1	06	02	03	0313	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	02	03	0314	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
2	1	06	02	03	0315	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
2	1	06	02	03	0316	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa
2	1	06	02	03	0317	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
2	1	06	02	03	0318	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
2	1	06	02	03	0319	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
2	1	06	02	03	0320	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
2	1	06	02	03	0321	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
2	1	06	02	03	0322	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
2	1	06	02	03	0323	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
2	1	06	02	03	0324	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
2	1	06	02	03	0325	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium
2	1	06	02	03	0326	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
2	1	06	02	03	0327	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
2	1	06	02	03	0328	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
2	1	06	02	03	0329	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
2	1	06	02	03	0330	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
2	1	06	02	03	0331	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
2	1	06	02	03	0332	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
2	1	06	02	03	0333	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
2	1	06	02	03	0334	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
2	1	06	02	03	0335	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
2	1	06	02	03	0336	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
2	1	06	02	03	0337	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Analytical Instrument
2	1	06	02	03	0338	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Instrument Probe/Sensor
2	1	06	02	03	0339	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-General Laboratory Tool
2	1	06	02	03	0340	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Glassware Plastic/Utensils
2	1	06	02	03	0341	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratory Safety Equipment
2	1	06	02	03	0342	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
2	1	06	02	03	0343	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
2	1	06	02	03	0344	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
2	1	06	02	03	0345	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
2	1	06	02	03	0346	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
2	1	06	02	03	0347	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
2	1	06	02	03	0348	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
2	1	06	02	03	0349	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS
2	1	06	02	03	0350	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
2	1	06	02	03	0351	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
2	1	06	02	03	0352	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
2	1	06	02	03	0353	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
2	1	06	02	03	0354	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
2	1	06	02	03	0355	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
2	1	06	02	03	0356	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Kejuruan
2	1	06	02	03	0357	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga PAUD/TK

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	03	0358	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
2	1	06	02	03	0359	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Detector
2	1	06	02	03	0360	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Modular Counting and Scientific Electronic
2	1	06	02	03	0361	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Assembly/Counting System
2	1	06	02	03	0362	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Recorder Display
2	1	06	02	03	0363	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-System/Power Supply
2	1	06	02	03	0364	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Measuring/Testing Device
2	1	06	02	03	0365	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Opto Electronics
2	1	06	02	03	0366	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Accelerator
2	1	06	02	03	0367	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Reactor Experimental System
2	1	06	02	03	0368	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
2	1	06	02	03	0369	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Ukur Fisika Kesehatan
2	1	06	02	03	0370	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Kesehatan Kerja
2	1	06	02	03	0371	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Proteksi Lingkungan
2	1	06	02	03	0372	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Meteorological Equipment
2	1	06	02	03	0373	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Sumber Radiasi
2	1	06	02	03	0374	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
2	1	06	02	03	0375	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application Equipment
2	1	06	02	03	0376	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Non Destructive Test (NDT) Device
2	1	06	02	03	0377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Hidrologi
2	1	06	02	03	0377	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya
2	1	06	02	03	0378	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
2	1	06	02	03	0379	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kualitas Udara
2	1	06	02	03	0380	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
2	1	06	02	03	0381	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Laboratorium Lingkungan
2	1	06	02	03	0382	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Penunjang
2	1	06	02	03	0383	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
2	1	06	02	03	0384	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Towing Carriage
2	1	06	02	03	0385	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Wave Generator and Absorber
2	1	06	02	03	0386	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Data Acquisition and Analyzing System
2	1	06	02	03	0387	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Cavitation Tunnel
2	1	06	02	03	0388	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Overhead Cranes
2	1	06	02	03	0389	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Umum
2	1	06	02	03	0390	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Model Ship Workshop
2	1	06	02	03	0391	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Propeller Model Workshop
2	1	06	02	03	0392	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Mechanical Workshop
2	1	06	02	03	0393	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop
2	1	06	02	03	0394	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Painting Shop
2	1	05	02	03	0395	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop
2	1	06	02	03	0396	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Pemesinan:Electrical Workshop
2	1	06	02	03	0397	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-MOB
2	1	06	02	03	0398	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Photo and Film Equipment
2	1	06	02	03	0399	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Peralatan Laboratorium
2	1	06	02	03	0400	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
2	1	06	02	03	0401	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
2	1	06	02	03	0402	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
2	1	06	02	03	0403	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
2	1	06	02	03	0404	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
2	1	06	02	03	0405	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
2	1	06	02	03	0406	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Natus
2	1	06	02	03	0407	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
2	1	06	02	03	0408	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
2	1	06	02	03	0409	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Perangkat
2	1	06	02	03	0410	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
2	1	06	02	03	0438	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Jaringan
2	1	06	02	03	0439	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Personal Computer
2	1	06	02	03	0440	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya
2	1	06	02	03	0441	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Mainframe
2	1	06	02	03	0442	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Mini Computer
2	1	06	02	03	0443	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Personal Computer
2	1	06	02	03	0444	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Jaringan
2	1	06	02	03	0445	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Peralatan Komputer Lainnya
2	1	06	02	03	0446	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Optik
2	1	06	02	03	0447	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Ukur/Instrumen
2	1	06	02	03	0448	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
2	1	06	02	03	0449	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Mekanik
2	1	06	02	03	0450	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Elektronik/Electric
2	1	06	02	03	0451	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Manual

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	03	0452	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
2	1	06	02	03	0453	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Tumbuk
2	1	06	02	03	0454	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bor Mesin Putar
2	1	06	02	03	0455	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
2	1	06	02	03	0456	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Bangka
2	1	06	02	03	0457	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Pantek
2	1	06	02	03	0458	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Putar
2	1	06	02	03	0459	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Peralatan Bantu
2	1	06	02	03	0460	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
2	1	06	02	03	0461	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Peralatan Sumur Minyak
2	1	06	02	03	0462	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Pemboran
2	1	06	02	03	0463	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur Lainnya
2	1	06	02	03	0464	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-RIG
2	1	06	02	03	0465	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi Lainnya
2	1	06	02	03	0466	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
2	1	06	02	03	0467	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
2	1	06	02	03	0468	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Steam
2	1	06	02	03	0469	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Alat Pengolahan Wax
2	1	06	02	03	0470	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
2	1	06	02	03	0471	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
2	1	06	02	03	0472	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
2	1	06	02	03	0473	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
2	1	06	02	03	0474	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Perawatan Sumur
2	1	06	02	03	0475	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Tes Unit
2	1	06	02	03	0476	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Produksi Lainnya
2	1	06	02	03	0477	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Radiasi
2	1	06	02	03	0478	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Suara
2	1	06	02	03	0479	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi Lainnya
2	1	06	02	03	0480	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Baju Pengaman
2	1	06	02	03	0481	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Masker
2	1	06	02	03	0482	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Topi Kerja
2	1	06	02	03	0483	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sabuk Pengaman
2	1	06	02	03	0484	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Sepatu Lapangan
2	1	06	02	03	0485	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung Lainnya
2	1	06	02	03	0486	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Penolong
2	1	06	02	03	0487	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pendukung
2	1	06	02	03	0488	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Bawah Air
2	1	06	02	03	0489	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR Lainnya
2	1	06	02	03	0490	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
2	1	06	02	03	0491	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
2	1	06	02	03	0492	Utang Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
2	1	06	02	03	0493	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
2	1	06	02	03	0494	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
2	1	06	02	03	0495	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Ukur Peralatan Fasklektrik
2	1	06	02	03	0496	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
2	1	06	02	03	0497	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan
2	1	06	02	03	0498	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Percontohan
2	1	06	02	03	0499	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
2	1	06	02	03	0500	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid Contractor Equipment
2	1	06	02	03	0501	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Mixing Equipment
2	1	06	02	03	0502	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Screening Equipment
2	1	06	02	03	0503	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid Classifier
2	1	06	02	03	0504	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid Mixing Equipment
2	1	06	02	03	0505	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Crystallization Equipment
2	1	06	02	03	0506	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Ion Exchange Absortion Equipment
2	1	06	02	03	0507	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Leaching Equipment
2	1	06	02	03	0508	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gravity Sedimentation Equipment
2	1	06	02	03	0509	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid Filtering Equipment
2	1	06	02	03	0510	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
2	1	06	02	03	0511	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment
2	1	06	02	03	0512	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment
2	1	06	02	03	0513	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment



Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	03	0514	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Separation Equipment
2	1	06	02	03	0515	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Distillation Equipment
2	1	06	02	03	0516	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid Separation Equipment
2	1	06	02	03	0517	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
2	1	06	02	03	0518	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
2	1	06	02	03	0519	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
2	1	06	02	03	0520	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
2	1	06	02	03	0521	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
2	1	06	02	03	0522	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
2	1	06	02	03	0523	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
2	1	06	02	03	0524	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
2	1	06	02	03	0525	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
2	1	06	02	03	0526	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Bersuar
2	1	06	02	03	0527	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Tidak Bersuar
2	1	06	02	03	0528	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
2	1	06	02	03	0529	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Runway/Threshold Light
2	1	06	02	03	0530	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
2	1	06	02	03	0531	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Approach Light
2	1	06	02	03	0532	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Runway Identification Light (REILS)
2	1	06	02	03	0533	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Signal
2	1	06	02	03	0534	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Flood Lights
2	1	06	02	03	0535	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
2	1	06	02	03	0536	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
2	1	06	02	03	0537	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
2	1	06	02	03	0538	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
2	1	06	02	03	0539	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
2	1	06	02	03	0540	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
2	1	06	02	03	0541	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
2	1	06	02	03	0542	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
2	1	06	02	03	0543	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
2	1	06	02	03	0544	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Kantor
2	1	06	02	03	0545	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gudang
2	1	06	02	03	0546	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung
2	1	06	02	03	0547	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Instalasi
2	1	06	02	03	0548	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Laboratorium
2	1	06	02	03	0549	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan
2	1	06	02	03	0550	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Oseanarium/Observatorium
2	1	06	02	03	0551	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
2	1	06	02	03	0552	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
2	1	06	02	03	0553	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
2	1	06	02	03	0554	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
2	1	06	02	03	0555	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar
2	1	06	02	03	0556	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
2	1	06	02	03	0557	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Garasi/Pool
2	1	06	02	03	0558	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
2	1	06	02	03	0559	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Perpustakaan
2	1	06	02	03	0560	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Museum
2	1	06	02	03	0561	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan/Bandara
2	1	06	02	03	0562	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pengujian Kelayakan
2	1	06	02	03	0563	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
2	1	06	02	03	0564	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Rumah Tahanan
2	1	06	02	03	0565	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Krematorium
2	1	06	02	03	0566	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
2	1	06	02	03	0567	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Persidangan
2	1	06	02	03	0568	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Terbuka
2	1	06	02	03	0569	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Penampung Sekam
2	1	06	02	03	0570	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2	1	06	02	03	0571	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan
2	1	06	02	03	0572	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peternakan/Perikanan
2	1	06	02	03	0573	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat

Kode Akun						Uraian Akun
						Kerja Lainnya
2	1	06	02	03	0574	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Peralatan Geofisika
2	1	06	02	03	0575	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Umum
2	1	06	02	03	0576	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Parkir
2	1	05	02	03	0577	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Pabrik
2	1	06	02	03	0578	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Stasiun Bus
2	1	06	02	03	0579	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman
2	1	06	02	03	0580	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	02	03	0581	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan I
2	1	06	02	03	0582	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan II
2	1	06	02	03	0583	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara Golongan III
2	1	06	02	03	0584	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan
2	1	06	02	03	0585	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Asrama
2	1	06	02	03	0586	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Hotel
2	1	06	02	03	0587	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Motel
2	1	06	02	03	0588	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Flat/Rumah Susun
2	1	06	02	03	0589	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
2	1	06	02	03	0590	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Panti Asuhan
2	1	06	02	03	0591	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Apartemen
2	1	06	02	03	0592	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Rumah Tidak Bersusun
2	1	06	02	03	0593	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
2	1	06	02	03	0594	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi
2	1	06	02	03	0595	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Tugu
2	1	06	02	03	0596	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Bangunan Peninggalan
2	1	06	02	03	0597	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
2	1	06	02	03	0598	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
2	1	06	02	03	0599	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
2	1	06	02	03	0600	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Telekomunikasi
2	1	06	02	03	0601	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Pengawas
2	1	06	02	03	0602	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
2	1	06	02	03	0603	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Administrasi
2	1	06	02	03	0604	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
2	1	06	02	03	0605	Utang Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
2	1	06	02	03	0606	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti-Pagar
2	1	06	02	03	0607	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas Lainnya
2	1	06	02	03	0608	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Nasional
2	1	06	02	03	0609	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Provinsi
2	1	06	02	03	0610	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kabupaten
2	1	06	02	03	0611	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kota
2	1	06	02	03	0612	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Desa
2	1	06	02	03	0613	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Tol
2	1	06	02	03	0614	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Kereta Api
2	1	06	02	03	0615	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	02	03	0616	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Khusus
2	1	06	02	03	0617	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan Lainnya
2	1	06	02	03	0618	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
2	1	06	02	03	0619	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
2	1	06	02	03	0620	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
2	1	06	02	03	0621	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
2	1	06	02	03	0622	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
2	1	06	02	03	0623	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
2	1	06	02	03	0624	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
2	1	06	02	03	0625	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	02	03	0626	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
2	1	06	02	03	0627	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Penyeberangan
2	1	06	02	03	0628	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
2	1	06	02	03	0629	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Pengukur
2	1	06	02	03	0630	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya
2	1	06	02	03	0631	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Irigasi
2	1	06	02	03	0632	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Irigasi
2	1	06	02	03	0633	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Irigasi
2	1	06	02	03	0634	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Irigasi
2	1	06	02	03	0635	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Irigasi
2	1	06	02	03	0636	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Irigasi
2	1	06	02	03	0637	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,
2	1	06	02	03	0638	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi Lainnya
2	1	06	02	03	0639	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pasang

Kode Akun						Uraian Akun
						Surut
2	1	06	02	03	0640	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
2	1	06	02	03	0641	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa
2	1	06	02	03	0642	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Saluran Pembuang Pasang Surut
2	1	06	02	03	0643	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pasang Surut
2	1	06	02	03	0644	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
2	1	06	02	03	0645	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah Pasang Surut
2	1	06	02	03	0646	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
2	1	06	02	03	0647	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0648	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0649	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0650	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0651	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0652	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
2	1	06	02	03	0653	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah
2	1	06	02	03	0654	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
2	1	06	02	03	0655	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
2	1	06	02	03	0656	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	02	03	0657	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	02	03	0658	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
2	1	06	02	03	0659	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
2	1	06	02	03	0660	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
2	1	06	02	03	0661	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
2	1	06	02	03	0662	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0663	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0664	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0665	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0666	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0667	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
2	1	06	02	03	0668	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Sawah
2	1	06	02	03	0669	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
2	1	06	02	03	0670	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0671	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0672	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0673	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0674	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
2	1	06	02	03	0675	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	02	03	0676	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembawa Air Kotor
2	1	06	02	03	0677	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Waduk Air Kotor
2	1	06	02	03	0678	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pembuang Air Kotor
2	1	06	02	03	0679	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Pengaman Air Kotor
2	1	06	02	03	0680	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,
2	1	06	02	03	0681	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor Lainnya
2	1	06	02	03	0682	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Permukaan
2	1	06	02	03	0683	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Sumber/Mata Air
2	1	06	02	03	0684	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dalam
2	1	06	02	03	0685	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Tanah Dangkal
2	1	06	02	03	0686	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	02	03	0687	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Domestik
2	1	06	02	03	0688	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Industri
2	1	06	02	03	0689	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Buangan Pertanian
2	1	06	02	03	0690	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Kotor Lainnya
2	1	06	02	03	0691	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
2	1	06	02	03	0692	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
2	1	06	02	03	0693	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,
2	1	06	02	03	0694	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	02	03	0695	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
2	1	06	02	03	0696	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
2	1	06	02	03	0697	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
2	1	06	02	03	0698	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
2	1	06	02	03	0699	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
2	1	06	02	03	0700	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
2	1	06	02	03	0701	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan,
2	1	06	02	03	0702	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
2	1	06	02	03	0703	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
2	1	06	02	03	0704	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
2	1	06	02	03	0705	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
2	1	06	02	03	0706	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
2	1	06	02	03	0707	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
2	1	06	02	03	0708	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
2	1	06	02	03	0709	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
2	1	06	02	03	0710	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
2	1	06	02	03	0711	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Induk
2	1	06	02	03	0712	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
2	1	06	02	03	0713	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
2	1	06	02	03	0714	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
2	1	06	02	03	0715	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan di Darat
2	1	06	02	03	0716	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pertahanan Lainnya
2	1	06	02	03	0717	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gardu Gas
2	1	06	02	03	0718	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Jaringan Pipa Gas
2	1	06	02	03	0719	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Gas
2	1	06	02	03	0720	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Gas Lainnya
2	1	06	02	03	0721	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
2	1	06	02	03	0722	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Reaktor Nuklir
2	1	06	02	03	0723	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
2	1	06	02	03	0724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengaman Lainnya
2	1	06	02	03	0724	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain
2	1	06	02	03	0725	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pembawa
2	1	06	02	03	0726	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Induk Distribusi
2	1	06	02	03	0727	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Cabang Distribusi
2	1	06	02	03	0728	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Sambungan ke Rumah
2	1	06	02	03	0729	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Air Minum Lainnya
2	1	06	02	03	0730	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Transmisi
2	1	06	02	03	0731	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Distribusi
2	1	06	02	03	0732	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Listrik Lainnya
2	1	06	02	03	0733	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di atas Tanah
2	1	06	02	03	0734	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di bawah Tanah
2	1	06	02	03	0735	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon di dalam Air
2	1	06	02	03	0736	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan dengan Media Udara
2	1	06	02	03	0737	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Telepon Lainnya
2	1	06	02	03	0738	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Gas Transmisi
2	1	06	02	03	0739	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Distribusi
2	1	06	02	03	0740	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Pipa Dinas
2	1	06	02	03	0741	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan BBM
2	1	06	02	03	0742	Utang Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan-Jaringan Gas Lainnya
2	1	06	02	03	0743	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Umum
2	1	06	02	03	0744	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Filsafat
2	1	06	02	03	0745	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Agama
2	1	06	02	03	0746	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Sosial
2	1	06	02	03	0747	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Bahasa
2	1	06	02	03	0748	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
2	1	06	02	03	0749	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
2	1	06	02	03	0750	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
2	1	06	02	03	0751	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
2	1	06	02	03	0752	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Serial
2	1	06	02	03	0753	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Buku Laporan
2	1	06	02	03	0754	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
2	1	06	02	03	0755	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Audio Visual
2	1	06	02	03	0756	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )
2	1	06	02	03	0757	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
2	1	06	02	03	0758	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
2	1	06	02	03	0759	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Naskah (Manuskrip)/Asli
2	1	06	02	03	0760	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Lukisan dan Ukiran
2	1	06	02	03	0761	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
2	1	06	02	03	0762	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Musik

Kode Akun						Uraian Akun							
2	1	06	02	03	0763	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Musik Lainnya							
2	1	06	02	03	0764	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )							
2	1	06	02	03	0765	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan-Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya							
2	1	06	02	03	0766	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>							
2	1	06	02	03	0767	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya							
2	1	06	02	03	0768	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt</i>							
2	1	06	02	03	0769	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt</i> Lainnya							
2	1	06	02	03	0770	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak							
2	1	06	02	03	0771	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Lukisan							
2	1	06	02	03	0772	Utang	Belanja	Pemeliharaan	Aset	Tetap	Lainnya-	Barang	Bercorak
2	1	06	02	03	0773	Utang	Belanja	Pemeliharaan	Aset	Tetap	Lainnya-	Barang	Bercorak
2	1	06	02	03	0774	Utang	Belanja	Pemeliharaan	Aset	Tetap	Lainnya-	Barang	Bercorak
2	1	06	02	03	0775	Utang	Belanja	Pemeliharaan	Aset	Tetap	Lainnya-	Barang	Bercorak
2	1	06	02	03	0776	Utang	Belanja	Pemeliharaan	Aset	Tetap	Lainnya-	Barang	Bercorak
2	1	06	02	03	0777	Utang	Belanja	Pemeliharaan	Aset	Tetap	Lainnya-	Barang	Bercorak
2	1	06	02	03	0778	Utang	Belanja	Pemeliharaan	Aset	Tetap	Lainnya-	Barang	Bercorak
2	1	06	02	03	0779	Utang	Belanja	Pemeliharaan	Aset	Tetap	Lainnya-	Barang	Bercorak
2	1	06	02	03	0780	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Hewan-Hewan Pengaman							
2	1	06	02	03	0781	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Pengangkut							
2	1	06	02	03	0782	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Kebun Binatang							
2	1	06	02	03	0783	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Piaraan Lainnya							
2	1	06	02	03	0784	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Potong							
2	1	06	02	03	0785	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Perah							
2	1	06	02	03	0786	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Unggas							
2	1	06	02	03	0787	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Ternak Lainnya							
2	1	06	02	03	0788	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Hewan-Hewan Lainnya							
2	1	06	02	03	0789	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan-Ikan Budidaya							
2	1	06	02	03	0790	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan- <i>Crustacea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)							
2	1	06	02	03	0791	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-							
2	1	06	02	03	0792	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Coelenterata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)							
2	1	06	02	03	0793	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)							
2	1	06	02	03	0794	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)							
2	1	06	02	03	0795	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan- <i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-							
2	1	06	02	03	0796	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan- <i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)							
2	1	06	02	03	0797	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Biota Perairan- <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)							
2	1	06	02	03	0798	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan-Budidaya Biota Perairan Lainnya							
2	1	06	02	03	0799	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Tanaman-Tanaman							
2	1	06	02	03	0800	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi							
2	1	06	02	03	0801	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi							
2	1	06	02	03	0803	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi							
2	1	06	02	03	0804	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi							
2	1	06	02	03	0805	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi							
2	1	06	02	03	0806	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Fosil							
2	1	06	02	03	0807	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya- Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya							
2	1	06	02	03	0808	Utang Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya-Aset Dalam Renovasi-Aset Dalam Renovasi							
2	1	06	02	04		Utang Belanja Perjalanan Dinas							
2	1	06	02	04	0001	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa							
2	1	06	02	04	0002	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Tetap							
2	1	06	02	04	0003	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							
2	1	06	02	04	0004	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota							
2	1	06	02	04	0005	Utang Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri– Utang Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota							
2	1	06	02	04	0006	Utang Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri–Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri							
2	1	06	02	05		Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat							
2	1	06	02	05	0001	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan							
2	1	06	02	05	0002	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Penghargaan atas Suatu Prestasi							
2	1	06	02	05	0003	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Beasiswa							
2	1	06	02	05	0004	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat- Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan							
2	1	06	02	05	0005	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada							
2	1	06	02	05	0006	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain							
2	1	06	02	05	0007	Utang Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat							
2	1	06	03			Utang Belanja Bunga							
2	1	06	03	01		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Pusat							
2	1	06	03	01	0001	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah							

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	03	01	0002	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
2	1	06	03	01	0003	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
2	1	06	03	01	0004	Utang Belanja Bunga atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
2	1	06	03	01	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	1	06	03	01	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	1	06	03	02		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	03	02	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya-Jangka Pendek
2	1	06	03	03		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	03	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek
2	1	06	03	03	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
2	1	06	03	03	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
2	1	06	03	03	0004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
2	1	06	03	03	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah
2	1	06	03	03	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
2	1	06	03	03	0007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Pendek
2	1	06	03	03	0008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Menengah
2	1	06	03	03	0009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang
2	1	06	03	04		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
2	1	06	03	04	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Pendek
2	1	06	03	04	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Menengah
2	1	06	03	04	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMN-Jangka Panjang
2	1	06	03	04	0004	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Pendek
2	1	06	03	04	0005	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Menengah
2	1	06	03	04	0006	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada BUMD-Jangka Panjang
2	1	06	03	04	0007	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka pendek
2	1	06	03	04	0008	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada
2	1	06	03	04	0009	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Swasta-Jangka Panjang
2	1	06	03	05		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman kepada Masyarakat
2	1	06	03	05	0001	Utang Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
2	1	06	03	06		Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD
2	1	06	03	06	0001	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
2	1	06	03	06	0002	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
2	1	06	03	06	0003	Utang Belanja Bunga atas Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
2	1	06	04			Utang Belanja Subsidi
2	1	06	04	01		Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	06	04	01	0001	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2	1	06	04	02		Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2	1	06	04	02	0001	Utang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah/BUMD
2	1	06	04	03		Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
2	1	06	04	03	0001	Utang Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
2	1	06	04	04		Utang Belanja Subsidi kepada Koperasi
2	1	06	04	03	0001	Utang Belanja Subsidi kepada Koperasi
2	1	06	05			Utang Belanja Hibah
2	1	06	05	01		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	01	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
2	1	06	05	02		Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	02	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	06	05	03		Utang Belanja Hibah kepada BUMN
2	1	06	05	03	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMN
2	1	06	05	03	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMN
2	1	06	05	03	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
2	1	06	05	04		Utang Belanja Hibah kepada BUMD
2	1	06	05	04	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMD
2	1	06	05	04	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMD
2	1	06	05	04	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
2	1	06	05	05		Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
2	1	06	05	05	0001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	06	05	05	0002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	06	05	05	0003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan
2	1	06	05	05	0004	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
2	1	06	05	05	0005	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
2	1	06	05	05	0006	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
2	1	06	05	05	0007	Utang Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
2	1	06	05	05	0008	Utang Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
2	1	06	05	05	0009	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
2	1	06	05	05	0010	Utang Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
2	1	06	05	05	0011	Utang Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
2	1	06	05	05	0012	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
2	1	06	05	06		Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS
2	1	06	05	06	0001	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
2	1	06	05	06	0002	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
2	1	06	05	06	0003	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
2	1	06	05	06	0004	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
2	1	06	05	07		Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2	1	06	05	07	0001	Utang Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
2	1	06	06			Utang Belanja Modal Tanah
2	1	06	06	01		Utang Belanja Modal Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	06	01	0001	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
2	1	06	06	01	0002	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
2	1	06	06	01	0003	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri
2	1	06	06	01	0004	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
2	1	06	06	01	0005	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
2	1	06	06	01	0006	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
2	1	06	06	01	0007	Utang Belanja Modal Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya
2	1	06	06	01	0008	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Basah
2	1	06	06	01	0009	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Kering
2	1	06	06	01	0010	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Perkebunan
2	1	06	06	01	0011	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Hutan
2	1	06	06	01	0012	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Tandus
2	1	06	06	01	0013	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
2	1	06	06	01	0014	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertanian
2	1	06	06	01	0015	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Pertambangan
2	1	06	06	01	0016	Utang Belanja Modal Tanah non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
2	1	06	06	01	0017	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
2	1	06	06	01	0018	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
2	1	06	06	01	0019	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
2	1	06	06	01	0200	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
2	1	06	06	01	0021	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
2	1	06	06	01	0022	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
2	1	06	06	01	0023	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Jalan
2	1	06	06	01	0024	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
2	1	06	06	01	0025	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
2	1	06	06	01	0026	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
2	1	06	06	01	0027	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah
2	1	06	06	01	0028	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Makam
2	1	06	06	01	0029	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Taman
2	1	06	06	01	0030	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Latihan
2	1	06	06	01	0031	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
2	1	06	06	01	0032	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Lapangan PBB
2	1	06	06	01	0033	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Kampung
2	1	06	06	01	0034	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah Emplasmnt
2	1	06	06	01	0035	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Lapangan Lainnya
2	1	06	07			Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2	1	06	07	01		Utang Belanja Modal Alat Besar
2	1	06	07	01	0001	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Tractor
2	1	06	07	01	0002	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Grader
2	1	06	07	01	0003	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Excavator
2	1	06	07	01	0004	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Pile Driver
2	1	06	07	01	0005	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Hauler
2	1	06	07	01	0006	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Asphalt Equipment
2	1	06	07	01	0007	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Compacting Equipment
2	1	06	07	01	0008	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Aggregate and Concrete Equipment
2	1	06	07	01	0009	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Loader
2	1	06	07	01	0010	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Alat Pengangkat
2	1	06	07	01	0011	Utang Belanja Modal Alat Berat Darat-Mesin Proses
2	1	06	07	01	0012	Utang Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
2	1	06	07	01	0013	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung- Equipment Dredger
2	1	06	07	01	0014	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Floating Excavator
2	1	06	07	01	0015	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Amphibi Dredger
2	1	06	07	01	0016	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Kapal Tarik
2	1	06	07	01	0017	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
2	1	06	07	01	0018	Utang Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
2	1	06	07	01	0019	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Penarik
2	1	06	07	01	0200	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Feeder
2	1	06	07	01	0021	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Compressor
2	1	06	07	01	0022	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set
2	1	06	07	01	0023	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pompa
2	1	06	07	01	0024	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Mesin Bor
2	1	06	07	01	0025	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan
2	1	06	07	01	0026	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor
2	1	06	07	01	0027	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
2	1	06	07	01	0028	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
2	1	06	07	01	0029	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Tattoo
2	1	06	07	01	0300	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan
2	1	06	07	01	0031	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Selam
2	1	06	07	01	0032	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering
2	1	06	07	01	0033	Utang Belanja Modal Alat Bantu-Peralatan Intelejen
2	1	06	07	01	0034	Utang Belanja Modal Alat Bantu Lainnya
2	1	06	07	02		Utang Belanja Modal Alat Angkutan
2	1	06	07	02	0001	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
2	1	06	07	02	0002	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
2	1	06	07	02	0003	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
2	1	06	07	02	0004	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
2	1	06	07	02	0005	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
2	1	06	07	02	0006	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0007	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
2	1	06	07	02	0008	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
2	1	06	07	02	0009	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
2	1	06	07	02	0010	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak
2	1	06	07	02	0011	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
2	1	06	07	02	0012	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
2	1	06	07	02	0013	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	07	02	0014	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
2	1	06	07	02	0015	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0016	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
2	1	06	07	02	0017	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor -Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0018	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	07	02	0019	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
2	1	06	07	02	0020	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
2	1	06	07	02	0021	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
2	1	06	07	02	0022	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
2	1	06	07	02	0023	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
2	1	06	07	02	0024	Utang Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya
2	1	06	07	03		Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
2	1	06	07	03	0001	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
2	1	06	07	03	0002	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
2	1	06	07	03	0003	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	07	03	0004	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel <i>Service</i>
2	1	06	07	03	0005	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pengangkat Bermesin
2	1	06	07	03	0006	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu
2	1	06	07	03	0007	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Khusus
2	1	06	07	03	0008	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Peralatan Las
2	1	06	07	03	0009	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es
2	1	06	07	03	0010	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
2	1	06	07	03	0011	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
2	1	06	07	03	0012	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik
2	1	06	07	03	0013	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel <i>Service</i>
2	1	06	07	03	0014	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Pengangkat
2	1	06	07	03	0015	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Standar ( <i>Standard Tools</i> )
2	1	06	07	03	0016	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
2	1	06	07	03	0017	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Kerja
2	1	06	07	03	0018	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Besi
2	1	06	07	03	0019	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	07	03	0200	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Tukang Kayu
2	1	06	07	03	0021	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
2	1	06	07	03	0022	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin- Peralatan Bengkel Khusus Peladam
2	1	06	07	03	0023	Utang Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
2	1	06	07	03	0024	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur Universal
2	1	06	07	03	0025	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/TesIntelegensia
2	1	06	07	03	0026	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
2	1	06	07	03	0027	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
2	1	06	07	03	0028	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Kalibrasi
2	1	06	07	03	0029	Utang Belanja Modal Alat Ukur- <i>Oscilloscope</i>
2	1	06	07	03	0300	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Universal Tester
2	1	06	07	03	0031	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat
2	1	06	07	03	0032	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
2	1	06	07	03	0033	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
2	1	06	07	03	0034	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
2	1	06	07	03	0035	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Kering
2	1	06	07	03	0036	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
2	1	06	07	03	0037	Utang Belanja Modal Takaran Lainnya
2	1	06	07	03	0038	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
2	1	06	07	03	0039	Utang Belanja Modal Alat Ukur- <i>Specific Set</i>
2	1	06	07	03	0400	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
2	1	06	07	03	0041	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
2	1	06	07	03	0042	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
2	1	06	07	03	0043	Utang Belanja Modal Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
2	1	06	07	03	0044	Utang Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
2	1	06	07	04		Utang Belanja Modal Alat Pertanian
2	1	06	07	04	0001	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
2	1	06	07	04	0002	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
2	1	06	07	04	0003	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Panen
2	1	06	07	04	0004	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
2	1	06	07	04	0005	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-alat laboratorium pertanian
2	1	06	07	04	0006	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat <i>Processing</i>
2	1	06	07	04	0007	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
2	1	06	07	04	0008	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
2	1	06	07	04	0009	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
2	1	06	07	04	0010	Utang Belanja Modal Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
2	1	06	07	05		Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
2	1	06	07	05	0001	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Ketik
2	1	06	07	05	0002	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
2	1	06	07	05	0003	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
2	1	06	07	05	0004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
2	1	05	07	05	0005	Utang Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
2	1	05	07	05	0006	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel
2	1	05	07	05	0007	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
2	1	05	07	05	0008	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
2	1	06	07	05	0009	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
2	1	06	07	05	0010	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
2	1	06	07	05	0011	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
2	1	06	07	05	0012	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
2	1	06	07	05	0013	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
2	1	06	07	05	0014	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
2	1	06	07	05	0015	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
2	1	06	07	05	0016	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
2	1	06	07	05	0017	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
2	1	06	07	05	0018	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat-Kursi Tamu di Ruangannya
2	1	06	07	05	0019	Utang Belanja Modal Meja dan Kursi
2	1	06	07	06		Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
2	1	06	07	06	0001	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio
2	1	06	07	06	0002	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
2	1	06	07	06	0003	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
2	1	06	07	06	0004	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Cetak
2	1	06	07	06	0005	Utang Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
2	1	06	07	06	0006	Utang Belanja Belanja Modal Alat Studio Lainnya



Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	07	06	0007	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi- <i>Telephone</i>
2	1	06	07	06	0008	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
2	1	06	07	06	0009	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
2	1	06	07	06	0010	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF
2	1	06	07	06	0011	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
2	1	06	07	06	0012	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
2	1	06	07	06	0013	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Sandi
2	1	06	07	06	0014	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
2	1	06	07	06	0015	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
2	1	06	07	06	0016	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
2	1	06	07	06	0017	Utang Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
2	1	06	07	06	0018	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-
2	1	06	07	06	0019	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW
2	1	06	07	06	0200	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM
2	1	06	07	06	0021	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF
2	1	06	07	06	0022	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF
2	1	06	07	06	0023	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW
2	1	06	07	06	0024	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW
2	1	06	07	06	0025	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM
2	1	06	07	06	0026	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF
2	1	06	07	06	0027	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola
2	1	06	07	06	0028	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
2	1	06	07	06	0029	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
2	1	06	07	06	0300	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
2	1	06	07	06	0031	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
2	1	06	07	06	0032	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> FPU
2	1	06	07	06	0033	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> Terrestrial
2	1	06	07	06	0034	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
2	1	06	07	06	0035	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan <i>Dummy Load</i>
2	1	06	07	06	0036	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
2	1	06	07	06	0037	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena
2	1	06	07	06	0038	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
2	1	06	07	06	0039	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
2	1	06	07	06	0400	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Program <i>Input Equipment</i>
2	1	06	07	06	0041	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF
2	1	06	07	06	0042	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar LF
2	1	06	07	06	0043	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
2	1	06	07	06	0044	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar MF+HF
2	1	06	07	06	0045	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima
2	1	06	07	06	0046	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	07	06	0047	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar-
2	1	06	07	06	0048	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	07	06	0049	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	07	06	0050	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	07	06	0051	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	07	06	0052	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	07	06	0053	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
2	1	06	07	06	0054	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
2	1	06	07	06	0055	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
2	1	06	07	06	0056	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
2	1	06	07	06	0057	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
2	1	06	07	06	0058	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
2	1	06	07	06	0059	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
2	1	06	07	06	0600	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
2	1	06	07	06	0061	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
2	1	06	07	06	0062	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
2	1	06	07	06	0063	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Peralatan Perlengkapan Radio
2	1	06	07	05	0064	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga
2	1	06	07	05	0065	Utang Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
2	1	06	07	06	0066	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi <i>Instrument Landing System</i>
2	1	06	07	06	0067	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequency Omni Range</i> (VOR)
2	1	06	07	06	0068	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment</i> (DME)
2	1	06	07	06	0069	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
2	1	06	07	06	0700	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
2	1	06	07	06	0071	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
2	1	06	07	06	0072	Utang Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
2	1	06	07	07		Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan
2	1	06	07	07	0001	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
2	1	06	07	07	0002	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
2	1	06	07	07	0003	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
2	1	06	07	07	0004	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
2	1	06	07	07	0005	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
2	1	06	07	07	0006	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
2	1	06	07	07	0007	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
2	1	06	07	07	0008	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
2	1	06	07	07	0009	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
2	1	06	07	07	0010	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
2	1	06	07	07	0011	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
2	1	06	07	07	0012	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
2	1	06	07	07	0013	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
2	1	06	07	07	0014	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
2	1	06	07	07	0015	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
2	1	06	07	07	0016	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi <i>Anatomy</i>
2	1	06	07	07	0017	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
2	1	06	07	07	0018	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
2	1	06	07	07	0019	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
2	1	06	07	07	0200	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
2	1	06	07	07	0021	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	07	07	0022	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
2	1	06	07	07	0023	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
2	1	06	07	07	0024	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
2	1	06	07	07	0025	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
2	1	06	07	07	0026	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
2	1	06	07	07	0027	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
2	1	06	07	07	0028	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
2	1	06	07	07	0029	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
2	1	06	07	07	0300	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
2	1	06	07	07	0031	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
2	1	06	07	07	0032	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
2	1	06	07	07	0033	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
2	1	06	07	07	0034	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
2	1	06	07	08		Utang Belanja Modal Alat Laboratorium
2	1	06	07	08	0001	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
2	1	06	07	08	0002	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
2	1	06	07	08	0003	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
2	1	06	07	08	0004	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
2	1	06	07	08	0005	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
2	1	06	07	08	0006	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
2	1	06	07	08	0007	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
2	1	06	07	08	0008	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
2	1	06	07	08	0009	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocok Tanam
2	1	06	07	08	0100	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
2	1	06	07	08	0011	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
2	1	06	07	08	0012	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
2	1	06	07	08	0013	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
2	1	06	07	08	0014	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
2	1	06	07	08	0015	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
2	1	06	07	08	0016	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
2	1	06	07	08	0017	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
2	1	06	07	08	0018	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
2	1	06	07	08	0019	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat
2	1	06	07	08	0200	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	07	08	0021	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
2	1	06	07	08	0022	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
2	1	06	07	08	0023	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Proses Peleburan
2	1	06	07	08	0024	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	07	08	0025	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
2	1	06	07	08	0026	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
2	1	06	07	08	0027	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
2	1	06	07	08	0028	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
2	1	06	07	08	0029	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
2	1	06	07	08	0300	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
2	1	06	07	08	0031	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
2	1	06	07	08	0032	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
2	1	06	07	08	0033	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
2	1	06	07	08	0034	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
2	1	06	07	08	0035	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
2	1	06	07	08	0036	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
2	1	06	07	08	0037	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
2	1	06	07	08	0038	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	07	08	0039	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
2	1	06	07	08	0400	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
2	1	06	07	08	0041	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
2	1	06	07	08	0042	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
2	1	06	07	08	0043	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
2	1	06	07	08	0044	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
2	1	06	07	08	0045	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
2	1	06	07	08	0046	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium <i>Oceanography</i>
2	1	06	07	08	0047	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
2	1	06	07	08	0048	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
2	1	06	07	08	0049	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
2	1	06	07	08	0500	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
2	1	06	07	08	0051	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
2	1	06	07	08	0052	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
2	1	06	07	08	0053	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
2	1	06	07	08	0054	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
2	1	06	07	08	0055	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan
2	1	06	07	08	0056	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
2	1	06	07	08	0057	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
2	1	06	07	08	0058	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
2	1	06	07	08	0059	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
2	1	06	07	08	0600	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
2	1	06	07	08	0061	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
2	1	06	07	08	0062	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
2	1	06	07	08	0063	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
2	1	06	07	08	0064	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
2	1	06	07	08	0065	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
2	1	06	07	08	0066	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
2	1	06	07	08	0067	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
2	1	06	07	08	0068	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>
2	1	06	07	08	0069	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/Utensil</i>
2	1	06	07	08	0700	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Laboratory Safety Equipment</i>
2	1	06	07	08	0071	Utang Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
2	1	06	07	08	0072	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: Bahasa Indonesia
2	1	06	07	08	0073	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: Matematika
2	1	06	07	08	0074	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi: IPA Dasar

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	07	08	0075	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Lanjutan
2	1	06	07	08	0076	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Menengah
2	1	06	07	08	0077	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPA Atas
2	1	06	07	08	0078	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:IPS
2	1	06	07	08	0079	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Agama
2	1	06	07	08	0800	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Keterampilan
2	1	06	07	08	0081	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:Kesenian
2	1	06	07	08	0082	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik
2	1	06	07	08	0083	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah- Bidang Studi:PKN
2	1	06	07	08	0084	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
2	1	06	07	08	0085	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
2	1	06	07	08	0086	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
2	1	06	07	08	0087	Utang Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
2	1	06	07	08	0088	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Radiation Detector</i>
2	1	06	07	08	0089	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
2	1	06	07	08	0900	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Assembly/Counting System</i>
2	1	06	07	08	0091	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Recorder Display</i>
2	1	06	07	08	0092	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>System/Power Supply</i>
2	1	06	07	08	0093	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika
2	1	06	07	08	0094	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
2	1	06	07	08	0095	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Accelerator</i>
2	1	06	07	08	0096	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Reactor Experimental System</i>
2	1	06	07	08	0097	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
2	1	06	07	08	0098	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
2	1	06	07	08	0099	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
2	1	06	07	08	0100	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
2	1	06	07	08	0101	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- <i>Meteorological Equipment</i>
2	1	06	07	08	0102	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
2	1	06	07	08	0103	Utang Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
2	1	06	07	08	0104	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and</i>
2	1	06	07	08	0105	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
2	1	06	07	08	0106	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya- Peralatan Hidrologi
2	1	06	07	08	0107	Utang Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
2	1	06	07	08	0108	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
2	1	06	07	08	0109	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
2	1	06	07	08	0110	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
2	1	06	07	08	0111	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
2	1	06	07	08	0112	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
2	1	06	07	08	0113	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
2	1	06	07	08	0114	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Towing Carriage</i>
2	1	06	07	08	0115	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System</i>
2	1	06	07	08	0116	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Cavitation Tunnel</i>
2	1	06	07	08	0117	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Overhead Cranes</i>
2	1	06	07	08	0118	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Umum</i>
2	1	06	07	08	0119	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
2	1	06	07	08	0120	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>
2	1	06	07	08	0121	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop</i>
2	1	06	07	08	0122	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>
2	1	06	07	08	0123	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop</i>
2	1	06	07	08	0124	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Ship Model Preparation Shop</i>
2	1	06	07	08	0125	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop</i>
2	1	06	07	08	0126	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-MOB</i>
2	1	06	07	08	0127	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Photo and Film Equipment</i>
2	1	06	07	08	0128	Utang Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
2	1	06	07	08	0129	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik dan Biomedik
2	1	06	07	08	0130	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
2	1	06	07	08	0131	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
2	1	06	07	08	0132	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
2	1	06	07	08	0133	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
2	1	06	07	08	0134	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
2	1	06	07	08	0135	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
2	1	06	07	08	0136	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
2	1	06	07	08	0137	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
2	1	06	07	08	0138	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
2	1	06	07	08	0139	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
2	1	06	07	10		Utang Belanja Modal Komputer
2	1	06	07	10	0001	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Komputer Jaringan
2	1	06	07	10	0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
2	1	06	07	10	0003	Utang Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
2	1	06	07	10	0004	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan <i>Mainframe</i>
2	1	06	07	10	0005	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan <i>Mini Computer</i>
2	1	06	07	10	0006	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer-
2	1	06	07	10	0007	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	07	10	0008	Utang Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
2	1	06	07	11		Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi
2	1	06	07	11	0001	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi- Optik
2	1	06	07	11	0002	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi- Ukur/Instrumen
2	1	06	07	11	0003	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
2	1	06	07	11	0004	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika- Mekanik
2	1	06	07	11	0005	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika- Elektronik/ <i>Electric</i>
2	1	06	07	11	0006	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika- Manual
2	1	06	07	11	0007	Utang Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
2	1	06	07	12		Utang Belanja Modal Alat Pengeboran
2	1	06	07	12	0001	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
2	1	06	07	12	0002	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
2	1	06	07	12	0003	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
2	1	06	07	12	0004	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran non Mesin- Bangka
2	1	06	07	12	0005	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin- Pantek
2	1	06	07	12	0006	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin- Putar
2	1	06	07	12	0007	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin- Peralatan Bantu
2	1	06	07	12	0008	Utang Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin
2	1	06	07	13		Utang Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
2	1	06	07	13	0001	Utang Belanja Modal Sumur-Peralatan Sumur Minyak
2	1	06	07	13	0002	Utang Belanja Modal Sumur-Sumur Pemboran
2	1	06	07	13	0003	Utang Belanja Modal Sumur Lainnya
2	1	06	07	13	0004	Utang Belanja Modal Produksi-Rig
2	1	06	07	13	0005	Utang Belanja Modal Produksi Lainnya
2	1	06	07	13	0006	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
2	1	06	07	13	0007	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
2	1	06	07	13	0008	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Steam</i>
2	1	06	07	13	0009	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Wax</i>
2	1	06	07	13	0010	Utang Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
2	1	06	07	14		Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
2	1	06	07	14	0001	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi- Mekanik
2	1	06	07	14	0002	Utang Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi- Elektrik
2	1	06	07	14	0003	Utang Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
2	1	06	07	14	0004	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi- Perawatan Sumur
2	1	06	07	14	0005	Utang Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
2	1	06	07	15		Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
2	1	06	07	15	0001	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Radiasi
2	1	06	07	15	0002	Utang Belanja Modal Alat Deteksi-Suara
2	1	06	07	15	0003	Utang Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
2	1	06	07	15	0004	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Baju Pengaman
2	1	06	07	15	0005	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Masker
2	1	06	07	15	0006	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Topi Kerja
2	1	06	07	15	0007	Utang Belanja Modal Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
2	1	06	07	15	0008	Utang Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
2	1	06	07	15	0009	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
2	1	06	07	15	0010	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Penolong
2	1	06	07	15	0011	Utang Belanja Modal Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
2	1	06	07	15	0012	Utang Belanja Modal Alat SAR Lainnya
2	1	06	07	15	0013	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
2	1	06	07	15	0014	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
2	1	06	07	15	0015	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
2	1	06	07	15	0016	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-
2	1	06	07	15	0017	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
2	1	06	07	15	0018	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
2	1	06	07	15	0019	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
2	1	06	07	15	0020	Utang Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
2	1	06	07	16		Utang Belanja Modal Alat Peraga
2	1	06	07	16	0001	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
2	1	06	07	16	0002	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
2	1	06	07	16	0003	Utang Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
2	1	06	07	17		Utang Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
2	1	06	07	17	0001	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
2	1	06	07	17	0002	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
2	1	06	07	17	0003	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
2	1	06	07	17	0004	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Classifier</i>
2	1	06	07	17	0005	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
2	1	06	07	17	0006	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
2	1	06	07	17	0007	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
2	1	06	07	17	0008	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Leaching Equipment</i>
2	1	06	07	17	0009	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation</i>
2	1	06	07	17	0010	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
2	1	06	07	17	0011	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
2	1	06	07	17	0012	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
2	1	06	07	17	0013	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
2	1	06	07	17	0014	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
2	1	06	07	17	0015	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
2	1	06	07	17	0016	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
2	1	06	07	17	0017	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
2	1	06	07	17	0018	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
2	1	06	07	17	0019	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
2	1	06	07	17	0020	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Material Handling Equipment</i>
2	1	06	07	17	0021	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
2	1	06	07	17	0022	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>
2	1	06	07	17	0023	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	07	17	0024	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
2	1	06	07	17	0025	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
2	1	06	07	17	0026	Utang Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
2	1	06	07	18		Utang Belanja Modal Rambu-Rambu
2	1	06	07	18	0001	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
2	1	06	07	18	0002	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
2	1	06	07	18	0003	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
2	1	06	07	18	0004	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light
2	1	06	07	18	0005	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach Slope Indicator (VASI)
2	1	06	07	18	0006	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light
2	1	06	07	18	0007	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)
2	1	06	07	18	0008	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Signal
2	1	06	07	18	0009	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
2	1	06	07	18	0010	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
2	1	06	07	18	0011	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
2	1	06	07	18	0012	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
2	1	06	07	19		Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga
2	1	06	07	19	0001	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik
2	1	06	07	19	0002	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan
2	1	06	07	19	0003	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Senam
2	1	06	07	19	0004	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Air
2	1	06	07	19	0005	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Udara
2	1	06	07	19	0006	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
2	1	06	08			Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	1	06	08	01		Utang Belanja Modal Bangunan Gedung
2	1	06	08	01	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
2	1	06	08	01	0002	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
2	1	06	08	01	0003	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
2	1	06	08	01	0004	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
2	1	06	08	01	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
2	1	06	08	01	0006	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
2	1	06	08	01	0007	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
2	1	06	08	01	0008	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
2	1	06	08	01	0009	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
2	1	06	08	01	0010	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
2	1	06	08	01	0011	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
2	1	06	08	01	0012	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
2	1	06	08	01	0013	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
2	1	06	08	01	0014	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
2	1	06	08	01	0015	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
2	1	06	08	01	0016	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
2	1	06	08	01	0017	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
2	1	06	08	01	0018	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
2	1	06	08	01	0019	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
2	1	06	08	01	0020	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
2	1	06	08	01	0021	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
2	1	06	08	01	0022	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
2	1	06	08	01	0023	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
2	1	06	08	01	0024	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
2	1	06	08	01	0025	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
2	1	06	08	01	0026	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
2	1	06	08	01	0027	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
2	1	06	08	01	0028	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
2	1	06	08	01	0029	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
2	1	06	08	01	0030	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	08	01	0031	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
2	1	06	08	01	0032	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
2	1	06	08	01	0033	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
2	1	06	08	01	0034	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
2	1	06	08	01	0035	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
2	1	06	08	01	0036	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
2	1	06	08	01	0037	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
2	1	06	08	01	0038	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
2	1	06	08	01	0039	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
2	1	06	08	01	0040	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
2	1	06	08	01	0041	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
2	1	06	08	01	0042	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
2	1	06	08	01	0043	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
2	1	06	08	01	0044	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
2	1	06	08	01	0045	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Modal Flat/Rumah Susun
2	1	06	08	01	0046	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
2	1	06	08	01	0047	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
2	1	06	08	01	0048	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
2	1	06	08	01	0049	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
2	1	06	08	01	0050	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
2	1	06	08	02		Utang Belanja Modal Monumen
2	1	06	08	02	0001	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
2	1	06	08	02	0002	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
2	1	06	08	02	0003	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
2	1	06	08	02	0004	Utang Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
2	1	06	08	03		Belanja Modal Bangunan Menara
2	1	06	08	03	0001	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan-Penerangan Pantai
2	1	06	08	03	0002	Utang Belanja Modal Bangunan Menara-Pantai
2	1	06	08	03	0003	Utang Belanja Modal Bangunan Menara- Telekomunikasi
2	1	06	08	03	0004	Utang Belanja Modal Bangunan Menara- Pengawas
2	1	06	08	03	0005	Utang Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya

Kode Akun					Uraian Akun
2	1	06	08	04	Utang Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
2	1	06	08	04	0001 Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Batas Administrasi
2	1	06	08	04	0002 Utang Belanja Modal Tugu/Tanda-Jaring Kontrol Geodesi
2	1	06	08	04	0003 Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
2	1	06	08	04	0004 Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar
2	1	06	08	04	0005 Utang Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
2	1	06	09		Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2	1	06	09	01	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan
2	1	06	09	01	0001 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Nasional
2	1	06	09	01	0002 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Provinsi
2	1	06	09	01	0003 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten
2	1	06	09	01	0004 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kota
2	1	06	09	01	0005 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Desa
2	1	06	09	01	0006 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Tol
2	1	06	09	01	0007 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Kereta Api
2	1	06	09	01	0008 Utang Belanja Modal Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	09	01	0009 Utang Belanja Modal Jalan-Jalan Khusus
2	1	06	09	01	0010 Utang Belanja Modal Jalan Lainnya
2	1	06	09	01	0011 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
2	1	06	09	01	0012 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
2	1	06	09	01	0013 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
2	1	06	09	01	0014 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada
2	1	06	09	01	0015 Utang Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
2	1	06	09	01	0016 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
2	1	06	09	01	0017 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
2	1	06	09	01	0018 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
2	1	06	09	01	0019 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
2	1	06	09	01	0020 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan penyeberangan
2	1	06	09	01	0021 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
2	1	06	09	01	0022 Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan Pengukur
2	1	06	09	01	0023 Utang Belanja Modal Jembatan Lainnya
2	1	06	09	02	Utang Belanja Modal Bangunan Air
2	1	06	09	02	0001 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi
2	1	06	09	02	0002 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi
2	1	06	09	02	0003 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi
2	1	06	09	02	0004 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi
2	1	06	09	02	0005 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi
2	1	06	09	02	0006 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi
2	1	06	09	02	0007 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi
2	1	06	09	02	0008 Utang Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
2	1	06	09	02	0009 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
2	1	06	09	02	0010 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
2	1	06	09	02	0011 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
2	1	06	09	02	0012 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
2	1	06	09	02	0013 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut
2	1	06	09	02	0014 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
2	1	06	09	02	0015 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
2	1	06	09	02	0016 Utang Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
2	1	06	09	02	0017 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0018 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0019 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0020 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0021 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0022 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0023 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
2	1	06	09	02	0024 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
2	1	06	09	02	0025 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
2	1	06	09	02	0026 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	09	02	0027 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
2	1	06	09	02	0028 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
2	1	06	09	02	0029 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
2	1	06	09	02	0030 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
2	1	06	09	02	0031 Utang Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
2	1	06	09	02	0032 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0033 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0034 Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0035 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0036 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0037 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
2	1	06	09	02	0038 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
2	1	06	09	02	0039 Utang Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	09	02	0040	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0041	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0042	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0043	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0044	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
2	1	06	09	02	0045	Utang Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	09	02	0046	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor
2	1	06	09	02	0047	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Waduk Air Kotor
2	1	06	09	02	0048	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor
2	1	06	09	02	0049	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pengaman Air Kotor
2	1	06	09	02	0050	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor
2	1	06	09	02	0051	Utang Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
2	1	06	09	03		Utang Belanja Modal Instalasi
2	1	06	09	03	0001	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air
2	1	06	09	03	0002	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
2	1	06	09	03	0003	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
2	1	06	09	03	0004	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku- Instalasi Air Tanah Dangkal
2	1	06	09	03	0005	Utang Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
2	1	06	09	03	0006	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
2	1	06	09	03	0007	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
2	1	06	09	03	0008	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
2	1	06	09	03	0009	Utang Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
2	1	06	09	03	0010	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
2	1	06	09	03	0011	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
2	1	06	09	03	0012	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
2	1	06	09	03	0013	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
2	1	06	09	03	0014	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
2	1	06	09	03	0015	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
2	1	06	09	03	0016	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
2	1	06	09	03	0017	Utang Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan
2	1	06	09	03	0018	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
2	1	06	09	03	0019	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
2	1	06	09	03	0020	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
2	1	06	09	03	0021	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
2	1	06	09	03	0022	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
2	1	06	09	03	0023	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
2	1	06	09	03	0024	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
2	1	06	09	03	0025	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
2	1	06	09	03	0026	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
2	1	06	09	03	0027	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
2	1	06	09	03	0028	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
2	1	06	09	03	0029	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
2	1	06	09	03	0030	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk
2	1	06	09	03	0031	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi
2	1	06	09	03	0032	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik
2	1	06	09	03	0033	Utang Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
2	1	06	09	03	0034	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat
2	1	06	09	03	0035	Utang Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
2	1	06	09	03	0036	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Gardu Gas
2	1	06	09	03	0037	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas
2	1	06	09	03	0038	Utang Belanja Modal Instalasi Gas-Instalasi Pengolahan Gas
2	1	06	09	03	0039	Utang Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
2	1	06	09	03	0040	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir
2	1	06	09	03	0041	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman- Instalasi Reaktor Nuklir
2	1	06	09	03	0042	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman- Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
2	1	06	09	03	0043	Utang Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
2	1	06	09	03	0044	Utang Belanja Modal Instalasi Lain
2	1	06	09	04		Utang Belanja Modal Jaringan
2	1	06	09	04	0001	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa
2	1	06	09	04	0002	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi
2	1	06	09	04	0003	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Cabang Distribusi
2	1	06	09	04	0004	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah
2	1	06	09	04	0005	Utang Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
2	1	06	09	04	0006	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
2	1	06	09	04	0007	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
2	1	06	09	04	0008	Utang Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
2	1	06	09	04	0009	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah
2	1	06	09	04	0010	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah
2	1	06	09	04	0011	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan Telepon didalam Air
2	1	06	09	04	0012	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon-Jaringan
2	1	06	09	04	0013	Utang Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
2	1	06	09	04	0014	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Gas Transmisi
2	1	06	09	04	0015	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
2	1	06	09	04	0016	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
2	1	06	09	04	0017	Utang Belanja Modal Jaringan Gas-Jaringan BBM
2	1	06	09	04	0018	Utang Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
2	1	06	10			Utang Belanja Aset Tetap Lainnya
2	1	06	10	01		Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan
2	1	06	10	01	0001	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
2	1	06	10	01	0002	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
2	1	06	10	01	0003	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
2	1	06	10	01	0004	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
2	1	06	10	01	0005	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
2	1	06	10	01	0006	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam

Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	10	01	0007	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
2	1	06	10	01	0008	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
2	1	06	10	01	0009	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
2	1	06	10	01	0010	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
2	1	06	10	01	0011	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
2	1	06	10	01	0012	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
2	1	06	10	01	0013	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
2	1	06	10	01	0014	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )
2	1	06	10	01	0015	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
2	1	06	10	01	0016	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
2	1	06	10	01	0017	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
2	1	06	10	01	0018	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
2	1	06	10	01	0019	Utang Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
2	1	06	10	01	0020	Utang Belanja Modal Musik-Karya Musik
2	1	06	10	01	0021	Utang Belanja Modal Musik Lainnya
2	1	06	10	01	0022	Utang Belanja Modal Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )-Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
2	1	06	10	01	0023	Utang Belanja Modal Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya
2	1	06	10	01	0024	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts And Realita</i>
2	1	06	10	01	0025	Utang Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i> Lainnya
2	1	06	10	01	0026	Utang Belanja Modal Tarscalt-Tarscalt
2	1	06	10	01	0027	Utang Belanja Modal Tarscalt Lainnya
2	1	06	10	02		Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
2	1	06	10	02	0001	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Alat Musik
2	1	06	10	02	0002	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Lukisan
2	1	06	10	02	0003	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian- Alat Peraga Kesenian
2	1	06	10	02	0004	Utang Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
2	1	06	10	02	0005	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Pahatan
2	1	06	10	02	0006	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
2	1	06	10	02	0007	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan- Belanja Modal Barang Kerajinan
2	1	06	10	02	0008	Utang Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
2	1	06	10	02	0009	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
2	1	06	10	02	0010	Utang Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
2	1	06	10	03		Utang Belanja Modal Hewan
2	1	06	10	03	0001	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengaman
2	1	06	10	03	0002	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Pengangkut
2	1	06	10	03	0003	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan-Hewan Kebun Binatang
2	1	06	10	03	0004	Utang Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
2	1	06	10	03	0005	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Potong
2	1	06	10	03	0006	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Perah
2	1	06	10	03	0007	Utang Belanja Modal Ternak-Ternak Unggas
2	1	06	10	03	0008	Utang Belanja Modal Ternak Lainnya
2	1	06	10	03	0009	Utang Belanja Modal Hewan Lainnya
2	1	06	10	04		Utang Belanja Modal Biota Perairan
2	1	06	10	04	0001	Utang Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
2	1	06	10	04	0002	Utang Belanja Modal Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Krustasea (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0003	Utang Belanja Modal Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)- Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0004	Utang Belanja Modal Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)-Coelenterata (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0005	Utang Belanja Modal Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)-Echinodermata (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0006	Utang Belanja Modal Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)-Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0007	Utang Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)-Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0008	Utang Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba- lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)-Mammalia (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
2	1	06	10	04	0009	Utang Belanja Modal Algae (Rumput Laut dan
2	1	06	10	04	0010	Utang Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
2	1	06	10	05		Utang Belanja Modal Tanaman
2	1	06	10	05	0001	Utang Belanja Modal Tanaman-Tanaman
2	1	06	10	06		Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
2	1	06	10	06	0001	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
2	1	06	10	06	0002	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya- Biota Perairan Koleksi
2	1	06	10	06	0003	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
2	1	06	10	06	0004	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
2	1	06	10	06	0005	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
2	1	06	10	06	0006	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
2	1	06	10	06	0007	Utang Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
2	1	06	10	07		Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
2	1	06	10	07	0001	Utang Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi- Aset Tetap Dalam Renovasi
2	1	06	11			Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01		Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	11	01	0001	Utang Belanja Tidak Terduga
2	1	06	12			Utang Belanja Bagi Hasil
2	1	06	12	01		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	06	12	01	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	06	12	02		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	06	12	02	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	06	12	03		Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
2	1	06	12	03	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2	1	06	12	04		Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
2	1	06	12	04	0001	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
2	1	06	13			Utang Belanja Bantuan Keuangan
2	1	06	13	01		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	01	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
2	1	06	13	02		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
2	1	06	13	02	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
2	1	06	13	03		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota



Kode Akun						Uraian Akun
2	1	06	13	03	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	04		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	04	0001	Utang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
2	1	06	13	05		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	05	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	06		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	06	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	07		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	07	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	08		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	08	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota kepada Provinsi
2	1	06	13	09		Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	09	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	10		Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	10	0001	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	06	13	11		Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	06	13	11	0001	Utang Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	1	07				Utang Jangka Pendek Lainnya
2	1	07	01			Utang Kelebihan Pembayaran PAD
2	1	07	01	01		Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2	1	07	01	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	1	07	01	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Permukaan
2	1	07	01	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok
2	1	07	01	01	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hotel
2	1	07	01	01	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Restoran
2	1	07	01	01	0008	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan
2	1	07	01	01	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame
2	1	07	01	01	0100	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan
2	1	07	01	01	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir
2	1	07	01	01	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah
2	1	07	01	01	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet
2	1	07	01	01	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2	1	07	01	01	0015	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
2	1	07	01	01	0016	Utang Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2	1	07	01	02		Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2	1	07	01	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum
2	1	07	01	02	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha
2	1	07	01	02	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu
2	1	07	01	03		Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
2	1	07	01	03	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
2	1	07	01	03	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
2	1	07	01	04		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah
2	1	07	01	04	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Kerja Sama Daerah
2	1	07	01	04	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro
2	1	07	01	04	0006	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
2	1	07	01	04	0007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bunga
2	1	07	01	04	0008	Utang Kelebihan Pembayaran atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
2	1	07	01	04	0009	Utang Kelebihan Pembayaran Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
2	1	07	01	04	0100	Utang Kelebihan Pembayaran Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
2	1	07	01	04	0011	Utang Kelebihan Pembayaran Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
2	1	07	01	04	0012	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Pajak Daerah
2	1	07	01	04	0013	Utang Kelebihan Pembayaran Denda Retribusi Daerah
2	1	07	01	04	0014	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Eksekusi atas Jaminan
2	1	07	01	04	0015	Utang Kelebihan Pembayaran dari Pengembalian
2	1	07	01	04	0016	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD
2	1	07	01	04	0017	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
2	1	07	01	04	0018	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
2	1	07	01	04	0019	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
2	1	07	01	04	0200	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
2	1	07	01	04	0021	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
2	1	07	01	04	0022	Utang Kelebihan Pembayaran atas Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
2	1	07	02			Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2	1	07	02	01		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2	1	07	02	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
2	1	07	02	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah
2	1	07	02	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus
2	1	07	02	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan
2	1	07	02	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Desa
2	1	07	02	02		Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Antar Daerah
2	1	07	02	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Bagi Hasil
2	1	07	02	02	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan
2	1	07	03			Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
2	1	07	03	01		Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2	1	07	03	01	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
2	1	07	03	01	0002	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
2	1	07	03	01	0003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
2	1	07	03	01	0004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
2	1	07	03	01	0005	Utang Kelebihan Pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
2	1	07	03	02		Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	1	07	03	02	0001	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan
2	1	07	04			Utang Transfer

Kode Akun					Uraian Akun
2	1	07	04	01	Utang Transfer Bagi Hasil
2	1	07	04	01	0001 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
2	1	07	04	01	0002 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
2	1	07	04	01	0003 Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
2	1	07	04	02	Utang Transfer Bantuan Keuangan
2	1	07	04	02	0001 Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
2	1	07	04	02	0002 Utang Transfer Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
2	1	07	04	02	0003 Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
2	1	07	04	02	0004 Utang Transfer Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
2	1	07	04	02	0005 Utang Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
2	1	07	04	02	0006 Utang Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
2	2				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
2	2	01			Utang kepada Pemerintah Pusat
2	2	01	01		Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri
2	2	01	01	01	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
2	2	01	01	01	0001 Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
2	2	01	01	02	Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
2	2	01	01	02	0001 Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
2	2	01	02		Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri
2	2	01	02	01	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah
2	2	01	02	01	0001 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah
2	2	01	02	02	Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang
2	2	01	02	02	0001 Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang
2	2	01	03		Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	2	01	03	01	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	2	01	03	01	0001 Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
2	2	01	03	02	Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	2	01	03	02	0001 Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
2	2	02			Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	2	02	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN
2	2	02	01	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Menengah
2	2	02	01	01	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Menengah
2	2	02	01	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Panjang
2	2	02	01	02	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMN-Jangka Panjang
2	2	02	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD
2	2	02	02	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Menengah
2	2	02	02	01	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Menengah
2	2	02	02	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Panjang
2	2	02	02	02	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- BUMD-Jangka Panjang
2	2	02	03		Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta
2	2	02	03	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Menengah
2	2	02	03	01	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Menengah
2	2	02	03	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Panjang
2	2	02	03	02	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)- Swasta-Jangka Panjang
2	2	03			Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
2	2	03	01		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN
2	2	03	01	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	2	03	01	01	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
2	2	03	01	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	2	03	01	01	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
2	2	03	02		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD
2	2	03	02	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	2	03	02	01	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
2	2	03	02	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	2	03	02	02	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
2	2	03	03		Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta
2	2	03	03	01	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	2	03	03	01	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
2	2	03	03	02	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	2	03	03	02	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
2	2	04			Utang kepada Masyarakat
2	2	04	01		Obligasi
2	2	04	01	01	Obligasi Daerah
2	2	04	01	01	0001 Obligasi Daerah
3					EKUITAS
3	1				EKUITAS
3	1	01			Ekuitas
3	1	01	01		Ekuitas
3	1	01	01	01	Ekuitas
3	1	01	01	01	0001 Ekuitas
3	1	01	02		Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01	Surplus/Defisit-LO
3	1	01	02	01	0001 Surplus/Defisit-LO
3	1	02			Ekuitas SAL
3	1	02	01		Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01	Estimasi Pendapatan
3	1	02	01	01	0001 Estimasi Pendapatan
3	1	02	02		Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	02	01	0001 Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3	1	02	03		Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01	Apropriasi Belanja
3	1	02	03	01	0001 Apropriasi Belanja
3	1	02	04		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	04	01	0001 Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3	1	02	05		Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01	Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	05	01	0001 Estimasi Perubahan SAL
3	1	02	06		Surplus/Defisit-LRA

Kode Akun						Uraian Akun
3						Surplus/Defisit-LRA
3	1	02	06	01	0001	Surplus/Defisit-LRA
4						PENDAPATAN DAERAH
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	1	01				Pajak Daerah
4	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	01	01	0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi
4	1	01	01	01	0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum
4	1	01	01	01	0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	01	0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	01	01	02	0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi
4	1	01	01	02	0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum
4	1	01	01	02	0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	02	0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	01	03	0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi
4	1	01	01	03	0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum
4	1	01	01	03	0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	03	0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	01	01	04	0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi
4	1	01	01	04	0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum
4	1	01	01	04	0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	04	0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	01	05	0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi
4	1	01	01	05	0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum
4	1	01	01	05	0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	05	0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	01	01	06	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi
4	1	01	01	06	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum
4	1	01	01	06	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-
4	1	01	01	06	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah
4	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	01	01	07	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi
4	1	01	01	07	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum
4	1	01	01	07	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Pusat
4	1	01	01	07	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah
4	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	01	01	08	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi
4	1	01	01	08	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum
4	1	01	01	08	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	08	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	01	01	09	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi
4	1	01	01	09	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum
4	1	01	01	09	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Pusat
4	1	01	01	09	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah
4	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	01	10	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pribadi
4	1	01	01	10	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Umum
4	1	01	01	10	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Pusat
4	1	01	01	10	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua- Pemerintah Daerah
4	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	01	11	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pribadi
4	1	01	01	11	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Umum
4	1	01	01	11	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Pusat
4	1	01	01	11	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga- Pemerintah Daerah
4	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	01	12	0001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi
4	1	01	01	12	0002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum
4	1	01	01	12	0003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	12	0004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan
4	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
4	1	01	01	13	0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi
4	1	01	01	13	0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum
4	1	01	01	13	0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	13	0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah
4	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	01	14	0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi
4	1	01	01	14	0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum
4	1	01	01	14	0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat
4	1	01	01	14	0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah
4	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	02	01	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	01	02	02	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	01	02	03		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	02	03	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	01	02	04		BBNKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	01	02	04	0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	01	02	05		BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	02	05	0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	01	02	06		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	01	02	06	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	01	02	07		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck

Kode Akun						Uraian Akun
4	1	01	02	07	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
4	1	01	02	08		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
4	1	01	02	08	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
4	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
4	1	01	02	09	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
4	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	02	10	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
4	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	02	11	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	02	12	0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	01	02	13	0001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	02	14	0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4	1	01	03	01		PBBKB-Bahan Bakar Bensin
4	1	01	03	01	0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin
4	1	01	03	02		PBBKB-Bahan Bakar Solar
4	1	01	03	02	0001	PBBKB Bahan Bakar Solar
4	1	01	03	03		PBBKB-Bahan Bakar Gas
4	1	01	03	03	0001	PBBKB Bahan Bakar Gas
4	1	01	03	04		PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
4	1	01	03	04	0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya
4	1	01	04			Pajak Air Permukaan
4	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan
4	1	01	04	01	0001	Pajak Air Permukaan
4	1	01	05			Pajak Rokok
4	1	01	05	01		Pajak Rokok
4	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok
4	1	01	06			Pajak Hotel
4	1	01	06	01		Pajak Hotel
4	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel
4	1	01	06	02		Pajak Motel
4	1	01	06	02	0001	Pajak Motel
4	1	01	06	03		Pajak Losmen
4	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen
4	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata
4	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata
4	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan
4	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan
4	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
4	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	01	07			Pajak Restoran
4	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya
4	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
4	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
4	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya
4	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya
4	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisnya
4	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
4	1	01	08			Pajak Hiburan
4	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film
4	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film
4	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
4	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
4	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
4	1	01	08	03	0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
4	1	01	08	04		Pajak Pameran
4	1	01	08	04	0001	Pajak Pameran
4	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4	1	01	08	05	0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
4	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	01	08	06	0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
4	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
4	1	01	08	07	0001	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
4	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )
4	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )
4	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	01	09			Pajak Reklame
4	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i> / <i>Megatron</i>
4	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i> / <i>Megatron</i>
4	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain
4	1	01	09	02	0001	Pajak Reklame Kain
4	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker
4	1	01	09	03	0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker

Kode Akun					Uraian Akun
4	1	01	09	04	Pajak Reklame Selebaran
4	1	01	09	04	0001 Pajak Reklame Selebaran
4	1	01	09	05	Pajak Reklame Berjalan
4	1	01	09	05	0001 Pajak Reklame Berjalan
4	1	01	09	06	Pajak Reklame Udara
4	1	01	09	06	0001 Pajak Reklame Udara
4	1	01	09	07	Pajak Reklame Apung
4	1	01	09	07	0001 Pajak Reklame Apung
4	1	01	09	08	Pajak Reklame Suara
4	1	01	09	08	0001 Pajak Reklame Suara
4	1	01	09	09	Pajak Reklame Film/Slide
4	1	01	09	09	0001 Pajak Reklame Film/Slide
4	1	01	09	10	Pajak Reklame Peragaan
4	1	01	09	10	0001 Pajak Reklame Peragaan
4	1	01	10		Pajak Penerangan Jalan
4	1	01	10	01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	01	10	01	0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	01	10	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	01	10	02	0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	01	11		Pajak Parkir
4	1	01	11	01	Pajak Parkir
4	1	01	11	01	0001 Pajak Parkir
4	1	01	12		Pajak Air Tanah
4	1	01	12	01	Pajak Air Tanah
4	1	01	12	01	0001 Pajak Air Tanah
4	1	01	13		Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	13	01	Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	13	01	0001 Pajak Sarang Burung Walet
4	1	01	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	01	14	01	Pajak Asbes
4	1	01	14	01	0001 Pajak Asbes
4	1	01	14	02	Pajak Batu Tulis
4	1	01	14	02	0001 Pajak Batu Tulis
4	1	01	14	03	Pajak Batu Setengah Permata
4	1	01	14	03	0001 Pajak Batu Setengah Permata
4	1	01	14	04	Pajak Batu Kapur
4	1	01	14	04	0001 Pajak Batu Kapur
4	1	01	14	05	Pajak Batu Apung
4	1	01	14	05	0001 Pajak Batu Apung
4	1	01	14	06	Pajak Batu Permata
4	1	01	14	06	0001 Pajak Batu Permata
4	1	01	14	07	Pajak Bentonit
4	1	01	14	07	0001 Pajak Bentonit
4	1	01	14	08	Pajak Dolomit
4	1	01	14	08	0001 Pajak Dolomit
4	1	01	14	09	Pajak Felspar
4	1	01	14	09	0001 Pajak Felspar
4	1	01	14	10	Pajak Garam Batu (Halite)
4	1	01	14	10	0001 Pajak Garam Batu (Halite)
4	1	01	14	11	Pajak Grafit
4	1	01	14	11	0001 Pajak Grafit
4	1	01	14	12	Pajak Granit/Andesit
4	1	01	14	12	0001 Pajak Granit/Andesit
4	1	01	14	13	Pajak Gips
4	1	01	14	13	0001 Pajak Gips
4	1	01	14	14	Pajak Kalsit
4	1	01	14	14	0001 Pajak Kalsit
4	1	01	14	15	Pajak Kaolin
4	1	01	14	15	0001 Pajak Kaolin
4	1	01	14	16	Pajak Leusit
4	1	01	14	16	0001 Pajak Leusit
4	1	01	14	17	Pajak Magnesit
4	1	01	14	17	0001 Pajak Magnesit
4	1	01	14	18	Pajak Mika
4	1	01	14	18	0001 Pajak Mika
4	1	01	14	19	Pajak Marmer
4	1	01	14	19	0001 Pajak Marmer
4	1	01	14	20	Pajak Nitrat
4	1	01	14	20	0001 Pajak Nitrat
4	1	01	14	21	Pajak Opsidien
4	1	01	14	21	0001 Pajak Opsidien
4	1	01	14	22	Pajak Oker
4	1	01	14	22	0001 Pajak Oker
4	1	01	14	23	Pajak Pasir dan Kerikil
4	1	01	14	23	0001 Pajak Pasir dan Kerikil
4	1	01	14	24	Pajak Pasir Kuarsa
4	1	01	14	24	0001 Pajak Pasir Kuarsa
4	1	01	14	25	Pajak Perlit
4	1	01	14	25	0001 Pajak Perlit
4	1	01	14	26	Pajak Fospat
4	1	01	14	26	0001 Pajak Fospat
4	1	01	14	27	Pajak Talk
4	1	01	14	27	0001 Pajak Talk
4	1	01	14	28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
4	1	01	14	28	0001 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
4	1	01	14	29	Pajak Tanah Diatome
4	1	01	14	29	0001 Pajak Tanah Diatome
4	1	01	14	30	Pajak Tanah Liat
4	1	01	14	30	0001 Pajak Tanah Liat
4	1	01	14	31	Pajak Tawas (Alum)

Kode Akun						Uraian Akun
4	1	01	14	31	0001	Pajak Tawas (Alum)
4	1	01	14	32		Pajak Tras
4	1	01	14	32	0001	Pajak Tras
4	1	01	14	33		Pajak Yarosif
4	1	01	14	33	0001	Pajak Yarosif
4	1	01	14	34		Pajak Zeolit
4	1	01	14	34	0001	Pajak Zeolit
4	1	01	14	35		Pajak Basal
4	1	01	14	35	0001	Pajak Basal
4	1	01	14	36		Pajak Trakit
4	1	01	14	36	0001	Pajak Trakit
4	1	01	14	37		Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	01	14	37	0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	01	15			Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	01	15	01		PBBP2
4	1	01	15	01	0001	PBBP2
4	1	01	16			Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4	1	01	16	01		BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	01	16	01	0001	BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	01	16	02		BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	01	16	02	0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	02				Retribusi Daerah
4	1	02	01			Retribusi Jasa Umum
4	1	02	01	01		Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	02	01	01	0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
4	1	02	01	01	0002	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
4	1	02	01	01	0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
4	1	02	01	01	0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
4	1	02	01	01	0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
4	1	02	01	01	0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
4	1	02	01	02		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
4	1	02	01	02	0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/
4	1	02	01	03		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4	1	02	01	03	0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
4	1	02	01	03	0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
4	1	02	01	04		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	02	01	04	0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	02	01	05		Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	02	01	05	0001	Retribusi Pelataran
4	1	02	01	05	0002	Retribusi Los
4	1	02	01	05	0003	Retribusi Kios
4	1	02	01	06		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	02	01	06	0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	02	01	07		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4	1	02	01	07	0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
4	1	02	01	07	0002	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
4	1	02	01	07	0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
4	1	02	01	08		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	02	01	08	0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)
4	1	02	01	08	0002	Retribusi Penyediaan Peta Foto
4	1	02	01	08	0003	Retribusi Penyediaan Peta Digital
4	1	02	01	08	0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik
4	1	02	01	08	0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
4	1	02	01	09		Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	02	01	09	0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	02	01	10		Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	02	01	10	0001	Retribusi Rumah Tangga
4	1	02	01	10	0002	Retribusi Perkantoran
4	1	02	01	10	0003	Retribusi Industri
4	1	02	01	11		Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	02	01	11	0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat
4	1	02	01	11	0002	Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
4	1	02	01	12		Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	02	01	12	0001	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
4	1	02	01	12	0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
4	1	02	01	12	0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
4	1	02	01	13		Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	02	01	13	0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian
4	1	02	02			Retribusi Jasa Usaha
4	1	02	02	01		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan
4	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah
4	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan
4	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium
4	1	02	02	01	0005	Retribusi Pemakaian Ruangan
4	1	02	02	01	0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor
4	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat
4	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	02	02	02	0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
4	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
4	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan
4	1	02	02	03	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
4	1	02	02	04		Retribusi Terminal
4	1	02	02	04	0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
4	1	02	02	04	0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
4	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
4	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
4	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
4	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
4	1	02	02	06	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
4	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan
4	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	02	02	08	0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air
4	1	02	02	10	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang
4	1	02	02	10	0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang
4	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	02	02	11	0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
4	1	02	02	11	0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
4	1	02	02	11	0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
4	1	02	02	11	0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
4	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
4	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
4	1	02	03	02	0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
4	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan
4	1	02	03	04	0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
4	1	02	03	04	0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
4	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	02	03	05	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
4	1	02	03	05	0002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
4	1	02	03	05	0003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
4	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
4	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	01	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
4	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
4	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
4	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
4	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
4	1	03	02	03	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)
4	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
4	1	03	02	04	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
4	1	03	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
4	1	03	02	05	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
4	1	03	03			Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	03	03	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	03	03	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	1	04				Lain-lain PAD yang Sah
4	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah
4	1	04	01	01	0001	Hasil Penjualan Tanah
4	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
4	1	04	01	02	0001	Hasil Penjualan Alat Besar
4	1	04	01	02	0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan
4	1	04	01	02	0003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur
4	1	04	01	02	0004	Hasil Penjualan Alat Pertanian
4	1	04	01	02	0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga
4	1	04	01	02	0006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
4	1	04	01	02	0007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan
4	1	04	01	02	0008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium
4	1	04	01	02	0010	Hasil Penjualan Komputer
4	1	04	01	02	0011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi
4	1	04	01	02	0012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran
4	1	04	01	02	0013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
4	1	04	01	02	0014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi
4	1	04	01	02	0015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja
4	1	04	01	02	0016	Hasil Penjualan Alat Peraga
4	1	04	01	02	0017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi
4	1	04	01	02	0018	Hasil Penjualan Rambu-rambu
4	1	04	01	02	0019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga
4	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
4	1	04	01	03	0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung

Kode Akun						Uraian Akun
4	1	04	01	03	0002	Hasil Penjualan Monumen
4	1	04	01	03	0003	Hasil Penjualan Bangunan Menara
4	1	04	01	03	0004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti
4	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	04	01	04	0001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan
4	1	04	01	04	0002	Hasil Penjualan Bangunan Air
4	1	04	01	04	0003	Hasil Penjualan Instalasi
4	1	04	01	04	0004	Hasil Penjualan Jaringan
4	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
4	1	04	01	05	0001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan
4	1	04	01	05	0002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
4	1	04	01	05	0003	Hasil Penjualan Hewan
4	1	04	01	05	0004	Hasil Penjualan Biota Perairan
4	1	04	01	05	0005	Hasil Penjualan Tanaman
4	1	04	01	05	0006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya
4	1	04	01	05	0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi
4	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya
4	1	04	01	06	0001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
4	1	04	01	06	0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
4	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
4	1	04	02	01	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
4	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
4	1	04	02	02	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar
4	1	04	02	02	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan
4	1	04	02	02	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur
4	1	04	02	02	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian
4	1	04	02	02	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga
4	1	04	02	02	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
4	1	04	02	02	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan
4	1	04	02	02	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium
4	1	04	02	02	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer
4	1	04	02	02	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi
4	1	04	02	02	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran
4	1	04	02	02	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
4	1	04	02	02	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi
4	1	04	02	02	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja
4	1	04	02	02	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga
4	1	04	02	02	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi
4	1	04	02	02	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu- Rambu
4	1	04	02	02	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga
4	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
4	1	04	02	03	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung
4	1	04	02	03	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen
4	1	04	02	03	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara
4	1	04	02	03	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti
4	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
4	1	04	02	04	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan
4	1	04	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air
4	1	04	02	04	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi
4	1	04	02	04	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan
4	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
4	1	04	02	05	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan
4	1	04	02	05	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
4	1	04	02	05	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan
4	1	04	02	05	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan
4	1	04	02	05	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman
4	1	04	02	05	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya
4	1	04	02	05	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi
4	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
4	1	04	02	06	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
4	1	04	02	06	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain
4	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
4	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD
4	1	04	03	01	0001	Hasil Sewa BMD
4	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
4	1	04	03	02	0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
4	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah
4	1	04	03	03	0001	Hasil dari Bangun Guna Serah
4	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna
4	1	04	03	04	0001	Hasil dari Bangun Serah Guna
4	1	04	03	05		Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	03	05	0001	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	04			Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	04	01		Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	04	01	0001	Hasil Kerja Sama Daerah
4	1	04	05			Jasa Giro
4	1	04	05	01		Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	04	05	01	0001	Jasa Giro pada Kas Daerah
4	1	04	05	02		Jasa Giro pada Kas di Bendahara
4	1	04	05	02	0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara
4	1	04	05	03		Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
4	1	04	05	03	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
4	1	04	05	04		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
4	1	04	05	04	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
4	1	04	05	05		Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
4	1	04	05	05	0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
4	1	04	06			Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	06	01		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	06	01	0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir



Kode Akun					Uraian Akun
4	1	04	07		Pendapatan Bunga
4	1	04	07	01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4	1	04	07	01	0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
4	1	04	08		Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
4	1	04	08	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4	1	04	08	01	0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
4	1	04	08	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4	1	04	08	02	0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
4	1	04	09		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	04	09	01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	04	09	01	0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
4	1	04	10		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	10	01	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	10	01	0001 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
4	1	04	11		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	11	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	11	01	0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4	1	04	12		Pendapatan Denda Pajak Daerah
4	1	04	12	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
4	1	04	12	01	0001 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan
4	1	04	12	01	0002 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Jeep
4	1	04	12	01	0003 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Minibus
4	1	04	12	01	0004 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	04	12	01	0005 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
4	1	04	12	01	0006 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	04	12	01	0007 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	04	12	01	0008 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	04	12	01	0009 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	04	12	01	0010 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua
4	1	04	12	01	0011 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-
4	1	04	12	01	0012 Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
4	1	04	12	01	0013 Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
4	1	04	12	01	0014 Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
4	1	04	12	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
4	1	04	12	02	0001 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
4	1	04	12	02	0002 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
4	1	04	12	02	0003 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
4	1	04	12	02	0004 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus
4	1	04	12	02	0005 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
4	1	04	12	02	0006 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
4	1	04	12	02	0007 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
4	1	04	12	02	0008 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck
4	1	04	12	02	0009 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
4	1	04	12	02	0010 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua
4	1	04	12	02	0011 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga
4	1	04	12	02	0012 Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air
4	1	04	12	02	0013 Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
4	1	04	12	02	0014 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
4	1	04	12	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4	1	04	12	03	0001 Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin
4	1	04	12	03	0002 Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar
4	1	04	12	03	0003 Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas
4	1	04	12	03	0004 Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya
4	1	04	12	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	04	12	04	0001 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
4	1	04	12	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	04	12	05	0001 Pendapatan Denda Pajak Rokok
4	1	04	12	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	04	12	06	0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel
4	1	04	12	06	0002 Pendapatan Denda Pajak Motel
4	1	04	12	06	0003 Pendapatan Denda Pajak Losmen
4	1	04	12	06	0004 Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
4	1	04	12	06	0005 Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
4	1	04	12	06	0006 Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
4	1	04	12	06	0007 Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny
4	1	04	12	06	0008 Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
4	1	04	12	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran
4	1	04	12	07	0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisny
4	1	04	12	07	0002 Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisny
4	1	04	12	07	0003 Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisny
4	1	04	12	07	0004 Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisny
4	1	04	12	07	0005 Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisny
4	1	04	12	07	0006 Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisny
4	1	04	12	07	0007 Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisny
4	1	04	12	08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan
4	1	04	12	08	0001 Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
4	1	04	12	08	0002 Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
4	1	04	12	08	0003 Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisny
4	1	04	12	08	0004 Pendapatan Denda Pajak Pameran
4	1	04	12	08	0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisny
4	1	04	12	08	0006 Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap
4	1	04	12	08	0007 Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling
4	1	04	12	08	0008 Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
4	1	04	12	08	0009 Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
4	1	04	12	08	0010 Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
4	1	04	12	09	Pendapatan Denda Pajak Reklame
4	1	04	12	09	0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron
4	1	04	12	09	0002 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
4	1	04	12	09	0003 Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker

Kode Akun						Uraian Akun
4	1	04	12	09	0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
4	1	04	12	09	0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
4	1	04	12	09	0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
4	1	04	12	09	0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
4	1	04	12	09	0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
4	1	04	12	09	0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide
4	1	04	12	09	0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
4	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
4	1	04	12	10	0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
4	1	04	12	10	0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
4	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	04	12	11	0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir
4	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4	1	04	12	12	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
4	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
4	1	04	12	13	0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung
4	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4	1	04	12	14	0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes
4	1	04	12	14	0002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
4	1	04	12	14	0003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
4	1	04	12	14	0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
4	1	04	12	14	0005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
4	1	04	12	14	0006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
4	1	04	12	14	0007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit
4	1	04	12	14	0008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit
4	1	04	12	14	0009	Pendapatan Denda Pajak Felspar
4	1	04	12	14	0010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)
4	1	04	12	14	0011	Pendapatan Denda Pajak Grafit
4	1	04	12	14	0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
4	1	04	12	14	0013	Pendapatan Denda Pajak Gips
4	1	04	12	14	0014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit
4	1	04	12	14	0015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin
4	1	04	12	14	0016	Pendapatan Denda Pajak Leusit
4	1	04	12	14	0017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit
4	1	04	12	14	0018	Pendapatan Denda Pajak Mika
4	1	04	12	14	0019	Pendapatan Denda Pajak Marmar
4	1	04	12	14	0020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat
4	1	04	12	14	0021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien
4	1	04	12	14	0022	Pendapatan Denda Pajak Oker
4	1	04	12	14	0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
4	1	04	12	14	0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
4	1	04	12	14	0025	Pendapatan Denda Pajak Perlit
4	1	04	12	14	0026	Pendapatan Denda Pajak Fosfat
4	1	04	12	14	0027	Pendapatan Denda Pajak Talk
4	1	04	12	14	0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
4	1	04	12	14	0029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatom
4	1	04	12	14	0030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
4	1	04	12	14	0031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
4	1	04	12	14	0032	Pendapatan Denda Pajak Tras
4	1	04	12	14	0033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif
4	1	04	12	14	0034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit
4	1	04	12	14	0035	Pendapatan Denda Pajak Basal
4	1	04	12	14	0036	Pendapatan Denda Pajak Trakit
4	1	04	12	14	0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
4	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4	1	04	12	15	0001	Pendapatan Denda PBBP2
4	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
4	1	04	12	16	0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
4	1	04	12	16	0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
4	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah
4	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4	1	04	13	01	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan
4	1	04	13	01	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4	1	04	13	01	0003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
4	1	04	13	01	0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	1	04	13	01	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar
4	1	04	13	01	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4	1	04	13	01	0007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan
4	1	04	13	01	0008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4	1	04	13	01	0009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
4	1	04	13	01	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4	1	04	13	01	0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4	1	04	13	01	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan
4	1	04	13	01	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
4	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4	1	04	13	02	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4	1	04	13	02	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
4	1	04	13	02	0003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan
4	1	04	13	02	0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal
4	1	04	13	02	0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir
4	1	04	13	02	0006	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
4	1	04	13	02	0007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan
4	1	04	13	02	0008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4	1	04	13	02	0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	1	04	13	02	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Air
4	1	04	13	02	0011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
4	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4	1	04	13	03	0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4	1	04	13	03	0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4	1	04	13	03	0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
4	1	04	13	03	0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha
4	1	04	13	03	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
4	1	04	13	03	0006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
4	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4	1	04	14	01	0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
4	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian
4	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
4	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
4	1	04	15	02	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
4	1	04	15	02	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
4	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
4	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
4	1	04	15	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa
4	1	04	15	04	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Tetap
4	1	04	15	04	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota
4	1	04	15	04	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
4	1	04	15	04	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
4	1	04	15	04	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri- Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri
4	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
4	1	04	15	05	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK
4	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
4	1	04	15	06	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM
4	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4	1	04	15	07	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4	1	04	16			Pendapatan BLUD
4	1	04	16	01		Pendapatan BLUD
4	1	04	16	01	0001	Pendapatan BLUD
4	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
4	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
4	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD
4	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	17	02	0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
4	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
4	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	1	04	18	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
4	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	19	01	0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
4	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
4	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
4	1	04	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
4	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	04	21	01	0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
4	1	04	22			Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
4	1	04	22	01		Pendapatan Zakat
4	1	04	22	01	0001	Pendapatan Zakat
4	1	04	22	01	0002	Pendapatan Infaq
4	1	04	22	01	0003	Pendapatan Shadaqah
4	1	04	22	01	0004	Pendapatan Wakaf
4	2					PENDAPATAN TRANSFER
4	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4	2	01	01			Dana Perimbangan
4	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
4	2	01	01	01	0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan
4	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21
4	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
4	2	01	01	01	0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
4	2	01	01	01	0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi
4	2	01	01	01	0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi
4	2	01	01	01	0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi
4	2	01	01	01	0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent
4	2	01	01	01	0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty
4	2	01	01	01	0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
4	2	01	01	01	0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)
4	2	01	01	01	0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)
4	2	01	01	01	0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan
4	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
4	2	01	01	02	0001	DAU
4	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan
4	2	01	01	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
4	2	01	01	02	0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
4	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD
4	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP

Kode Akun						Uraian Akun
4	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
4	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB
4	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB
4	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD
4	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP
4	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA
4	2	01	01	03	0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK
4	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah
4	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Gedung Olahraga
4	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
4	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
4	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian
4	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
4	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>
4	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
4	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
4	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Pembangunan RS Pratama
4	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Puskesmas Pariwisata
4	2	01	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
4	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
4	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
4	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB
4	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> (KB)
4	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
4	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
4	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
4	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
4	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-
4	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan
4	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan
4	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
4	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
4	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Keselamatan Jalan
4	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
4	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
4	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
4	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
4	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
4	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
4	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
4	2	01	01	03	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
4	2	01	01	03	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
4	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
4	2	01	01	03	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi
4	2	01	01	03	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
4	2	01	01	03	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan
4	2	01	01	03	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
4	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
4	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler
4	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi
4	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja
4	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD
4	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD
4	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD
4	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD
4	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
4	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
4	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
4	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
4	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
4	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
4	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
4	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
4	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM
4	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
4	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
4	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS
4	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)
4	2	01	02	01		DID
4	2	01	02	01	0001	DID
4	2	01	03			Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur
4	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
4	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
4	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
4	2	01	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
4	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
4	2	01	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
4	2	01	03	05	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
4	2	01	04			Dana Keistimewaan
4	2	01	04	01		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	2	01	04	01	0001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	2	01	05			Dana Desa
4	2	01	05	01		Dana Desa

Kode Akun						Uraian Akun
4	2	01	05	01	0001	Dana Desa
4	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah
4	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil
4	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak
4	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor
4	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan
4	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok
4	2	02	02			Bantuan Keuangan
4	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
4	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi
4	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
4	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	03	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
4	2	02	02	04	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4	3	01				Pendapatan Hibah
4	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	01	02	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah
4	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
4	3	01	03	01	0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri
4	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
4	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
4	3	01	04	01	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
4	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
4	3	01	04	02	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri
4	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4	3	01	04	03	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
4	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
4	3	01	04	04	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri
4	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	01	05	01	0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
4	3	02				Dana Darurat
4	3	02	01			Dana Darurat
4	3	02	01	01		Dana Darurat
4	3	02	01	01	0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana
4	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
4	3	03	01			Lain-lain Pendapatan
4	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS
4	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS
4	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah
4	3	03	01	02	0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah
4	3	03	01	02	0002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya
4	3	03	01	02	0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN
4	3	03	01	02	0004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD
4	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia
4	3	03	01	02	0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik
5						BELANJA DAERAH
5	1					BELANJA OPERASI
5	1	01				Belanja Pegawai
5	1	01	01			Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5	1	01	01	01		Belanja Gaji Pokok ASN
5	1	01	01	01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS
5	1	01	01	01	0002	Belanja Gaji Pokok PPPK
5	1	01	01	02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN
5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS
5	1	01	01	02	0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK
5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN
5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS
5	1	01	01	03	0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK
5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN
5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS
5	1	01	01	04	0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK
5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS
5	1	01	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK
5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN
5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS
5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK
5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS
5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK
5	1	01	01	09		Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN
5	1	01	01	09	0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS
5	1	01	01	09	0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK
5	1	01	01	10		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
5	1	01	01	10	0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	01	01	10	0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
5	1	01	01	11		Belanja luran Jaminan Kematian ASN
5	1	01	01	11	0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS
5	1	01	01	11	0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK
5	1	01	01	12		Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
5	1	01	01	12	0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
5	1	01	01	12	0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
5	1	01	02			Belanja Tambahan Penghasilan ASN
5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
5	1	01	02	01	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
5	1	01	02	02		Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
5	1	01	02	02	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS
5	1	01	02	02	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
5	1	01	02	03	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
5	1	01	02	03	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
5	1	01	02	04		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
5	1	01	02	04	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
5	1	01	02	04	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
5	1	01	02	05	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
5	1	01	02	05	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5	1	01	03	01		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	01	03	01	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	01	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	01	03	01	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	01	03	01	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	01	03	01	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	01	03	01	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	01	03	01	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	01	03	01	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
5	1	01	03	01	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	01	03	01	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	01	03	01	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	01	03	01	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	01	03	01	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan
5	1	01	03	01	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	01	03	02		Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	01	03	02	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
5	1	01	03	02	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
5	1	01	03	02	0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat bagi ASN
5	1	01	03	02	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	01	03	02	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
5	1	01	03	02	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	01	03	02	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	01	03	02	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
5	1	01	03	02	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
5	1	01	03	02	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
5	1	01	03	02	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	01	03	02	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
5	1	01	03	02	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	01	03	02	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	01	03	02	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	01	03	02	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
5	1	01	03	02	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	01	03	02	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	01	03	02	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
5	1	01	03	02	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	01	03	02	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	01	03	02	0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	01	03	02	0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
5	1	01	03	02	0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5	1	01	03	02	0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
5	1	01	03	02	0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	01	03	02	0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	01	03	02	0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
5	1	01	03	02	0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
5	1	01	03	02	0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5	1	01	03	03		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
5	1	01	03	03	0001	Belanja TPG PNSD
5	1	01	03	04		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
5	1	01	03	04	0001	Belanja TKG PNSD
5	1	01	03	05		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
5	1	01	03	05	0001	Belanja Tamsil Guru PNSD
5	1	01	03	06		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	01	03	06	0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

Kode Akun					Uraian Akun
5	1	01	03	07	Belanja Honorarium
5	1	01	03	07	0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
5	1	01	03	07	0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
5	1	01	03	07	0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
5	1	01	03	08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD
5	1	01	03	08	0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
5	1	01	03	08	0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
5	1	01	04		Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
5	1	01	04	01	Belanja Uang Representasi DPRD
5	1	01	04	01	0001 Belanja Uang Representasi DPRD
5	1	01	04	02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	01	04	02	0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
5	1	01	04	03	Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	01	04	03	0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD
5	1	01	04	04	Belanja Uang Paket DPRD
5	1	01	04	04	0001 Belanja Uang Paket DPRD
5	1	01	04	05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	01	04	05	0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
5	1	01	04	06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	01	04	06	0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
5	1	01	04	07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5	1	01	04	07	0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
5	1	01	04	08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	08	0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	09	Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	01	04	09	0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD
5	1	01	04	10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	10	0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD
5	1	01	04	11	0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD
5	1	01	04	12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	01	04	12	0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD
5	1	01	04	12	0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
5	1	01	04	12	0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD
5	1	01	04	12	0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
5	1	01	04	13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	01	04	13	0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
5	1	01	04	14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	01	04	14	0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
5	1	01	05		Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
5	1	01	05	01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	01	05	01	0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
5	1	01	05	02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	01	05	02	0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
5	1	01	05	03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	01	05	03	0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
5	1	01	05	04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	01	05	04	0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
5	1	01	05	05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	01	05	05	0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
5	1	01	05	06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	01	05	06	0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
5	1	01	05	07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	07	0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	01	05	08	0001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
5	1	01	05	09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	01	05	09	0001 Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH
5	1	01	05	10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	01	05	10	0001 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	10	0002 Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	10	0003 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	10	0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	01	05	10	0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	01	05	10	0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	01	05	10	0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	01	05	10	0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
5	1	01	05	10	0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	01	05	10	0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas
5	1	01	05	10	0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	01	05	10	0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	01	05	10	0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	01	05	10	0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	01	05	10	0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
5	1	01	05	10	0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	01	05	11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
5	1	01	05	11	0001 Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Kesehatan
5	1	01	05	11	0002 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	01	05	11	0003 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
5	1	01	05	11	0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
5	1	01	05	11	0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar
5	1	01	05	11	0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	01	05	11	0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
5	1	01	05	11	0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak

Kode Akun						Uraian Akun
						Peta
5	1	01	05	11	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5	1	01	05	11	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair
5	1	01	05	11	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	01	05	11	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pendidikan
5	1	01	05	11	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	01	05	11	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	01	05	11	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
5	1	01	05	11	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
5	1	01	05	11	0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	01	05	11	0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	01	05	11	0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
5	1	01	05	11	0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	01	05	11	0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	01	05	11	0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	01	05	11	0023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-
5	1	01	05	11	0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5	1	01	05	11	0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan
5	1	01	05	11	0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	01	05	11	0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	01	05	11	0028	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Usaha Perikanan
5	1	01	05	11	0029	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas
5	1	01	05	11	0030	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
5	1	01	06			Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
5	1	01	06	01		Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	01	06	01	0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
5	1	01	06	02		Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	01	06	02	0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
5	1	02				Belanja Barang dan Jasa
5	1	02	01			Belanja Barang
5	1	02	01	01		Belanja Barang Pakai Habis
5	1	02	01	01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
5	1	02	01	01	0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia
5	1	02	01	01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5	1	02	01	01	0005	Belanja Bahan-Bahan Baku
5	1	02	01	01	0006	Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir
5	1	02	01	01	0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses
5	1	02	01	01	0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
5	1	02	01	01	0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
5	1	02	01	01	0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas
5	1	02	01	01	0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
5	1	02	01	01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
5	1	02	01	01	0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
5	1	02	01	01	0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
5	1	02	01	01	0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
5	1	02	01	01	0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
5	1	02	01	01	0017	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar
5	1	02	01	01	0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
5	1	02	01	01	0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
5	1	02	01	01	0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
5	1	02	01	01	0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
5	1	02	01	01	0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
5	1	02	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
5	1	02	01	01	0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer
5	1	02	01	01	0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik
5	1	02	01	01	0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas
5	1	02	01	01	0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
5	1	02	01	01	0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga
5	1	02	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata
5	1	02	01	01	0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5	1	02	01	01	0037	Belanja Obat-Obatan-Obat
5	1	02	01	01	0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
5	1	02	01	01	0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
5	1	02	01	01	0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
5	1	02	01	01	0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
5	1	02	01	01	0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
5	1	02	01	01	0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura
5	1	02	01	01	0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan



Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	01	01	0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
5	1	02	01	01	0046	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
5	1	02	01	01	0047	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
5	1	02	01	01	0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
5	1	02	01	01	0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
5	1	02	01	01	0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
5	1	02	01	01	0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5	1	02	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
5	1	02	01	01	0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
5	1	02	01	01	0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
5	1	02	01	01	0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
5	1	02	01	01	0057	Belanja Makanan dan Minuman pada
5	1	02	01	01	0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
5	1	02	01	01	0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH
5	1	02	01	01	0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
5	1	02	01	01	0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5	1	02	01	01	0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5	1	02	01	01	0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5	1	02	01	01	0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
5	1	02	01	01	0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
5	1	02	01	01	0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5	1	02	01	01	0067	Belanja Pakaian Penyelamatan
5	1	02	01	01	0068	Belanja Pakaian Siaga
5	1	02	01	01	0069	Belanja Pakaian Teknik
5	1	02	01	01	0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja
5	1	02	01	01	0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium
5	1	02	01	01	0072	Belanja Pakaian Kerja Bengkel
5	1	02	01	01	0073	Belanja Pakaian KORPRI
5	1	02	01	01	0074	Belanja Pakaian Adat Daerah
5	1	02	01	01	0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional
5	1	02	01	01	0076	Belanja Pakaian Olahraga
5	1	02	01	01	0077	Belanja Pakaian Paskibraka
5	1	02	01	01	0078	Belanja Pakaian Jas/Safari
5	1	02	01	02		Belanja Barang Tak Habis Pakai
5	1	02	01	02	0001	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja
5	1	02	01	02	0002	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
5	1	02	01	02	0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan
5	1	02	01	02	0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu
5	1	02	01	02	0005	Belanja Komponen-Attachment
5	1	02	01	02	0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya
5	1	02	01	02	0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
5	1	02	01	02	0008	Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
5	1	02	01	02	0009	Belanja Pipa-Pipa Baja
5	1	02	01	02	0010	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan
5	1	02	01	02	0011	Belanja Pipa-Pipa Fiber Glass
5	1	02	01	02	0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
5	1	02	01	02	0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya
5	1	02	01	03		Belanja Barang Bekas Dipakai
5	1	02	01	03	0001	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas
5	1	02	01	03	0002	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Pipa Bekas
5	1	02	01	03	0003	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
5	1	02	02	01		Belanja Jasa
5	1	02	02	01		Belanja Jasa Kantor
5	1	02	02	01	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
5	1	02	02	01	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
5	1	02	02	01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
5	1	02	02	01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5	1	02	02	01	0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
5	1	02	02	01	0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
5	1	02	02	01	0007	Honorarium Rohaniwan
5	1	02	02	01	0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
5	1	02	02	01	0009	Honorarium Penyelenggara Ujian
5	1	02	02	01	0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
5	1	02	02	01	0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
5	1	02	02	01	0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5	1	02	02	01	0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan
5	1	02	02	01	0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
5	1	02	02	01	0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium
5	1	02	02	01	0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
5	1	02	02	01	0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
5	1	02	02	01	0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
5	1	02	02	01	0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana
5	1	02	02	01	0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
5	1	02	02	01	0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air
5	1	02	02	01	0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan
5	1	02	02	01	0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
5	1	02	02	01	0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
5	1	02	02	01	0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi
5	1	02	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
5	1	02	02	01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
5	1	02	02	01	0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli
5	1	02	02	01	0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
5	1	02	02	01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan
5	1	02	02	01	0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka
5	1	02	02	01	0033	Belanja Jasa Tenaga Supir
5	1	02	02	01	0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak
5	1	02	02	01	0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	02	01	0036	Belanja Jasa Audit/ <i>Surveillance</i> ISO
5	1	02	02	01	0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
5	1	02	02	01	0038	Belanja Jasa Tata Rias
5	1	02	02	01	0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
5	1	02	02	01	0040	Belanja Jasa Tenaga Operator Tiket
5	1	02	02	01	0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
5	1	02	02	01	0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
5	1	02	02	01	0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan
5	1	02	02	01	0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan
5	1	02	02	01	0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan
5	1	02	02	01	0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
5	1	02	02	01	0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
5	1	02	02	01	0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi
5	1	02	02	01	0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
5	1	02	02	01	0050	Belanja Jasa Kalibrasi
5	1	02	02	01	0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah
5	1	02	02	01	0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
5	1	02	02	01	0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah
5	1	02	02	01	0054	Belanja Jasa Jalan/Tol
5	1	02	02	01	0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan
5	1	02	02	01	0056	Belanja Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
5	1	02	02	01	0057	Belanja Jasa Operator Kapal
5	1	02	02	01	0058	Belanja Jasa Penyelaman
5	1	02	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon
5	1	02	02	01	0060	Belanja Tagihan Air
5	1	02	02	01	0061	Belanja Tagihan Listrik
5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
5	1	02	02	01	0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
5	1	02	02	01	0064	Belanja Paket/Pengiriman
5	1	02	02	01	0065	Belanja Penambahan Daya
5	1	02	02	01	0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan
5	1	02	02	01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
5	1	02	02	01	0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum
5	1	02	02	01	0069	Belanja Pengolahan Air Limbah
5	1	02	02	01	0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan
5	1	02	02	01	0071	Belanja Lembur
5	1	02	02	01	0072	Belanja Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
5	1	02	02	01	0073	Belanja <i>Medical Check Up</i>
5	1	02	02	02		Belanja luran Jaminan/Asuransi
5	1	02	02	02	0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	02	02	02	0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
5	1	02	02	02	0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
5	1	02	02	02	0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
5	1	02	02	02	0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
5	1	02	02	02	0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
5	1	02	02	02	0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN
5	1	02	02	02	0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah
5	1	02	02	03		Belanja Sewa Tanah
5	1	02	02	03	0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5	1	02	02	03	0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	1	02	02	03	0003	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan
5	1	02	02	03	0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
5	1	02	02	03	0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
5	1	02	02	03	0006	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	1	02	02	03	0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya
5	1	02	02	03	0008	Belanja Sewa Tanah Basah
5	1	02	02	03	0009	Belanja Sewa Tanah Kering
5	1	02	02	03	0010	Belanja Sewa Tanah Perkebunan
5	1	02	02	03	0011	Belanja Sewa Tanah Hutan
5	1	02	02	03	0012	Belanja Sewa Tanah Tandus
5	1	02	02	03	0013	Belanja Sewa Tanah Padang Alang- Alang/Rumput
5	1	02	02	03	0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian
5	1	02	02	03	0015	Belanja Sewa Tanah Pertambangan
5	1	02	02	03	0016	Belanja Sewa Tanah Non Persil Lainnya
5	1	02	02	03	0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga
5	1	02	02	03	0018	Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir
5	1	02	02	03	0019	Belanja Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
5	1	02	02	03	0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	1	02	02	03	0021	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	1	02	02	03	0022	Belanja Sewa Tanah Lapangan Terbang
5	1	02	02	03	0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan
5	1	02	02	03	0024	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air
5	1	02	02	03	0025	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
5	1	02	02	03	0026	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
5	1	02	02	03	0027	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
5	1	02	02	03	0028	Belanja Sewa Tanah untuk Makam
5	1	02	02	03	0029	Belanja Sewa Tanah untuk Taman
5	1	02	02	03	0030	Belanja Sewa Tanah untuk Latihan
5	1	02	02	03	0031	Belanja Sewa Tanah Daerah Pertahanan
5	1	02	02	03	0032	Belanja Sewa Tanah Lapangan PBB
5	1	02	02	03	0033	Belanja Sewa Tanah Kampung
5	1	02	02	03	0034	Belanja Sewa <i>Emplasmnt</i>
5	1	02	02	03	0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya
5	1	02	02	04		Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
5	1	02	02	04	0001	Belanja Sewa <i>Tractor</i>
5	1	02	02	04	0002	Belanja Sewa <i>Grader</i>
5	1	02	02	04	0003	Belanja Sewa <i>Excavator</i>
5	1	02	02	04	0004	Belanja Sewa <i>Pile Driver</i>
5	1	02	02	04	0005	Belanja Sewa <i>Hauler</i>
5	1	02	02	04	0006	Belanja Sewa <i>Asphalt Equipment</i>

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	02	04	0007	Belanja Sewa <i>Compacting Equipment</i>
5	1	02	02	04	0008	Belanja Sewa <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
5	1	02	02	04	0009	Belanja Sewa <i>Loader</i>
5	1	02	02	04	0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat
5	1	02	02	04	0011	Belanja Sewa Mesin Proses
5	1	02	02	04	0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya
5	1	02	02	04	0013	Belanja Sewa <i>Dredger</i>
5	1	02	02	04	0014	Belanja Sewa <i>Floating Excavator</i>
5	1	02	02	04	0015	Belanja Sewa <i>Amphibi Dredger</i>
5	1	02	02	04	0016	Belanja Sewa Kapal Tarik
5	1	02	02	04	0017	Belanja Sewa Mesin Proses Apung
5	1	02	02	04	0018	Belanja Sewa Alat Besar Apung Lainnya
5	1	02	02	04	0019	Belanja Sewa Alat Penarik
5	1	02	02	04	0020	Belanja Sewa <i>Feeder</i>
5	1	02	02	04	0021	Belanja Sewa <i>Compressor</i>
5	1	02	02	04	0022	Belanja Sewa <i>Electric Generating Set</i>
5	1	02	02	04	0023	Belanja Sewa Pompa
5	1	02	02	04	0024	Belanja Sewa Mesin Bor
5	1	02	02	04	0025	Belanja Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
5	1	02	02	04	0026	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
5	1	02	02	04	0027	Belanja Sewa Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
5	1	02	02	04	0028	Belanja Sewa <i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
5	1	02	02	04	0029	Belanja Sewa Mesin <i>Tattoo</i>
5	1	02	02	04	0030	Belanja Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan
5	1	02	02	04	0031	Belanja Sewa Peralatan Selam
5	1	02	02	04	0032	Belanja Sewa Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
5	1	02	02	04	0033	Belanja Sewa Peralatan Intelijen
5	1	02	02	04	0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya
5	1	02	02	04	0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	1	02	02	04	0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
5	1	02	02	04	0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	02	04	0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	1	02	02	04	0039	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	1	02	02	04	0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
5	1	02	02	04	0041	Belanja Sewa Kendaraan Tempur
5	1	02	02	04	0042	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
5	1	02	02	04	0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0044	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	02	04	0045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
5	1	02	02	04	0046	Belanja Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
5	1	02	02	04	0047	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
5	1	02	02	04	0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	02	04	0050	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
5	1	02	02	04	0051	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
5	1	02	02	04	0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0053	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
5	1	02	02	04	0054	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	02	04	0055	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
5	1	02	02	04	0056	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	02	04	0057	Belanja Sewa Kapal Terbang
5	1	02	02	04	0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
5	1	02	02	04	0059	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
5	1	02	02	04	0060	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
5	1	02	02	04	0061	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	02	04	0062	Belanja Sewa Perkakas Bengkel <i>Service</i>
5	1	02	02	04	0063	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
5	1	02	02	04	0064	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kayu
5	1	02	02	04	0065	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Khusus
5	1	02	02	04	0066	Belanja Sewa Peralatan Las
5	1	02	02	04	0067	Belanja Sewa Perkakas Pabrik Es
5	1	02	02	04	0068	Belanja Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
5	1	02	02	04	0069	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	1	02	02	04	0070	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	02	04	0071	Belanja Sewa Perkakas Bengkel <i>Service</i>
5	1	02	02	04	0072	Belanja Sewa Perkakas Pengangkat
5	1	02	02	04	0073	Belanja Sewa Perkakas <i>Standard (Standard Tools)</i>
5	1	02	02	04	0074	Belanja Sewa Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
5	1	02	02	04	0075	Belanja Sewa Perkakas Bengkel Kerja
5	1	02	02	04	0076	Belanja Sewa Peralatan Tukang Besi
5	1	02	02	04	0077	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	02	04	0078	Belanja Sewa Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	02	04	0079	Belanja Sewa Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
5	1	02	02	04	0080	Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
5	1	02	02	04	0081	Belanja Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
5	1	02	02	04	0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal
5	1	02	02	04	0083	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
5	1	02	02	04	0084	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
5	1	02	02	04	0085	Belanja Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
5	1	02	02	04	0086	Belanja Sewa Alat Kalibrasi
5	1	02	02	04	0087	Belanja Sewa <i>Oscilloscope</i>
5	1	02	02	04	0088	Belanja Sewa <i>Universal Tester</i>
5	1	02	02	04	0089	Belanja Sewa Alat Ukur/Pembanding
5	1	02	02	04	0090	Belanja Sewa Alat Ukur Lain-Lain
5	1	02	02	04	0091	Belanja Sewa Alat Timbangan/Biara
5	1	02	02	04	0092	Belanja Sewa Anak Timbangan/Biara
5	1	02	02	04	0093	Belanja Sewa Takaran Kering
5	1	02	02	04	0094	Belanja Sewa Takaran Bahan Bangunan
5	1	02	02	04	0095	Belanja Sewa Takaran Lainnya
5	1	02	02	04	0096	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	02	04	0097	Belanja Sewa <i>Specific Set</i>
5	1	02	02	04	0098	Belanja Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
5	1	02	02	04	0099	Belanja Sewa Alat Pengukur Penglihatan
5	1	02	02	04	0100	Belanja Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
5	1	02	02	04	0101	Belanja Sewa Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
5	1	02	02	04	0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya
5	1	02	02	04	0103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	1	02	02	04	0104	Belanja Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
5	1	02	02	04	0105	Belanja Sewa Alat Panen
5	1	02	02	04	0106	Belanja Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
5	1	02	02	04	0107	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	02	04	0108	Belanja Sewa Alat <i>Processing</i>
5	1	02	02	04	0109	Belanja Sewa Alat Pasca Panen
5	1	02	02	04	0110	Belanja Sewa Alat Produksi Perikanan
5	1	02	02	04	0111	Belanja Sewa Alat-Alat Peternakan
5	1	02	02	04	0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya
5	1	02	02	04	0113	Belanja Sewa Mesin Ketik
5	1	02	02	04	0114	Belanja Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
5	1	02	02	04	0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
5	1	02	02	04	0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	1	02	02	04	0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
5	1	02	02	04	0118	Belanja Sewa Mebel
5	1	02	02	04	0119	Belanja Sewa Alat Pengukur Waktu
5	1	02	02	04	0120	Belanja Sewa Alat Pembersih
5	1	02	02	04	0121	Belanja Sewa Alat Pendingin
5	1	02	02	04	0122	Belanja Sewa Alat Dapur
5	1	02	02	04	0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
5	1	02	02	04	0124	Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran
5	1	02	02	04	0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat
5	1	02	02	04	0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat
5	1	02	02	04	0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat
5	1	02	02	04	0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat
5	1	02	02	04	0129	Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	1	02	02	04	0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	1	02	02	04	0131	Belanja Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
5	1	02	02	04	0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
5	1	02	02	04	0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film
5	1	02	02	04	0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar
5	1	02	02	04	0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak
5	1	02	02	04	0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
5	1	02	02	04	0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya
5	1	02	02	04	0138	Belanja Sewa Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
5	1	02	02	04	0139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
5	1	02	02	04	0140	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	1	02	02	04	0141	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
5	1	02	02	04	0142	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
5	1	02	02	04	0143	Belanja Sewa Alat Komunikasi Sosial
5	1	02	02	04	0144	Belanja Sewa Alat-Alat Sandi
5	1	02	02	04	0145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus
5	1	02	02	04	0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
5	1	02	02	04	0147	Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit
5	1	02	02	04	0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya
5	1	02	02	04	0149	Belanja Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
5	1	02	02	04	0150	Peralatan Pemancar HF/SW
5	1	02	02	04	0151	Belanja Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
5	1	02	02	04	0152	Belanja Sewa Peralatan Pemancar UHF
5	1	02	02	04	0153	Belanja Sewa Peralatan Pemancar SHF
5	1	02	02	04	0154	Belanja Sewa Peralatan Antena MF/MW
5	1	02	02	04	0155	Belanja Sewa Peralatan Antena HF/SW
5	1	02	02	04	0156	Belanja Sewa Peralatan Antena VHF/FM
5	1	02	02	04	0157	Belanja Sewa Peralatan Antena UHF
5	1	02	02	04	0158	Belanja Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
5	1	02	02	04	0159	Belanja Sewa Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
5	1	02	02	04	0160	Belanja Sewa Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
5	1	02	02	04	0161	Belanja Sewa Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
5	1	02	02	04	0162	Belanja Sewa Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
5	1	02	02	04	0163	Belanja Sewa Peralatan <i>Microwave</i> FPU
5	1	02	02	04	0164	Belanja Sewa Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
5	1	02	02	04	0165	Belanja Sewa Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
5	1	02	02	04	0166	Belanja Sewa Peralatan <i>Dummy Load</i>
5	1	02	02	04	0167	Belanja Sewa <i>Switcher</i> Antena
5	1	02	02	04	0168	Belanja Sewa <i>Switcher</i> /Menara Antena
5	1	02	02	04	0169	Belanja Sewa <i>Feeder</i>
5	1	02	02	04	0170	Belanja Sewa <i>Humidity Control</i>
5	1	02	02	04	0171	Belanja Sewa Program <i>Input Equipment</i>
5	1	02	02	04	0172	Belanja Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
5	1	02	02	04	0173	Belanja Sewa Peralatan Pemancar LF
5	1	02	02	04	0174	Belanja Sewa Unit Pemancar MF+HF
5	1	02	02	04	0175	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
5	1	02	02	04	0176	Belanja Sewa Peralatan Penerima
5	1	02	02	04	0177	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	02	04	0178	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	02	04	0179	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	02	04	0180	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	02	04	0181	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	02	04	0182	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	02	04	0183	Belanja Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	02	04	0184	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	02	04	0185	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	02	04	0186	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	02	04	0187	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	02	04	0188	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	02	04	0189	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	02	04	0190	Belanja Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	02	04	0191	Belanja Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
5	1	02	02	04	0192	Belanja Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
5	1	02	02	04	0193	Belanja Sewa Peralatan Penerima dan
5	1	02	02	04	0194	Belanja Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
5	1	02	02	04	0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga
5	1	02	02	04	0196	Belanja Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
5	1	02	02	04	0197	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
5	1	02	02	04	0198	Belanja Sewa <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
5	1	02	02	04	0199	Belanja Sewa <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
5	1	02	02	04	0200	Belanja Sewa Radar
5	1	02	02	04	0201	Belanja Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
5	1	02	02	04	0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
5	1	02	02	04	0203	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
5	1	02	02	04	0204	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum
5	1	02	02	04	0205	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gigi
5	1	02	02	04	0206	Belanja Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	1	02	02	04	0207	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah
5	1	02	02	04	0208	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	1	02	02	04	0209	Belanja Sewa Alat Kedokteran THT
5	1	02	02	04	0210	Belanja Sewa Alat Kedokteran Mata
5	1	02	02	04	0211	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	1	02	02	04	0212	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
5	1	02	02	04	0213	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anak
5	1	02	02	04	0214	Belanja Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
5	1	02	02	04	0215	Belanja Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	1	02	02	04	0216	Belanja Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
5	1	02	02	04	0217	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jantung
5	1	02	02	04	0218	Belanja Sewa Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
5	1	02	02	04	0219	Belanja Sewa Alat Kedokteran Patalogi <i>Anatomy</i>
5	1	02	02	04	0220	Belanja Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
5	1	02	02	04	0221	Belanja Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
5	1	02	02	04	0222	Belanja Sewa Alat Kedokteran Nuklir
5	1	02	02	04	0223	Belanja Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	1	02	02	04	0224	Belanja Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	1	02	02	04	0225	Belanja Sewa Alat Kedokteran Jiwa
5	1	02	02	04	0226	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
5	1	02	02	04	0227	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICU
5	1	02	02	04	0228	Belanja Sewa Alat Kedokteran ICCU
5	1	02	02	04	0229	Belanja Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
5	1	02	02	04	0230	Belanja Sewa Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
5	1	02	02	04	0231	Belanja Sewa Alat Kedokteran Anestesi
5	1	02	02	04	0232	Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya
5	1	02	02	04	0233	Belanja Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
5	1	02	02	04	0234	Belanja Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
5	1	02	02	04	0235	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
5	1	02	02	04	0236	Belanja Sewa Alat Kesehatan Olahraga
5	1	02	02	04	0237	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
5	1	02	02	04	0238	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
5	1	02	02	04	0239	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
5	1	02	02	04	0240	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
5	1	02	02	04	0241	Belanja Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
5	1	02	02	04	0242	Belanja Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
5	1	02	02	04	0243	Belanja Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	1	02	02	04	0244	Belanja Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
5	1	02	02	04	0245	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
5	1	02	02	04	0246	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cangkok Tanam
5	1	02	02	04	0247	Belanja Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
5	1	02	02	04	0248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum
5	1	02	02	04	0249	Belanja Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	1	02	02	04	0250	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kimia
5	1	02	02	04	0251	Belanja Sewa Alat Laboratorium Patologi
5	1	02	02	04	0252	Belanja Sewa Alat Laboratorium Immunologi
5	1	02	02	04	0253	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hematologi
5	1	02	02	04	0254	Belanja Sewa Alat Laboratorium Film
5	1	02	02	04	0255	Belanja Sewa Alat Laboratorium Makanan
5	1	02	02	04	0256	Belanja Sewa Alat Laboratorium Farmasi
5	1	02	02	04	0257	Belanja Sewa Alat Laboratorium Fisika
5	1	02	02	04	0258	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	1	02	02	04	0259	Belanja Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
5	1	02	02	04	0260	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	1	02	02	04	0261	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pasir
5	1	02	02	04	0262	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5	1	02	02	04	0263	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
5	1	02	02	04	0264	Belanja Sewa Alat Laboratorium Metalografi
5	1	02	02	04	0265	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	1	02	02	04	0266	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	1	02	02	04	0267	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	1	02	02	04	0268	Belanja Sewa Alat Laboratorium Metrologi
5	1	02	02	04	0269	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
5	1	02	02	04	0270	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	1	02	02	04	0271	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5	1	02	02	04	0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
5	1	02	02	04	0273	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	1	02	02	04	0274	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
5	1	02	02	04	0275	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
5	1	02	02	04	0276	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	02	04	0277	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	1	02	02	04	0278	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	02	04	0279	Belanja Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	1	02	02	04	0280	Belanja Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
5	1	02	02	04	0281	Belanja Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5	1	02	02	04	0282	Belanja Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
5	1	02	02	04	0283	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	1	02	02	04	0284	Belanja Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
5	1	02	02	04	0285	Belanja Sewa Alat Laboratorium Biologi
5	1	02	02	04	0286	Belanja Sewa Alat Laboratorium Geofisika
5	1	02	02	04	0287	Belanja Sewa Alat Laboratorium Tambang
5	1	02	02	04	0288	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	1	02	02	04	0289	Belanja Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
5	1	02	02	04	0290	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	1	02	02	04	0291	Belanja Sewa Laboratorium Kearsipan
5	1	02	02	04	0292	Belanja Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
5	1	02	02	04	0293	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lain
5	1	02	02	04	0294	Belanja Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
5	1	02	02	04	0295	Belanja Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
5	1	02	02	04	0296	Belanja Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
5	1	02	02	04	0297	Belanja Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
5	1	02	02	04	0298	Belanja Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
5	1	02	02	04	0299	Belanja Sewa Alat Laboratorium Populasi
5	1	02	02	04	0300	Belanja Sewa Alat Pengukur Gelombang
5	1	02	02	04	0301	Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
5	1	02	02	04	0302	Belanja Sewa <i>Analytical Instrument</i>
5	1	02	02	04	0303	Belanja Sewa <i>Instrument Probe/Sensor</i>
5	1	02	02	04	0304	Belanja Sewa <i>General Laboratory Tool</i>
5	1	02	02	04	0305	Belanja Sewa <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
5	1	02	02	04	0306	Belanja Sewa <i>Laboratory Safety Equipment</i>
5	1	02	02	04	0307	Belanja Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
5	1	02	02	04	0308	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
5	1	02	02	04	0309	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
5	1	02	02	04	0310	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
5	1	02	02	04	0311	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah
5	1	02	02	04	0312	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
5	1	02	02	04	0313	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
5	1	02	02	04	0314	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS
5	1	02	02	04	0315	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
5	1	02	02	04	0316	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
5	1	02	02	04	0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
5	1	02	02	04	0318	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
5	1	02	02	04	0319	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
5	1	02	02	04	0320	Belanja Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
5	1	02	02	04	0321	Belanja Sewa Alat Peraga Kejuruan
5	1	02	02	04	0322	Belanja Sewa Alat Peraga PAUD/TK
5	1	02	02	04	0323	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
5	1	02	02	04	0324	Belanja Sewa <i>Radiation Detector</i>
5	1	02	02	04	0325	Belanja Sewa <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
5	1	02	02	04	0326	Belanja Sewa <i>Assembly/Counting System</i>
5	1	02	02	04	0327	Belanja Sewa <i>Recorder Display</i>
5	1	02	02	04	0328	Belanja Sewa <i>System/Power Supply</i>
5	1	02	02	04	0329	Belanja Sewa <i>Measuring/Testing Device</i>
5	1	02	02	04	0330	Belanja Sewa <i>Opto Electronics</i>
5	1	02	02	04	0331	Belanja Sewa <i>Accelerator</i>
5	1	02	02	04	0332	Belanja Sewa <i>Reactor Experimental System</i>
5	1	02	02	04	0333	Belanja Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
5	1	02	02	04	0334	Belanja Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	1	02	02	04	0335	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kerja
5	1	02	02	04	0336	Belanja Sewa Proteksi Lingkungan
5	1	02	02	04	0337	Belanja Sewa <i>Meteorological Equipment</i>
5	1	02	02	04	0338	Belanja Sewa Sumber Radiasi
5	1	02	02	04	0339	Belanja Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
5	1	02	02	04	0340	Belanja Sewa <i>Radiation Application Equipment</i>
5	1	02	02	04	0341	Belanja Sewa <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
5	1	02	02	04	0342	Belanja Sewa Peralatan Hidrologi
5	1	02	02	04	0343	Belanja Sewa <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
5	1	02	02	04	0344	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
5	1	02	02	04	0345	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	1	02	02	04	0346	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	1	02	02	04	0347	Belanja Sewa Laboratorium Lingkungan
5	1	02	02	04	0348	Belanja Sewa Alat Laboratorium Penunjang
5	1	02	02	04	0349	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lingkungan
5	1	02	02	04	0350	Belanja Sewa <i>Towing Carriage</i>
5	1	02	02	04	0351	Belanja Sewa <i>Wave Generator and Absorber</i>
5	1	02	02	04	0352	Belanja Sewa <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
5	1	02	02	04	0353	Belanja Sewa <i>Cavitation Tunnel</i>
5	1	02	02	04	0354	Belanja Sewa <i>Overhead Cranes</i>
5	1	02	02	04	0355	Belanja Sewa Peralatan Umum
5	1	02	02	04	0356	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
5	1	02	02	04	0357	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
5	1	02	02	04	0358	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
5	1	02	02	04	0359	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Precision Mechanical</i>
5	1	02	02	04	0360	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
5	1	02	02	04	0361	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
5	1	02	02	04	0362	Belanja Sewa Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
5	1	02	02	04	0363	Belanja Sewa MOB
5	1	02	02	04	0364	Belanja Sewa <i>Photo and Film Equipment</i>
5	1	02	02	04	0365	Belanja Sewa Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
5	1	02	02	04	0366	Belanja Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	02	04	0367	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
5	1	02	02	04	0368	Belanja Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
5	1	02	02	04	0369	Belanja Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
5	1	02	02	04	0370	Belanja Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
5	1	02	02	04	0371	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
5	1	02	02	04	0372	Belanja Sewa Alat Laboratorium Natus
5	1	02	02	04	0373	Belanja Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
5	1	02	02	04	0374	Belanja Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
5	1	02	02	04	0375	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat
5	1	02	02	04	0376	Belanja Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
5	1	02	02	04	0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan
5	1	02	02	04	0405	Belanja Sewa <i>Personal Computer</i>
5	1	02	02	04	0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya
5	1	02	02	04	0407	Belanja Sewa Peralatan <i>Mainframe</i>
5	1	02	02	04	0408	Belanja Sewa Peralatan <i>Mini Computer</i>
5	1	02	02	04	0409	Belanja Sewa Peralatan <i>Personal Computer</i>
5	1	02	02	04	0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan
5	1	02	02	04	0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya
5	1	02	02	04	0412	Belanja Sewa Optik
5	1	02	02	04	0413	Belanja Sewa Ukur/Instrumen
5	1	02	02	04	0414	Belanja Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
5	1	02	02	04	0415	Belanja Sewa Mekanik
5	1	02	02	04	0416	Belanja Sewa Elektronik/ <i>Electric</i>
5	1	02	02	04	0417	Belanja Sewa Manual
5	1	02	02	04	0418	Belanja Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
5	1	02	02	04	0419	Belanja Sewa Bor Mesin Tumbuk
5	1	02	02	04	0420	Belanja Sewa Bor Mesin Putar
5	1	02	02	04	0421	Belanja Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
5	1	02	02	04	0422	Belanja Sewa Bangka
5	1	02	02	04	0423	Belanja Sewa Pantek
5	1	02	02	04	0424	Belanja Sewa Putar
5	1	02	02	04	0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu
5	1	02	02	04	0426	Belanja Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
5	1	02	02	04	0427	Belanja Sewa Peralatan Sumur Minyak
5	1	02	02	04	0428	Belanja Sewa Sumur Pemboran
5	1	02	02	04	0429	Belanja Sewa Sumur Lainnya
5	1	02	02	04	0430	Belanja Sewa RIG
5	1	02	02	04	0431	Belanja Sewa Produksi Lainnya
5	1	02	02	04	0432	Belanja Sewa Alat Pengolahan Minyak
5	1	02	02	04	0433	Belanja Sewa Alat Pengolahan Air
5	1	02	02	04	0434	Belanja Sewa Alat Pengolahan <i>Steam</i>
5	1	02	02	04	0435	Belanja Sewa Alat Pengolahan <i>Wax</i>
5	1	02	02	04	0436	Belanja Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
5	1	02	02	04	0437	Belanja Sewa Mekanik
5	1	02	02	04	0438	Belanja Sewa Elektrik
5	1	02	02	04	0439	Belanja Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
5	1	02	02	04	0440	Belanja Sewa Perawatan Sumur
5	1	02	02	04	0441	Belanja Sewa Tes Unit
5	1	02	02	04	0442	Belanja Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
5	1	02	02	04	0443	Belanja Sewa Radiasi
5	1	02	02	04	0444	Belanja Sewa Suara
5	1	02	02	04	0445	Belanja Sewa Alat Deteksi Lainnya
5	1	02	02	04	0446	Belanja Sewa Baju Pengaman
5	1	02	02	04	0447	Belanja Sewa Masker
5	1	02	02	04	0448	Belanja Sewa Topi Kerja
5	1	02	02	04	0449	Belanja Sewa Sabuk Pengaman
5	1	02	02	04	0450	Belanja Sewa Sepatu Lapangan
5	1	02	02	04	0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya
5	1	02	02	04	0452	Belanja Sewa Alat Penolong
5	1	02	02	04	0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian
5	1	02	02	04	0454	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air
5	1	02	02	04	0455	Belanja Sewa Alat SAR Lainnya
5	1	02	02	04	0456	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
5	1	02	02	04	0457	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
5	1	02	02	04	0458	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
5	1	02	02	04	0459	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayaran dan Pengamanan Bandar Udara
5	1	02	02	04	0460	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
5	1	02	02	04	0461	Belanja Sewa Alat Ukur Peralatan <i>Fasiekrrik</i>
5	1	02	02	04	0462	Belanja Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
5	1	02	02	04	0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan
5	1	02	02	04	0464	Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan
5	1	02	02	04	0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
5	1	02	02	04	0466	Belanja Sewa <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
5	1	02	02	04	0467	Belanja Sewa <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
5	1	02	02	04	0468	Belanja Sewa <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
5	1	02	02	04	0469	Belanja Sewa <i>Solid-Solid Classifier</i>
5	1	02	02	04	0470	Belanja Sewa <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
5	1	02	02	04	0471	Belanja Sewa <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
5	1	02	02	04	0472	Belanja Sewa <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
5	1	02	02	04	0473	Belanja Sewa <i>Leaching Equipment</i>
5	1	02	02	04	0474	Belanja Sewa <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
5	1	02	02	04	0475	Belanja Sewa <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
5	1	02	02	04	0476	Belanja Sewa <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
5	1	02	02	04	0477	Belanja Sewa <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
5	1	02	02	04	0478	Belanja Sewa <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
5	1	02	02	04	0479	Belanja Sewa <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
5	1	02	02	04	0480	Belanja Sewa <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
5	1	02	02	04	0481	Belanja Sewa <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
5	1	02	02	04	0482	Belanja Sewa <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
5	1	02	02	04	0483	Belanja Sewa <i>Isotope Separation Equipment</i>

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	02	04	0484	Belanja Sewa <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
5	1	02	02	04	0485	Belanja Sewa <i>Solid Material Handling Equipment</i>
5	1	02	02	04	0486	Belanja Sewa <i>Size Reduction Size Balargement</i>
5	1	02	02	04	0487	Belanja Sewa <i>Heat Generating Equipment</i>
5	1	02	02	04	0488	Belanja Sewa <i>Heat Transfer Equipment</i>
5	1	02	02	04	0489	Belanja Sewa <i>Mechanical Process</i>
5	1	02	02	04	0490	Belanja Sewa <i>Chemical Reaction Equipment</i>
5	1	02	02	04	0491	Belanja Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
5	1	02	02	04	0492	Belanja Sewa Rambu Bersuar
5	1	02	02	04	0493	Belanja Sewa Rambu Tidak Bersuar
5	1	02	02	04	0494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5	1	02	02	04	0495	Belanja Sewa <i>Runway/Threshold Light</i>
5	1	02	02	04	0496	Belanja Sewa <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
5	1	02	02	04	0497	Belanja Sewa <i>Approach Light</i>
5	1	02	02	04	0498	Belanja Sewa <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
5	1	02	02	04	0499	Belanja Sewa <i>Signal</i>
5	1	02	02	04	0500	Belanja Sewa <i>Flood Lights</i>
5	1	02	02	04	0501	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
5	1	02	02	04	0502	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	1	02	02	04	0503	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
5	1	02	02	04	0504	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Atletik
5	1	02	02	04	0505	Belanja Sewa Peralatan Permainan
5	1	02	02	04	0506	Belanja Sewa Peralatan Senam
5	1	02	02	04	0507	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Air
5	1	02	02	04	0508	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Udara
5	1	02	02	04	0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
5	1	02	02	05		Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
5	1	02	02	05	0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
5	1	02	02	05	0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang
5	1	02	02	05	0003	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
5	1	02	02	05	0004	Belanja Sewa Bangunan Gedung Instalasi
5	1	02	02	05	0005	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
5	1	02	02	05	0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan
5	1	02	02	05	0007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
5	1	02	02	05	0008	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	1	02	02	05	0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	1	02	02	05	0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	1	02	02	05	0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	1	02	02	05	0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	1	02	02	05	0013	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	1	02	02	05	0014	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	1	02	02	05	0015	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
5	1	02	02	05	0016	Belanja Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
5	1	02	02	05	0017	Belanja Sewa Bangunan Gedung Museum
5	1	02	02	05	0018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
5	1	02	02	05	0019	Belanja Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
5	1	02	02	05	0020	Belanja Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
5	1	02	02	05	0021	Belanja Sewa Bangunan Rumah Tahanan
5	1	02	02	05	0022	Belanja Sewa Bangunan Gedung Krematorium
5	1	02	02	05	0023	Belanja Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	1	02	02	05	0024	Belanja Sewa Bangunan Tempat Persidangan
5	1	02	02	05	0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka
5	1	02	02	05	0026	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sekam
5	1	02	02	05	0027	Belanja Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	1	02	02	05	0028	Belanja Sewa Bangunan Industri
5	1	02	02	05	0029	Belanja Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
5	1	02	02	05	0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	02	05	0031	Belanja Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
5	1	02	02	05	0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum
5	1	02	02	05	0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir
5	1	02	02	05	0034	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pabrik
5	1	02	02	05	0035	Belanja Sewa Bangunan Stasiun Bus
5	1	02	02	05	0036	Belanja Sewa Taman
5	1	02	02	05	0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	02	05	0038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I
5	1	02	02	05	0039	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II
5	1	02	02	05	0040	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan III
5	1	02	02	05	0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	1	02	02	05	0042	Belanja Sewa Asrama
5	1	02	02	05	0043	Belanja Sewa Hotel
5	1	02	02	05	0044	Belanja Sewa Motel
5	1	02	02	05	0045	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun
5	1	02	02	05	0046	Belanja Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
5	1	02	02	05	0047	Belanja Sewa Panti Asuhan
5	1	02	02	05	0048	Belanja Sewa Apartemen
5	1	02	02	05	0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun
5	1	02	02	05	0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
5	1	02	02	05	0051	Belanja Sewa Candi
5	1	02	02	05	0052	Belanja Sewa Tugu
5	1	02	02	05	0053	Belanja Sewa Bangunan Peninggalan
5	1	02	02	05	0054	Belanja Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
5	1	02	02	05	0055	Belanja Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	02	05	0056	Belanja Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	02	05	0057	Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
5	1	02	02	05	0058	Belanja Sewa Bangunan Menara Pengawas
5	1	02	02	05	0059	Belanja Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
5	1	02	02	05	0060	Belanja Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
5	1	02	02	05	0061	Belanja Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
5	1	02	02	05	0062	Belanja Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
5	1	02	02	05	0063	Belanja Sewa Pagar



Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	02	05	0064	Belanja Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
5	1	02	02	06		Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
5	1	02	02	06	0001	Belanja Sewa Jalan Nasional
5	1	02	02	06	0002	Belanja Sewa Jalan Provinsi
5	1	02	02	06	0003	Belanja Sewa Jalan Kabupaten
5	1	02	02	06	0004	Belanja Sewa Jalan Kota
5	1	02	02	06	0005	Belanja Sewa Jalan Desa
5	1	02	02	06	0006	Belanja Sewa Jalan Tol
5	1	02	02	06	0007	Belanja Sewa Jalan Kereta Api
5	1	02	02	06	0008	Belanja Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	02	06	0009	Belanja Sewa Jalan Khusus
5	1	02	02	06	0010	Belanja Sewa Jalan Lainnya
5	1	02	02	06	0011	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
5	1	02	02	06	0012	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
5	1	02	02	06	0013	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
5	1	02	02	06	0014	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kota
5	1	02	02	06	0015	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Desa
5	1	02	02	06	0016	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Tol
5	1	02	02	06	0017	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
5	1	02	02	06	0018	Belanja Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	02	06	0019	Belanja Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
5	1	02	02	06	0020	Belanja Sewa Jembatan Penyeberangan
5	1	02	02	06	0021	Belanja Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
5	1	02	02	06	0022	Belanja Sewa Jembatan Pengukur
5	1	02	02	06	0023	Belanja Sewa Jembatan Lainnya
5	1	02	02	06	0024	Belanja Sewa Bangunan Waduk Irigasi
5	1	02	02	06	0025	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
5	1	02	02	06	0026	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
5	1	02	02	06	0027	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
5	1	02	02	06	0028	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
5	1	02	02	06	0029	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
5	1	02	02	06	0030	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi
5	1	02	02	06	0031	Belanja Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
5	1	02	02	06	0032	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
5	1	02	02	06	0033	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	1	02	02	06	0034	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	1	02	02	06	0035	Belanja Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
5	1	02	02	06	0036	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	1	02	02	06	0037	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	1	02	02	06	0038	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
5	1	02	02	06	0039	Belanja Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
5	1	02	02	06	0040	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0041	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0042	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0043	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0044	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0045	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0046	Belanja Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	1	02	02	06	0047	Belanja Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
5	1	02	02	06	0048	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	1	02	02	06	0049	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	02	06	0050	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	02	06	0051	Belanja Sewa Bangunan Pembuang
5	1	02	02	06	0052	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
5	1	02	02	06	0053	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
5	1	02	02	06	0054	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
5	1	02	02	06	0055	Belanja Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0056	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0057	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0058	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0059	Belanja Sewa Bangunan Pengaman
5	1	02	02	06	0060	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	1	02	02	06	0061	Belanja Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
5	1	02	02	06	0062	Belanja Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
5	1	02	02	06	0063	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0064	Belanja Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0065	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0066	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0067	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	1	02	02	06	0068	Belanja Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	02	06	0069	Belanja Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
5	1	02	02	06	0070	Belanja Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
5	1	02	02	06	0071	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
5	1	02	02	06	0072	Belanja Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
5	1	02	02	06	0073	Belanja Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	1	02	02	06	0074	Belanja Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
5	1	02	02	06	0075	Belanja Sewa Instalasi Air Permukaan
5	1	02	02	06	0076	Belanja Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
5	1	02	02	06	0077	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
5	1	02	02	06	0078	Belanja Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
5	1	02	02	06	0079	Belanja Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	02	06	0080	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
5	1	02	02	06	0081	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Industri
5	1	02	02	06	0082	Belanja Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
5	1	02	02	06	0083	Belanja Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
5	1	02	02	06	0084	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	1	02	02	06	0085	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	1	02	02	06	0086	Belanja Sewa Bangunan Penampung Sampah
5	1	02	02	06	0087	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	02	06	0088	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
5	1	02	02	06	0089	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
5	1	02	02	06	0090	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
5	1	02	02	06	0091	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
5	1	02	02	06	0092	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
5	1	02	02	06	0093	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
5	1	02	02	06	0094	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
5	1	02	02	06	0095	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	1	02	02	06	0096	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	1	02	02	06	0097	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	1	02	02	06	0098	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	1	02	02	06	0099	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	1	02	02	06	0100	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	1	02	02	06	0101	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	1	02	02	06	0102	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
5	1	02	02	06	0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5	1	02	02	06	0104	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
5	1	02	02	06	0105	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	1	02	02	06	0106	Belanja Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	1	02	02	06	0107	Belanja Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
5	1	02	02	06	0108	Belanja Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
5	1	02	02	06	0109	Belanja Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
5	1	02	02	06	0110	Belanja Sewa Instalasi Gardu Gas
5	1	02	02	06	0111	Belanja Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	1	02	02	06	0112	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Gas
5	1	02	02	06	0113	Belanja Sewa Instalasi Gas Lainnya
5	1	02	02	06	0114	Belanja Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	1	02	02	06	0115	Belanja Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
5	1	02	02	06	0116	Belanja Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
5	1	02	02	06	0117	Belanja Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
5	1	02	02	06	0118	Belanja Sewa Instalasi Lain
5	1	02	02	06	0119	Belanja Sewa Jaringan Pembawa
5	1	02	02	06	0120	Belanja Sewa Jaringan Induk Distribusi
5	1	02	02	06	0121	Belanja Sewa Jaringan Cabang Distribusi
5	1	02	02	06	0122	Belanja Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
5	1	02	02	06	0123	Belanja Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
5	1	02	02	06	0124	Belanja Sewa Jaringan Transmisi
5	1	02	02	06	0125	Belanja Sewa Jaringan Distribusi
5	1	02	02	06	0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya
5	1	02	02	06	0127	Belanja Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
5	1	02	02	06	0128	Belanja Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
5	1	02	02	06	0129	Belanja Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
5	1	02	02	06	0130	Belanja Sewa Jaringan dengan Media Udara
5	1	02	02	06	0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya
5	1	02	02	06	0132	Belanja Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	1	02	02	06	0133	Belanja Sewa Jaringan Pipa Distribusi
5	1	02	02	06	0134	Belanja Sewa Jaringan Pipa Dinas
5	1	02	02	06	0135	Belanja Sewa Jaringan BBM
5	1	02	02	06	0136	Belanja Sewa Jaringan Gas Lainnya
5	1	02	02	07		Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
5	1	02	02	07	0001	Belanja Sewa Buku Umum
5	1	02	02	07	0002	Belanja Sewa Buku Filsafat
5	1	02	02	07	0003	Belanja Sewa Buku Agama
5	1	02	02	07	0004	Belanja Sewa Buku Ilmu Sosial
5	1	02	02	07	0005	Belanja Sewa Buku Ilmu Bahasa
5	1	02	02	07	0006	Belanja Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
5	1	02	02	07	0007	Belanja Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	1	02	02	07	0008	Belanja Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
5	1	02	02	07	0009	Belanja Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
5	1	02	02	07	0010	Belanja Sewa Serial
5	1	02	02	07	0011	Belanja Sewa Buku Laporan
5	1	02	02	07	0012	Belanja Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
5	1	02	02	07	0013	Belanja Sewa Audio Visual
5	1	02	02	07	0014	Belanja Sewa Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )
5	1	02	02	07	0015	Belanja Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
5	1	02	02	07	0016	Belanja Sewa Bahan Kartografi
5	1	02	02	07	0017	Belanja Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
5	1	02	02	07	0018	Belanja Sewa Lukisan dan Ukiran
5	1	02	02	07	0019	Belanja Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
5	1	02	02	07	0020	Belanja Sewa Karya Musik
5	1	02	02	07	0021	Belanja Sewa Musik Lainnya
5	1	02	02	07	0022	Belanja Sewa Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
5	1	02	02	07	0023	Belanja Sewa Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya
5	1	02	02	07	0024	Belanja Sewa <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
5	1	02	02	07	0025	Belanja Sewa <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i> Lainnya
5	1	02	02	07	0026	Belanja Sewa <i>Tarscalt</i>
5	1	02	02	07	0027	Belanja Sewa <i>Tarscalt</i> Lainnya
5	1	02	02	07	0028	Belanja Sewa Alat Musik
5	1	02	02	07	0029	Belanja Sewa Lukisan
5	1	02	02	07	0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian
5	1	02	02	07	0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
5	1	02	02	07	0032	Belanja Sewa Pahatan
5	1	02	02	07	0033	Belanja Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
5	1	02	02	07	0034	Belanja Sewa Barang Kerajinan
5	1	02	02	07	0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
5	1	02	02	07	0036	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
5	1	02	02	07	0037	Belanja Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
5	1	02	02	07	0038	Belanja Sewa Hewan Pengaman
5	1	02	02	07	0039	Belanja Sewa Hewan Pengangkut
5	1	02	02	07	0040	Belanja Sewa Hewan Kebun Binatang

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	02	07	0041	Belanja Sewa Hewan Piaraan Lainnya
5	1	02	02	07	0042	Belanja Sewa Ternak Potong
5	1	02	02	07	0043	Belanja Sewa Ternak Perah
5	1	02	02	07	0044	Belanja Sewa Ternak Unggas
5	1	02	02	07	0045	Belanja Sewa Ternak Lainnya
5	1	02	02	07	0046	Belanja Sewa Hewan Lainnya
5	1	02	02	07	0047	Belanja Sewa Ikan Budidaya
5	1	02	02	07	0048	Belanja Sewa <i>Crustea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0049	Belanja Sewa <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0050	Belanja Sewa <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0051	Belanja Sewa <i>Echinodermata</i> Budidaya
5	1	02	02	07	0052	Belanja Sewa <i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0053	Belanja Sewa <i>Reptilia</i> Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0054	Belanja Sewa <i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
5	1	02	02	07	0055	Belanja Sewa <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
5	1	02	02	07	0056	Belanja Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
5	1	02	02	07	0057	Belanja Sewa Tanaman
5	1	02	02	07	0058	Belanja Sewa Hewan Koleksi
5	1	02	02	07	0059	Belanja Sewa Biota Perairan Koleksi
5	1	02	02	07	0060	Belanja Sewa Tanaman Koleksi
5	1	02	02	07	0061	Belanja Sewa Mikroba Koleksi
5	1	02	02	07	0062	Belanja Sewa Batuan Koleksi
5	1	02	02	07	0063	Belanja Sewa Fosil
5	1	02	02	07	0064	Belanja Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
5	1	02	02	08		Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
5	1	02	02	08	0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
5	1	02	02	08	0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
5	1	02	02	08	0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
5	1	02	02	08	0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5	1	02	02	08	0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
5	1	02	02	08	0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
5	1	02	02	08	0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
5	1	02	02	08	0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
5	1	02	02	08	0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
5	1	02	02	08	0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
5	1	02	02	08	0011	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
5	1	02	02	08	0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
5	1	02	02	08	0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
5	1	02	02	08	0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan
5	1	02	02	08	0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
5	1	02	02	08	0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan <i>Landscape</i>
5	1	02	02	08	0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
5	1	02	02	08	0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
5	1	02	02	08	0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
5	1	02	02	08	0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
5	1	02	02	08	0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
5	1	02	02	08	0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
5	1	02	02	08	0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
5	1	02	02	08	0024	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
5	1	02	02	08	0025	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
5	1	02	02	08	0026	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
5	1	02	02	08	0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
5	1	02	02	08	0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
5	1	02	02	08	0029	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
5	1	02	02	08	0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
5	1	02	02	08	0031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
5	1	02	02	08	0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
5	1	02	02	08	0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
5	1	02	02	08	0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
5	1	02	02	08	0035	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
5	1	02	02	08	0036	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
5	1	02	02	08	0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
5	1	02	02	08	0038	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
5	1	02	02	08	0039	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
5	1	02	02	08	0040	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa ( <i>Engineering</i> ) Terpadu
5	1	02	02	09		Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
5	1	02	02	09	0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
5	1	02	02	09	0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi
5	1	02	02	09	0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	02	09	0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan
5	1	02	02	09	0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi
5	1	02	02	09	0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keluangan
5	1	02	02	09	0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan
5	1	02	02	09	0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan
5	1	02	02	09	0009	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan
5	1	02	02	09	0010	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Rekayasa Industri
5	1	02	02	09	0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei
5	1	02	02	09	0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
5	1	02	02	09	0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen
5	1	02	02	09	0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus
5	1	02	02	09	0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata
5	1	02	02	09	0016	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
5	1	02	02	09	0017	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
5	1	02	02	09	0018	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisataaan
5	1	02	02	09	0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataaan
5	1	02	02	09	0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan
5	1	02	02	09	0021	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataaan
5	1	02	02	09	0022	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataaan-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisataaan
5	1	02	02	10		Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )
5	1	02	02	10	0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan
5	1	02	02	10	0002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Jalan
5	1	02	02	10	0003	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
5	1	02	02	10	0004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Air Minum
5	1	02	02	10	0005	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
5	1	02	02	10	0006	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
5	1	02	02	10	0007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
5	1	02	02	10	0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
5	1	02	02	10	0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Ketenagalistrikan
5	1	02	02	10	0010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
5	1	02	02	10	0011	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Konservasi Energi
5	1	02	02	10	0012	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
5	1	02	02	10	0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
5	1	02	02	10	0014	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
5	1	02	02	10	0015	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Kawasan
5	1	02	02	10	0016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Pariwisata
5	1	02	02	10	0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Kesehatan
5	1	02	02	10	0018	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Lembaga Masyarakat
5	1	02	02	10	0019	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Perumahan Rakyat
5	1	02	02	11		Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	1	02	02	11	0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
5	1	02	02	11	0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
5	1	02	02	11	0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
5	1	02	02	12		Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
5	1	02	02	12	0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
5	1	02	02	12	0002	Belanja Sosialisasi
5	1	02	02	12	0003	Belanja Bimbingan Teknis
5	1	02	02	12	0004	Belanja Diklat Kepemimpinan
5	1	02	02	13		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
5	1	02	02	13	0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	13	0002	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	13	0003	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	13	0004	Belanja Jasa Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
5	1	02	02	13	0005	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
5	1	02	02	13	0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
5	1	02	02	13	0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
5	1	02	02	13	0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas
5	1	02	02	13	0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
5	1	02	02	13	0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
5	1	02	02	13	0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
5	1	02	02	13	0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
5	1	02	02	13	0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
5	1	02	02	13	0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	1	02	02	13	0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas
5	1	02	02	13	0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
5	1	02	02	14		Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	02	02	14	0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
5	1	02	02	14	0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5	1	02	02	14	0003	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5	1	02	02	14	0004	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-
5	1	02	02	14	0005	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar
5	1	02	02	14	0006	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
5	1	02	02	14	0007	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat

Kode Akun						Uraian Akun
						Pemadam Kebakaran
5	1	02	02	14	0008	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta
5	1	02	02	14	0009	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
5	1	02	02	14	0010	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengolahan Limbah Cair
5	1	02	02	14	0011	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang
5	1	02	02	14	0012	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pendidikan
5	1	02	02	14	0013	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	1	02	02	14	0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah
5	1	02	02	14	0015	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar
5	1	02	02	14	0016	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyediaan Tempat Pelelangan
5	1	02	02	14	0017	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
5	1	02	02	14	0018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
5	1	02	02	14	0019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
5	1	02	02	14	0020	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
5	1	02	02	14	0021	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
5	1	02	02	14	0022	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
5	1	02	02	14	0023	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
5	1	02	02	14	0024	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
5	1	02	02	14	0025	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan
5	1	02	02	14	0026	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
5	1	02	02	14	0027	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
5	1	02	02	14	0028	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Usaha Perikanan
5	1	02	02	14	0029	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas
5	1	02	02	14	0030	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
5	1	02	03			Belanja Pemeliharaan
5	1	02	03	01		Belanja Pemeliharaan Tanah
5	1	02	03	01	0001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5	1	02	03	01	0002	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	1	02	03	01	0003	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Industri
5	1	02	03	01	0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
5	1	02	03	01	0005	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
5	1	02	03	01	0006	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	1	02	03	01	0007	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya
5	1	02	03	01	0008	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah
5	1	02	03	01	0009	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering
5	1	02	03	01	0010	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan
5	1	02	03	01	0011	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan
5	1	02	03	01	0012	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus
5	1	02	03	01	0013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
5	1	02	03	01	0014	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian
5	1	02	03	01	0015	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan
5	1	02	03	01	0016	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya
5	1	02	03	01	0017	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Olahraga
5	1	02	03	01	0018	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Parkir
5	1	02	03	01	0019	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Penimbunan Barang
5	1	02	03	01	0020	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	1	02	03	01	0021	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	1	02	03	01	0022	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan Terbang
5	1	02	03	01	0023	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Jalan
5	1	02	03	01	0024	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Air
5	1	02	03	01	0025	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Instalasi
5	1	02	03	01	0026	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Jaringan
5	1	02	03	01	0027	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Bangunan Bersejarah
5	1	02	03	01	0028	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Makam
5	1	02	03	01	0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Taman
5	1	02	03	01	0030	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah untuk Latihan
5	1	02	03	01	0031	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Daerah Pertahanan
5	1	02	03	01	0032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Lapangan PBB
5	1	02	03	01	0033	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Tanah Kampung
5	1	02	03	01	0034	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- <i>Emplasmnt</i>
5	1	02	03	01	0035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya
5	1	02	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5	1	02	03	02	0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>
5	1	02	03	02	0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Grader</i>
5	1	02	03	02	0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>
5	1	02	03	02	0004	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>
5	1	02	03	02	0005	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>
5	1	02	03	02	0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
5	1	02	03	02	0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
5	1	02	03	02	0008	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
5	1	02	03	02	0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
5	1	02	03	02	0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	03	02	0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
5	1	02	03	02	0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
5	1	02	03	02	0013	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger
5	1	02	03	02	0014	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator
5	1	02	03	02	0015	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger
5	1	02	03	02	0016	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
5	1	02	03	02	0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar
5	1	02	03	02	0018	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
5	1	02	03	02	0019	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik
5	1	02	03	02	0020	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Feeder
5	1	02	03	02	0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Compressor
5	1	02	03	02	0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set
5	1	02	03	02	0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa
5	1	02	03	02	0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Bor
5	1	02	03	02	0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-
5	1	02	03	02	0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor
5	1	02	03	02	0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator
5	1	02	03	02	0028	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan
5	1	02	03	02	0029	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Tato
5	1	02	03	02	0030	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan
5	1	02	03	02	0031	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Selam
5	1	02	03	02	0032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan SAR Mountenering
5	1	02	03	02	0033	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen
5	1	02	03	02	0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya
5	1	02	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	1	02	03	02	0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
5	1	02	03	02	0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	1	02	03	02	0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	1	02	03	02	0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0041	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
5	1	02	03	02	0042	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
5	1	02	03	02	0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
5	1	02	03	02	0045	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
5	1	02	03	02	0046	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
5	1	02	03	02	0047	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0048	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
5	1	02	03	02	0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	03	02	0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0051	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
5	1	02	03	02	0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0053	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
5	1	02	03	02	0054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
5	1	02	03	02	0055	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
5	1	02	03	02	0056	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
5	1	02	03	02	0057	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
5	1	02	03	02	0058	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
5	1	02	03	02	0059	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
5	1	02	03	02	0060	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)
5	1	02	03	02	0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	03	02	0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
5	1	02	03	02	0063	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
5	1	02	03	02	0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
5	1	02	03	02	0065	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
5	1	02	03	02	0066	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
5	1	02	03	02	0067	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
5	1	02	03	02	0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
5	1	02	03	02	0069	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat
5	1	02	03	02	0070	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
5	1	02	03	02	0071	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Servis
5	1	02	03	02	0072	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
5	1	02	03	02	0073	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)
5	1	02	03	02	0074	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)
5	1	02	03	02	0075	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
5	1	02	03	02	0076	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	03	02	0077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	03	02	0078	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
5	1	02	03	02	0079	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting
5	1	02	03	02	0080	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
5	1	02	03	02	0081	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat
5	1	02	03	02	0082	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
5	1	02	03	02	0083	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Inteligensia
5	1	02	03	02	0084	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
5	1	02	03	02	0085	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
5	1	02	03	02	0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
5	1	02	03	02	0087	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Ukur-Oscilloscope
5	1	02	03	02	0088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester
5	1	02	03	02	0089	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan AlatUkur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
5	1	02	03	02	0090	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain
5	1	02	03	02	0091	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
5	1	02	03	02	0092	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
5	1	02	03	02	0093	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
5	1	02	03	02	0094	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
5	1	02	03	02	0095	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
5	1	02	03	02	0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat
5	1	02	03	02	0097	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set
5	1	02	03	02	0098	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
5	1	02	03	02	0099	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
5	1	02	03	02	0100	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
5	1	02	03	02	0101	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Instrument Workshop
5	1	02	03	02	0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
5	1	02	03	02	0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat
5	1	02	03	02	0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
5	1	02	03	02	0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
5	1	02	03	02	0106	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
5	1	02	03	02	0107	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	03	02	0108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing
5	1	02	03	02	0109	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
5	1	02	03	02	0110	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
5	1	02	03	02	0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
5	1	02	03	02	0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
5	1	02	03	02	0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
5	1	02	03	02	0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
5	1	02	03	02	0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
5	1	02	03	02	0116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	1	02	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor
5	1	02	03	02	0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
5	1	02	03	02	0119	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
5	1	02	03	02	0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
5	1	02	03	02	0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
5	1	02	03	02	0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5	1	02	03	02	0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
5	1	02	03	02	0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
5	1	02	03	02	0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0128	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat
5	1	02	03	02	0129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	1	02	03	02	0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat
5	1	02	03	02	0131	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat
5	1	02	03	02	0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio
5	1	02	03	02	0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Video dan Film
5	1	02	03	02	0134	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Gambar
5	1	02	03	02	0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
5	1	02	03	02	0136	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
5	1	02	03	02	0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
5	1	02	03	02	0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone
5	1	02	03	02	0139	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
5	1	02	03	02	0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	1	02	03	02	0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Radio VHF
5	1	02	03	02	0142	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	03	02	0143	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Sosial
5	1	02	03	02	0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat-Alat Sandi
5	1	02	03	02	0145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Khusus
5	1	02	03	02	0146	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
5	1	02	03	02	0147	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-
5	1	02	03	02	0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya
5	1	02	03	02	0149	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
5	1	02	03	02	0150	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
5	1	02	03	02	0151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
5	1	02	03	02	0152	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
5	1	02	03	02	0153	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
5	1	02	03	02	0154	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW
5	1	02	03	02	0155	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
5	1	02	03	02	0156	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM
5	1	02	03	02	0157	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
5	1	02	03	02	0158	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
5	1	02	03	02	0159	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
5	1	02	03	02	0160	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
5	1	02	03	02	0161	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
5	1	02	03	02	0162	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
5	1	02	03	02	0163	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> FPU
5	1	02	03	02	0164	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
5	1	02	03	02	0165	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
5	1	02	03	02	0166	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
5	1	02	03	02	0167	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
5	1	02	03	02	0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena
5	1	02	03	02	0169	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
5	1	02	03	02	0170	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
5	1	02	03	02	0171	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program <i>Input Equipment</i>
5	1	02	03	02	0172	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
5	1	02	03	02	0173	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
5	1	02	03	02	0174	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
5	1	02	03	02	0175	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
5	1	02	03	02	0176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio,
5	1	02	03	02	0177	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	03	02	0178	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	03	02	0179	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	03	02	0180	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	03	02	0181	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	03	02	0182	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	03	02	0183	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	03	02	0184	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
5	1	02	03	02	0185	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
5	1	02	03	02	0186	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
5	1	02	03	02	0187	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
5	1	02	03	02	0188	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
5	1	02	03	02	0189	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
5	1	02	03	02	0190	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
5	1	02	03	02	0191	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan



Kode Akun						Uraian Akun
						Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
5	1	02	03	02	0192	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
5	1	02	03	02	0193	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
5	1	02	03	02	0194	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
5	1	02	03	02	0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
5	1	02	03	02	0196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
5	1	02	03	02	0197	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan
5	1	02	03	02	0198	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Very High Frequency Omni Range (VOR)
5	1	02	03	02	0199	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Distance Measuring Equipment (DME)
5	1	02	03	02	0200	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar
5	1	02	03	02	0201	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Alat Pengatur Telekomunikasi
5	1	02	03	02	0202	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
5	1	02	03	02	0203	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
5	1	02	03	02	0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
5	1	02	03	02	0205	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
5	1	02	03	02	0206	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	1	02	03	02	0207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
5	1	02	03	02	0208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	1	02	03	02	0209	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
5	1	02	03	02	0210	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
5	1	02	03	02	0211	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	1	02	03	02	0212	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
5	1	02	03	02	0213	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
5	1	02	03	02	0214	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
5	1	02	03	02	0215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	1	02	03	02	0216	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
5	1	02	03	02	0217	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
5	1	02	03	02	0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
5	1	02	03	02	0219	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomy
5	1	02	03	02	0220	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
5	1	02	03	02	0221	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
5	1	02	03	02	0222	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
5	1	02	03	02	0223	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	1	02	03	02	0224	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	1	02	03	02	0225	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
5	1	02	03	02	0226	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
5	1	02	03	02	0227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
5	1	02	03	02	0228	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
5	1	02	03	02	0229	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
5	1	02	03	02	0230	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
5	1	02	03	02	0231	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
5	1	02	03	02	0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
5	1	02	03	02	0233	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
5	1	02	03	02	0234	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
5	1	02	03	02	0235	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
5	1	02	03	02	0236	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
5	1	02	03	02	0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
5	1	02	03	02	0238	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
5	1	02	03	02	0239	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
5	1	02	03	02	0240	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
5	1	02	03	02	0241	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
5	1	02	03	02	0242	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
5	1	02	03	02	0243	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	1	02	03	02	0244	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
5	1	02	03	02	0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
5	1	02	03	02	0246	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cocom Tanam
5	1	02	03	02	0247	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
5	1	02	03	02	0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	03	02	0249	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	1	02	03	02	0250	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
5	1	02	03	02	0251	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
5	1	02	03	02	0252	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
5	1	02	03	02	0253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
5	1	02	03	02	0254	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
5	1	02	03	02	0255	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
5	1	02	03	02	0256	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
5	1	02	03	02	0257	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
5	1	02	03	02	0258	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	1	02	03	02	0259	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
5	1	02	03	02	0260	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	1	02	03	02	0261	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
5	1	02	03	02	0262	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
5	1	02	03	02	0263	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
5	1	02	03	02	0264	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
5	1	02	03	02	0265	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	1	02	03	02	0266	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	1	02	03	02	0267	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	1	02	03	02	0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
5	1	02	03	02	0269	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
5	1	02	03	02	0270	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	1	02	03	02	0271	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5	1	02	03	02	0272	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
5	1	02	03	02	0273	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	1	02	03	02	0274	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
5	1	02	03	02	0275	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
5	1	02	03	02	0276	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
5	1	02	03	02	0277	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	1	02	03	02	0278	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
5	1	02	03	02	0279	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	1	02	03	02	0280	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
5	1	02	03	02	0281	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa
5	1	02	03	02	0282	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
5	1	02	03	02	0283	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	1	02	03	02	0284	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
5	1	02	03	02	0285	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
5	1	02	03	02	0286	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
5	1	02	03	02	0287	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
5	1	02	03	02	0288	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	1	02	03	02	0289	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
5	1	02	03	02	0290	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	1	02	03	02	0291	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
5	1	02	03	02	0292	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
5	1	02	03	02	0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
5	1	02	03	02	0294	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
5	1	02	03	02	0295	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
5	1	02	03	02	0296	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
5	1	02	03	02	0297	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
5	1	02	03	02	0298	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
5	1	02	03	02	0299	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit
5	1	02	03	02	0300	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
5	1	02	03	02	0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
5	1	02	03	02	0302	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
5	1	02	03	02	0303	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
5	1	02	03	02	0304	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>
5	1	02	03	02	0305	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
5	1	02	03	02	0306	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Laboratory Safety Equipment</i>
5	1	02	03	02	0307	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
5	1	02	03	02	0308	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
5	1	02	03	02	0309	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
5	1	02	03	02	0310	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
5	1	02	03	02	0311	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat
5	1	02	03	02	0312	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
5	1	02	03	02	0313	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
5	1	02	03	02	0314	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	03	02	0315	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama
5	1	02	03	02	0316	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan
5	1	02	03	02	0317	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian
5	1	02	03	02	0318	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga
5	1	02	03	02	0319	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN
5	1	02	03	02	0320	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
5	1	02	03	02	0321	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
5	1	02	03	02	0322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
5	1	02	03	02	0323	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
5	1	02	03	02	0324	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Radiation Detector</i>
5	1	02	03	02	0325	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
5	1	02	03	02	0326	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Assembly/Counting System</i>
5	1	02	03	02	0327	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Recorder Display</i>
5	1	02	03	02	0328	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>System/Power Supply</i>
5	1	02	03	02	0329	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/Testing Device</i>
5	1	02	03	02	0330	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
5	1	02	03	02	0331	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Accelerator</i>
5	1	02	03	02	0332	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Reactor Experimental System</i>
5	1	02	03	02	0333	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
5	1	02	03	02	0334	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat
5	1	02	03	02	0335	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
5	1	02	03	02	0336	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Proteksi Lingkungan
5	1	02	03	02	0337	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- <i>Meteorological Equipment</i>
5	1	02	03	02	0338	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- Sumber Radiasi
5	1	02	03	02	0339	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
5	1	02	03	02	0340	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment</i>
5	1	02	03	02	0341	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device</i>
5	1	02	03	02	0342	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi</i>
5	1	02	03	02	0343	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
5	1	02	03	02	0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
5	1	02	03	02	0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	1	02	03	02	0346	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	1	02	03	02	0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup- Laboratorium Lingkungan
5	1	02	03	02	0348	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
5	1	02	03	02	0349	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
5	1	02	03	02	0350	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Towing Carriage</i>
5	1	02	03	02	0351	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber</i>
5	1	02	03	02	0352	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System</i>
5	1	02	03	02	0353	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Cavitation Tunnel</i>
5	1	02	03	02	0354	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Overhead Cranes</i>
5	1	02	03	02	0355	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Peralatan Umum</i>
5	1	02	03	02	0356	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
5	1	02	03	02	0357	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>
5	1	02	03	02	0358	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Mechanical Workshop</i>
5	1	02	03	02	0359	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>
5	1	02	03	02	0360	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Painting Shop</i>
5	1	02	03	02	0361	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Ship Model Preparation Shop</i>
5	1	02	03	02	0362	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Pemesinan:Electrical Workshop</i>
5	1	02	03	02	0363	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-MOB</i>
5	1	02	03	02	0364	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Photo and Film Equipment</i>
5	1	02	03	02	0365	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya</i>
5	1	02	03	02	0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-

Kode Akun						Uraian Akun
						Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
5	1	02	03	02	0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
5	1	02	03	02	0368	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
5	1	02	03	02	0369	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
5	1	02	03	02	0370	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
5	1	02	03	02	0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
5	1	02	03	02	0372	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
5	1	02	03	02	0373	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
5	1	02	03	02	0374	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
5	1	02	03	02	0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
5	1	02	03	02	0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
5	1	02	03	02	0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
5	1	02	03	02	0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
5	1	02	03	02	0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>
5	1	02	03	02	0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
5	1	02	03	02	0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
5	1	02	03	02	0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
5	1	02	03	02	0412	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
5	1	02	03	02	0413	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
5	1	02	03	02	0414	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
5	1	02	03	02	0415	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
5	1	02	03	02	0416	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/ <i>Electric</i>
5	1	02	03	02	0417	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual
5	1	02	03	02	0418	Belanja Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
5	1	02	03	02	0419	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
5	1	02	03	02	0420	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
5	1	02	03	02	0421	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
5	1	02	03	02	0422	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
5	1	02	03	02	0423	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
5	1	02	03	02	0424	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Putar
5	1	02	03	02	0425	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
5	1	02	03	02	0426	Belanja Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
5	1	02	03	02	0427	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur- Peralatan Sumur Minyak
5	1	02	03	02	0428	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
5	1	02	03	02	0429	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
5	1	02	03	02	0430	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
5	1	02	03	02	0431	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi- Produksi Lainnya
5	1	02	03	02	0432	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
5	1	02	03	02	0433	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
5	1	02	03	02	0434	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Steam</i>
5	1	02	03	02	0435	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Wax</i>
5	1	02	03	02	0436	Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
5	1	02	03	02	0437	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
5	1	02	03	02	0438	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
5	1	02	03	02	0439	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi-
5	1	02	03	02	0440	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
5	1	02	03	02	0441	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Tes Unit
5	1	02	03	02	0442	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Alat Bantu Produksi Lainnya
5	1	02	03	02	0443	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Radiasi
5	1	02	03	02	0444	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Suara
5	1	02	03	02	0445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
5	1	02	03	02	0446	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman
5	1	02	03	02	0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker
5	1	02	03	02	0448	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja
5	1	02	03	02	0449	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
5	1	02	03	02	0450	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
5	1	02	03	02	0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
5	1	02	03	02	0452	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Penolong
5	1	02	03	02	0453	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
5	1	02	03	02	0454	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
5	1	02	03	02	0455	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya
5	1	02	03	02	0456	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
5	1	02	03	02	0457	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
5	1	02	03	02	0458	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
5	1	02	03	02	0459	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayaran dan Pengamanan Bandar Udara

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	03	02	0460	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
5	1	02	03	02	0461	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
5	1	02	03	02	0462	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
5	1	02	03	02	0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
5	1	02	03	02	0464	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
5	1	02	03	02	0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
5	1	02	03	02	0466	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
5	1	02	03	02	0467	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
5	1	02	03	02	0468	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
5	1	02	03	02	0469	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Solid Classifier</i>
5	1	02	03	02	0470	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
5	1	02	03	02	0471	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan
5	1	02	03	02	0472	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
5	1	02	03	02	0473	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Leaching Equipment</i>
5	1	02	03	02	0474	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
5	1	02	03	02	0475	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
5	1	02	03	02	0476	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
5	1	02	03	02	0477	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
5	1	02	03	02	0478	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
5	1	02	03	02	0479	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
5	1	02	03	02	0480	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
5	1	02	03	02	0481	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
5	1	02	03	02	0482	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
5	1	02	03	02	0483	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Isotope Separation Equipment</i>
5	1	02	03	02	0484	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
5	1	02	03	02	0485	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Solid Material Handling Equipment</i>
5	1	02	03	02	0486	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
5	1	02	03	02	0487	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Generating Equipment</i>
5	1	02	03	02	0488	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Heat Transfer Equipment</i>
5	1	02	03	02	0489	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Mechanical Process</i>
5	1	02	03	02	0490	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Chemical Reaction Equipment</i>
5	1	02	03	02	0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
5	1	02	03	02	0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
5	1	02	03	02	0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
5	1	02	03	02	0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5	1	02	03	02	0495	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway/Threshold Light</i>
5	1	02	03	02	0496	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
5	1	02	03	02	0497	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Approach Light</i>
5	1	02	03	02	0498	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
5	1	02	03	02	0499	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Signal</i>
5	1	02	03	02	0500	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara- <i>Flood Lights</i>
5	1	02	03	02	0501	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
5	1	02	03	02	0502	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut
5	1	02	03	02	0503	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
5	1	02	03	02	0504	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
5	1	02	03	02	0505	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
5	1	02	03	02	0506	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
5	1	02	03	02	0507	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
5	1	02	03	02	0508	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
5	1	02	03	02	0509	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
5	1	02	03	03		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5	1	02	03	03	0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
5	1	02	03	03	0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
5	1	02	03	03	0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
5	1	02	03	03	0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	03	03	0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
5	1	02	03	03	0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
5	1	02	03	03	0007	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
5	1	02	03	03	0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	1	02	03	03	0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	1	02	03	03	0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	1	02	03	03	0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	1	02	03	03	0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	1	02	03	03	0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	1	02	03	03	0014	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	1	02	03	03	0015	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
5	1	02	03	03	0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
5	1	02	03	03	0017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
5	1	02	03	03	0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
5	1	02	03	03	0019	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
5	1	02	03	03	0020	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
5	1	02	03	03	0021	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
5	1	02	03	03	0022	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
5	1	02	03	03	0023	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	1	02	03	03	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
5	1	02	03	03	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
5	1	02	03	03	0026	Belanja Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-
5	1	02	03	03	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	1	02	03	03	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
5	1	02	03	03	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan
5	1	02	03	03	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	03	03	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
5	1	02	03	03	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-
5	1	02	03	03	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
5	1	02	03	03	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
5	1	02	03	03	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
5	1	02	03	03	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
5	1	02	03	03	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	1	02	03	03	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
5	1	02	03	03	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
5	1	02	03	03	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
5	1	02	03	03	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	1	02	03	03	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
5	1	02	03	03	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
5	1	02	03	03	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
5	1	02	03	03	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun
5	1	02	03	03	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
5	1	02	03	03	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
5	1	02	03	03	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
5	1	02	03	03	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
5	1	02	03	03	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
5	1	02	03	03	0051	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
5	1	02	03	03	0052	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
5	1	02	03	03	0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
5	1	02	03	03	0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
5	1	02	03	03	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	03	03	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
5	1	02	03	03	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan
5	1	02	03	03	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
5	1	02	03	03	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
5	1	02	03	03	0060	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	03	03	0061	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
5	1	02	03	03	0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
5	1	02	03	03	0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik
5	1	02	03	03	0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Lainnya
5	1	02	03	04		Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	1	02	03	04	0001	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Nasional
5	1	02	03	04	0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi
5	1	02	03	04	0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten
5	1	02	03	04	0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota
5	1	02	03	04	0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Desa
5	1	02	03	04	0006	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-
5	1	02	03	04	0007	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kereta Api
5	1	02	03	04	0008	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	03	04	0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Khusus
5	1	02	03	04	0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya
5	1	02	03	04	0011	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
5	1	02	03	04	0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
5	1	02	03	04	0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
5	1	02	03	04	0014	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
5	1	02	03	04	0015	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
5	1	02	03	04	0016	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
5	1	02	03	04	0017	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
5	1	02	03	04	0018	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	1	02	03	04	0019	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
5	1	02	03	04	0020	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Penyeberangan
5	1	02	03	04	0021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-
5	1	02	03	04	0022	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Pengukur
5	1	02	03	04	0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Lainnya
5	1	02	03	04	0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
5	1	02	03	04	0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
5	1	02	03	04	0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
5	1	02	03	04	0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
5	1	02	03	04	0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
5	1	02	03	04	0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
5	1	02	03	04	0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
5	1	02	03	04	0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
5	1	02	03	04	0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Waduk Pasang Surut
5	1	02	03	04	0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	1	02	03	04	0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	1	02	03	04	0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
5	1	02	03	04	0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	1	02	03	04	0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	1	02	03	04	0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Sawah Pasang Surut
5	1	02	03	04	0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
5	1	02	03	04	0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-
5	1	02	03	04	0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0043	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0044	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0046	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	1	02	03	04	0047	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder- Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
5	1	02	03	04	0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	1	02	03	04	0049	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	1	02	03	04	0052	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai
5	1	02	03	04	0053	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
5	1	02	03	04	0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
5	1	02	03	04	0055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan
5	1	02	03	04	0056	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	03	04	0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0058	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0060	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	1	02	03	04	0061	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
5	1	02	03	04	0062	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
5	1	02	03	04	0063	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0064	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0065	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0066	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0067	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	1	02	03	04	0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya- Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	03	04	0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
5	1	02	03	04	0070	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
5	1	02	03	04	0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
5	1	02	03	04	0072	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
5	1	02	03	04	0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	1	02	03	04	0074	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
5	1	02	03	04	0075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
5	1	02	03	04	0076	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
5	1	02	03	04	0077	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
5	1	02	03	04	0078	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air
5	1	02	03	04	0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	1	02	03	04	0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
5	1	02	03	04	0081	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
5	1	02	03	04	0082	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
5	1	02	03	04	0083	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
5	1	02	03	04	0084	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	1	02	03	04	0085	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi
5	1	02	03	04	0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
5	1	02	03	04	0087	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
5	1	02	03	04	0088	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
5	1	02	03	04	0089	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
5	1	02	03	04	0090	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
5	1	02	03	04	0091	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
5	1	02	03	04	0092	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
5	1	02	03	04	0093	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
5	1	02	03	04	0094	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
5	1	02	03	04	0095	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	1	02	03	04	0096	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	1	02	03	04	0097	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5	1	02	03	04	0098	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	1	02	03	04	0099	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	1	02	03	04	0100	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	1	02	03	04	0101	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	1	02	03	04	0102	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
5	1	02	03	04	0103	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0104	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk
5	1	02	03	04	0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	1	02	03	04	0106	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	1	02	03	04	0107	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0108	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
5	1	02	03	04	0109	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
5	1	02	03	04	0110	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gardu Gas
5	1	02	03	04	0111	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	1	02	03	04	0112	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Pengolahan Gas
5	1	02	03	04	0113	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gas Lainnya
5	1	02	03	04	0114	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	1	02	03	04	0115	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
5	1	02	03	04	0116	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
5	1	02	03	04	0117	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya



Kode Akun						Uraian Akun
5	1	02	03	04	0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain
5	1	02	03	04	0119	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
5	1	02	03	04	0120	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
5	1	02	03	04	0121	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
5	1	02	03	04	0122	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
5	1	02	03	04	0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
5	1	02	03	04	0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
5	1	02	03	04	0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
5	1	02	03	04	0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
5	1	02	03	04	0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
5	1	02	03	04	0128	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
5	1	02	03	04	0129	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
5	1	02	03	04	0130	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan dengan Media Udara
5	1	02	03	04	0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
5	1	02	03	04	0132	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan
5	1	02	03	04	0133	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi
5	1	02	03	04	0134	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas
5	1	02	03	04	0135	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan BBM
5	1	02	03	04	0136	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya
5	1	02	03	05		Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5	1	02	03	05	0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
5	1	02	03	05	0002	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
5	1	02	03	05	0003	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
5	1	02	03	05	0004	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
5	1	02	03	05	0005	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
5	1	02	03	05	0006	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
5	1	02	03	05	0007	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	1	02	03	05	0008	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
5	1	02	03	05	0009	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
5	1	02	03	05	0010	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
5	1	02	03	05	0011	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
5	1	02	03	05	0012	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
5	1	02	03	05	0013	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
5	1	02	03	05	0014	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )
5	1	02	03	05	0015	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
5	1	02	03	05	0016	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
5	1	02	03	05	0017	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
5	1	02	03	05	0018	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
5	1	02	03	05	0019	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah, dan Lukisan Lainnya
5	1	02	03	05	0020	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Karya Musik
5	1	02	03	05	0021	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya
5	1	02	03	05	0022	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-
5	1	02	03	05	0023	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )-Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya
5	1	02	03	05	0024	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
5	1	02	03	05	0025	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
5	1	02	03	05	0026	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i>
5	1	02	03	05	0027	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i> Lainnya
5	1	02	03	05	0028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
5	1	02	03	05	0029	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
5	1	02	03	05	0030	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
5	1	02	03	05	0031	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
5	1	02	03	05	0032	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
5	1	02	03	05	0033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
5	1	02	03	05	0034	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
5	1	02	03	05	0035	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
5	1	02	03	05	0036	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
5	1	02	03	05	0037	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
5	1	02	03	05	0038	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengaman
5	1	02	03	05	0039	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengangkut
5	1	02	03	05	0040	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Kebun Binatang
5	1	02	03	05	0041	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya
5	1	02	03	05	0042	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Potong
5	1	02	03	05	0043	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Perah
5	1	02	03	05	0044	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas
5	1	02	03	05	0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Lainnya
5	1	02	03	05	0046	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya
5	1	02	03	05	0047	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip ( <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya
5	1	02	03	05	0048	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Crustacea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-

Kode Akun						Uraian Akun
						<i>Crustacea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0049	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)- <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0050	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Coelenterata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)- <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0051	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)- <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0052	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)- <i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0053	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)- <i>Reptilia</i> Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0054	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)- <i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
5	1	02	03	05	0055	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)- <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
5	1	02	03	05	0056	Belanja Pemeliharaan Biota Perairan-Biota Perairan Lainnya-Budidaya Biota Perairan Lainnya
5	1	02	03	05	0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman
5	1	02	03	05	0058	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
5	1	02	03	05	0059	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Perairan Koleksi
5	1	02	03	05	0060	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya- Tanaman Koleksi
5	1	02	03	05	0061	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
5	1	02	03	05	0062	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
5	1	02	03	05	0063	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
5	1	02	03	05	0064	Belanja Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
5	1	02	03	05	0065	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi
5	1	02	04			Belana Perjalanan Dinas
5	1	02	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5	1	02	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5	1	02	04	01	0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap
5	1	02	04	01	0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5	1	02	04	01	0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
5	1	02	04	01	0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
5	1	02	04	02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
5	1	02	04	02	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri
5	1	02	05			Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	02	05	01		Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	02	05	01	0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
5	1	02	05	01	0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi
5	1	02	05	01	0003	Belanja Beasiswa
5	1	02	05	01	0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
5	1	02	05	01	0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
5	1	02	05	02		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5	1	02	05	02	0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
5	1	02	05	02	0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
5	1	02	05	02		Belanja Bunga
5	1	03	01			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
5	1	03	01	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
5	1	03	01	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
5	1	03	01	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
5	1	03	01	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
5	1	03	01	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah
5	1	03	01	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Menengah
5	1	03	01	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang
5	1	03	01	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri- Jangka Panjang
5	1	03	01	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
5	1	03	01	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah
5	1	03	01	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang
5	1	03	01	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang
5	1	03	02			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
5	1	03	02	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
5	1	03	02	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah-Jangka Pendek
5	1	03	03			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
5	1	03	03	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Pendek
5	1	03	03	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Pendek
5	1	03	03	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Menengah
5	1	03	03	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Menengah
5	1	03	03	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Panjang
5	1	03	03	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Panjang
5	1	03	03	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Pendek
5	1	03	03	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Pendek
5	1	03	03	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Menengah
5	1	03	03	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD- Jangka Menengah
5	1	03	03	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-

Kode Akun						Uraian Akun
5	1	03	03	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
5	1	03	03	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
5	1	03	03	07	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Pendek
5	1	03	03	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah
5	1	03	03	08	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah
5	1	03	03	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang
5	1	03	03	09	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang
5	1	03	04			Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5	1	03	04	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
5	1	03	04	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Pendek
5	1	03	04	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
5	1	03	04	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
5	1	03	04	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang
5	1	03	04	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang
5	1	03	04	04		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
5	1	03	04	04	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
5	1	03	04	05		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
5	1	03	04	05	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah
5	1	03	04	06		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
5	1	03	04	06	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
5	1	03	04	07		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek
5	1	03	04	07	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-
5	1	03	04	08		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah
5	1	03	04	08	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah
5	1	03	04	09		Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang
5	1	03	04	09	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang
5	1	03	05			Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	05	01		Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	05	01	0001	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)
5	1	03	06			Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD
5	1	03	06	01		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
5	1	03	06	01	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
5	1	03	06	02		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
5	1	03	06	02	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
5	1	03	06	03		Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
5	1	03	06	03	0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
5	1	04				Belanja Subsidi
5	1	04	01			Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	01	01		Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	01	01	0001	Belanja Subsidi kepada BUMN
5	1	04	02			Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	02	02		Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	02	02	0001	Belanja Subsidi kepada BUMD
5	1	04	03			Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	03	01		Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	03	01	0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
5	1	04	04			Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	04	04	01		Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	04	04	01	0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi
5	1	05				Belanja Hibah
5	1	05	01			Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	01	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
5	1	05	02			Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	01		Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	02		Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	03		Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	02	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
5	1	05	03			Belanja Hibah kepada BUMN
5	1	05	03	01		Belanja Hibah Uang kepada BUMN
5	1	05	03	01	0001	Belanja Hibah Uang kepada BUMN
5	1	05	03	02		Belanja Hibah Barang kepada BUMN
5	1	05	03	02	0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMN
5	1	05	03	03		Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
5	1	05	03	03	0001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMN
5	1	05	04			Belanja Hibah kepada BUMD

Kode Akun					Uraian Akun
5	1	05	04	01	Belanja Hibah Uang kepada BUMD
5	1	05	04	01	0001 Belanja Hibah Uang kepada BUMD
5	1	05	04	02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD
5	1	05	04	02	0001 Belanja Hibah Barang kepada BUMD
5	1	05	04	03	Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
5	1	05	04	03	0001 Belanja Hibah Jasa kepada BUMD
5	1	05	05		Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia
5	1	05	05	01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01	0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01	0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01	0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	02	0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	02	0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	02	0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat
5	1	05	05	03	0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat
5	1	05	05	03	0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat
5	1	05	05	03	0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Masyarakat
5	1	05	05	04	Belanja Hibah kepada Koperasi
5	1	05	05	04	0001 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
5	1	05	05	04	0002 Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
5	1	05	05	04	0003 Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
5	1	05	06		Belanja Hibah Dana BOS
5	1	05	06	01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
5	1	05	06	01	0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
5	1	05	06	02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
5	1	05	06	02	0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
5	1	05	06	03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
5	1	05	06	03	0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
5	1	05	06	04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
5	1	05	06	04	0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
5	1	05	07		Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	05	07	01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
5	1	05	07	01	0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan
5	1	06			Belanja Bantuan Sosial
5	1	06	01		Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5	1	06	01	01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	01	0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	06	01	02	0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
5	1	06	02		Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
5	1	06	02	01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	01	0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	02	02	0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
5	1	06	03		Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	01	0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	03	02	0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
5	1	06	04		Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	01	0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	1	06	04	02	0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
5	2				BELANJA MODAL
5	2	01			Belanja Modal Tanah
5	2	01	01		Belanja Modal Tanah
5	2	01	01	01	Belanja Modal Tanah Persil
5	2	01	01	01	0001 Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal
5	2	01	01	01	0002 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5	2	01	01	01	0003 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri
5	2	01	01	01	0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
5	2	01	01	01	0005 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga
5	2	01	01	01	0006 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
5	2	01	01	01	0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya
5	2	01	01	02	Belanja Modal Tanah Non Persil
5	2	01	01	02	0001 Belanja Modal Tanah Basah
5	2	01	01	02	0002 Belanja Modal Tanah Kering
5	2	01	01	02	0003 Belanja Modal Tanah Perkebunan
5	2	01	01	02	0004 Belanja Modal Tanah Hutan
5	2	01	01	02	0005 Belanja Modal Tanah Tandus
5	2	01	01	02	0006 Belanja Modal Tanah Padang Alang- Alang/Rumput
5	2	01	01	02	0007 Belanja Modal Tanah Pertanian
5	2	01	01	02	0008 Belanja Modal Tanah Pertambangan
5	2	01	01	02	0009 Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya

Kode Akun					Uraian Akun
5	2	01	01	03	Belanja Modal Lapangan
5	2	01	01	03	0001 Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga
5	2	01	01	03	0002 Belanja Modal Tanah Lapangan Parkir
5	2	01	01	03	0003 Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang
5	2	01	01	03	0004 Belanja Modal Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5	2	01	01	03	0005 Belanja Modal Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5	2	01	01	03	0006 Belanja Modal Tanah Lapangan Terbang
5	2	01	01	03	0007 Belanja Modal Tanah untuk Jalan
5	2	01	01	03	0008 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air
5	2	01	01	03	0009 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Instalasi
5	2	01	01	03	0010 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan
5	2	01	01	03	0011 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Bersejarah
5	2	01	01	03	0012 Belanja Modal Tanah untuk Makam
5	2	01	01	03	0013 Belanja Modal Tanah untuk Taman
5	2	01	01	03	0014 Belanja Modal Tanah untuk Latihan
5	2	01	01	03	0015 Belanja Modal Tanah Daerah Pertahanan
5	2	01	01	03	0016 Belanja Modal Tanah Lapangan PBB
5	2	01	01	03	0017 Belanja Modal Tanah Kampung
5	2	01	01	03	0018 Belanja Modal <i>Emplasmnt</i>
5	2	01	01	03	0019 Belanja Modal Lapangan Lainnya
5	2	02			Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5	2	02	01		Belanja Modal Alat Besar
5	2	02	01	01	Belanja Modal Alat Besar Darat
5	2	02	01	01	0001 Belanja Modal <i>Tractor</i>
5	2	02	01	01	0002 Belanja Modal <i>Grader</i>
5	2	02	01	01	0003 Belanja Modal <i>Excavator</i>
5	2	02	01	01	0004 Belanja Modal <i>Pile Driver</i>
5	2	02	01	01	0005 Belanja Modal <i>Hauler</i>
5	2	02	01	01	0006 Belanja Modal <i>Asphalt Equipment</i>
5	2	02	01	01	0007 Belanja Modal <i>Compacting Equipment</i>
5	2	02	01	01	0008 Belanja Modal <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
5	2	02	01	01	0009 Belanja Modal <i>Loader</i>
5	2	02	01	01	0010 Belanja Modal Alat Pengangkat
5	2	02	01	01	0011 Belanja Modal Mesin Proses
5	2	02	01	01	0012 Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya
5	2	02	01	02	Belanja Modal Alat Besar Apung
5	2	02	01	02	0001 Belanja Modal <i>Dredger</i>
5	2	02	01	02	0002 Belanja Modal <i>Floating Excavator</i>
5	2	02	01	02	0003 Belanja Modal <i>Amphibi Dredger</i>
5	2	02	01	02	0004 Belanja Modal Kapal Tarik
5	2	02	01	02	0005 Belanja Modal Mesin Proses Apung
5	2	02	01	02	0006 Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya
5	2	02	01	03	Belanja Modal Alat Bantu
5	2	02	01	03	0001 Belanja Modal Alat Penarik
5	2	02	01	03	0002 Belanja Modal <i>Feeder</i>
5	2	02	01	03	0003 Belanja Modal <i>Compressor</i>
5	2	02	01	03	0004 Belanja Modal <i>Electric Generating Set</i>
5	2	02	01	03	0005 Belanja Modal Pompa
5	2	02	01	03	0006 Belanja Modal Mesin Bor
5	2	02	01	03	0007 Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan
5	2	02	01	03	0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor
5	2	02	01	03	0009 Belanja Modal Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
5	2	02	01	03	0010 Belanja Modal <i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
5	2	02	01	03	0011 Belanja Modal Mesin <i>Tatoo</i>
5	2	02	01	03	0012 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan
5	2	02	01	03	0013 Belanja Modal Peralatan Selam
5	2	02	01	03	0014 Belanja Modal Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
5	2	02	01	03	0015 Belanja Modal Peralatan Intelijen
5	2	02	01	03	0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya
5	2	02	02		Belanja Modal Alat Angkutan
5	2	02	02	01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
5	2	02	02	01	0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5	2	02	02	01	0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
5	2	02	02	01	0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5	2	02	02	01	0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5	2	02	02	01	0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
5	2	02	02	01	0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
5	2	02	02	01	0007 Belanja Modal Kendaraan Tempur
5	2	02	02	01	0008 Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel
5	2	02	02	01	0009 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5	2	02	02	02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5	2	02	02	02	0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
5	2	02	02	02	0002 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
5	2	02	02	02	0003 Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
5	2	02	02	02	0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
5	2	02	02	03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor
5	2	02	02	03	0001 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
5	2	02	02	03	0002 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
5	2	02	02	03	0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
5	2	02	02	03	0004 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
5	2	02	02	03	0005 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
5	2	02	02	04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
5	2	02	02	04	0001 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
5	2	02	02	04	0002 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
5	2	02	02	04	0003 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
5	2	02	02	04	0004 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
5	2	02	02	05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara
5	2	02	02	05	0001 Belanja Modal Kapal Terbang
5	2	02	02	05	0002 Belanja Modal Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya
5	2	02	03		Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Kode Akun					Uraian Akun
5	2	02	03	01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin
5	2	02	03	01	0001 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
5	2	02	03	01	0002 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
5	2	02	03	01	0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
5	2	02	03	01	0004 Belanja Modal Perkakas Bengkel <i>Service</i>
5	2	02	03	01	0005 Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin
5	2	02	03	01	0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu
5	2	02	03	01	0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus
5	2	02	03	01	0008 Belanja Modal Peralatan Las
5	2	02	03	01	0009 Belanja Modal Perkakas Pabrik Es
5	2	02	03	01	0010 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya
5	2	02	03	02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin
5	2	02	03	02	0001 Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5	2	02	03	02	0002 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik
5	2	02	03	02	0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel <i>Service</i>
5	2	02	03	02	0004 Belanja Modal Perkakas Pengangkat
5	2	02	03	02	0005 Belanja Modal Perkakas Standard ( <i>Standard Tools</i> )
5	2	02	03	02	0006 Belanja Modal Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
5	2	02	03	02	0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja
5	2	02	03	02	0008 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi
5	2	02	03	02	0009 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
5	2	02	03	02	0010 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu
5	2	02	03	02	0011 Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
5	2	02	03	02	0012 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam
5	2	02	03	02	0013 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
5	2	02	03	03	Belanja Modal Alat Ukur
5	2	02	03	03	0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal
5	2	02	03	03	0002 Belanja Modal Alat Ukur/Tes Inteligensia
5	2	02	03	03	0003 Belanja Modal Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
5	2	02	03	03	0004 Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain
5	2	02	03	03	0005 Belanja Modal Alat Kalibrasi
5	2	02	03	03	0006 Belanja Modal <i>Oscilloscope</i>
5	2	02	03	03	0007 Belanja Modal <i>Universal Tester</i>
5	2	02	03	03	0008 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding
5	2	02	03	03	0009 Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain
5	2	02	03	03	0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara
5	2	02	03	03	0011 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara
5	2	02	03	03	0012 Belanja Modal Takaran Kering
5	2	02	03	03	0013 Belanja Modal Takaran Bahan Bangunan
5	2	02	03	03	0014 Belanja Modal Takaran Lainnya
5	2	02	03	03	0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor
5	2	02	03	03	0016 Belanja Modal <i>Specific Set</i>
5	2	02	03	03	0017 Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam
5	2	02	03	03	0018 Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan
5	2	02	03	03	0019 Belanja Modal Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
5	2	02	03	03	0020 Belanja Modal Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
5	2	02	03	03	0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya
5	2	02	04		Belanja Modal Alat Pertanian
5	2	02	04	01	Belanja Modal Alat Pengolahan
5	2	02	04	01	0001 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5	2	02	04	01	0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
5	2	02	04	01	0003 Belanja Modal Alat Panen
5	2	02	04	01	0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
5	2	02	04	01	0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
5	2	02	04	01	0006 Belanja Modal Alat <i>Processing</i>
5	2	02	04	01	0007 Belanja Modal Alat Pasca Panen
5	2	02	04	01	0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan
5	2	02	04	01	0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan
5	2	02	04	01	0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya
5	2	02	05		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
5	2	02	05	01	Belanja Modal Alat Kantor
5	2	02	05	01	0001 Belanja Modal Mesin Ketik
5	2	02	05	01	0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah
5	2	02	05	01	0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)
5	2	02	05	01	0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
5	2	02	05	01	0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
5	2	02	05	02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga
5	2	02	05	02	0001 Belanja Modal Mebel
5	2	02	05	02	0002 Belanja Modal Alat Pengukur Waktu
5	2	02	05	02	0003 Belanja Modal Alat Pembersih
5	2	02	05	02	0004 Belanja Modal Alat Pendingin
5	2	02	05	02	0005 Belanja Modal Alat Dapur
5	2	02	05	02	0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
5	2	02	05	02	0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran
5	2	02	05	03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5	2	02	05	03	0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat
5	2	02	05	03	0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat
5	2	02	05	03	0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
5	2	02	05	03	0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat
5	2	02	05	03	0005 Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5	2	02	05	03	0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5	2	02	05	03	0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat
5	2	02	06		Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
5	2	02	06	01	Belanja Modal Alat Studio
5	2	02	06	01	0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio
5	2	02	06	01	0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
5	2	02	06	01	0003 Belanja Modal Peralatan Studio Gambar
5	2	02	06	01	0004 Belanja Modal Peralatan Cetak
5	2	02	06	01	0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
5	2	02	06	01	0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya

Kode Akun					Uraian Akun
5	2	02	06	02	Belanja Modal Alat Komunikasi
5	2	02	06	02	0001 Belanja Modal Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
5	2	02	06	02	0002 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB
5	2	02	06	02	0003 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM
5	2	02	06	02	0004 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF
5	2	02	06	02	0005 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF
5	2	02	06	02	0006 Belanja Modal Alat Komunikasi Sosial
5	2	02	06	02	0007 Belanja Modal Alat-Alat Sandi
5	2	02	06	02	0008 Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus
5	2	02	06	02	0009 Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
5	2	02	06	02	0010 Belanja Modal Alat Komunikasi Satelit
5	2	02	06	02	0011 Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya
5	2	02	06	03	Belanja Modal Peralatan Pemancar
5	2	02	06	03	0001 Belanja Modal Peralatan Pemancar MF/MW
5	2	02	06	03	0002 Belanja Modal Peralatan Pemancar HF/SW
5	2	02	06	03	0003 Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM
5	2	02	06	03	0004 Belanja Modal Peralatan Pemancar UHF
5	2	02	06	03	0005 Belanja Modal Peralatan Pemancar SHF
5	2	02	06	03	0006 Belanja Modal Peralatan Antena MF/MW
5	2	02	06	03	0007 Belanja Modal Peralatan Antena HF/SW
5	2	02	06	03	0008 Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM
5	2	02	06	03	0009 Belanja Modal Peralatan Antena UHF
5	2	02	06	03	0010 Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola
5	2	02	06	03	0011 Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
5	2	02	06	03	0012 Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
5	2	02	06	03	0013 Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
5	2	02	06	03	0014 Belanja Modal Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
5	2	02	06	03	0015 Belanja Modal Peralatan <i>Microwave</i> FPU
5	2	02	06	03	0016 Belanja Modal Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
5	2	02	06	03	0017 Belanja Modal Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
5	2	02	06	03	0018 Belanja Modal Peralatan <i>Dummy Load</i>
5	2	02	06	03	0019 Belanja Modal <i>Switcher</i> Antena
5	2	02	06	03	0020 Belanja Modal <i>Switcher</i> /Menara Antena
5	2	02	06	03	0021 Belanja Modal <i>Feeder</i>
5	2	02	06	03	0022 Belanja Modal <i>Humidity Control</i>
5	2	02	06	03	0023 Belanja Modal Program <i>Input Equipment</i>
5	2	02	06	03	0024 Belanja Modal Peralatan Antena Penerima VHF
5	2	02	06	03	0025 Belanja Modal Peralatan Pemancar LF
5	2	02	06	03	0026 Belanja Modal Unit Pemancar MF+HF
5	2	02	06	03	0027 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar MF+HF
5	2	02	06	03	0028 Belanja Modal Peralatan Penerima
5	2	02	06	03	0029 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima LF
5	2	02	06	03	0030 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF
5	2	02	06	03	0031 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima HF
5	2	02	06	03	0032 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
5	2	02	06	03	0033 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
5	2	02	06	03	0034 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
5	2	02	06	03	0035 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
5	2	02	06	03	0036 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
5	2	02	06	03	0037 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
5	2	02	06	03	0038 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
5	2	02	06	03	0039 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
5	2	02	06	03	0040 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
5	2	02	06	03	0041 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
5	2	02	06	03	0042 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
5	2	02	06	03	0043 Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
5	2	02	06	03	0044 Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
5	2	02	06	03	0045 Belanja Modal Peralatan Penerima dan
5	2	02	06	03	0046 Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio
5	2	02	06	03	0047 Belanja Modal Sumber Tenaga
5	2	02	06	03	0048 Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya
5	2	02	06	04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi
5	2	02	06	04	0001 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
5	2	02	06	04	0002 Belanja Modal <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
5	2	02	06	04	0003 Belanja Modal <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
5	2	02	06	04	0004 Belanja Modal Radar
5	2	02	06	04	0005 Belanja Modal Alat Pangatur Telekomunikasi
5	2	02	06	04	0006 Belanja Modal Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
5	2	02	06	04	0007 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
5	2	02	07		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
5	2	02	07	01	Belanja Modal Alat Kedokteran
5	2	02	07	01	0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum
5	2	02	07	01	0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi
5	2	02	07	01	0003 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5	2	02	07	01	0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah
5	2	02	07	01	0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5	2	02	07	01	0006 Belanja Modal Alat Kedokteran THT
5	2	02	07	01	0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata
5	2	02	07	01	0008 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5	2	02	07	01	0009 Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
5	2	02	07	01	0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak
5	2	02	07	01	0011 Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik
5	2	02	07	01	0012 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5	2	02	07	01	0013 Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
5	2	02	07	01	0014 Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung
5	2	02	07	01	0015 Belanja Modal Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
5	2	02	07	01	0016 Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi <i>Anatomy</i>
5	2	02	07	01	0017 Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah
5	2	02	07	01	0018 Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi
5	2	02	07	01	0019 Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir

Kode Akun						Uraian Akun
5	2	02	07	01	0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5	2	02	07	01	0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat
5	2	02	07	01	0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa
5	2	02	07	01	0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
5	2	02	07	01	0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU
5	2	02	07	01	0025	Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU
5	2	02	07	01	0026	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung
5	2	02	07	01	0027	Belanja Modal Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
5	2	02	07	01	0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi
5	2	02	07	01	0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya
5	2	02	07	02		Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
5	2	02	07	02	0001	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Laut
5	2	02	07	02	0002	Belanja Modal Alat Kesehatan Matra Udara
5	2	02	07	02	0003	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian
5	2	02	07	02	0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga
5	2	02	07	02	0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya
5	2	02	08			Belanja Modal Alat Laboratorium
5	2	02	08	01		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
5	2	02	08	01	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
5	2	02	08	01	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
5	2	02	08	01	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrokimia
5	2	02	08	01	0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Model Hidrolika
5	2	02	08	01	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi
5	2	02	08	01	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5	2	02	08	01	0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
5	2	02	08	01	0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
5	2	02	08	01	0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Cocok Tanam
5	2	02	08	01	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
5	2	02	08	01	0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum
5	2	02	08	01	0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi
5	2	02	08	01	0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia
5	2	02	08	01	0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi
5	2	02	08	01	0015	Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi
5	2	02	08	01	0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi
5	2	02	08	01	0017	Belanja Modal Alat Laboratorium Film
5	2	02	08	01	0018	Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan
5	2	02	08	01	0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi
5	2	02	08	01	0020	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika
5	2	02	08	01	0021	Belanja Modal Alat Laboratorium Hidrodinamika
5	2	02	08	01	0022	Belanja Modal Alat Laboratorium Klimatologi
5	2	02	08	01	0023	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Peleburan
5	2	02	08	01	0024	Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir
5	2	02	08	01	0025	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan
5	2	02	08	01	0026	Belanja Modal Alat Laboratorium Pembuatan Pola
5	2	02	08	01	0027	Belanja Modal Alat Laboratorium Metalografi
5	2	02	08	01	0028	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5	2	02	08	01	0029	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5	2	02	08	01	0030	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5	2	02	08	01	0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi
5	2	02	08	01	0032	Belanja Modal Alat Laboratorium Pelapisan Logam
5	2	02	08	01	0033	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5	2	02	08	01	0034	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
5	2	02	08	01	0035	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Tekstil
5	2	02	08	01	0036	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5	2	02	08	01	0037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
5	2	02	08	01	0038	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
5	2	02	08	01	0039	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Keramik
5	2	02	08	01	0040	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5	2	02	08	01	0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian
5	2	02	08	01	0042	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5	2	02	08	01	0043	Belanja Modal Alat Laboratorium Energi Surya
5	2	02	08	01	0044	Belanja Modal Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa
5	2	02	08	01	0045	Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi
5	2	02	08	01	0046	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5	2	02	08	01	0047	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi Perairan
5	2	02	08	01	0048	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi
5	2	02	08	01	0049	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika
5	2	02	08	01	0050	Belanja Modal Alat Laboratorium Tambang
5	2	02	08	01	0051	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5	2	02	08	01	0052	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Industri
5	2	02	08	01	0053	Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5	2	02	08	01	0054	Belanja Modal Laboratorium Kearsipan
5	2	02	08	01	0055	Belanja Modal Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
5	2	02	08	01	0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain
5	2	02	08	01	0057	Belanja Modal Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
5	2	02	08	01	0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan
5	2	02	08	01	0059	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
5	2	02	08	01	0060	Belanja Modal Alat Laboratorium Teknik Pantai
5	2	02	08	01	0061	Belanja Modal Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
5	2	02	08	01	0062	Belanja Modal Alat Laboratorium Populasi
5	2	02	08	01	0063	Belanja Modal Alat Pengukur Gelombang
5	2	02	08	01	0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya
5	2	02	08	02		Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5	2	02	08	02	0001	Belanja Modal <i>Analytical Instrument</i>
5	2	02	08	02	0002	Belanja Modal <i>Instrument Probe/Sensor</i>
5	2	02	08	02	0003	Belanja Modal <i>General Laboratory Tool</i>
5	2	02	08	02	0004	Belanja Modal <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
5	2	02	08	02	0005	Belanja Modal <i>Laboratory Safety Equipment</i>
5	2	02	08	02	0006	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
5	2	02	08	03		Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah



Kode Akun						Uraian Akun
5	2	02	08	03	0001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
5	2	02	08	03	0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika
5	2	02	08	03	0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
5	2	02	08	03	0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
5	2	02	08	03	0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
5	2	02	08	03	0006	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
5	2	02	08	03	0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS
5	2	02	08	03	0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama
5	2	02	08	03	0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
5	2	02	08	03	0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian
5	2	02	08	03	0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olahraga
5	2	02	08	03	0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: PKN
5	2	02	08	03	0013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
5	2	02	08	03	0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan
5	2	02	08	03	0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK
5	2	02	08	03	0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
5	2	02	08	04		Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
5	2	02	08	04	0001	Belanja Modal <i>Radiation Detector</i>
5	2	02	08	04	0002	Belanja Modal <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
5	2	02	08	04	0003	Belanja Modal <i>Assembly/Counting System</i>
5	2	02	08	04	0004	Belanja Modal <i>Recorder Display</i>
5	2	02	08	04	0005	Belanja Modal <i>System/Power Supply</i>
5	2	02	08	04	0006	Belanja Modal <i>Measuring/Testing Device</i>
5	2	02	08	04	0007	Belanja Modal <i>Opto Electronics</i>
5	2	02	08	04	0008	Belanja Modal <i>Accelerator</i>
5	2	02	08	04	0009	Belanja Modal <i>Reactor Experimental System</i>
5	2	02	08	04	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
5	2	02	08	05		Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
5	2	02	08	05	0001	Alat Ukur Fisika Kesehatan
5	2	02	08	05	0002	Alat Kesehatan Kerja
5	2	02	08	05	0003	Proteksi Lingkungan
5	2	02	08	05	0004	<i>Meteorological Equipment</i>
5	2	02	08	05	0005	Sumber Radiasi
5	2	02	08	05	0006	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
5	2	02	08	06		Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
5	2	02	08	06	0001	Belanja Modal <i>Radiation Application Equipment</i>
5	2	02	08	06	0002	Belanja Modal <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
5	2	02	08	06	0003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi
5	2	02	08	06	0004	Belanja Modal <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
5	2	02	08	07		Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5	2	02	08	07	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
5	2	02	08	07	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara
5	2	02	08	07	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5	2	02	08	07	0004	Belanja Modal Laboratorium Lingkungan
5	2	02	08	07	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang
5	2	02	08	07	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
5	2	02	08	08		Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>
5	2	02	08	08	0001	Belanja Modal <i>Towing Carriage</i>
5	2	02	08	08	0002	Belanja Modal <i>Wave Generator and Absorber</i>
5	2	02	08	08	0003	Belanja Modal <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
5	2	02	08	08	0004	Belanja Modal <i>Cavitation Tunnel</i>
5	2	02	08	08	0005	Belanja Modal <i>Overhead Cranes</i>
5	2	02	08	08	0006	Belanja Modal Peralatan Umum
5	2	02	08	08	0007	Belanja Modal Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
5	2	02	08	08	0008	Belanja Modal Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
5	2	02	08	08	0009	Belanja Modal Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
5	2	02	08	08	0010	Belanja Modal Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
5	2	02	08	08	0011	Belanja Modal Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
5	2	02	08	08	0012	Belanja Modal Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
5	2	02	08	08	0013	Belanja Modal Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
5	2	02	08	08	0014	Belanja Modal MOB
5	2	02	08	08	0015	Belanja Modal <i>Photo and Film Equipment</i>
5	2	02	08	08	0016	Belanja Modal Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
5	2	02	08	09		Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
5	2	02	08	09	0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
5	2	02	08	09	0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
5	2	02	08	09	0003	Belanja Modal Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
5	2	02	08	09	0004	Belanja Modal Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
5	2	02	08	09	0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
5	2	02	08	09	0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
5	2	02	08	09	0007	Belanja Modal Alat Laboratorium Natus
5	2	02	08	09	0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
5	2	02	08	09	0009	Belanja Modal Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
5	2	02	08	09	0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Uji Perangkat
5	2	02	08	09	0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
5	2	02	10			Belanja Modal Komputer
5	2	02	10	01		Belanja Modal Komputer Unit
5	2	02	10	01	0001	Belanja Modal Komputer Jaringan
5	2	02	10	01	0002	Belanja Modal <i>Personal Computer</i>
5	2	02	10	01	0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya
5	2	02	10	02		Belanja Modal Peralatan Komputer
5	2	02	10	02	0001	Belanja Modal Peralatan <i>Mainframe</i>
5	2	02	10	02	0002	Belanja Modal Peralatan <i>Mini Computer</i>
5	2	02	10	02	0003	Belanja Modal Peralatan <i>Personal Computer</i>
5	2	02	10	02	0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan
5	2	02	10	02	0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
5	2	02	11			Belanja Modal Alat Eksplorasi
5	2	02	11	01		Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi
5	2	02	11	01	0001	Belanja Modal Optik
5	2	02	11	01	0002	Belanja Modal Ukur/Instrumen

Kode Akun						Uraian Akun
5	2	02	11	01	0003	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
5	2	02	11	02		Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika
5	2	02	11	02	0001	Belanja Modal Mekanik
5	2	02	11	02	0002	Belanja Modal Elektronik/ <i>Electric</i>
5	2	02	11	02	0003	Belanja Modal Manual
5	2	02	11	02	0004	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
5	2	02	12			Belanja Modal Alat Pengeboran
5	2	02	12	01		Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin
5	2	02	12	01	0001	Belanja Modal Bor Mesin Tumbuk
5	2	02	12	01	0002	Belanja Modal Bor Mesin Putar
5	2	02	12	01	0003	Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin Lainnya
5	2	02	12	02		Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin
5	2	02	12	02	0001	Belanja Modal Bangka
5	2	02	12	02	0002	Belanja Modal Pantek
5	2	02	12	02	0003	Belanja Modal Putar
5	2	02	12	02	0004	Belanja Modal Peralatan Bantu
5	2	02	12	02	0005	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
5	2	02	13			Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
5	2	02	13	01		Belanja Modal Sumur
5	2	02	13	01	0001	Belanja Modal Peralatan Sumur Minyak
5	2	02	13	01	0002	Belanja Modal Sumur Pemboran
5	2	02	13	01	0003	Belanja Modal Sumur Lainnya
5	2	02	13	02		Belanja Modal Produksi
5	2	02	13	02	0001	Belanja Modal RIG
5	2	02	13	02	0002	Belanja Modal Produksi Lainnya
5	2	02	13	03		Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian
5	2	02	13	03	0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Minyak
5	2	02	13	03	0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air
5	2	02	13	03	0003	Belanja Modal Alat Pengolahan <i>Steam</i>
5	2	02	13	03	0004	Belanja Modal Alat Pengolahan <i>Wax</i>
5	2	02	13	03	0005	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
5	2	02	14			Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5	2	02	14	01		Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
5	2	02	14	01	0001	Belanja Modal Mekanik
5	2	02	14	01	0002	Belanja Modal Elektrik
5	2	02	14	01	0003	Belanja Modal Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
5	2	02	14	02		Belanja Modal Alat Bantu Produksi
5	2	02	14	02	0001	Belanja Modal Perawatan Sumur
5	2	02	14	02	0002	Belanja Modal Tes Unit
5	2	02	14	02	0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya
5	2	02	15			Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
5	2	02	15	01		Belanja Modal Alat Deteksi
5	2	02	15	01	0001	Belanja Modal Radiasi
5	2	02	15	01	0002	Belanja Modal Suara
5	2	02	15	01	0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya
5	2	02	15	02		Belanja Modal Alat Pelindung
5	2	02	15	02	0001	Belanja Modal Baju Pengaman
5	2	02	15	02	0002	Belanja Modal Masker
5	2	02	15	02	0003	Belanja Modal Topi Kerja
5	2	02	15	02	0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman
5	2	02	15	02	0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan
5	2	02	15	02	0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya
5	2	02	15	03		Belanja Modal Alat SAR
5	2	02	15	03	0001	Belanja Modal Alat Penolong
5	2	02	15	03	0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian
5	2	02	15	03	0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air
5	2	02	15	03	0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya
5	2	02	15	04		Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan
5	2	02	15	04	0001	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
5	2	02	15	04	0002	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
5	2	02	15	04	0003	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
5	2	02	15	04	0004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
5	2	02	15	04	0005	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
5	2	02	15	04	0006	Belanja Modal Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
5	2	02	15	04	0007	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Lainnya
5	2	02	16			Belanja Modal Alat Peraga
5	2	02	16	01		Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
5	2	02	16	01	0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan
5	2	02	16	01	0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan
5	2	02	16	01	0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
5	2	02	17			Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
5	2	02	17	01		Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi
5	2	02	17	01	0001	Belanja Modal <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
5	2	02	17	01	0002	Belanja Modal <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
5	2	02	17	01	0003	Belanja Modal <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
5	2	02	17	01	0004	Belanja Modal <i>Solid-Solid Classifier</i>
5	2	02	17	01	0005	Belanja Modal <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
5	2	02	17	01	0006	Belanja Modal <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
5	2	02	17	01	0007	Belanja Modal <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>
5	2	02	17	01	0008	Belanja Modal <i>Leaching Equipment</i>
5	2	02	17	01	0009	Belanja Modal <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
5	2	02	17	01	0010	Belanja Modal <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
5	2	02	17	01	0011	Belanja Modal <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
5	2	02	17	01	0012	Belanja Modal <i>Liquid from Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
5	2	02	17	01	0013	Belanja Modal <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
5	2	02	17	01	0014	Belanja Modal <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
5	2	02	17	01	0015	Belanja Modal <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
5	2	02	17	01	0016	Belanja Modal <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
5	2	02	17	01	0017	Belanja Modal <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
5	2	02	17	01	0018	Belanja Modal <i>Isotope Separation Equipment</i>

Kode Akun						Uraian Akun
5	2	02	17	01	0019	Belanja Modal <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
5	2	02	17	01	0020	Belanja Modal <i>Solid Material Handling Equipment</i>
5	2	02	17	01	0021	Belanja Modal <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
5	2	02	17	01	0022	Belanja Modal <i>Heat Generating Equipment</i>
5	2	02	17	01	0023	Belanja Modal <i>Heat Transfer Equipment</i>
5	2	02	17	01	0024	Belanja Modal <i>Mechanical Process</i>
5	2	02	17	01	0025	Belanja Modal <i>Chemical Reaction Equipment</i>
5	2	02	17	01	0026	Belanja Modal Unit Peralatan
5	2	02	18			Belanja Modal Rambu-Rambu
5	2	02	18	01		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
5	2	02	18	01	0001	Belanja Modal Rambu Bersuar
5	2	02	18	01	0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar
5	2	02	18	01	0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
5	2	02	18	02		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5	2	02	18	02	0001	Belanja Modal <i>Runway/Threshold Light</i>
5	2	02	18	02	0002	Belanja Modal <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
5	2	02	18	02	0003	Belanja Modal <i>Approach Light</i>
5	2	02	18	02	0004	Belanja Modal <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
5	2	02	18	02	0005	Belanja Modal <i>Signal</i>
5	2	02	18	02	0006	Belanja Modal <i>Flood Lights</i>
5	2	02	18	02	0007	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
5	2	02	18	03		Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	2	02	18	03	0001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
5	2	02	18	03	0002	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
5	2	02	19			Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	02	19	01		Belanja Modal Peralatan Olahraga
5	2	02	19	01	0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik
5	2	02	19	01	0002	Belanja Modal Peralatan Permainan
5	2	02	19	01	0003	Belanja Modal Peralatan Senam
5	2	02	19	01	0004	Belanja Modal Peralatan Olahraga Air
5	2	02	19	01	0005	Belanja Modal Peralatan Olahraga Udara
5	2	02	19	01	0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya
5	2	03				Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5	2	03	01			Belanja Modal Bangunan Gedung
5	2	03	01	01		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
5	2	03	01	01	0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
5	2	03	01	01	0002	Belanja Modal Bangunan Gudang
5	2	03	01	01	0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
5	2	03	01	01	0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi
5	2	03	01	01	0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium
5	2	03	01	01	0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan
5	2	03	01	01	0007	Belanja Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
5	2	03	01	01	0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5	2	03	01	01	0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5	2	03	01	01	0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5	2	03	01	01	0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga
5	2	03	01	01	0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5	2	03	01	01	0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
5	2	03	01	01	0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool
5	2	03	01	01	0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5	2	03	01	01	0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan
5	2	03	01	01	0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum
5	2	03	01	01	0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
5	2	03	01	01	0019	Belanja Modal Bangunan Pengujian Kelaikan
5	2	03	01	01	0020	Belanja Modal Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
5	2	03	01	01	0021	Belanja Modal Bangunan Rumah Tahanan
5	2	03	01	01	0022	Belanja Modal Bangunan Gedung Krematorium
5	2	03	01	01	0023	Belanja Modal Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5	2	03	01	01	0024	Belanja Modal Bangunan Tempat Persidangan
5	2	03	01	01	0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka
5	2	03	01	01	0026	Belanja Modal Bangunan Penampung Sekam
5	2	03	01	01	0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
5	2	03	01	01	0028	Belanja Modal Bangunan Industri
5	2	03	01	01	0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan
5	2	03	01	01	0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	03	01	01	0031	Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika
5	2	03	01	01	0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum
5	2	03	01	01	0033	Belanja Modal Bangunan Parkir
5	2	03	01	01	0034	Belanja Modal Bangunan Gedung Pabrik
5	2	03	01	01	0035	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus
5	2	03	01	01	0036	Belanja Modal Taman
5	2	03	01	01	0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5	2	03	01	02		Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5	2	03	01	02	0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I
5	2	03	01	02	0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II
5	2	03	01	02	0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III
5	2	03	01	02	0004	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5	2	03	01	02	0005	Belanja Modal Asrama
5	2	03	01	02	0006	Belanja Modal Hotel
5	2	03	01	02	0007	Belanja Modal Motel
5	2	03	01	02	0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun
5	2	03	01	02	0009	Belanja Modal Rumah Negara dalam Proses
5	2	03	01	02	0010	Belanja Modal Panti Asuhan
5	2	03	01	02	0011	Belanja Modal Apartemen
5	2	03	01	02	0012	Belanja Modal Rumah Tidak Bersusun
5	2	03	01	02	0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
5	2	03	02			Belanja Modal Monumen
5	2	03	02	01		Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti
5	2	03	02	01	0001	Belanja Modal Candi
5	2	03	02	01	0002	Belanja Modal Tugu

Kode Akun						Uraian Akun
5	2	03	02	01	0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan
5	2	03	02	01	0004	Belanja Modal Candi/Tugu
5	2	03	03			Belanja Modal Bangunan Menara
5	2	03	03	01		Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan
5	2	03	03	01	0001	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
5	2	03	03	01	0002	Belanja Modal Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
5	2	03	03	01	0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi
5	2	03	03	01	0004	Belanja Modal Bangunan Menara Pengawas
5	2	03	03	01	0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya
5	2	03	04			Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
5	2	03	04	01		Belanja Modal Tugu/Tanda Batas
5	2	03	04	01	0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi
5	2	03	04	01	0002	Belanja Modal Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
5	2	03	04	01	0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
5	2	03	04	01	0004	Belanja Modal Pagar
5	2	03	04	01	0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya
5	2	04				Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5	2	04	01			Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5	2	04	01	01		Belanja Modal Jalan
5	2	04	01	01	0001	Belanja Modal Jalan Nasional
5	2	04	01	01	0002	Belanja Modal Jalan Provinsi
5	2	04	01	01	0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten
5	2	04	01	01	0004	Belanja Modal Jalan Kota
5	2	04	01	01	0005	Belanja Modal Jalan Desa
5	2	04	01	01	0006	Belanja Modal Jalan Tol
5	2	04	01	01	0007	Belanja Modal Jalan Kereta Api
5	2	04	01	01	0008	Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat Terbang
5	2	04	01	01	0009	Belanja Modal Jalan Khusus
5	2	04	01	01	0010	Belanja Modal Jalan Lainnya
5	2	04	01	02		Belanja Modal Jembatan
5	2	04	01	02	0001	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Nasional
5	2	04	01	02	0002	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi
5	2	04	01	02	0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten
5	2	04	01	02	0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota
5	2	04	01	02	0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa
5	2	04	01	02	0006	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Tol
5	2	04	01	02	0007	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kereta Api
5	2	04	01	02	0008	Belanja Modal Jembatan pada Landasan
5	2	04	01	02	0009	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Khusus
5	2	04	01	02	0010	Belanja Modal Jembatan Penyeberangan
5	2	04	01	02	0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
5	2	04	01	02	0012	Belanja Modal Jembatan Pengukur
5	2	04	01	02	0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya
5	2	04	02			Belanja Modal Bangunan Air
5	2	04	02	01		Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
5	2	04	02	01	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi
5	2	04	02	01	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi
5	2	04	02	01	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi
5	2	04	02	01	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi
5	2	04	02	01	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi
5	2	04	02	01	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi
5	2	04	02	01	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi
5	2	04	02	01	0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya
5	2	04	02	02		Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut
5	2	04	02	02	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pasang Surut
5	2	04	02	02	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5	2	04	02	02	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut
5	2	04	02	02	0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut
5	2	04	02	02	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut
5	2	04	02	02	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5	2	04	02	02	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pasang Surut
5	2	04	02	02	0008	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
5	2	04	02	03		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
5	2	04	02	03	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap
5	2	04	02	03	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5	2	04	02	03	0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
5	2	04	02	04		Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	04	02	04	0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
5	2	04	02	04	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
5	2	04	02	04	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
5	2	04	02	04	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5	2	04	02	04	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman
5	2	04	02	04	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
5	2	04	02	04	0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
5	2	04	02	05		Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5	2	04	02	05	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
5	2	04	02	05	0007	Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
5	2	04	02	05	0008	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
5	2	04	02	06		Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku

Kode Akun						Uraian Akun
5	2	04	02	06	0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5	2	04	02	06	0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	04	02	07		Belanja Modal Bangunan Air Kotor
5	2	04	02	07	0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor
5	2	04	02	07	0002	Belanja Modal Bangunan Waduk Air Kotor
5	2	04	02	07	0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor
5	2	04	02	07	0004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor
5	2	04	02	07	0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor
5	2	04	02	07	0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya
5	2	04	03			Belanja Modal Instalasi
5	2	04	03	01		Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku
5	2	04	03	01	0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan
5	2	04	03	01	0002	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air
5	2	04	03	01	0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam
5	2	04	03	01	0004	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dangkal
5	2	04	03	01	0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
5	2	04	03	02		Belanja Modal Instalasi Air Kotor
5	2	04	03	02	0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik
5	2	04	03	02	0002	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Industri
5	2	04	03	02	0003	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Pertanian
5	2	04	03	02	0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya
5	2	04	03	03		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah
5	2	04	03	03	0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5	2	04	03	03	0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5	2	04	03	03	0003	Belanja Modal Bangunan Penampung
5	2	04	03	03	0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
5	2	04	03	04		Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5	2	04	03	04	0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
5	2	04	03	04	0002	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
5	2	04	03	04	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
5	2	04	03	04	0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
5	2	04	03	05		Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	04	03	05	0001	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
5	2	04	03	05	0002	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
5	2	04	03	05	0003	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
5	2	04	03	05	0004	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5	2	04	03	05	0005	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5	2	04	03	05	0006	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik
5	2	04	03	05	0007	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5	2	04	03	05	0008	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5	2	04	03	05	0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5	2	04	03	05	0010	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5	2	04	03	05	0011	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
5	2	04	03	05	0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
5	2	04	03	06		Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik
5	2	04	03	06	0001	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Induk
5	2	04	03	06	0002	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5	2	04	03	06	0003	Belanja Modal Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5	2	04	03	06	0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya
5	2	04	03	07		Belanja Modal Instalasi Pertahanan
5	2	04	03	07	0001	Belanja Modal Instalasi Pertahanan di Darat
5	2	04	03	07	0002	Belanja Modal Instalasi Pertahanan Lainnya
5	2	04	03	08		Belanja Modal Instalasi Gas
5	2	04	03	08	0001	Belanja Modal Instalasi Gardu Gas
5	2	04	03	08	0002	Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Gas
5	2	04	03	08	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Gas
5	2	04	03	08	0004	Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya
5	2	04	03	09		Belanja Modal Instalasi Pengaman
5	2	04	03	09	0001	Belanja Modal Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5	2	04	03	09	0002	Belanja Modal Instalasi Reaktor Nuklir
5	2	04	03	09	0003	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
5	2	04	03	09	0004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya
5	2	04	03	10		Belanja Modal Instalasi Lain
5	2	04	03	10	0001	Belanja Modal Instalasi Lain
5	2	04	04			Belanja Modal Jaringan
5	2	04	04	01		Belanja Modal Jaringan Air Minum
5	2	04	04	01	0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa
5	2	04	04	01	0002	Belanja Modal Jaringan Induk Distribusi
5	2	04	04	01	0003	Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi
5	2	04	04	01	0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah
5	2	04	04	01	0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya
5	2	04	04	02		Belanja Modal Jaringan Listrik
5	2	04	04	02	0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi
5	2	04	04	02	0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi
5	2	04	04	02	0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya
5	2	04	04	03		Belanja Modal Jaringan Telepon
5	2	04	04	03	0001	Belanja Modal Jaringan Telepon di atas Tanah
5	2	04	04	03	0002	Belanja Modal Jaringan Telepon di bawah Tanah
5	2	04	04	03	0003	Belanja Modal Jaringan Telepon di dalam Air
5	2	04	04	03	0004	Belanja Modal Jaringan dengan Media Udara
5	2	04	04	03	0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya
5	2	04	04	04		Belanja Modal Jaringan Gas
5	2	04	04	04	0001	Belanja Modal Jaringan Pipa Gas Transmisi
5	2	04	04	04	0002	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi
5	2	04	04	04	0003	Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas
5	2	04	04	04	0004	Belanja Modal Jaringan BBM

Kode Akun						Uraian Akun
5	2	04	04	04	0005	Belanja Modal Jaringan Gas Lainnya
5	2	05				Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5	2	05	01			Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5	2	05	01	01		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
5	2	05	01	01	0001	Belanja Modal Buku Umum
5	2	05	01	01	0002	Belanja Modal Buku Filsafat
5	2	05	01	01	0003	Belanja Modal Buku Agama
5	2	05	01	01	0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial
5	2	05	01	01	0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa
5	2	05	01	01	0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
5	2	05	01	01	0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
5	2	05	01	01	0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
5	2	05	01	01	0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
5	2	05	01	01	0010	Belanja Modal Serial
5	2	05	01	01	0011	Belanja Modal Buku Laporan
5	2	05	01	01	0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
5	2	05	01	02		Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro
5	2	05	01	02	0001	Belanja Modal Audio Visual
5	2	05	01	02	0002	Belanja Modal Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )
5	2	05	01	02	0003	Belanja Modal Terekam Dan Bentuk Mikro Lainnya
5	2	05	01	03		Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan
5	2	05	01	03	0001	Belanja Modal Bahan Kartografi
5	2	05	01	03	0002	Belanja Modal Naskah (Manuskrip)/Asli
5	2	05	01	03	0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran
5	2	05	01	03	0004	Belanja Modal Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
5	2	05	01	04		Belanja Modal Musik
5	2	05	01	04	0001	Belanja Modal Karya Musik
5	2	05	01	04	0002	Belanja Modal Musik Lainnya
5	2	05	01	05		Belanja Modal Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
5	2	05	01	05	0001	Belanja Modal Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
5	2	05	01	05	0002	Belanja Modal Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya
5	2	05	01	06		Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
5	2	05	01	06	0001	Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i>
5	2	05	01	06	0002	Belanja Modal <i>Three Dimensional Artifacts And Realita</i> Lainnya
5	2	05	01	07		Belanja Modal <i>Tarscalt</i>
5	2	05	01	07	0001	Belanja Modal <i>Tarscalt</i>
5	2	05	01	07	0002	Belanja Modal <i>Tarscalt</i> Lainnya
5	2	05	02			Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
5	2	05	02	01		Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
5	2	05	02	01	0001	Belanja Modal Alat Musik
5	2	05	02	01	0002	Belanja Modal Lukisan
5	2	05	02	01	0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian
5	2	05	02	01	0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya
5	2	05	02	02		Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan
5	2	05	02	02	0001	Belanja Modal Pahatan
5	2	05	02	02	0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
5	2	05	02	02	0003	Belanja Modal Barang Kerajinan
5	2	05	02	02	0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
5	2	05	02	03		Belanja Modal Tanda Penghargaan
5	2	05	02	03	0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang
5	2	05	02	03	0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
5	2	05	03			Belanja Modal Hewan
5	2	05	03	01		Belanja Modal Hewan Piaraan
5	2	05	03	01	0001	Belanja Modal Hewan Pengaman
5	2	05	03	01	0002	Belanja Modal Hewan Pengangkut
5	2	05	03	01	0003	Belanja Modal Hewan Kebun Binatang
5	2	05	03	01	0004	Belanja Modal Hewan Piaraan Lainnya
5	2	05	03	02		Belanja Modal Ternak
5	2	05	03	02	0001	Belanja Modal Ternak Potong
5	2	05	03	02	0002	Belanja Modal Ternak Perah
5	2	05	03	02	0003	Belanja Modal Ternak Unggas
5	2	05	03	02	0004	Belanja Modal Ternak Lainnya
5	2	05	03	03		Belanja Modal Hewan Lainnya
1	3	05	03	03	0001	Belanja Modal Hewan Lainnya
5	2	05	04			Belanja Modal Biota Perairan
5	2	05	04	01		Belanja Modal Ikan Bersirip ( <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip)
5	2	05	04	01	0001	Belanja Modal Ikan Budidaya
5	2	05	04	02		Belanja Modal <i>Crustea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	02	0001	Belanja Modal <i>Crustea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan Sebangsanya)
5	2	05	04	03		Belanja Modal <i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	03	0001	Belanja Modal <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)
5	2	05	04	04		Belanja Modal <i>Coelenterata</i> (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
5	2	05	04	04	0001	Belanja Modal <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur- ubur dan Sebangsanya)
5	2	05	04	05		Belanja Modal <i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	05	0001	Belanja Modal <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
5	2	05	04	06		Belanja Modal <i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)
5	2	05	04	06	0001	Belanja Modal <i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
5	2	05	04	07		Belanja Modal Reptilia (Buaya, Penyu, Kura- kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	07	0001	Belanja Modal Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
5	2	05	04	08		Belanja Modal Mammalia (Paus, Lumba- lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
5	2	05	04	08	0001	Belanja Modal Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
5	2	05	04	09		Belanja Modal <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di Dalam Air)
5	2	05	04	09	0001	Belanja Modal <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
5	2	05	04	10		Belanja Modal Biota Perairan Lainnya
5	2	05	04	10	0001	Belanja Modal Budidaya Biota Perairan Lainnya
5	2	05	05			Belanja Modal Tanaman
5	2	05	05	01		Belanja Modal Tanaman

Kode Akun						Uraian Akun
5	2	05	05	01	0001	Belanja Modal Tanaman
5	2	05	06			Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	05	06	01		Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
5	2	05	06	01	0001	Belanja Modal Hewan Koleksi
5	2	05	06	01	0002	Belanja Modal Biota Perairan Koleksi
5	2	05	06	01	0003	Belanja Modal Tanaman Koleksi
5	2	05	06	01	0004	Belanja Modal Mikroba Koleksi
5	2	05	06	01	0005	Belanja Modal Batuan Koleksi
5	2	05	06	01	0006	Belanja Modal Fosil
5	2	05	06	01	0007	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
5	2	05	07			Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	07	01		Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	07	01	0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
5	2	05	08			Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	05	08	01		Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
5	2	05	08	01	0001	Belanja Modal <i>Goodwill</i>
5	2	05	08	01	0002	Belanja Modal Lisensi dan <i>Franchise</i>
5	2	05	08	01	0003	Belanja Modal Hak Cipta
5	2	05	08	01	0004	Belanja Modal Hak Paten
5	2	05	08	01	0005	Belanja Modal <i>Software</i>
5	2	05	08	01	0006	Belanja Modal Kajian
5	2	05	08	01	0007	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya
5	2	05	08	01	0008	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan
5	2	05	08	01	0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya
5	3					BELANJA TIDAK TERDUGA
5	3	01				Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01			Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01	01		Belanja Tidak Terduga
5	3	01	01	01	0001	Belanja Tidak Terduga
5	4					BELANJA TRANSFER
5	4	01				Belanja Bagi Hasil
5	4	01	01			Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
5	4	01	01	01		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
5	4	01	01	01	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
5	4	01	01	02		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
5	4	01	01	02	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
5	4	01	01	03		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
5	4	01	01	03	0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
5	4	01	02			Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	01	02	01		Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	01	02	01	0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
5	4	02				Belanja Bantuan Keuangan
5	4	02	01			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Provinsi
5	4	02	01	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
5	4	02	01	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi
5	4	02	02			Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
5	4	02	02	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
5	4	02	03			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah
5	4	02	03	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	03	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
5	4	02	04			Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
5	4	02	04	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	04	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi
5	4	02	05			Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	01		Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	01	0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	02		Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	05	02	0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
5	4	02	06			Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	02	06	01		Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
5	4	02	06	01	0001	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
6						PEMBIAYAAN DAERAH
6	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6	1	01				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6	1	01	01			Pelampauan Penerimaan PAD
6	1	01	01	01		Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
6	1	01	01	01	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
6	1	01	01	01	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
6	1	01	01	01	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
6	1	01	01	01	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan
6	1	01	01	01	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok
6	1	01	01	01	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel
6	1	01	01	01	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran
6	1	01	01	01	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan
6	1	01	01	01	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame
6	1	01	01	01	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Penerangan Jalan
6	1	01	01	01	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir
6	1	01	01	01	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah
6	1	01	01	01	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet
6	1	01	01	01	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6	1	01	01	01	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Kode Akun						Uraian Akun
6	1	01	01	01	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6	1	01	01	02		Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah
6	1	01	01	02	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum
6	1	01	01	02	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha
6	1	01	01	02	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu
6	1	01	01	03		Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	01	01	03	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
6	1	01	01	03	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
6	1	01	01	04		Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah
6	1	01	01	04	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah
6	1	01	01	04	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro
6	1	01	01	04	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
6	1	01	01	04	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga
6	1	01	01	04	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
6	1	01	01	04	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
6	1	01	01	04	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
6	1	01	01	04	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
6	1	01	01	04	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah
6	1	01	01	04	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah
6	1	01	01	04	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
6	1	01	01	04	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian
6	1	01	01	04	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
6	1	01	01	04	0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
6	1	01	01	04	0018	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
6	1	01	01	04	0019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
6	1	01	01	04	0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah
6	1	01	01	04	0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
6	1	01	02			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
6	1	01	02	01		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat
6	1	01	02	01	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan
6	1	01	02	01	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21
6	1	01	02	01	0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
6	1	01	02	01	0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
6	1	01	02	01	0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi
6	1	01	02	01	0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi
6	1	01	02	01	0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi
6	1	01	02	01	0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara- <i>Landrent</i>
6	1	01	02	01	0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara- <i>Royalty</i>
6	1	01	02	01	0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
6	1	01	02	01	0011	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)
6	1	01	02	01	0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
6	1	01	02	01	0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan
6	1	01	02	01	0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum
6	1	01	02	01	0015	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
6	1	01	02	01	0016	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan
6	1	01	02	01	0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
6	1	01	02	01	0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-PAUD
6	1	01	02	01	0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD
6	1	01	02	01	0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMP
6	1	01	02	01	0021	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMA
6	1	01	02	01	0022	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SLB
6	1	01	02	01	0023	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SKB
6	1	01	02	01	0024	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SD
6	1	01	02	01	0025	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana



Kode Akun						Uraian Akun
						Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SMP
6	1	01	02	01	0026	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Afirmasi-SMA
6	1	01	02	01	0027	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK
6	1	01	02	01	0028	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Perpustakaan Daerah
6	1	01	02	01	0029	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-Gedung Olahraga
6	1	01	02	01	0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
6	1	01	02	01	0031	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
6	1	01	02	01	0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian
6	1	01	02	01	0033	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
6	1	01	02	01	0034	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>
6	1	01	02	01	0035	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
6	1	01	02	01	0036	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
6	1	01	02	01	0037	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama
6	1	01	02	01	0038	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
6	1	01	02	01	0039	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
6	1	01	02	01	0040	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
6	1	01	02	01	0041	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
6	1	01	02	01	0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB
6	1	01	02	01	0043	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> (KB)
6	1	01	02	01	0044	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
6	1	01	02	01	0045	Pelampauan Penerimaan Pendapatan
6	1	01	02	01	0046	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
6	1	01	02	01	0047	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
6	1	01	02	01	0048	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana
6	1	01	02	01	0049	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
6	1	01	02	01	0050	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata- Penugasan
6	1	01	02	01	0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler- Jalan
6	1	01	02	01	0052	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan
6	1	01	02	01	0053	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Keselamatan Jalan
6	1	01	02	01	0054	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- Reguler
6	1	01	02	01	0055	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- Afirmasi
6	1	01	02	01	0056	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- Penugasan
6	1	01	02	01	0057	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler
6	1	01	02	01	0058	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Afirmasi
6	1	01	02	01	0059	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Penugasan
6	1	01	02	01	0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi- Penugasan
6	1	01	02	01	0061	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pasar- Penugasan
6	1	01	02	01	0062	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana

Kode Akun						Uraian Akun
						Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
6	1	01	02	01	0063	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
6	1	01	02	01	0064	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
6	1	01	02	01	0065	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi
6	1	01	02	01	0066	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Laut-Penugasan
6	1	01	02	01	0067	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sosial-Reguler
6	1	01	02	01	0068	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
6	1	01	02	01	0069	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Afirmasi
6	1	01	02	01	0070	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOS Kinerja
6	1	01	02	01	0071	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
6	1	01	02	01	0072	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
6	1	01	02	01	0073	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
6	1	01	02	01	0074	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6	1	01	02	01	0075	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus Dana
6	1	01	02	01	0076	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
6	1	01	02	01	0077	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
6	1	01	02	01	0078	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
6	1	01	02	01	0079	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
6	1	01	02	01	0080	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
6	1	01	02	01	0081	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
6	1	01	02	01	0082	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
6	1	01	02	01	0083	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
6	1	01	02	01	0084	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
6	1	01	02	01	0085	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
6	1	01	02	01	0086	Pelampauan Penerimaan Pendapatan
6	1	01	02	01	0087	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah
6	1	01	02	01	0088	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
6	1	01	02	01	0089	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
6	1	01	02	01	0090	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
6	1	01	02	01	0091	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
6	1	01	02	01	0092	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
6	1	01	02	01	0093	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Keistimewaan DIY
6	1	01	02	01	0094	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana
6	1	01	02	02		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah
6	1	01	02	02	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil
6	1	01	02	02	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan
6	1	01	03			Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
6	1	01	03	01		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah
6	1	01	03	01	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
6	1	01	03	01	0002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	03	01	0003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
6	1	01	03	01	0004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi dalam Negeri/Luar Negeri
6	1	01	03	01	0005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis
6	1	01	03	02		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
6	1	01	03	02	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Dana Darurat
6	1	01	03	03		Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
6	1	01	03	03	0001	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Kode Akun					Uraian Akun
6	1	01	04		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
6	1	01	04	01	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan
6	1	01	04	01	0001 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pencairan Dana Cadangan
6	1	01	04	02	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	01	04	02	0001 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6	1	01	04	02	0002 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	01	04	03	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	01	04	03	0001 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	1	01	04	03	0002 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	01	04	03	0003 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank
6	1	01	04	03	0004 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	1	01	04	03	0005 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	1	01	04	04	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	01	04	04	0001 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
6	1	01	04	04	0002 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah
6	1	01	04	04	0003 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	04	04	0004 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	04	04	0005 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	01	04	04	0006 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	01	04	04	0007 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	01	04	04	0008 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	01	04	04	0009 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	01	04	04	0010 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	01	04	04	0011 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	01	04	04	0012 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan- Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	01	05		Penghematan Belanja
6	1	01	05	01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi
6	1	01	05	01	0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN
6	1	01	05	01	0002 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN
6	1	01	05	01	0003 Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
6	1	01	05	01	0004 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan DPRD
6	1	01	05	01	0005 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
6	1	01	05	01	0006 Penghematan Belanja Pegawai-Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
6	1	01	05	01	0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang
6	1	01	05	01	0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Jasa
6	1	01	05	01	0009 Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Pemeliharaan
6	1	01	05	01	0010 Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Perjalanan Dinas
6	1	01	05	01	0011 Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
6	1	01	05	01	0012 Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
6	1	01	05	01	0013 Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	05	01	0014 Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
6	1	01	05	01	0015 Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	1	01	05	01	0016 Penghematan Belanja Bunga-Bunga Utang Pinjaman kepada Masyarakat (Obligasi)
6	1	01	05	01	0017 Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMN
6	1	01	05	01	0018 Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada BUMD
6	1	01	05	01	0019 Penghematan Belanja Subsidi-Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
6	1	01	05	01	0020 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Pusat
6	1	01	05	01	0021 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	01	05	01	0022 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMN
6	1	01	05	01	0023 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMD
6	1	01	05	01	0024 Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
6	1	01	05	01	0025 Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS
6	1	01	05	01	0026 Penghematan Belanja Hibah-Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
6	1	01	05	01	0027 Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Individu
6	1	01	05	01	0028 Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Keluarga
6	1	01	05	01	0029 Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
6	1	01	05	01	0030 Penghematan Belanja Bantuan Sosial- Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
6	1	01	05	02	Penghematan Belanja-Belanja Modal
6	1	01	05	02	0001 Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah
6	1	01	05	02	0002 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar
6	1	01	05	02	0003 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan
6	1	01	05	02	0004 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur
6	1	01	05	02	0005 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian
6	1	01	05	02	0006 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga
6	1	01	05	02	0007 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
6	1	01	05	02	0008 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan
6	1	01	05	02	0009 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium
6	1	01	05	02	0010 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer
6	1	01	05	02	0011 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi
6	1	01	05	02	0012 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Pengeboran
6	1	01	05	02	0013 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
6	1	01	05	02	0014 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Bantu Eksplorasi
6	1	01	05	02	0015 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja
6	1	01	05	02	0016 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Peraga
6	1	01	05	02	0017 Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Proses/Produksi

Kode Akun						Uraian Akun
6	1	01	05	02	0018	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu
6	1	01	05	02	0019	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga
6	1	01	05	02	0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung
6	1	01	05	02	0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen
6	1	01	05	02	0022	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Menara
6	1	01	05	02	0023	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti
6	1	01	05	02	0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan
6	1	01	05	02	0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air
6	1	01	05	02	0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi
6	1	01	05	02	0027	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan
6	1	01	05	02	0028	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan
6	1	01	05	02	0029	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
6	1	01	05	02	0030	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan
6	1	01	05	02	0031	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Biota Perairan
6	1	01	05	02	0032	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Tanaman
6	1	01	05	02	0033	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Barang Koleksi Non Budaya
6	1	01	05	02	0034	Penghematan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Dalam Renovasi
6	1	01	05	03		Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
6	1	01	05	03	0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga
6	1	01	05	04		Sisa Belanja Transfer
6	1	01	05	04	0001	Sisa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
6	1	01	05	04	0002	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
6	1	01	05	04	0003	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
6	1	01	05	04	0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
6	1	01	05	04	0005	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan
6	1	01	05	04	0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
6	1	01	05	04	0007	Sisa Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
6	1	01	06			Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselamatkan
6	1	01	06	01		Uang Jaminan
6	1	01	06	01	0001	Uang Jaminan
6	1	01	07			Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	01	07	01		Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
6	1	01	07	01	0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja
6	1	01	07	02		Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	01	07	02	0001	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
6	1	01	08			Sisa Belanja Lainnya
6	1	01	08	01		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	01	08	01	0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
6	1	01	08	02		Sisa Dana BOS
6	1	01	08	02	0001	Sisa Dana BOS
6	1	01	08	03		Sisa Dana Kapitasi
6	1	01	08	03	0001	Sisa Dana Kapitasi
6	1	02				Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01			Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01	01		Pencairan Dana Cadangan
6	1	02	01	01	0001	Pencairan Dana Cadangan
6	1	03				Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6	1	03	01			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	1	03	01	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6	1	03	01	01	0001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMN
6	1	03	02			Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	1	03	02	01		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	03	02	01	0001	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
6	1	04				Penerimaan Pinjaman Daerah
6	1	04	01			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
6	1	04	01	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	02		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	02	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	03		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	03	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	1	04	01	04		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	04	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	1	04	01	05		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	1	04	01	05	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah
6	1	04	01	06		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka
6	1	04	01	06	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang
6	1	04	02			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	04	02	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah- Jangka Pendek
6	1	04	02	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah- Jangka Pendek
6	1	04	03			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	1	04	03	01		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	03	01	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	03	02		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	03	02	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	03	03		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	03	03	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	03	04		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	03	04	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	03	05		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	03	05	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	03	06		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	03	06	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	03	07		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	03	07	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek

Kode Akun					Uraian Akun
6	1	04	03	08	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	03	08	0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	03	09	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	03	09	0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	04		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	1	04	04	01	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	04	01	0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek
6	1	04	04	02	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	04	02	0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah
6	1	04	04	03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	04	03	0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang
6	1	04	04	04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	04	04	0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek
6	1	04	04	05	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	04	05	0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah
6	1	04	04	06	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	04	06	0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang
6	1	04	04	07	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	04	07	0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek
6	1	04	04	08	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	04	08	0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah
6	1	04	04	09	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	04	09	0001 Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang
6	1	04	05		Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	1	04	05	01	Obligasi Daerah
6	1	04	05	01	0001 Obligasi Daerah
6	1	05			Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6	1	05	01		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	01	0001 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	02	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	01	02	0001 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	1	05	02		Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	01	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	01	0001 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	02	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	1	05	02	02	0001 Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah
6	1	05	03		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	05	03	01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	05	03	01	0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
6	1	05	03	02	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	05	03	02	0001 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	1	05	04		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	05	04	01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	05	04	01	0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
6	1	05	04	02	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	05	04	02	0001 Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen kepada BUMN
6	1	05	05		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	01	0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
6	1	05	05	02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	05	05	02	0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi
6	1	05	06		Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	01	0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
6	1	05	06	02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	05	06	02	0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	1	05	07		Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	05	07	01	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	05	07	01	0001 Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6	1	06			Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	06	01		Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
6	1	06	01	01	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	1	06	01	01	0001 Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek
6	1	06	01	02	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	1	06	01	02	0001 Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Menengah
6	1	06	01	03	Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
6	1	06	01	03	0001 Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang
6	2				PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6	2	01			Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	01	01	01	0001 Pembentukan Dana Cadangan
6	2	02			Penyertaan Modal Daerah
6	2	02	01		Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
6	2	02	01	01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
6	2	02	01	01	0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMN
6	2	02	02		Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
6	2	02	02	01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
6	2	02	02	01	0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD
6	2	03			Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
6	2	03	01		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman
6	2	03	01	01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	01	0001 Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	02	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
6	2	03	01	02	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari
6	2	03	01	03		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	03	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
6	2	03	01	04		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	04	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
6	2	03	01	05		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Menengah
6	2	03	01	05	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan-Jangka Menengah
6	2	03	01	06		Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan-Jangka Panjang
6	2	03	01	06	0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan-Jangka Panjang
6	2	03	02			Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
6	2	03	02	01		Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
6	2	03	02	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
6	2	03	03			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	2	03	03	01		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	2	03	03	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
6	2	03	03	02		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	2	03	03	02	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah
6	2	03	03	03		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	2	03	03	03	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
6	2	03	03	04		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	2	03	03	04	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
6	2	03	03	05		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	2	03	03	05	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
6	2	03	03	06		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	2	03	03	06	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
6	2	03	03	07		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	2	03	03	07	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek
6	2	03	03	08		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	2	03	03	08	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah
6	2	03	03	09		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	2	03	03	09	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang
6	2	03	04			Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	2	03	04	01		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Pendek
6	2	03	04	01	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Pendek
6	2	03	04	02		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah
6	2	03	04	02	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Menengah
6	2	03	04	03		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang
6	2	03	04	03	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN- Jangka Panjang
6	2	03	04	04		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Pendek
6	2	03	04	04	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Pendek
6	2	03	04	05		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Menengah
6	2	03	04	05	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Menengah
6	2	03	04	06		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Panjang
6	2	03	04	06	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD- Jangka Panjang
6	2	03	04	07		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Pendek
6	2	03	04	07	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Pendek
6	2	03	04	08		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Menengah
6	2	03	04	08	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Menengah
6	2	03	04	09		Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang
6	2	03	04	09	0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang
6	2	03	05			Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat
6	2	03	05	01		Pembayaran Obligasi Daerah
6	2	03	05	01	0001	Pembayaran Obligasi Daerah
6	2	04				Pemberian Pinjaman Daerah
6	2	04	01			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	01	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
6	2	04	02			Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	02		Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	02	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
6	2	04	03			Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	04	03	01		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	04	03	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
6	2	04	03	02		Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD
6	2	04	03	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen kepada BUMD

Kode Akun					Uraian Akun	
6	2	04	04		Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	
6	2	04	04	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN	
6	2	04	04	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
6	2	04	04	02	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN	
6	2	04	04	02	0001	Pemberian Pinjaman-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
6	2	04	05		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	
6	2	04	05	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi	
6	2	04	05	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
6	2	04	05	02	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi	
6	2	04	05	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Koperasi
6	2	04	06		Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	
6	2	04	06	01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	
6	2	04	06	01	0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
6	2	04	06	02	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	
6	2	04	06	02	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat
6	2	04	07		Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	
6	2	04	07	01	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	
6	2	04	07	01	0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
6	2	05			Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
6	2	05	01		Pinjaman melalui BLUD	
7					PENDAPATAN DAERAH-LO	
7	1				PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	
7	1	01			Pajak Daerah-LO	
7	1	01	01		Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	
7	1	01	01	01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	
7	1	01	01	01	0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO
7	1	01	01	01	0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO
7	1	01	01	01	0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	01	0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	
7	1	01	01	02	0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi-LO
7	1	01	01	02	0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum-LO
7	1	01	01	02	0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	02	0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	
7	1	01	01	03	0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO
7	1	01	01	03	0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO
7	1	01	01	03	0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	03	0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	04	PKB-Mobil Bus-Microbus-LO	
7	1	01	01	04	0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi-LO
7	1	01	01	04	0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum-LO
7	1	01	01	04	0003	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	04	0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	05	PKB-Mobil Bus-Bus-LO	
7	1	01	01	05	0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO
7	1	01	01	05	0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum-LO
7	1	01	01	05	0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	05	0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	
7	1	01	01	06	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi-LO
7	1	01	01	06	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum-LO
7	1	01	01	06	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	06	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	
7	1	01	01	07	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi-LO
7	1	01	01	07	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum-LO
7	1	01	01	07	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	07	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	
7	1	01	01	08	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi-LO
7	1	01	01	08	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum-LO
7	1	01	01	08	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	08	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	
7	1	01	01	09	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi-LO
7	1	01	01	09	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum-LO
7	1	01	01	09	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	09	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	
7	1	01	01	10	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi-LO
7	1	01	01	10	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum-LO
7	1	01	01	10	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	10	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	
7	1	01	01	11	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi-LO
7	1	01	01	11	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum-LO
7	1	01	01	11	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	11	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	12	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO	
7	1	01	01	12	0001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi-LO
7	1	01	01	12	0002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum-LO
7	1	01	01	12	0003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	12	0004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	01	13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO	
7	1	01	01	13	0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi-LO
7	1	01	01	13	0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum-LO
7	1	01	01	13	0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	13	0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah-LO

Kode Akun					Uraian Akun
7	1	01	01	14	PKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	01	14	0001 PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi-LO
7	1	01	01	14	0002 PKB-Mobil Roda Tiga-Umum-LO
7	1	01	01	14	0003 PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO
7	1	01	01	14	0004 PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO
7	1	01	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	01	02	01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO
7	1	01	02	01	0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
7	1	01	02	02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
7	1	01	02	02	0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO
7	1	01	02	03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	02	03	0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
7	1	01	02	04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO
7	1	01	02	04	0001 BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO
7	1	01	02	05	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	02	05	0001 BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	01	02	06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO
7	1	01	02	06	0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO
7	1	01	02	07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	01	02	07	0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO
7	1	01	02	08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
7	1	01	02	08	0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
7	1	01	02	09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO
7	1	01	02	09	0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO
7	1	01	02	10	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	01	02	10	0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	01	02	11	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	01	02	11	0001 BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	01	02	12	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	02	12	0001 BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	01	02	13	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7	1	01	02	13	0001 BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7	1	01	02	14	BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	02	14	0001 BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	01	03		Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
7	1	01	03	01	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7	1	01	03	01	0001 PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7	1	01	03	02	PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
7	1	01	03	02	0001 PBBKB Bahan Bakar Solar-LO
7	1	01	03	03	PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
7	1	01	03	03	0001 PBBKB Bahan Bakar Gas-LO
7	1	01	03	04	PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
7	1	01	03	04	0001 PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO
7	1	01	04		Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	04	01	Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	04	01	0001 Pajak Air Permukaan-LO
7	1	01	05		Pajak Rokok-LO
7	1	01	05	01	Pajak Rokok-LO
7	1	01	05	01	0001 Pajak Rokok-LO
7	1	01	06		Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01	Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	01	0001 Pajak Hotel-LO
7	1	01	06	02	Pajak Motel-LO
7	1	01	06	02	0001 Pajak Motel-LO
7	1	01	06	03	Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	03	0001 Pajak Losmen-LO
7	1	01	06	04	Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	01	06	04	0001 Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	01	06	05	Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	06	05	0001 Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	01	06	06	Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	01	06	06	0001 Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	01	06	07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	07	0001 Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	06	08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7	1	01	06	08	0001 Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7	1	01	07		Pajak Restoran-LO
7	1	01	07	01	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	01	0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	02	0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	03	0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	04	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	04	0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	05	0001 Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	06	Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	06	0001 Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	07	07	0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08		Pajak Hiburan-LO
7	1	01	08	01	Pajak Tontonan Film-LO
7	1	01	08	01	0001 Pajak Tontonan Film-LO
7	1	01	08	02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
7	1	01	08	02	0001 Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO
7	1	01	08	03	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	03	0001 Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan
7	1	01	08	04	Pajak Pameran-LO
7	1	01	08	04	0001 Pajak Pameran-LO



Kode Akun					Uraian Akun
7	1	01	08	05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	05	0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7	1	01	08	06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
7	1	01	08	06	0001 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
7	1	01	08	07	Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO
7	1	01	08	07	0001 Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO
7	1	01	08	08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
7	1	01	08	08	0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
7	1	01	08	09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> , dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )-LO
7	1	01	08	09	0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ <i>Spa</i> , dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )-LO
7	1	01	08	10	Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	01	08	10	0001 Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	01	09		Pajak Reklame-LO
7	1	01	09	01	Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i> / <i>Megatron</i> -LO
7	1	01	09	01	0001 Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i> / <i>Megatron</i> -LO
7	1	01	09	02	Pajak Reklame Kain-LO
7	1	01	09	02	0001 Pajak Reklame Kain-LO
7	1	01	09	03	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
7	1	01	09	03	0001 Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
7	1	01	09	04	Pajak Reklame Selebaran-LO
7	1	01	09	04	0001 Pajak Reklame Selebaran-LO
7	1	01	09	05	Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	01	09	05	0001 Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	01	09	06	Pajak Reklame Udara-LO
7	1	01	09	06	0001 Pajak Reklame Udara-LO
7	1	01	09	07	Pajak Reklame Apung-LO
7	1	01	09	07	0001 Pajak Reklame Apung-LO
7	1	01	09	08	Pajak Reklame Suara-LO
7	1	01	09	08	0001 Pajak Reklame Suara-LO
7	1	01	09	09	Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> -LO
7	1	01	09	09	0001 Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> -LO
7	1	01	09	10	Pajak Reklame Peragaan-LO
7	1	01	09	10	0001 Pajak Reklame Peragaan-LO
7	1	01	10		Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	01	10	01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	10	01	0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	01	10	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	01	10	02	0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	01	11		Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01	Pajak Parkir-LO
7	1	01	11	01	0001 Pajak Parkir-LO
7	1	01	12		Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01	Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	12	01	0001 Pajak Air Tanah-LO
7	1	01	13		Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	13	01	Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	13	01	0001 Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	01	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	01	14	01	Pajak Asbes-LO
7	1	01	14	01	0001 Pajak Asbes-LO
7	1	01	14	02	Pajak Batu Tulis-LO
7	1	01	14	02	0001 Pajak Batu Tulis-LO
7	1	01	14	03	Pajak Batu Setengah Permata-LO
7	1	01	14	03	0001 Pajak Batu Setengah Permata-LO
7	1	01	14	04	Pajak Batu Kapur-LO
7	1	01	14	04	0001 Pajak Batu Kapur-LO
7	1	01	14	05	Pajak Batu Apung-LO
7	1	01	14	05	0001 Pajak Batu Apung-LO
7	1	01	14	06	Pajak Batu Permata-LO
7	1	01	14	06	0001 Pajak Batu Permata-LO
7	1	01	14	07	Pajak Bentonit-LO
7	1	01	14	07	0001 Pajak Bentonit-LO
7	1	01	14	08	Pajak Dolomit-LO
7	1	01	14	08	0001 Pajak Dolomit-LO
7	1	01	14	09	Pajak Felspar-LO
7	1	01	14	09	0001 Pajak Felspar-LO
7	1	01	14	10	Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )-LO
7	1	01	14	10	0001 Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )-LO
7	1	01	14	11	Pajak Grafit-LO
7	1	01	14	11	0001 Pajak Grafit-LO
7	1	01	14	12	Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	01	14	12	0001 Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	01	14	13	Pajak Gips-LO
7	1	01	14	13	0001 Pajak Gips-LO
7	1	01	14	14	Pajak Kalsit-LO
7	1	01	14	14	0001 Pajak Kalsit-LO
7	1	01	14	15	Pajak Kaolin-LO
7	1	01	14	15	0001 Pajak Kaolin-LO
7	1	01	14	16	Pajak Leusit-LO
7	1	01	14	16	0001 Pajak Leusit-LO
7	1	01	14	17	Pajak Magnesit-LO
7	1	01	14	17	0001 Pajak Magnesit-LO
7	1	01	14	18	Pajak Mika-LO
7	1	01	14	18	0001 Pajak Mika-LO
7	1	01	14	19	Pajak Marmer-LO
7	1	01	14	19	0001 Pajak Marmer-LO
7	1	01	14	20	Pajak Nitrat-LO
7	1	01	14	20	0001 Pajak Nitrat-LO
7	1	01	14	21	Pajak Opsidien-LO
7	1	01	14	21	0001 Pajak Opsidien-LO

Kode Akun					Uraian Akun
7	1	01	14	22	Pajak Oker-LO
7	1	01	14	22	0001 Pajak Oker-LO
7	1	01	14	23	Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	01	14	23	0001 Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	01	14	24	Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	01	14	24	0001 Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	01	14	25	Pajak Perlit-LO
7	1	01	14	25	0001 Pajak Perlit-LO
7	1	01	14	26	Pajak Fosfat-LO
7	1	01	14	26	0001 Pajak Fosfat-LO
7	1	01	14	27	Pajak Talk-LO
7	1	01	14	27	0001 Pajak Talk-LO
7	1	01	14	28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
7	1	01	14	28	0001 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO
7	1	01	14	29	Pajak Tanah Diatome-LO
7	1	01	14	29	0001 Pajak Tanah Diatome-LO
7	1	01	14	30	Pajak Tanah Liat-LO
7	1	01	14	30	0001 Pajak Tanah Liat-LO
7	1	01	14	31	Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	01	14	31	0001 Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	01	14	32	Pajak Tras-LO
7	1	01	14	32	0001 Pajak Tras-LO
7	1	01	14	33	Pajak Yarosif-LO
7	1	01	14	33	0001 Pajak Yarosif-LO
7	1	01	14	34	Pajak Zeolit-LO
7	1	01	14	34	0001 Pajak Zeolit-LO
7	1	01	14	35	Pajak Basal-LO
7	1	01	14	35	0001 Pajak Basal-LO
7	1	01	14	36	Pajak Trakit-LO
7	1	01	14	36	0001 Pajak Trakit-LO
7	1	01	14	37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	01	14	37	0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	01	15		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	01	15	01	PBBP2-LO
7	1	01	15	01	0001 PBBP2-LO
7	1	01	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	01	16	01	BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7	1	01	16	01	0001 BPHTB-Pemindahan Hak-LO
7	1	01	16	02	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	01	16	02	0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	02			Retribusi Daerah-LO
7	1	02	01		Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	02	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
7	1	02	01	01	0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas- LO
7	1	02	01	01	0002 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO
7	1	02	01	01	0003 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO
7	1	02	01	01	0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Balai Pengobatan-LO
7	1	02	01	01	0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO
7	1	02	01	01	0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO
7	1	02	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
7	1	02	01	02	0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
7	1	02	01	03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat-LO
7	1	02	01	03	0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Penguburan Mayat-LO
7	1	02	01	03	0002 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Penguburan Mayat-LO
7	1	02	01	04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	02	01	04	0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	02	01	05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO
7	1	02	01	05	0001 Retribusi Pelataran-LO
7	1	02	01	05	0002 Retribusi Los-LO
7	1	02	01	05	0003 Retribusi Kios-LO
7	1	02	01	06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	01	06	0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	01	07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	0001 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	0002 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO
7	1	02	01	07	0003 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO
7	1	02	01	08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
7	1	02	01	08	0001 Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO
7	1	02	01	08	0002 Retribusi Penyediaan Peta Foto-LO
7	1	02	01	08	0003 Retribusi Penyediaan Peta Digital-LO
7	1	02	01	08	0004 Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO
7	1	02	01	08	0005 Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO
7	1	02	01	09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	02	01	09	0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
7	1	02	01	10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
7	1	02	01	10	0001 Retribusi Rumah Tangga-LO
7	1	02	01	10	0002 Retribusi Perkantoran-LO
7	1	02	01	10	0003 Retribusi Industri-LO
7	1	02	01	11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
7	1	02	01	11	0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
7	1	02	01	11	0002 Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO
7	1	02	01	12	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
7	1	02	01	12	0001 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO
7	1	02	01	12	0002 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO
7	1	02	01	12	0003 Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO
7	1	02	01	13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7	1	02	01	13	0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian
7	1	02	02		Retribusi Jasa Usaha-LO
7	1	02	02	01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
7	1	02	02	01	0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
7	1	02	02	01	0002	Retribusi Penyewaan Tanah-LO
7	1	02	02	01	0003	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO
7	1	02	02	01	0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO
7	1	02	02	01	0005	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO
7	1	02	02	01	0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	02	02	01	0007	Retribusi Pemakaian Alat-LO
7	1	02	02	02		Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7	1	02	02	02	0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO
7	1	02	02	02	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
7	1	02	02	03		Retribusi Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	03	0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
7	1	02	02	03	0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
7	1	02	02	04		Retribusi Terminal-LO
7	1	02	02	04	0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum- LO
7	1	02	02	04	0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO
7	1	02	02	04	0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO
7	1	02	02	05		Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	02	02	05	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	02	02	06		Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	02	02	06	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO
7	1	02	02	07		Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
7	1	02	02	07	0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
7	1	02	02	08		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	08	0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	02	02	09		Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	02	02	09	0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	02	02	10		Retribusi Penyeberangan di Air-LO
7	1	02	02	10	0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
7	1	02	02	10	0002	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang-LO
7	1	02	02	11		Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
7	1	02	02	11	0001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO
7	1	02	02	11	0002	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO
7	1	02	02	11	0003	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO
7	1	02	02	11	0004	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak dan Ikan-LO
7	1	02	03			Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	02	03	01		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	02	03	01	0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	02	03	02		Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	02	03	02	0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	02	03	03		Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
7	1	02	03	03	0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan
7	1	02	03	04		Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
7	1	02	03	04	0001	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO
7	1	02	03	04	0002	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO
7	1	02	03	05		Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	02	03	05	0001	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO
7	1	02	03	05	0002	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO
7	1	02	03	05	0003	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu-LO
7	1	02	03	06		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
7	1	02	03	06	0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing-LO
7	1	03				Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
7	1	03	01			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	01	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	01	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO
7	1	03	02			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO
7	1	03	02	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
7	1	03	02	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO
7	1	03	02	02		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
7	1	03	02	02	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO
7	1	03	02	03		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO
7	1	03	02	03	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO
7	1	03	02	04		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO
7	1	03	02	04	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)-LO
7	1	03	02	05		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan
7	1	03	02	05	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)-LO
7	1	03	03			Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO
7	1	03	03	01		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO
7	1	03	03	01	0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO
7	1	04				Lain-lain PAD yang Sah-LO
7	1	04	01			Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO
7	1	04	01	01		Hasil Penjualan Tanah-LO
7	1	04	01	01	0001	Hasil Penjualan Tanah
7	1	04	01	02		Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	01	02	0001	Hasil Penjualan Alat Besar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
7	1	04	01	02	0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan-LO
7	1	04	01	02	0003	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
7	1	04	01	02	0004	Hasil Penjualan Alat Pertanian-LO
7	1	04	01	02	0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
7	1	04	01	02	0006	Hasil Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
7	1	04	01	02	0007	Hasil Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
7	1	04	01	02	0008	Hasil Penjualan Alat Laboratorium-LO
7	1	04	01	02	0010	Hasil Penjualan Komputer-LO
7	1	04	01	02	0011	Hasil Penjualan Alat Eksplorasi-LO
7	1	04	01	02	0012	Hasil Penjualan Alat Pengeboran-LO
7	1	04	01	02	0013	Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
7	1	04	01	02	0014	Hasil Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	1	04	01	02	0015	Hasil Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
7	1	04	01	02	0016	Hasil Penjualan Alat Peraga-LO
7	1	04	01	02	0017	Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi-LO
7	1	04	01	02	0018	Hasil Penjualan Rambu-Rambu-LO
7	1	04	01	02	0019	Hasil Penjualan Peralatan Olahraga-LO
7	1	04	01	03		Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO
7	1	04	01	03	0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO
7	1	04	01	03	0002	Hasil Penjualan Monumen-LO
7	1	04	01	03	0003	Hasil Penjualan Bangunan Menara-LO
7	1	04	01	03	0004	Hasil Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	1	04	01	04		Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	1	04	01	04	0001	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
7	1	04	01	04	0002	Hasil Penjualan Bangunan Air-LO
7	1	04	01	04	0003	Hasil Penjualan Instalasi-LO
7	1	04	01	04	0004	Hasil Penjualan Jaringan-LO
7	1	04	01	05		Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	01	05	0001	Hasil Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
7	1	04	01	05	0002	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	1	04	01	05	0003	Hasil Penjualan Hewan-LO
7	1	04	01	05	0004	Hasil Penjualan Biota Perairan-LO
7	1	04	01	05	0005	Hasil Penjualan Tanaman-LO
7	1	04	01	05	0006	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO
7	1	04	01	05	0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
7	1	04	01	06		Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO
7	1	04	01	06	0001	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
7	1	04	01	06	0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
7	1	04	02			Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	02	01		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
7	1	04	02	01	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah-LO
7	1	04	02	02		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
7	1	04	02	02	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Besar-LO
7	1	04	02	02	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
7	1	04	02	02	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
7	1	04	02	02	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
7	1	04	02	02	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
7	1	04	02	02	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
7	1	04	02	02	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
7	1	04	02	02	0008	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
7	1	04	02	02	0010	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Komputer-LO
7	1	04	02	02	0011	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
7	1	04	02	02	0012	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
7	1	04	02	02	0013	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat
7	1	04	02	02	0014	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	1	04	02	02	0015	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
7	1	04	02	02	0016	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Alat Peraga-LO
7	1	04	02	02	0017	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO
7	1	04	02	02	0018	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Rambu- Rambu-LO
7	1	04	02	02	0019	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
7	1	04	02	03		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung
7	1	04	02	03	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
7	1	04	02	03	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Monumen-LO
7	1	04	02	03	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
7	1	04	02	03	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	1	04	02	04		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	1	04	02	04	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO
7	1	04	02	04	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bangunan Air-LO
7	1	04	02	04	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Instalasi-LO
7	1	04	02	04	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jaringan-LO
7	1	04	02	05		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	1	04	02	05	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Bahan Perpustakaan-LO
7	1	04	02	05	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	1	04	02	05	0003	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Hewan-LO
7	1	04	02	05	0004	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Biota Perairan-LO
7	1	04	02	05	0005	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanaman-LO
7	1	04	02	05	0006	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
7	1	04	02	05	0007	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
7	1	04	02	06		Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	1	04	02	06	0001	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
7	1	04	02	06	0002	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain-Lain-LO
7	1	04	03			Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	03	01		Hasil Sewa BMD-LO
7	1	04	03	01	0001	Hasil Sewa BMD-LO
7	1	04	03	02		Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD-LO
7	1	04	03	02	0001	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO
7	1	04	03	03		Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
7	1	04	03	03	0001	Hasil dari Bangun Guna Serah-LO
7	1	04	03	04		Hasil dari Bangun Serah Guna-LO
7	1	04	03	04	0001	Hasil dari Bangun Serah Guna-LO

Kode Akun					Uraian Akun
7	1	04	03	05	Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur- LO
7	1	04	03	05	0001 Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	04		Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	04	01	Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	04	01	0001 Hasil Kerja Sama Daerah-LO
7	1	04	05		Jasa Giro-LO
7	1	04	05	01	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	04	05	01	0001 Jasa Giro pada Kas Daerah-LO
7	1	04	05	02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
7	1	04	05	02	0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO
7	1	04	05	03	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO
7	1	04	05	03	0001 Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO
7	1	04	05	04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
7	1	04	05	04	0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO
7	1	04	05	05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
7	1	04	05	05	0001 Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO
7	1	04	06		Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	06	01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	06	01	0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO
7	1	04	07		Pendapatan Bunga-LO
7	1	04	07	01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	07	01	0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO
7	1	04	08		Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO
7	1	04	08	01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	04	08	01	0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO
7	1	04	08	02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
7	1	04	08	02	0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO
7	1	04	09		Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	04	09	01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk
7	1	04	09	01	0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO
7	1	04	10		Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10	01	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	10	01	0001 Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO
7	1	04	11		Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	11	01	0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO
7	1	04	12		Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO
7	1	04	12	01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO
7	1	04	12	01	0001 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO
7	1	04	12	01	0002 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Jeep-LO
7	1	04	12	01	0003 Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO
7	1	04	12	01	0004 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> - LO
7	1	04	12	01	0005 Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	04	12	01	0006 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO
7	1	04	12	01	0007 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO
7	1	04	12	01	0008 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO
7	1	04	12	01	0009 Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-
7	1	04	12	01	0010 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	04	12	01	0011 Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	04	12	01	0012 Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	04	12	01	0013 Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
7	1	04	12	01	0014 Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-LO
7	1	04	12	02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO
7	1	04	12	02	0001 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Sedan-LO
7	1	04	12	02	0002 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- <i>Jeep</i> -LO
7	1	04	12	02	0003 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang- Minibus-LO
7	1	04	12	02	0004 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i> -LO
7	1	04	12	02	0005 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
7	1	04	12	02	0006 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i> -LO
7	1	04	12	02	0007 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i> -LO
7	1	04	12	02	0008 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i> -LO
7	1	04	12	02	0009 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i> -LO
7	1	04	12	02	0010 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua-LO
7	1	04	12	02	0011 Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga-LO
7	1	04	12	02	0012 Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
7	1	04	12	02	0013 Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
7	1	04	12	02	0014 Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga - LO
7	1	04	12	03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO
7	1	04	12	03	0001 Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO
7	1	04	12	03	0002 Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Solar- LO
7	1	04	12	03	0003 Pendapatan Denda PBBKB Bahan Bakar Gas- LO
7	1	04	12	03	0004 Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO
7	1	04	12	04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
7	1	04	12	04	0001 Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
7	1	04	12	05	Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
7	1	04	12	05	0001 Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
7	1	04	12	06	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
7	1	04	12	06	0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
7	1	04	12	06	0002 Pendapatan Denda Pajak Motel-LO
7	1	04	12	06	0003 Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO
7	1	04	12	06	0004 Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO
7	1	04	12	06	0005 Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO
7	1	04	12	06	0006 Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan-LO
7	1	04	12	06	0007 Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	06	0008 Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
7	1	04	12	07	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO
7	1	04	12	07	0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0002 Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0003 Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0004 Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
7	1	04	12	07	0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	07	0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya- LO
7	1	04	12	07	0007	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LO
7	1	04	12	08	0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO
7	1	04	12	08	0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana-LO
7	1	04	12	08	0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	08	0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran-LO
7	1	04	12	08	0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
7	1	04	12	08	0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap-LO
7	1	04	12	08	0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i> -LO
7	1	04	12	08	0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
7	1	04	12	08	0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran ( <i>Fitness Center</i> )-LO
7	1	04	12	08	0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO
7	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame-LO
7	1	04	12	09	0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> /Videotron/ <i>Megatron</i> -LO
7	1	04	12	09	0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO
7	1	04	12	09	0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/
7	1	04	12	09	0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran- LO
7	1	04	12	09	0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO
7	1	04	12	09	0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara-LO
7	1	04	12	09	0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung-LO
7	1	04	12	09	0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara-LO
7	1	04	12	09	0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i> - LO
7	1	04	12	09	0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan- LO
7	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LO
7	1	04	12	10	0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
7	1	04	12	10	0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
7	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
7	1	04	12	11	0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
7	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
7	1	04	12	12	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
7	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	04	12	13	0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
7	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO
7	1	04	12	14	0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes-LO
7	1	04	12	14	0002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis-LO
7	1	04	12	14	0003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata-LO
7	1	04	12	14	0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO
7	1	04	12	14	0005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung-LO
7	1	04	12	14	0006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata-LO
7	1	04	12	14	0007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit-LO
7	1	04	12	14	0008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit-LO
7	1	04	12	14	0009	Pendapatan Denda Pajak Felspar-LO
7	1	04	12	14	0010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu ( <i>Halite</i> )- LO
7	1	04	12	14	0011	Pendapatan Denda Pajak Grafit-LO
7	1	04	12	14	0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit-LO
7	1	04	12	14	0013	Pendapatan Denda Pajak Gips-LO
7	1	04	12	14	0014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit-LO
7	1	04	12	14	0015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin-LO
7	1	04	12	14	0016	Pendapatan Denda Pajak Leusit-LO
7	1	04	12	14	0017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit-LO
7	1	04	12	14	0018	Pendapatan Denda Pajak Mika-LO
7	1	04	12	14	0019	Pendapatan Denda Pajak Marmer-LO
7	1	04	12	14	0020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat-LO
7	1	04	12	14	0021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien-LO
7	1	04	12	14	0022	Pendapatan Denda Pajak Oker-LO
7	1	04	12	14	0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO
7	1	04	12	14	0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO
7	1	04	12	14	0025	Pendapatan Denda Pajak Perlit-LO
7	1	04	12	14	0026	Pendapatan Denda Pajak Fosfat-LO
7	1	04	12	14	0027	Pendapatan Denda Pajak Talk-LO
7	1	04	12	14	0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers Earth</i> )-LO
7	1	04	12	14	0029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome-LO
7	1	04	12	14	0030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO
7	1	04	12	14	0031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)-LO
7	1	04	12	14	0032	Pendapatan Denda Pajak Tras-LO
7	1	04	12	14	0033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif-LO
7	1	04	12	14	0034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit-LO
7	1	04	12	14	0035	Pendapatan Denda Pajak Basal-LO
7	1	04	12	14	0036	Pendapatan Denda Pajak Trakit-LO
7	1	04	12	14	0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
7	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO
7	1	04	12	15	0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO
7	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO
7	1	04	12	16	0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak- LO
7	1	04	12	16	0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
7	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO
7	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-LO
7	1	04	13	01	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
7	1	04	13	01	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
7	1	04	13	01	0003	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat-LO
7	1	04	13	01	0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
7	1	04	13	01	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar- LO
7	1	04	13	01	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
7	1	04	13	01	0007	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO
7	1	04	13	01	0008	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO
7	1	04	13	01	0009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
7	1	04	13	01	0010	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO
7	1	04	13	01	0011	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO
7	1	04	13	01	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO
7	1	04	13	01	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
7	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-LO
7	1	04	13	02	0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO
7	1	04	13	02	0002	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO
7	1	04	13	02	0003	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-LO
7	1	04	13	02	0004	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-LO
7	1	04	13	02	0005	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO
7	1	04	13	02	0006	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila LO
7	1	04	13	02	0007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-LO
7	1	04	13	02	0008	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO
7	1	04	13	02	0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
7	1	04	13	02	0010	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air-LO
7	1	04	13	02	0011	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO
7	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-LO
7	1	04	13	03	0001	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO
7	1	04	13	03	0002	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
7	1	04	13	03	0003	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
7	1	04	13	03	0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
7	1	04	13	03	0005	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO
7	1	04	13	03	0006	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO
7	1	04	14			Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO
7	1	04	14	01		Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
7	1	04	14	01	0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa-LO
7	1	04	15			Pendapatan dari Pengembalian-LO
7	1	04	15	01		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
7	1	04	15	01	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO
7	1	04	15	02		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN-LO
7	1	04	15	02	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
7	1	04	15	02	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK-LO
7	1	04	15	03		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	1	04	15	03	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO
7	1	04	15	04		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO
7	1	04	15	04	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO
7	1	04	15	04	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tetap-LO
7	1	04	15	04	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota-LO
7	1	04	15	04	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota-LO
7	1	04	15	04	0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota-LO
7	1	04	15	04	0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Luar Negeri- Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri-LO
7	1	04	15	05		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)-LO
7	1	04	15	05	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK-LO
7	1	04	15	06		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LO
7	1	04	15	06	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKM-LO
7	1	04	15	07		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-LO
7	1	04	15	07	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKN-LO
7	1	04	16			Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	16	01		Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	16	01	0001	Pendapatan dari BLUD-LO
7	1	04	17			Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	1	04	17	01		Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
7	1	04	17	01	0001	Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD-LO
7	1	04	17	02		Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	17	02	0001	Pendapatan Denda Hasil dari Kerjasama Penyediaan Infrastruktur-LO
7	1	04	18			Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO
7	1	04	18	01		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	1	04	18	01	0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO
7	1	04	19			Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO
7	1	04	19	01		Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO
7	1	04	19	01	0001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO
7	1	04	20			Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )-LO
7	1	04	20	01		Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )-LO
7	1	04	20	01	0001	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )-LO
7	1	04	21			Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	21	01		Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	21	01	0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO
7	1	04	22			Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO
7	1	04	22	01		Pendapatan Zakat-LO
7	1	04	22	01	0001	Pendapatan Zakat-LO
7	1	04	22	02		Pendapatan Infaq-LO
7	1	04	22	02	0001	Pendapatan Infaq-LO
7	1	04	22	03		Pendapatan Shadaqah-LO
7	1	04	22	03	0001	Pendapatan Shadaqah-LO
7	1	04	22	04		Pendapatan Wakaf-LO
7	1	04	22	04	0001	Pendapatan Wakaf-LO
7	2					PENDAPATAN TRANSFER-LO
7	2	01				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
7	2	01	01			Dana Perimbangan-LO
7	2	01	01	01		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO
7	2	01	01	01	0001	DBH PBB-LO
7	2	01	01	01	0002	DBH PPh Pasal 21-LO
7	2	01	01	01	0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDPN-LO
7	2	01	01	01	0004	DBH CHT-LO
7	2	01	01	01	0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
7	2	01	01	01	0006	DBH SDA Gas Bumi-LO
7	2	01	01	01	0007	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO
7	2	01	01	01	0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO
7	2	01	01	01	0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO
7	2	01	01	01	0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO
7	2	01	01	01	0011	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO
7	2	01	01	01	0012	DBH SDA Kehutanan-DR-LO
7	2	01	01	01	0013	DBH SDA Perikanan-LO
7	2	01	01	02		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
7	2	01	01	02	0001	DAU-LO
7	2	01	01	02	0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO
7	2	01	01	02	0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa-LO
7	2	01	01	02	0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO
7	2	01	01	03		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
7	2	01	01	03	0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO
7	2	01	01	03	0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO
7	2	01	01	03	0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO
7	2	01	01	03	0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO
7	2	01	01	03	0005	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO
7	2	01	01	03	0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO
7	2	01	01	03	0007	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD-LO
7	2	01	01	03	0008	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP- LO
7	2	01	01	03	0009	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA- LO
7	2	01	01	03	0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan- SMK-LO
7	2	01	01	03	0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO
7	2	01	01	03	0012	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga-LO
7	2	01	01	03	0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO
7	2	01	01	03	0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO
7	2	01	01	03	0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO
7	2	01	01	03	0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO
7	2	01	01	03	0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i> -LO
7	2	01	01	03	0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO
7	2	01	01	03	0019	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata-LO
7	2	01	01	03	0020	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Pembangunan RS Pratama-LO
7	2	01	01	03	0021	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Puskesmas Pariwisata-LO
7	2	01	01	03	0022	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan-LO
7	2	01	01	03	0023	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi- Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)-LO
7	2	01	01	03	0024	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi- Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas-LO
7	2	01	01	03	0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO
7	2	01	01	03	0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> (KB)-LO
7	2	01	01	03	0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
7	2	01	01	03	0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO
7	2	01	01	03	0029	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah
7	2	01	01	03	0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO
7	2	01	01	03	0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO
7	2	01	01	03	0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO
7	2	01	01	03	0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO
7	2	01	01	03	0036	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan-LO
7	2	01	01	03	0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0038	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO
7	2	01	01	03	0041	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0043	DAK Fisik-Bidang Irgasi-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0044	DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO
7	2	01	01	03	0046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO
7	2	01	01	03	0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi-LO
7	2	01	01	03	0048	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut-Afirmasi- LO
7	2	01	01	03	0049	DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan-LO
7	2	01	01	03	0050	DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler-LO
7	2	01	01	04		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
7	2	01	01	04	0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO
7	2	01	01	04	0002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi-LO
7	2	01	01	04	0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO
7	2	01	01	04	0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO
7	2	01	01	04	0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO
7	2	01	01	04	0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO
7	2	01	01	04	0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO
7	2	01	01	04	0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO
7	2	01	01	04	0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO
7	2	01	01	04	0010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO
7	2	01	01	04	0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO
7	2	01	01	04	0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO
7	2	01	01	04	0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas- LO
7	2	01	01	04	0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO
7	2	01	01	04	0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO
7	2	01	01	04	0016	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO
7	2	01	01	04	0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO



Kode Akun						Uraian Akun
7	2	01	01	04	0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO
7	2	01	01	04	0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO
7	2	01	02			Dana Insentif Daerah (DID)-LO
7	2	01	02	01		DID-LO
7	2	01	02	01	0001	DID-LO
7	2	01	03			Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
7	2	01	03	01		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	02		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO
7	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat- LO
7	2	01	03	03		Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
7	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh-LO
7	2	01	03	04		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua-LO
7	2	01	03	05		Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
7	2	01	03	05	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-LO
7	2	01	04			Dana Keistimewaan-LO
7	2	01	04	01		Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
7	2	01	04	01	0001	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta-LO
7	2	01	05			Dana Desa-LO
7	2	01	05	01		Dana Desa-LO
7	2	01	05	01	0001	Dana Desa-LO
7	2	02				Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
7	2	02	01			Pendapatan Bagi Hasil-LO
7	2	02	01	01		Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO
7	2	02	01	01	0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO
7	2	02	01	01	0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO
7	2	02	01	01	0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO
7	2	02	02			Bantuan Keuangan
7	2	02	02	01		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	01	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	02		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	02	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
7	2	02	02	03		Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	03	0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	04		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	2	02	02	04	0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7	3					LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO
7	3	01				Pendapatan Hibah-LO
7	3	01	01			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	01	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO
7	3	01	02			Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	01	02	01		Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	01	02	01	0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO
7	3	01	03			Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	03	01		Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	03	01	0001	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO
7	3	01	04			Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO
7	3	01	04	01		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	01	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	02		Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO
7	3	01	04	02	0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Luar Negeri-LO
7	3	01	04	03		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	03	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO
7	3	01	04	04		Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO
7	3	01	04	04	0001	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO
7	3	01	05			Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	01	05	01		Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	01	05	01	0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO
7	3	02				Dana Darurat-LO
7	3	02	01			Dana Darurat-LO
7	3	02	01	01		Dana Darurat-LO
7	3	02	01	01	0001	Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana-LO
7	3	03				Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO
7	3	03	01			Lain-lain Pendapatan-LO
7	3	03	01	01		Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
7	3	03	01	01	0001	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO
7	3	03	01	02		Pendapatan atas Pengembalian Hibah-LO
7	3	03	01	02	0001	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah-LO
7	3	03	01	02	0002	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya-LO
7	3	03	01	02	0003	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN-LO
7	3	03	01	02	0004	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD-LO
7	3	03	01	02	0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO
7	3	03	01	02	0006	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik-LO
7	4					SURPLUS NON OPERASIONAL-LO
7	4	01				Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
7	4	01	01			Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	4	01	01	01		Surplus Penjualan Tanah-LO
7	4	01	01	01	0001	Surplus Penjualan Tanah-LO
7	4	01	01	02		Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
7	4	01	01	02	0001	Surplus Penjualan Alat Besar-LO
7	4	01	01	02	0002	Surplus Penjualan Alat Angkutan-LO
7	4	01	01	02	0003	Surplus Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur- LO
7	4	01	01	02	0004	Surplus Penjualan Alat Pertanian-LO
7	4	01	01	02	0005	Surplus Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
7	4	01	01	02	0006	Surplus Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
7	4	01	01	02	0007	Surplus Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
7	4	01	01	02	0008	Surplus Penjualan Alat Laboratorium-LO
7	4	01	01	02	0010	Surplus Penjualan Komputer-LO
7	4	01	01	02	0011	Surplus Penjualan Alat Eksplorasi-LO
7	4	01	01	02	0012	Surplus Penjualan Alat Pengeboran-LO
7	4	01	01	02	0013	Surplus Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
7	4	01	01	02	0014	Surplus Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	4	01	01	02	0015	Surplus Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
7	4	01	01	02	0016	Surplus Penjualan Alat Peraga-LO
7	4	01	01	02	0017	Surplus Penjualan Peralatan Proses/Produksi- LO
7	4	01	01	02	0018	Surplus Penjualan Rambu-Rambu-LO
7	4	01	01	02	0019	Surplus Penjualan Peralatan Olahraga-LO
7	4	01	01	03		Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO
7	4	01	01	03	0001	Surplus Penjualan Bangunan Gedung-LO
7	4	01	01	03	0002	Surplus Penjualan Monumen-LO
7	4	01	01	03	0003	Surplus Penjualan Bangunan Menara-LO
7	4	01	01	03	0004	Surplus Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	4	01	01	04		Surplus Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO
7	4	01	01	04	0001	Surplus Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
7	4	01	01	04	0002	Surplus Penjualan Bangunan Air-LO
7	4	01	01	04	0003	Surplus Penjualan Instalasi-LO
7	4	01	01	04	0004	Surplus Penjualan Jaringan-LO
7	4	01	01	05		Surplus Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	01	01	05	0001	Surplus Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
7	4	01	01	05	0002	Surplus Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	4	01	01	05	0003	Surplus Penjualan Hewan-LO
7	4	01	01	05	0004	Surplus Penjualan Biota Perairan-LO
7	4	01	01	05	0005	Surplus Penjualan Tanaman-LO
7	4	01	01	05	0006	Surplus Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-LO
7	4	01	01	05	0007	Surplus Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi- LO
7	4	01	01	06		Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO
7	4	01	01	06	0001	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
7	4	01	01	06	0002	Surplus Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain- Lain-LO
7	4	01	02			Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
7	4	01	02	01		Surplus Tukar Menukar Tanah-LO
7	4	01	02	01	0001	Surplus Tukar Menukar Tanah -LO
7	4	01	02	02		Surplus Tukar Menukar Peralatan dan Mesin- LO
7	4	01	02	02	0001	Surplus Tukar Menukar Alat Besar-LO
7	4	01	02	02	0002	Surplus Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
7	4	01	02	02	0003	Surplus Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
7	4	01	02	02	0004	Surplus Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
7	4	01	02	02	0005	Surplus Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
7	4	01	02	02	0006	Surplus Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
7	4	01	02	02	0007	Surplus Tukar Menukar Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
7	4	01	02	02	0008	Surplus Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
7	4	01	02	02	0010	Surplus Tukar Menukar Komputer-LO
7	4	01	02	02	0011	Surplus Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
7	4	01	02	02	0012	Surplus Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
7	4	01	02	02	0013	Surplus Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
7	4	01	02	02	0014	Surplus Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi-LO
7	4	01	02	02	0015	Surplus Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja-LO
7	4	01	02	02	0016	Surplus Tukar Menukar Alat Peraga-LO
7	4	01	02	02	0017	Surplus Tukar Menukar Peralatan Proses/ Produksi-LO
7	4	01	02	02	0018	Surplus Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
7	4	01	02	02	0019	Surplus Tukar Menukar Peralatan Olahraga- LO
7	4	01	02	03		Surplus Tukar Menukar Gedung dan Bangunan-LO
7	4	01	02	03	0001	Surplus Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
7	4	01	02	03	0002	Surplus Tukar Menukar Monumen-LO
7	4	01	02	03	0003	Surplus Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
7	4	01	02	03	0004	Surplus Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
7	4	01	02	04		Surplus Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
7	4	01	02	04	0001	Surplus Tukar Menukar Jalan dan Jembatan- LO
7	4	01	02	04	0002	Surplus Tukar Menukar Bangunan Air-LO
7	4	01	02	04	0003	Surplus Tukar Menukar Instalasi-LO
7	4	01	02	04	0004	Surplus Tukar Menukar Jaringan-LO
7	4	01	02	05		Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
7	4	01	02	05	0001	Surplus Tukar Menukar Bahan Perpustakaan- LO
7	4	01	02	05	0002	Surplus Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
7	4	01	02	05	0003	Surplus Tukar Menukar Hewan-LO
7	4	01	02	05	0004	Surplus Tukar Menukar Biota Perairan-LO
7	4	01	02	05	0005	Surplus Tukar Menukar Tanaman-LO
7	4	01	02	05	0006	Surplus Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
7	4	01	02	05	0007	Surplus Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
7	4	01	02	06		Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
7	4	01	02	06	0001	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
7	4	01	02	06	0002	Surplus Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset
7	4	01	03			Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO
7	4	01	03	01		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
7	4	01	03	01	0001	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO
7	4	01	03	01	0002	Surplus Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
7	4	01	03	01	0003	Surplus Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
7	4	01	03	01	0004	Surplus Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO
7	4	01	03	01	0005	Surplus Pelepasan Dana Bergulir-LO
7	4	01	03	02		Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
7	4	01	03	02	0001	Surplus Pelepasan Penyertaan Modal-LO
7	4	02				Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
7	4	02	01			Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
7	4	02	01	01		Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	01	0001	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka

Kode Akun					Uraian Akun
					Menengah-LO
7	4	02	01	02	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	02	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	03	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	03	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	04	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	04	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	05	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	05	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah-LO
7	4	02	01	06	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
7	4	02	01	06	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
7	4	02	02	01	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	01	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	02	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	02	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	03	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	03	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	04	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	04	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	05	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	05	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	02	06	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	02	06	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03		Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
7	4	02	03	01	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	01	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	02	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	02	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMN-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	03	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	03	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	04	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	04	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- BUMD-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	05	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	05	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Menengah-LO
7	4	02	03	06	Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	03	06	0001 Surplus Penyelesaian Utang kepada LKBB- Swasta-Jangka Panjang-LO
7	4	02	04		Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
7	4	02	04	01	0001 Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO
8					BEBAN DAERAH
8	1				BEBAN OPERASI
8	1	01			Beban Pegawai
8	1	01	01		Beban Gaji dan Tunjangan ASN
8	1	01	01	01	Beban Gaji Pokok ASN
8	1	01	01	01	0001 Beban Gaji Pokok PNS
8	1	01	01	01	0002 Beban Gaji Pokok PPPK
8	1	01	01	02	Beban Tunjangan Keluarga ASN
8	1	01	01	02	0001 Beban Tunjangan Keluarga PNS
8	1	01	01	02	0002 Beban Tunjangan Keluarga PPPK
8	1	01	01	03	Beban Tunjangan Jabatan ASN
8	1	01	01	03	0001 Beban Tunjangan Jabatan PNS
8	1	01	01	03	0002 Beban Tunjangan Jabatan PPPK
8	1	01	01	04	Beban Tunjangan Fungsional ASN
8	1	01	01	04	0001 Beban Tunjangan Fungsional PNS
8	1	01	01	04	0002 Beban Tunjangan Fungsional PPPK
8	1	01	01	05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN
8	1	01	01	05	0001 Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS
8	1	01	01	05	0002 Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK
8	1	01	01	06	Beban Tunjangan Beras ASN
8	1	01	01	06	0001 Beban Tunjangan Beras PNS
8	1	01	01	06	0002 Beban Tunjangan Beras PPPK
8	1	01	01	07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
8	1	01	01	07	0001 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
8	1	01	01	07	0002 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK
8	1	01	01	08	Beban Pembulatan Gaji ASN
8	1	01	01	08	0001 Beban Pembulatan Gaji PNS
8	1	01	01	08	0002 Beban Pembulatan Gaji PPPK
8	1	01	01	09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN
8	1	01	01	09	0001 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS
8	1	01	01	09	0002 Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK
8	1	01	01	10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
8	1	01	01	10	0001 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
8	1	01	01	10	0002 Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK
8	1	01	01	11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN
8	1	01	01	11	0001 Beban Iuran Jaminan Kematian PNS
8	1	01	01	11	0002 Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK
8	1	01	01	12	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
8	1	01	01	12	0001 Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS
8	1	01	01	12	0002 Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK
8	1	01	02		Beban Tambahan Penghasilan ASN

Kode Akun					Uraian Akun
8	1	01	02	01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
8	1	01	02	01	0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
8	1	01	02	01	0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK
8	1	01	02	02	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN
8	1	01	02	02	0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan
8	1	01	02	02	0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK
8	1	01	02	03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
8	1	01	02	03	0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
8	1	01	02	03	0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK
8	1	01	02	04	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
8	1	01	02	04	0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
8	1	01	02	04	0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK
8	1	01	02	05	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN
8	1	01	02	05	0001 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS
8	1	01	02	05	0002 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK
8	1	01	03		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
8	1	01	03	01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	03	01	0001 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	01	0002 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	01	0003 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	01	0004 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
8	1	01	03	01	0005 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
8	1	01	03	01	0006 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
8	1	01	03	01	0007 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
8	1	01	03	01	0008 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
8	1	01	03	01	0009 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
8	1	01	03	01	0010 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
8	1	01	03	01	0011 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
8	1	01	03	01	0012 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
8	1	01	03	01	0013 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
8	1	01	03	01	0014 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	01	03	01	0015 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
8	1	01	03	01	0016 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
8	1	01	03	02	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	03	02	0001 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
8	1	01	03	02	0002 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	1	01	03	02	0003 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
8	1	01	03	02	0004 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum -Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	01	03	02	0005 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pelayanan Pasar
8	1	01	03	02	0006 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
8	1	01	03	02	0007 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	1	01	03	02	0008 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	01	03	02	0009 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku
8	1	01	03	02	0010 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
8	1	01	03	02	0011 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	1	01	03	02	0012 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
8	1	01	03	02	0013 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	01	03	02	0014 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah
8	1	01	03	02	0015 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
8	1	01	03	02	0016 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan
8	1	01	03	02	0017 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
8	1	01	03	02	0018 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
8	1	01	03	02	0019 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
8	1	01	03	02	0020 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
8	1	01	03	02	0021 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
8	1	01	03	02	0022 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
8	1	01	03	02	0023 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
8	1	01	03	02	0024 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	1	01	03	02	0025 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan
8	1	01	03	02	0026 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8	1	01	03	02	0027 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
8	1	01	03	02	0028 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
8	1	01	03	02	0029 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas
8	1	01	03	02	0030 Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
8	1	01	03	03	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
8	1	01	03	03	0001 Beban TPG PNSD
8	1	01	03	04	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
8	1	01	03	04	0001 Beban TKG PNSD
8	1	01	03	05	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
8	1	01	03	05	0001 Beban Tamsil Guru PNSD
8	1	01	03	06	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	01	03	06	0001 Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	01	03	07	Beban Honorarium
8	1	01	03	07	0001 Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
8	1	01	03	07	0002 Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
8	1	01	03	07	0003 Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
8	1	01	03	08	Beban Jasa Pengelolaan BMD
8	1	01	03	08	0001 Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	01	03	08	0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
8	1	01	04			Beban Gaji dan Tunjangan DPRD
8	1	01	04	01		Beban Uang Representasi DPRD
8	1	01	04	01	0001	Beban Uang Representasi DPRD
8	1	01	04	02		Beban Tunjangan Keluarga DPRD
8	1	01	04	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD
8	1	01	04	03		Beban Tunjangan Beras DPRD
8	1	01	04	03	0001	Beban Tunjangan Beras DPRD
8	1	01	04	04		Beban Uang Paket DPRD
8	1	01	04	04	0001	Beban Uang Paket DPRD
8	1	01	04	05		Beban Tunjangan Jabatan DPRD
8	1	01	04	05	0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD
8	1	01	04	06		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
8	1	01	04	06	0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
8	1	01	04	07		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
8	1	01	04	07	0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
8	1	01	04	08		Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	08	0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	09		Beban Tunjangan Reses DPRD
8	1	01	04	09	0001	Beban Tunjangan Reses DPRD
8	1	01	04	10		Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan
8	1	01	04	10	0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	11		Beban Pembulatan Gaji DPRD
8	1	01	04	11	0001	Beban Pembulatan Gaji DPRD
8	1	01	04	12		Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	01	04	12	0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD
8	1	01	04	12	0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
8	1	01	04	12	0003	Beban Jaminan Kematian DPRD
8	1	01	04	12	0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD
8	1	01	04	13		Beban Tunjangan Transportasi DPRD
8	1	01	04	13	0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD
8	1	01	04	14		Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
8	1	01	04	14	0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD
8	1	01	05			Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
8	1	01	05	01		Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
8	1	01	05	01	0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH
8	1	01	05	02		Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
8	1	01	05	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
8	1	01	05	03		Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
8	1	01	05	03	0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
8	1	01	05	04		Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
8	1	01	05	04	0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH
8	1	01	05	05		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
8	1	01	05	05	0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
8	1	01	05	06		Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
8	1	01	05	06	0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH
8	1	01	05	07		Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
8	1	01	05	07	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
8	1	01	05	08		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
8	1	01	05	08	0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
8	1	01	05	09		Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
8	1	01	05	09	0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
8	1	01	05	10		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
8	1	01	05	10	0001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	01	05	10	0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	01	05	10	0003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8	1	01	05	10	0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
8	1	01	05	10	0005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok
8	1	01	05	10	0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel
8	1	01	05	10	0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran
8	1	01	05	10	0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan
8	1	01	05	10	0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame
8	1	01	05	10	0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
8	1	01	05	10	0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir
8	1	01	05	10	0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah
8	1	01	05	10	0013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
8	1	01	05	10	0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	01	05	10	0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
8	1	01	05	10	0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
8	1	01	05	11		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	01	05	11	0001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
8	1	01	05	11	0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	1	01	05	11	0003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan
8	1	01	05	11	0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	01	05	11	0005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
8	1	01	05	11	0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
8	1	01	05	11	0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemandam Kebakaran
8	1	01	05	11	0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	01	05	11	0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
8	1	01	05	11	0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
8	1	01	05	11	0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	1	01	05	11	0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	01	05	11	0013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	01	05	11	0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
8	1	01	05	11	0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
8	1	01	05	11	0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
8	1	01	05	11	0017	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
8	1	01	05	11	0018	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
8	1	01	05	11	0019	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
8	1	01	05	11	0020	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
8	1	01	05	11	0021	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan
8	1	01	05	11	0022	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
8	1	01	05	11	0023	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air
8	1	01	05	11	0024	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	1	01	05	11	0025	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan bagi KDH/WKDH
8	1	01	05	11	0026	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8	1	01	05	11	0027	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
8	1	01	05	11	0028	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
8	1	01	05	11	0029	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas
8	1	01	05	11	0030	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
8	1	01	06			Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
8	1	01	06	01		Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
8	1	01	06	01	0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD
8	1	01	06	02		Beban Dana Operasional KDH/WKDH
8	1	01	06	02	0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH
8	1	02				Beban Barang dan Jasa
8	1	02	01			Beban Barang
8	1	02	01	01		Beban Barang Pakai Habis
8	1	02	01	01	0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi
8	1	02	01	01	0002	Beban Bahan-Bahan Kimia
8	1	02	01	01	0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
8	1	02	01	01	0005	Beban Bahan-Bahan Baku
8	1	02	01	01	0006	Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir
8	1	02	01	01	0007	Beban Bahan-Barang dalam Proses
8	1	02	01	01	0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman
8	1	02	01	01	0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
8	1	02	01	01	0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas
8	1	02	01	01	0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan
8	1	02	01	01	0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya
8	1	02	01	01	0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
8	1	02	01	01	0014	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar
8	1	02	01	01	0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran
8	1	02	01	01	0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium
8	1	02	01	01	0017	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar
8	1	02	01	01	0018	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi
8	1	02	01	01	0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian
8	1	02	01	01	0020	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel
8	1	02	01	01	0022	Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial
8	1	02	01	01	0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
8	1	02	01	01	0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
8	1	02	01	01	0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
8	1	02	01	01	0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
8	1	02	01	01	0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
8	1	02	01	01	0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
8	1	02	01	01	0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
8	1	02	01	01	0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor
8	1	02	01	01	0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik
8	1	02	01	01	0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas
8	1	02	01	01	0033	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa
8	1	02	01	01	0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga
8	1	02	01	01	0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata
8	1	02	01	01	0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
8	1	02	01	01	0037	Beban Obat-Obatan-Obat
8	1	02	01	01	0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
8	1	02	01	01	0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
8	1	02	01	01	0040	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
8	1	02	01	01	0041	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga
8	1	02	01	01	0042	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya
8	1	02	01	01	0043	Beban Natura dan Pakan-Natura
8	1	02	01	01	0044	Beban Natura dan Pakan-Pakan
8	1	02	01	01	0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
8	1	02	01	01	0046	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi
8	1	02	01	01	0047	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi Lainnya
8	1	02	01	01	0048	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi
8	1	02	01	01	0049	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya
8	1	02	01	01	0050	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses
8	1	02	01	01	0051	Beban Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya
8	1	02	01	01	0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat
8	1	02	01	01	0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
8	1	02	01	01	0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	01	01	0055	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
8	1	02	01	01	0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
8	1	02	01	01	0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
8	1	02	01	01	0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
8	1	02	01	01	0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH
8	1	02	01	01	0060	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
8	1	02	01	01	0061	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
8	1	02	01	01	0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
8	1	02	01	01	0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
8	1	02	01	01	0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
8	1	02	01	01	0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
8	1	02	01	01	0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
8	1	02	01	01	0067	Beban Pakaian Penyelamatan
8	1	02	01	01	0068	Beban Pakaian Siaga
8	1	02	01	01	0069	Beban Pakaian Teknik
8	1	02	01	01	0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja
8	1	02	01	01	0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium
8	1	02	01	01	0072	Beban Pakaian Kerja Bengkel
8	1	02	01	01	0073	Beban Pakaian KORPRI
8	1	02	01	01	0074	Beban Pakaian Adat Daerah
8	1	02	01	01	0075	Beban Pakaian Batik Tradisional
8	1	02	01	01	0076	Beban Pakaian Olahraga
8	1	02	01	01	0077	Beban Pakaian Paskibraka
8	1	02	01	01	0078	Beban Pakaian Jas/Safari
8	1	02	01	02		Beban Barang Tak Habis Pakai
8	1	02	01	02	0001	Beban Komponen-Komponen Jembatan Baja
8	1	02	01	02	0002	Beban Komponen-Komponen Jembatan Pratekan
8	1	02	01	02	0003	Beban Komponen-Komponen Peralatan
8	1	02	01	02	0004	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu
8	1	02	01	02	0005	Beban Komponen-Attachment
8	1	02	01	02	0006	Beban Komponen-Komponen Lainnya
8	1	02	01	02	0007	Beban Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)
8	1	02	01	02	0008	Beban Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)
8	1	02	01	02	0009	Beban Pipa-Pipa Baja
8	1	02	01	02	0010	Beban Pipa-Pipa Beton Pratekan
8	1	02	01	02	0011	Beban Pipa-Pipa Fiber Glass
8	1	02	01	02	0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)
8	1	02	01	02	0013	Beban Pipa-Pipa Lainnya
8	1	02	01	03		Beban Barang Bekas Dipakai
8	1	02	01	03	0001	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas
8	1	02	01	03	0002	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Pipa Bekas
8	1	02	01	03	0003	Beban Komponen Bekas dan Pipa Bekas- Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya
8	1	02	02	01		Beban Jasa
8	1	02	02	01		Beban Jasa Kantor
8	1	02	02	01	0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan
8	1	02	02	01	0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
8	1	02	02	01	0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
8	1	02	02	01	0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
8	1	02	02	01	0005	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
8	1	02	02	01	0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
8	1	02	02	01	0007	Beban Honorarium Rohaniwan
8	1	02	02	01	0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
8	1	02	02	01	0009	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian
8	1	02	02	01	0010	Beban Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
8	1	02	02	01	0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
8	1	02	02	01	0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
8	1	02	02	01	0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan
8	1	02	02	01	0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan
8	1	02	02	01	0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium
8	1	02	02	01	0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum
8	1	02	02	01	0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
8	1	02	02	01	0018	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8	1	02	02	01	0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana
8	1	02	02	01	0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial
8	1	02	02	01	0021	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air
8	1	02	02	01	0022	Beban Jasa Tenaga Perhubungan
8	1	02	02	01	0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
8	1	02	02	01	0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan
8	1	02	02	01	0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
8	1	02	02	01	0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi
8	1	02	02	01	0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer
8	1	02	02	01	0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum
8	1	02	02	01	0029	Beban Jasa Tenaga Ahli
8	1	02	02	01	0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan
8	1	02	02	01	0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan
8	1	02	02	01	0032	Beban Jasa Tenaga Caraka
8	1	02	02	01	0033	Beban Jasa Tenaga Supir
8	1	02	02	01	0034	Beban Jasa Tenaga Juru Masak
8	1	02	02	01	0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik
8	1	02	02	01	0036	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO
8	1	02	02	01	0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
8	1	02	02	01	0038	Beban Jasa Tata Rias
8	1	02	02	01	0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
8	1	02	02	01	0040	Beban Jasa Tenaga Operator Tiket
8	1	02	02	01	0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik
8	1	02	02	01	0042	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan
8	1	02	02	01	0043	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan
8	1	02	02	01	0044	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	02	01	0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan
8	1	02	02	01	0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi
8	1	02	02	01	0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara
8	1	02	02	01	0048	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi
8	1	02	02	01	0049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
8	1	02	02	01	0050	Beban Jasa Kalibrasi
8	1	02	02	01	0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah
8	1	02	02	01	0052	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi
8	1	02	02	01	0053	Beban Jasa Pengukuran Tanah
8	1	02	02	01	0054	Beban Jasa Jalan/Tol
8	1	02	02	01	0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
8	1	02	02	01	0056	Beban Jasa Pemindahan Benda Bersejarah
8	1	02	02	01	0057	Beban Jasa Operator Kapal
8	1	02	02	01	0058	Beban Jasa Penyelaman
8	1	02	02	01	0059	Beban Tagihan Telepon
8	1	02	02	01	0060	Beban Tagihan Air
8	1	02	02	01	0061	Beban Tagihan Listrik
8	1	02	02	01	0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
8	1	02	02	01	0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
8	1	02	02	01	0064	Beban Paket/Pengiriman
8	1	02	02	01	0065	Beban Penambahan Daya
8	1	02	02	01	0066	Beban Registrasi/Keanggotaan
8	1	02	02	01	0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
8	1	02	02	01	0068	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum
8	1	02	02	01	0069	Beban Pengolahan Air Limbah
8	1	02	02	01	0070	Beban Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Akibat Kecelakaan
8	1	02	02	01	0071	Beban Lembur
8	1	02	02	01	0072	Beban Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
8	1	02	02	01	0073	Beban <i>Medical Check Up</i>
8	1	02	02	02		Beban Iuran Jaminan/Asuransi
8	1	02	02	02	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
8	1	02	02	02	0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
8	1	02	02	02	0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
8	1	02	02	02	0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
8	1	02	02	02	0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN
8	1	02	02	02	0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
8	1	02	02	02	0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN
8	1	02	02	02	0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah
8	1	02	02	03		Beban Sewa Tanah
8	1	02	02	03	0001	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
8	1	02	02	03	0002	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
8	1	02	02	03	0003	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Industri
8	1	02	02	03	0004	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
8	1	02	02	03	0005	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
8	1	02	02	03	0006	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
8	1	02	02	03	0007	Beban Sewa Tanah Persil Lainnya
8	1	02	02	03	0008	Beban Sewa Tanah Basah
8	1	02	02	03	0009	Beban Sewa Tanah Kering
8	1	02	02	03	0010	Beban Sewa Tanah Perkebunan
8	1	02	02	03	0011	Beban Sewa Tanah Hutan
8	1	02	02	03	0012	Beban Sewa Tanah Tandus
8	1	02	02	03	0013	Beban Sewa Tanah Padang Alang- Alang/Rumput
8	1	02	02	03	0014	Beban Sewa Tanah Pertanian
8	1	02	02	03	0015	Beban Sewa Tanah Pertambangan
8	1	02	02	03	0016	Beban Sewa Tanah Non Persil Lainnya
8	1	02	02	03	0017	Beban Sewa Tanah Lapangan Olahraga
8	1	02	02	03	0018	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir
8	1	02	02	03	0019	Beban Sewa Tanah Lapangan Penimbunan Barang
8	1	02	02	03	0020	Beban Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
8	1	02	02	03	0021	Beban Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
8	1	02	02	03	0022	Beban Sewa Tanah Lapangan Terbang
8	1	02	02	03	0023	Beban Sewa Tanah untuk Jalan
8	1	02	02	03	0024	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Air
8	1	02	02	03	0025	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi
8	1	02	02	03	0026	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Jaringan
8	1	02	02	03	0027	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Bersejarah
8	1	02	02	03	0028	Beban Sewa Tanah untuk Makam
8	1	02	02	03	0029	Beban Sewa Tanah untuk Taman
8	1	02	02	03	0030	Beban Sewa Tanah untuk Latihan
8	1	02	02	03	0031	Beban Sewa Tanah Daerah Pertahanan
8	1	02	02	03	0032	Beban Sewa Tanah Lapangan PBB
8	1	02	02	03	0033	Beban Sewa Tanah Kampung
8	1	02	02	03	0034	Beban Sewa <i>Emplament</i>
8	1	02	02	03	0035	Beban Sewa Lapangan Lainnya
8	1	02	02	04		Beban Sewa Peralatan dan Mesin
8	1	02	02	04	0001	Beban Sewa <i>Tractor</i>
8	1	02	02	04	0002	Beban Sewa <i>Grader</i>
8	1	02	02	04	0003	Beban Sewa <i>Excavator</i>
8	1	02	02	04	0004	Beban Sewa <i>Pile Driver</i>
8	1	02	02	04	0005	Beban Sewa <i>Hauler</i>
8	1	02	02	04	0006	Beban Sewa <i>Asphalt Equipment</i>
8	1	02	02	04	0007	Beban Sewa <i>Compacting Equipment</i>
8	1	02	02	04	0008	Beban Sewa <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
8	1	02	02	04	0009	Beban Sewa <i>Loader</i>
8	1	02	02	04	0010	Beban Sewa Alat Pengangkat
8	1	02	02	04	0011	Beban Sewa Mesin Proses
8	1	02	02	04	0012	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya
8	1	02	02	04	0013	Beban Sewa <i>Dredger</i>
8	1	02	02	04	0014	Beban Sewa <i>Floating Excavator</i>
8	1	02	02	04	0015	Beban Sewa <i>Amphibi Dredger</i>



Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	02	04	0016	Beban Sewa Kapal Tarik
8	1	02	02	04	0017	Beban Sewa Mesin Proses Apung
8	1	02	02	04	0018	Beban Sewa Alat Besar Apung Lainnya
8	1	02	02	04	0019	Beban Sewa Alat Penarik
8	1	02	02	04	0020	Beban Sewa <i>Feeder</i>
8	1	02	02	04	0021	Beban Sewa <i>Compressor</i>
8	1	02	02	04	0022	Beban Sewa <i>Electric Generating Set</i>
8	1	02	02	04	0023	Beban Sewa Pompa
8	1	02	02	04	0024	Beban Sewa Mesin Bor
8	1	02	02	04	0025	Beban Sewa Unit Pemeliharaan Lapangan
8	1	02	02	04	0026	Beban Sewa Alat Pengolahan Air Kotor
8	1	02	02	04	0027	Beban Sewa Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
8	1	02	02	04	0028	Beban Sewa <i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
8	1	02	02	04	0029	Beban Sewa Mesin <i>Tatoo</i>
8	1	02	02	04	0030	Beban Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan
8	1	02	02	04	0031	Beban Sewa Peralatan Selam
8	1	02	02	04	0032	Beban Sewa Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
8	1	02	02	04	0033	Beban Sewa Peralatan Intelijen
8	1	02	02	04	0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya
8	1	02	02	04	0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
8	1	02	02	04	0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
8	1	02	02	04	0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
8	1	02	02	04	0038	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
8	1	02	02	04	0039	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
8	1	02	02	04	0040	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus
8	1	02	02	04	0041	Beban Sewa Kendaraan Tempur
8	1	02	02	04	0042	Beban Sewa Alat Angkutan Kereta Rel
8	1	02	02	04	0043	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
8	1	02	02	04	0044	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
8	1	02	02	04	0045	Beban Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
8	1	02	02	04	0046	Beban Sewa Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
8	1	02	02	04	0047	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
8	1	02	02	04	0048	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
8	1	02	02	04	0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
8	1	02	02	04	0050	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
8	1	02	02	04	0051	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
8	1	02	02	04	0052	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
8	1	02	02	04	0053	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
8	1	02	02	04	0054	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
8	1	02	02	04	0055	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
8	1	02	02	04	0056	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
8	1	02	02	04	0057	Beban Sewa Kapal Terbang
8	1	02	02	04	0058	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
8	1	02	02	04	0059	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
8	1	02	02	04	0060	Beban Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang
8	1	02	02	04	0061	Beban Sewa Perkakas Bengkel Listrik
8	1	02	02	04	0062	Beban Sewa Perkakas Bengkel <i>Service</i>
8	1	02	02	04	0063	Beban Sewa Perkakas Pengangkat Bermesin
8	1	02	02	04	0064	Beban Sewa Perkakas Bengkel Kayu
8	1	02	02	04	0065	Beban Sewa Perkakas Bengkel Khusus
8	1	02	02	04	0066	Beban Sewa Peralatan Las
8	1	02	02	04	0067	Beban Sewa Perkakas Pabrik Es
8	1	02	02	04	0068	Beban Sewa Alat Bengkel Bermesin Lainnya
8	1	02	02	04	0069	Beban Sewa Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
8	1	02	02	04	0070	Beban Sewa Perkakas Bengkel Listrik
8	1	02	02	04	0071	Beban Sewa Perkakas Bengkel <i>Service</i>
8	1	02	02	04	0072	Beban Sewa Perkakas Pengangkat
8	1	02	02	04	0073	Beban Sewa Perkakas <i>Standard (Standard</i>
8	1	02	02	04	0074	Beban Sewa Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
8	1	02	02	04	0075	Beban Sewa Perkakas Bengkel Kerja
8	1	02	02	04	0076	Beban Sewa Peralatan Tukang Besi
8	1	02	02	04	0077	Beban Sewa Peralatan Tukang Kayu
8	1	02	02	04	0078	Beban Sewa Peralatan Tukang Kayu
8	1	02	02	04	0079	Beban Sewa Peralatan Ukur, Gip dan <i>Feeting</i>
8	1	02	02	04	0080	Beban Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam
8	1	02	02	04	0081	Beban Sewa Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
8	1	02	02	04	0082	Beban Sewa Alat Ukur Universal
8	1	02	02	04	0083	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Inteligensia
8	1	02	02	04	0084	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
8	1	02	02	04	0085	Beban Sewa Alat Ukur/Tes Klinis Lain
8	1	02	02	04	0086	Beban Sewa Alat Kalibrasi
8	1	02	02	04	0087	Beban Sewa <i>Oscilloscope</i>
8	1	02	02	04	0088	Beban Sewa <i>Universal Tester</i>
8	1	02	02	04	0089	Beban Sewa Alat Ukur/Pembanding
8	1	02	02	04	0090	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain
8	1	02	02	04	0091	Beban Sewa Alat Timbangan/Biara
8	1	02	02	04	0092	Beban Sewa Anak Timbangan/Biara
8	1	02	02	04	0093	Beban Sewa Takaran Kering
8	1	02	02	04	0094	Beban Sewa Takaran Bahan Bangunan
8	1	02	02	04	0095	Beban Sewa Takaran Lainnya
8	1	02	02	04	0096	Beban Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	04	0097	Beban Sewa <i>Specific Set</i>
8	1	02	02	04	0098	Beban Sewa Alat Pengukur Keadaan Alam
8	1	02	02	04	0099	Beban Sewa Alat Pengukur Penglihatan
8	1	02	02	04	0100	Beban Sewa Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
8	1	02	02	04	0101	Beban Sewa Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
8	1	02	02	04	0102	Beban Sewa Alat Ukur Lainnya
8	1	02	02	04	0103	Beban Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
8	1	02	02	04	0104	Beban Sewa Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
8	1	02	02	04	0105	Beban Sewa Alat Panen

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	02	04	0106	Beban Sewa Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
8	1	02	02	04	0107	Beban Sewa Alat Laboratorium Pertanian
8	1	02	02	04	0108	Beban Sewa Alat <i>Processing</i>
8	1	02	02	04	0109	Beban Sewa Alat Pasca Panen
8	1	02	02	04	0110	Beban Sewa Alat Produksi Perikanan
8	1	02	02	04	0111	Beban Sewa Alat-Alat Peternakan
8	1	02	02	04	0112	Beban Sewa Alat Pengolahan Lainnya
8	1	02	02	04	0113	Beban Sewa Mesin Ketik
8	1	02	02	04	0114	Beban Sewa Mesin Hitung/Mesin Jumlah
8	1	02	02	04	0115	Beban Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)
8	1	02	02	04	0116	Beban Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
8	1	02	02	04	0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya
8	1	02	02	04	0118	Beban Sewa Mebel
8	1	02	02	04	0119	Beban Sewa Alat Pengukur Waktu
8	1	02	02	04	0120	Beban Sewa Alat Pembersih
8	1	02	02	04	0121	Beban Sewa Alat Pendingin
8	1	02	02	04	0122	Beban Sewa Alat Dapur
8	1	02	02	04	0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
8	1	02	02	04	0124	Beban Sewa Alat Pemadam Kebakaran
8	1	02	02	04	0125	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat
8	1	02	02	04	0126	Beban Sewa Meja Rapat Pejabat
8	1	02	02	04	0127	Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat
8	1	02	02	04	0128	Beban Sewa Kursi Rapat Pejabat
8	1	02	02	04	0129	Beban Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
8	1	02	02	04	0130	Beban Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
8	1	02	02	04	0131	Beban Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
8	1	02	02	04	0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio
8	1	02	02	04	0133	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film
8	1	02	02	04	0134	Beban Sewa Peralatan Studio Gambar
8	1	02	02	04	0135	Beban Sewa Peralatan Cetak
8	1	02	02	04	0136	Beban Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
8	1	02	02	04	0137	Beban Sewa Alat Studio Lainnya
8	1	02	02	04	0138	Beban Sewa Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
8	1	02	02	04	0139	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio SSB
8	1	02	02	04	0140	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM
8	1	02	02	04	0141	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio VHF
8	1	02	02	04	0142	Beban Sewa Alat Komunikasi Radio UHF
8	1	02	02	04	0143	Beban Sewa Alat Komunikasi Sosial
8	1	02	02	04	0144	Beban Sewa Alat-Alat Sandi
8	1	02	02	04	0145	Beban Sewa Alat Komunikasi Khusus
8	1	02	02	04	0146	Beban Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
8	1	02	02	04	0147	Beban Sewa Alat Komunikasi Satelit
8	1	02	02	04	0148	Beban Sewa Alat Komunikasi Lainnya
8	1	02	02	04	0149	Beban Sewa Peralatan Pemancar MF/MW
8	1	02	02	04	0150	Peralatan Pemancar HF/SW
8	1	02	02	04	0151	Beban Sewa Peralatan Pemancar VHF/FM
8	1	02	02	04	0152	Beban Sewa Peralatan Pemancar UHF
8	1	02	02	04	0153	Beban Sewa Peralatan Pemancar SHF
8	1	02	02	04	0154	Beban Sewa Peralatan Antena MF/MW
8	1	02	02	04	0155	Beban Sewa Peralatan Antena HF/SW
8	1	02	02	04	0156	Beban Sewa Peralatan Antena VHF/FM
8	1	02	02	04	0157	Beban Sewa Peralatan Antena UHF
8	1	02	02	04	0158	Beban Sewa Peralatan Antena SHF/Parabola
8	1	02	02	04	0159	Beban Sewa Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
8	1	02	02	04	0160	Beban Sewa Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
8	1	02	02	04	0161	Beban Sewa Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
8	1	02	02	04	0162	Beban Sewa Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
8	1	02	02	04	0163	Beban Sewa Peralatan <i>Microwave</i> FPU
8	1	02	02	04	0164	Beban Sewa Peralatan <i>Microwave</i> <i>Terrestrial</i>
8	1	02	02	04	0165	Beban Sewa Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
8	1	02	02	04	0166	Beban Sewa Peralatan <i>Dummy Load</i>
8	1	02	02	04	0167	Beban Sewa <i>Switcher</i> Antena
8	1	02	02	04	0168	Beban Sewa <i>Switcher</i> /Menara Antena
8	1	02	02	04	0169	Beban Sewa <i>Feeder</i>
8	1	02	02	04	0170	Beban Sewa <i>Humidity Control</i>
8	1	02	02	04	0171	Beban Sewa Program <i>Input Equipment</i>
8	1	02	02	04	0172	Beban Sewa Peralatan Antena Penerima VHF
8	1	02	02	04	0173	Beban Sewa Peralatan Pemancar LF
8	1	02	02	04	0174	Beban Sewa Unit Pemancar MF+HF
8	1	02	02	04	0175	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar MF+HF
8	1	02	02	04	0176	Beban Sewa Peralatan Penerima
8	1	02	02	04	0177	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima LF
8	1	02	02	04	0178	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima
8	1	02	02	04	0179	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima HF
8	1	02	02	04	0180	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
8	1	02	02	04	0181	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
8	1	02	02	04	0182	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
8	1	02	02	04	0183	Beban Sewa Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
8	1	02	02	04	0184	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
8	1	02	02	04	0185	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
8	1	02	02	04	0186	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
8	1	02	02	04	0187	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
8	1	02	02	04	0188	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
8	1	02	02	04	0189	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan
8	1	02	02	04	0190	Beban Sewa Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
8	1	02	02	04	0191	Beban Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
8	1	02	02	04	0192	Beban Sewa Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
8	1	02	02	04	0193	Beban Sewa Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
8	1	02	02	04	0194	Beban Sewa Peralatan Perlengkapan Radio
8	1	02	02	04	0195	Beban Sewa Sumber Tenaga

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	02	04	0196	Beban Sewa Peralatan Pemancar Lainnya
8	1	02	02	04	0197	Beban Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
8	1	02	02	04	0198	Beban Sewa <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
8	1	02	02	04	0199	Beban Sewa <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
8	1	02	02	04	0200	Beban Sewa Radar
8	1	02	02	04	0201	Beban Sewa Alat Pengatur Telekomunikasi
8	1	02	02	04	0202	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
8	1	02	02	04	0203	Beban Sewa Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
8	1	02	02	04	0204	Beban Sewa Alat Kedokteran Umum
8	1	02	02	04	0205	Beban Sewa Alat Kedokteran Gigi
8	1	02	02	04	0206	Beban Sewa Alat Kedokteran Keluarga Berencana
8	1	02	02	04	0207	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah
8	1	02	02	04	0208	Beban Sewa Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
8	1	02	02	04	0209	Beban Sewa Alat Kedokteran THT
8	1	02	02	04	0210	Beban Sewa Alat Kedokteran Mata
8	1	02	02	04	0211	Beban Sewa Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
8	1	02	02	04	0212	Beban Sewa Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
8	1	02	02	04	0213	Beban Sewa Alat Kedokteran Anak
8	1	02	02	04	0214	Beban Sewa Alat Kedokteran Poliklinik
8	1	02	02	04	0215	Beban Sewa Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
8	1	02	02	04	0216	Beban Sewa Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
8	1	02	02	04	0217	Beban Sewa Alat Kedokteran Jantung
8	1	02	02	04	0218	Beban Sewa Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
8	1	02	02	04	0219	Beban Sewa Alat Kedokteran Patologi <i>Anatomy</i>
8	1	02	02	04	0220	Beban Sewa Alat Kedokteran Transfusi Darah
8	1	02	02	04	0221	Beban Sewa Alat Kedokteran Radioterapi
8	1	02	02	04	0222	Beban Sewa Alat Kedokteran Nuklir
8	1	02	02	04	0223	Beban Sewa Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
8	1	02	02	04	0224	Beban Sewa Alat Kedokteran Gawat Darurat
8	1	02	02	04	0225	Beban Sewa Alat Kedokteran Jiwa
8	1	02	02	04	0226	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
8	1	02	02	04	0227	Beban Sewa Alat Kedokteran ICU
8	1	02	02	04	0228	Beban Sewa Alat Kedokteran ICCU
8	1	02	02	04	0229	Beban Sewa Alat Kedokteran Bedah Jantung
8	1	02	02	04	0230	Beban Sewa Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
8	1	02	02	04	0231	Beban Sewa Alat Kedokteran Anestesi
8	1	02	02	04	0232	Beban Sewa Alat Kedokteran Lainnya
8	1	02	02	04	0233	Beban Sewa Alat Kesehatan Matra Laut
8	1	02	02	04	0234	Beban Sewa Alat Kesehatan Matra Udara
8	1	02	02	04	0235	Beban Sewa Alat Kesehatan Kepolisian
8	1	02	02	04	0236	Beban Sewa Alat Kesehatan Olahraga
8	1	02	02	04	0237	Beban Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya
8	1	02	02	04	0238	Beban Sewa Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
8	1	02	02	04	0239	Beban Sewa Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
8	1	02	02	04	0240	Beban Sewa Alat Laboratorium Hidrokimia
8	1	02	02	04	0241	Beban Sewa Alat Laboratorium Model Hidrolika
8	1	02	02	04	0242	Beban Sewa Alat Laboratorium Batuan/Geologi
8	1	02	02	04	0243	Beban Sewa Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
8	1	02	02	04	0244	Beban Sewa Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
8	1	02	02	04	0245	Beban Sewa Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
8	1	02	02	04	0246	Beban Sewa Alat Laboratorium Cocok Tanam
8	1	02	02	04	0247	Beban Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
8	1	02	02	04	0248	Beban Sewa Alat Laboratorium Umum
8	1	02	02	04	0249	Beban Sewa Alat Laboratorium Mikrobiologi
8	1	02	02	04	0250	Beban Sewa Alat Laboratorium Kimia
8	1	02	02	04	0251	Beban Sewa Alat Laboratorium Patologi
8	1	02	02	04	0252	Beban Sewa Alat Laboratorium Immunologi
8	1	02	02	04	0253	Beban Sewa Alat Laboratorium Hematologi
8	1	02	02	04	0254	Beban Sewa Alat Laboratorium Film
8	1	02	02	04	0255	Beban Sewa Alat Laboratorium Makanan
8	1	02	02	04	0256	Beban Sewa Alat Laboratorium Farmasi
8	1	02	02	04	0257	Beban Sewa Alat Laboratorium Fisika
8	1	02	02	04	0258	Beban Sewa Alat Laboratorium Hidrodinamika
8	1	02	02	04	0259	Beban Sewa Alat Laboratorium Klimatologi
8	1	02	02	04	0260	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Peleburan
8	1	02	02	04	0261	Beban Sewa Alat Laboratorium Pasir
8	1	02	02	04	0262	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
8	1	02	02	04	0263	Beban Sewa Alat Laboratorium Pembuatan Pola
8	1	02	02	04	0264	Beban Sewa Alat Laboratorium Metalografi
8	1	02	02	04	0265	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pengelasan
8	1	02	02	04	0266	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
8	1	02	02	04	0267	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
8	1	02	02	04	0268	Beban Sewa Alat Laboratorium Metrologi
8	1	02	02	04	0269	Beban Sewa Alat Laboratorium Pelapisan Logam
8	1	02	02	04	0270	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
8	1	02	02	04	0271	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
8	1	02	02	04	0272	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil
8	1	02	02	04	0273	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
8	1	02	02	04	0274	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
8	1	02	02	04	0275	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
8	1	02	02	04	0276	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Keramik
8	1	02	02	04	0277	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
8	1	02	02	04	0278	Beban Sewa Alat Laboratorium Pertanian
8	1	02	02	04	0279	Beban Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
8	1	02	02	04	0280	Beban Sewa Alat Laboratorium Energi Surya
8	1	02	02	04	0281	Beban Sewa Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
8	1	02	02	04	0282	Beban Sewa Alat Laboratorium Oseanografi
8	1	02	02	04	0283	Beban Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
8	1	02	02	04	0284	Beban Sewa Alat Laboratorium Biologi Perairan
8	1	02	02	04	0285	Beban Sewa Alat Laboratorium Biologi

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	02	04	0286	Beban Sewa Alat Laboratorium Geofisika
8	1	02	02	04	0287	Beban Sewa Alat Laboratorium Tambang
8	1	02	02	04	0288	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
8	1	02	02	04	0289	Beban Sewa Alat Laboratorium Proses Industri
8	1	02	02	04	0290	Beban Sewa Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
8	1	02	02	04	0291	Beban Sewa Laboratorium Kearsipan
8	1	02	02	04	0292	Beban Sewa Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
8	1	02	02	04	0293	Beban Sewa Alat Laboratorium Lain
8	1	02	02	04	0294	Beban Sewa Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
8	1	02	02	04	0295	Beban Sewa Alat Laboratorium Pendidikan
8	1	02	02	04	0296	Beban Sewa Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
8	1	02	02	04	0297	Beban Sewa Alat Laboratorium Teknik Pantai
8	1	02	02	04	0298	Beban Sewa Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
8	1	02	02	04	0299	Beban Sewa Alat Laboratorium Populasi
8	1	02	02	04	0300	Beban Sewa Alat Pengukur Gelombang
8	1	02	02	04	0301	Beban Sewa Unit Alat Laboratorium Lainnya
8	1	02	02	04	0302	Beban Sewa <i>Analytical Instrument</i>
8	1	02	02	04	0303	Beban Sewa <i>Instrument Probe/Sensor</i>
8	1	02	02	04	0304	Beban Sewa <i>General Laboratory Tool</i>
8	1	02	02	04	0305	Beban Sewa <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
8	1	02	02	04	0306	Beban Sewa <i>Laboratory Safety Equipment</i>
8	1	02	02	04	0307	Beban Sewa Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
8	1	02	02	04	0308	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
8	1	02	02	04	0309	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
8	1	02	02	04	0310	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
8	1	02	02	04	0311	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
8	1	02	02	04	0312	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
8	1	02	02	04	0313	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
8	1	02	02	04	0314	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS
8	1	02	02	04	0315	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
8	1	02	02	04	0316	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
8	1	02	02	04	0317	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
8	1	02	02	04	0318	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
8	1	02	02	04	0319	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
8	1	02	02	04	0320	Beban Sewa Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
8	1	02	02	04	0321	Beban Sewa Alat Peraga Kejuruan
8	1	02	02	04	0322	Beban Sewa Alat Peraga PAUD/TK
8	1	02	02	04	0323	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
8	1	02	02	04	0324	Beban Sewa <i>Radiation Detector</i>
8	1	02	02	04	0325	Beban Sewa <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
8	1	02	02	04	0326	Beban Sewa <i>Assembly/Counting System</i>
8	1	02	02	04	0327	Beban Sewa <i>Recorder Display</i>
8	1	02	02	04	0328	Beban Sewa <i>System/Power Supply</i>
8	1	02	02	04	0329	Beban Sewa <i>Measuring/Testing Device</i>
8	1	02	02	04	0330	Beban Sewa <i>Opto Electronics</i>
8	1	02	02	04	0331	Beban Sewa <i>Accelerator</i>
8	1	02	02	04	0332	Beban Sewa <i>Reactor Experimental System</i>
8	1	02	02	04	0333	Beban Sewa Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
8	1	02	02	04	0334	Beban Sewa Alat Ukur Fisika Kesehatan
8	1	02	02	04	0335	Beban Sewa Alat Kesehatan Kerja
8	1	02	02	04	0336	Beban Sewa Proteksi Lingkungan
8	1	02	02	04	0337	Beban Sewa <i>Meteorological Equipment</i>
8	1	02	02	04	0338	Beban Sewa Sumber Radiasi
8	1	02	02	04	0339	Beban Sewa Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
8	1	02	02	04	0340	Beban Sewa <i>Radiation Application Equipment</i>
8	1	02	02	04	0341	Beban Sewa <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
8	1	02	02	04	0342	Beban Sewa Peralatan Hidrologi
8	1	02	02	04	0343	Beban Sewa <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya
8	1	02	02	04	0344	Beban Sewa Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
8	1	02	02	04	0345	Beban Sewa Alat Laboratorium Kualitas Udara
8	1	02	02	04	0346	Beban Sewa Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
8	1	02	02	04	0347	Beban Sewa Laboratorium Lingkungan
8	1	02	02	04	0348	Beban Sewa Alat Laboratorium Penunjang
8	1	02	02	04	0349	Beban Sewa Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
8	1	02	02	04	0350	Beban Sewa <i>Towing Carriage</i>
8	1	02	02	04	0351	Beban Sewa <i>Wave Generator and Absorber</i>
8	1	02	02	04	0352	Beban Sewa <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
8	1	02	02	04	0353	Beban Sewa <i>Cavitation Tunnel</i>
8	1	02	02	04	0354	Beban Sewa <i>Overhead Cranes</i>
8	1	02	02	04	0355	Beban Sewa Peralatan Umum
8	1	02	02	04	0356	Beban Sewa Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
8	1	02	02	04	0357	Beban Sewa Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
8	1	02	02	04	0358	Beban Sewa Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
8	1	02	02	04	0359	Beban Sewa Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
8	1	02	02	04	0360	Beban Sewa Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
8	1	02	02	04	0361	Beban Sewa Pemesinan: <i>Ship Model Preparation</i>
8	1	02	02	04	0362	Beban Sewa Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
8	1	02	02	04	0363	Beban Sewa MOB
8	1	02	02	04	0364	Beban Sewa <i>Photo and Film Equipment</i>
8	1	02	02	04	0365	Beban Sewa Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
8	1	02	02	04	0366	Beban Sewa Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
8	1	02	02	04	0367	Beban Sewa Alat Laboratorium Standar dan
8	1	02	02	04	0368	Beban Sewa Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
8	1	02	02	04	0369	Beban Sewa Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
8	1	02	02	04	0370	Beban Sewa Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
8	1	02	02	04	0371	Beban Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
8	1	02	02	04	0372	Beban Sewa Alat Laboratorium Nautis
8	1	02	02	04	0373	Beban Sewa Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
8	1	02	02	04	0374	Beban Sewa Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
8	1	02	02	04	0375	Beban Sewa Alat Laboratorium Uji Perangkat

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	02	04	0376	Beban Sewa Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
8	1	02	02	04	0404	Beban Sewa Komputer Jaringan
8	1	02	02	04	0405	Beban Sewa <i>Personal Computer</i>
8	1	02	02	04	0406	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya
8	1	02	02	04	0407	Beban Sewa Peralatan <i>Mainframe</i>
8	1	02	02	04	0408	Beban Sewa Peralatan <i>Mini Computer</i>
8	1	02	02	04	0409	Beban Sewa Peralatan <i>Personal Computer</i>
8	1	02	02	04	0410	Beban Sewa Peralatan Jaringan
8	1	02	02	04	0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya
8	1	02	02	04	0412	Beban Sewa Optik
8	1	02	02	04	0413	Beban Sewa Ukur/Instrumen
8	1	02	02	04	0414	Beban Sewa Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
8	1	02	02	04	0415	Beban Sewa Mekanik
8	1	02	02	04	0416	Beban Sewa Elektronik/ <i>Electric</i>
8	1	02	02	04	0417	Beban Sewa Manual
8	1	02	02	04	0418	Beban Sewa Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
8	1	02	02	04	0419	Beban Sewa Bor Mesin Tumbuk
8	1	02	02	04	0420	Beban Sewa Bor Mesin Putar
8	1	02	02	04	0421	Beban Sewa Alat Pengeboran Mesin Lainnya
8	1	02	02	04	0422	Beban Sewa Bangka
8	1	02	02	04	0423	Beban Sewa Pantek
8	1	02	02	04	0424	Beban Sewa Putar
8	1	02	02	04	0425	Beban Sewa Peralatan Bantu
8	1	02	02	04	0426	Beban Sewa Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
8	1	02	02	04	0427	Beban Sewa Peralatan Sumur Minyak
8	1	02	02	04	0428	Beban Sewa Sumur Pemboran
8	1	02	02	04	0429	Beban Sewa Sumur Lainnya
8	1	02	02	04	0430	Beban Sewa RIG
8	1	02	02	04	0431	Beban Sewa Produksi Lainnya
8	1	02	02	04	0432	Beban Sewa Alat Pengolahan Minyak
8	1	02	02	04	0433	Beban Sewa Alat Pengolahan Air
8	1	02	02	04	0434	Beban Sewa Alat Pengolahan <i>Steam</i>
8	1	02	02	04	0435	Beban Sewa Alat Pengolahan <i>Wax</i>
8	1	02	02	04	0436	Beban Sewa Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
8	1	02	02	04	0437	Beban Sewa Mekanik
8	1	02	02	04	0438	Beban Sewa Elektrik
8	1	02	02	04	0439	Beban Sewa Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
8	1	02	02	04	0440	Beban Sewa Perawatan Sumur
8	1	02	02	04	0441	Beban Sewa Tes Unit
8	1	02	02	04	0442	Beban Sewa Alat Bantu Produksi Lainnya
8	1	02	02	04	0443	Beban Sewa Radiasi
8	1	02	02	04	0444	Beban Sewa Suara
8	1	02	02	04	0445	Beban Sewa Alat Deteksi Lainnya
8	1	02	02	04	0446	Beban Sewa Baju Pengaman
8	1	02	02	04	0447	Beban Sewa Masker
8	1	02	02	04	0448	Beban Sewa Topi Kerja
8	1	02	02	04	0449	Beban Sewa Sabuk Pengaman
8	1	02	02	04	0450	Beban Sewa Sepatu Lapangan
8	1	02	02	04	0451	Beban Sewa Alat Pelindung Lainnya
8	1	02	02	04	0452	Beban Sewa Alat Penolong
8	1	02	02	04	0453	Beban Sewa Alat Pendukung Pencarian
8	1	02	02	04	0454	Beban Sewa Alat Kerja Bawah Air
8	1	02	02	04	0455	Beban Sewa Alat SAR Lainnya
8	1	02	02	04	0456	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
8	1	02	02	04	0457	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
8	1	02	02	04	0458	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Bantu
8	1	02	02	04	0459	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
8	1	02	02	04	0460	Beban Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
8	1	02	02	04	0461	Beban Sewa Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
8	1	02	02	04	0462	Beban Sewa Alat Kerja Penerbangan Lainnya
8	1	02	02	04	0463	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan
8	1	02	02	04	0464	Beban Sewa Alat Peraga Percontohan
8	1	02	02	04	0465	Beban Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
8	1	02	02	04	0466	Beban Sewa <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
8	1	02	02	04	0467	Beban Sewa <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
8	1	02	02	04	0468	Beban Sewa <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
8	1	02	02	04	0469	Beban Sewa <i>Solid-Solid Classifier</i>
8	1	02	02	04	0470	Beban Sewa <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
8	1	02	02	04	0471	Beban Sewa <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
8	1	02	02	04	0472	Beban Sewa <i>Ion Exchange Absorption Equipment</i>
8	1	02	02	04	0473	Beban Sewa <i>Leaching Equipment</i>
8	1	02	02	04	0474	Beban Sewa <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
8	1	02	02	04	0475	Beban Sewa <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
8	1	02	02	04	0476	Beban Sewa <i>Centrifuge for Solid Liquid</i>
8	1	02	02	04	0477	Beban Sewa <i>Liquid from Solid Expelling</i>
8	1	02	02	04	0478	Beban Sewa <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
8	1	02	02	04	0479	Beban Sewa <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
8	1	02	02	04	0480	Beban Sewa <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
8	1	02	02	04	0481	Beban Sewa <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
8	1	02	02	04	0482	Beban Sewa <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
8	1	02	02	04	0483	Beban Sewa <i>Isotope Separation Equipment</i>
8	1	02	02	04	0484	Beban Sewa <i>Transport and Storage Equipment for Liquid</i>
8	1	02	02	04	0485	Beban Sewa <i>Solid Material Handling Equipment</i>
8	1	02	02	04	0486	Beban Sewa <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
8	1	02	02	04	0487	Beban Sewa <i>Heat Generating Equipment</i>
8	1	02	02	04	0488	Beban Sewa <i>Heat Transfer Equipment</i>
8	1	02	02	04	0489	Beban Sewa <i>Mechanical Process</i>
8	1	02	02	04	0490	Beban Sewa <i>Chemical Reaction Equipment</i>
8	1	02	02	04	0491	Beban Sewa Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
8	1	02	02	04	0492	Beban Sewa Rambu Bersuar

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	02	04	0493	Beban Sewa Rambu Tidak Bersuar
8	1	02	02	04	0494	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
8	1	02	02	04	0495	Beban Sewa <i>Runway/Threshold Light</i>
8	1	02	02	04	0496	Beban Sewa <i>Visual Approach Slope Indicator</i>
8	1	02	02	04	0497	Beban Sewa <i>Approach Light</i>
8	1	02	02	04	0498	Beban Sewa <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
8	1	02	02	04	0499	Beban Sewa <i>Signal</i>
8	1	02	02	04	0500	Beban Sewa <i>Flood Lights</i>
8	1	02	02	04	0501	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
8	1	02	02	04	0502	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
8	1	02	02	04	0503	Beban Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
8	1	02	02	04	0504	Beban Sewa Peralatan Olahraga Atletik
8	1	02	02	04	0505	Beban Sewa Peralatan Permainan
8	1	02	02	04	0506	Beban Sewa Peralatan Senam
8	1	02	02	04	0507	Beban Sewa Peralatan Olahraga Air
8	1	02	02	04	0508	Beban Sewa Peralatan Olahraga Udara
8	1	02	02	04	0509	Beban Sewa Peralatan Olahraga Lainnya
8	1	02	02	05		Beban Sewa Gedung dan Bangunan
8	1	02	02	05	0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor
8	1	02	02	05	0002	Beban Sewa Bangunan Gudang
8	1	02	02	05	0003	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
8	1	02	02	05	0004	Beban Sewa Bangunan Gedung Instalasi
8	1	02	02	05	0005	Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium
8	1	02	02	05	0006	Beban Sewa Bangunan Kesehatan
8	1	02	02	05	0007	Beban Modal Bangunan Oseanarium/Observatorium
8	1	02	02	05	0008	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Ibadah
8	1	02	02	05	0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
8	1	02	02	05	0010	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
8	1	02	02	05	0011	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga
8	1	02	02	05	0012	Beban Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
8	1	02	02	05	0013	Beban Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
8	1	02	02	05	0014	Beban Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool
8	1	02	02	05	0015	Beban Sewa Bangunan Gedung Pemotong Hewan
8	1	02	02	05	0016	Beban Sewa Bangunan Gedung Perpustakaan
8	1	02	02	05	0017	Beban Sewa Bangunan Gedung Museum
8	1	02	02	05	0018	Beban Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
8	1	02	02	05	0019	Beban Sewa Bangunan Pengujian Kelaikan
8	1	02	02	05	0020	Beban Sewa Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
8	1	02	02	05	0021	Beban Sewa Bangunan Rumah Tahanan
8	1	02	02	05	0022	Beban Sewa Bangunan Gedung Krematorium
8	1	02	02	05	0023	Beban Sewa Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
8	1	02	02	05	0024	Beban Sewa Bangunan Tempat Persidangan
8	1	02	02	05	0025	Beban Sewa Bangunan Terbuka
8	1	02	02	05	0026	Beban Sewa Bangunan Penampung Sekam
8	1	02	02	05	0027	Beban Sewa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
8	1	02	02	05	0028	Beban Sewa Bangunan Industri
8	1	02	02	05	0029	Beban Sewa Bangunan Peternakan/Perikanan
8	1	02	02	05	0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	1	02	02	05	0031	Beban Sewa Bangunan Peralatan Geofisika
8	1	02	02	05	0032	Beban Sewa Bangunan Fasilitas Umum
8	1	02	02	05	0033	Beban Sewa Bangunan Parkir
8	1	02	02	05	0034	Beban Sewa Bangunan Gedung Pabrik
8	1	02	02	05	0035	Beban Sewa Bangunan Stasiun Bus
8	1	02	02	05	0036	Beban Sewa Taman
8	1	02	02	05	0037	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	1	02	02	05	0038	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I
8	1	02	02	05	0039	Beban Sewa Rumah Negara Golongan II
8	1	02	02	05	0040	Beban Sewa Rumah Negara Golongan III
8	1	02	02	05	0041	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
8	1	02	02	05	0042	Beban Sewa Asrama
8	1	02	02	05	0043	Beban Sewa Hotel
8	1	02	02	05	0044	Beban Sewa Motel
8	1	02	02	05	0045	Beban Sewa Flat/Rumah Susun
8	1	02	02	05	0046	Beban Sewa Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
8	1	02	02	05	0047	Beban Sewa Panti Asuhan
8	1	02	02	05	0048	Beban Sewa Apartemen
8	1	02	02	05	0049	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun
8	1	02	02	05	0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
8	1	02	02	05	0051	Beban Sewa Candi
8	1	02	02	05	0052	Beban Sewa Tugu
8	1	02	02	05	0053	Beban Sewa Bangunan Peninggalan
8	1	02	02	05	0054	Beban Sewa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya
8	1	02	02	05	0055	Beban Sewa Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
8	1	02	02	05	0056	Beban Sewa Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
8	1	02	02	05	0057	Beban Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi
8	1	02	02	05	0058	Beban Sewa Bangunan Menara Pengawas
8	1	02	02	05	0059	Beban Sewa Bangunan Menara Perambuan Lainnya
8	1	02	02	05	0060	Beban Sewa Tugu/Tanda Batas Administrasi
8	1	02	02	05	0061	Beban Sewa Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
8	1	02	02	05	0062	Beban Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
8	1	02	02	05	0063	Beban Sewa Pagar
8	1	02	02	05	0064	Beban Sewa Tugu/Tanda Batas Lainnya
8	1	02	02	06		Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
8	1	02	02	06	0001	Beban Sewa Jalan Nasional
8	1	02	02	06	0002	Beban Sewa Jalan Provinsi
8	1	02	02	06	0003	Beban Sewa Jalan Kabupaten
8	1	02	02	06	0004	Beban Sewa Jalan Kota
8	1	02	02	06	0005	Beban Sewa Jalan Desa
8	1	02	02	06	0006	Beban Sewa Jalan Tol
8	1	02	02	06	0007	Beban Sewa Jalan Kereta Api

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	02	06	0008	Beban Sewa Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	1	02	02	06	0009	Beban Sewa Jalan Khusus
8	1	02	02	06	0010	Beban Sewa Jalan Lainnya
8	1	02	02	06	0011	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Nasional
8	1	02	02	06	0012	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Provinsi
8	1	02	02	06	0013	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kabupaten
8	1	02	02	06	0014	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kota
8	1	02	02	06	0015	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Desa
8	1	02	02	06	0016	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Tol
8	1	02	02	06	0017	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Kereta Api
8	1	02	02	06	0018	Beban Sewa Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	1	02	02	06	0019	Beban Sewa Jembatan pada Jalan Khusus
8	1	02	02	06	0020	Beban Sewa Jembatan Penyeberangan
8	1	02	02	06	0021	Beban Sewa Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
8	1	02	02	06	0022	Beban Sewa Jembatan Pengukur
8	1	02	02	06	0023	Beban Sewa Jembatan Lainnya
8	1	02	02	06	0024	Beban Sewa Bangunan Waduk Irigasi
8	1	02	02	06	0025	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Irigasi
8	1	02	02	06	0026	Beban Sewa Bangunan Pembawa Irigasi
8	1	02	02	06	0027	Beban Sewa Bangunan Pembuang Irigasi
8	1	02	02	06	0028	Beban Sewa Bangunan Pengaman Irigasi
8	1	02	02	06	0029	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Irigasi
8	1	02	02	06	0030	Beban Sewa Bangunan Sawah Irigasi
8	1	02	02	06	0031	Beban Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya
8	1	02	02	06	0032	Beban Sewa Bangunan Waduk Pasang Surut
8	1	02	02	06	0033	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pasang Surut
8	1	02	02	06	0034	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pasang Surut
8	1	02	02	06	0035	Beban Sewa Saluran Pembuang Pasang Surut
8	1	02	02	06	0036	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pasang Surut
8	1	02	02	06	0037	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pasang Surut
8	1	02	02	06	0038	Beban Sewa Bangunan Sawah Pasang Surut
8	1	02	02	06	0039	Beban Sewa Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
8	1	02	02	06	0040	Beban Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0041	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0042	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0043	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0044	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0045	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0046	Beban Sewa Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
8	1	02	02	06	0047	Beban Sewa Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
8	1	02	02	06	0048	Beban Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
8	1	02	02	06	0049	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
8	1	02	02	06	0050	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
8	1	02	02	06	0051	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
8	1	02	02	06	0052	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
8	1	02	02	06	0053	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
8	1	02	02	06	0054	Beban Sewa Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
8	1	02	02	06	0055	Beban Sewa Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0056	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0057	Beban Sewa Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0058	Beban Sewa Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0059	Beban Sewa Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0060	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
8	1	02	02	06	0061	Beban Sewa Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
8	1	02	02	06	0062	Beban Sewa Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
8	1	02	02	06	0063	Beban Sewa Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
8	1	02	02	06	0064	Beban Sewa Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
8	1	02	02	06	0065	Beban Sewa Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
8	1	02	02	06	0066	Beban Sewa Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
8	1	02	02	06	0067	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
8	1	02	02	06	0068	Beban Sewa Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	1	02	02	06	0069	Beban Sewa Bangunan Pembawa Air Kotor
8	1	02	02	06	0070	Beban Sewa Bangunan Waduk Air Kotor
8	1	02	02	06	0071	Beban Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor
8	1	02	02	06	0072	Beban Sewa Bangunan Pengaman Air Kotor
8	1	02	02	06	0073	Beban Sewa Bangunan Pelengkap Air Kotor
8	1	02	02	06	0074	Beban Sewa Bangunan Air Kotor Lainnya
8	1	02	02	06	0075	Beban Sewa Instalasi Air Permukaan
8	1	02	02	06	0076	Beban Sewa Instalasi Air Sumber/Mata Air
8	1	02	02	06	0077	Beban Sewa Instalasi Air Tanah Dalam
8	1	02	02	06	0078	Beban Sewa Instalasi Air Tanah Dangkal
8	1	02	02	06	0079	Beban Sewa Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	1	02	02	06	0080	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Domestik
8	1	02	02	06	0081	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Industri
8	1	02	02	06	0082	Beban Sewa Instalasi Air Buangan Pertanian
8	1	02	02	06	0083	Beban Sewa Instalasi Air Kotor Lainnya
8	1	02	02	06	0084	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Organik
8	1	02	02	06	0085	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
8	1	02	02	06	0086	Beban Sewa Bangunan Penampung Sampah
8	1	02	02	06	0087	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
8	1	02	02	06	0088	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
8	1	02	02	06	0089	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
8	1	02	02	06	0090	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
8	1	02	02	06	0091	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
8	1	02	02	06	0092	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
8	1	02	02	06	0093	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
8	1	02	02	06	0094	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
8	1	02	02	06	0095	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
8	1	02	02	06	0096	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	02	06	0097	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
8	1	02	02	06	0098	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
8	1	02	02	06	0099	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
8	1	02	02	06	0100	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
8	1	02	02	06	0101	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
8	1	02	02	06	0102	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
8	1	02	02	06	0103	Beban Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
8	1	02	02	06	0104	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Induk
8	1	02	02	06	0105	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Distribusi
8	1	02	02	06	0106	Beban Sewa Instalasi Pusat Pengatur Listrik
8	1	02	02	06	0107	Beban Sewa Instalasi Gardu Listrik Lainnya
8	1	02	02	06	0108	Beban Sewa Instalasi Pertahanan di Darat
8	1	02	02	06	0109	Beban Sewa Instalasi Pertahanan Lainnya
8	1	02	02	06	0110	Beban Sewa Instalasi Gardu Gas
8	1	02	02	06	0111	Beban Sewa Instalasi Jaringan Pipa Gas
8	1	02	02	06	0112	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Gas
8	1	02	02	06	0113	Beban Sewa Instalasi Gas Lainnya
8	1	02	02	06	0114	Beban Sewa Instalasi Pengaman Penangkal Petir
8	1	02	02	06	0115	Beban Sewa Instalasi Reaktor Nuklir
8	1	02	02	06	0116	Beban Sewa Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
8	1	02	02	06	0117	Beban Sewa Instalasi Pengaman Lainnya
8	1	02	02	06	0118	Beban Sewa Instalasi Lain
8	1	02	02	06	0119	Beban Sewa Jaringan Pembawa
8	1	02	02	06	0120	Beban Sewa Jaringan Induk Distribusi
8	1	02	02	06	0121	Beban Sewa Jaringan Cabang Distribusi
8	1	02	02	06	0122	Beban Sewa Jaringan Sambungan ke Rumah
8	1	02	02	06	0123	Beban Sewa Jaringan Air Minum Lainnya
8	1	02	02	06	0124	Beban Sewa Jaringan Transmisi
8	1	02	02	06	0125	Beban Sewa Jaringan Distribusi
8	1	02	02	06	0126	Beban Sewa Jaringan Listrik Lainnya
8	1	02	02	06	0127	Beban Sewa Jaringan Telepon di atas Tanah
8	1	02	02	06	0128	Beban Sewa Jaringan Telepon di bawah Tanah
8	1	02	02	06	0129	Beban Sewa Jaringan Telepon di dalam Air
8	1	02	02	06	0130	Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara
8	1	02	02	06	0131	Beban Sewa Jaringan Telepon Lainnya
8	1	02	02	06	0132	Beban Sewa Jaringan Pipa Gas Transmisi
8	1	02	02	06	0133	Beban Sewa Jaringan Pipa Distribusi
8	1	02	02	06	0134	Beban Sewa Jaringan Pipa Dinas
8	1	02	02	06	0135	Beban Sewa Jaringan BBM
8	1	02	02	06	0136	Beban Sewa Jaringan Gas Lainnya
8	1	02	02	07		Beban Sewa Aset Tetap Lainnya
8	1	02	02	07	0001	Beban Sewa Buku Umum
8	1	02	02	07	0002	Beban Sewa Buku Filsafat
8	1	02	02	07	0003	Beban Sewa Buku Agama
8	1	02	02	07	0004	Beban Sewa Buku Ilmu Sosial
8	1	02	02	07	0005	Beban Sewa Buku Ilmu Bahasa
8	1	02	02	07	0006	Beban Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
8	1	02	02	07	0007	Beban Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
8	1	02	02	07	0008	Beban Sewa Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
8	1	02	02	07	0009	Beban Sewa Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
8	1	02	02	07	0010	Beban Sewa Serial
8	1	02	02	07	0011	Beban Sewa Buku Laporan
8	1	02	02	07	0012	Beban Sewa Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
8	1	02	02	07	0013	Beban Sewa Audio Visual
8	1	02	02	07	0014	Beban Sewa Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )
8	1	02	02	07	0015	Beban Sewa Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
8	1	02	02	07	0016	Beban Sewa Bahan Kartografi
8	1	02	02	07	0017	Beban Sewa Naskah (Manuskrip)/Asli
8	1	02	02	07	0018	Beban Sewa Lukisan dan Ukiran
8	1	02	02	07	0019	Beban Sewa Kartografi, Naskah, Dan Lukisan Lainnya
8	1	02	02	07	0020	Beban Sewa Karya Musik
8	1	02	02	07	0021	Beban Sewa Musik Lainnya
8	1	02	02	07	0022	Beban Sewa Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
8	1	02	02	07	0023	Beban Sewa Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya
8	1	02	02	07	0024	Beban Sewa <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i>
8	1	02	02	07	0025	Beban Sewa <i>Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
8	1	02	02	07	0026	Beban Sewa <i>Tarscalt</i>
8	1	02	02	07	0027	Beban Sewa <i>Tarscalt</i> Lainnya
8	1	02	02	07	0028	Beban Sewa Alat Musik
8	1	02	02	07	0029	Beban Sewa Lukisan
8	1	02	02	07	0030	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian
8	1	02	02	07	0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya
8	1	02	02	07	0032	Beban Sewa Pahatan
8	1	02	02	07	0033	Beban Sewa Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah
8	1	02	02	07	0034	Beban Sewa Barang Kerajinan
8	1	02	02	07	0035	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan
8	1	02	02	07	0036	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
8	1	02	02	07	0037	Beban Sewa Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
8	1	02	02	07	0038	Beban Sewa Hewan Pengaman
8	1	02	02	07	0039	Beban Sewa Hewan Pengangkut
8	1	02	02	07	0040	Beban Sewa Hewan Kebun Binatang
8	1	02	02	07	0041	Beban Sewa Hewan Piaraan Lainnya
8	1	02	02	07	0042	Beban Sewa Ternak Potong
8	1	02	02	07	0043	Beban Sewa Ternak Perah
8	1	02	02	07	0044	Beban Sewa Ternak Unggas
8	1	02	02	07	0045	Beban Sewa Ternak Lainnya
8	1	02	02	07	0046	Beban Sewa Hewan Lainnya
8	1	02	02	07	0047	Beban Sewa Ikan Budidaya
8	1	02	02	07	0048	Beban Sewa <i>Crustea</i> Budidaya (Udang,
8	1	02	02	07	0049	Beban Sewa <i>Mollusca</i> Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)



Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	02	07	0050	Beban Sewa <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-ubur dan Sebangsanya)
8	1	02	02	07	0051	Beban Sewa <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)
8	1	02	02	07	0052	Beban Sewa <i>Amphibia</i> Budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
8	1	02	02	07	0053	Beban Sewa <i>Reptilia</i> Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
8	1	02	02	07	0054	Beban Sewa <i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan Sebangsanya)
8	1	02	02	07	0055	Beban Sewa <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
8	1	02	02	07	0056	Beban Sewa Budidaya Biota Perairan Lainnya
8	1	02	02	07	0057	Beban Sewa Tanaman
8	1	02	02	07	0058	Beban Sewa Hewan Koleksi
8	1	02	02	07	0059	Beban Sewa Biota Perairan Koleksi
8	1	02	02	07	0060	Beban Sewa Tanaman Koleksi
8	1	02	02	07	0061	Beban Sewa Mikroba Koleksi
8	1	02	02	07	0062	Beban Sewa Batuan Koleksi
8	1	02	02	07	0063	Beban Sewa Fosil
8	1	02	02	07	0064	Beban Sewa Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
8	1	02	02	08		Beban Jasa Konsultansi Konstruksi
8	1	02	02	08	0001	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural
8	1	02	02	08	0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural
8	1	02	02	08	0003	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung
8	1	02	02	08	0004	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior
8	1	02	02	08	0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya
8	1	02	02	08	0006	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik
8	1	02	02	08	0007	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan
8	1	02	02	08	0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air
8	1	02	02	08	0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
8	1	02	02	08	0010	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan
8	1	02	02	08	0011	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi
8	1	02	02	08	0012	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi
8	1	02	02	08	0013	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya
8	1	02	02	08	0014	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan
8	1	02	02	08	0015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah
8	1	02	02	08	0016	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan <i>Landscape</i>
8	1	02	02	08	0017	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang
8	1	02	02	08	0018	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur
8	1	02	02	08	0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung
8	1	02	02	08	0020	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi
8	1	02	02	08	0021	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air
8	1	02	02	08	0022	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri
8	1	02	02	08	0023	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang
8	1	02	02	08	0024	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Prospektus Geologi dan Geofisika
8	1	02	02	08	0025	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Bawah Tanah
8	1	02	02	08	0026	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah
8	1	02	02	08	0027	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta
8	1	02	02	08	0028	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian
8	1	02	02	08	0029	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Parameter Fisikal
8	1	02	02	08	0030	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal
8	1	02	02	08	0031	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal
8	1	02	02	08	0032	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan
8	1	02	02	08	0033	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan
8	1	02	02	08	0034	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan
8	1	02	02	08	0035	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
8	1	02	02	08	0036	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan
8	1	02	02	08	0037	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya
8	1	02	02	08	0038	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial
8	1	02	02	08	0039	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Sistem Kendali Lalu Lintas
8	1	02	02	08	0040	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering) Terpadu
8	1	02	02	09		Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi
8	1	02	02	09	0001	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan
8	1	02	02	09	0002	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Transportasi
8	1	02	02	09	0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika
8	1	02	02	09	0004	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Perindustrian dan Perdagangan
8	1	02	02	09	0005	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pertambangan dan Energi
8	1	02	02	09	0006	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Keuangan
8	1	02	02	09	0007	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pendidikan
8	1	02	02	09	0008	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kesehatan
8	1	02	02	09	0009	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Kependudukan
8	1	02	02	09	0010	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Rekayasa Industri
8	1	02	02	09	0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei
8	1	02	02	09	0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik
8	1	02	02	09	0013	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen
8	1	02	02	09	0014	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus
8	1	02	02	09	0015	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	02	09	0016	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Industri Pariwisata
8	1	02	02	09	0017	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pemasaran Pariwisata
8	1	02	02	09	0018	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisata
8	1	02	02	09	0019	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata
8	1	02	02	09	0020	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata
8	1	02	02	09	0021	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata
8	1	02	02	09	0022	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata
8	1	02	02	10		Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )
8	1	02	02	10	0001	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Transportasi
8	1	02	02	10	0002	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Jalan
8	1	02	02	10	0003	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi
8	1	02	02	10	0004	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Air Minum
8	1	02	02	10	0005	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat
8	1	02	02	10	0006	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat
8	1	02	02	10	0007	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan
8	1	02	02	10	0008	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
8	1	02	02	10	0009	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Ketenagalistrikan
8	1	02	02	10	0010	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan
8	1	02	02	10	0011	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Konservasi Energi
8	1	02	02	10	0012	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Fasilitas Perkotaan
8	1	02	02	10	0013	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan
8	1	02	02	10	0014	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian
8	1	02	02	10	0015	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Kawasan
8	1	02	02	10	0016	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Pariwisata
8	1	02	02	10	0017	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Kesehatan
8	1	02	02	10	0018	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )
8	1	02	02	10	0019	Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> ) Infrastruktur Perumahan Rakyat
8	1	02	02	11		Beban Beasiswa Pendidikan PNS
8	1	02	02	11	0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1
8	1	02	02	11	0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2
8	1	02	02	11	0003	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3
8	1	02	02	12		Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan
8	1	02	02	12	0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan
8	1	02	02	12	0002	Beban Sosialisasi
8	1	02	02	12	0003	Beban Bimbingan Teknis
8	1	02	02	12	0004	Beban Diklat Kepemimpinan
8	1	02	02	13		Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN
8	1	02	02	13	0001	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	13	0002	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	13	0003	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	13	0004	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan
8	1	02	02	13	0005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Rokok
8	1	02	02	13	0006	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel
8	1	02	02	13	0007	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran
8	1	02	02	13	0008	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan
8	1	02	02	13	0009	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame
8	1	02	02	13	0010	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
8	1	02	02	13	0011	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir
8	1	02	02	13	0012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah
8	1	02	02	13	0013	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
8	1	02	02	13	0014	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	02	02	13	0015	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
8	1	02	02	13	0016	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
8	1	02	02	14		Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi
8	1	02	02	14	0001	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan
8	1	02	02	14	0002	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	1	02	02	14	0003	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
8	1	02	02	14	0004	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	02	02	14	0005	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar
8	1	02	02	14	0006	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
8	1	02	02	14	0007	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	1	02	02	14	0008	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	02	02	14	0009	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
8	1	02	02	14	0010	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair
8	1	02	02	14	0011	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	1	02	02	14	0012	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan
8	1	02	02	14	0013	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	02	02	14	0014	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah
8	1	02	02	14	0015	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau

Kode Akun						Uraian Akun
						Pertokoan
8	1	02	02	14	0016	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan
8	1	02	02	14	0017	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal
8	1	02	02	14	0018	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir
8	1	02	02	14	0019	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
8	1	02	02	14	0020	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan
8	1	02	02	14	0021	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan
8	1	02	02	14	0022	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga
8	1	02	02	14	0023	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air
8	1	02	02	14	0024	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	1	02	02	14	0025	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan
8	1	02	02	14	0026	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8	1	02	02	14	0027	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
8	1	02	02	14	0028	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan
8	1	02	02	14	0029	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Pengendalian Lalu Lintas bagi Pegawai Non
8	1	02	02	14	0030	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing
8	1	02	03			Beban Pemeliharaan
8	1	02	03	01		Beban Pemeliharaan Tanah
8	1	02	03	01	0001	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
8	1	02	03	01	0002	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
8	1	02	03	01	0003	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Industri
8	1	02	03	01	0004	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja
8	1	02	03	01	0005	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga
8	1	02	03	01	0006	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah
8	1	02	03	01	0007	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah Persil Lainnya
8	1	02	03	01	0008	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Basah
8	1	02	03	01	0009	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Kering
8	1	02	03	01	0010	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Perkebunan
8	1	02	03	01	0011	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Hutan
8	1	02	03	01	0012	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Tandus
8	1	02	03	01	0013	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput
8	1	02	03	01	0014	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Pertanian
8	1	02	03	01	0015	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Pertambangan
8	1	02	03	01	0016	Beban Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil- Tanah Non Persil Lainnya
8	1	02	03	01	0017	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga
8	1	02	03	01	0018	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir
8	1	02	03	01	0019	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang
8	1	02	03	01	0020	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
8	1	02	03	01	0021	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
8	1	02	03	01	0022	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang
8	1	02	03	01	0023	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan
8	1	02	03	01	0024	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air
8	1	02	03	01	0025	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi
8	1	02	03	01	0026	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan
8	1	02	03	01	0027	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah
8	1	02	03	01	0028	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam
8	1	02	03	01	0029	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman
8	1	02	03	01	0030	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan
8	1	02	03	01	0031	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan
8	1	02	03	01	0032	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB
8	1	02	03	01	0033	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Kampung
8	1	02	03	01	0034	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- <i>Emplasmnt</i>
8	1	02	03	01	0035	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya
8	1	02	03	02		Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
8	1	02	03	02	0001	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Tractor</i>
8	1	02	03	02	0002	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Grader</i>
8	1	02	03	02	0003	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Excavator</i>
8	1	02	03	02	0004	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Pile Driver</i>
8	1	02	03	02	0005	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Hauler</i>
8	1	02	03	02	0006	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Asphalt Equipment</i>
8	1	02	03	02	0007	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Compacting Equipment</i>
8	1	02	03	02	0008	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
8	1	02	03	02	0009	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat- <i>Loader</i>
8	1	02	03	02	0010	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat
8	1	02	03	02	0011	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses
8	1	02	03	02	0012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya
8	1	02	03	02	0013	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Dredger</i>
8	1	02	03	02	0014	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Floating Excavator</i>
8	1	02	03	02	0015	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung- <i>Amphibi Dredger</i>
8	1	02	03	02	0016	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik
8	1	02	03	02	0017	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung
8	1	02	03	02	0018	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya
8	1	02	03	02	0019	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Penarik
8	1	02	03	02	0020	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- <i>Feeder</i>
8	1	02	03	02	0021	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- <i>Compressor</i>
8	1	02	03	02	0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- <i>Electric Generating Set</i>
8	1	02	03	02	0023	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pompa
8	1	02	03	02	0024	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin Bor
8	1	02	03	02	0025	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Unit Pemeliharaan Lapangan
8	1	02	03	02	0026	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Pengolahan Air Kotor
8	1	02	03	02	0027	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	03	02	0028	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Air <i>Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
8	1	02	03	02	0029	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Mesin <i>Tatoo</i>
8	1	02	03	02	0030	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Perlengkapan Kebakaran Hutan
8	1	02	03	02	0031	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Selam
8	1	02	03	02	0032	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
8	1	02	03	02	0033	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Peralatan Intelijen
8	1	02	03	02	0034	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya
8	1	02	03	02	0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
8	1	02	03	02	0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
8	1	02	03	02	0037	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
8	1	02	03	02	0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua
8	1	02	03	02	0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
8	1	02	03	02	0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
8	1	02	03	02	0041	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur
8	1	02	03	02	0042	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel
8	1	02	03	02	0043	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
8	1	02	03	02	0044	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
8	1	02	03	02	0045	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
8	1	02	03	02	0046	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
8	1	02	03	02	0047	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
8	1	02	03	02	0048	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
8	1	02	03	02	0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
8	1	02	03	02	0050	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus
8	1	02	03	02	0051	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
8	1	02	03	02	0052	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
8	1	02	03	02	0053	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
8	1	02	03	02	0054	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
8	1	02	03	02	0055	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
8	1	02	03	02	0056	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
8	1	02	03	02	0057	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Kapal Terbang
8	1	02	03	02	0058	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Bermotor Udara-Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
8	1	02	03	02	0059	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
8	1	02	03	02	0060	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
8	1	02	03	02	0061	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
8	1	02	03	02	0062	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel <i>Service</i>
8	1	02	03	02	0063	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin
8	1	02	03	02	0064	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu
8	1	02	03	02	0065	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus
8	1	02	03	02	0066	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las
8	1	02	03	02	0067	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es
8	1	02	03	02	0068	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya
8	1	02	03	02	0069	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
8	1	02	03	02	0070	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik
8	1	02	03	02	0071	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel <i>Service</i>
8	1	02	03	02	0072	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat
8	1	02	03	02	0073	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur- Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas <i>Standard (Standard Tools)</i>
8	1	02	03	02	0074	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
8	1	02	03	02	0075	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja
8	1	02	03	02	0076	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi
8	1	02	03	02	0077	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
8	1	02	03	02	0078	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu
8	1	02	03	02	0079	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
8	1	02	03	02	0080	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam
8	1	02	03	02	0081	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
8	1	02	03	02	0082	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal
8	1	02	03	02	0083	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat
8	1	02	03	02	0084	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Alat Kepribadian
8	1	02	03	02	0085	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain
8	1	02	03	02	0086	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi
8	1	02	03	02	0087	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Oscilloscope</i>
8	1	02	03	02	0088	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Universal Tester</i>
8	1	02	03	02	0089	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding
8	1	02	03	02	0090	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	03	02	0091	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara
8	1	02	03	02	0092	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara
8	1	02	03	02	0093	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Kering
8	1	02	03	02	0094	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Bahan Bangunan
8	1	02	03	02	0095	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Takaran Lainnya
8	1	02	03	02	0096	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor
8	1	02	03	02	0097	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur- <i>Specific Set</i>
8	1	02	03	02	0098	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Keadaan Alam
8	1	02	03	02	0099	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Penglihatan
8	1	02	03	02	0100	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
8	1	02	03	02	0101	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
8	1	02	03	02	0102	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya
8	1	02	03	02	0103	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
8	1	02	03	02	0104	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak
8	1	02	03	02	0105	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen
8	1	02	03	02	0106	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
8	1	02	03	02	0107	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian
8	1	02	03	02	0108	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat <i>Processing</i>
8	1	02	03	02	0109	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen
8	1	02	03	02	0110	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan
8	1	02	03	02	0111	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan
8	1	02	03	02	0112	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya
8	1	02	03	02	0113	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik
8	1	02	03	02	0114	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah
8	1	02	03	02	0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)
8	1	02	03	02	0116	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
8	1	02	03	02	0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
8	1	02	03	02	0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel
8	1	02	03	02	0119	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu
8	1	02	03	02	0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
8	1	02	03	02	0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
8	1	02	03	02	0122	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
8	1	02	03	02	0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
8	1	02	03	02	0124	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
8	1	02	03	02	0125	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat
8	1	02	03	02	0126	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat
8	1	02	03	02	0127	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat
8	1	02	03	02	0128	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Rapat Pejabat
8	1	02	03	02	0129	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
8	1	02	03	02	0130	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangannya
8	1	02	03	02	0131	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat
8	1	02	03	02	0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio
8	1	02	03	02	0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
8	1	02	03	02	0134	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar
8	1	02	03	02	0135	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak
8	1	02	03	02	0136	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
8	1	02	03	02	0137	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya
8	1	02	03	02	0138	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
8	1	02	03	02	0139	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB
8	1	02	03	02	0140	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM
8	1	02	03	02	0141	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
8	1	02	03	02	0142	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF
8	1	02	03	02	0143	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial
8	1	02	03	02	0144	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi
8	1	02	03	02	0145	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus
8	1	02	03	02	0146	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
8	1	02	03	02	0147	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit
8	1	02	03	02	0148	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya
8	1	02	03	02	0149	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW
8	1	02	03	02	0150	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW
8	1	02	03	02	0151	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM
8	1	02	03	02	0152	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar UHF
8	1	02	03	02	0153	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar SHF
8	1	02	03	02	0154	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
8	1	02	03	02	0155	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena HF/SW
8	1	02	03	02	0156	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena

Kode Akun						Uraian Akun
						VHF/FM
8	1	02	03	02	0157	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF
8	1	02	03	02	0158	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola
8	1	02	03	02	0159	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
8	1	02	03	02	0160	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
8	1	02	03	02	0161	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
8	1	02	03	02	0162	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Translator</i> UHF/VHF
8	1	02	03	02	0163	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> FPU
8	1	02	03	02	0164	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
8	1	02	03	02	0165	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
8	1	02	03	02	0166	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan <i>Dummy Load</i>
8	1	02	03	02	0167	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> Antena
8	1	02	03	02	0168	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Switcher</i> /Menara Antena
8	1	02	03	02	0169	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Feeder</i>
8	1	02	03	02	0170	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar- <i>Humidity Control</i>
8	1	02	03	02	0171	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Program <i>Input Equipment</i>
8	1	02	03	02	0172	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF
8	1	02	03	02	0173	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar LF
8	1	02	03	02	0174	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Unit Pemancar MF+HF
8	1	02	03	02	0175	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar MF+HF
8	1	02	03	02	0176	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Pemancar dan Penerima LF
8	1	02	03	02	0177	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF
8	1	02	03	02	0178	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
8	1	02	03	02	0179	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
8	1	02	03	02	0180	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
8	1	02	03	02	0181	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
8	1	02	03	02	0182	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
8	1	02	03	02	0183	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
8	1	02	03	02	0184	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar dan Penerima HF
8	1	02	03	02	0185	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
8	1	02	03	02	0186	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
8	1	02	03	02	0187	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
8	1	02	03	02	0188	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
8	1	02	03	02	0189	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
8	1	02	03	02	0190	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
8	1	02	03	02	0191	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
8	1	02	03	02	0192	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
8	1	02	03	02	0193	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
8	1	02	03	02	0194	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Perlengkapan Radio
8	1	02	03	02	0195	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga
8	1	02	03	02	0196	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya
8	1	02	03	02	0197	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,
8	1	02	03	02	0198	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Very High Frequency Omni Range (VOR)</i>
8	1	02	03	02	0199	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- <i>Distance Measuring Equipment (DME)</i>
8	1	02	03	02	0200	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi- Radar
8	1	02	03	02	0201	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-
8	1	02	03	02	0202	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
8	1	02	03	02	0203	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
8	1	02	03	02	0204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
8	1	02	03	02	0205	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
8	1	02	03	02	0206	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana
8	1	02	03	02	0207	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
8	1	02	03	02	0208	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan

Kode Akun						Uraian Akun
						Penyakit Kandungan
8	1	02	03	02	0209	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT
8	1	02	03	02	0210	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan
8	1	02	03	02	0211	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
8	1	02	03	02	0212	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary
8	1	02	03	02	0213	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak
8	1	02	03	02	0214	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik
8	1	02	03	02	0215	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
8	1	02	03	02	0216	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
8	1	02	03	02	0217	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
8	1	02	03	02	0218	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
8	1	02	03	02	0219	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patologi Anatomi
8	1	02	03	02	0220	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah
8	1	02	03	02	0221	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi
8	1	02	03	02	0222	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir
8	1	02	03	02	0223	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
8	1	02	03	02	0224	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat
8	1	02	03	02	0225	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jiwa
8	1	02	03	02	0226	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
8	1	02	03	02	0227	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
8	1	02	03	02	0228	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU
8	1	02	03	02	0229	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung
8	1	02	03	02	0230	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Traditional Medicine
8	1	02	03	02	0231	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
8	1	02	03	02	0232	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya
8	1	02	03	02	0233	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut
8	1	02	03	02	0234	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Udara
8	1	02	03	02	0235	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian
8	1	02	03	02	0236	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga
8	1	02	03	02	0237	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya
8	1	02	03	02	0238	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
8	1	02	03	02	0239	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan
8	1	02	03	02	0240	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia
8	1	02	03	02	0241	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Model Hidrolika
8	1	02	03	02	0242	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Batuan/Geologi
8	1	02	03	02	0243	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
8	1	02	03	02	0244	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
8	1	02	03	02	0245	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
8	1	02	03	02	0246	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Cokok Tanam
8	1	02	03	02	0247	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik
8	1	02	03	02	0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum
8	1	02	03	02	0249	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi
8	1	02	03	02	0250	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia
8	1	02	03	02	0251	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi
8	1	02	03	02	0252	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi
8	1	02	03	02	0253	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi
8	1	02	03	02	0254	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film
8	1	02	03	02	0255	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan
8	1	02	03	02	0256	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi
8	1	02	03	02	0257	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika
8	1	02	03	02	0258	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrodinamika
8	1	02	03	02	0259	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Klimatologi
8	1	02	03	02	0260	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Peleburan
8	1	02	03	02	0261	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir
8	1	02	03	02	0262	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
8	1	02	03	02	0263	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola
8	1	02	03	02	0264	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metalografi
8	1	02	03	02	0265	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan
8	1	02	03	02	0266	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
8	1	02	03	02	0267	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
8	1	02	03	02	0268	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi
8	1	02	03	02	0269	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pelapisan Logam
8	1	02	03	02	0270	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
8	1	02	03	02	0271	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	03	02	0272	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Tekstil
8	1	02	03	02	0273	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
8	1	02	03	02	0274	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
8	1	02	03	02	0275	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
8	1	02	03	02	0276	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Uji Keramik
8	1	02	03	02	0277	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
8	1	02	03	02	0278	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian
8	1	02	03	02	0279	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
8	1	02	03	02	0280	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya
8	1	02	03	02	0281	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomasa
8	1	02	03	02	0282	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi
8	1	02	03	02	0283	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
8	1	02	03	02	0284	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan
8	1	02	03	02	0285	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi
8	1	02	03	02	0286	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika
8	1	02	03	02	0287	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Tambang
8	1	02	03	02	0288	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
8	1	02	03	02	0289	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri
8	1	02	03	02	0290	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
8	1	02	03	02	0291	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan
8	1	02	03	02	0292	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
8	1	02	03	02	0293	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain
8	1	02	03	02	0294	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
8	1	02	03	02	0295	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pendidikan
8	1	02	03	02	0296	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
8	1	02	03	02	0297	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Teknik Pantai
8	1	02	03	02	0298	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi
8	1	02	03	02	0299	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Populasi
8	1	02	03	02	0300	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Pengukur Gelombang
8	1	02	03	02	0301	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya
8	1	02	03	02	0302	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Analytical Instrument</i>
8	1	02	03	02	0303	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Instrument Probe/Sensor</i>
8	1	02	03	02	0304	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>General Laboratory Tool</i>
8	1	02	03	02	0305	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
8	1	02	03	02	0306	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir- <i>Laboratory Safety Equipment</i>
8	1	02	03	02	0307	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
8	1	02	03	02	0308	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
8	1	02	03	02	0309	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
8	1	02	03	02	0310	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
8	1	02	03	02	0311	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
8	1	02	03	02	0312	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
8	1	02	03	02	0313	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
8	1	02	03	02	0314	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik
8	1	02	03	02	0315	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
8	1	02	03	02	0316	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
8	1	02	03	02	0317	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
8	1	02	03	02	0318	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
8	1	02	03	02	0319	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
8	1	02	03	02	0320	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
8	1	02	03	02	0321	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan
8	1	02	03	02	0322	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK
8	1	02	03	02	0323	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
8	1	02	03	02	0324	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Radiation Detector</i>
8	1	02	03	02	0325	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Modular Counting and Scientific Electronic</i>
8	1	02	03	02	0326	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Assembly/Counting System</i>
8	1	02	03	02	0327	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-
8	1	02	03	02	0328	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>System/Power Supply</i>
8	1	02	03	02	0329	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Measuring/Testing Device</i>
8	1	02	03	02	0330	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Opto Electronics</i>
8	1	02	03	02	0331	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Accelerator</i>
8	1	02	03	02	0332	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika- <i>Reactor Experimental System</i>
8	1	02	03	02	0333	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya



Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	03	02	0334	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan
8	1	02	03	02	0335	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja
8	1	02	03	02	0336	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan
8	1	02	03	02	0337	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan- <i>Meteorological Equipment</i>
8	1	02	03	02	0338	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Sumber Radiasi
8	1	02	03	02	0339	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
8	1	02	03	02	0340	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application Equipment</i>
8	1	02	03	02	0341	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device</i>
8	1	02	03	02	0342	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Peralatan Hidrologi</i>
8	1	02	03	02	0343	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
8	1	02	03	02	0344	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
8	1	02	03	02	0345	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara
8	1	02	03	02	0346	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
8	1	02	03	02	0347	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan
8	1	02	03	02	0348	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang
8	1	02	03	02	0349	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
8	1	02	03	02	0350	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Towing Carriage</i>
8	1	02	03	02	0351	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Wave Generator and Absorber</i>
8	1	02	03	02	0352	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System</i>
8	1	02	03	02	0353	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Cavitation Tunnel</i>
8	1	02	03	02	0354	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Overhead Cranes</i>
8	1	02	03	02	0355	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Peralatan Umum</i>
8	1	02	03	02	0356	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop</i>
8	1	02	03	02	0357	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop</i>
8	1	02	03	02	0358	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Mechanical Workshop</i>
8	1	02	03	02	0359	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Precision Mechanical Workshop</i>
8	1	02	03	02	0360	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Painting Shop</i>
8	1	02	03	02	0361	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-
8	1	02	03	02	0362	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop</i>
8	1	02	03	02	0363	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-MOB</i>
8	1	02	03	02	0364	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica-Photo and Film Equipment</i>
8	1	02	03	02	0365	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium- Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica- Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya</i>
8	1	02	03	02	0366	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
8	1	02	03	02	0367	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
8	1	02	03	02	0368	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Cahaya, Optik, dan Akustik
8	1	02	03	02	0369	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan
8	1	02	03	02	0370	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
8	1	02	03	02	0371	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
8	1	02	03	02	0372	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Natus
8	1	02	03	02	0373	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
8	1	02	03	02	0374	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
8	1	02	03	02	0375	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat
8	1	02	03	02	0376	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
8	1	02	03	02	0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan
8	1	02	03	02	0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- <i>Personal Computer</i>
8	1	02	03	02	0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya
8	1	02	03	02	0407	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mainframe</i>
8	1	02	03	02	0408	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Mini Computer</i>
8	1	02	03	02	0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan <i>Personal Computer</i>
8	1	02	03	02	0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan
8	1	02	03	02	0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
8	1	02	03	02	0412	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Optik
8	1	02	03	02	0413	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Ukur/Instrumen
8	1	02	03	02	0414	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Topografi-Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
8	1	02	03	02	0415	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Mekanik
8	1	02	03	02	0416	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Elektronik/ <i>Electric</i>
8	1	02	03	02	0417	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Manual

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	03	02	0418	Beban Pemeliharaan Alat Eksplorasi-Alat Eksplorasi Geofisika-Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
8	1	02	03	02	0419	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Tumbuk
8	1	02	03	02	0420	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Bor Mesin Putar
8	1	02	03	02	0421	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Mesin-Alat Pengeboran Mesin Lainnya
8	1	02	03	02	0422	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Bangka
8	1	02	03	02	0423	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Pantek
8	1	02	03	02	0424	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat
8	1	02	03	02	0425	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Peralatan Bantu
8	1	02	03	02	0426	Beban Pemeliharaan Alat Pengeboran-Alat Pengeboran Non Mesin-Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya
8	1	02	03	02	0427	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Peralatan Sumur Minyak
8	1	02	03	02	0428	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Pemboran
8	1	02	03	02	0429	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Sumur-Sumur Lainnya
8	1	02	03	02	0430	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-RIG
8	1	02	03	02	0431	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya
8	1	02	03	02	0432	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Minyak
8	1	02	03	02	0433	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
8	1	02	03	02	0434	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Steam</i>
8	1	02	03	02	0435	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan <i>Wax</i>
8	1	02	03	02	0436	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
8	1	02	03	02	0437	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Mekanik
8	1	02	03	02	0438	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Elektrik
8	1	02	03	02	0439	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
8	1	02	03	02	0440	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Perawatan Sumur
8	1	02	03	02	0441	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi-Tes Unit
8	1	02	03	02	0442	Beban Pemeliharaan Alat Bantu Eksplorasi- Alat Bantu Produksi- Alat Bantu Produksi Lainnya
8	1	02	03	02	0443	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Radiasi
8	1	02	03	02	0444	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Suara
8	1	02	03	02	0445	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya
8	1	02	03	02	0446	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Baju Pengaman
8	1	02	03	02	0447	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Masker
8	1	02	03	02	0448	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Topi Kerja
8	1	02	03	02	0449	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sabuk Pengaman
8	1	02	03	02	0450	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sepatu Lapangan
8	1	02	03	02	0451	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya
8	1	02	03	02	0452	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Penolong
8	1	02	03	02	0453	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian
8	1	02	03	02	0454	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air
8	1	02	03	02	0455	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat SAR-Alat SAR Lainnya
8	1	02	03	02	0456	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
8	1	02	03	02	0457	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
8	1	02	03	02	0458	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas
8	1	02	03	02	0459	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
8	1	02	03	02	0460	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
8	1	02	03	02	0461	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Alat Ukur Peralatan <i>Faslektrik</i>
8	1	02	03	02	0462	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Kerja Penerbangan-Alat Kerja Penerbangan Lainnya
8	1	02	03	02	0463	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan
8	1	02	03	02	0464	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan
8	1	02	03	02	0465	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
8	1	02	03	02	0466	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid-Liquid <i>Contractor Equipment</i>
8	1	02	03	02	0467	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid <i>Mixing Equipment</i>
8	1	02	03	02	0468	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid <i>Screening Equipment</i>
8	1	02	03	02	0469	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Solid <i>Classifier</i>
8	1	02	03	02	0470	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid-Liquid <i>Mixing Equipment</i>
8	1	02	03	02	0471	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan
8	1	02	03	02	0472	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Ion <i>Exchange Absortion Equipment</i>
8	1	02	03	02	0473	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Leaching Equipment</i>
8	1	02	03	02	0474	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi- <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
8	1	02	03	02	0475	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Liquid <i>Filtering</i>
8	1	02	03	02	0476	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Centrifuge for Solid Liquid
8	1	02	03	02	0477	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Liquid from Solid <i>Expelling (Expressor)-Equipment</i>
8	1	02	03	02	0478	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid <i>Drying Equipment</i>
8	1	02	03	02	0479	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid <i>Fluidised Bed Equipment</i>
8	1	02	03	02	0480	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid <i>Separation Equipment</i>
8	1	02	03	02	0481	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Distillation Equipment</i>
8	1	02	03	02	0482	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Liquid <i>Separation Equipment</i>

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	02	03	02	0483	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Isotope Separation Equipment
8	1	02	03	02	0484	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment for Liquid
8	1	02	03	02	0485	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment
8	1	02	03	02	0486	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Size Reduction Size Balargement Equipment
8	1	02	03	02	0487	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Generating Equipment
8	1	02	03	02	0488	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Heat Transfer Equipment
8	1	02	03	02	0489	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Mechanical Process
8	1	02	03	02	0490	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment
8	1	02	03	02	0491	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Lainnya
8	1	02	03	02	0492	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar
8	1	02	03	02	0493	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar
8	1	02	03	02	0494	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
8	1	02	03	02	0495	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Runway/Threshold Light
8	1	02	03	02	0496	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Visual Approach
8	1	02	03	02	0497	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Approach Light
8	1	02	03	02	0498	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Runway Identification Light (REILS)
8	1	02	03	02	0499	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Signal
8	1	02	03	02	0500	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights
8	1	02	03	02	0501	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-
8	1	02	03	02	0502	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
8	1	02	03	02	0503	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu- Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
8	1	02	03	02	0504	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik
8	1	02	03	02	0505	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan
8	1	02	03	02	0506	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Senam
8	1	02	03	02	0507	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Air
8	1	02	03	02	0508	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Udara
8	1	02	03	02	0509	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya
8	1	02	03	03		Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
8	1	02	03	03	0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
8	1	02	03	03	0002	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang
8	1	02	03	03	0003	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar
8	1	02	03	03	0004	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
8	1	02	03	03	0005	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium
8	1	02	03	03	0006	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
8	1	02	03	03	0007	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Oseanarium/Observatorium
8	1	02	03	03	0008	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah
8	1	02	03	03	0009	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
8	1	02	03	03	0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
8	1	02	03	03	0011	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga
8	1	02	03	03	0012	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
8	1	02	03	03	0013	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
8	1	02	03	03	0014	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool
8	1	02	03	03	0015	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pemotong Hewan
8	1	02	03	03	0016	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan
8	1	02	03	03	0017	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum
8	1	02	03	03	0018	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
8	1	02	03	03	0019	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Pengujian Kelaikan
8	1	02	03	03	0020	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Lembaga Masyarakat
8	1	02	03	03	0021	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Rumah Tahanan
8	1	02	03	03	0022	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium
8	1	02	03	03	0023	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
8	1	02	03	03	0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Persidangan
8	1	02	03	03	0025	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka
8	1	02	03	03	0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Penampung Sekam
8	1	02	03	03	0027	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
8	1	02	03	03	0028	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri
8	1	02	03	03	0029	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Peternakan/Perikanan
8	1	02	03	03	0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat

Kode Akun						Uraian Akun
						Kerja Lainnya
8	1	02	03	03	0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peralatan Geofisika
8	1	02	03	03	0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum
8	1	02	03	03	0033	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir
8	1	02	03	03	0034	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik
8	1	02	03	03	0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus
8	1	02	03	03	0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman
8	1	02	03	03	0037	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	1	02	03	03	0038	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I
8	1	02	03	03	0039	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II
8	1	02	03	03	0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III
8	1	02	03	03	0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
8	1	02	03	03	0042	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama
8	1	02	03	03	0043	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Hotel
8	1	02	03	03	0044	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Motel
8	1	02	03	03	0045	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun
8	1	02	03	03	0046	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
8	1	02	03	03	0047	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Panti Asuhan
8	1	02	03	03	0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Apartemen
8	1	02	03	03	0049	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun
8	1	02	03	03	0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya
8	1	02	03	03	0051	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi
8	1	02	03	03	0052	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu
8	1	02	03	03	0053	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan
8	1	02	03	03	0054	Beban Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
8	1	02	03	03	0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai
8	1	02	03	03	0056	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
8	1	02	03	03	0057	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi
8	1	02	03	03	0058	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Pengawas
8	1	02	03	03	0059	Beban Pemeliharaan Bangunan Menara- Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya
8	1	02	03	03	0060	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi
8	1	02	03	03	0061	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
8	1	02	03	03	0062	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
8	1	02	03	03	0063	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pagar
8	1	02	03	03	0064	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya
8	1	02	03	04		Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8	1	02	03	04	0001	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Nasional
8	1	02	03	04	0002	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Provinsi
8	1	02	03	04	0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten
8	1	02	03	04	0004	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota
8	1	02	03	04	0005	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-
8	1	02	03	04	0006	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Tol
8	1	02	03	04	0007	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kereta Api
8	1	02	03	04	0008	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	1	02	03	04	0009	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Khusus
8	1	02	03	04	0010	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya
8	1	02	03	04	0011	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Nasional
8	1	02	03	04	0012	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi
8	1	02	03	04	0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten
8	1	02	03	04	0014	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kota
8	1	02	03	04	0015	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa
8	1	02	03	04	0016	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Tol
8	1	02	03	04	0017	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kereta Api
8	1	02	03	04	0018	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	1	02	03	04	0019	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus
8	1	02	03	04	0020	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Penyeberangan
8	1	02	03	04	0021	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
8	1	02	03	04	0022	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Pengukur
8	1	02	03	04	0023	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Lainnya
8	1	02	03	04	0024	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi
8	1	02	03	04	0025	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi
8	1	02	03	04	0026	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi
8	1	02	03	04	0027	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi
8	1	02	03	04	0028	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi
8	1	02	03	04	0029	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi
8	1	02	03	04	0030	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Sawah Irigasi
8	1	02	03	04	0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya
8	1	02	03	04	0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut
8	1	02	03	04	0033	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengambilan Pasang Surut
8	1	02	03	04	0034	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut
8	1	02	03	04	0035	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut
8	1	02	03	04	0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang

Kode Akun						Uraian Akun
						Surut
8	1	02	03	04	0037	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut
8	1	02	03	04	0038	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Sawah Pasang Surut
8	1	02	03	04	0039	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
8	1	02	03	04	0040	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0041	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0042	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0043	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0044	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0045	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0046	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
8	1	02	03	04	0047	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya
8	1	02	03	04	0048	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan
8	1	02	03	04	0049	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
8	1	02	03	04	0050	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
8	1	02	03	04	0051	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
8	1	02	03	04	0052	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengaman Sungai/Pantai
8	1	02	03	04	0053	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai
8	1	02	03	04	0054	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya
8	1	02	03	04	0055	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan
8	1	02	03	04	0056	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0057	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0058	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0059	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0060	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
8	1	02	03	04	0061	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
8	1	02	03	04	0062	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
8	1	02	03	04	0063	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0064	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0065	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0066	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0067	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
8	1	02	03	04	0068	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	1	02	03	04	0069	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor
8	1	02	03	04	0070	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor
8	1	02	03	04	0071	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor
8	1	02	03	04	0072	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pengaman Air Kotor
8	1	02	03	04	0073	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor
8	1	02	03	04	0074	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya
8	1	02	03	04	0075	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan
8	1	02	03	04	0076	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air
8	1	02	03	04	0077	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam
8	1	02	03	04	0078	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal
8	1	02	03	04	0079	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	1	02	03	04	0080	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik
8	1	02	03	04	0081	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri
8	1	02	03	04	0082	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Pertanian
8	1	02	03	04	0083	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya
8	1	02	03	04	0084	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik
8	1	02	03	04	0085	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
8	1	02	03	04	0086	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah
8	1	02	03	04	0087	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
8	1	02	03	04	0088	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
8	1	02	03	04	0089	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
8	1	02	03	04	0090	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
8	1	02	03	04	0091	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
8	1	02	03	04	0092	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air

Kode Akun						Uraian Akun
						(PLTA)
8	1	02	03	04	0093	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
8	1	02	03	04	0094	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
8	1	02	03	04	0095	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
8	1	02	03	04	0096	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
8	1	02	03	04	0097	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
8	1	02	03	04	0098	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
8	1	02	03	04	0099	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
8	1	02	03	04	0100	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
8	1	02	03	04	0101	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
8	1	02	03	04	0102	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
8	1	02	03	04	0103	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
8	1	02	03	04	0104	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu
8	1	02	03	04	0105	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi
8	1	02	03	04	0106	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Pusat Pengatur Listrik
8	1	02	03	04	0107	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya
8	1	02	03	04	0108	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat
8	1	02	03	04	0109	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan Lainnya
8	1	02	03	04	0110	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gardu Gas
8	1	02	03	04	0111	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Jaringan Pipa Gas
8	1	02	03	04	0112	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Pengolahan Gas
8	1	02	03	04	0113	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas- Instalasi Gas Lainnya
8	1	02	03	04	0114	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir
8	1	02	03	04	0115	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Reaktor Nuklir
8	1	02	03	04	0116	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengolahan Limbah Radioaktif
8	1	02	03	04	0117	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Lainnya
8	1	02	03	04	0118	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain- Instalasi Lain
8	1	02	03	04	0119	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa
8	1	02	03	04	0120	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi
8	1	02	03	04	0121	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi
8	1	02	03	04	0122	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah
8	1	02	03	04	0123	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya
8	1	02	03	04	0124	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi
8	1	02	03	04	0125	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi
8	1	02	03	04	0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya
8	1	02	03	04	0127	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah
8	1	02	03	04	0128	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di bawah Tanah
8	1	02	03	04	0129	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di dalam Air
8	1	02	03	04	0130	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan
8	1	02	03	04	0131	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya
8	1	02	03	04	0132	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Gas Transmisi
8	1	02	03	04	0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Distribusi
8	1	02	03	04	0134	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Pipa Dinas
8	1	02	03	04	0135	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan BBM
8	1	02	03	04	0136	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas- Jaringan Gas Lainnya
8	1	02	03	05		Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8	1	02	03	05	0001	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum
8	1	02	03	05	0002	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat
8	1	02	03	05	0003	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama
8	1	02	03	05	0004	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial
8	1	02	03	05	0005	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Bahasa
8	1	02	03	05	0006	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam
8	1	02	03	05	0007	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis
8	1	02	03	05	0008	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga
8	1	02	03	05	0009	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah
8	1	02	03	05	0010	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Serial
8	1	02	03	05	0011	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Laporan
8	1	02	03	05	0012	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya
8	1	02	03	05	0013	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Audio Visual
8	1	02	03	05	0014	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Bentuk Mikro ( <i>Microform</i> )
8	1	02	03	05	0015	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro-Terekam dan Bentuk Mikro Lainnya
8	1	02	03	05	0016	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Bahan Kartografi
8	1	02	03	05	0017	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Naskah (Manuskrip)/Asli
8	1	02	03	05	0018	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Lukisan dan Ukiran
8	1	02	03	05	0019	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Kartografi, Naskah, dan Lukisan-Kartografi, Naskah dan Lukisan Lainnya
8	1	02	03	05	0020	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Karya Musik
8	1	02	03	05	0021	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya
8	1	02	03	05	0022	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )-Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )
8	1	02	03	05	0023	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> )-Karya Grafika ( <i>Graphic Material</i> ) Lainnya
8	1	02	03	05	0024	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three</i>

Kode Akun						Uraian Akun
						<i>Dimensional Artifacts and Realita</i>
8	1	02	03	05	0025	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Three Dimensional Artifacts and Realita-Three Dimensional Artifacts and Realita</i> Lainnya
8	1	02	03	05	0026	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i>
8	1	02	03	05	0027	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- <i>Tarscalt-Tarscalt</i> Lainnya
8	1	02	03	05	0028	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik
8	1	02	03	05	0029	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Lukisan
8	1	02	03	05	0030	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian
8	1	02	03	05	0031	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya
8	1	02	03	05	0032	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Pahatan
8	1	02	03	05	0033	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah
8	1	02	03	05	0034	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan
8	1	02	03	05	0035	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya
8	1	02	03	05	0036	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Olahraga
8	1	02	03	05	0037	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya
8	1	02	03	05	0038	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengaman
8	1	02	03	05	0039	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Pengangkut
8	1	02	03	05	0040	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Kebun Binatang
8	1	02	03	05	0041	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Piaraan- Hewan Piaraan Lainnya
8	1	02	03	05	0042	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Potong
8	1	02	03	05	0043	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Perah
8	1	02	03	05	0044	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Unggas
8	1	02	03	05	0045	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak- Ternak Lainnya
8	1	02	03	05	0046	Beban Pemeliharaan Hewan-Hewan Lainnya- Hewan Lainnya
8	1	02	03	05	0047	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Ikan Bersirip ( <i>Pisces/Ikan Bersirip</i> )-Ikan Budidaya
8	1	02	03	05	0048	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Crustacea</i> (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)- <i>Crustacea</i> Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0049	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Mollusca</i> (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan
8	1	02	03	05	0050	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Coelenterata</i> (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)- <i>Coelenterata</i> Budidaya (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0051	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Echinodermata</i> (Tripang, Bulu Babi dan Sebangsanya)- <i>Echinodermata</i> Budidaya (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0052	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Amphibia</i> (Kodok dan Sebangsanya)- <i>Amphibia</i> budidaya (Kodok dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0053	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Reptilia</i> (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)- <i>Reptilia</i> Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0054	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Mammalia</i> (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)- <i>Mammalia</i> Budidaya (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)
8	1	02	03	05	0055	Beban Pemeliharaan Biota Perairan- <i>Algae</i> (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)- <i>Algae</i> Budidaya (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain yang Hidup di dalam Air)
8	1	02	03	05	0056	Beban Pemeliharaan Biota Perairan-Biota
8	1	02	03	05	0057	Beban Pemeliharaan Tanaman-Tanaman- Tanaman
8	1	02	03	05	0058	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Hewan Koleksi
8	1	02	03	05	0059	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Biota Perairan Koleksi
8	1	02	03	05	0060	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Tanaman Koleksi
8	1	02	03	05	0061	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Mikroba Koleksi
8	1	02	03	05	0062	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Batuan Koleksi
8	1	02	03	05	0063	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Fosil
8	1	02	03	05	0064	Beban Pemeliharaan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya
8	1	02	03	05	0065	Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi
8	1	02	04			Beban Perjalanan Dinas
8	1	02	04	01		Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
8	1	02	04	01	0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa
8	1	02	04	01	0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap
8	1	02	04	01	0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
8	1	02	04	01	0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
8	1	02	04	01	0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
8	1	02	04	02		Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
8	1	02	04	02	0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri
8	1	02	05	01		Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	01		Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	01	0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan
8	1	02	05	01	0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi
8	1	02	05	01	0003	Beban Beasiswa
8	1	02	05	01	0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan
8	1	02	05	01	0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
8	1	02	05	02		Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
8	1	02	05	02	0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain
8	1	02	05	02	0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat
8	1	03				Beban Bunga
8	1	03	01			Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat
8	1	03	01	01		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat
8	1	03	01	01	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah
8	1	03	01	02		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
8	1	03	01	02	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang
8	1	03	01	03		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	03	01	03	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah
8	1	03	01	04		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka
8	1	03	01	04	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang
8	1	03	01	05		Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah
8	1	03	01	05	0001	Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah
8	1	03	01	06		Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan- Jangka Panjang
8	1	03	01	06	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan- Jangka Panjang
8	1	03	02			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain
8	1	03	02	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
8	1	03	02	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek
8	1	03	03			Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
8	1	03	03	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	03	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	03	02		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Menengah
8	1	03	03	02	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN- Jangka Menengah
8	1	03	03	03		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	03	03	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada LKB-BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	03	04		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	03	04	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	03	05		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	03	05	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	03	06		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	03	06	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	03	07		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Pendek
8	1	03	03	07	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Pendek
8	1	03	03	08		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah
8	1	03	03	08	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Menengah
8	1	03	03	09		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang
8	1	03	03	09	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta- Jangka Panjang
8	1	03	04			Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
8	1	03	04	01		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	04	01	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Pendek
8	1	03	04	02		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	04	02	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah
8	1	03	04	03		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	04	03	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Panjang
8	1	03	04	04		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	04	04	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Pendek
8	1	03	04	05		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	04	05	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Menengah
8	1	03	04	06		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	04	06	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMD-Jangka Panjang
8	1	03	04	07		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek
8	1	03	04	07	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Pendek
8	1	03	04	08		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah
8	1	03	04	08	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Menengah
8	1	03	04	09		Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	04	09	0001	Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- Swasta-Jangka Panjang
8	1	03	05			Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat
8	1	03	05	01		Beban Bunga Utang kepada Masyarakat atas Obligasi
8	1	03	05	01	0001	Belanja Bunga Utang kepada masyarakat (Obligasi)
8	1	03	06			Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek
8	1	03	06	01		Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek
8	1	03	06	01	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek
8	1	03	06	02		Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Menengah
8	1	03	06	02	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Menengah
8	1	03	06	03		Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Panjang
8	1	03	06	03	0001	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Panjang
8	1	04				Beban Subsidi
8	1	04	01			Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	01	01		Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	01	01	0001	Beban Subsidi kepada BUMN
8	1	04	02			Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	02	01		Beban Subsidi kepada BUMD
8	1	04	02	01	0001	Beban Subsidi kepada BUMD



Kode Akun					Uraian Akun	
8	1	04	03		Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
8	1	04	03	01	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
8	1	04	03	01	0001	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta
8	1	04	04		Beban Subsidi kepada Koperasi	
8	1	04	04	01	Beban Subsidi kepada Koperasi	
8	1	04	04	01	0001	Beban Subsidi kepada Koperasi
8	1	05			Beban Hibah	
8	1	05	01		Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	
8	1	05	01	01	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	
8	1	05	01	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	02	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	
8	1	05	01	02	0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	01	03	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat	
8	1	05	01	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat
8	1	05	02		Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
8	1	05	02	01	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
8	1	05	02	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	02	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
8	1	05	02	02	0001	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	02	03	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
8	1	05	02	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	05	03		Beban Hibah kepada BUMN	
8	1	05	03	01	Beban Hibah Uang kepada BUMN	
8	1	05	03	01	0001	Beban Hibah Uang kepada BUMN
8	1	05	03	02	Beban Hibah Barang kepada BUMN	
8	1	05	03	02	0001	Beban Hibah Barang kepada BUMN ...
8	1	05	03	03	Beban Hibah Jasa kepada BUMN	
8	1	05	03	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada BUMN
8	1	05	04		Beban Hibah Uang kepada BUMD	
8	1	05	04	01	Beban Hibah Uang kepada BUMD	
8	1	05	04	01	0001	Beban Hibah Uang kepada BUMD
8	1	05	04	02	Beban Hibah Barang kepada BUMD	
8	1	05	04	02	0001	Beban Hibah Barang kepada BUMD
8	1	05	04	03	Beban Hibah Jasa kepada BUMD	
8	1	05	04	03	0001	Beban Hibah Jasa kepada BUMD
8	1	05	05		Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
8	1	05	05	01	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	
8	1	05	05	01	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01	0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	01	0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5	1	05	05	02	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	
5	1	05	05	02	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	02	0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	02	0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
5	1	05	05	03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	
5	1	05	05	03	0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	05	05	03	0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	05	05	03	0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
5	1	05	05	04	Beban Hibah kepada Koperasi	
5	1	05	05	04	0001	Beban Hibah Uang kepada Koperasi
5	1	05	05	04	0002	Beban Hibah Barang kepada Koperasi
5	1	05	05	04	0003	Beban Hibah Jasa kepada Koperasi
8	1	05	06		Beban Hibah Dana BOS	
8	1	05	06	01	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	
8	1	05	06	01	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri
8	1	05	06	02	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	
8	1	05	06	02	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta
8	1	05	06	03	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	
8	1	05	06	03	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta
8	1	05	06	04	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	
8	1	05	06	04	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta
8	1	05	07		Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
8	1	05	07	01	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
8	1	05	07	01	0001	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
8	1	06			Beban Bantuan Sosial	
8	1	06	01		Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	
8	1	06	01	01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	
8	1	06	01	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	01	02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	
8	1	06	01	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
8	1	06	02		Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	
8	1	06	02	01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	
8	1	06	02	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
8	1	06	02	02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	
8	1	06	02	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
8	1	06	03		Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	
8	1	06	03	01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	
8	1	06	03	01	0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	03	02	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	
8	1	06	03	02	0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
8	1	06	04		Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan	

Kode Akun					Uraian Akun
					dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	01	0001 Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	02	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	06	04	02	0001 Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
8	1	07			Beban Penyisihan Piutang
8	1	07	01		Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah
8	1	07	01	01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	07	01	01	0001 Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil
8	1	07	01	01	0002 Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep
8	1	07	01	01	0003 Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus
8	1	07	01	01	0004 Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
8	1	07	01	01	0005 Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Bus-Bus
8	1	07	01	01	0006 Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
8	1	07	01	01	0007 Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil
8	1	07	01	01	0008 Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
8	1	07	01	01	0009 Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
8	1	07	01	01	0010 Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua
8	1	07	01	01	0011 Beban Penyisihan Piutang PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga
8	1	07	01	01	0012 Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
8	1	07	01	01	0013 Beban Penyisihan Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
8	1	07	01	01	0014 Beban Penyisihan Piutang PKB-Mobil Roda Tiga
8	1	07	01	02	Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
8	1	07	01	02	0001 Beban Penyisihan BBNKB-Mobil Penumpang- Sedan
8	1	07	01	02	0002 Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
8	1	07	01	02	0003 Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Minibus
8	1	07	01	02	0004 Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Bus- <i>Microbus</i>
8	1	07	01	02	0005 Beban Penyisihan BBNKB-Mobil Bus-Bus
8	1	07	01	02	0006 Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Pick Up</i>
8	1	07	01	02	0007 Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Light Truck</i>
8	1	07	01	02	0008 Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Truck</i>
8	1	07	01	02	0009 Beban Penyisihan BBNKB-Mobil Barang/Beban- <i>Blind Van</i>
8	1	07	01	02	0010 Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
8	1	07	01	02	0011 Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
8	1	07	01	02	0012 Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
8	1	07	01	02	0013 Beban Penyisihan BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
8	1	07	01	02	0014 Beban Penyisihan Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga
8	1	07	01	03	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
8	1	07	01	03	0001 Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin
8	1	07	01	03	0002 Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar
8	1	07	01	03	0003 Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas
8	1	07	01	03	0004 Beban Penyisihan Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya
8	1	07	01	04	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
8	1	07	01	04	0001 Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan
8	1	07	01	05	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok
8	1	07	01	05	0001 Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok
8	1	07	01	06	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel
8	1	07	01	06	0001 Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel
8	1	07	01	06	0002 Beban Penyisihan Piutang Pajak Motel
8	1	07	01	06	0003 Beban Penyisihan Piutang Pajak Losmen
8	1	07	01	06	0004 Beban Penyisihan Piutang Pajak Gubuk Pariwisata
8	1	07	01	06	0005 Beban Penyisihan Piutang Pajak Wisma Pariwisata
8	1	07	01	06	0006 Beban Penyisihan Piutang Pajak Pesanggrahan
8	1	07	01	06	0007 Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
8	1	07	01	06	0008 Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
8	1	07	01	07	Beban Penyisihan Pajak Restoran
8	1	07	01	07	0001 Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya
8	1	07	01	07	0002 Beban Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
8	1	07	01	07	0003 Beban Penyisihan Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
8	1	07	01	07	0004 Beban Penyisihan Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya
8	1	07	01	07	0005 Beban Penyisihan Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya
8	1	07	01	07	0006 Beban Penyisihan Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya
8	1	07	01	07	0007 Beban Penyisihan Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
8	1	07	01	08	Beban Penyisihan Pajak Hiburan
8	1	07	01	08	0001 Beban Penyisihan Piutang Pajak Tontonan Film
8	1	07	01	08	0002 Beban Penyisihan Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
8	1	07	01	08	0003 Beban Penyisihan Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
8	1	07	01	08	0004 Beban Penyisihan Piutang Pajak Pameran
8	1	07	01	08	0005 Beban Penyisihan Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
8	1	07	01	08	0006 Beban Penyisihan Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
8	1	07	01	08	0007 Beban Penyisihan Piutang Pajak Permainan Biliar dan <i>Bowling</i>
8	1	07	01	08	0008 Beban Penyisihan Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
8	1	07	01	08	0009 Beban Penyisihan Piutang Pajak Panti Pijat,
8	1	07	01	08	010 Beban Penyisihan Piutang Pajak Pertandingan Olahraga
8	1	07	01	09	Beban Penyisihan Pajak Reklame
8	1	07	01	09	0001 Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i> /Megatron
8	1	07	01	09	0002 Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Kain
8	1	07	01	09	0003 Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker
8	1	07	01	09	0004 Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Selebaran
8	1	07	01	09	0005 Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Berjalan
8	1	07	01	09	0006 Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Udara
8	1	07	01	09	0007 Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Apung
8	1	07	01	09	0008 Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Suara
8	1	07	01	09	0009 Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Film/ <i>Slide</i>
8	1	07	01	09	0010 Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Peragaan
8	1	07	01	10	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	07	01	10	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri
8	1	07	01	10	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
8	1	07	01	11		Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir
8	1	07	01	11	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir
8	1	07	01	12		Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
8	1	07	01	12	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah
8	1	07	01	13		Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
8	1	07	01	13	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet
8	1	07	01	14		Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	07	01	14	0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Asbes
8	1	07	01	14	0002	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Tulis
8	1	07	01	14	0003	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Setengah Permata
8	1	07	01	14	0004	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Kapur
8	1	07	01	14	0005	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Apung
8	1	07	01	14	0006	Beban Penyisihan Piutang Pajak Batu Permata
8	1	07	01	14	0007	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bentonit
8	1	07	01	14	0008	Beban Penyisihan Piutang Pajak Dolomit
8	1	07	01	14	0009	Beban Penyisihan Piutang Pajak Felspar
8	1	07	01	14	0010	Beban Penyisihan Piutang Pajak Garam Batu (Halite)
8	1	07	01	14	0011	Beban Penyisihan Piutang Pajak Grafit
8	1	07	01	14	0012	Beban Penyisihan Piutang Pajak Granit/Andesit
8	1	07	01	14	0013	Beban Penyisihan Piutang Pajak Gips
8	1	07	01	14	0014	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kalsit
8	1	07	01	14	0015	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kaolin
8	1	07	01	14	0016	Beban Penyisihan Piutang Pajak Leusit
8	1	07	01	14	0017	Beban Penyisihan Piutang Pajak Magnesit
8	1	07	01	14	0018	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mika
8	1	07	01	14	0019	Beban Penyisihan Piutang Pajak Marmer
8	1	07	01	14	0020	Beban Penyisihan Piutang Pajak Nitrat
8	1	07	01	14	0021	Beban Penyisihan Piutang Pajak Opsidien
8	1	07	01	14	0022	Beban Penyisihan Piutang Pajak Oker
8	1	07	01	14	0023	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pasir dan Kerikil
8	1	07	01	14	0024	Beban Penyisihan Piutang Pajak Pasir Kuarsa
8	1	07	01	14	0025	Beban Penyisihan Piutang Pajak Perlit
8	1	07	01	14	0026	Beban Penyisihan Piutang Pajak Fosfat
8	1	07	01	14	0027	Beban Penyisihan Piutang Pajak Talk
8	1	07	01	14	0028	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah Serap ( <i>Fullers earth</i> )
8	1	07	01	14	0029	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah Diatome
8	1	07	01	14	0030	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tanah Liat
8	1	07	01	14	0031	Beban Penyisihan Piutang Pajak Tawas (Alum)
8	1	07	01	14	0032	Beban Penyisihan Piutang Pajak Trass
8	1	07	01	14	0033	Beban Penyisihan Piutang Pajak Yarosif
8	1	07	01	14	0034	Beban Penyisihan Piutang Pajak Zeolit
8	1	07	01	14	0035	Beban Penyisihan Piutang Pajak Basal
8	1	07	01	14	0036	Beban Penyisihan Piutang Pajak Trakit
8	1	07	01	14	0037	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
8	1	07	01	15		Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
8	1	07	01	15	0001	Beban Penyisihan Piutang PBBP2
8	1	07	01	16		Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8	1	07	01	16	0001	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak
8	1	07	01	16	0002	Beban Penyisihan Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru
8	1	07	02			Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
8	1	07	02	01		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum
8	1	07	02	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
8	1	07	02	01	0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	1	07	02	01	0003	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
8	1	07	02	01	0004	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
8	1	07	02	01	0005	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
8	1	07	02	01	0006	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8	1	07	02	01	0007	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
8	1	07	02	01	0008	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
8	1	07	02	01	0009	Beban Penyisihan Piutang Retribusi
8	1	07	02	01	0010	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
8	1	07	02	01	0011	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
8	1	07	02	01	0012	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
8	1	07	02	01	0013	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	1	07	02	02		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha
8	1	07	02	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
8	1	07	02	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
8	1	07	02	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
8	1	07	02	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal
8	1	07	02	02	0005	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
8	1	07	02	02	0006	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
8	1	07	02	02	0007	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
8	1	07	02	02	0008	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
8	1	07	02	02	0009	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
8	1	07	02	02	0010	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penyeberangan di Air
8	1	07	02	02	0011	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
8	1	07	02	03		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu
8	1	07	02	03	0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
8	1	07	02	03	0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
8	1	07	02	03	0003	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
8	1	07	02	03	0004	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
8	1	07	02	03	0005	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
8	1	07	02	03	0006	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
8	1	07	03			Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan
8	1	07	03	01		Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	07	03	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN
8	1	07	03	02		Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
8	1	07	03	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
8	1	07	03	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
8	1	07	03	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
8	1	07	03	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Limbah)
8	1	07	03	02	0005	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Sanitasi)
8	1	07	03	01		Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
8	1	07	03	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
8	1	07	04			Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
8	1	07	04	01		Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Tanah
8	1	07	04	01	0002	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin
8	1	07	04	01	0003	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan
8	1	07	04	01	0004	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8	1	07	04	01	0005	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya
8	1	07	04	01	0006	Beban Penyisihan Piutang Hasil Penjualan Aset Lainnya
8	1	07	04	02		Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Tanah
8	1	07	04	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Peralatan dan Mesin
8	1	07	04	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Gedung dan Bangunan
8	1	07	04	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8	1	07	04	02	0005	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya
8	1	07	04	02	0006	Beban Penyisihan Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar Aset Lainnya
8	1	07	04	03		Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	03	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD
8	1	07	04	03	0002	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD
8	1	07	04	03	0003	Beban Penyisihan Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah
8	1	07	04	03	0004	Beban Penyisihan Piutang Hasil dari Bangun Serah Guna
8	1	07	04	03	0005	Beban Penyisihan Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
8	1	07	04	04		Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
8	1	07	04	04	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah
8	1	07	04	05		Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro
8	1	07	04	05	0001	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah
8	1	07	04	05	0002	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara
8	1	07	04	05	0003	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan
8	1	07	04	05	0004	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS
8	1	07	04	05	0005	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP
8	1	07	04	06		Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	06	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	07		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga
8	1	07	04	07	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah
8	1	07	04	08		Beban Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
8	1	07	04	08	0001	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti
8	1	07	04	08	0002	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
8	1	07	04	09		Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
8	1	07	04	09	0001	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
8	1	07	04	10		Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
8	1	07	04	10	0001	Beban Penyisihan Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing
8	1	07	04	11		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
8	1	07	04	11	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
8	1	07	04	12		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah
8	1	07	04	12	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
8	1	07	04	12	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
8	1	07	04	12	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
8	1	07	04	12	0004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
8	1	07	04	12	0005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
8	1	07	04	12	0006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
8	1	07	04	12	0007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran
8	1	07	04	12	0008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan
8	1	07	04	12	0009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame
8	1	07	04	12	0010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
8	1	07	04	12	0011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
8	1	07	04	12	0012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
8	1	07	04	12	0013	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
8	1	07	04	12	0014	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8	1	07	04	12	0015	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
8	1	07	04	12	0016	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8	1	07	04	13		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah
8	1	07	04	13	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
8	1	07	04	13	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
8	1	07	04	13	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
8	1	07	04	14		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
8	1	07	04	14	0001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa
8	1	07	04	15		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian
8	1	07	04	15	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21
8	1	07	04	15	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan

Kode Akun					Uraian Akun	
					Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	
8	1	07	04	15	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan
8	1	07	04	15	0004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas
8	1	07	04	15	0005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
8	1	07	04	15	0006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)
8	1	07	04	15	0007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
8	1	07	04	16		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
8	1	07	04	16	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD
8	1	07	04	17		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
8	1	07	04	17	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda
8	1	07	04	17	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
8	1	07	04	18		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
8	1	07	04	18	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
8	1	07	04	19		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	19	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
8	1	07	04	20		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
8	1	07	04	20	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan ( <i>Inkracht</i> )
8	1	07	04	21		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
8	1	07	04	21	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
8	1	07	04	22		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
8	1	07	04	22	0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Zakat
8	1	07	04	22	0002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Infaq
8	1	07	04	22	0003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Shadaqah
8	1	07	04	22	0004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Wakaf
8	1	07	05			Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
8	1	07	05	01		Beban Penyisihan Piutang Dana Perimbangan
8	1	07	05	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH-DBH PBB
8	1	07	05	01	0002	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21
8	1	07	05	01	0003	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN
8	1	07	05	01	0004	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT
8	1	07	05	01	0005	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi
8	1	07	05	01	0006	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi
8	1	07	05	01	0007	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
8	1	07	05	01	0008	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i>
8	1	07	05	01	0009	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Royalty</i>
8	1	07	05	01	0010	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH
8	1	07	05	01	0011	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IUPH
8	1	07	05	01	0012	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR
8	1	07	05	01	0013	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan
8	1	07	05	01	0014	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU
8	1	07	05	01	0015	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan
8	1	07	05	01	0016	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
8	1	07	05	01	0017	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAU-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
8	1	07	05	01	0018	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD
8	1	07	05	01	0019	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SD
8	1	07	05	01	0020	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMP
8	1	07	05	01	0021	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SMA
8	1	07	05	01	0022	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SLB
8	1	07	05	01	0023	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- SKB
8	1	07	05	01	0024	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi- SD
8	1	07	05	01	0025	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi- SMP
8	1	07	05	01	0026	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi- SMA
8	1	07	05	01	0027	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK
8	1	07	05	01	0028	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah
8	1	07	05	01	0029	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Gedung Olahraga
8	1	07	05	01	0030	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar
8	1	07	05	01	0031	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan
8	1	07	05	01	0032	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian
8	1	07	05	01	0033	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB
8	1	07	05	01	0034	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>
8	1	07	05	01	0035	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
8	1	07	05	01	0036	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata
8	1	07	05	01	0037	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Pembangunan RS Pratama
8	1	07	05	01	0038	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Puskesmas Pariwisata
8	1	07	05	01	0039	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan
8	1	07	05	01	0040	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)
8	1	07	05	01	0041	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas
8	1	07	05	01	0042	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB
8	1	07	05	01	0043	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-

Kode Akun						Uraian Akun
						Penurunan <i>Stunting</i> (KB)
8	1	07	05	01	0044	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya
8	1	07	05	01	0045	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya
8	1	07	05	01	0046	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus
8	1	07	05	01	0047	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM
8	1	07	05	01	0048	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian
8	1	07	05	01	0049	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan
8	1	07	05	01	0050	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pariwisata- Penugasan
8	1	07	05	01	0051	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan
8	1	07	05	01	0052	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Jalan
8	1	07	05	01	0053	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan- Keselamatan Jalan
8	1	07	05	01	0054	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
8	1	07	05	01	0055	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Afirmasi
8	1	07	05	01	0056	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan
8	1	07	05	01	0057	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
8	1	07	05	01	0058	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Afirmasi
8	1	07	05	01	0059	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan
8	1	07	05	01	0060	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan
8	1	07	05	01	0061	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Pasar-Penugasan
8	1	07	05	01	0062	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup
8	1	07	05	01	0063	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan
8	1	07	05	01	0064	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi
8	1	07	05	01	0065	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Afirmasi
8	1	07	05	01	0066	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Transportasi Laut- Penugasan
8	1	07	05	01	0067	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Fisik-Bidang Sosial-Reguler
8	1	07	05	01	0068	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler
8	1	07	05	01	0069	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer
8	1	07	05	01	0070	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOS Kinerja
8	1	07	05	01	0071	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
8	1	07	05	01	0072	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
8	1	07	05	01	0073	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
8	1	07	05	01	0074	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
8	1	07	05	01	0075	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan
8	1	07	05	01	0076	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya-Museum
8	1	07	05	01	0077	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
8	1	07	05	01	0078	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOKKB)-
8	1	07	05	01	0079	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
8	1	07	05	01	0080	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas
8	1	07	05	01	0081	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan
8	1	07	05	01	0082	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
8	1	07	05	01	0083	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)
8	1	07	05	01	0084	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
8	1	07	05	01	0085	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata
8	1	07	05	01	0086	Beban Penyisihan Piutang Dana Transfer Umum-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)
8	1	07	05	02		Beban Penyisihan Piutang Dana Insentif Daerah
8	1	07	05	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Insentif Daerah
8	1	07	05	03		Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
8	1	07	05	03	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua
8	1	07	05	03	0002	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat
8	1	07	05	03	0003	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh
8	1	07	05	03	0004	Beban Penyisihan Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua
8	1	07	05	03	0005	Beban Penyisihan Piutang Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat
8	1	07	05	04		Beban Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan
8	1	07	05	04	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
8	1	07	05	05		Beban Penyisihan Piutang Dana Desa
8	1	07	05	05	0001	Beban Penyisihan Piutang Dana Desa
8	1	07	06			Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah
8	1	07	06	01		Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil
8	1	07	06	01	0001	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak
8	1	07	06	02		Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
8	1	07	06	02	0001	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
8	1	07	06	02	0002	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
8	1	07	06	02	0003	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
8	1	07	06	02	0004	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
8	1	07	07			Beban Penyisihan Piutang Lainnya
8	1	07	07	01		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Kode Akun						Uraian Akun
8	1	07	07	01	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Pusat
8	1	07	07	01	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam Proyek Pembangunan kepada Pemerintah Daerah/Lainnya
8	1	07	07	01	0003	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen kepada BUMD
8	1	07	07	01	0004	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi Non Permanen Lainnya kepada BUMN
8	1	07	07	01	0005	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi
8	1	07	07	01	0006	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat
8	1	07	07	01	0007	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD
8	1	07	07	02		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang
8	1	07	07	02	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat
8	1	07	07	02	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
8	1	07	07	02	0003	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD
8	1	07	07	02	0004	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMN
8	1	07	07	02	0005	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Koperasi
8	1	07	07	02	0006	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
8	1	07	07	02	0007	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang melalui BLUD
8	1	07	07	03		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
8	1	07	07	03	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III
8	1	07	07	03	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
8	1	07	07	04		Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
8	1	07	07	04	0001	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
8	1	07	07	04	0002	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
8	1	07	07	05		Beban Penyisihan Uang Muka
8	1	07	07	05	0001	Beban Penyisihan Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
8	2					Beban Penyusutan dan Amortisasi
8	2	01				Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
8	2	01	01			Beban Penyusutan Alat Besar
8	2	01	01	01		Beban Penyusutan Alat Besar Darat
8	2	01	01	01	0001	Beban Penyusutan <i>Tractor</i>
8	2	01	01	01	0002	Beban Penyusutan <i>Grader</i>
8	2	01	01	01	0003	Beban Penyusutan <i>Excavator</i>
8	2	01	01	01	0004	Beban Penyusutan <i>Pile Driver</i>
8	2	01	01	01	0005	Beban Penyusutan <i>Hauler</i>
8	2	01	01	01	0006	Beban Penyusutan <i>Asphalt Equipment</i>
8	2	01	01	01	0007	Beban Penyusutan <i>Compacting Equipment</i>
8	2	01	01	01	0008	Beban Penyusutan <i>Aggregate and Concrete Equipment</i>
8	2	01	01	01	0009	Beban Penyusutan <i>Loader</i>
8	2	01	01	01	0010	Beban Penyusutan Alat Pengangkat
8	2	01	01	01	0011	Beban Penyusutan Mesin Proses
8	2	01	01	01	0012	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya
8	2	01	01	02		Beban Penyusutan Alat Besar Apung
8	2	01	01	02	0001	Beban Penyusutan <i>Dredger</i>
8	2	01	01	02	0002	Beban Penyusutan <i>Floating Excavator</i>
8	2	01	01	02	0003	Beban Penyusutan <i>Amphibi Dredger</i>
8	2	01	01	02	0004	Beban Penyusutan Kapal Tarik
8	2	01	01	02	0005	Beban Penyusutan Mesin Proses Apung
8	2	01	01	02	0006	Beban Penyusutan Alat Besar Apung Lainnya
8	2	01	01	03		Beban Penyusutan Alat Bantu
8	2	01	01	03	0001	Beban Penyusutan Alat Penarik
8	2	01	01	03	0002	Beban Penyusutan <i>Feeder</i>
8	2	01	01	03	0003	Beban Penyusutan <i>Compressor</i>
8	2	01	01	03	0004	Beban Penyusutan <i>Electric Generating Set</i>
8	2	01	01	03	0005	Beban Penyusutan Pompa
8	2	01	01	03	0006	Beban Penyusutan Mesin Bor
8	2	01	01	03	0007	Beban Penyusutan Unit Pemeliharaan Lapangan
8	2	01	01	03	0008	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air Kotor
8	2	01	01	03	0009	Beban Penyusutan Pembangkit Uap Air Panas/ <i>Steam Generator</i>
8	2	01	01	03	0010	Beban Penyusutan <i>Air Port Maintenance Equipment</i> /Alat Bantu Penerbangan
8	2	01	01	03	0011	Beban Penyusutan Mesin <i>Tattoo</i>
8	2	01	01	03	0012	Beban Penyusutan Perlengkapan Kebakaran Hutan
8	2	01	01	03	0013	Beban Penyusutan Peralatan Selam
8	2	01	01	03	0014	Beban Penyusutan Peralatan SAR <i>Mountenering</i>
8	2	01	01	03	0015	Beban Penyusutan Peralatan Intelijen
8	2	01	01	03	0016	Beban Penyusutan Alat Bantu Lainnya
8	2	01	02			Beban Penyusutan Alat Angkutan
8	2	01	02	01		Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
8	2	01	02	01	0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
8	2	01	02	01	0002	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang
8	2	01	02	01	0003	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
8	2	01	02	01	0004	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
8	2	01	02	01	0005	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
8	2	01	02	01	0006	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus
8	2	01	02	01	0007	Beban Penyusutan Kendaraan Tempur
8	2	01	02	01	0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel
8	2	01	02	01	0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
8	2	01	02	02		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
8	2	01	02	02	0001	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang
8	2	01	02	02	0002	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Penumpang
8	2	01	02	02	0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor
8	2	01	02	02	0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya
8	2	01	02	03		Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor
8	2	01	02	03	0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang
8	2	01	02	03	0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang
8	2	01	02	03	0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus

Kode Akun						Uraian Akun
8	2	01	02	03	0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Militer
8	2	01	02	03	0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya
8	2	01	02	04		Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor
8	2	01	02	04	0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang
8	2	01	02	04	0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang
8	2	01	02	04	0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus
8	2	01	02	04	0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya
8	2	01	02	05		Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara
8	2	01	02	05	0001	Beban Penyusutan Kapal Terbang
8	2	01	02	05	0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya
8	2	01	03			Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur
8	2	01	03	01		Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
8	2	01	03	01	0001	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi
8	2	01	03	01	0002	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang <i>Transportable</i> (Berpindah)
8	2	01	03	01	0003	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik
8	2	01	03	01	0004	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel <i>Service</i>
8	2	01	03	01	0005	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat Bermesin
8	2	01	03	01	0006	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu
8	2	01	03	01	0007	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Khusus
8	2	01	03	01	0008	Beban Penyusutan Peralatan Las
8	2	01	03	01	0009	Beban Penyusutan Perkakas Pabrik Es
8	2	01	03	01	0010	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin Lainnya
8	2	01	03	02		Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
8	2	01	03	02	0001	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
8	2	01	03	02	0002	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik
8	2	01	03	02	0003	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel <i>Service</i>
8	2	01	03	02	0004	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat
8	2	01	03	02	0005	Beban Penyusutan Perkakas Standar ( <i>Standard Tools</i> )
8	2	01	03	02	0006	Beban Penyusutan Perkakas Khusus ( <i>Special Tools</i> )
8	2	01	03	02	0007	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja
8	2	01	03	02	0008	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi
8	2	01	03	02	0009	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Kayu
8	2	01	03	02	0010	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Kayu
8	2	01	03	02	0011	Beban Penyusutan Peralatan Ukur, Gip, dan <i>Feeting</i>
8	2	01	03	02	0012	Beban Penyusutan Peralatan Bengkel Khusus Peladam
8	2	01	03	02	0013	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya
8	2	01	03	03		Beban Penyusutan Alat Ukur
8	2	01	03	03	0001	Beban Penyusutan Alat Ukur Universal
8	2	01	03	03	0002	Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Inteligensia
8	2	01	03	03	0003	Beban Penyusutan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
8	2	01	03	03	0004	Beban Penyusutan Alat Ukur/Tes Klinis Lain
8	2	01	03	03	0005	Beban Penyusutan Alat Kalibrasi
8	2	01	03	03	0006	Beban Penyusutan <i>Oscilloscope</i>
8	2	01	03	03	0007	Beban Penyusutan <i>Universal Tester</i>
8	2	01	03	03	0008	Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding
8	2	01	03	03	0009	Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain
8	2	01	03	03	0010	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara
8	2	01	03	03	0011	Beban Penyusutan Anak Timbangan/Biara
8	2	01	03	03	0012	Beban Penyusutan Takaran Kering
8	2	01	03	03	0013	Beban Penyusutan Takaran Bahan Bangunan
8	2	01	03	03	0014	Beban Penyusutan Takaran Lainnya
8	2	01	03	03	0015	Beban Penyusutan Alat Penguji Kendaraan Bermotor
8	2	01	03	03	0016	Beban Penyusutan <i>Specific Set</i>
8	2	01	03	03	0017	Beban Penyusutan Alat Pengukur Keadaan Alam
8	2	01	03	03	0018	Beban Penyusutan Alat Pengukur Penglihatan
8	2	01	03	03	0019	Beban Penyusutan Alat Pengukur Ketepatan dan Koreksi Waktu
8	2	01	03	03	0020	Beban Penyusutan Alat Ukur <i>Instrument Workshop</i>
8	2	01	03	03	0021	Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya
8	2	01	04			Beban Penyusutan Alat Pertanian
8	2	01	04	01		Beban Penyusutan Alat Pengolahan
8	2	01	04	01	0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
8	2	01	04	01	0002	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak
8	2	01	04	01	0003	Beban Penyusutan Alat Panen
8	2	01	04	01	0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian
8	2	01	04	01	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian
8	2	01	04	01	0006	Beban Penyusutan Alat <i>Processing</i>
8	2	01	04	01	0007	Beban Penyusutan Alat Pasca Panen
8	2	01	04	01	0008	Beban Penyusutan Alat Produksi Perikanan
8	2	01	04	01	0009	Beban Penyusutan Alat-Alat Peternakan
8	2	01	04	01	010	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Lainnya
8	2	01	05			Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
8	2	01	05	01		Beban Penyusutan Alat Kantor
8	2	01	05	01	0001	Beban Penyusutan Mesin Ketik
8	2	01	05	01	0002	Beban Penyusutan Mesin Hitung/Mesin Jumlah
8	2	01	05	01	0003	Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)
8	2	01	05	01	0004	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
8	2	01	05	01	0005	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya
8	2	01	05	02		Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
8	2	01	05	02	0001	Beban Penyusutan Mebel
8	2	01	05	02	0002	Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu
8	2	01	05	02	0003	Beban Penyusutan Alat Pembersih
8	2	01	05	02	0004	Beban Penyusutan Alat Pendingin
8	2	01	05	02	0005	Beban Penyusutan Alat Dapur
8	2	01	05	02	0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya ( <i>Home Use</i> )
8	2	01	05	02	0007	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran
8	2	01	05	03		Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
8	2	01	05	03	0001	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat
8	2	01	05	03	0002	Beban Penyusutan Meja Rapat Pejabat
8	2	01	05	03	0003	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat
8	2	01	05	03	0004	Beban Penyusutan Kursi Rapat Pejabat



Kode Akun						Uraian Akun
8	2	01	05	03	0005	Beban Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
8	2	01	05	03	0006	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruang Pejabat
8	2	01	05	03	0007	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat
8	2	01	06			Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
8	2	01	06	01		Beban Penyusutan Alat Studio
8	2	01	06	01	0001	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio
8	2	01	06	01	0002	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film
8	2	01	06	01	0003	Beban Penyusutan Peralatan Studio Gambar
8	2	01	06	01	0004	Beban Penyusutan Peralatan Cetak
8	2	01	06	01	0005	Beban Penyusutan Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah
8	2	01	06	01	0006	Beban Penyusutan Alat Studio Lainnya
8	2	01	06	02		Beban Penyusutan Alat Komunikasi
8	2	01	06	02	0001	Beban Penyusutan Alat Komunikasi <i>Telephone</i>
8	2	01	06	02	0002	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB
8	2	01	06	02	0003	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio HF/FM
8	2	01	06	02	0004	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio VHF
8	2	01	06	02	0005	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio UHF
8	2	01	06	02	0006	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial
8	2	01	06	02	0007	Beban Penyusutan Alat-Alat Sandi
8	2	01	06	02	0008	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Khusus
8	2	01	06	02	0009	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Digital dan Konvensional
8	2	01	06	02	0010	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Satelit
8	2	01	06	02	0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Lainnya
8	2	01	06	03		Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
8	2	01	06	03	0001	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar MF/MW
8	2	01	06	03	0002	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar HF/SW
8	2	01	06	03	0003	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar VHF/FM
8	2	01	06	03	0004	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar UHF
8	2	01	06	03	0005	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar SHF
8	2	01	06	03	0006	Beban Penyusutan Peralatan Antena MF/MW
8	2	01	06	03	0007	Beban Penyusutan Peralatan Antena HF/SW
8	2	01	06	03	0008	Beban Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM
8	2	01	06	03	0009	Beban Penyusutan Peralatan Antena UHF
8	2	01	06	03	0010	Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola
8	2	01	06	03	0011	Beban Penyusutan Peralatan <i>Translator</i> VHF/VHF
8	2	01	06	03	0012	Beban Penyusutan Peralatan <i>Translator</i> UHF/UHF
8	2	01	06	03	0013	Beban Penyusutan Peralatan <i>Translator</i> VHF/UHF
8	2	01	06	03	0014	Beban Penyusutan Peralatan <i>Translator</i>
8	2	01	06	03	0015	Beban Penyusutan Peralatan <i>Microwave</i> FPU
8	2	01	06	03	0016	Beban Penyusutan Peralatan <i>Microwave Terrestrial</i>
8	2	01	06	03	0017	Beban Penyusutan Peralatan <i>Microwave</i> TVRO
8	2	01	06	03	0018	Beban Penyusutan Peralatan <i>Dummy Load</i>
8	2	01	06	03	0019	Beban Penyusutan <i>Switcher</i> Antena
8	2	01	06	03	0020	Beban Penyusutan <i>Switcher</i> /Menara Antena
8	2	01	06	03	0021	Beban Penyusutan <i>Feeder</i>
8	2	01	06	03	0022	Beban Penyusutan <i>Humidity Control</i>
8	2	01	06	03	0023	Beban Penyusutan Program <i>Input Equipment</i>
8	2	01	06	03	0024	Beban Penyusutan Peralatan Antena Penerima VHF
8	2	01	06	03	0025	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar LF
8	2	01	06	03	0026	Beban Penyusutan Unit Pemancar MF+HF
8	2	01	06	03	0027	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar MF+HF
8	2	01	06	03	0028	Beban Penyusutan Peralatan Penerima
8	2	01	06	03	0029	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima LF
8	2	01	06	03	0030	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima MF
8	2	01	06	03	0031	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima HF
8	2	01	06	03	0032	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima MF+HF
8	2	01	06	03	0033	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima VHF
8	2	01	06	03	0034	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima UHF
8	2	01	06	03	0035	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar dan Penerima SHF
8	2	01	06	03	0036	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima LF
8	2	01	06	03	0037	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF
8	2	01	06	03	0038	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima HF
8	2	01	06	03	0039	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF
8	2	01	06	03	0040	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF
8	2	01	06	03	0041	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima UHF
8	2	01	06	03	0042	Beban Penyusutan Peralatan Antena Pemancar dan Penerima SHF
8	2	01	06	03	0043	Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Rendah
8	2	01	06	03	0044	Beban Penyusutan Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi
8	2	01	06	03	0045	Beban Penyusutan Peralatan Penerima dan Pengirim Gambar ke Permukaan
8	2	01	06	03	0046	Beban Penyusutan Peralatan Perlengkapan Radio
8	2	01	06	03	0047	Beban Penyusutan Sumber Tenaga
8	2	01	06	03	0048	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar Lainnya
8	2	01	06	04		Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi
8	2	01	06	04	0001	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen <i>Landing System</i>
8	2	01	06	04	0002	Beban Penyusutan <i>Very High Frequency Omni Range</i> (VOR)
8	2	01	06	04	0003	Beban Penyusutan <i>Distance Measuring Equipment</i> (DME)
8	2	01	06	04	0004	Beban Penyusutan Radar
8	2	01	06	04	0005	Beban Penyusutan Alat Pengatur Telekomunikasi
8	2	01	06	04	0006	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi
8	2	01	06	04	0007	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya
8	2	01	07			Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan
8	2	01	07	01		Beban Penyusutan Alat Kedokteran
8	2	01	07	01	0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum
8	2	01	07	01	0002	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi
8	2	01	07	01	0003	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
8	2	01	07	01	0004	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah
8	2	01	07	01	0005	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
8	2	01	07	01	0006	Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT
8	2	01	07	01	0007	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata
8	2	01	07	01	0008	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam

Kode Akun						Uraian Akun
8	2	01	07	01	0009	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kamar Jenazah/ <i>Mortuary</i>
8	2	01	07	01	0010	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak
8	2	01	07	01	0011	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Poliklinik
8	2	01	07	01	0012	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
8	2	01	07	01	0013	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)
8	2	01	07	01	0014	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung
8	2	01	07	01	0015	Beban Penyusutan Alat Kedokteran <i>Radiodiagnostic</i>
8	2	01	07	01	0016	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Patologi <i>Anatomy</i>
8	2	01	07	01	0017	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Transfusi
8	2	01	07	01	0018	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radioterapi
8	2	01	07	01	0019	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir
8	2	01	07	01	0020	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
8	2	01	07	01	0021	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat
8	2	01	07	01	0022	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jiwa
8	2	01	07	01	0023	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
8	2	01	07	01	0024	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICU
8	2	01	07	01	0025	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICCU
8	2	01	07	01	0026	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Jantung
8	2	01	07	01	0027	Beban Penyusutan Alat Kedokteran <i>Traditional Medicine</i>
8	2	01	07	01	0028	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anestesi
8	2	01	07	01	0029	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya
8	2	01	07	02		Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum
8	2	01	07	02	0001	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Laut
8	2	01	07	02	0002	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Udara
8	2	01	07	02	0003	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kepolisian
8	2	01	07	02	0004	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Olahraga
8	2	01	07	02	0005	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya
8	2	01	08			Beban Penyusutan Alat Laboratorium
8	2	01	08	01		Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium
8	2	01	08	01	0001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan
8	2	01	08	01	0002	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan
8	2	01	08	01	0003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidrokimia
8	2	01	08	01	0004	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Model Hidrolika
8	2	01	08	01	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Batuan/ Geologi
8	2	01	08	01	0006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
8	2	01	08	01	0007	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia
8	2	01	08	01	0008	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan
8	2	01	08	01	0009	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cangkok Tanaman
8	2	01	08	01	0010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam,
8	2	01	08	01	0011	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum
8	2	01	08	01	0012	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi
8	2	01	08	01	0013	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia
8	2	01	08	01	0014	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi
8	2	01	08	01	0015	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi
8	2	01	08	01	0016	Beban Penyusutan Alat Laboratorium
8	2	01	08	01	0017	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film
8	2	01	08	01	0018	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan
8	2	01	08	01	0019	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi
8	2	01	08	01	0020	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika
8	2	01	08	01	0021	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidrodinamika
8	2	01	08	01	0022	Beban Penyusutan Alat Laboratorium
8	2	01	08	01	0023	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Peleburan
8	2	01	08	01	0024	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pasir
8	2	01	08	01	0025	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
8	2	01	08	01	0026	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pembuatan Pola
8	2	01	08	01	0027	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Metalografi
8	2	01	08	01	0028	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
8	2	01	08	01	0029	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
8	2	01	08	01	0030	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
8	2	01	08	01	0031	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Metrologi
8	2	01	08	01	0032	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pelapisan Logam
8	2	01	08	01	0033	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
8	2	01	08	01	0034	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil
8	2	01	08	01	0035	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Tekstil
8	2	01	08	01	0036	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
8	2	01	08	01	0037	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik
8	2	01	08	01	0038	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet, dan Plastik
8	2	01	08	01	0039	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Keramik
8	2	01	08	01	0040	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
8	2	01	08	01	0041	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian
8	2	01	08	01	0042	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
8	2	01	08	01	0043	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Energi Surya
8	2	01	08	01	0044	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
8	2	01	08	01	0045	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Oseanografi
8	2	01	08	01	0046	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
8	2	01	08	01	0047	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi Perairan
8	2	01	08	01	0048	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi
8	2	01	08	01	0049	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Geofisika
8	2	01	08	01	0050	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tambang
8	2	01	08	01	0051	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
8	2	01	08	01	0052	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Industri
8	2	01	08	01	0053	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
8	2	01	08	01	0054	Beban Penyusutan Laboratorium Kearsipan
8	2	01	08	01	0055	Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis
8	2	01	08	01	0056	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain
8	2	01	08	01	0057	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hermodinamika Motor dan Sistem Propulsi
8	2	01	08	01	0058	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pendidikan
8	2	01	08	01	0059	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzim
8	2	01	08	01	0060	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Teknik Pantai
8	2	01	08	01	0061	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sumber Daya dan Energi

Kode Akun						Uraian Akun
8	2	01	08	01	0062	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Populasi
8	2	01	08	01	0063	Beban Penyusutan Alat Pengukur Gelombang
8	2	01	08	01	0064	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Lainnya
8	2	01	08	02		Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir
8	2	01	08	02	0001	Beban Penyusutan <i>Analytical Instrument</i>
8	2	01	08	02	0002	Beban Penyusutan <i>Instrument Probe/Sensor</i>
8	2	01	08	02	0003	Beban Penyusutan <i>General Laboratory Tool</i>
8	2	01	08	02	0004	Beban Penyusutan <i>Glassware Plastic/Utensils</i>
8	2	01	08	02	0005	Beban Penyusutan <i>Laboratory Safety</i>
8	2	01	08	02	0006	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya
8	2	01	08	03		Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah
8	2	01	08	03	0001	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia
8	2	01	08	03	0002	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika
8	2	01	08	03	0003	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar
8	2	01	08	03	0004	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan
8	2	01	08	03	0005	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah
8	2	01	08	03	0006	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas
8	2	01	08	03	0007	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS
8	2	01	08	03	0008	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama
8	2	01	08	03	0009	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan
8	2	01	08	03	0010	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian
8	2	01	08	03	0011	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga
8	2	01	08	03	0012	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN
8	2	01	08	03	0013	Beban Penyusutan Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)
8	2	01	08	03	0014	Beban Penyusutan Alat Peraga Kejuruan
8	2	01	08	03	0015	Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK
8	2	01	08	03	0016	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya
8	2	01	08	04		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika
8	2	01	08	04	0001	Beban Penyusutan <i>Radiation Detector</i>
8	2	01	08	04	0002	Beban Penyusutan <i>Modular Counting And Scientific Electronic</i>
8	2	01	08	04	0003	Beban Penyusutan <i>Assembly/Counting System</i>
8	2	01	08	04	0004	Beban Penyusutan <i>Recorder Display</i>
8	2	01	08	04	0005	Beban Penyusutan <i>System/Power Supply</i>
8	2	01	08	04	0006	Beban Penyusutan <i>Measuring/Testing Device</i>
8	2	01	08	04	0007	Beban Penyusutan <i>Opto Electronics</i>
8	2	01	08	04	0008	Beban Penyusutan <i>Accelerator</i>
8	2	01	08	04	0009	Beban Penyusutan <i>Reactor Experimental System</i>
8	2	01	08	04	0010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya
8	2	01	08	05		Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan
8	2	01	08	05	0001	Beban Penyusutan Alat Ukur Fisika Kesehatan
8	2	01	08	05	0002	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kerja
8	2	01	08	05	0003	Beban Penyusutan Proteksi Lingkungan
8	2	01	08	05	0004	Beban Penyusutan <i>Meteorological Equipment</i>
8	2	01	08	05	0005	Beban Penyusutan Sumber Radiasi
8	2	01	08	05	0006	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya
8	2	01	08	06		Beban Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
8	2	01	08	06	0001	Beban Penyusutan <i>Radiation Application Equipment</i>
8	2	01	08	06	0002	Beban Penyusutan <i>Non Destructive Test (NDT) Device</i>
8	2	01	08	06	0003	Beban Penyusutan Peralatan Hidrologi
8	2	01	08	06	0004	Beban Penyusutan <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>
8	2	01	08	07		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
8	2	01	08	07	0001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah
8	2	01	08	07	0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara
8	2	01	08	07	0003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
8	2	01	08	07	0004	Beban Penyusutan Laboratorium Lingkungan
8	2	01	08	07	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang
8	2	01	08	07	0006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya
8	2	01	08	08		Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i>
8	2	01	08	08	0001	Beban Penyusutan <i>Towing Carriage</i>
8	2	01	08	08	0002	Beban Penyusutan <i>Wave Generator and Absorber</i>
8	2	01	08	08	0003	Beban Penyusutan <i>Data Acquisition and Analyzing System</i>
8	2	01	08	08	0004	Beban Penyusutan <i>Cavitation Tunnel</i>
8	2	01	08	08	0005	Beban Penyusutan <i>Overhead Cranes</i>
8	2	01	08	08	0006	Beban Penyusutan Peralatan Umum
8	2	01	08	08	0007	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Model Ship Workshop</i>
8	2	01	08	08	0008	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Propeller Model Workshop</i>
8	2	01	08	08	0009	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Mechanical Workshop</i>
8	2	01	08	08	0010	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Precision Mechanical Workshop</i>
8	2	01	08	08	0011	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Painting Shop</i>
8	2	01	08	08	0012	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Ship Model Preparation Shop</i>
8	2	01	08	08	0013	Beban Penyusutan Pemesinan: <i>Electrical Workshop</i>
8	2	01	08	08	0014	Beban Penyusutan MOB
8	2	01	08	08	0015	Beban Penyusutan <i>Photo and Film Equipment</i>
8	2	01	08	08	0016	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> Lainnya
8	2	01	08	09		Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi
8	2	01	08	09	0001	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik
8	2	01	08	09	0002	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator
8	2	01	08	09	0003	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Cahaya, Optik dan Akustik
8	2	01	08	09	0004	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik
8	2	01	08	09	0005	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu
8	2	01	08	09	0006	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain
8	2	01	08	09	0007	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Nautis
8	2	01	08	09	0008	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Pelayaran
8	2	01	08	09	0009	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
8	2	01	08	09	0010	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Perangkat
8	2	01	08	09	0011	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya
8	2	01	10			Beban Penyusutan Komputer
8	2	01	10	01		Beban Penyusutan Komputer Unit
8	2	01	10	01	0001	Beban Penyusutan Komputer Jaringan
8	2	01	10	01	0002	Beban Penyusutan <i>Personal Computer</i>

Kode Akun						Uraian Akun
8	2	01	10	01	0003	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya
8	2	01	10	02		Beban Penyusutan Peralatan Komputer
8	2	01	10	02	0001	Beban Penyusutan Peralatan <i>Mainframe</i>
8	2	01	10	02	0002	Beban Penyusutan Peralatan <i>Mini Computer</i>
8	2	01	10	02	0003	Beban Penyusutan Peralatan <i>Personal Computer</i>
8	2	01	10	02	0004	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan
8	2	01	10	02	0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya
8	2	01	11			Beban Penyusutan Alat Eksplorasi
8	2	01	11	01		Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi
8	2	01	11	01	0001	Beban Penyusutan Optik
8	2	01	11	01	0002	Beban Penyusutan Ukur/Instrumen
8	2	01	11	01	0003	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Topografi Lainnya
8	2	01	11	02		Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika
8	2	01	11	02	0001	Beban Penyusutan Mekanik
8	2	01	11	02	0002	Beban Penyusutan Elektronik/ <i>Electric</i>
8	2	01	11	02	0003	Beban Penyusutan Manual
8	2	01	11	02	0004	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya
8	2	01	12			Beban Penyusutan Alat Pengeboran
8	2	01	12	01		Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin
8	2	01	12	01	0001	Beban Penyusutan Bor Mesin Tumbuk
8	2	01	12	01	0002	Beban Penyusutan Bor Mesin Putar
8	2	01	12	01	0003	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Mesin Lainnya
8	2	01	12	02		Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin
8	2	01	12	02	0001	Beban Penyusutan Bangka
8	2	01	12	02	0002	Beban Penyusutan Pantek
8	2	01	12	02	0003	Beban Penyusutan Putar
8	2	01	12	02	0004	Beban Penyusutan Peralatan Bantu
8	2	01	12	02	0005	Beban Penyusutan Alat Pengeboran Non Mesin
8	2	01	13			Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
8	2	01	13	01		Beban Penyusutan Sumur
8	2	01	13	01	0001	Beban Penyusutan Peralatan Sumur Minyak
8	2	01	13	01	0002	Beban Penyusutan Sumur Pemboran
8	2	01	13	01	0003	Beban Penyusutan Sumur Lainnya
8	2	01	13	02		Beban Penyusutan Produksi
8	2	01	13	02	0001	Beban Penyusutan RIG
8	2	01	13	02	0002	Beban Penyusutan Produksi Lainnya
8	2	01	13	03		Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian
8	2	01	13	03	0001	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Minyak
8	2	01	13	03	0002	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Air
8	2	01	13	03	0003	Beban Penyusutan Alat Pengolahan <i>Steam</i>
8	2	01	13	03	0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan <i>Wax</i>
8	2	01	13	03	0005	Beban Penyusutan Pengolahan dan Pemurnian Lainnya
8	2	01	14			Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
8	2	01	14	01		Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi
8	2	01	14	01	0001	Beban Penyusutan Mekanik
8	2	01	14	01	0002	Beban Penyusutan Elektrik
8	2	01	14	01	0003	Beban Penyusutan Alat Bantu Ekplorasi Lainnya
8	2	01	14	02		Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi
8	2	01	14	02	0001	Beban Penyusutan Perawatan Sumur
8	2	01	14	02	0002	Beban Penyusutan Tes Unit
8	2	01	14	02	0003	Beban Penyusutan Alat Bantu Produksi Lainnya
8	2	01	15			Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja
8	2	01	15	01		Beban Penyusutan Alat Deteksi
8	2	01	15	01	0001	Beban Penyusutan Radiasi
8	2	01	15	01	0002	Beban Penyusutan Suara
8	2	01	15	01	0003	Beban Penyusutan Alat Deteksi Lainnya
8	2	01	15	02		Beban Penyusutan Alat Pelindung
8	2	01	15	02	0001	Beban Penyusutan Baju Pengaman
8	2	01	15	02	0002	Beban Penyusutan Masker
8	2	01	15	02	0003	Beban Penyusutan Topi Kerja
8	2	01	15	02	0004	Beban Penyusutan Sabuk Pengaman
8	2	01	15	02	0005	Beban Penyusutan Sepatu Lapangan
8	2	01	15	02	0006	Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya
8	2	01	15	03		Beban Penyusutan Alat SAR
8	2	01	15	03	0001	Beban Penyusutan Alat Penolong
8	2	01	15	03	0002	Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian
8	2	01	15	03	0003	Beban Penyusutan Alat Kerja Bawah Air
8	2	01	15	03	0004	Beban Penyusutan Alat SAR Lainnya
8	2	01	15	04		Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan
8	2	01	15	04	0001	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan
8	2	01	15	04	0002	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Navigasi dan Pengamatan Penerbangan
8	2	01	15	04	0003	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan
8	2	01	15	04	0004	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara
8	2	01	15	04	0005	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara
8	2	01	15	04	0006	Beban Penyusutan Alat Ukur Peralatan
8	2	01	15	04	0007	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan Lainnya
8	2	01	16			Beban Penyusutan Alat Peraga
8	2	01	16	01		Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan
8	2	01	16	01	0001	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan
8	2	01	16	01	0002	Beban Penyusutan Alat Peraga Percontohan
8	2	01	16	01	0003	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya
8	2	01	17			Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi
8	2	01	17	01		Beban Penyusutan Unit Peralatan
8	2	01	17	01	0001	Beban Penyusutan <i>Liquid-Liquid Contractor Equipment</i>
8	2	01	17	01	0002	Beban Penyusutan <i>Solid-Solid Mixing Equipment</i>
8	2	01	17	01	0003	Beban Penyusutan <i>Solid-Solid Screening Equipment</i>
8	2	01	17	01	0004	Beban Penyusutan <i>Solid-Solid Classifier</i>
8	2	01	17	01	0005	Beban Penyusutan <i>Solid-Liquid Mixing Equipment</i>
8	2	01	17	01	0006	Beban Penyusutan <i>Solid Liquid Crystallization Equipment</i>
8	2	01	17	01	0007	Beban Penyusutan <i>Ion Exchange Absortion Equipment</i>

Kode Akun						Uraian Akun
8	2	01	17	01	0008	Beban Penyusutan <i>Leaching Equipment</i>
8	2	01	17	01	0009	Beban Penyusutan <i>Gravity Sedimentation Equipment</i>
8	2	01	17	01	0010	Beban Penyusutan <i>Solid Liquid Filtering Equipment</i>
8	2	01	17	01	0011	Beban Penyusutan <i>Centrifuge For Solid Liquid</i>
8	2	01	17	01	0012	Beban Penyusutan <i>Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment</i>
8	2	01	17	01	0013	Beban Penyusutan <i>Gas-Solid Drying Equipment</i>
8	2	01	17	01	0014	Beban Penyusutan <i>Gas-Solid Fluidised Bed Equipment</i>
8	2	01	17	01	0015	Beban Penyusutan <i>Gas-Solid Separation Equipment</i>
8	2	01	17	01	0016	Beban Penyusutan <i>Gas-Liquid Distillation Equipment</i>
8	2	01	17	01	0017	Beban Penyusutan <i>Gas-Liquid Separation Equipment</i>
8	2	01	17	01	0018	Beban Penyusutan <i>Isotope Separation Equipment</i>
8	2	01	17	01	0019	Beban Penyusutan <i>Transport and Storage Equipment For Liquid</i>
8	2	01	17	01	00200	Beban Penyusutan <i>Solid Material Handling Equipment</i>
8	2	01	17	01	0021	Beban Penyusutan <i>Size Reduction Size Balargement Equipment</i>
8	2	01	17	01	0022	Beban Penyusutan <i>Heat Generating Equipment</i>
8	2	01	17	01	0023	Beban Penyusutan <i>Heat Transfer Equipment</i>
8	2	01	17	01	0024	Beban Penyusutan <i>Mechanical Process</i>
8	2	01	17	01	0025	Beban Penyusutan <i>Chemical Reaction Equipment</i>
8	2	01	17	01	0026	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya
8	2	01	18			Beban Penyusutan Rambu-Rambu
8	2	01	18	01		Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat
8	2	01	18	01	0001	Beban Penyusutan Rambu Bersuar
8	2	01	18	01	0002	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar
8	2	01	18	01	0003	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
8	2	01	18	02		Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
8	2	01	18	02	0001	Beban Penyusutan <i>Runway/Threshold Light</i>
8	2	01	18	02	0002	Beban Penyusutan <i>Visual Approach Slope Indicator (VASI)</i>
8	2	01	18	02	0003	Beban Penyusutan <i>Approach Light</i>
8	2	01	18	02	0004	Beban Penyusutan <i>Runway Identification Light (REILS)</i>
8	2	01	18	02	0005	Beban Penyusutan <i>Signal</i>
8	2	01	18	02	0006	Beban Penyusutan <i>Flood Lights</i>
8	2	01	18	02	0007	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya
8	2	01	18	03		Beban Penyusutan Rambu-rambu Lalu Lintas Laut
8	2	01	18	03	0001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut
8	2	01	18	03	0001	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya
8	2	01	19			Beban Penyusutan Peralatan Olahraga
8	2	01	19	01		Beban Penyusutan Peralatan Olahraga
8	2	01	19	01	0001	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Atletik
8	2	01	19	01	0002	Beban Penyusutan Peralatan Permainan
8	2	01	19	01	0003	Beban Penyusutan Peralatan Senam
8	2	01	19	01	0004	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Air
8	2	01	19	01	0005	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Udara
8	2	01	19	01	0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya
8	2	02				Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
8	2	02	01			Beban Penyusutan Bangunan Gedung
8	2	02	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja
8	2	02	01	01	0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor
8	2	02	01	01	0002	Beban Penyusutan Bangunan Gudang
8	2	02	01	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar
8	2	02	01	01	0004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi
8	2	02	01	01	0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium
8	2	02	01	01	0006	Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan
8	2	02	01	01	0007	Beban Penyusutan Bangunan Oseanarium/Observatorium
8	2	02	01	01	0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
8	2	02	01	01	0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
8	2	02	01	01	0010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
8	2	02	01	01	0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga
8	2	02	01	01	0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
8	2	02	01	01	0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga
8	2	02	01	01	0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool
8	2	02	01	01	0015	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pemotong Hewan
8	2	02	01	01	0016	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan
8	2	02	01	01	0017	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Museum
8	2	02	01	01	0018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara
8	2	02	01	01	0019	Beban Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan
8	2	02	01	01	00200	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Lembaga Pemasarakatan
8	2	02	01	01	0021	Beban Penyusutan Bangunan Rumah Tahanan
8	2	02	01	01	0022	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Krematorium
8	2	02	01	01	0023	Beban Penyusutan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
8	2	02	01	01	0024	Beban Penyusutan Bangunan Tempat Persidangan
8	2	02	01	01	0025	Beban Penyusutan Bangunan Terbuka
8	2	02	01	01	0026	Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sekam
8	2	02	01	01	0027	Beban Penyusutan Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
8	2	02	01	01	0028	Beban Penyusutan Bangunan Industri
8	2	02	01	01	0029	Beban Penyusutan Bangunan Peternakan/ Perikanan
8	2	02	01	01	00300	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	2	02	01	01	0031	Beban Penyusutan Bangunan Peralatan Geofisika
8	2	02	01	01	0032	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum
8	2	02	01	01	0033	Beban Penyusutan Bangunan Parkir
8	2	02	01	01	0034	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pabrik
8	2	02	01	01	0035	Beban Penyusutan Bangunan Stasiun Bus
8	2	02	01	01	0036	Beban Penyusutan Taman
8	2	02	01	01	0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
8	2	02	01	02		Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal
8	2	02	01	02	0001	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I
8	2	02	01	02	0002	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II
8	2	02	01	02	0003	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III
8	2	02	01	02	0004	Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan
8	2	02	01	02	0005	Beban Penyusutan Asrama
8	2	02	01	02	0006	Beban Penyusutan Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
8	2	02	01	02	0007	Beban Penyusutan Motel
8	2	02	01	02	0008	Beban Penyusutan Flat/Rumah Susun
8	2	02	01	02	0009	Beban Penyusutan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan
8	2	02	01	02	0010	Beban Penyusutan Panti Asuhan
8	2	02	01	02	0011	Beban Penyusutan Apartemen
8	2	02	01	02	0012	Beban Penyusutan Rumah Tidak Bersusun
8	2	02	01	02	0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat
8	2	02	02			Beban Penyusutan Monumen
8	2	02	02	01		Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti
8	2	02	02	01	0001	Beban Penyusutan Candi
8	2	02	02	01	0002	Beban Penyusutan Tugu
8	2	02	02	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Peninggalan
8	2	02	02	01	0004	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya
8	2	02	03			Beban Penyusutan Bangunan Menara
8	2	02	03	01		Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan
8	2	02	03	01	0001	Beban Penyusutan Bangunan Menara
8	2	02	03	01	0002	Beban Penyusutan Bangunan Perambuan Penerangan Pantai
8	2	02	03	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Menara Telekomunikasi
8	2	02	03	01	0004	Beban Penyusutan Bangunan Menara Pengawas
8	2	02	03	01	0005	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Lainnya
8	2	02	04			Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
8	2	02	04	01		Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas
8	2	02	04	01	0001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi
8	2	02	04	01	0002	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi
8	2	02	04	01	0003	Beban Penyusutan Pilar/Tugu/Tanda Lainnya
8	2	02	04	01	0004	Beban Penyusutan Pagar
8	2	02	04	01	0005	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Lainnya
8	2	03				Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
8	2	03	01			Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan
8	2	03	01	01		Beban Penyusutan Jalan
8	2	03	01	01	0001	Beban Penyusutan Jalan Nasional
8	2	03	01	01	0002	Beban Penyusutan Jalan Provinsi
8	2	03	01	01	0003	Beban Penyusutan Jalan Kabupaten
8	2	03	01	01	0004	Beban Penyusutan Jalan Kota
8	2	03	01	01	0005	Beban Penyusutan Jalan Desa
8	2	03	01	01	0006	Beban Penyusutan Jalan Tol
8	2	03	01	01	0007	Beban Penyusutan Jalan Kereta Api
8	2	03	01	01	0008	Beban Penyusutan Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	2	03	01	01	0009	Beban Penyusutan Jalan Khusus
8	2	03	01	01	0010	Beban Penyusutan Jalan Lainnya
8	2	03	01	02		Beban Penyusutan Jembatan
8	2	03	01	02	0001	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Nasional
8	2	03	01	02	0002	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Provinsi
8	2	03	01	02	0003	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kabupaten
8	2	03	01	02	0004	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kota
8	2	03	01	02	0005	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Desa
8	2	03	01	02	0006	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Tol
8	2	03	01	02	0007	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Kereta Api
8	2	03	01	02	0008	Beban Penyusutan Jembatan pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
8	2	03	01	02	0009	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Khusus
8	2	03	01	02	0010	Beban Penyusutan Jembatan Penyeberangan
8	2	03	01	02	0011	Beban Penyusutan Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal
8	2	03	01	02	0012	Beban Penyusutan Jembatan Pengukur
8	2	03	01	02	0013	Beban Penyusutan Jembatan Lainnya
8	2	03	02			Beban Penyusutan Bangunan Air
8	2	03	02	01		Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
8	2	03	02	01	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Irigasi
8	2	03	02	01	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi
8	2	03	02	01	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi
8	2	03	02	01	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi
8	2	03	02	01	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi
8	2	03	02	01	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi
8	2	03	02	01	0007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi
8	2	03	02	01	0008	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Lainnya
8	2	03	02	02		Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut
8	2	03	02	02	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut
8	2	03	02	02	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
8	2	03	02	02	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pasang Surut
8	2	03	02	02	0004	Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang Surut
8	2	03	02	02	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut
8	2	03	02	02	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
8	2	03	02	02	0007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pasang Surut
8	2	03	02	02	0008	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya
8	2	03	02	03		Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder
8	2	03	02	03	0001	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0007	Beban Penyusutan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
8	2	03	02	03	0008	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Lainnya
8	2	03	02	04		Beban Penyusutan Bangunan Pengaman
8	2	03	02	04	0001	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam
8	2	03	02	04	0002	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai
8	2	03	02	04	0003	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai
8	2	03	02	04	0004	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
8	2	03	02	04	0005	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai
8	2	03	02	04	0006	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap
8	2	03	02	04	0007	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya

Kode Akun					Uraian Akun
8	2	03	02	05	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
8	2	03	02	05	0001 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0002 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0003 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0004 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0005 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0006 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
8	2	03	02	05	0007 Beban Penyusutan Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah
8	2	03	02	05	0008 Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Lainnya
8	2	03	02	06	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0001 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0002 Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0003 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0004 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0005 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
8	2	03	02	06	0006 Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	2	03	02	07	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
8	2	03	02	07	0001 Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor
8	2	03	02	07	0002 Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Kotor
8	2	03	02	07	0003 Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Air Kotor
8	2	03	02	07	0004 Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Air Kotor
8	2	03	02	07	0005 Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor
8	2	03	02	07	0006 Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor Lainnya
8	2	03	03		Beban Penyusutan Instalasi
8	2	03	03	01	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku
8	2	03	03	01	0001 Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan
8	2	03	03	01	0002 Beban Penyusutan Instalasi Air Sumber/Mata Air
8	2	03	03	01	0003 Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam
8	2	03	03	01	0004 Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal
8	2	03	03	01	0005 Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya
8	2	03	03	02	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
8	2	03	03	02	0001 Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik
8	2	03	03	02	0002 Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Industri
8	2	03	03	02	0003 Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Pertanian
8	2	03	03	02	0004 Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor Lainnya
8	2	03	03	03	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
8	2	03	03	03	0001 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
8	2	03	03	03	0002 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
8	2	03	03	03	0003 Beban Penyusutan Bangunan Penampung Sampah
8	2	03	03	03	0004 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya
8	2	03	03	04	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
8	2	03	03	04	0001 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan
8	2	03	03	04	0002 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis
8	2	03	03	04	0003 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan
8	2	03	03	04	0004 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya
8	2	03	03	05	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
8	2	03	03	05	0001 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
8	2	03	03	05	0002 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
8	2	03	03	05	0003 Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)
8	2	03	03	05	0004 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
8	2	03	03	05	0005 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
8	2	03	03	05	0006 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
8	2	03	03	05	0007 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
8	2	03	03	05	0008 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
8	2	03	03	05	0009 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
8	2	03	03	05	0010 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
8	2	03	03	05	0011 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera
8	2	03	03	05	0012 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya
8	2	03	03	06	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
8	2	03	03	06	0001 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk
8	2	03	03	06	0002 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
8	2	03	03	06	0003 Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
8	2	03	03	06	0004 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Lainnya
8	2	03	03	07	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan
8	2	03	03	07	0001 Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan di Darat
8	2	03	03	07	0002 Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan Lainnya
8	2	03	03	08	Beban Penyusutan Instalasi Gas
8	2	03	03	08	0001 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Gas
8	2	03	03	08	0002 Beban Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas
8	2	03	03	08	0003 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Gas
8	2	03	03	08	0004 Beban Penyusutan Instalasi Gas Lainnya
8	2	03	03	09	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
8	2	03	03	09	0001 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
8	2	03	03	09	0002 Beban Penyusutan Instalasi Reaktor Nuklir
8	2	03	03	09	0003 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif
8	2	03	03	09	0004 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Lainnya
8	2	03	03	10	Beban Penyusutan Instalasi Lain
8	2	03	03	10	0001 Beban Penyusutan Instalasi Lain
8	2	03	04		Beban Penyusutan Jaringan
8	2	03	04	01	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
8	2	03	04	01	0001 Beban Penyusutan Jaringan Pembawa
8	2	03	04	01	0002 Beban Penyusutan Jaringan Induk Distribusi
8	2	03	04	01	0003 Beban Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi
8	2	03	04	01	0004 Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke Rumah
8	2	03	04	01	0005 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Lainnya
8	2	03	04	02	Beban Penyusutan Jaringan Listrik
8	2	03	04	02	0001 Beban Penyusutan Jaringan Transmisi
8	2	03	04	02	0002 Beban Penyusutan Jaringan Distribusi
8	2	03	04	02	0003 Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya
8	2	03	04	03	Beban Penyusutan Jaringan Telepon

Kode Akun						Uraian Akun
8	2	03	04	03	0001	Beban Penyusutan Jaringan Telepon diatas Tanah
8	2	03	04	03	0002	Beban Penyusutan Jaringan Telepon dibawah Tanah
8	2	03	04	03	0003	Beban Penyusutan Jaringan Telepon di dalam Air
8	2	03	04	03	0004	Beban Penyusutan Jaringan dengan Media Udara
8	2	03	04	03	0005	Beban Penyusutan Jaringan Telepon Lainnya
8	2	03	04	04		Beban Penyusutan Jaringan Gas
8	2	03	04	04	0001	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Gas Transmisi
8	2	03	04	04	0002	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Distribusi
8	2	03	04	04	0003	Beban Penyusutan Jaringan Pipa Dinas
8	2	03	04	04	0004	Beban Penyusutan Jaringan BBM
8	2	03	04	04	0005	Beban Penyusutan Jaringan Gas Lainnya
8	2	04				Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
8	2	04	01			Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
8	2	04	01	01		Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian
8	2	04	01	01	0001	Beban Penyusutan Alat Musik
8	2	04	02			Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	2	04	02	01		Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	2	04	02	01	0001	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi
8	2	05				Beban Penyusutan Aset Lainnya
8	2	05	01			Beban Penyusutan Aset Lainnya
8	2	05	01	01		Beban Penyusutan Kemitraan denga Pihak Ketiga
8	2	05	01	01	0001	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa
8	2	05	01	01	0002	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
8	2	05	01	01	0003	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
8	2	05	01	01	0004	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan dengan Infrastruktur
8	2	06				Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01			Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01	01		Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
8	2	06	01	01	0001	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise
8	2	06	01	01	0002	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak
8	2	06	01	01	0003	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten
8	2	06	01	01	0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software
8	2	06	01	01	0005	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian
8	3					BEBAN TRANSFER
8	3	01				Beban Bagi Hasil
8	3	01	01			Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
8	3	01	01	01		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
8	3	01	01	01	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten
8	3	01	01	02		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota
8	3	01	01	02	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada
8	3	01	01	03		Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
8	3	01	01	03	0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
8	3	01	02			Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	3	01	02	01		Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	3	01	02	01	0001	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
8	3	02				Beban Bantuan Keuangan
8	3	02	01			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	01		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
8	3	02	01	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi
8	3	02	02			Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	01		Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	02	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota
8	3	02	03			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	03	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
8	3	02	04			Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	04	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi
8	3	02	05			Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	01		Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	01	0001	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	02		Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	05	02	0001	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
8	3	02	06			Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	3	02	06	01		Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	3	02	06	01	0001	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota
8	4					BEBAN TAK TERDUGA
8	4	01				Beban Tak Terduga
8	4	01	01			Beban Tak Terduga
8	4	01	01	01		Beban Tak Terduga
8	4	01	01	01	0001	Beban Tak Terduga
8	5					DEFISIT NON OPERASIONAL-LO
8	5	01				Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
8	5	01	01			Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO
8	5	01	01	01		Defisit Penjualan Tanah-LO
8	5	01	01	01	0001	Defisit Penjualan Tanah-LO
8	5	01	01	02		Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO
8	5	01	01	02	0001	Defisit Penjualan Alat Besar-LO
8	5	01	01	02	0002	Defisit Penjualan Alat Angkutan-LO
8	5	01	01	02	0003	Defisit Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur- LO
8	5	01	01	02	0004	Defisit Penjualan Alat Pertanian-LO
8	5	01	01	02	0005	Defisit Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO



Kode Akun						Uraian Akun
8	5	01	01	02	0006	Defisit Penjualan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
8	5	01	01	02	0007	Defisit Penjualan Alat Kedokteran dan Kesehatan-LO
8	5	01	01	02	0008	Defisit Penjualan Alat Laboratorium-LO
8	5	01	01	02	0010	Defisit Penjualan Komputer-LO
8	5	01	01	02	0011	Defisit Penjualan Alat Eksplorasi-LO
8	5	01	01	02	0012	Defisit Penjualan Alat Pengeboran-LO
8	5	01	01	02	0013	Defisit Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
8	5	01	01	02	0014	Defisit Penjualan Alat Bantu Eksplorasi-LO
8	5	01	01	02	0015	Defisit Penjualan Alat Keselamatan Kerja-LO
8	5	01	01	02	0016	Defisit Penjualan Alat Peraga-LO
8	5	01	01	02	0017	Defisit Penjualan Peralatan Proses/Produksi- LO
8	5	01	01	02	0018	Defisit Penjualan Rambu-Rambu-LO
8	5	01	01	02	0019	Defisit Penjualan Peralatan Olahraga-LO
8	5	01	01	03		Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO
8	5	01	01	03	0001	Defisit Penjualan Bangunan Gedung-LO
8	5	01	01	03	0002	Defisit Penjualan Monumen-LO
8	5	01	01	03	0003	Defisit Penjualan Bangunan Menara-LO
8	5	01	01	03	0004	Defisit Penjualan Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
8	5	01	01	04		Defisit Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi- LO
8	5	01	01	04	0001	Defisit Penjualan Jalan dan Jembatan-LO
8	5	01	01	04	0002	Defisit Penjualan Bangunan Air-LO
8	5	01	01	04	0003	Defisit Penjualan Instalasi-LO
8	5	01	01	04	0004	Defisit Penjualan Jaringan-LO
8	5	01	01	05		Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO
8	5	01	01	05	0001	Defisit Penjualan Bahan Perpustakaan-LO
8	5	01	01	05	0002	Defisit Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
8	5	01	01	05	0003	Defisit Penjualan Hewan-LO
8	5	01	01	05	0004	Defisit Penjualan Biota Perairan-LO
8	5	01	01	05	0005	Defisit Penjualan Tanaman-LO
8	5	01	01	05	0006	Defisit Penjualan Barang Koleksi Non Budaya- LO
8	5	01	01	05	0007	Defisit Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi- LO
8	5	01	01	06		Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO
8	5	01	01	06	0001	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
8	5	01	01	06	0002	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO
8	5	01	02			Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO
8	5	01	02	01		Defisit Tukar Menukar Tanah-LO
8	5	01	02	01	0001	Defisit Tukar Menukar Tanah -LO
8	5	01	02	02		Defisit Tukar Menukar Peralatan dan Mesin-LO
8	5	01	02	02	0001	Defisit Tukar Menukar Alat Besar-LO
8	5	01	02	02	0002	Defisit Tukar Menukar Alat Angkutan-LO
8	5	01	02	02	0003	Defisit Tukar Menukar Alat Bengkel dan Alat Ukur-LO
8	5	01	02	02	0004	Defisit Tukar Menukar Alat Pertanian-LO
8	5	01	02	02	0005	Defisit Tukar Menukar Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO
8	5	01	02	02	0006	Defisit Tukar Menukar Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-LO
8	5	01	02	02	0007	Defisit Tukar Menukar Alat Kedokteran dan
8	5	01	02	02	0008	Defisit Tukar Menukar Alat Laboratorium-LO
8	5	01	02	02	0010	Defisit Tukar Menukar Komputer-LO
8	5	01	02	02	0011	Defisit Tukar Menukar Alat Eksplorasi-LO
8	5	01	02	02	0012	Defisit Tukar Menukar Alat Pengeboran-LO
8	5	01	02	02	0013	Defisit Tukar Menukar Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-LO
8	5	01	02	02	0014	Defisit Tukar Menukar Alat Bantu Eksplorasi- LO
8	5	01	02	02	0015	Defisit Tukar Menukar Alat Keselamatan Kerja- LO
8	5	01	02	02	0016	Defisit Tukar Menukar Alat Peraga-LO
8	5	01	02	02	0017	Defisit Tukar Menukar Peralatan Proses/Produksi-LO
8	5	01	02	02	0018	Defisit Tukar Menukar Rambu-Rambu-LO
8	5	01	02	02	0019	Defisit Tukar Menukar Peralatan Olahraga-LO
8	5	01	02	03		Defisit Tukar Menukar Gedung dan Bangunan- LO
8	5	01	02	03	0001	Defisit Tukar Menukar Bangunan Gedung-LO
8	5	01	02	03	0002	Defisit Tukar Menukar Monumen-LO
8	5	01	02	03	0003	Defisit Tukar Menukar Bangunan Menara-LO
8	5	01	02	03	0004	Defisit Tukar Menukar Tugu Titik Kontrol/Pasti-LO
8	5	01	02	04		Defisit Tukar Menukar Jalan, Jaringan dan Irigasi-LO
8	5	01	02	04	0001	Defisit Tukar Menukar Jalan dan Jembatan-LO
8	5	01	02	04	0002	Defisit Tukar Menukar Bangunan Air-LO
8	5	01	02	04	0003	Defisit Tukar Menukar Instalasi-LO
8	5	01	02	04	0004	Defisit Tukar Menukar Jaringan-LO
8	5	01	02	05		Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Lainnya-LO
8	5	01	02	05	0001	Defisit Tukar Menukar Bahan Perpustakaan- LO
8	5	01	02	05	0002	Defisit Tukar Menukar Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO
8	5	01	02	05	0003	Defisit Tukar Menukar Hewan-LO
8	5	01	02	05	0004	Defisit Tukar Menukar Biota Perairan-LO
8	5	01	02	05	0005	Defisit Tukar Menukar Tanaman-LO
8	5	01	02	05	0006	Defisit Tukar Menukar Barang Koleksi Non Budaya-LO
8	5	01	02	05	0007	Defisit Tukar Menukar Aset Tetap Dalam Renovasi-LO
8	5	01	02	06		Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-LO
8	5	01	02	06	0001	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud-LO
8	5	01	02	06	0002	Defisit Tukar Menukar Aset Lainnya-Aset Lain- Lain-LO
8	5	01	03			Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO
8	5	01	03	01		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO
8	5	01	03	01	0001	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara-LO
8	5	01	03	01	0002	Defisit Pelepasan Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah-LO
8	5	01	03	01	0003	Defisit Pelepasan Investasi dalam Obligasi-LO
8	5	01	03	01	0004	Defisit Pelepasan Investasi dalam Proyek Pembangunan-LO
8	5	01	03	01	0005	Defisit Pelepasan Dana Bergulir-LO
8	5	01	03	02		Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen-LO
8	5	01	03	02	0001	Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO
8	5	02				Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8	5	02	01			Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO
8	5	02	01	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah-LO

Kode Akun						Uraian Akun
8	5	02	01	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri- Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Menengah-LO
8	5	02	01	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang-LO
8	5	02	01	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
8	5	02	02	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMN- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB-BUMD- Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	02	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO
8	5	02	02	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada LKB- Swasta-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03			Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
8	5	02	03	01		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	01	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	02		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	02	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	03		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	03	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	04		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	04	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	05		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	05	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah-LO
8	5	02	03	06		Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang-LO
8	5	02	03	06	0001	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta- Jangka Panjang-LO
8	5	02	04			Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8	5	02	04	01		Defisit Penyelesaian Obligasi-LO
8	5	02	04	01	0001	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU